# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
## TAHUN ANGGARAN 2024

***AUDITED***

# BAB I

## PENDAHULUAN

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka kepala daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
   CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

a. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
b. kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan Peraturan Perundang-undangan;
c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
e. posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
f. perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
m. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
n. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
p. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;
q. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi;

r. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
s. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
t. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
u. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
v. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2024;
w. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, indikator kinerja utama, kebijakan keuangan, perubahan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun 2024.

BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Dan Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB VI : Berisi penjelasan atas catatan penting lainnya.

BAB VII : Berisi penutup yang memuat kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

# BAB II

## EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

# BAB II
# EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

## 2.1 Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro digambarkan dalam bentuk capaian kinerja makro yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

| No. | Indikator Kinerja Makro | Capaian Tahun 2023 | Capaian Tahun 2024 | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Indeks Pembangunan Manusia | 83,55 | 84,15 | 0,60% |
| 2. | Angka Kemiskinan | 4,44% | 4,14% | (0,30%) |
| 3. | Angka Pengangguran | 6,53% | 6,21% | (0,32%) |
| 4. | Pertumbuhan Ekonomi | 4,96% | 4,90% | (0,06%) |
| 5. | Pendapatan Per Kapita | Rp322,62 Juta | Rp344,35 Juta | Rp21,73 Juta |
| 6. | Ketimpangan Pendapatan | 0,43 | 0,43 | - |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025*

Penjelasan atas capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yakni dengan menjelaskan bagaimana penduduk mencapai umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu:

1) umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yakni rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi sesuai kondisinya pada saat lahir;
2) pengetahuan yang diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan rata-rata lamanya pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan harapan atas rata- rata lamanya pendidikan formal yang dapat dikenyam oleh penduduk sejak usia tujuh tahun ke atas; dan
3) standar hidup layak yang diperoleh dari besar pengeluaran per kapita yang disesuaikan - *Purchasing Power Parity* (PPP).

Data IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta berjudul Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta 2024 yang dirilis pada 2 Desember 2024. IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 tercatat sebesar 84,15

atau meningkat 0,20% dibandingkan Tahun 2023 dengan status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM ≥ 80) dan menjadi Provinsi dengan kualitas hidup penduduk tertinggi di Indonesia. Capaian pertumbuhan IPM Provinsi DKI Jakarta di tahun ini juga menjadi yang tertinggi sepanjang periode 2020-2024.

Grafik 2.1

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Periode 2020-2024

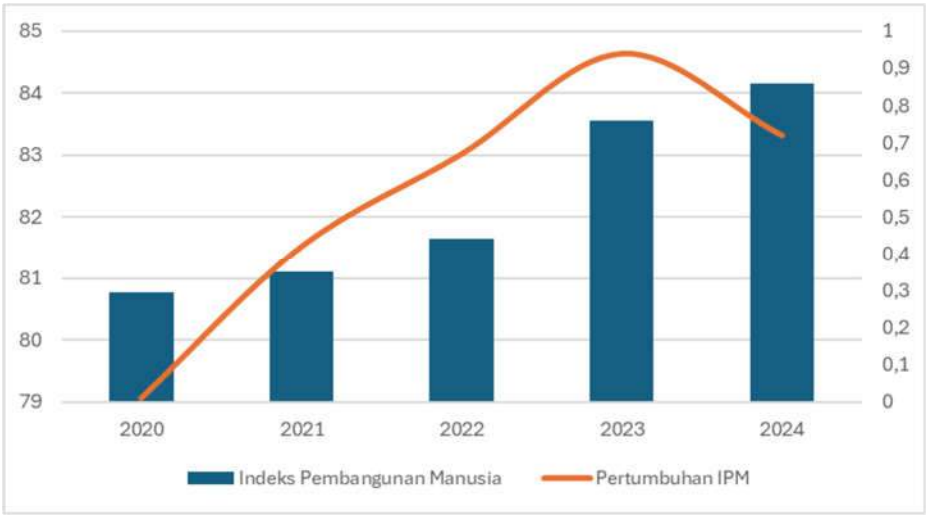


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025*

Selama kurun waktu 2020-2024, IPM Provinsi DKI Jakarta tumbuh sebesar 3,38%, dari sebesar 80,77 pada 2020 kemudian meningkat 3,38 poin menjadi 84,15 pada 2024.

**b. Angka Kemiskinan**

Angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 digambarkan menggunakan indikator persentase penduduk miskin dan bersumber dari Berita Resmi Statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Maret dan September. BPS mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan. Indikator persentase penduduk miskin dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah total penduduk.

Persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta per September 2024 sebesar 4,14 persen, atau turun 0,30 persen poin dibandingkan dengan angka Maret 2023 sebesar 4,44 persen. Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada September 2024 berada pada level 9,03 persen. Secara gradual tingkat kemiskinan mulai turun dari puncaknya pada Maret 2021 sebesar 4,72 persen. Tren penurunan angka kemiskinan dalam tiga tahun terakhir menjadi momentum keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan. Namun demikian ke depannya masih terdapat tantangan mengingat angka kemiskinan Maret 2024

masih lebih tinggi bila dibandingkan angka kemiskinan sebelum Covid-19 yaitu Maret 2019 yang sebesar 3,47 persen. Perkembangan angka kemiskinan selama periode 2020-2024 secara lengkap disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2.2

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Periode 2020-2024

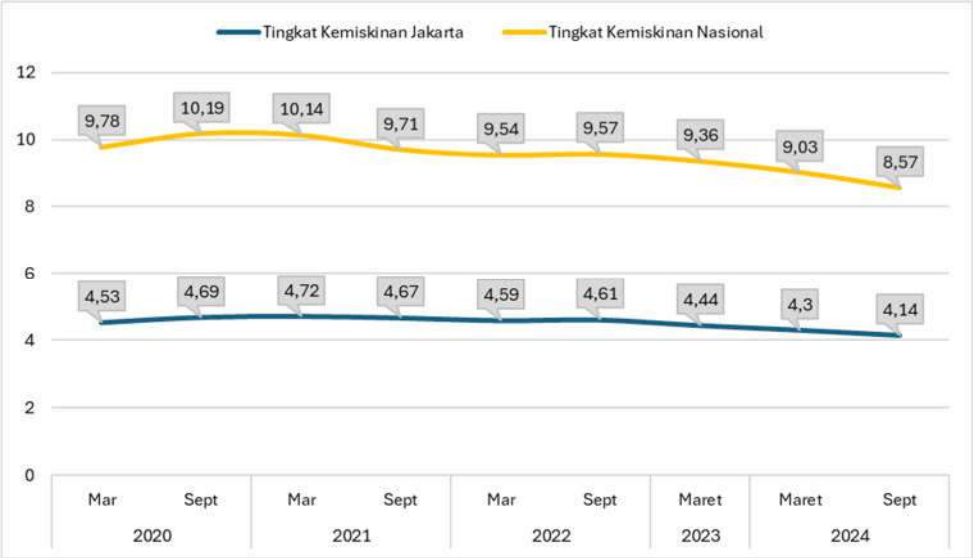


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025*

Sementara itu Badan Pusat Statistik mencatat garis kemiskinan di DKI Jakarta pada September 2024 sebesar Rp 846.085/Kapita/Bulan, naik sebesar 24,35 persen dibandingkan dengan Maret 2020 yang sebesar Rp 680.401/Kapita/Bulan. Secara umum kondisi ini menunjukkan meningkatnya pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan agar tidak dikategorikan sebagai penduduk kategori miskin.

Grafik 2.3

Perkembangan Garis Kemiskinan di DKI Jakarta Periode 2020-2024

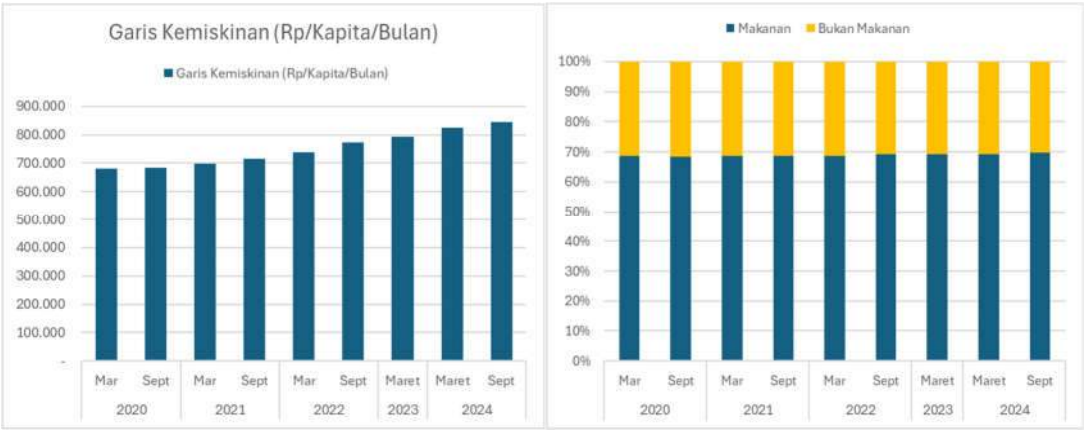


*Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, diolah 2025*

Kenaikan Garis Kemiskinan pada periode 2020-2024 didorong oleh kenaikan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) (26,72 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) (19,20 persen).

Dari sisi komoditas, Garis Kemiskinan pada September 2024 masih didominasi oleh pengeluaran dasar untuk makanan (69,82 persen). Secara lebih lengkap perkembangan Garis Kemiskinan dan komponen pembentuknya pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik 2.3.

**c. Angka Pengangguran**

Pengukuran angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan laman resmi BPS Provinsi DKI Jakarta, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dan pengangguran didefinisikan sebagai berikut:

1) angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran;
2) pengangguran adalah:
   a) penduduk yang aktif mencari pekerjaan;
   b) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;
   c) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; dan
   d) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Grafik 2.4

Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta Periode 2020-2024

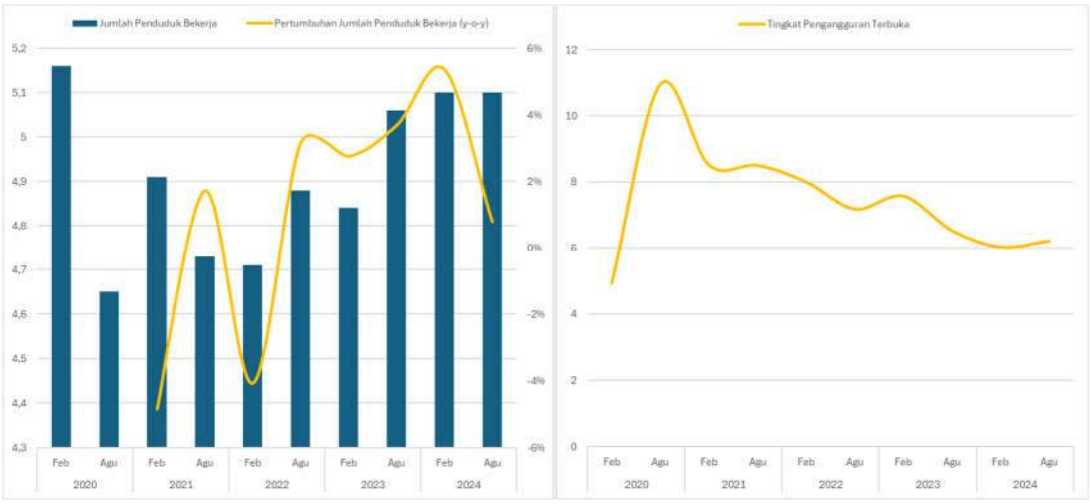


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025*

Selama kurun waktu 2020-2024 jumlah penduduk bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang berfluktuasi. Jumlah penduduk bekerja mulai mengalami peningkatan pada Agustus 2022 (4,88 juta orang), meningkat sebesar 3,17 persen

dibandingkan dengan Agustus 2021. Tren peningkatan jumlah penduduk bekerja terus berlanjut hingga pada Agustus 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,15 persen (yoy) menjadi 5,1 juta orang. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja, Tingkat Pengangguran Terbuka juga berangsur turun dari puncaknya sebesar 10,95 persen pada Agustus 2020 menjadi sebesar 6,21 persen (yoy) pada Agustus 2024.

Grafik 2.5
Perkembangan Pekerja Sektor Formal dan Informal
di Provinsi DKI Jakarta Periode 2020-2024

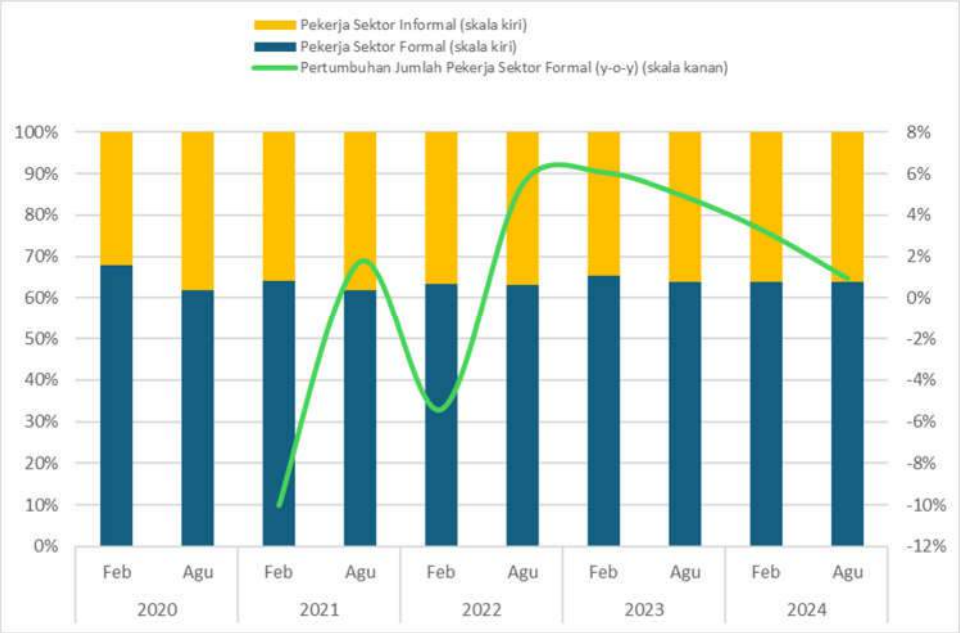


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025*

Sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta pada Agustus 2024, yakni sebanyak 63,69 persen dari total pekerja dan sisanya sebanyak 36,31 persen bekerja pada sektor informal. Jumlah pekerja sektor formal pada Agustus 2024 tumbuh sebesar 3,26 persen (yoy), melambat dibandingkan periode Agustus 2023 sebesar 3,23 persen (yoy). Sementara itu, jumlah pekerja sektor informal tumbuh sebesar 1,84 persen (yoy), meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi 1,83 persen (yoy).

**d. Pertumbuhan Ekonomi**

Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Jakarta masih tumbuh positif. Ekonomi Jakarta Tahun 2024 tumbuh sebesar 4,90 persen, lebih lambat dibandingkan pertumbuhan Tahun 2023 yang mencapai 4,96 persen. Pada Tahun 2024 PDRB DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mencapai 3.679,36 triliun rupiah dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 2.151,04 triliun rupiah, meningkat dari Tahun 2023 yang tercatat sebesar 3.443,03 triliun rupiah Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan 2.050,47 triliun rupiah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Grafik 2.6

Perkembangan PDRB DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2024

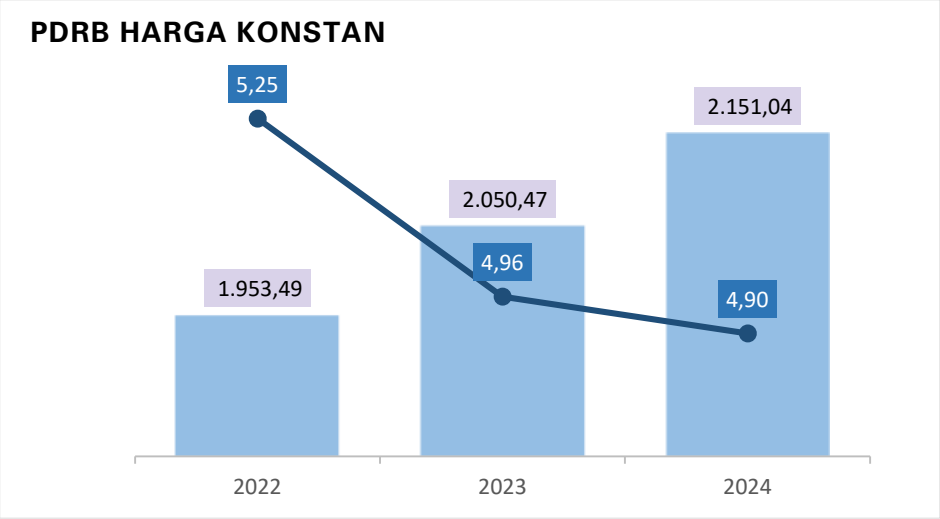


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025*

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,31 persen. Tingginya kinerja Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Jakarta terutama disebabkan peningkatan Jumlah Wisatawan Nusantara menuju Jakarta sehingga penerimaan pajak hotel dan restoran tumbuh. Pertumbuhan tertinggi berikutnya dicapai oleh Konstruksi yang tumbuh sebesar 6,99 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,96 persen. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mendominasi struktur perekonomian Jakarta sebesar 18,01 persen. Adapun perkembangan PDRB Jakarta berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 2.7

Perkembangan PDRB Lapangan Usaha DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2024

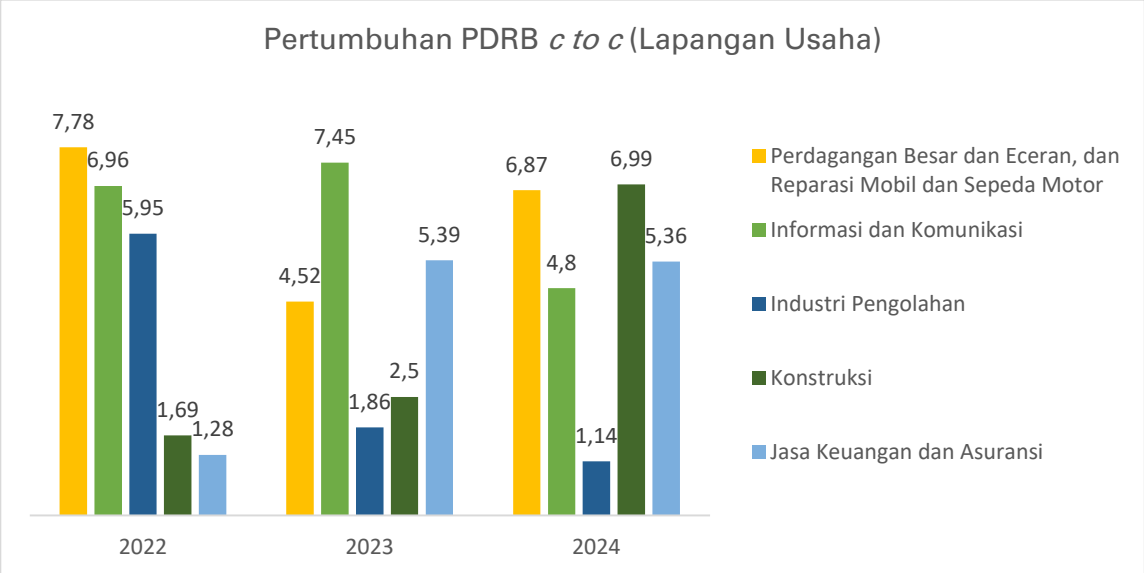


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025*

Lebih lanjut berdasarkan Pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 11,82 persen; diikuti Komponen Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa sebesar 9,64 persen; dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 8,72 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB mengalami pertumbuhan sebesar 10,09 persen. Pertumbuhan PKLNPRT didorong oleh Peningkatan aktivitas partai politik pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dan Pertumbuhan konsumsi listrik kategori sosial.

Grafik 2.8

Perkembangan PDRB Pengeluaran DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2024

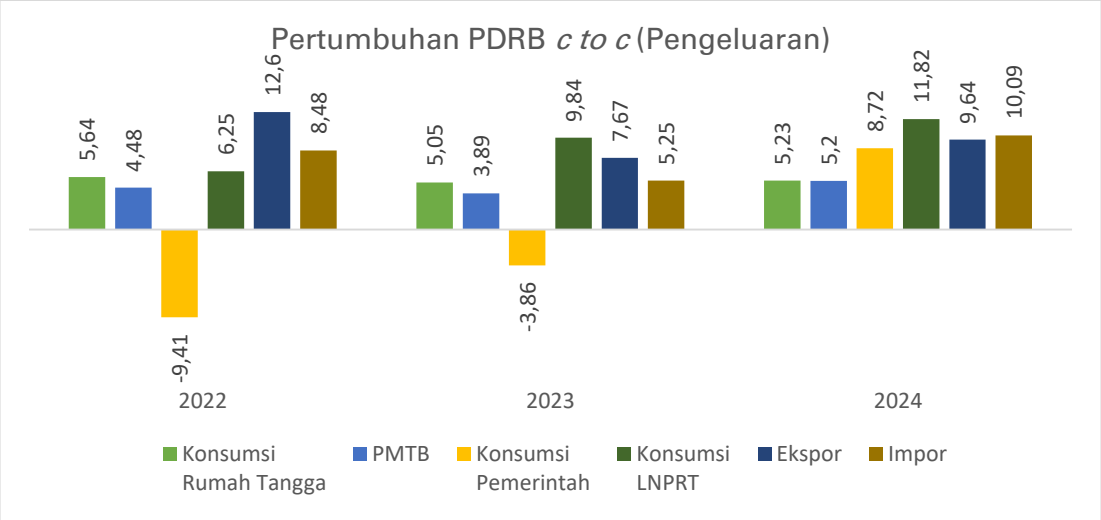


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025*

Adapun struktur ekonomi Jakarta menurut pengeluaran Tahun 2024 didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 70,37 persen; diikuti oleh Komponen PKRT sebesar 62,48 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 34,11 persen; Komponen PK-P sebesar 12,53 persen; dan Komponen PKLNPRT sebesar 2,32 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 81,98 persen.

**e. Pendapatan Per Kapita**

Indikator pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa pendekatan (*proxy*) yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu daerah di mana pendekatan yang paling sering digunakan adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah. Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dan 2024 pada dokumen ini merupakan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang bersumber dari Berita Resmi Statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Januari 2025.

Pengukuran PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. Pada 2024, PDRB per kapita tercatat sebesar 344,35 juta rupiah atau meningkat 6,74% dibandingkan Tahun 2023. Pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta terus meningkat sejak tahun 2020, meskipun sempat mengalami penurunan karena pandemi Covid-19. PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2020-2024 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2.9

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita atas Dasar Harga Berlaku

Periode 2020-2024

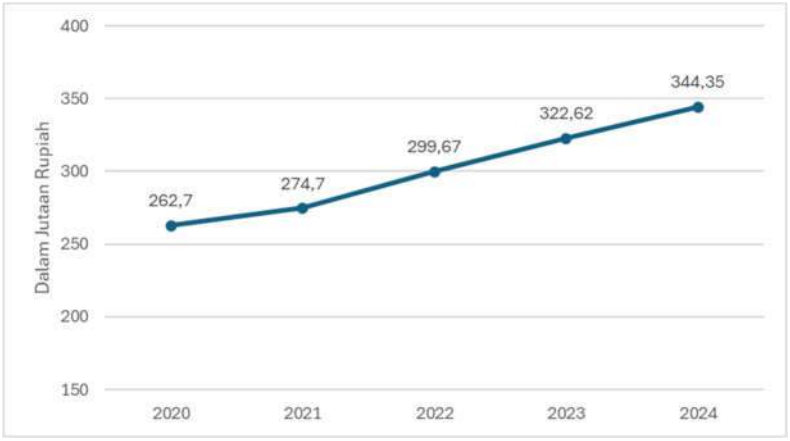


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025*

PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2020-2024 menunjukkan tren meningkat meskipun sempat turun pada 2020 dikarenakan pandemi Covid-19.

**f. Ketimpangan Pendapatan**

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DKI Jakarta menggunakan Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Maret dan September. Data terakhir yang dipublikasi oleh BPS adalah data periode sampai dengan September 2024 yang dipublikasi pada tanggal 15 Januari 2025. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1 di mana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, Rasio Gini yang semakin mendekati nilai 0, semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna di mana satu orang dapat memiliki semua pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki. Perkembangan Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2.10

Perkembangan Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020-2024

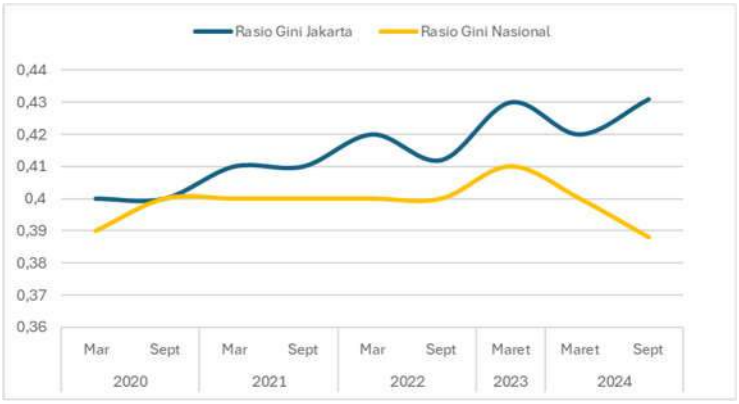


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025*

Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta secara umum berada di atas Rasio Gini Nasional selama periode 2020-2024. Artinya, ketimpangan pendapatan di wilayah DKI Jakarta umumnya lebih tinggi dibandingkan kondisi nasional. Selain itu apabila dilihat dari perkembangannya selama 2020-2024, ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami kenaikan hingga September 2024 mencapai tingkat tertinggi sebesar 0,431 dan kemudian sedikit turun pada Maret 2024 menjadi sebesar 0,423.

**g. Inflasi**

Pergerakan inflasi (y-on-y) sepanjang Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan inflasi pada Tahun 2024 terjadi empat kali yaitu pada bulan Februari, Maret, Juni dan Agustus dengan puncak inflasi sebesar 2,23 persen pada bulan Juni 2024. Pada Desember 2024, tingkat inflasi y-on-y Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,48 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,48 persen. Sementara itu, pada Desember 2023, tingkat inflasi y-on-y tercatat sebesar 2,28 persen. Hal ini menunjukkan inflasi di Jakarta dalam keadaan terkendali.

Grafik 2.11

Realisasi Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

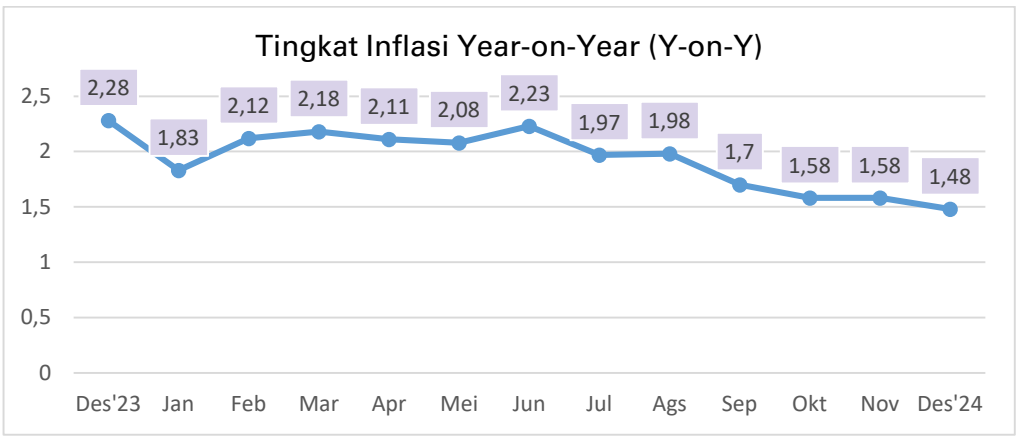


*Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2025*

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Dari sebelas kelompok pengeluaran, sepuluh di antaranya mengalami peningkatan indeks harga atau inflasi dan hanya satu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga atau deflasi. Sepuluh kelompok tersebut yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (8,10 persen), perlengkapan, penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,80 persen), pendidikan (2,39 persen), peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (2,14 persen), makanan minuman dan tembakau (1,67 persen), kesehatan (1,63 persen), pakaian dan alas kaki (0,93 persen), perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,64 persen), dan rekreasi, olahraga dan budaya (0,38 persen). Sementara kelompok yang mengalami deflasi yaitu transportasi (1,15 persen) dan informasi, komunikasi dan jasa keuangan (0,04 persen).

Dibandingkan provinsi lain di Indonesia, inflasi Jakarta pada Desember 2024 (y-on-y) menunjukkan tren yang relatif terkendali dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Inflasi DKI Jakarta paling rendah bila dibandingkan dengan seluruh provinsi di Pulau Jawa. Sementara itu, di antara kota-kota satelit, inflasi Jakarta merupakan yang terendah secara y-on-y namun berada di posisi tengah secara m-to-m. Inflasi Jakarta (y-to-y sebesar 1,48 persen paling rendah dibandingkan Bogor (1,75 persen), Depok (1,95 persen) , Tangerang (1,86 persen), dan Bekasi (1,60 persen).

Realisasi inflasi di DKI Jakarta yang relatif masih terkendali tidak terlepas dari dukungan berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta. TPID Provinsi DKI Jakarta melakukan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) untuk pengendalian inflasi. Upaya tersebut di antaranya melaksanakan program pangan murah bersubsidi bagi kelompok masyarakat tertentu, kegiatan pasar murah, panen raya bersama, kerja sama antardaerah, monitoring harga dan pasokan di pasar induk dan gudang beras, peluncuran produk beras resik, serta High Level Meeting (HLM) TPID. Sinergi dan kerja sama juga senantiasa dilakukan dengan Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, Bulog, BUMD Pangan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengendalikan inflasi di Jakarta.

**h. Kinerja Belanja Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

Kinerja belanja urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebesar 56,33% dari total belanja keseluruhan sebesar Rp70.012.728.586.086,00 yang terdiri atas urusan Pendidikan sebesar 23,98%, urusan Kesehatan sebesar 14,86%, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 9,94%, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 1,92%, urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar 3,63%, dan urusan Sosial sebesar 2,00%. Kinerja belanja urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2024

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Tahun Anggaran 2024 | | % | % Terhadap Total Belanja |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| **I** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **42.247.891.005.900** | **39.437.201.404.246** | **93,35** | **56,33** |
| 1 | Pendidikan | 17.780.831.753.367 | 16.786.112.162.883 | 94,41 | 23,98 |
| 2 | Kesehatan | 10.845.875.887.486 | 10.401.287.867.957 | 95,90 | 14,86 |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8.060.621.581.050 | 6.961.529.482.334 | 86,36 | 9,94 |
| 4 | Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1.433.518.119.145 | 1.345.992.644.823 | 93,89 | 1,92 |
| 5 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 2.666.125.746.128 | 2.543.497.357.142 | 95,40 | 3,63 |
| 6 | Sosial | 1.460.917.918.724 | 1.398.781.889.107 | 95,75 | 2,00 |

Penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran dan realisasi belanja urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dijelaskan pada CaLK 5.1.2.2 Klasifikasi Urusan.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu capaian kinerja Pemerintah Daerah diukur dengan akuntabilitas kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis.

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam masa satu periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 4 Tujuan dengan 4 Indikator Kinerja Tujuan dan 22 Sasaran dan 26 Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dari 26 indikator kinerja yang dijanjikan pada Tahun 2024 secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.3

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024

| NO | | TUJUAN / SASARAN | NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan | | Indeks Kota Layak Huni | | Indeks | 71 | N/A (belum rilis) | - |
| | 1 | Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas | | Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan | Persen | 77.24 | 77,66 | 100.54% |
| | 2 | Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit | | Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik | Persen | 20.97 | 22.19 | 105.82% |
| | 3 | Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon | 1 | Indeks kualitas lingkungan hidup | Indeks | 55.43 | 56.39 | 101.73% |
| | | | 2 | Persentase penurunan emisi gas rumah kaca | Persen | 25.4 | 25,9 | 101.97% |
| | 4 | Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota | | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 59.66 | N/A (belum rilis) | - |
| 2 | Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan | | Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif | | Indeks | 7,81 | N/A (belum rilis) | - |
| | 5 | Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah | | Laju pertumbuhan ekonomi | Persen | 4.8 – 5.6 | 4.90 | 100% |
| | 6 | Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja | | Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus) | Persen | 6.53 | 6.21 | 105.15% *) |
| | 7 | Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial | 1 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 3.79 | 4.14 | 91.55% *) |
| | | | 2 | Rasio Gini | Koefisien | 0.410 | 0,431 | 95,13% *) |
| | | | 3 | Tingkat Kemiskinan Ekstrem | Persen | 0.5 | 0,35 | 142.86% *) |
| | 8 | Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi | | Indeks Daya Saing Daerah | Indeks | 4.01 | N/A (belum rilis) | - |
| 3 | Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan | | Indeks Pembangunan Manusia | | Indeks | 83.55 | 84.15 | 100.72% |
| | 9 | Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat | | Indeks dimensi pendidikan | Tahun | 12,16 | 12,5 | 102.80% |
| | 10 | Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan | 1 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 75.81 | 75,99 | 100.24% |
| | | | 2 | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita | Persen | 13.2 | N/A (belum rilis) | - |
| | 11 | Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender | | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 95.14 | N/A (belum rilis) | - |
| | 12 | Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebinekaan masyarakat | | Indeks Demokrasi | Indeks | 82.13 | 84.57 | 102.97% |
| 4 | Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas | | Indeks Reformasi Birokrasi | | Indeks | 83 | N/A (belum rilis) | - |

| NO | | TUJUAN / SASARAN | NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 91.08 | 93.36 | 102.50% |
| | 14 | Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 4.21 | 4,46 | 105.94% |
| | 15 | Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah | 1 | Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Predikat | 84 (A) | 81,66 | 97.21% |
| | | | 2 | Indeks Survei Penilaian Integritas | Indeks | 75 | 72,34 | 96.45% |
| | 16 | Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel | | Opini Laporan Keuangan Daerah | Opini | WTP | WTP | 100% |
| | 17 | Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur | | Indeks Sistem Merit | Indeks | 350.5 | 350.5 | 100% |

**)Semakin rendah capaian semakin baik indikator kinerja*

## 2.3 Kebijakan Keuangan

### 2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dana Perimbangan.

Beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 2.3.1.1 Kebijakan Pajak Daerah

Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah:

a. Strategi Pajak Daerah: Intensifikasi
   1) Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah;
   2) Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah;
   3) Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment*;
   4) *Law enforcement* penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah;
   5) Pemberdayaan Juru Sita, PPNS, Intel Pajak Daerah dalam upaya penegakan hukum;
   6) Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mendekati harga pasar wajar;
   7) Meningkatkan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital; dan
   8) Peningkatan koordinasi kelembagaan (pertukaran data informasi, tax clearance, law enforcement, sosialisasi, dan pendataan).

b. Strategi Pajak Daerah: Ekstensifikasi

   Pengukuhan Wajib Pajak baru berdasarkan pendataan, terutama objek pajak baru sebagai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### 2.3.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

a. Kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, antara lain:
    1) Pengembangan retribusi daerah pada Retribusi Online Sistem (R.O.S) sebagai sarana pemungutan retribusi;
    2) Digitalisasi pemungutan retribusi berbasis tiket atau dokumen yang dipersamakan;
    3) Melakukan integrasi aplikasi yang dimiliki oleh SKPD pemungut retribusi ke dalam R.O.S;
    4) Mendorong SKPD yang memiliki Laboratorium agar mempunyai akreditasi dari KAN;
    5) Monitoring langsung ke SKPD pemungut retribusi untuk mendapatkan objek retribusi yang kemungkinan belum dijadikan objek retribusi;
    6) Pencairan piutang dan mendorong SKPD pemungut retribusi untuk memastikan piutang semakin mengecil;
    7) Penyusunan Draf Rapergub Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    8) Sosialisasi terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
    9) Monitoring dan Evaluasi secara periodik/bulanan objek retribusi.

#### 2.3.1.3 Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini antara lain berasal dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

a. Mempertahankan dan meningkatkan status rasio kesehatan serta tata kelola BUMD;
b. Menghadirkan kepengurusan yang unggul dan profesional dalam pengelolaan bisnis BUMD;

c. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergi antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
d. Optimalisasi produktivitas aset BUMD melalui kerja sama dengan BUMD, BUMN dan pihak swasta;
e. Meningkatkan inovasi dan diferensiasi bisnis agar mampu bersaing secara unggul;
f. Alokasi PMD diutamakan untuk program yang mendukung prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
g. Mendorong skema alternatif pembiayaan lainnya dalam pembiayaan korporasi.

Sedangkan, lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Dalam hal meningkatkan kinerja lain- lain pendapatan daerah yang sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

a. Melakukan pembinaan dan monitoring kepada SKPD Pengampu Penerimaan LLPAD;
b. Pengembangan serta integrasi sistem terkait monitoring dan evaluasi laporan bulanan dan rekonsiliasi; dan
c. Melakukan pendataan potensi kepada SKPD Pengampu Penerimaan LLPAD:

Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, diperlukan strategi dalam hal optimalisasi pemanfaatan aset, pelayanan rekomendasi Hak Guna Bangunan di atas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi, serta pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame, yang dilakukan melalui langkah-langkah berikut;

a. Optimalisasi pemanfaatan aset;
b. Optimalisasi pelayanan rekomendasi Hak Guna Bangunan di atas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tanah Kota Praja dan Eks Desa;
c. Optimalisasi pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi;
d. Optimalisasi pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame.

#### 2.3.1.4 Kebijakan Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK)

Non Fisik, peningkatan kerja sama intensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, serta penjaringan WP baru di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

### 2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, kebijakan belanja daerah Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

a. Pemenuhan belanja wajib dan mengikat, yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah;
b. Menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial;
c. Penyelesaian prioritas Pembangunan daerah Tahun Anggaran 2024, antara lain Penanggulangan Banjir, Penanganan Kemacetan, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Pencegahan Stunting, Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Nilai Demokrasi;
d. Kegiatan tahun jamak yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada Tahun Anggaran 2024; dan
e. Kegiatan yang mendukung Program Strategis Nasional (PSN) dan kegiatan lainnya yang merupakan ear marking dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, antara lain Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Wajib yang didanai oleh dana bagi hasil.

### 2.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan untuk pengalokasian SILPA dan Rencana Penerimaan Pinjaman Daerah yang

bersumber dari penerusan pinjaman dari pemerintah pusat untuk pembangunan proyek MRT Jakarta. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; dan Pembayaran Pokok Utang.

Dalam penyertaan penganggaran Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada Kebijakan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 terdiri atas beberapa unsur pembentukan yakni, Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya; Penerimaan dari Obligasi Daerah; Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Pengembalian Investasi Dana Bergulir.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas. Perluasan tersebut dapat dilakukan melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pinjaman dan hibah luar negeri, penerbitan Obligasi Daerah, pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong kerja sama secara *business to business* (B to B) serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela dalam kerangka skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

## 2.4 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2024

Seiring perkembangan kondisi perekonomian global dan nasional ketika konflik Rusia-Ukraina berdampak pada kenaikan harga pangan dan energi di berbagai negara yang berakibat pada terganggunya rantai pasok dunia maka inflasi global tidak dapat dihindari. Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II juga memperkuat bahwa Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 harus dilakukan penyesuaian.

APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 semula direncanakan sebesar Rp81.716.573.026.059,00. Namun pada APBD Perubahan 2024 mengalami kenaikan 4,27% menjadi Rp85.202.328.591.676,00.

Tabel 2.4

Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

| APBD | Perda No. 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp) | Perda No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **PENDAPATAN DAERAH** | **72.446.382.571.261** | **74.946.825.859.889** |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 52.398.081.040.625 | 50.466.744.400.403 |
| Pajak Daerah | 46.240.000.000.000 | 44.980.000.000.000 |
| Retribusi Daerah | 483.034.270.805 | 647.749.998.376 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 823.000.000.000 | 634.395.407.063 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 4.852.046.769.820 | 4.204.598.994.964 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 19.326.007.889.000 | 23.776.426.806.863 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 722.293.641.636 | 703.654.652.623 |
| **BELANJA DAERAH** | **72.600.997.362.528** | **76.023.113.210.933** |
| Belanja Pegawai | 20.065.594.901.085 | 20.031.780.182.216 |
| Belanja Barang dan Jasa | 27.309.645.709.375 | 27.835.321.117.883 |
| Belanja Bunga | 256.000.000.000 | 186.000.000.000 |
| Belanja Subsidi | 5.603.712.087.924 | 6.320.798.085.601 |
| Belanja Hibah | 3.306.327.319.994, | 3.358.144.887.494 |
| Belanja Bantuan Sosial | 3.114.488.637.394 | 3.551.461.654.483 |
| Belanja Modal | **11.554.909.926.952** | **12.989.055.827.469** |
| Belanja Tidak Terduga | 1.072.006.625.640 | 1.365.518.170.267 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 318.312.154.164 | 385.033.285.520 |
| **PEMBIAYAAN DAERAH** | **154.614.791.267** | **1.076.287.351.044** |
| Penerimaan Pembiayaan | 9.270.190.454.798 | 10.255.502.731.787 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 9.115.575.663.531 | 9.179.215.380.743 |
| **Total APBD** | **81.716.573.026.059** | **85.202.328.591.676** |

# BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

# BAB III
# IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

## 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pada Tahun 2024 terdapat Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam ringkasan Realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran Tahun 2024 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) | % | Realisasi Tahun 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| **1** | **PENDAPATAN** | **74.946.825.859.889** | **72.952.092.296.153** | **97,34** | **71.065.534.207.722** |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 50.466.744.400.403 | 50.742.019.272.748 | 100,55 | 49.139.745.715.234 |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 23.776.426.806.863 | 21.620.905.241.381 | 90,93 | 20.159.634.672.034 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 703.654.652.623 | 589.167.782.024 | 83,73 | 1.766.153.820.454 |
| **2** | **BELANJA dan TRANSFER** | **76.023.113.210.933** | **70.012.717.839.886** | **92,09** | **66.770.609.628.414** |
| 2.1 | Belanja Operasi | 61.283.505.927.677 | 58.623.935.516.823 | 95,66 | 57.556.903.079.616 |
| 2.2 | Belanja Modal | 12.989.055.827.469 | 11.004.785.255.543 | 84,72 | 8.857.260.068.298 |
| 2.3 | Belanja Tak Terduga | 1.365.518.170.267 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2.4 | Transfer - Bantuan Keuangan | 385.033.285.520 | 383.997.067.520 | 99,73 | 356.446.480.500 |
| **Surplus/Defisit** | | **(1.076.287.351.044)** | **2.939.374.456.267** | | **4.294.924.579.308** |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | **1.076.287.351.044** | **1.494.476.377.779** | **138,85** | **2.247.496.540.761** |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 10.255.502.731.787 | 9.343.797.504.127 | 91,11 | 8.886.564.884.056 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 9.179.215.380.743 | 7.849.321.126.348 | 85,51 | 6.639.068.343.295 |
| **4** | **SiLPA** | | **4.433.850.834.046** | | **6.542.421.120.069** |

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut.

### 3.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.952.092.296.153,00 atau 97,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp74.946.825.859.889,00. Realisasi Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp50.742.019.272.748,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp21.620.905.241.381,00, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp589.167.782.024,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.742.019.272.748,00 atau 100,55% dari target sebesar Rp50.466.744.400.403,00. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp49.139.745.715.234,00, realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.602.273.557.514,00 atau 3,26%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp931.593.220.027,00 atau 2,14%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp44.448.074.892.860,00 atau 98,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp44.980.000.000.000,00. Tidak tercapainya target dikarenakan kurang optimalnya realisasi Pendapatan Pajak di antaranya disebabkan oleh menurunnya transaksi pengalihan hak yang berdampak pada penurunan pendapatan BPHTB;
b. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp713.719.914.820,00 atau 110,18% dari target yang ditetapkan sebesar Rp647.749.998.376,00. Capaian pendapatan Retribusi yang melebihi target di antaranya disebabkan oleh peningkatan layanan kemudahan pembayaran retribusi dan peningkatan retribusi pada layanan MOD di BLUD bidang kesehatan;
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp653.700.898.761,00 atau 103,04% dari target yang ditetapkan sebesar Rp634.395.407.063,00. Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp107.831.648.774,00 dibandingkan tahun lalu; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp4.926.523.566.307,00 atau 117,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.204.598.994.964,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp303.826.334.804,00 dibandingkan dengan tahun lalu. Pendapatan lain-lain PAD yang sah melebihi target yang disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Bunga karena optimalisasi penempatan dalam investasi jangka pendek (deposito) dan kenaikan Pendapatan Bunga karena remunerasi atas Dana TDF.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.620.905.241.381,00 atau 90,93% dari target sebesar Rp23.776.426.806.863,00. Sisa yang tidak terealisasi dikarenakan faktor kebijakan pemerintah di mana penyaluran DAK Non Fisik

memperhitungkan sisa dana tahun yang lalu yang ada di Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari:

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp18.032.588.917.639,00 atau 89,76% dari target yang ditetapkan sebesar Rp20.089.713.629.863,00;
b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp368.173.270.201,00 atau 99,94% dari target yang ditetapkan sebesar Rp368.377.412.000,00;
c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp3.176.052.836.541,00 atau 97,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.274.245.548.000,00; dan
d. Insentif Fiskal Daerah sebesar Rp44.090.217.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp44.090.217.000,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.461.270.569.347,00 atau 7,25% dibandingkan Tahun 2023. Kenaikan ini disebabkan karena terdapat penyaluran *Treasury Deposit Facility* (TDF) ke Rekening Kas Umum Daerah di Tahun 2023.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2024 merupakan Pendapatan Hibah yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp589.167.782.024,00 atau 83,73% dari target sebesar Rp703.654.652.623,00. Pendapatan Hibah tidak mencapai target anggaran disebabkan adanya pergeseran pekerjaan proyek MRT Jakarta dan adanya selisih kurs pada saat perencanaan dengan realisasi. Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.176.986.038.430,00 atau 66,64% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp1.766.153.820.454,00.

### 3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.012.717.839.886,00 atau 92,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp76.023.113.210.933,00. Apabila realisasi Belanja Daerah dan Transfer tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya tercatat Rp66.770.609.628.414,00, maka realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.242.108.211.472,00 atau 4,85%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa jenis belanja mengalami kenaikan di Tahun 2024 yaitu Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan sebesar Rp 1.212.778.373.173,00 atau 6,75% dibanding Tahun Anggaran 2023, selain itu Belanja Gedung dan Bangunan yang mengalami kenaikan sebesar Rp731.955.110.045,00 atau 44,28% dibanding Tahun Anggaran 2023, dan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan juga

mengalami kenaikan sebesar Rp1.176.922.313.642,00 atau 30,98% dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer terdiri dari:

a. Belanja Operasi sebesar Rp58.623.935.516.823,00 atau 95,66% dari anggaran sebesar Rp61.283.505.927.677,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:
   1) Belanja Pegawai sebesar Rp19.190.554.701.043,00 atau 95,80% dari anggaran sebesar Rp20.031.780.182.216,00. Belanja Pegawai tidak tercapai secara optimal dikarenakan adanya perhitungan accres anggaran Belanja Pegawai, kekosongan jabatan struktural, dan CPNS yang belum aktif bekerja;
   2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp26.572.367.215.305,00 atau 95,46% dari anggaran sebesar Rp27.835.321.117.883,00. Tidak optimalnya realisasi dikarenakan tidak terserapnya Belanja Jasa KKI dan PJLP, efisiensi Belanja TALI, dan Belanja Barang/Jasa di BLUD;
   3) Belanja Bunga sebesar Rp180.738.864.995,00 atau 97,17% dari anggaran sebesar Rp186.000.000.000,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Bunga disebabkan penyesuaian kurs pada saat pelaksanaan pembayaran bunga pinjaman MRT;
   4) Belanja Subsidi sebesar Rp5.875.837.590.937,00 atau 92,96% dari anggaran sebesar Rp6.320.798.085.601,00. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Belanja Subsidi terkait dengan Pemberian Subsidi untuk Pelayanan Transjakarta melalui PT. Transportasi Jakarta yang disesuaikan dengan hasil verifikasi;
   5) Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.307.808.095.906,00 atau 98,50% dari anggaran sebesar Rp3.358.144.887.494,00. Realisasi Belanja Hibah tidak mencapai 100% di antaranya disebabkan oleh sisa hibah kepada Penerima Hibah; dan
   6) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.496.629.048.637,00 atau 98,46% dari anggaran sebesar Rp3.551.461.654.483,00. Belanja Bantuan Sosial tidak terserap 100% di antaranya disebabkan oleh sisa anggaran Belanja Bantuan Sosial merupakan adanya mekanisme verifikasi yang lebih selektif dalam pencairan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

b. Belanja Modal sebesar Rp11.004.785.255.543,00 atau 84,72% dari anggaran sebesar Rp12.989.055.827.469,00, terdiri dari:
   1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp433.525.287.650,00 atau 56,79% dari anggaran sebesar Rp763.402.783.015,00;
   2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.961.717.289.383,00 atau 93,45% dari anggaran sebesar Rp3.169.221.270.721,00;
   3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.385.010.773.455,00 atau 69,30% dari anggaran sebesar Rp3.441.760.532.962,00;
   4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp4.975.949.887.118,00 atau 92,96% dari anggaran sebesar Rp5.352.974.561.800,00

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp119.496.671.697,00 atau 93,24% dari anggaran sebesar Rp128.157.171.217,00; dan
6) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp129.085.346.240,00 atau 96,66% dari anggaran sebesar Rp133.539.507.754,00.

Tidak optimalnya realisasi Belanja Modal antara lain disebabkan oleh:

1) Adanya sisa anggaran atas pembayaran pengadaan tanah pada Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Perhubungan yang pembayarannya belum terlaksana karena terdapat tahapan untuk memenuhi persyaratan pengadaan yang masih dalam proses di BPN;
2) Kurang optimalnya realisasi Belanja Peralatan dan Mesin disebabkan oleh adanya efisiensi pengadaan;
3) Terdapat kegiatan yang belum terselesaikan dan dilanjutkan pada tahun berikutnya pada Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan;
4) Adanya efisiensi pada pembangunan waduk di Dinas Sumber Daya Air;
5) Efisiensi hasil negosiasi harga dan penyesuaian kebutuhan satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan; dan
6) Efisiensi pengadaan lisensi dan *franchise* pada UP Jakarta Smart City.

c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp1.365.518.170.267,00. Tidak terserapnya Belanja Tidak Terduga disebabkan karena tidak ada kebutuhan yang bersifat darurat atau mendesak yang mengharuskan penggunaan Belanja Tidak Terduga.
d. Transfer atau Bantuan Keuangan sebesar Rp383.997.067.520,00 atau 99,73% dari anggaran sebesar Rp385.033.285.520,00.

### 3.1.3 Surplus

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.952.092.296.153,00 dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.012.717.839.886,00 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami surplus sebesar Rp2.939.374.456.267,00 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

### 3.1.4 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.494.476.377.779,00. Rincian realisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.343.797.504.127,00 atau 91,11% dari anggaran sebesar Rp10.255.502.731.787,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 yang tercatat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.542.421.120.069,00 atau 100,00%;
2) Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp2.801.304.537.758,00 atau 75,44%; dan
3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp71.846.300,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.849.321.126.348,00 atau 85,51% dari anggaran sebesar Rp9.179.215.380.743,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp5.988.136.019.949,00 atau 81,83% dari anggaran sebesar Rp7.317.545.546.679,00; dan
2) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp1.861.185.106.399,00 atau 99,97% dari target sebesar Rp1.861.669.834.064,00.

Tidak tercapainya pengeluaran pembiayaan daerah terdapat pada realisasi Penyertaan Modal Daerah (PMD), disebabkan oleh:
1) pergeseran pekerjaan proyek MRT Jakarta dan terdapat selisih kurs pada saat perencanaan dengan realisasi;
2) belum ditetapkannya Perda pembentukan BUMD PT JIEP sehingga PMD atas PT JIEP tidak terealisasi; dan
3) adanya kegiatan yang diusulkan akan didanai dari sumber pembiayaan lain pada Perumda Air Minum Jaya sehingga tidak terealisasi.

### 3.1.5 SiLPA

Berdasarkan data realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan maka posisi SiLPA Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp4.433.850.834.046,00. Penjelasan lebih rinci atas komponen LRA disajikan dalam CaLK Bab 5.

# BAB IV

## KEBIJAKAN AKUNTANSI

# BAB IV
# KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Laporan keuangan yang disusun terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
b. Entitas tersebut dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan;
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan

akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara *intern* dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 merupakan konsolidasi dari 753 Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku entitas akuntansi. Pada proses konsolidasi, dilakukan penggabungan 753 Laporan Keuangan entitas akuntansi menjadi 42 laporan keuangan entitas akuntansi penggabung sebagai berikut.

| No. | Entitas Penggabung | Jumlah Entitas Akuntansi |
|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan | 33 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 88 |
| 3 | Dinas Bina Marga | 6 |
| 4 | Dinas Sumber Daya Air | 7 |
| 5 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan | 9 |
| 6 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman | 18 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja | 7 |
| 8 | Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan | 8 |
| 9 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2 |
| 10 | Dinas Sosial | 30 |
| 11 | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi | 16 |
| 12 | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk | 10 |
| 13 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian | 13 |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup | 10 |
| 15 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 9 |
| 16 | Dinas Perhubungan | 21 |
| 17 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik | 8 |
| 18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 13 |
| 19 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7 |
| 20 | Dinas Pemuda Dan Olahraga | 12 |
| 21 | Dinas Kebudayaan | 14 |
| 22 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 7 |
| 23 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 11 |
| 24 | Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota | 8 |
| 25 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 9 |
| 26 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 8 |
| 27 | Badan Pengelolaan Aset Daerah | 10 |
| 28 | Badan Pendapatan Daerah | 6 |
| 29 | Badan Kepegawaian Daerah | 7 |
| 30 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2 |
| 31 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 7 |
| 32 | Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah | 10 |
| 33 | Sekretariat DPRD | 1 |
| 34 | Inspektorat | 7 |
| 35 | Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 1 |
| 36 | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | 1 |
| 37 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 53 |
| 38 | Kota Administrasi Jakarta Utara | 38 |
| 39 | Kota Administrasi Jakarta Barat | 65 |
| 40 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 76 |

| No. | Entitas Penggabung | Jumlah Entitas Akuntansi |
|---|---|---|
| 41 | Kota Administrasi Jakarta Timur | 76 |
| 42 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu | 9 |
| | **Jumlah** | **753** |

## 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi, walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian, atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

## 4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

### 4.3.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas, penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan

e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Kelompok Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari Pemerintah Pusat, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

a. Penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening operasional (d.h rekening penampungan);
d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan-LRA; dan
e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat:

a. Terjadi pengeluaran dari RKUD;
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA;
c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada Peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
d. Dalam hal Belanja Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Pemerintah Pusat, belanja diakui dengan mengacu pada Peraturan perundangan yang mengatur mengenai penggunaan dan penatausahaan Dana BOS.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi Aset Tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
b. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut.

| No. | Uraian | Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp) |
|---|---|---|
| **1** | **Tanah** | 1 |
| **2** | **Peralatan dan Mesin**, terdiri atas: | |
| 2.1 | Alat-alat Berat | 10.000.000 |
| 2.2 | Alat-alat Angkutan | 1.750.000 |
| 2.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | 750.000 |
| 2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan | 1.000.000 |
| 2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | |
| | - Alat-alat Kantor | 750.000 |
| | - Alat-alat Rumah Tangga | 500.000 |

| No. | Uraian | Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp) |
|---|---|---|
| 2.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 1.000.000 |
| 2.7 | Alat-alat Kedokteran | 5.000.000 |
| 2.8 | Alat-alat Laboratorium | 2.500.000 |
| 2.9 | Alat Keamanan | 1.000.000 |
| 2.10 | Alat Olahraga | 250.000 |
| **3** | **Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas: | |
| 3.1 | Bangunan Gedung | 15.000.000 |
| 3.2 | Bangunan Monumen | 15.000.000 |
| **4** | **Jalan, Irigasi dan Jaringan**, yang terdiri atas: | |
| 4.1 | Jalan dan Jembatan | 50.000.000 |
| 4.2 | Bangunan Air/Irigasi | 50.000.000 |
| 4.3 | Instalasi | 50.000.000 |
| 4.4 | Jaringan | 50.000.000 |
| **5** | **Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas: | |
| 5.1 | Buku dan Perpustakaan *) | 100.000 |
| 5.2 | Alat Peraga Pendidikan | 500.000 |
| 5.3 | Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan | 250.000 |
| 5.4 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan | |
| | a. Hewan | 300.000 |
| | b. Ternak | 300.000 |
| | c. Tumbuhan Pohon | 300.000 |
| | d. Tumbuhan Tanaman Hias | ekstra komtabel |
| 5.5 | Aset Tetap Renovasi | 15.000.000 |
| **6** | **Konstruksi Dalam Pengerjaan** | 1 |

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja non modal.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi Aset Tetap) jika pemeliharaan tersebut memenuhi seluruh kriteria huruf a dan b sebagai berikut:

a. Manfaat ekonomi atas barang/Aset Tetap yang dipelihara:
   1) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
   2) Bertambah umur ekonomis, dan/atau
   3) Bertambah volume, dan/atau
   4) Bertambah kapasitas produktivitas; dan

b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/Aset Tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut.

| No. | Uraian | Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp) |
|---|---|---|
| **1** | **Tanah** | 1 |
| **2** | **Peralatan dan Mesin**, terdiri atas: | |
| 2.1 | Alat-alat Berat | 10.000.000 |
| 2.2 | Alat-alat Angkutan: | 1.750.000 |
| 2.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | 750.000 |
| 2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan | 1.000.000 |
| 2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | |
| | - Alat-alat Kantor | 750.000 |
| | - Alat-alat Rumah Tangga | 500.000 |
| 2.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 1.000.000 |

| No. | Uraian | Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp) |
|---|---|---|
| 2.7 | Alat-alat Kedokteran | 5.000.000 |
| 2.8 | Alat-alat Laboratorium | 2.500.000 |
| 2.9 | Alat Keamanan | 1.000.000 |
| 2.10 | Alat Olahraga | 250.000 |
| **3** | **Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas: | |
| 3.1 | Bangunan Gedung | 15.000.000 |
| 3.2 | Bangunan Monumen | 15.000.000 |
| **4** | **Jalan, Irigasi dan Jaringan**, yang terdiri atas: | |
| 4.1 | Jalan dan Jembatan | 50.000.000 |
| 4.2 | Bangunan Air/Irigasi | 50.000.000 |
| 4.3 | Instalasi | 50.000.000 |
| 4.4 | Jaringan | 50.000.000 |
| **5** | **Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas: | |
| 5.1 | Buku dan Perpustakaan | 100.000 |
| 5.2 | Alat Peraga Pendidikan | 500.000 |
| 5.3 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | 250.000 |
| 5.4 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan | |
| | a. Hewan | 300.000 |
| | b. Ternak | 300.000 |
| | c. Tumbuhan Pohon | 300.000 |
| | d. Tumbuhan Tanaman Hias | ekstra komtabel |
| 5.5 | Aset Tetap Renovasi | 15.000.000 |
| **6** | **Konstruksi Dalam Pengerjaan** | 1 |

Dalam Hal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pembayaran Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2025 adalah dalam hal pelaksanaan pekerjaan kontraktual tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan akan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pengajuan wajib menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya kepada Kepala SBPKD, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan dilampiri:
   1) Fotokopi surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa yang telah dilegalisasi oleh PA/KPA;
   2) BAPP sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
   3) Surat Penetapan Nilai Pengembalian Kepada Daerah sesuai dengan Format 10 Lampiran II; dan
   4) Surat permintaan pencairan/Klaim Jaminan Pembayaran kepada Kepala SBPKD yang dibuat sesuai dengan Format 12 Lampiran II.
b. Berdasarkan surat pemberitahuan, SBPKD melakukan klaim jaminan sesuai surat kuasa klaim pencairan jaminan dari PA/KPA sebesar prestasi pekerjaan yang belum terselesaikan atau sebesar termin pekerjaan yang belum terselesaikan;
c. Dilakukan penyelesaian dengan mengacu ketentuan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

d. Dalam hal SKPD/Unit SKPD tidak menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya kepada Kepala SBPKD, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tahun anggaran berkenaan atau paling lambat tanggal 15 Januari 2025, maka dilakukan klaim jaminan oleh SBPKD berdasarkan surat kuasa klaim pencairan jaminan dari PA/KPA sebesar nilai jaminan.

### 4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

### 4.3.4 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait; dan
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

a. Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan; dan
b. Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk Pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima Pemerintah Daerah. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan
c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 4.3.5 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan Aset Tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu:
    1) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau

2) Konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah (Contohnya penggunaan persediaan).

c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

d. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan Peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban dalam BAS sebagai berikut:

a. Beban operasi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain;
b. Beban penyusutan dan amortisasi;
c. Beban transfer;
d. Beban tak terduga; dan
e. Defisit non operasional.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin, dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam defisit non operasional, antara lain defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar dan defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang. Sedangkan, pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai Aset Tetap diakui sebagai beban barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### 4.3.6 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalian mineral, minyak, dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal; dan
d. Persediaan dicatat sebesar:
    1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
    2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
    3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non lancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 4.3.6.1 Aset Lancar

a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
    1) Diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
    2) Berupa kas dan setara kas; dan
    3) Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek, antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
c. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.
d. Penerimaan kas dibendahara penerimaan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam

bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Saldo kas di bendahara penerimaan harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

e. Pengeluaran kas dibendahara pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Saldo kas di bendahara pengeluaran harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

f. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
Piutang Pemerintah Daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih Pemerintah Daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
   a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
   b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih; Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca;
   c) Penyisihan Piutang Tak Tertagih bukan merupakan penghapusan piutang; Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan Peraturan yang berlaku; dan
   d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

2) Kualitas Piutang
   a) Kualitas Piutang adalah perkiraan atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

b) Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.

c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
   1. Menilai dan menentukan kualitas piutang; dan
   2. Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

d) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan keuangan;

e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
   1. Kualitas lancar;
   2. Kualitas kurang lancar;
   3. Kualitas diragukan; dan
   4. Kualitas macet.

f) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
   1. Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun;
   2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
   3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun; dan
   4. Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.

g) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
   1. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
   2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
   3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
   4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

h) Khusus untuk piutang transfer Pemerintah Pusat tidak dilakukan penggolongan kualitas piutang,

i) Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer antar daerah, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun;
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
4. Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.

j) persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebagai berikut.

| No | Penggolongan Kualitas Piutang | Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%) |
|---|---|---|
| 1. | Lancar | 0,5 |
| 2. | Kurang Lancar | 10 |
| 3. | Diragukan | 50 |
| 4. | Macet | 100 |

k) setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang tuntutan ganti kerugian daerah yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada; dan
5. Informasi lainnya yang dianggap penting.

g. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:
1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

1) Barang konsumsi;
2) Amunisi;
3) Bahan untuk pemeliharaan;
4) Suku cadang;
5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6) Pita cukai;
7) Bahan baku;
8) Barang dalam proses/setengah jadi;
9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
10) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/ sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaan berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada di gudang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan jika potongan tersebut tercantum dalam bukti pembelian, jika tidak tercantum diakui sebagai pendapatan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual dan dinilai dengan menggunakan metode sistematis *FIFO*.

Persediaan juga mencakup Barang atau perlengkapan yang diperoleh selain dari Belanja persediaan, misalnya yang bersumber dari hibah dan reklasifikasi aset yang diperoleh dari Belanja modal yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai aset tetap.

Dalam hal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

h. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemerintah Daerah

diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 (tiga) – 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berupa Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergulir.

Penilaian kualitas Investasi Non Permanen dana bergulir dilakukan berdasarkan umur Investasi Non Permanen dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir ditetapkan sebesar:

a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergulir dengan kualitas lancar;
b) 10% (sepuluh perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c) 50% (lima puluh perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d) 100% (seratus perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Metode penilaian Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya

perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Metode biaya diterapkan untuk:

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk saham, deposito, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), SPN, dan investasi jangka pendek lainnya; dan
2. Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk obligasi, proyek pembangunan, surat utang jangka panjang, deposito jangka panjang, maupun investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk lainnya yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.

b) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk Investasi Non Permanen berupa dana bergulir. Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap Investasi Non Permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terealisasi.

Pengukuran Investasi Non Permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan nilai Investasi Non Permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai Investasi Non Permanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan.

Investasi Non Permanen dapat dihapuskan jika Investasi Non Permanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

b) Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya (*cost method*)

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.

b) Metode Ekuitas (*equity method*)

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laba/rugi Perusahaan

   Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi usaha, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai investasi tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

   Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

2. Penerimaan Dividen

Pada saat BUMD dan PT Patungan mengumumkan pembagian dividen, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pembagian dividen dalam bentuk saham.

Sama halnya dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi Pemerintah Daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

#### 4.3.6.2 Properti Investasi

a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
b. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh akan diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
f. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas

properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

g. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

h. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian.

#### 4.3.6.3 Aset Tetap

a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah klasifikasi Aset Tetap yang digunakan meliputi:

1) Tanah
2) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
   a) Alat - alat berat;
   b) Alat - alat angkutan;
   c) Alat - alat bengkel dan alat ukur;
   d) Alat - alat pertanian/peternakan;
   e) Alat - alat kantor dan rumah tangga;
   f) Alat - alat studio dan alat komunikasi;
   g) Alat - alat kedokteran;
   h) Alat - alat laboratorium;
   i) Alat - alat keamanan; dan
   j) Alat – alat olahraga.
3) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
   a) Bangunan gedung; dan
   b) Bangunan monumen.
4) Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
   a) Jalan dan jembatan;
   b) Bangunan air/irigasi;
   c) Instalasi; dan
   d) Jaringan.
5) Aset Tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
   a) Buku dan perpustakaan;
   b) Alat peraga pendidikan;

c) Barang bercorak kesenian/kebudayaan;
d) Hewan/ternak dan tumbuhan; dan
e) Aset Tetap-renovasi.

6) Konstruksi dalam pengerjaan

c. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
2) Biaya perolehan Aset Tetap selain harga beli atau konstruksinya yang dapat diatribusikan langsung seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya pengawasan dan/atau biaya lainnya yang diperoleh secara gabungan untuk beberapa unit Aset Tetap induk, maka di kapitalisasi dengan diatribusikan secara proporsional ke masing-masing Aset Tetap induk;
3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
4) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
5) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;

6) Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
7) Biaya perolehan Aset Tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
9) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian; dan
11) Biaya appraisal untuk pengadaan Aset Tetap tanah secara gabungan, namun tidak seluruh pengadaan tersebut terealisasi maka atas biaya appraisal tersebut dikapitalisasi ke aset yang pengadaannya terealisasi dan dialokasikan secara proporsional berdasarkan luasan aset tetap tanah tersebut.

d. Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai Aset Tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).
e. Jika suatu belanja modal/Aset Tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam CaLK.

#### 4.3.6.4 Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta Aset Tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
    1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
    2) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
    3) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
    4) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
    1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
    2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
    3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

    Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
    1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
    2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.
d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4) Uang muka kerja yang diberikan;
5) Uang Jaminan/Retensi; dan
6) KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

#### 4.3.6.5 Penyusutan Aset

a. Penyesuaian nilai Aset Tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

b. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

c. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap.

| No. | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|
| **1** | **Tanah** | Tidak Disusutkan |
| **2** | **Peralatan dan Mesin**, terdiri atas: | |
| 2.1 | Alat-alat Berat | 8 |
| 2.2 | Alat-alat Angkutan | 8 |
| 2.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | 8 |
| 2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan | 5 |
| 2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 5 |
| 2.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 5 |
| 2.7 | Alat-alat Kedokteran | 5 |
| 2.8 | Alat-alat Laboratorium | 5 |
| 2.9 | Alat Keamanan | 5 |
| 2.10 | Alat Olahraga | 5 |
| **3** | **Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas: | |
| 3.1 | Bangunan Gedung | 20 |
| 3.2 | Bangunan Monumen | 20 |
| **4** | **Jalan, Irigasi dan Jaringan**, terdiri atas: | |
| 4.1 | Jalan dan Jembatan | 20 |
| 4.2 | Bangunan Air/Irigasi | 20 |
| 4.3 | Instalasi | 20 |
| 4.4 | Jaringan | 20 |

| No. | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|
| **5** | **Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas: | |
| 5.1 | Buku dan Perpustakaan | Tidak disusutkan |
| 5.2 | Alat Peraga Pendidikan | 5 |
| 5.3 | Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan | 5 |
| 5.4 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan | |
| | a. Hewan | Tidak Disusutkan |
| | b. Ternak | Tidak Disusutkan |
| | c. Tumbuhan Pohon | Tidak Disusutkan |
| | d. Tumbuhan Tanaman Hias | Tidak Disusutkan |
| 5.5 | Aset Tetap - renovasi | Masa kerja sama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek |
| **6** | **Konstruksi Dalam Pengerjaan** | Tidak Disusutkan |

d. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomi mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

e. Penyusutan atas Aset Tetap mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.

f. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

g. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (*Aset Idle)* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

h. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

   1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
   2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

   Aset Tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi Aset Tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut.

| Uraian | Jenis | Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| **Peralatan dan Mesin** | | | |
| Alat-alat Berat | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 6 |
| | | >75% s.d.100% | 7 |
| Alat-alat Angkutan | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 6 |
| | | >75% s.d.100% | 7 |

| Uraian | Jenis | Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 6 |
| | | >75% s.d.100% | 7 |
| Alat-alat Pertanian/Peternakan | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Alat-alat Kantor | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Alat-alat Rumah Tangga | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Alat Studio dan Alat Komunikasi | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Alat-alat Kedokteran | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Alat-alat Laboratorium | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Alat Keamanan | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Alat Olahraga | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| **Gedung dan Bangunan** | | | |
| Bangunan Gedung | Renovasi | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% s.d.100% | 20 |

| Uraian | Jenis | Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| Bangunan Monumen | Renovasi | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% s.d.100% | 20 |
| **Jalan, Irigasi dan Jaringan** | | | |
| Jalan/Jembatan | Renovasi | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% s.d.100% | 20 |
| Bangunan Air/Irigasi | Renovasi | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% s.d.100% | 20 |
| Instalasi | Renovasi | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% s.d.100% | 20 |
| Jaringan | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% s.d.100% | 20 |
| **Aset Tetap Dalam Renovasi** | | | |
| Peralatan dan Mesin dalam Renovasi | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Gedung dan bangunan dalam Renovasi | Renovasi | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% s.d.100% | 20 |
| Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi | Renovasi /Overhaul | *>0% s.d. 25%* | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% s.d.100% | 20 |

Penambahan masa manfaat karena *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

#### 4.3.6.6 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

a. Aset Tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

b. Apabila Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi Aset Tetap, maka harus dipindahkan ke pos Aset Lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat;
c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh;
d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan;
e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara; dan
f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluwarsa dihapus.

#### 4.3.6.7 Aset Lainnya

a. Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, Aset Tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:
   1) Tagihan Jangka Panjang;
   2) Kemitraan dengan pihak ketiga;
   3) Aset tidak berwujud; dan
   4) Aset Lain-lain.
b. Tagihan Jangka Panjang merupakan jumlah tagihan yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima/dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
c. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran. Antara lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
d. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

   TP merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

   Tagihan TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum

yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Atas TGR yang belum diterbitkan SKP2K dapat diakui sepanjang sudah terdapat kata sepakat antara pemeriksa auditor internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK) dengan pihak terperiksa dan hasil temuan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang sudah teregister, TGR tersebut dicatat pada kelompok aset lainnya.

e. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerja sama pemanfaatan (KSP).

f. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

g. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

h. Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

   Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerja sama.

i. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

j. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.

k. Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

l. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Tidak Berwujud. Termasuk di dalam Aset Lain-lain di antaranya Aset Rusak Berat/Usang, Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah, Aset Tetap - Fasos Fasum, Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB), Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya, dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

m. Kewajiban Penyerahan Fasos Fasum.

   Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Fasos-Fasum selanjutnya disebut PPK-Fasos-Fasum merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang untuk menyerahkan aset fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan. Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan PPK-Fasos-Fasum merupakan dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kewajiban Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang menyerahkan fasos-fasum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi.

   Piutang Fasos-Fasum dan Pendapatan Fasos Fasum - LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Apabila tidak terdapat dokumen yang sah yang menyatakan nilai kewajiban fasos-fasum yang harus diserahkan oleh Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau nilai Fasos-Fasum tidak dapat diukur atau diestimasi secara andal, dokumen Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan PPK-Fasos-Fasum dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat disajikan informasi antara lain:

1) Jumlah keseluruhan Izin yang diterbitkan (jumlah Izin Pemanfaatan Ruang keseluruhan);
2) Jumlah lokasi wilayah dan luas lahan kewajiban;
3) Jumlah izin yang telah dilakukan BAST;
4) Jumlah sisa kewajiban yang belum dilakukan BAST; dan
5) Informasi pendukung lainnya.

Fasos-fasum yang telah diterima dari kewajiban pengembang dicatat sebagai aset fasos fasum dan sekaligus diakui sebagai pendapatan LO berkenaan pada saat berita acara serah terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah serta diungkapkan secara memadai. Aset Fasos Fasum dicatat sebagai Aset Tetap/aset berkenaan pada saat BAST/SK Gubernur kepada SKPD Pengguna telah diterbitkan.

Aset Tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika tidak ada nilai dalam BAST, fasom fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat Aset Tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur Fasos Fasum. Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban fasos fasum serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah – LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai. Aset Fasos Fasum selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Dalam rangka pencatatan secara ekstrakomtabel atas pemenuhan kewajiban fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai jumlah kewajiban Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang yang belum diserahkan.

Perolehan Aset Tetap sebagai pemenuhan kewajiban fasos fasum diperlakukan sebagai pendapatan operasional dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

n. Konversi Kewajiban SP3L dalam Bentuk Penyetoran Dana.

Dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS) dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas konversi kewajiban SP3L dalam bentuk penyetoran dana.

Sanksi SP3L untuk membangun/menyediakan Rumah Susun Murah (RSM) yang dikonversi dalam bentuk penyetoran dana kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai Pendapatan Sanksi SP3L – LO dan Piutang Sanksi SP3L sebesar jumlah yang tercantum dalam dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS).

Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang menjadi bagian dari Lain-lain PAD yang sah dan diakui saat Sanksi tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Piutang atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang berkurang saat diterimanya pembayaran.

Pendapatan Sanksi SP3L – LO, Piutang Sanksi SP3L, dan Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

o. Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (PPK-KLB).

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK-KLB dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan KLB.

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK- KLB merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan KLB yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kompensasi KLB diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang sah – LO dan Piutang KLB sebesar jumlah yang tercantum dalam PPK- KLB.

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan KLB disajikan dalam neraca untuk dapat mengetahui nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan KLB dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan KLB dan menambah Aset sebesar jumlah yang tercantum dalam BAST.

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLB serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai.

Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban kompensasi pelampauan KLB selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO, Piutang Kompensasi KLB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KLB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

p. Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Surat ketetapan pengenaan denda atas pelampauan KDB/dokumen lainnya yang sah yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan lahan pengganti dan/aset lainnya dapat dijadikan sebagai sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan KDB.

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang kompensasi pelampauan KDB dan Pendapatan kompensasi pelampauan KDB - LO diakui dan dicatat dalam Neraca saat nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah.

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan KDB dalam bentuk aset lahan tanah dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan KDB dan menambah aset lahan tanah sebesar jumlah yang tercantum dalam BAST, Jika terdapat beda nilai antara pengakuan piutang awal dengan nilai saat serah terima maka diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang Sah – LO.

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KDB serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KDB – LO, Piutang Kompensasi KDB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KDB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

q. Pemenuhan Kewajiban Lainnya oleh Pihak Ketiga

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Lainnya, selanjutnya disebut PPK-Lainnya merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan uang dan/atau aset kepada Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian pemenuhan kewajiban lainnya (PPK-Lainnya), seperti kewajiban kontribusi reklamasi dan tambahan kewajiban kontribusi reklamasi dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang atas pemenuhan kewajiban lainnya dan pendapatan lainnya LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam PPK-Lainnya dan/atau dokumen lainnya yang sah. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. dokumen PPK-Lainnya atau dokumen lainnya yang sah dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstra komtabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

r. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang dan menambah Aset sebesar jumlah yang tercantum dalam BAST. Pengakuan Aset Tetap akibat dari pemenuhan kewajiban lainnya berdasarkan adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai pengurang piutang dan Pendapatan Lain-lain yang sah-LO. Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban lainnya selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

#### 4.3.6.8 Amortisasi Aset

a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.

b. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai Tabel Amortisasi Aset Tak Berwujud berikut ini.

| Uraian | Masa Manfaat |
|---|---|
| *Software* Komputer | 5 |
| Lisensi | 10 |
| *Franchise* | 5 |
| Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I | 70 |
| Hak Paten Sederhana | 10 |
| Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II | 50 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan | 25 |
| Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan | 50 |
| Hak Ekonomi Prosedur Fonogram | 50 |
| Hak ekonomi Lembaga Penyiaran | 20 |
| Paten Biasa | 20 |

| Uraian | Masa Manfaat |
|---|---|
| Merek | 10 |
| Desain Industri | 10 |
| Rahasia Dagang | 10 |
| Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 10 |
| Perlindungan Varietas Tanaman Semusim | 20 |
| Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Peta RBI Skala Kecil (1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000) | 20 |
| Peta BRI Skala Menengah (1:100.000, 1:50.000, 1:25.000) | 10 |
| Peta RBI Skala Besar (1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, 1:1.000) | 5 |
| Peta LLN Skala Kecil (1:500.000, 1:250.000) | 20 |
| Peta LLN Skala Menengah (1:50.000) | 12 |
| Peta LPI Skala Kecil (1:250.000) | 20 |
| Peta LPI Skala Menengah (1:50.000, 1:25.000) | 12 |
| Peta LPI Skala Besar (1:10.000) | 5 |
| Peta Batas Wilayah Administrasi | 10 |
| Peta Delineasi Batas Wilayah Administrasi | 5 |
| Peta Batas Negara | 10 |
| Data Pasang Surut | 20 |
| Data GNSS | 20 |
| Data Gaya berat | 20 |
| Data Pengukuran Sifat Datar Teliti | 10 |
| Citra Satelit Resolusi Tinggi (4 meter atau lebih halus) | 5 |
| Citra Satelit Resolusi Sedang (lebih kasar dari 4 meter) | 10 |
| Foto Udara | 5 |
| Peta Tematik Morfometri | 5 |
| Peta Tematik Penutup Lahan | 5 |
| Peta Tematik Sistem Lahan | 5 |
| Peta Tematik Lainnya | 5 |
| Atlas | 10 |

c. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat Aset Tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

d. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.

#### 4.3.6.9 Kewajiban

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau Peraturan Perundang-undangan.
d. Kewajiban Pemerintah Daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
    1) Kewajiban Jangka Pendek
        a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; dan
        b) Kewajiban Jangka Pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima di muka, utang kepada pegawai, dan Kewajiban jangka pendek lainnya. Misalnya, Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi; Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
    2) Kewajiban Jangka Panjang
        a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
        b) Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya;

c) Utang Luar Negeri Pemerintah Daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundangan-undangan.

e. Pengukuran Kewajiban

1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat pertama kali transaksi berlangsung; Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut;
2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong, tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan; Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong; Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain; Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
3) Utang Bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi, tetapi belum dibayar oleh pemerintah; Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak;
4) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
5) Pendapatan Diterima di Muka dicatat sebesar kas yang telah diterima, tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang / jasa belum diserahkan oleh pemerintah;
6) Utang Belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca; Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan, 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon, tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan;

7) Utang Jangka Pendek Lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun; Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya, utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer;
8) Utang Jaminan dicatat sebesar kas yang disepakati oleh Pihak Ketiga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
9) Utang Dalam Negeri (utang yang diperoleh dari dalam negeri) merupakan komitmen maksimum atas jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

f. Kewajiban kontingensi merupakan:
1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti, dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa mendatang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau
2) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) bahwa Pemerintah Daerah akan mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

### 4.3.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas dalam Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

a. Ekuitas awal;
b. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
   1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
   2) Perubahan nilai Aset Tetap akibat revaluasi Aset Tetap.
c. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; dan
d. Ekuitas Akhir.

### 4.3.8 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dan dijabarkan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

## 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 menggunakan basis akrual yang mengacu pada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, tetapi telah diupayakan untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan Peraturan Perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment*" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya, semua pencatatan "*auditable*", sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.

# BAB V

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

# BAB V
# PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

## 5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

### 5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp74.946.825.859.889,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp72.952.092.296.153,00 atau 97,34%.

Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.886.558.088.431,00 atau 2,65% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp71.065.534.207.722,00.

Realisasi Pendapatan Daerah (PD) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp50.742.019.272.748,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp21.620.905.241.381,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp589.167.782.024,00. Rincian realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2024 | | | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4:3) | 6 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 50.466.744.400.403 | 50.742.019.272.748 | 100,55 | 49.139.745.715.234 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 23.776.426.806.863 | 21.620.905.241.381 | 90,93 | 20.159.634.672.034 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 703.654.652.623 | 589.167.782.024 | 83,73 | 1.766.153.820.454 |
| **Jumlah** | | **74.946.825.859.889** | **72.952.092.296.153** | **97,34** | **71.065.534.207.722** |

#### 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp50.466.744.400.403,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun 2024 sebesar Rp50.742.019.272.748,00 atau 100,55%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun 2024 terdiri atas realisasi Pajak Daerah sebesar Rp44.448.074.892.860,00 atau 98,82%, realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp713.719.914.820,00 atau 110,18%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp653.700.898.761,00 atau 103,04%, dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp4.926.523.566.307,00 atau 117,17%. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

#### 5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya diturunkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp44.448.074.892.860,00 atau 98,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp44.980.000.000.000,00. Rincian realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 | | | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 9.409.750.000.000 | 9.650.927.358.671 | 102,56 | 9.416.563.568.950 |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 6.250.000.000.000 | 6.644.445.800.800 | 106,31 | 6.643.605.545.100 |
| 3 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 1.700.000.000.000 | 1.795.757.431.976 | 105,63 | 1.680.813.642.600 |
| 4 | Pajak Rokok | 900.000.000.000 | 883.986.065.225 | 98,22 | 855.303.949.037 |
| 5 | Pajak Reklame | 700.000.000.000 | 961.372.732.703 | 137,34 | 975.808.842.214 |
| 6 | Pajak Air Tanah | 90.000.000.000 | 87.684.846.585 | 97,43 | 83.718.755.701 |
| 7 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 10.000.000.000.000 | 9.954.931.380.113 | 99,55 | 9.048.682.494.705 |
| 8 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 8.000.000.000.000 | 6.159.796.789.591 | 77,00 | 6.910.215.589.931 |
| 9 | Pajak Alat Berat | 250.000.000 | 5.978.000 | 2,39 | 0 |
| 10 | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 7.930.000.000.000 | 8.309.166.509.196 | 104,78 | 7.901.769.284.595 |
| 10.1 | Pajak Hotel (1 – 4 Jan 2024) | 29.875.332.000 | 372.067.855 | 1,25 | 1.898.844.468.744 |

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 | | | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 10.2 | Pajak Restoran (1 – 4 Jan 2024) | 66.389.332.000 | 2.227.532.305 | 3,36 | 3.949.482.690.461 |
| 10.3 | Pajak Hiburan (1 – 4 Jan 2024) | 10.695.498.000 | 308.732.635 | 2,89 | 686.623.192.014 |
| 10.4 | Pajak Penerangan Jalan (1 – 4 Jan 2024) | 14.938.000.000 | 0 | 0 | 889.487.806.146 |
| 10.5 | Pajak Parkir (1 – 4 Jan 2024) | 8.714.000.000 | 65.531.100 | 0,75 | 477.331.127.230 |
| 10.6 | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) (5 Jan - 31 Desember 2024) | 7.799.387.838.000 | 8.306.192.645.301 | 106,50 | 0 |
| | **JUMLAH (1 s.d 10)** | **44.980.000.000.000** | **44.448.074.892.860** | **98.82** | **43.516.481.672.833** |

Penjelasan mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

**a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor, Subjek PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor sedangkan Wajib PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi ditetapkan secara progresif sebesar: 2% (dua persen) untuk kendaraan bermotor pertama, 2,5% (dua koma lima persen) untuk kendaraan bermotor kedua, 3% (tiga persen) untuk kendaraan bermotor ketiga dan seterusnya meningkat sebesar 0,5% sampai dengan kendaraan ke tujuh belas dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen). Untuk kendaraan ke delapan belas dan selanjutnya menggunakan tarif 10%. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dan tidak dikenakan pajak progresif.

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp9.650.927.358.671,00 atau 102,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9.409.750.000.000,00. Dengan demikian realisasi PKB Tahun Anggaran 2024 telah melampaui target sebesar Rp241.177.358.671,00 atau 2,56%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp234.363.789.721,00 atau 2,49% jika dibandingkan dengan realisasi PKB Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.416.563.568.950,00. Rincian Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.3
Rincian Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun Anggaran 2024

| No | Nama Akun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKB-Mobil Penumpang-Sedan | 816.007.000.000 | 854.613.915.200 | 104,73 |
| 2 | PKB-Mobil Penumpang-Jeep | 1.579.841.000.000 | 1.606.987.139.700 | 101,72 |
| 3 | PKB-Mobil Penumpang-Minibus | 5.060.722.000.000 | 5.190.269.253.336 | 102,56 |
| 4 | PKB-Mobil Bus-Microbus | 61.608.000.000 | 70.242.352.150 | 114,01 |
| 5 | PKB-Mobil Bus-Bus | 7.626.000.000 | 7.266.646.100 | 95,29 |
| 6 | PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up | 215.465.000.000 | 227.580.424.300 | 105,62 |
| 7 | PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truk | 73.467.000.000 | 72.912.772.400 | 99,25 |
| 8 | PKB-Mobil Barang/Beban-Truk | 34.109.000.000 | 39.312.507.600 | 115,26 |
| 9 | PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van | 283.585.000.000 | 276.915.072.425 | 97,65 |
| 10 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua | 985.346.000.000 | 1.004.515.751.260 | 101,95 |
| 11 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga | 1.605.000.000 | 1.520.748.000 | 94,75 |
| 12 | PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 13 | PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar | 290.129.000.000 | 298.790.776.200 | 102,99 |
| 14 | PKB-Mobil Roda Tiga | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 15 | PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 16 | PKB-Mobil Barang-Roda Tiga | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 17 | PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 18 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang | 40.000.000 | 0 | 0 |
| | **JUMLAH** | **9.409.750.000.000** | **9.650.927.358.671** | **102,56** |

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Tahun Anggaran 2024, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2024:

1) Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 426 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
2) Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0098 Tahun 2024 tentang penghapusan sanksi

administrasi secara jabatan untuk jenis PKB dan BBNKB penyerahan pertama sebagai salah satu upaya optimalisasi penerimaan PKB di penghujung Tahun 2024;

3) *Monitoring* dan evaluasi secara berkala atas capaian penerimaan PKB pada seluruh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UPPPKB);
4) Pelaksanaan kegiatan Razia Gabungan dengan mengikutsertakan peran serta Media Massa/Media Sosial secara masif;
5) Sosialisasi secara masif terkait penggunaan aplikasi SIGNAL dan pembayaran pajak menggunakan teknologi QRIS bagi seluruh Wajib Pajak;
6) Mengusulkan inovasi pelayanan pembayaran SKP secara *online* sebagai salah satu pengembangan sistem PKB dan BBNKB DKI Jakarta; dan
7) Penambahan sarana pembayaran PKB dan BBNKB, melalui pembukaan gerai samsat baru pada beberapa tempat di Jakarta.

Walaupun realisasi PKB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, bahwa Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB, selanjutnya bersamaan dengan pertumbuhan penjualan dan kepemilikan kendaraan Listrik yang mendapatkan serangkaian insentif fiskal dari Pemerintah Pusat dan Daerah, turut mempengaruhi laju realisasi penerimaan PKB secara agregat dan jangka panjang; dan
b. Mengacu pada data Gabungan Industri kendaraan bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan *wholesales* (pabrik ke dealer) kendaraan bermotor secara nasional mengalami penurunan hingga 13,9% secara *year on year* (YoY) sepanjang Tahun 2024 kemudian pada periode yang sama, penjualan retail (dealer ke konsumen) kendaraan bermotor nasional juga menyusut 8,4% secara *year on year* (YoY).

**b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kendaraan bermotor adalah semua

kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Subjek BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor sedangkan Wajib BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen). Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB.

Realisasi BBNKB Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.644.445.800.800,00 atau 106,31% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.250.000.000.000,00, dengan demikian realisasi BBNKB Tahun Anggaran 2024 telah melampaui target sebesar Rp394.445.800.800,00 atau 5,94%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp840.255.700,00 atau 0,01% jika dibandingkan dengan realisasi BBNKB Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.643.605.545.100,00. Rincian BBNKB Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.4

Rincian BBNKB Tahun Anggaran 2024

| No | Nama Akun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan | 320.973.000.000 | 356.853.073.800 | 111.18 |
| 2 | BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep | 1.032.265.000.000 | 1.030.476.624.200 | 99.83 |
| 3 | BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus | 3.522.116.000.000 | 3.771.599.264.800 | 107.08 |
| 4 | BBNKB-Mobil Bus-Microbus | 57.430.000.000 | 78.982.254.500 | 137.53 |
| 5 | BBNKB-Mobil Bus-Bus | 6.104.000.000 | 7.093.414.000 | 116.21 |
| 6 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up | 223.979.000.000 | 254.618.152.000 | 113.68 |
| 7 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truk | 17.025.000.000 | 18.764.822.500 | 110.22 |
| 8 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truk | 15.169.000.000 | 19.726.036.800 | 130.04 |
| 9 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van | 97.246.000.000 | 103.841.900.500 | 106.78 |
| 10 | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua | 641.951.000.000 | 658.585.493.600 | 102.59 |
| 11 | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga | 2.128.000.000 | 1.562.077.100 | 73.41 |
| 12 | BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air | 10.000.000 | 0 | 0 |

| No | Nama Akun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 13 | BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat | 313.554.000.000 | 342.342.687.000 | 109.18 |
| 14 | BBNKB-Mobil Roda Tiga | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 15 | BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 16 | BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 17 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 18 | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang | 10.000.000 | 0 | 0 |
| **JUMLAH** | | **6.250.000.000.000** | **6.644.445.800.800** | **106,31** |

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Tahun Anggaran 2024, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2024 antara lain:

1) Proses percepatan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagai dasar *APM, Dealer, Leasing* untuk menerbitkan faktur pajak, menjadi hal yang patut untuk tetap dipertahankan;
2) Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024 tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan Sebesar 0% (Nol Persen) untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebagai upaya tertib administrasi identitas Wajib Pajak Kendaraan Bermotor;
3) Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 426 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4) Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0098 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama; dan
5) Mensosialisasikan secara masif penggunaan aplikasi SIGNAL dan pembayaran pajak menggunakan teknologi QRIS bagi seluruh Wajib Pajak.

Walaupun realisasi Pajak BBNKB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

1) belum pulihnya daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor baru yang disebabkan oleh kecenderungan masyarakat masih

memprioritaskan pada kebutuhan dasar, perlambatan ekonomi nasional dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia pada akhir 2023; dan

2) asumsi *Loss Potency* penerimaan BBNKB yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan kendaraan Listrik yang mendapatkan insentif fiskal mengacu pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 mengamanatkan Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai ditetapkan 0% dari DPP PKB dan DPP BBNKB.

c. **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

Objek PBBKB merupakan penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor, Subjek PBBKB merupakan konsumen BBKB sedangkan Wajib PBBKB merupakan orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.

Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Dasar Pengenaan PBBKB merupakan nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Realisasi PBBKB Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.795.757.431.976,00 atau 105,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.700.000.000.000,00, dengan demikian realisasi PBBKB melampaui target sebesar Rp95.757.431.976,00 atau 5,63%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp114.943.789.376,00 atau 6,84% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.680.813.642.600,00. Rincian PBBKB Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.5

Rincian PBBKB Tahun Anggaran 2024

| No | Nama Akun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBBKB Bahan Bakar Bensin | 1.699.970.000.000 | 1.795.757.431.976 | 105,63 |
| 2 | PBBKB Bahan Bakar Solar | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 3 | PBBKB Bahan Bakar Gas | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 4 | PBBKB Bahan Bakar Lainnya | 10.000.000 | 0 | 0 |
| **JUMLAH** | | **1.700.000.000.000** | **1.795.757.431.976** | **105,63** |

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Tahun Anggaran 2024, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2024 antara lain sebagai berikut:

1) Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai salah satu optimalisasi Penerimaan PBBKB di Tahun 2024;
2) Ekstensifikasi melalui pendataan Perusahaan Niaga Bahan Bakar Minyak/BBM/Hasil Olahan, khususnya terhadap perusahaan yang telah memiliki IUNU;
3) Memaksimalkan pelaporan wajib pajak secara *online* (pajak *online*), khususnya terhadap badan usaha dengan kontribusi penerimaan PBBKB terbesar;
4) Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan BPH Migas Kementerian ESDM dalam rangka penelusuran data pembanding terkait dengan jumlah volume pendistribusian BBM di DKI Jakarta; dan
5) Penyampaian himbauan kepada para WP PBBKB untuk menyampaikan laporan secara baik dan benar.

Walaupun realisasi PBBKB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

1) Peralihan penggunaan bahan bakar minyak ke penggunaan tenaga listrik sebagai penggerak kendaraan bermotor menjadi tantangan dalam pemungutan PBBKB; dan
2) Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bahan Bakar Minyak untuk keperluan industri merupakan salah satu objek pengecualian pemungutan PBBKB sehingga hal tersebut menjadi *loss potency* terhadap penerimaan PBBKB.

d. **Pajak Rokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak

Rokok merupakan jenis pajak yang secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk menarik cukai dari produksi rokok di Indonesia.

Secara umum mekanisme pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dan disetorkan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Kas Negara serta dilakukan pengelolaan penyetoran ke RKUD Provinsi oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI. Pembayaran Pajak Rokok ditetapkan Melalui Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, setiap tahun ditetapkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi/Daerah berdasarkan proporsi jumlah penduduk per Provinsi/Daerah.

Realisasi Pajak Rokok Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp883.986.065.225,00 atau 98,22% dari target yang ditetapkan sebesar Rp900.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Rokok tidak mencapai target sebesar Rp16.013.934.775,00 atau 1,87%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.682.116.188,00 atau 3,35% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp855.303.949.037,00.

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Rokok di Tahun Anggaran 2024, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2024 antara lain sebagai berikut:

1) Percepatan pembuatan Surat Kuasa Gubernur dan berkas penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi, Kesepakatan dan Kompilasi Kesepakatan Kontribusi daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2023; dan
2) Koordinasi intensif sehingga transfer pajak rokok dan validasi penerimaan pajak rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap triwulan dapat direalisasikan tepat waktu.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pajak rokok Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1) Sulitnya mendapatkan data riil pemungutan pajak rokok yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
2) Turunnya daya beli dan keinginan masyarakat terhadap rokok, sebagai dampak dari pola hidup masyarakat untuk hidup sehat dan harga rokok yang secara perlahan mulai naik.

e. **Pajak Reklame**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Objek Pajak Reklame meliputi: reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/*slide*; dan reklame peragaan.

Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Sedangkan Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp961.372.732.703,00 atau 137,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp700.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Reklame melebihi target sebesar Rp261.372.732.703,00 atau 37,34%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.436.109.511,00 atau 1,48% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp975.808.842.214,00.

Rincian Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.6

Rincian Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024

| No | Nama Akun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron | 635.506.000.000 | 879.783.519.210 | 138,44 |
| 2 | Pajak Reklame Kain | 30.222.000.000 | 42.247.958.840 | 139,79 |
| 3 | Pajak Reklame Melekat/Stiker | 258.000.000 | 283.660.000 | 109,95 |
| 4 | Pajak Reklame Selebaran | 98.000.000 | 67.109.375 | 68,48 |
| 5 | Pajak Reklame Berjalan | 31.765.000.000 | 36.199.448.028 | 113,96 |
| 6 | Pajak Reklame Udara | 104.000.000 | 130.825.000 | 125,79 |
| 7 | Pajak Reklame Apung | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| 8 | Pajak Reklame Suara | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| 9 | Pajak Reklame Film/Slide | 1.770.000.000 | 2.237.319.500 | 126,40 |
| 10 | Pajak Reklame Peragaan | 257.000.000 | 422.892.750 | 164,55 |
| **JUMLAH** | | **700.000.000.000** | **961.372.732.703** | **137,34** |

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Reklame di Tahun Anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2024 antara lain sebagai berikut:

1) Penerbitan aturan turunan sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024;
2) Penagihan untuk piutang SKPD pajak reklame yang terbit sejak 01 Januari 2021 sampai dengan sekarang;
3) Ekstensifikasi melalui pendataan reklame perkantoran, insidental dan reklame berjalan pada kendaraan;
4) Penyampaian himbauan reklame yang belum daftar ulang (BDU) kelompok tertentu;
5) Simplifikasi persyaratan pendaftaran/perpanjangan reklame guna mendorong Wajib Pajak melakukan pendaftaran dan perpanjangan secara daring melalui pajakonline.jakarta.go.id;
6) Simplifikasi persyaratan, prosedur penetapan dan pembatalan Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame guna mendorong pertumbuhan Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Bapenda Nomor 1588 Tahun 2023;
7) Pengimplementasian sistem e-Reklame pada tanggal 01 Mei 2024 guna mendorong digitalisasi pelayanan pemungutan pajak reklame;
8) Sosialisasi dan penyamaan persepsi tentang pengenaan pajak reklame kepada *stakeholders* atas reklame pengenal usaha; reklame dalam ruang; hingga dan penyelenggaraan reklame kegiatan politik; dan
9) Melakukan penambahan dan/atau perubahan nama jalan reklame yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2020.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pajak reklame Tahun Anggaran 2024 antara lain kecenderungan penyelenggara reklame memilih media sosial sebagai sarana penyelenggaraan/penayangan reklame/iklan, dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

f. **Pajak Air Tanah (PAT)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sedangkan Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah sedangkan Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp87.684.846.585,00 atau 97,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp90.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Air Tanah tidak mencapai target sebesar Rp2.315.153.415,00 atau 2,57%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.966.090.884,00 atau 4,74% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Pemanfaatan Air Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp83.718.755.701,00.

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Tahun Anggaran 2024, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2024 antara lain sebagai berikut:

1) ekstensifikasi melalui pendataan dan pengukuhan wajib pajak yang bergerak di sektor bisnis dan komersial seperti hotel, restoran besar, dan perkantoran;
2) koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk percepatan pengklasifikasian (*mapping*) objek maupun penyesuaian ulang data/klasifikasi ulang objek pajak berdasarkan Pergub No. 94 Tahun 2021;
3) penagihan atas piutang SKPD Pajak Air Tanah khususnya SKPD yang terbit sejak 01 Januari 2021 sampai dengan sekarang;
4) verifikasi objek yang telah dilakukan pengklasifikasian objek atas jenis pengusahaan dan kualitas air oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta guna mengidentifikasi objek aktif, tidak aktif, tutup, tidak ditemukan dan keadaan objek lainnya; dan
5) pemutakhiran data wajib pajak dengan memasukkan *email* wajib pajak untuk percepatan penyampaian SKPD secara elektronik.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2024, antara lain:

1) adanya Wajib Pajak yang hanya menggunakan air tanah sebagai cadangan, apabila air perpipaan mati/tidak stabil, sehingga penggunaan/pemanfaatan atas air tanah seminimal mungkin yang mempengaruhi nilai ketetapan pajaknya; dan

2) adanya pembatasan penggunaan/pemanfaatan air tanah oleh Wajib Pajak, karena buruknya kualitas air tanah, terutama terhadap objek air tanah yang berada di lokasi dekat dengan daerah pesisir pantai/laut.

g. **Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBBP2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Objek PBBP2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Objek PBBP2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, Subjek PBBP2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan sedangkan Wajib PBBP2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBBP2 dan ditetapkan setiap 1 (satu) tahun.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tarif PBBP2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Sementara untuk tarif PBBP2 lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).

Realisasi PBBP2 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.954.931.380.113,00 atau 99,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp906.248.885.408,00 atau 10,02% jika dibandingkan dengan realisasi PBBP2 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.048.682.494.705,00.

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan PBBP2 di Tahun Anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah

melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2024 antara lain sebagai berikut:

1) Penerbitan aturan turunan sebagai amanat dari Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 yang di dalamnya memuat kebijakan penetapan, pembayaran, dan juga memuat insentif fiskal berupa keringanan, pengurangan, pembebasan untuk PBBP2 Tahun 2024 dan tahun-tahun pajak sebelumnya.
2) Penagihan pasif dan penagihan aktif PBBP2 yang terdiri dari upaya penagihan sebagai berikut:
    a) himbauan terhadap Wajib Pajak dengan ketetapan pajak per tahun sebesar 100 juta ke atas untuk melakukan permohonan PBBP2 secara angsuran berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023;
    b) pemberian teguran terhadap Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran s.d 31 Desember 2024 dengan pelibatan Lurah, Camat, Walikota/Bupati di kota administrasi; dan
    c) penagihan aktif dengan surat paksa dan penagihan melibatkan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
3) Penambahan kanal dan metode pembayaran PBBP2 untuk memudahkan Wajib Pajak melakukan pembayaran secara digital seperti melalui QRIS.
4) Pemutakhiran data PBBP2 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah melalui Sistem Informasi Geospasial.
5) Simplifikasi dan digitalisasi pelayanan pengurangan dan pembebasan PBBP2 yang diajukan secara daring melalui kanal pajakonline.jakarta.go.id.
6) Pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pendataan NIK dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek PBBP2 oleh petugas Kelurahan guna mendapatkan data narahubung Wajib PBBP2.

Dalam pelaksanaan pemungutan PBBP2 di Tahun 2024, terdapat kendala yang menghambat pencapaian. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan PBBP2 disebabkan adanya penurunan kemampuan ekonomi untuk Badan dan Orang Pribadi yang mengalami kesulitan melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran PBBP2.

h. **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang meliputi: a. pemindahan hak karena: jual beli; tukar-menukar; hibah; hibah wasiat; waris; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; penggabungan usaha; peleburan usaha; pemekaran usaha; atau hadiah. b. pemberian hak baru karena: kelanjutan pelepasan hak; atau di luar pelepasan hak.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB (setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak) dengan tarif BPHTB.

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.159.796.786.591,00 atau 77,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.000.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp750.418.800.340,00 atau 10,86% jika dibandingkan dengan realisasi PBBP2 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.910.215.589.931,00.

Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.7

Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2024

| No | Nama Akun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BPHTB-Pemindahan Hak | 7.999.990.000.000 | 6.159.796.789.591 | 77,00 |
| 2 | BPHTB-Pemberian Hak Baru | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| **JUMLAH** | | **8.000.000.000.000** | **6.159.796.789.591** | **77,00** |

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan BPHTB di Tahun Anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2024 antara lain sebagai berikut, antara lain:

1) penerbitan aturan turunan sebagai amanat dari Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 terkait implementasi perubahan NPOPTKP dan pengecualian BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
2) pengembangan sistem BPHTB secara elektronik (e-BPHTB) sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelaporan, Pelayanan, dan Pengawasan BPHTB secara Elektronik untuk efisiensi dan efektivitas pemungutan BPHTB;
3) penetapan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembebasan BPHTB terhadap Perolehan Hak Pertama Kali dengan Nilai Perolehan Objek Pajak sampai dengan Nilai Tertentu yang berkontribusi atas penerimaan BPHTB dari objek non-tapak;
4) penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemecahan SPPT PBBP2 atas Satuan Rumah Susun untuk mendorong percepatan penerimaan BPHTB sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh hak-hak pertanahannya; dan
5) kemudahan pelaporan BPHTB yang dilakukan oleh WNA berdasarkan dokumen keimigrasian berupa KITAP atau paspor.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target BPHTB Tahun Anggaran 2024, antara lain:

1) Adanya penurunan penjualan properti di wilayah DKI Jakarta Tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya;
2) Adanya kenaikan pemberian insentif pembebasan BPHTB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023, Pembebasan BPHTB berlaku untuk objek Perolehan Hak Pertama Kali berupa Rumah Tapak dengan NPOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang tidak mensyaratkan Wajib Pajak harus berdomisili di DKI Jakarta paling sedikit selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Daerah atau Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang (berbeda dengan Peraturan Gubernur Sebelumnya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2017); dan
3) Adanya perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 sebagai

amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang sebelumnya sebesar Rp80.000.000 untuk transaksi jual beli dan Rp350.000.000 untuk transaksi waris dan hibah wasiat menjadi Rp250.000.000,00 untuk transaksi jual beli dan Rp1.000.000.000 untuk transaksi waris dan hibah wasiat.

i. **Pajak Alat Berat**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Alat Berat (PAB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan kehutanan, dan pertambangan.

Dasar pengenaan Pajak Alat Berat merupakan nilai jual alat berat yang ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum alat berat yang bersangkutan. Tarif Pajak Alat Berat yang ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Realisasi Pajak Alat Berat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.978.000,00 atau 2,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp250.000.000,00, dengan demikian realisasi PAB tidak mencapai target sebesar Rp244.022.000,00 atau 97,61%. Realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, karena PAB baru di berlakukan pada Tahun 2024.

j. **Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan dalam nomenklatur nama untuk beberapa jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir menjadi pajak atas barang dan jasa tertentu. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

**1) Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur nama jenis pajak dari Pajak Hotel menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan. Perubahan ini berlaku sejak 5 Januari 2024. Untuk periode 1 hingga 4 Januari 2024, nomenklatur nama yang digunakan masih Pajak Hotel dengan realisasi penerimaan sebesar Rp372.067.855,00, atau 1,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp29.875.332.000,00

**2) Pajak Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur nama jenis pajak dari Pajak Restoran menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Makan dan/atau Minuman. Perubahan ini berlaku sejak 5 Januari 2024. Untuk periode 1 hingga 4 Januari 2024, nomenklatur nama yang digunakan masih Pajak Restoran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp2.227.532.305,00 atau 3,36% dari target yang ditetapkan sebesar Rp66.389.332.000,00.

**3) Pajak Hiburan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, Pajak Hiburan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang berlaku sejak 5 Januari 2024 Selain perubahan nomenklatur, tarif pajak juga mengalami penyesuaian dari 25% menjadi paling rendah 40% dan paling tinggi 75% Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Untuk periode 1 hingga 4 Januari 2024, nomenklatur yang digunakan masih Pajak Hiburan dengan realisasi sebesar Rp308.732.635,00 atau 2,89% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.695.498.000.00,

**4) Pajak Penerangan Jalan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur nama jenis pajak dari Pajak Penerangan Jalan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Tenaga Listrik. Perubahan ini berlaku sejak 5 Januari 2024. Untuk periode 1 hingga 4 Januari 2024, nomenklatur nama yang digunakan masih Pajak Penerangan Jalan dan tidak terdapat realisasi penerimaan dari target sebesar Rp14.938.000.000,00 dikarenakan jatuh tempo pembayaran terjadi pada tanggal 15 bulan berikutnya. Pajak Penerangan Jalan hanya memiliki satu Wajib Pajak, yaitu PT PLN.

**5) Pajak Parkir**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur nama jenis pajak dari Pajak Parkir menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perparkiran. Perubahan ini berlaku sejak 5 Januari 2024. Selain perubahan nomenklatur, tarif pajak juga mengalami penyesuaian dari 20% menjadi 10%. Untuk periode 1 hingga 4 Januari 2024, nomenklatur nama yang digunakan masih Pajak Parkir dengan realisasi penerimaan sebesar Rp65.531.100,00, atau 0,75% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.714.000.000,00.

**6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Periode 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disebut PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu dikenakan atas penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

a) Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran; Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran;
b) Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik;
c) Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya;
d) Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor; dan
e) Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Sementara untuk Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu sedangkan Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar,

dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen), konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.306.192.645.301,00 atau 106,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.799.387.838.000,00.

Rincian penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.8

Rincian penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Tahun Anggaran 2024

| No | Nama Akun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBJT-Makanan dan Minuman | 4.133.610.668.000 | 4.277.305.948.355 | 103,48 |
| 2 | PBJT-Tenaga Listrik | 885.062.000.000 | 950.005.521.197 | 107,34 |
| 3 | PBJT-Jasa Perhotelan | 1.870.124.668.000 | 2.123.857.788.041 | 113,57 |
| 4 | PBJT-Jasa Parkir | 321.286.000.000 | 330.258.787.242 | 102,79 |
| 5 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 589.304.502.000 | 624.764.600.466 | 106,02 |
| **JUMLAH** | | **7.799.387.838.000** | **8.306.192.645.301** | **106,50** |

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Tahun Anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2024 antara lain sebagai berikut:

1) *Monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap Wajib yang Pajak tidak melakukan setoran masa dan tidak melakukan pelaporan SPTPD;
2) Kegiatan *monitoring* dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
3) Implementasi Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Analisa Setoran Masa Pajak;
4) Pengimplementasian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Hotel yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT), termasuk pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi secara pemeriksaan secara berkala untuk memastikan proses pemeriksaan

sesuai ketentuan dan target pemeriksaan pajak daerah Tahun 2024 tercapai;

5) Penagihan atas tunggakan SKPDKB objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu sekaligus upaya pemasangan stiker/plang atas objek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan daerah;
6) Penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
7) Penggiatan kembali upaya *tax clearance* sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020; dan
8) Optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak *online* sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib pajak hotel berdasarkan Pergub No. 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 2 Tahun 2022.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target PBJT Tahun Anggaran 2024, antara lain:

1) Pada bulan Desember 2023, aktivitas perhotelan dan tingkat hunian hotel di Jakarta cenderung mengalami perlambatan karena libur akhir tahun bisnis, dan pelaku bisnis cenderung menunggu dan melihat situasi secara nasional, terutama dengan persiapan pemilihan presiden yang sedang berlangsung;
2) Adanya kecenderungan masyarakat untuk memilih sewa apartemen dibandingkan memanfaatkan hotel sebagai sarana menginap;
3) Terdapat beberapa objek pajak yang tahun sebelumnya masih dipungut pajak restoran, namun saat ini dipungut PPN karena amanat UU HKPD;
4) Makin berkembangnya usaha restoran dan kuliner di daerah penyangga DKI Jakarta;
5) Stagnasi pada pertumbuhan objek pajak hiburan baru karena kemampuan daya beli masyarakat dan dunia bisnis khususnya sektor pariwisata yang masih belum sepenuhnya pulih karena pandemi;
6) Perkembangan yang semakin dinamis pada industri hiburan malam salah satunya bentuk transformasi dan pergeseran dari diskotek, klub dan bar konvensional menjadi restoran formal yang menyediakan hiburan malam berupa pentas musik hidup/DJ, konser band;
7) Belum tertibnya administrasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan PT. PLN (Persero) Distribusi Banten terkait data pendukung pelaporan SPTPD; dan

8) Pelaksanaan penggalian potensi objek PPJ baru di antaranya objek tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri belum optimal hal ini disebabkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pemungutan PPJ atas objek dimaksud.

**5.1.1.1.2 Retribusi Daerah**

Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 Rp713.719.914.820,00 atau 110,18% dari anggaran sebesar Rp647.749.998.376,00. Dengan demikian realisasi melampaui target sebesar Rp65.969.916.444,00 atau 10,18%. Apabila realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp454.697.560.911,00, maka pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp259.022.353.909,00 atau 56,97%. Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 termasuk realisasi Retribusi Daerah pada BLUD sebesar Rp605.179.943.597,00.

Unit pemungut retribusi melakukan berbagai upaya intensif yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan seperti:

a. Melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024;
b. Menaikkan tarif retribusi untuk beberapa objek retribusi sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024;
c. Menambah objek retribusi baru sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024;
d. Melakukan penagihan – penagihan secara aktif terhadap piutang tahun – tahun sebelumnya;
e. Menerapkan *Banking System* dan transaksi non tunai dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah; dan
f. Menjalin hubungan baik dengan pengguna jasa, kolaborasi dan promosi dengan *travel agent* serta *tenant* (Wajib Retribusi).

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.9

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Jenis Pendapatan | Tahun Anggaran 2024 | | % | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Retribusi Jasa Umum | 212.194.331.357 | 242.006.204.556 | 114,05 | 130.712.761.587 |
| 2 | Retribusi Jasa Usaha | 160.541.330.737 | 200.120.308.890 | 124,65 | 87.591.704.800 |
| 3 | Retribusi Perizinan Tertentu | 275.014.336.282 | 271.593.401.374 | 98,76 | 236.393.094.524 |
| **Jumlah** | | **647.749.998.376** | **713.719.914.820** | **110,18** | **454.697.560.911** |

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

**a. Retribusi Jasa Umum**

Realisasi Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp242.006.204.556,00 atau 114,05% dari anggaran sebesar Rp212.194.331.357,00. Dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum melampaui target sebesar Rp29.811.873.199,00 atau 14,05%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 Rp130.712.761.587,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp111.293.442.969,00 atau 85,14%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.10

Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum

Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Jenis Pendapatan | Tahun Anggaran 2024 | | % | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 115.189.739.636 | 156.319.434.913 | 135,71 | 0 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 73.142.719.200 | 71.179.826.562 | 97,32 | 56.637.395.482 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 301.320.000 | 296.055.000 | 98,25 | 13.709.730.000 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 15.442.882.458 | 13.149.732.518 | 85,15 | 0 |
| 5 | Retribusi Pelayanan Pasar | 7.645.500.000 | 589.085.500 | 7,70 | 1.091.168.400 |
| 6 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 373.366.000 | 373.366.000 | 100,00 | 49.360.885.500 |
| 7 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 98.704.063 | 98.704.063 | 100,00 | 1.669.692.705 |

| No | Jenis Pendapatan | Tahun Anggaran 2024 | | % | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 8 | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta | 0 | 0 | 0 | 228.000 |
| 9 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 100.000 | 0 | 0 | 8.243.661.500 |
| **Jumlah** | | **212.194.331.357** | **242.006.204.556** | **114,05** | **130.712.761.587** |

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

**1) Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp115.189.739.636,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp156.319.434.913,00 atau 135,71%. Dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp41.129.695.277,00 atau 35,71%. Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD untuk bulan Januari sampai dengan Mei 2024 sebesar Rp128.225.692.751,00, masih disajikan sebagai Lain-Lain PAD yang Sah. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan retribusi pada awal tahun telah disahkan dengan diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD. Meskipun demikian, seluruh Retribusi Pelayanan Kesehatan telah disajikan sebagai Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional.

**2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp73.142.719.200,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp71.179.826.562,00 atau 97,32%. Dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp1.962.892.638,00 atau 2,68%. Penurunan realisasi ini karena adanya permohonan keringanan pembayaran retribusi atas pengangkutan sampah pasar dari Perumda Pasar Jaya sehingga belum terealisasinya pembayaran yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp56.637.395.482,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp14.542.431.080,00 atau 25,68%.

Beberapa upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan antara lain:

a) Pendataan Wajib Retribusi yang dilakukan secara intensif;
b) Penggunaan aplikasi *e-retribusi* dalam pendataan, penetapan, penyetoran dan pelaporan retribusi; dan
c) Adanya standarisasi pemungutan retribusi dengan mengacu kepada metode hitung yang terukur.

**3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp301.320.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp296.055.000,00 atau 98,25%. Dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tidak mencapai target sebesar Rp5.265.000,00 atau 1,75%. Hal tersebut disebabkan antara lain transisi peralihan peraturan pada Tahun Anggaran 2024 yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tidak terdapat jenis Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dianggarkan untuk mengakomodasi realisasi pada masa transisi dan target pembayaran atas piutang retribusi makam pada tahun sebelumnya.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan perpanjangan sewa tanah makam. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.709.730.000,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp13.413.675.000,00 atau 97,84 %.

**4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp15.442.882.458,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp13.149.732.518,00 atau 85,15%. Dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak

mencapai target sebesar Rp2.293.149.940,00 atau 14,85 %. Hal tersebut disebabkan di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Revitalisasi trotoar/penataan trotoar melalui kegiatan *complete street* yang menyebabkan pengurangan Satuan Ruang Parkir (SRP) pada lokasi parkir di ruang milik jalan (*onstreet*);
b) Perkembangan lalu lintas jalan dengan rambu larangan parkir;
c) Banyaknya mesin Terminal Elektronik (TPE) yang rusak dan tidak dapat diperbaiki karena tidak adanya purna jual untuk *sparepart* mesin TPE; dan
d) Pengembangan jalur sepeda.

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Upaya yang dilakukan Unit Pengelola Perparkiran Provinsi DKI Jakarta untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum antara lain:

a) Pengembangan lokasi layanan parkir;
b) Kerja sama penyelenggaraan perparkiran di lokasi penitipan atau simpul angkutan umum serta mendorong adanya digitalisasi dengan aplikasi parkir;
c) Layanan parkir kegiatan *insidentil* dan *event*; dan
d) Pengembangan jasa layanan, contoh iklan reklame mesin TPE, sewa SRP untuk layanan uji emisi dan SPKLU.

**5) Retribusi Pelayanan Pasar**

Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.645.500.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp589.085.500,00 atau 7,70%. Dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target sebesar Rp7.056.414.500,00 atau 92,30%.

Hal tersebut disebabkan di antaranya dasar penerbitan SKRD untuk retribusi Lokasi Sementara menunggu Kepgub Nomor 835 Tahun 2024 yang rilis pada tanggal 13 Desember 2024. SKRD baru dapat diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2024 menunggu kesiapan sistem ROS dalam mengakomodasi pengurangan tarif dimaksud.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.091.168.400,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp502.082.900,00 atau 46,01%. Dalam rangka optimalisasi penerimaan dari pembayaran Retribusi Pelayanan

Pasar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melakukan upaya penagihan tunggakan retribusi kepada pedagang di enam wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi sesuai Surat Tugas Kepala Dinas PPKUKM Nomor e-0145/UD.02.01 tanggal 29 Mei 2024 tentang Kegiatan Peninjauan Lapangan dan Upaya Penagihan Piutang Retribusi di Lokasi Sementara (Loksem) dan Lokasi Binaan (Lokbin).

**6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp373.366.000,00. Realisasinya mencapai Rp373.366.000,00 atau 100,00%. Dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mencapai target sebesar Rp373.366.000,00 atau 100,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp49.360.885.500, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp48.987.519.500,00 atau 99,24%.

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain:

a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan kemudahan, dan cepat dalam proses Pengujian KIR sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku;
b) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
c) Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum;
d) Melaksanakan pengujian dengan cepat dan mudah dengan sistem *Drive Thru*; dan
e) Melakukan penyuluhan kepada awak angkutan umum dan mengadakan penertiban di lapangan.

**7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp98.704.063,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp98.704.063,00 atau 100,00%. Dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini mencapai target sebesar Rp98.704.063,00 atau 100,00%.

Realisasi retribusi pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mencapai target sebesar

Rp2.550.000,00 atau 100,00% dan realisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta mencapai target sebesar Rp96.154.063,00 atau 100,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.669.692.705,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.570.988.642,00 atau 94,09%.

**8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ini tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2024 karena berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak terdapat jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena adanya pencetakan peta diganti dengan peta digital. Realisasi retribusi ini sudah beralih menjadi peta digital sehingga tidak dipungut retribusi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp228.000,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp228.000,00 atau 100,00%.

**9) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp100.000,00. Tidak terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 atau 0,00%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak mencapai target sebesar Rp100.000,00 atau 0,00%. Hal tersebut disebabkan pungutan atas retribusi pelayanan tera/tera ulang sudah dihapus berdasarkan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 dan Perda No. 1 Tahun 2024 sehingga penerimaan yang diperoleh di atas tanggal 4 Januari 2025 (setelah Perda No. 1 Tahun 2024 ditetapkan) menjadi penerimaan kode rekening baru (Retribusi Pemakaian Alat).

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.243.661.500,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.243.661.500,00 atau 100,00%.

**b. Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp160.541.330.737,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp200.120.308.890,00 atau 124,65%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp39.578.978.154,00 atau 24,65%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp87.591.704.800,00, maka terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp112.528.604.091,00 atau 128,47%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.11

Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha

Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Jenis Pendapatan | Tahun Anggaran 2024 | | % | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 29.634.486.473 | 50.908.747.221 | 171,79 | 54.905.199.122 |
| 2 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 5.656.635.800 | 2.125.684.216 | 37,58 | 595.668.080 |
| 3 | Retribusi Tempat Pelelangan | 7.030.122.688 | 6.242.085.800 | 88,79 | 0 |
| 4 | Retribusi Terminal | 1.554.855.319 | 1.945.853.583 | 125,15 | 2.430.250.462 |
| 5 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 6.264.746.400 | 3.940.580.018 | 62,90 | 0 |
| 6 | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 4.332.594.000 | 5.299.535.000 | 122,32 | 196.700.000 |
| 7 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 2.977.448.008 | 3.724.349.859 | 125,09 | 0 |
| 8 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 7.224.141.612 | 8.397.499.250 | 116,24 | 967.896.250 |
| 9 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 28.416.502.107 | 35.925.726.191 | 126,43 | 25.845.219.800 |
| 10 | Retribusi Penyeberangan di Air | 3.400.000.000 | 4.051.300.000 | 119,16 | 1.630.105.000 |
| 11 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 10.674.731.784 | 17.448.767.848 | 163,46 | 1.020.666.086 |
| 12 | Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya | 1.555.124.762 | 2.712.742.452 | 174,44 | 0 |
| 13 | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di luar Badan Jalan | 3.541.305.500 | 4.168.353.927 | 117,71 | 0 |
| 14 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga | 6.956.103.142 | 6.333.889.750 | 91,06 | 0 |

| No | Jenis Pendapatan | Tahun Anggaran 2024 | | % | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 15 | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah | 13.149.073.546 | 10.228.366.482 | 77,79 | 0 |
| 16 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 28.173.459.596 | 36.666.827.293 | 130,15 | 0 |
| **Jumlah** | | **160.541.330.737** | **200.120.308.890** | **124,65** | **87.591.704.800** |

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut:

**1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp29.634.486.473,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp50.908.747.221,00 atau 171,79%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp21.274.260.748,00 atau 71,79%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.905.199.122,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.996.451.901,00 atau 7,28%.

Kenaikan realisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a) Adanya peningkatan permohonan sewa lahan dan bangunan dari pihak swasta dan instansi di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
b) Adanya *event–event* di berbagai bidang sudah mulai diadakan dengan dicabutnya status PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) selama pandemi COVID-19;
c) Adanya peningkatan permohonan uji laboratorium untuk mutu hasil perikanan seiring peningkatan ekspor hasil perikanan;
d) Adanya pembayaran piutang dari tahun-tahun sebelumnya;
e) Dicabutnya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 per 22 November 2023; dan
f) Perubahan klasifikasi retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian laboratorium, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

a) Optimalisasi pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pelayanan;
b) Optimalisasi jasa layanan yang disediakan;
c) Optimalisasi koordinasi antar unit terkait layanan kepada wajib retribusi;
d) Membangun relasi dengan laboratorium LsPro dan laboratorium swasta;
e) Mendaftarkan/ mengajukan diri menjadi unit LsPro di bawah Kementerian Perindustrian melalui sistem SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional). Harapannya, apabila terdapat perusahaan/ masyarakat yang akan melakukan pengujian maka UPT akan ditunjuk sebagai mitra yang tersertifikasi oleh Kementerian Perindustrian; dan
f) Kolaborasi dan promosi kawasan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh SKPD terkait sebagai destinasi wisata, lokasi *shooting*, pertunjukkan seni budaya, pertandingan olahraga, seminar dan berbagai kegiatan lainnya kepada seluruh masyarakat.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh SKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain: Badan Pengelolaan Aset Daerah; Dinas Bina Marga; Dinas Sumber Daya Air; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi; Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Pertamanan dan Hutan Kota; dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

**2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp5.656.635.800,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp2.125.684.216,00 atau 37,58%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp3.530.951.584,00 atau 62,42%.

Penurunan ini di antaranya disebabkan oleh dasar penerbitan SKRD untuk retribusi Lokasi Sementara menunggu Kepgub Nomor 835 Tahun 2024 yang rilis di tanggal 13 Desember 2024. SKRD baru dapat

diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2024 menunggu kesiapan sistem ROS dalam mengakomodasi pengurangan tarif dimaksud.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp595.668.080,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.530.016.136,00 atau 256,86%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain melakukan upaya penagihan tunggakan retribusi kepada pedagang di enam wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi sesuai Surat Tugas Kepala Dinas PPKUKM Nomor e-0145/UD.02.01 tanggal 29 Mei 2024 tentang Kegiatan Peninjauan Lapangan dan Upaya Penagihan Piutang Retribusi di Lokasi Sementara (Loksem) dan Lokasi Binaan (Lokbin).

**3) Retribusi Tempat Pelelangan**

Retribusi Tempat Pelelangan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.030.122.688,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp6.242.085.800,00 atau 88,79%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp788.036.888,00 atau 11,21%.

Penurunan ini disebabkan oleh beberapa kendala berikut:

a) Terbitnya Surat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nomor: B.781/DJPT/PI.330/VII/2024, perihal pelaksanaan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan penarikan pungutan hasil perikanan pasca produksi menyebabkan terjadinya penolakan dari nelayan melalui Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DKI JAKARTA untuk melakukan pembayaran pungutan fasilitas pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan, karena pungutan tersebut dianggap serupa dengan yang dipungut KKP; dan
b) Berkurangnya bahan baku untuk olahan ikan asin, sehingga pendapatan menurun dan berakibat pada kemampuan membayar retribusi.

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

a) Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
b) Memberikan surat teguran kepada para Wajib Retribusi yang menunggak.

**4) Retribusi Terminal**

Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.554.855.319,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp1.945.853.583,00 atau 125,15%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp390.998.264,00 atau 25,15%.

Kendala yang dihadapi unit pemungut Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan dalam mencapai target adalah masih adanya pendapatan dalam bentuk manual/*cash* (belum *cashless*) pada lokasi Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, Terminal Tanjung Priok, Terminal Tanah Merdeka, Terminal Pulo Gebang, dan Terminal Pulo Gadung.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.430.250.462,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp484.396.879,00 atau 19,93%.

**5) Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.264.746.400,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp3.940.580.018,00 atau 62,90%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp2.324.166.382,00 atau 37,10%. Penurunan ini dikarenakan sarana pendukung perparkiran pada lokasi parkir *off street* dan parkir *on street* belum terlaksana secara optimal, di mana pengelolaan parkir dilakukan secara konvensional (manual).

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

a) Penerapan kenaikan tarif parkir mengacu kenaikan tarif retribusi sesuai Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b) Mendorong kajian sistem bagi hasil yang memberikan dampak pendapatan yang maksimal; dan
c) Mendorong pengelolaan semua fasos/fasum Pemerintah Daerah dengan metode swakelola sehingga pendapatan optimal tanpa bagi hasil ataupun pajak parkir.

**6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila**

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp4.332.594.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp5.299.535.000,00 atau 122,32%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp966.941.000,00 atau 22,32%. Pencapaian target ini disebabkan antara lain sudah tidak adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada masa Pandemi COVID-19 dan dicabutnya Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2021 efektif per 22 November 2023.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp196.700.000,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.102.835.000,00 atau 2.594,22%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

**7) Retribusi Rumah Potong Hewan**

Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.977.448.008,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp3.724.349.859,00 atau 125,09%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp746.901.851,00 atau 25,09%.

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan**

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.224.141.612,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp8.397.499.250,00 atau 116,24%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp1.173.357.638,00 atau 16,24%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp967.896.250,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.429.603.000,00 atau 767,60%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

**9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Dinas Kebudayaan.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp28.416.502.107,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp35.925.726.191,00 atau 126,43%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp7.509.224.084,00 atau 26,43%.

Penerimaan retribusi ini diperoleh utamanya dari pemakaian tempat untuk rekreasi kebudayaan dan permuseuman, gedung olahraga, kolam renang, pertunjukan planetarium dan observatorium serta pemakaian stadion olahraga. Semua unit pemungut dapat merealisasikan dengan melebihi target yang telah ditetapkan, terutama Dinas Pemuda dan Olahraga karena tingginya animo masyarakat untuk berolahraga pasca pandemi COVID-19.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.845.219.800,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp10.080.506.391,00 atau 39,00%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pemeliharaan fasilitas terkait;

b) Melakukan promosi melalui media sosial maupun kolaborasi dengan instansi terkait;
c) Menginformasikan pembukaan kembali Fasilitas Penginapan dan Ruang Pertemuan di UP Anjungan dan Graha Wisata melalui website dan media sosial;
d) Menambahkan Monumen Nasional (Monas) sebagai salah satu tujuan destinasi pada kegiatan *Familiarization Trip;*
e) Mengadakan kegiatan Monas Week dan Pertunjukan – pertunjukan *video mapping*, konser musik dan hiburan lainnya pada saat peringatan hari – hari besar nasional;
f) Melakukan kerja sama dengan Bank DKI dalam mempromosikan dan memberikan layanan pembayaran melalui kartu elektronik dan uang elektronik QRIS; dan
g) Menganggarkan kegiatan wajib kunjung museum bagi kalangan pelajar dalam APBD Dinas Kebudayaan sebagai salah satu upaya pengenalan museum ke masyarakat.

**10) Retribusi Penyeberangan di Air**

Retribusi Penyeberangan di Air Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.400.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp4.051.300.000,00 atau 119,16%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp651.300.000,00 atau sebesar 19,16%. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyeberangan di Air Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.630.105.000,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.421.195.000,00 atau 148,53%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Penyeberangan di Air antara lain:

a) Menerapkan tarif baru sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
b) Mendorong UKPD Pemungut Retribusi agar terus berkoordinasi dengan Bank DKI dalam rangka percepatan proses pelimpahan dana dari bank DKI ke rekening serta penyempurnaan sistem *Jaket Boat*.

**11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp10.674.731.784,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp17.448.767.848,00 atau 163,46%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp6.774.036.064,00 atau 63,46 %.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.020.666.086,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp16.428.101.762,00 atau 1.609,55%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; Dinas Sumber Daya Air; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi; Dinas Bina Marga; Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta. Kenaikan signifikan realisasi dipengaruhi adanya perubahan klasifikasi dan unit pemungut retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**12) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.555.124.762,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp2.712.742.452,00 atau 174,44%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp1.157.617.690,00 atau 74,44%.

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**13) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan**

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di luar Badan Jalan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.541.305.500,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp4.168.353.927,00 atau 117,71%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp627.048.427,00 atau 17,71%.

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**14) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga**

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.956.103.142,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp6.333.889.750,00 atau 91,06%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp622.213.392,00 atau 8,94%.

Penurunan ini disebabkan oleh beberapa kendala berikut:

a) belum dianggarkannya biaya cetak karcis;
b) kurangnya SDM di lapangan, karena banyak yang pensiun dan belum mendapat pengganti;
c) adanya perubahan kode rekening retribusi pada pertengahan Tahun 2024.

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

a) menganggarkan cetak karcis masuk kebun bibit untuk Tahun 2025;
b) sosialisasi ke sekolah dan masyarakat terkait diberlakukannya Perda No. 1 Tahun 2024 tiket masuk kebun;
c) sosialisasi kepada masyarakat retribusi tiket hutan kota;
d) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
e) meningkatkan pengawasan dari pimpinan terhadap pelayanan.

**15) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah**

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp13.149.073.546,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp10.228.366.482,00 atau 77,79%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp2.920.707.063,00 atau 22,21%. Hal ini disebabkan diantaranya karena masih dalam transisi atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdampak pada penyesuaian kode rekening pemungutan Retribusi Daerah. Penetapan target APBD-P Tahun Anggaran 2024 yang semula ditargetkan di bulan Agustus, baru disahkan di bulan Oktober sehingga seluruh realisasi

penerimaan pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 diakui sebagai realisasi di kode rekening transisi (Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan). Atas hal tersebut, alokasi pagu menjadi berlebih sehingga menyebabkan *gap* antara target dan realisasi.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

a) telah mengajukan permohonan ke Kementerian agar menjadi laboratorium yang ditunjuk LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) melalui sistem SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional);
b) telah menawarkan kerja sama dengan 12 (dua belas) LSPro swasta dalam pengujian pakaian bayi, handuk dan mainan anak; serta dalam proses kerja sama antara LSPro UPPISP dan Laboratorium uji PT. Anindya Certification Testing, PT. SGS Indonesia dan PT. Rajawali Baskara Perkasa terkait pengujian dalam rangka sertifikasi produk mainan anak;
c) akan mendirikan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk tekstil dan kerajinan di Tahun 2025;
d) melakukan upaya-upaya penagihan kepada WR kios dan los yang mempunyai tunggakan antara lain membuat STRD melalui sistem e-ROS, menghubungi melalui media elektronik telepon/*chatting*, menerbitkan surat pemberitahuan/ tagihan/teguran, menandatangani secara langsung ke lapangan, memasang/menempelkan *stiker/banne*r sebagai sanksi sosial;
e) meningkatkan jumlah produksi benih ikan sehingga selain dibagikan ke masyarakat, masih ada benih ikan yang dapat dijual ke masyarakat;
f) melakukan komunikasi dengan WR yang pernah melakukan pengujian sebelumnya;
g) melakukan koordinasi ke bidang pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kota Administrasi lima wilayah agar melakukan tes pengujian, penyelidikan dan pengukuran ke UPPPP Bina Marga Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
h) memperbanyak ruang lingkup pengujian, penyelidikan dan pengukuran dan memperkenalkan pengujian, penyelidikan dan pengukuran UPPPP Bina Marga Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melalui media sosial.

**16) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah**

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp28.173.459.596,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp36.666.827.293,00 atau 130,15%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp8.493.367.697,00 atau 30,15%.

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**c. Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp275.014.336.282,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp271.593.401.374,00 atau 98,76%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp3.420.934.908,00 atau 1,24%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp236.393.094.524,00, maka realisasi retribusi di Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp35.200.306.850,00 atau 14,89%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan secara terpusat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.12

Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu

Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Jenis Pendapatan | Tahun Anggaran 2024 | | % | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 75.000.000 | 75.000.000 | 100,00 | 1.672.500.000 |
| 2 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 6.450.000 | 6.450.000 | 100,00 | 384.925.000 |
| 3 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 174.932.886.282 | 162.037.302.574 | 92,63 | 234.335.669.524 |
| 4 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 100.000.000.000 | 109.474.648.800 | 109,47 | 0 |
| | **Jumlah** | **275.014.336.282** | **271.593.401.374** | **98,76** | **236.393.094.524** |

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 antara lain:

**1) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp75.000.000,00 atau 100,00%. Dengan demikian realisasi penerimaan retribusi mencapai target sebesar Rp75.000.000,00 atau 100,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.672.500.000,00, maka realisasi retribusi ini di Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.597.500.000,00 atau 95,52%.

**2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum**

Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu.

Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.450.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.450.000,00 atau Rp100,00%. Dengan demikian realisasi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum mencapai target sebesar Rp6.450.000,00 atau Rp100,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp384.925.000,00, maka realisasi mengalami penurunan di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp378.475.000,00 atau 98,32%.

**3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)**

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah retribusi atas perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun anggaran sebelumnya menggunakan nomenklatur Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp174.932.886.282,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp162.037.302.574,00 atau 92,63%. Dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp12.895.583.708,00 atau 7,37%. Hal ini disebabkan di antaranya karena masih dalam transisi atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan masih belum pulihnya sektor infrastruktur.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp234.335.669.524,00, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp72.298.366.950,00 atau 30,85%.

**4) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)**

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp100.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp109.474.648.800,00 atau 109,47%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp9.474.648.800,00 atau 9,47%.

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### 5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024, ditetapkan sebesar Rp634.395.407.063,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp653.700.898.761,00 atau 103,04%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan akhir 31 Desember 2024 melampaui target sebesar Rp19.305.491.698,00 atau 3,04%.

Apabila realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp545.869.249.987,00, terjadi kenaikan sebesar Rp107.831.648.774,00 atau 19,75%.

Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.13

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2024 | | % | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 31.436.669.637 | 31.436.669.637 | 100,00 | 14.833.909.895 |
| 2 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 602.958.737.426 | 622.264.229.124 | 103,20 | 531.035.340.092 |
| **Jumlah** | | **634.395.407.063** | **653.700.898.761** | **103,04** | **545.869.249.987** |

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

**a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN**

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2024, ditargetkan sebesar Rp31.436.669.637,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31.436.669.637,00 atau 100,00%. Dengan demikian realisasi Penerimaan bagian laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sampai dengan akhir 31 Desember 2024 mencapai target.

Apabila Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya sebesar Rp14.833.909.895,00 maka di Tahun Anggaran 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp16.602.759.742,00 atau 111,92%.

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.14

Realisasi Penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN

Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2024 | | % | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung | 9.127.128.545 | 9.127.128.545 | 100,00 | 4.783.042.097 |
| 2 | PT Kawasan Berikat Nusantara | 22.309.541.092 | 22.309.541.092 | 100,00 | 10.050.867.798 |
| **Jumlah** | | **31.436.669.637** | **31.436.669.637** | 100,00 | **14.833.909.895** |

**b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp602.958.737.426,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 Rp622.264.229.124,00 atau 103,20%. Dengan demikian pendapatan dari penyertaan modal melampaui target sebesar Rp19.305.491.698,00 atau 3,20%.

Apabila Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp531.035.340.092,00, maka di Tahun Anggaran 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp91.228.889.032,00 atau 17,18%.

Rincian lebih lanjut realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.15

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 | | % | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | PT Asuransi Bangun Askrida | 0 | 0 | 0 | 2.302.711.241 |
| 2 | PT Bank DKI Jakarta | 326.362.883.842 | 326.362.883.842 | 100,00 | 281.670.562.798 |
| 3 | Perumda Pasar Jaya | 19.218.954.000 | 21.964.518.857 | 114,29 | 5.897.211.097 |
| 4 | PT Cemani Toka | 3.157.998.480 | 3.361.871.240 | 106,46 | 1.758.443.960 |
| 5 | PT Food Station Tjipinang | 1.856.956.748 | 1.856.956.748 | 100,00 | 14.426.245.892 |
| 6 | PT Pembangunan Jaya | 17.500.000.000 | 28.800.000.000 | 164,57 | 20.320.000.000 |

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 | | % | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 7 | PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk | 36.863.999.968 | 36.863.999.968 | 100,00 | 33.407.999.971 |
| 8 | PT Transportasi Jakarta | 55.399.293.005 | 55.452.326.932 | 100,10 | 88.529.116.811 |
| 9 | PT Delta Jakarta, Tbk | 59.066.396.700 | 59.066.396.700 | 100,00 | 68.315.227.500 |
| 10 | PT. Pakuan International | 0 | 111.171.340 | ~ | 0 |
| 11 | Perumda Air Minum Jaya | 61.150.000.000 | 62.367.973.726 | 101,99 | 0 |
| 12 | Perumda PAL Jaya | 14.695.500.353 | 18.369.375.441 | 125,00 | 14.407.820.822 |
| 13 | PT. Penjamin Kredit Daerah | 7.686.754.330 | 7.686.754.330 | 100,00 | 0 |
| **Jumlah** | | **602.958.737.426** | **622.264.229.124** | **103,20** | **531.035.340.092** |

#### 5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp4.204.598.994.964,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp4.926.523.566.307,00 atau 117,17%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp4.622.697.231.503,00, maka di Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp303.826.334.804,00 atau 6,57%. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 termasuk realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada BLUD sebesar Rp1.780.935.782,00.

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.16

Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2024 | | % | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 (4:3)** | **6** |
| 1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 22.000.000.000 | 31.088.097.192 | 141,31 | 6.868.340.118 |
| 2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 205.643.594.333 | 51.404.601.274 | 25,00 | 94.789.704.974 |
| 3 | Hasil Kerja Sama Daerah | 9.082.478.091 | 0 | 0,00 | 7.933.605.456 |
| 4 | Jasa Giro | 150.364.216.661 | 138.977.554.226 | 92,43 | 163.754.037.012 |
| 5 | Pendapatan Bunga | 134.442.082.231 | 488.490.087.480 | 363,35 | 350.699.189.334 |
| 6 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 41.897.641.265 | 24.662.147.115 | 58,86 | 15.412.050.340 |
| 7 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 15.540.000.000 | 16.273.021.852 | 104,72 | 15.509.900.579 |
| 8 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 17.205.883.824 | 72.571.509.022 | 421,78 | 43.692.667.644 |
| 9 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 280.000.000.000 | 304.385.210.814 | 108,71 | 288.999.391.997 |
| 10 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 765.777.296 | 2.831.448.222 | 369,75 | 314.556.868 |

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2024 | | % | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 11 | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan | 1.108.272.500 | 71.391.895 | 6,44 | 204.862.000 |
| 12 | Pendapatan dari Pengembalian | 0 | 95.507.744.792 | 0,00 | 102.706.935.656 |
| 13 | Pendapatan BLUD | 3.321.349.048.763 | 3.692.384.367.607 | 111,17 | 3.469.930.800.522 |
| 14 | Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 50.000.000 | 0 | 0,00 | 416.272.363 |
| 15 | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 5.150.000.000 | 7.876.384.816 | 152,94 | 61.464.916.640 |
| **Jumlah** | | **4.204.598.994.964** | **4.926.523.566.307** | **117,17** | **4.622.697.231.503** |

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut:

**a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2024 di antaranya diperoleh dari:

1) penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi pelepasan hak atas tanah jalan; dan
2) penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah, seperti kendaraan bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta inventaris kantor yang tidak terpakai.

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp22.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp31.088.097.192,00 atau 141,31%. Dengan demikian realisasi penerimaan ini melampaui target sebesar Rp9.088.097.192,00 atau 41,31%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp6.868.340.118,00, maka realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp24.219.757.074,00 atau 352,63%.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.17
Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2024 | | % |
|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) |
| 1 | Hasil Penjualan Tanah | 3.370.200.000 | 3.370.200.000 | 100,00 |
| 2 | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin | 9.288.700.485 | 13.952.606.328 | 150,21 |
| 3 | Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan | 9.341.099.515 | 13.765.290.864 | 147,36 |
| **Jumlah** | | **22.000.000.000** | **31.088.097.192** | **141,31** |

**b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp205.643.594.333,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp51.404.601.274,00 atau 25,00%. Dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp154.238.993.059,00 atau 75,00 %.

Realisasi penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp51.404.601.274,00 merupakan penerimaan atas Hasil Sewa BMD.

Realisasi penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp51.404.601.274,00 berasal dari:

1) Pendapatan Sewa Listrik dan Air Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun Sederhana dan sewa pemakaian lantai dasar rumah susun sewa beli sebesar Rp51.179.980.774,00;
2) Pendapatan Izin Penyelenggaraan Reklame sebesar Rp103.242.000,00;
3) Pendapatan cicilan atas sewa beli rumah bermis yang berlokasi di Muara Angke sebesar Rp62.928.500,00;
4) Pendapatan Sewa Tanah dan/atau Bangunan sebesar Rp53.450.000,00; dan
5) Pendapatan Sewa Pemakaian Ruang Serba Guna PKK Melati Jaya sebesar Rp5.000.000,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp94.789.704.974,00, maka realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp43.385.103.700,00 atau 45,77%.

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan mengalami penurunan akibat masih banyaknya pemanfaatan yang berada dalam proses

persetujuan dan perjanjian kerja sama. Selain itu, pemanfaatan titik reklame masih dalam tahap sidang proposal sebelum dapat diproses lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan.

**c. Hasil Kerja Sama Daerah**

Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp9.082.478.091,00. Tidak terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 atau 0,00%. Dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp9.082.478.091,00 atau 0,00%. Hasil Kerja Sama Daerah mengalami perubahan kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 yang sebelumnya tercatat sebagai Hasil Penerimaan Pihak Ketiga dan Hasil Kerja Sama Aset Daerah. Realisasi di Tahun 2024 mengalami penurunan dikarenakan penganggaran Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah pada Badan Pengelolaan Aset Daerah telah dikelola oleh BLUD Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center, sehingga Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah menjadi bagian dari Pendapatan BLUD pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.933.605.456,00, maka realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.933.605.456,00 atau 100,00%.

**d. Jasa Giro**

Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp150.364.216.661,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai sebesar Rp138.977.554.226,00 atau 92,43%. Dengan demikian realisasi Jasa Giro tidak mencapai target sebesar Rp11.386.662.435,00 atau 7,57%. Hal ini disebabkan di antaranya adanya optimalisasi penempatan dana pada Investasi Jangka Pendek yaitu Deposito pada Kas Daerah.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp138.977.554.226,00 terdiri dari:

1) Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp132.890.819.625,00;
2) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp3.920.651.990,00; dan
3) Jasa Giro pada Rekening Dana BOS sebesar Rp2.166.082.611,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp163.754.037.012,00 maka realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp24.776.482.786,00 atau 15,13%.

**e. Pendapatan Bunga**

Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp134.442.082.231,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp488.490.087.480,00 atau 363,35%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga tercapai melebihi target. Pendapatan bunga tersebut merupakan penerimaan bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp350.699.189.334,00, maka realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp137.790.898.146,00 atau 39,29%.

**f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan Rp41.897.641.265,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.662.147.115,00 atau 58,86%, realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tidak mencapai target sebesar Rp17.235.494.150,00 atau 41,14%. Hal ini dikarenakan dilakukannya pemindahan kode rekening Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ke kode rekening Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp28.323.306.516,00.

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tersebut diperoleh dari:

1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp20.665.481.476,00; dan
2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp3.996.665.639,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp15.412.050.340,00, maka realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.250.096.775,00 atau 60,02%.

**g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp15.540.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.273.021.852,00 atau 104,72%, realisasi

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain melebihi target sebesar Rp733.021.852,00 atau 4,72%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp15.509.900.579,00, maka realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp763.121.273,00 atau 4,92%.

Penerimaan komisi di antaranya merupakan pendapatan atas piutang hasil tagih atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sebesar Rp42.718.840,00, komisi bagi hasil Premi Program Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK) atas bulan Desember 2024 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi yaitu sebesar Rp14.607.594.619,00 dan pendapatan sewa Rusunami pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.622.708.393,00.

**h. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp17.205.883.824,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.571.509.022,00 atau 421,78%. Dengan demikian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi melebihi target sebesar Rp55.365.625.198 atau 321,78%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp43.692.667.644,00, maka realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp28.878.841.378,00 atau 66,10%.

**i. Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp280.000.000.000,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp304.385.210.814,00 atau 108,71%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah melampaui target sebesar Rp24.385.210.814,00 atau 8,71%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp288.999.391.997,00, maka realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp15.385.818.817.,00 atau 5,32%.

Lebih rinci mengenai realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut.

Tabel 5.18

Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 | | | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 190.194.138.711 | 210.767.387.519 | 110,82 | 163.536.491.522 |
| 2 | Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 1.405.043.192 | 1.485.372.690 | 105,72 | 1.411.779.560 |
| 3 | Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 59.769.139 | 80.413.442 | 134,54 | 43.658.362 |
| 4 | Pendapatan Denda Pajak Hotel | 3.722.893.576 | 6.508.551.813 | 174,83 | 4.412.662.709 |
| 5 | Pendapatan Denda Pajak Restoran | 14.146.598.557 | 20.289.171.545 | 143,42 | 23.936.140.368 |
| 6 | Pendapatan Denda Pajak Hiburan | 2.878.001.180 | 6.187.429.059 | 214,99 | 5.591.896.141 |
| 7 | Pendapatan Denda Pajak Reklame | 3.731.629.187 | 4.613.222.041 | 123,62 | 16.126.764.812 |
| 8 | Pendapatan Denda Pajak Parkir | 983.918.400 | 1.917.322.528 | 194,87 | 3.079.614.787 |
| 9 | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | 323.965.694 | 436.950.076 | 134,88 | 818.631.512 |
| 10 | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 60.975.431.522 | 50.028.126.146 | 82,05 | 64.250.642.083 |
| 11 | Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 1.578.610.842 | 2.071.263.955 | 131,21 | 5.791.110.141 |
| | **Jumlah** | **280.000.000.000** | **304.385.210.814** | **108,71** | **288.999.391.997** |

**j. Pendapatan Denda Retribusi Daerah**

Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp765.777.296,00. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.831.448.222,00 atau 369,75%. Dengan demikian Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi melebihi target sebesar Rp2.065.670.926,00 atau 269,75%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 tersebut terdiri atas perolehan:

1) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.061.402.033,00;
2) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp1.616.929.674,00; dan
3) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp153.116.515,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp314.556.868,00, maka realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.516.891.354,00 atau 800,14%.

**k. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan**

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.108.272.500,00. Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp71.391.895,00 atau Rp6,44%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan belum mencapai target sebesar Rp1.036.880.605,00 atau 93,56%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp204.862.000,00 maka realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp133.470.105,00 atau 65,15%.

**l. Pendapatan dari Pengembalian**

Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2024 tidak ditargetkan, namun terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp95.507.744.792,00.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2024 tersebut terdiri atas perolehan:

1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp138.530.153,00;
2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp3.295.998.904,00;
3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp645.209,00;
4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp49.283.291,00;
5) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa sebesar Rp165.110.626,00;
6) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp356.268.961,00;
7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp19.170.055.904,00;

8) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba sebesar Rp320.053.861,00;
9) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp44.258.253.262,00;
10) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp20.924.081.689,00;
11) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp27.873.000,00;
12) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.301.337.601,00;
13) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan sebesar Rp715.103.994;
14) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air sebesar Rp645.069.258,00;
15) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi sebesar Rp11.407.968;
16) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.649.975.960,00; dan
17) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp478.695.151,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp102.706.935.656,00, maka realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.199.190.864,00 atau 7,01%.

**m. Pendapatan BLUD**

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan

keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerja sama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah.

Secara periodik BLUD mengajukan pengajuan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3BP kepada BUD. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLUD yang telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima BLUD.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp3.321.349.048.763,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.692.384.367.607,00 atau 111,17%. Dengan demikian realisasi Pendapatan BLUD telah melebihi target sebesar Rp371.035.318.844,00 atau 10,05%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp3.469.930.800.521,00, maka realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp222.453.567.085,00 atau 6,37%.

Selain pengesahan pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.692.384.367.607,00, terdapat Pendapatan Operasional BLUD yang belum disahkan pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebesar Rp16.881.743.513,00. Nilai tersebut merupakan pendapatan yang diterima dan telah dibelanjakan oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Permukiman Pulogadung pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

**n. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp50.000.000,00. Tidak terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 atau 0,00%. Dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp50.000.000,00 atau 0,00%. Hal ini dikarenakan dilakukannya pemindahan penerimaan atas Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Badan Pengelolaan Aset Daerah ke kode rekening

Pendapatan BLUD pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center sebesar Rp1.050.684.978,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp416.272.363,00, maka realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp416.272.363,00 atau 100,00%.

**o. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp5.150.000.000,00. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.876.384.816,00 atau 152,94%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah di Tahun Anggaran 2024 melebihi target sebesar Rp2.726.384.816,00 atau 52,94%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp61.464.916.640,00, maka realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp53.588.531.824,00 atau 87,19%.

#### 5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2024 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran dari rekening *Treasury Deposit Facility* atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya, yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2024 Tanggal 22 Maret 2024 Tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267 Tahun 2024 Tanggal 6 Juni 2024

Tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Gaji Ketiga Belas Di Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp23.776.426.806.863,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp21.620.905.241.381,00 atau 90,93%. Apabila realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp20.159.634.672.034,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.461.270.569.347,00 atau 7,25%.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.19
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 | | % | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| **A** | **Dana Perimbangan** | **23.732.336.589.863** | **21.576.815.024.381** | **90,92** | **20.124.459.645.034** |
| **1** | **Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)** | **20.089.713.629.863** | **18.032.588.917.639** | **89,76** | **17.049.968.580.672** |
| a | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 49.522.948.000 | 31.130.727.000 | 62,86 | 31.525.639.306 |
| b | DBH PPh Pasal 21 | 18.686.943.626.863 | 17.151.231.818.639 | 91,78 | 15.790.018.049.333 |
| c | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 1.264.838.746.000 | 828.793.211.000 | 65,53 | 1.187.186.308.155 |
| d | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 1.302.705.000 | 1.332.416.000 | 102,28 | 1.137.786.459 |
| e | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 81.969.240.000 | 14.964.381.000 | 18,26 | 33.972.535.563 |
| f | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 5.136.364.000 | 5.136.364.000 | 100,00 | 6.128.261.856 |
| **2** | **Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)** | **368.377.412.000** | **368.173.270.201** | **99,94** | **22.179.718.000** |
| **3** | **Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik** | **0** | **0** | **100,00** | **3.076.020.400** |
| **4** | **Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik** | **3.274.245.548.000** | **3.176.052.836.541** | **97,00** | **3.049.235.325.962** |
| **B** | **Insentif Fiskal** | **44.090.217.000** | **44.090.217.000** | **100,00** | **35.175.027.000** |
| | **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** | **23.776.426.806.863** | **21.620.905.241.381** | **90,93** | **20.159.634.672.034** |

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan daerah dari Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

#### 5.1.1.2.1 Dana Perimbangan

##### 5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp20.089.713.629.863,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp18.032.588.917.639,00 atau 89,76%. Dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 tidak mencapai target sebesar Rp2.057.124.712.224,00 atau 10,24%. Tidak tercapainya target tersebut karena tidak tersalurkannya penarikan atas dana *Treasury Deposit Facility*. Berdasarkan surat Nomor e-0003/UD.08.01 Tanggal 6 Desember 2024 Hal Permohonan Penarikan *Dana Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam rangka mendanai kebutuhan yang diarahkan penggunaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan permohonan penarikan dana TDF sebesar Rp1.710.273.544.341,00 dan telah mendapat tanggapan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI melalui surat Nomor S-165/PK/PK.2/2024 Tanggal 11 Desember 2024 Hal Tanggapan atas Permohonan Penarikan Dana Treasury Deposit Facility (TDF) dalam rangka mendanai kebutuhan yang diarahkan penggunaannya, bahwa nilai penarikan dana TDF adalah sebesar sisa dana TDF pada saat pengajuan, yaitu sebesar Rp3.253.939.379.361,00. Sehingga pengajuan penarikan dana TDF dilakukan kembali di Tahun 2025.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp982.620.336.967,00 atau 5,76% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp17.049.968.580.672,00.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a. realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp31.130.727.000,00 atau 62,86%;
b. realisasi DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp17.151.231.818.639,00 atau 91,78%;
c. realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp828.793.211.000,00 atau 65,53%;
d. realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp1.332.416.000,00 atau 102,28%;
e. realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp14.964.381.000,00 atau 18,26%; dan
f. realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp5.136.364.000,00 atau 100,00%.

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 termasuk di dalamnya realisasi melalui mekanisme Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.7/2023 sebesar Rp922.491.898.278,00 yang terdiri dari:

a. pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Fasilitas I sebesar Rp390.385.927.362,00 sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 yang jatuh tempo untuk periode bulan Maret, Juni, dan September Tahun 2024.
b. pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Fasilitas II sebesar Rp532.105.970.916,00 sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020 yang jatuh tempo untuk periode bulan Maret, Juni dan September 2024.

#### 5.1.1.2.1.2 Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07.2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Dana Alokasi Umum yang didapat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (DAU *Block Grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU *Spesific Grant*) yaitu untuk pendanaan kelurahan.

Pendanaan kelurahan Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan sebanyak 267 kelurahan sebesar Rp53.400.000.000,00. Pendanaan Kelurahan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Transfer Umum-DAU Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditargetkan sebesar Rp368.377.412.000,00 yang terdiri dari DAU tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp314.977.412.000 dan DAU pendanaan kelurahan sebesar Rp53.400.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp368.173.270.201,00 atau 99,94% terdiri dari realisasi DAU tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp314.977.412.000 atau 100,00% dan DAU pendanaan kelurahan sebesar Rp53.195.858.201,00 atau 99,62% tidak tercapainya target tersebut karena penyaluran DAU pendanaan kelurahan sesuai dengan rencana penggunaan belanja pada APBD sebesar Rp53.195.858.201,00.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp345.993.552.201,00 atau 1559,95% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp22.179.718.000,00.

#### 5.1.1.2.1.3 Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp0,00 atau 0,00%. Tidak adanya target dan realisasi DAK Fisik, disebabkan karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tanggal 28 November 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 DKI Jakarta tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik pada Tahun Anggaran 2024, sehingga realisasi penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.076.020.400,00 atau 100% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp3.076.020.400,00.

#### 5.1.1.2.1.4 Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non fisik. Penyaluran DAK Non Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan Laporan secara lengkap dan benar.

Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp3.274.245.548.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp3.176.052.836.541,00 atau 97,00%. Dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 tidak mencapai target sebesar Rp98.192.711.459,00 atau 3,00%.

DAK Non Fisik TPG PNSD dan Tamsil Guru PNSD realisasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2024. Untuk jenis DAK Non Fisik BOS Reguler, BOS Kinerja, PAUD Reguler, PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Reguler dan BOP Kesetaraan Kinerja realisasi berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan yang telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Untuk jenis DAK Non Fisik BOP Museum dan Taman Budaya-Museum, BOKKB-BOKB, Fasilitasi Penanaman Modal, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan PK2UMK realisasi tidak mencapai 100%

karena masih terdapat sisa saldo di RKUD atas penggunaan tahun sebelumnya, sehingga mengurangi nilai penyaluran DAK Non Fisik Tahun berjalan.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 juga mengalami kenaikan sebesar Rp126.817.510.579,00 atau 4,16% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp3.049.235.325.962,00.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a. Realisasi DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOS Reguler sebesar Rp1.732.660.661.755,00 atau 95,11%;
b. Realisasi DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp35.268.750.000,00 atau 98,67%;
c. Realisasi DAK Non Fisik-TPG PNSD sebesar Rp1.248.388.041.000,00 atau 99,98%;
d. Realisasi DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp23.510.885.000,00 atau 84,15%;
e. Realisasi DAK Non Fisik-BOP PAUD Reguler sebesar Rp79.487.124.858,00 atau 98,82%;
f. Realisasi DAK Non Fisik-BOP PAUD Kinerja sebesar Rp1.620.000.000,00 atau 95,58%;
g. Realisasi DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler sebesar Rp39.023.171.234,00 atau 97,49%;
h. Realisasi DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja sebesar Rp855.000.000,00 atau 95,00%;
i. Realisasi DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum sebesar Rp5.886.922.625,00 atau 98,12%;
j. Realisasi DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp5.666.398.867,00 atau 78,77%;
k. Realisasi DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp605.673.050,00 atau 80,13%;
l. Realisasi DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp474.911.300,00 atau 91,33%; dan
m. Realisasi DAK Non Fisik-PK2UMK sebesar Rp2.605.296.852,00 atau 97,82%.

#### 5.1.1.2.2 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditargetkan sebesar Rp44.090.217.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp44.090.217.000,00 atau 100%.

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Pengelolaan Insentif Fiskal diatur dalam ketentuan berikut:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 Tanggal 24 November 2023 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal TA 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal TA 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi insentif fiskal (IF) pada Tahun Anggaran 2024 sebesar total Rp44.090.217.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. IF atas penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp32.358.203.000,00 berdasarkan alokasi yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tanggal 28 November 2023 tentang Rincian APBN TA 2024.
b. IF atas penghargaan kinerja tahun berjalan sebesar Rp11.732.014.000,00 berdasarkan alokasi yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 Tanggal 1 September 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal TA 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi kelompok kategori kesejahteraan masyarakat pada:
    - Kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, sebesar Rp5.778.438.000,00.
    - Kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, sebesar Rp5.953.576.000,00.

#### 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp703.654.652.623,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp589.167.782.024,00 atau 83,73% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah merupakan Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Pembangunan Proyek MRT Jakarta sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-001/MK.7/2019 Tanggal 13 Februari 2019 (IP-578) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-1/MK.7/DTK.03/MRT/2023 Tanggal 13 November 2023 (IP-585). Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan Hibah IP-578 dan IP-585 dengan jumlah sebesar Rp576.240.722.024,00 atau sebesar 83,52% dari anggaran sebesar Rp690.727.592.623,00 sesuai dengan salinan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Adapun penyebab tidak tercapainya pendapatan hibah dimaksud dikarenakan penggunaan kurs aktual yang cenderung di bawah asumsi kurs yang digunakan saat perencanaan, terjadi kegagalan tender paket pekerjaan CP206 dalam rangka pengadaan *rolling stock*, penyesuaian nilai kontrak dan pergeseran jadwal pekerjaan pada paket pekerjaan, dan;

b. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebesar Rp12.927.060.000,00, merupakan pendapatan hibah dari PT Jasa Raharja berupa kontribusi biaya operasional/hibah kantor bersama Samsat periode bulan Januari sampai dengan Desember 2024 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor P/44/SP/2024 Nomor E-0001/UD.02.01 Tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Pemberian Dana Hibah Daerah Tahun 2024 Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Untuk Mendukung Operasional Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.176.986.038.430,00 atau 66,64% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp1.766.153.820.454,00.

### 5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD.

Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam

pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Belanja Daerah dan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijabarkan menurut klasifikasi ekonomi sesuai penyajian pada Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penyajian Belanja Daerah sesuai dokumen APBD adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang dijabarkan menurut klasifikasi kelompok dan urusan.

#### 5.1.2.1 Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan Belanja dan Transfer yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi Ekonomi berdasarkan jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Transfer.

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp76.023.113.210.933,00. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.012.717.839.886,00 atau 92,09%. Adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp6.010.395.371.047,00 atau 7,91% di antaranya :

1. Belanja Barang dan Jasa, tidak terealisasi sebesar Rp1.262.953.902.578,00 dikarenakan tidak terserapnya belanja jasa KKI dan PJLP, efisiensi Belanja TALI dan Belanja Barang/Jasa di BLUD;
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak terealisasi sebesar Rp1.056.749.759.507,00 dikarenakan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan yang disebabkan oleh kegiatan yang belum selesai dan dilanjutkan pada tahun berikutnya; dan
3. Belanja Pegawai, tidak terealisasi sebesar Rp841.225.481.173,00 dikarenakan adanya perhitungan accres anggaran belanja pegawai, kekosongan jabatan struktural, dan CPNS yang belum masuk.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.242.108.211.472,00 atau 4,63% dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp66.770.609.628.414,00.

Rincian realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.20

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer

Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2024 | | | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| **I** | **Belanja Operasi** | **61.283.505.927.677** | **58.623.935.516.823** | **95,66** | **57.556.903.079.616** |
| 1 | Belanja Pegawai | 20.031.780.182.216 | 19.190.554.701.043 | 95,80 | 17.977.776.327.870 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 27.835.321.117.883 | 26.572.367.215.305 | 95,46 | 25.824.444.605.296 |
| 3 | Belanja Bunga | 186.000.000.000 | 180.738.864.995 | 97,17 | 229.704.491.741 |
| 4 | Belanja Subsidi | 6.320.798.085.601 | 5.875.837.590.937 | 92,96 | 5.539.653.281.534 |
| 5 | Belanja Hibah | 3.358.144.887.494 | 3.307.808.095.906 | 98,50 | 3.621.682.896.507 |
| 6 | Belanja Bantuan Sosial | 3.551.461.654.483 | 3.496.629.048.637 | 98,46 | 4.363.641.476.668 |
| **II** | **Belanja Modal** | **12.989.055.827.469** | **11.004.785.255.543** | **84,72** | **8.857.260.068.298** |
| 1 | Belanja Tanah | 763.402.783.015 | 433.525.287.650 | 56,79 | 442.600.308.470 |
| 2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 3.169.221.270.721 | 2.961.717.289.383 | 93,45 | 2.822.976.130.249 |
| 3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 3.441.760.532.962 | 2.385.010.773.455 | 69,30 | 1.653.055.663.410 |
| 4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.352.974.561.800 | 4.975.949.887.118 | 92,96 | 3.799.027.573.476 |
| 5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 128.157.171.217 | 119.496.671.697 | 93,24 | 139.600.392.693 |
| 6 | Belanja Aset Lainnya | 133.539.507.754 | 129.085.346.240 | 96,66 | 0 |
| **III** | **Belanja Tak Terduga** | **1.365.518.170.267** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | Belanja Tak Terduga | 1.365.518.170.267 | 0 | 0 | 0 |
| **IV** | **Transfer** | **385.033.285.520** | **383.997.067.520** | **99,73** | **356.446.480.500** |
| 1 | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 385.033.285.520 | 383.997.067.520 | 99,73 | 356.446.480.500 |
| **Jumlah (I,II, III, dan IV)** | | **76.023.113.210.933** | **70.012.717.839.886** | **92,09** | **66.770.609.628.414** |

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi Tahun Anggaran 2024, dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.1.2.1.1 Belanja

##### 5.1.2.1.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp61.283.505.927.677,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp58.623.935.516.823,00 atau 95,66%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp57.556.903.079.616,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.067.032.437.207,00 atau 1,85%. Rincian realisasi belanja operasi terdapat pada lampiran 1.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

#### 5.1.2.1.1.1.a Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp20.031.780.182.216,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.190.554.701.043,00 atau 95,80%.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 tidak terserap sebesar Rp841.225.481.173,00 atau 4,2% disebabkan adanya perhitungan accres anggaran Belanja Pegawai, kekosongan jabatan struktural, dan CPNS yang belum masuk.

Apabila realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.977.776.327.870,00 terdapat kenaikan realisasi di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.212.778.373.173,00 atau 6,75%.

Berikut rincian realisasi belanja pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.21

Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024

| Jenis Belanja Pegawai | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|
| Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 6.343.275.787.515 | 6.017.571.319.444 | 94,87 |
| Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 11.293.176.410.908 | 10.903.991.920.983 | 96,55 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 1.934.559.231.000 | 1.833.820.051.913 | 94,79 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 165.126.384.200 | 160.409.799.009 | 97,14 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 2.854.935.720 | 1.492.957.760 | 52,29 |
| Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 69.795.586.773 | 66.071.053.327 | 94,66 |
| Belanja Pegawai BLUD | 222.991.846.100 | 207.197.598.607 | 92,92 |
| **Total Belanja Pegawai** | **20.031.780.182.216** | **19.190.554.701.043** | **95,80** |

#### 5.1.2.1.1.1.b Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp27.835.321.117.883,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.572.367.215.305,00 atau 95,46%.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 tidak terserap sebesar Rp1.262.953.902.578,00 atau 4,54% disebabkan adanya tidak terserapnya Belanja Jasa KKI dan PJLP, efisiensi Belanja TALI dan Belanja Barang/Jasa di BLUD.

Apabila realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.824.444.605.296,00 terdapat kenaikan realisasi di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp747.922.610.009,00 atau 2,90%.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.572.367.215.305,00 di antaranya merupakan:

a. Realisasi belanja jasa sebesar Rp15.761.798.306.361,00;
b. Realisasi belanja barang jasa BLUD sebesar Rp3.493.660.758.447,00;
c. Realisasi belanja barang sebesar Rp3.211.762.716.717,00;dan
d. Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp2.634.070.516.032,00.

Dari jumlah belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 tersebut, di antaranya terdapat belanja yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp198.675.562.663,00 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (sebagaimana dijelaskan dalam CaLK 4.3.6.3 tentang Aset Tetap). Rincian kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap adalah sebagai berikut

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Kapitalisasi dari Belanja Barang-APBD** | |
| | Peralatan dan Mesin | 62.168.931.190,00 |
| | Gedung dan Bangunan | 658.610.160,00 |
| | Aset Tetap Lainnya | 22.497.660,00 |
| | **Jumlah** | **62.850.039.010,00** |
| **2.** | **Kapitalisasi dari Belanja Jasa** | |
| | Peralatan dan Mesin | 244.826.000,00 |
| | Gedung dan Bangunan | 8.212.909.480,00 |
| | Jalan, Jaringan dan Irigasi | 6.934.778.649,00 |
| | **Jumlah** | **15.392.514.129,00** |
| **3.** | **Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan** | |
| | Peralatan dan Mesin | 11.667.144.274,00 |
| | Gedung dan Bangunan | 67.794.158.745,00 |
| | Jalan, Jaringan dan Irigasi | 25.900.891.129,00 |
| | Aset Tetap Lainnya | 2.977.227.752,00 |
| | **Jumlah** | **108.339.421.900,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **4.** | **Kapitalisasi dari Belanja Persediaan** | |
| | Peralatan dan Mesin | 148.775.000,00 |
| | Jalan, Jaringan dan Irigasi | 11.944.812.624,00 |
| | **Jumlah** | **12.093.587.624,00** |
| **Jumlah Aset Tetap** | | **198.675.562.663,00** |

Rincian Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap terdapat pada Lampiran 10 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah.

Selain itu, terdapat Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 yang diakui sebagai Beban Barang dan Jasa Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp646.744.771.399,00, di antaranya merupakan jumlah nilai BBM yang belum digunakan berdasarkan saldo yang ada pada *Radio Frequency Identification (RFID)* BBM. Rincian Beban Barang dan Jasa Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

| **Beban Dibayar di Muka** | |
|---|---|
| Beban Barang Dibayar di Muka | 306.163.275.096 |
| Beban Jasa Dibayar di Muka | 286.739.131.617 |
| Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka | 53.842.364.686 |
| **Jumlah Beban Dibayar Di Muka** | **646.744.771.399,00** |

**5.1.2.1.1.1.c Belanja Bunga**

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp186.000.000.000,00. Realisasi Belanja Bunga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp180.738.864.995,00 atau 97,17%.

Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 tidak terserap sebesar Rp5.261.135.005,00 atau 2,83% disebabkan adanya oleh penyesuaian kurs pada saat pelaksanaan pembayaran bunga pinjaman MRT.

Apabila realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp229.704.491.741,00 terdapat penurunan realisasi di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp48.965.626.746,00 atau 21,32%.

Realisasi belanja bunga Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

a. Pembayaran bunga pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA–1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Proyek JEDI) sebesar Rp32.415.973.802,00;

b. Pembayaran bunga pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA 1263/DSMI/2016 dan SLA-1295/DSMI/2023 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Phase II (Jakarta Kota – Bundaran HI) sebesar JPY271.509.860,27 yang dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tanggal pembayaran sebesar Rp28.905.561.486,00; dan

c. Pembayaran bunga pinjaman Sumber Lainnya dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp119.417.329.707,00.

#### 5.1.2.1.1.1.d Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.320.798.085.601,00. Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.875.837.590.937,00 atau 92,96%.

Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 tidak terserap sebesar Rp444.960.494.664,00 atau 7,04% disebabkan adanya efisiensi pada PSO PT Transjakarta yang disesuaikan dengan hasil verifikasi.

Apabila realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.539.653.281.534,00 terdapat kenaikan realisasi di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp336.184.309.403,00 atau 6,07%.

Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.875.837.590.937,00 dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Transportasi

Belanja Subsidi dalam bidang transportasi dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.524.905.503.122,00 dan terealisasi sebesar Rp5.084.658.442.903,00 atau 92,03%, dengan rincian sebagai berikut:

1) PT. Trans Jakarta

Belanja Subsidi kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) merupakan belanja untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum guna menyelenggarakan transportasi publik di DKI Jakarta. Belanja Subsidi kepada PT Trans Jakarta Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.909.930.081.062,00 dan terealisasi sebesar Rp3.628.665.936.744,00 atau 92,81%.

2) PT. MRT Jakarta

Belanja Subsidi kepada PT MRT Jakarta merupakan belanja untuk memberikan dukungan pembiayaan menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik berupa layanan angkutan dengan Moda Raya Terpadu

(MRT) di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Belanja subsidi kepada PT MRT Jakarta Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.004.054.784.399,00 dan terealisasi sebesar Rp910.956.014.876,00 atau 90,73%.

3) PT. Jakarta Propertindo

Belanja Subsidi kepada PT Jakarta Propertindo (LRT) merupakan belanja untuk memberikan dukungan pembiayaan menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik berupa layanan angkutan dengan Lintas Raya Terpadu (LRT) di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Belanja Subsidi kepada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp610.920.637.661,00 dan terealisasi sebesar Rp545.036.491.283,00 atau 89,22%.

b. Bidang Penyediaan Pangan

Belanja Subsidi dalam bidang penyediaan pangan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp793.392.582.479,00 dan terealisasi sebesar Rp791.179.148.034,00 atau 99,72%. Belanja Subsidi dalam bidang pangan Tahun Anggaran 2024 seluruhnya merupakan belanja subsidi kepada Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

c. Bidang Pengelolaan Air Limbah

Belanja Subsidi dalam bidang pengelolaan air limbah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan tidak terealisasi seluruhnya yang disebabkan oleh proses administrasi Peraturan Gubernur penugasan Perumda PAL Jaya yang belum selesai.

**5.1.2.1.1.1.e Belanja Hibah**

Belanja Hibah adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.358.144.887.494,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.307.808.095.906,00 atau 98,50%.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 tidak terserap sebesar Rp50.336.791.588,00 atau 1,50% disebabkan oleh adanya tidak terealisasi sisa hibah kepada KONI.

Apabila realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.621.682.896.507,00 terdapat penurunan realisasi di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp313.874.800.601,00 atau 8,67%.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.307.808.095.906,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.22

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 543.961.406.000 | 525.194.266.097 | 96,55 |
| 2 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 2.037.905.046.494 | 2.011.406.600.656 | 98,70 |
| 3 | Belanja Hibah Dana BOS | 734.519.050.000 | 729.447.844.153 | 99,31 |
| 4 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 41.759.385.000 | 41.759.385.000 | 100,00 |
| | **Jumlah** | **3.358.144.887.494** | **3.307.808.095.906** | **98,50** |

a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

   Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat adalah hibah yang diberikan kepada instansi Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional instansi Pemerintah Pusat yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

   Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp543.961.406.000,00 terealisasi sebesar Rp525.194.266.097,00 atau 96,55%.

b. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia

   Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia adalah hibah yang diberikan kepada Badan/Lembaga kemasyarakatan bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah berbadan hukum, memiliki surat keterangan terdaftar dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur atau pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan

nilai manfaat serta mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.037.905.046.494,00 dan terealisasi sebesar Rp2.011.406.600.656,00 atau 98,70%.

c. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja Hibah Dana BOS adalah hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer secara langsung ke rekening sekolah swasta. Nilai Belanja Hibah BOS adalah sebesar nilai transfer dana BOS ke rekening sekolah swasta.

Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp734.519.050.000,00 terealisasi sebesar Rp729.447.844.153,00 atau 99,31% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.23

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Hibah Dana BOS ke SLB Swasta | 19.603.020.000 | 19.546.159.794 | 99,71 |
| 2 | Belanja Hibah Dana BOS ke SD/MI Swasta | 171.690.230.000 | 170.152.197.837 | 99,10 |
| 3 | Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta | 145.586.860.000 | 144.355.620.038 | 99,15 |
| 4 | Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta | 142.690.200.000 | 141.364.108.550 | 99,07 |
| 5 | Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta | 254.948.740.000 | 254.029.757.934 | 99,64 |
| | **Jumlah** | **734.519.050.000** | **729.447.844.153** | **99,31** |

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah Bantuan keuangan dari APBD yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Partai Politik berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp41.759.385.000,00 dan terealisasi sebesar Rp41.759.385.000,00 atau 100,00%.

#### 5.1.2.1.1.1.f Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.551.461.654.483,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.496.629.048.637,00 atau 98,46%.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 tidak terserap sebesar Rp54.832.605.846,00 atau 1,54% disebabkan oleh adanya mekanisme verifikasi yang lebih selektif dalam pencairan bantuan sosial agar tepat sasaran.

Apabila realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp4.363.641.476.668,00 terdapat penurunan realisasi di Tahun 2024 sebesar Rp867.012.428.031,00,00 atau 19,87%.

Realisasi Belanja Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.496.629.048.637,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.24

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 3.542.472.981.186 | 3.487.787.138.637 | 98,46 |
| 2 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 8.988.673.297 | 8.841.910.000 | 98,37 |
| | **Jumlah** | **3.551.461.654.483** | **3.496.629.048.637** | **98,46** |

a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu

Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu merupakan bantuan sosial berupa biaya personil peserta didik dan kesejahteraan keluarga.

Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.542.472.981.186,00 terealisasi sebesar Rp3.487.787.138.637,00 atau 98,46%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Biaya Personal Pendidikan KJP Plus | 2.461.029.973.093 | 2.454.165.542.631 | 99,72 |

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bantuan Biaya Personal Pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) | 281.682.000.000 | 278.811.000.000 | 98,98 |
| 3 | Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah | 108.296.648.093 | 92.226.036.006 | 85,16 |
| 4 | Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Dalam Penanganan COVID 19 | 654.000.000 | 654.000.000 | 100,00 |
| 5 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ) | 530.363.280.000 | 516.060.930.000 | 97,30 |
| 6 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui Kartu Anak Jakarta (KAJ) | 95.910.300.000 | 82.682.935.000 | 86,21 |
| 7 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) | 64.536.780.000 | 63.186.695.000 | 97,91 |
| | **Jumlah** | **3.542.472.981.186** | **3.487.787.138.637** | **98,46** |

b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat merupakan bantuan sosial penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas berupa kursi roda, alat bantu dengar, kaki palsu, tongkat kaki, dan sebagainya.

Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp8.988.673.297,00 terealisasi sebesar Rp8.841.910.000,00 atau 98,37%.

#### 5.1.2.1.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp12.989.055.827.469,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.004.785.255.543,00 atau 84,72% mengalami kenaikan sebesar Rp2.147.525.187.245,00 atau 24,25% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.857.260.068.298,00.

Terdapat realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dengan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun (RPBATA) sebesar Rp235.107.098.320, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah sebesar Rp159.840.000,00 terdapat pada Dinas Perhubungan merupakan pengadaan lahan untuk pembangunan MRT fase 2.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp129.255.396.706,00 di antaranya terdapat pada:
   a. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp89.208.466.150,00 merupakan pengadaan prasarana sarana pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan dan pengadaan Kendaraan Operasional Dinas (KDO);
   b. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp6.955.938.180,00 merupakan pengadaan alat kesehatan; dan
   c. Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp13.040.461.637,00 merupakan pengadaan mebel.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp85.698.306.650,00 di antaranya terdapat pada:
   a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp39.005.328.999,00 merupakan pembangunan rumah susun Jagakarsa Jakarta Selatan;
   b. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp8.231.679.460,00 merupakan rehabilitasi gedung dinas; dan
   c. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp7.341.618.040,00 merupakan restorasi rumah dinas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, perencanaan pembangunan markas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, pembangunan gedung parkir Jatibaru dan perawatan bangunan gedung dinas teknis Jatibaru.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp19.993.554.964,00 di antaranya terdapat pada:
   a. Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp12.432.186.006,00 merupakan pembangunan waduk Marunda dan bangunan kelengkapannya di pesisir Jakarta;
   b. Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp3.653.843.520,00 merupakan pembangunan fasilitas pendukung saringan sampah TB. Simatupang; dan
   c. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp1.230.697.712,00 merupakan pembangunan Saluran Penghubung (PHB) dan kelengkapannya.

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dijelaskan sebagai berikut:

**5.1.2.1.1.2.a Belanja Tanah**

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp763.402.783.015,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp433.525.287.650,00 atau 56,79% dan mengalami penurunan sebesar Rp9.075.020.820,00 atau 2,05% bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp442.600.308.470,00. Tidak optimalnya realisasi

Belanja Modal Tanah di antaranya disebabkan oleh belum terlaksananya pembayaran pengadaan tanah pada Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Perhubungan karena terdapat tahapan yang masih dalam proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

a. Belanja Modal Tanah untuk bangunan air pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp476.315.215.500,00 terealisasi sebesar Rp371.698.983.538,00 atau 78,04%;
b. Belanja Modal Tanah untuk jalan pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp249.870.465.000,00 terealisasi sebesar Rp58.190.549.010,00 atau 23,29%; dan
c. Belanja Modal Tanah untuk jaringan pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp37.217.102.515,00 terealisasi sebesar Rp3.635.755.102,00 atau 9,77%.

Dari realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp433.525.287.650,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Tanah sebesar Rp424.288.474.547,00 dan belanja modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Tanah sebesar Rp9.236.813.103,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun 2024 yang menjadi Beban sebesar Rp6.715.345.213,00; dan
2. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp2.521.467.890,00.

#### 5.1.2.1.1.2.b Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.169.221.270.721,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.961.717.289.383,00 atau 93,45% mengalami kenaikan sebesar Rp138.741.159.134,00 atau 4,91% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.822.976.130.249,00. Kurang optimalnya realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disebabkan oleh adanya efisiensi pengadaan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

a. Belanja Modal alat angkutan, alat-alat besar, alat kantor dan rumah tangga serta peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp345.568.547.692,00 terealisasi sebesar Rp336.748.313.836,00 atau 97,45%;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BOS serta peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp297.953.822.400,00 terealisasi sebesar Rp291.830.156.838,00 atau 97,94%;
c. Belanja Modal alat angkutan, alat-alat besar, alat kantor dan rumah tangga serta peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp144.750.037.912,00 terealisasi sebesar Rp141.206.350.508,00 atau 97,55%;
d. Belanja Modal komputer, alat studio serta peralatan dan mesin lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp154.149.003.986,00 terealisasi sebesar Rp135.572.652.528,00 atau 87,95%; dan
e. Belanja Modal alat angkutan, alat-alat besar, alat kantor dan rumah tangga serta peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp119.814.882.952,00,00 terealisasi sebesar Rp109.916.089.069,00 atau 91,74%.

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.961.717.289.383,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.748.602.591.480,00 dan belanja modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp213.114.697.903,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang masih Dalam Proses Pengerjaan sebesar Rp149.801.506.774,00;
2. Belanja Modal atas pekerjaan kontraktual belum selesai yang menggunakan mekanisme RPBATA sebesar Rp48.702.830.358,00;
3. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang menjadi Beban Operasional sebesar Rp12.887.497.756,00;
4. Pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp1.234.347.102,00; dan
5. Pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 atas Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya sebesar Rp488.515.913,00.

**5.1.2.1.1.2.c Belanja Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.441.760.532.962,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.385.010.773.455,00 atau 69,30% mengalami kenaikan sebesar Rp731.955.110.045,00 atau 44,28% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.653.055.663.410,00. Anggaran Belanja

Modal Gedung dan Bangunan belum terealisasi dengan optimal di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan karena adanya pemberian kesempatan 50 hari penyelesaian pekerjaan yang berlanjut ke tahun berikutnya.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

a. Belanja Modal bangunan gedung tempat pendidikan dan gedung kantor pada Unit Pengelola Prasarana dan Saran Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp1.327.479.231.571,00 terealisasi sebesar Rp772.759.252.727,00 atau 58,21%;
b. Belanja Modal bangunan rumah dinas dan gedung kantor pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp737.214.884.638,00 terealisasi sebesar Rp416.674.516.794,00 atau 56,52%;
c. Belanja Modal flat/rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp356.632.866.409,00 terealisasi sebesar Rp330.158.887.007,00 atau 92,58%;
d. Belanja Modal bangunan gedung tempat olahraga, gedung kantor dan pagar pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp195.158.756.463,00 terealisasi sebesar Rp177.655.238.862,00 atau 91,03%; dan
e. Belanja Modal untuk bangunan gedung kantor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp135.331.366.692,00 terealisasi sebesar Rp90.936.919.787,00 atau 67,20%.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.385.010.773.455,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.606.666.459.534,00 dan Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp778.344.313.921,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang masih Dalam Proses Pengerjaan sebesar Rp673.903.210.435,00;
2. Pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp75.771.592.587,00;
3. Belanja Modal yang diakui sebagai Uang Muka sebesar Rp13.978.875.153,00;
4. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang menjadi beban sebesar Rp11.172.050.076,00;

5. Belanja Modal atas pekerjaan kontraktual belum selesai yang menggunakan mekanisme RPBATA sebesar Rp2.398.606.038,00; dan
6. Pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 atas temuan, klaim bank garansi, dan koreksi lainnya sebesar Rp1.119.979.632,00.

**5.1.2.1.1.2.d Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp5.352.974.561.800,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.975.949.887.118,00 atau 92,96% mengalami kenaikan sebesar Rp1.176.922.313.642,00 atau 30,98% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.799.027.573.476,00. Kurang optimalnya Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi di antaranya disebabkan oleh adanya efisiensi pembangunan waduk di Dinas Sumber Daya Air.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

a. Belanja Modal jaringan listrik, jalan, instalasi air kotor, air irigasi dan pengolahan sampah pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp1.393.444.620.779,00 terealisasi sebesar Rp1.371.937.840.088,00 atau 98,46%;
b. Belanja Modal bangunan waduk irigasi, air irigasi, bangunan pengamanan sungai dan instalasi air kotor pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp1.453.939.470.013,00 terealisasi sebesar Rp1.209.088.314.201,00 atau 83,16%;
c. Belanja Modal untuk jalan provinsi, jembatan penyeberangan dan instalasi air kotor pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp974.014.646.339,00 terealisasi sebesar Rp937.068.920.322,00 atau 96,21%;
d. Belanja Modal bangunan air irigasi, bangunan pengamanan sungai dan instalasi air pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp131.719.781.242,00 terealisasi sebesar Rp129.774.028.421,00 atau 98,52%; dan
e. Belanja Modal bangunan air irigasi dan instalasi air pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp123.442.172.307,00 terealisasi sebesar Rp118.986.622.115,00 atau 98,52%.

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.975.949.887.118,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.350.424.851.647,00 dan belanja modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Jalan,

Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.625.525.035.471,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp77.926.504.446;
2. Belanja Modal yang di akui sebagai Uang Muka sebesar Rp57.150.309.759,00;
3. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang menjadi beban sebesar Rp25.881.455.082,00;
4. Pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 atas temuan, klaim bank garansi, dan koreksi lainnya sebesar Rp1.893.720.921,00;
5. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang masih dalam proses pengerjaan Rp1.462.143.558.321; dan
6. Belanja Modal atas pekerjaan kontraktual belum selesai yang menggunakan mekanisme RPBATA sebesar Rp529.486.942,00.

#### 5.1.2.1.1.2.e Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp128.157.171.217,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp119.496.671.697,00 atau 93,24% mengalami penurunan sebesar Rp20.103.720.996,00 atau 14,40% bila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp139.600.392.693,00. Kurang optimalnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di antaranya disebabkan oleh adanya efisiensi hasil negosiasi harga dan penyesuaian kebutuhan satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan.

Realisasi belanja Aset Tetap lainnya tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BOS dan buku pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp115.328.309.627,00 terealisasi sebesar Rp107.889.492.352,00 atau 93,55%;
b. Belanja Modal buku pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp2.788.700.464,00 terealisasi sebesar Rp2.779.829.994,00 atau 99,68%;
c. Belanja Modal alat musik dan alat peraga kesenian pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp1.759.966.434,00 terealisasi sebesar Rp1.647.783.000,00 atau 93,63%;
d. Belanja Modal buku pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp1.210.110.320,00 terealisasi sebesar Rp1.194.102.500,00 atau 98,68%; dan

e. Belanja Modal buku pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp1.050.264.420,00 terealisasi sebesar Rp975.914.081,00 atau 92,92%.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp119.496.671.697,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp85.633.503.655,00 dan Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp33.863.168.042,00 yang disajikan sebagai Beban.

**5.1.2.1.1.2.f Belanja Aset Lainnya**

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp133.539.507.754,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp129.085.346.240,00 atau 96,66% mengalami kenaikan sebesar Rp129.085.346.240,00 atau 100,00% karena tidak ada realisasi di Tahun Anggaran 2023. Kurang optimalnya Belanja Modal Aset Lainnya di antaranya disebabkan oleh adanya efisiensi pengadaan Lisensi pada Unit Pengelola Jakarta Smart City.

Realisasi belanja Aset lainnya tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

a. Belanja Modal *Software* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp115.456.062.981,00 terealisasi sebesar Rp113.463.364.940,00 atau 98,27%;
b. Belanja Modal *Lisensi* dan *Franchise* pada Pusat Data dan Informasi Keuangan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp3.069.663.375,00 terealisasi sebesar Rp2.999.897.500,00 atau 97,73%;
c. Belanja Modal *Lisensi* dan *Franchise dan Software* pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp2.958.375.000,00 terealisasi sebesar Rp2.826.615.000,00 atau 95,55%;
d. Belanja Modal *Lisensi* dan *Franchise dan Software* pada Unit Pengelola Jakarta Smart City Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp4.535.641.899,00 terealisasi sebesar Rp2.433.720.000,00 atau 53,66%; dan
e. Belanja Modal *Software* pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp2.368.652.041,00 terealisasi sebesar Rp2.367.700.000,00 atau 99,96%.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp129.085.346.240,00, seluruhnya disajikan sebagai Aset Lainnya.

#### 5.1.2.1.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan belanja yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya atau keadaan darurat mendesak.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.365.518.170.267,00. Tidak ada realisasi BTT Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dikarenakan tidak adanya kebutuhan yang bersifat darurat dan mendesak.Tidak ada realisasi BTT Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dikarenakan tidak adanya kebutuhan yang bersifat darurat dan mendesak.

#### 5.1.2.1.1.4 Belanja Transfer

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri dari Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan. Transfer/Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Belanja Transfer/Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp385.033.285.520,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp383.997.067.520,00 atau 99,73%. Anggaran realisasi Belanja Bantuan Keuangan tidak terealisasi sepenuhnya disebabkan oleh tidak terserapnya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota Tangerang. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp383.997.067.520,00 berasal dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran 2024

26

| No | Nama Penerima | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota** | | | |
| 1 | Pemerintah Kota Bekasi | 1.000.000.000 | 994.826.000 | 99,48 |
| 2 | Pemerintah Kabupaten Bekasi | 1.000.000.000 | 994.826.000 | 99,48 |
| 3 | Pemerintah Kota Bogor | 1.000.000.000 | 994.826.000 | 99,48 |
| 4 | Pemerintah Kabupaten Bogor | 1.000.000.000 | 994.826.000 | 99,48 |
| 5 | Pemerintah Kota Tangerang | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 |

| No | Nama Penerima | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Pemerintah Kabupaten Tangerang | 1.000.000.000 | 994.826.000 | 99,48 |
| 7 | Pemerintah Kota Tangerang Selatan | 1.000.000.000 | 994.826.000 | 99,48 |
| 8 | Pemerintah Kota Depok | 1.000.000.000 | 994.826.000 | 99,48 |
| | **Sub Jumlah** | **8.000.000.000** | **6.963.782.000** | **87,05** |
| **B** | **Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| 1 | Pemerintah Kota Bekasi | 371.773.962.000 | 371.773.962.000 | 100,00 |
| 2 | Pemerintah Kabupaten Bekasi | 5.259.323.520 | 5.259.323.520 | 100,00 |
| | **Sub Jumlah** | **377.033.285.520** | **377.033.285.520** | **100,00** |
| | **Jumlah** | **385.033.285.520** | **383.997.067.520** | **99,73** |

Apabila realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp356.446.480.500,00 terdapat kenaikan realisasi di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp27.550.587.020,00 atau 7,73%.

**Belanja BLUD**

Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 termasuk Belanja yang didanai dari Pendapatan BLUD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 55 Belanja BLUD terdiri dari Belanja Operasi BLUD dan Belanja Modal BLUD. Total anggaran Belanja BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.171.928.289.070,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.980.905.126.090,00 atau 95,42%. Belanja BLUD, terdiri dari:

a. Belanja Operasi BLUD mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi BLUD. Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Operasi BLUD dianggarkan sebesar Rp3.840.400.573.896,00 dan terealisasi sebesar Rp3.700.858.357.054,00 atau 96,37% dengan rincian sebagai berikut:
   1) Belanja Pegawai BLUD dianggarkan sebesar Rp222.991.846.100,00 dan terealisasi sebesar Rp207.197.598.607,00 atau 92,92%.
   2) Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp3.617.408.727.796,00 dan terealisasi sebesar Rp3.493.660.758.447,00 atau 96,58%.
b. Belanja Modal BLUD mencakup seluruh Belanja BLUD untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan,

Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya.

Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal BLUD dianggarkan sebesar Rp331.527.715.174,00 dan terealisasi sebesar Rp280.046.769.036,00 atau 84,47% dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp199.710.384.600,00 dan terealisasi sebesar Rp175.011.343.994,00 atau 87,63%;
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp124.435.312.867,00 dan terealisasi sebesar Rp98.718.271.842,00 atau 79,33%;
3) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp5.782.600.107,00 dan terealisasi sebesar Rp5.432.395.700,00 atau 93,94%;
4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp1.203.567.600,00 dan terealisasi sebesar Rp491.757.500,00 atau 40,86%; dan
5) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp395.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp393.000.000,00 atau 99,28%.

Selain realisasi belanja tersebut di atas, terdapat belanja BLUD yang belum disahkan sebesar Rp196.325.233,00 pada UP Terminal Terpadu Pulo Gebang dan SMK Negeri 57 Jakarta karena melebihi ambang batas pengesahan belanja BLUD. Belanja yang belum disahkan pada UP Terminal Terpadu Pulo Gebang sebesar Rp196.123.720,00 merupakan belanja barang dan jasa pada kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD guna pelaksanaan kegiatan operasional Terminal Pulo Gebang khususnya pada masa Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Belanja yang belum disahkan pada SMK Negeri 57 Jakarta sebesar Rp201.513,00 merupakan belanja barang dan jasa pada kegiatan operasional untuk belanja bahan produksi karena ada peningkatan pesanan makanan dan ruangan pada pertengahan hingga akhir tahun.

#### 5.1.2.2 Klasifikasi Urusan

Belanja Daerah menurut Klasifikasi Urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Klasifikasi Urusan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintahan, dan Kewilayahan yang penanganannya

dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan.

Belanja Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.27

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Tahun Anggaran 2024 | | % | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| **I** | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | **42.247.891.005.900** | **39.437.190.658.046** | **93,35** | **38.580.032.579.763** |
| 1 | Pendidikan | 17.780.831.753.367 | 16.786.112.162.883 | 94,41 | 16.201.439.626.040 |
| 2 | Kesehatan | 10.845.875.887.486 | 10.401.277.121.757 | 95,90 | 10.724.304.443.276 |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8.060.621.581.050 | 6.961.529.482.334 | 86,36 | 6.203.038.764.647 |
| 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1.433.518.119.145 | 1.345.992.644.823 | 93,89 | 1.457.866.291.925 |
| 5 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 2.666.125.746.128 | 2.543.497.357.142 | 95,40 | 2.428.980.997.223 |
| 6 | Sosial | 1.460.917.918.724 | 1.398.781.889.107 | 95,75 | 1.564.402.456.652 |
| **II** | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | **19.176.799.072.502** | **18.018.597.448.948** | **93,96** | **15.795.000.407.689** |
| 1 | Tenaga Kerja | 463.747.326.534 | 440.346.581.650 | 94,95 | 465.648.252.934 |
| 2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 24.035.007.234 | 23.616.938.450 | 98,26 | 21.282.381.599 |
| 3 | Pangan | 1.023.075.218.120 | 1.007.437.399.142 | 98,47 | 1.263.489.279.283 |
| 4 | Pertanahan | 2.563.377.046 | 2.527.787.500 | 98,61 | 2.544.200.000 |
| 5 | Lingkungan Hidup | 5.335.230.559.859 | 5.119.308.421.518 | 95,95 | 3.564.073.321.008 |
| 6 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 392.999.963.442 | 372.495.915.202 | 94,78 | 307.347.244.494 |
| 7 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 467.033.126.924 | 465.756.946.911 | 99,73 | 465.818.037.592 |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Tahun Anggaran 2024 | | % | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 8 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana | 197.246.556.406 | 186.661.536.649 | 94,63 | 200.427.200.629 |
| 9 | Perhubungan | 7.170.007.662.820 | 6.557.630.799.290 | 91,46 | 6.250.475.611.783 |
| 10 | Komunikasi dan Informatika | 773.763.124.353 | 665.027.904.567 | 85,95 | 592.057.315.269 |
| 11 | Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 247.620.698.178 | 235.420.385.134 | 95,07 | 218.412.113.931 |
| 12 | Penanaman Modal | 781.931.306.010 | 752.603.485.273 | 96,25 | 715.395.751.782 |
| 13 | Kepemudaan dan Olahraga | 1.547.180.901.366 | 1.486.821.274.565 | 96,10 | 1.018.397.155.065 |
| 14 | Statistik | 7.883.316.582 | 6.448.874.000 | 81,80 | 5.879.373.700 |
| 15 | Persandian | 8.041.176.320 | 7.205.840.040 | 89,61 | 14.710.520.000 |
| 16 | Kebudayaan | 465.545.189.929 | 429.725.960.725 | 92,31 | 469.070.578.956 |
| 17 | Perpustakaan | 104.352.157.725 | 101.664.392.075 | 97,42 | 77.232.292.878 |
| 18 | Kearsipan | 164.542.403.654 | 157.897.006.257 | 95,96 | 142.739.776.786 |
| **III** | **Urusan Pemerintahan Pilihan** | **1.051.777.854.394** | **972.704.988.086** | **92,48** | **1.052.586.716.964** |
| 1 | Kelautan dan Perikanan | 33.079.378.022 | 31.402.045.098 | 94,93 | 49.913.442.011 |
| 2 | Pariwisata | 412.251.605.638 | 383.444.641.730 | 93,01 | 375.055.403.592 |
| 3 | Pertanian | 44.647.639.023 | 43.249.011.440 | 96,87 | 42.956.177.389 |
| 4 | Kehutanan | 407.002.952.115 | 373.400.187.134 | 91,74 | 403.539.403.791 |
| 5 | Energi dan Sumber Daya Mineral | 32.812.025.764 | 27.616.762.570 | 84,17 | 32.132.609.833 |
| 6 | Perdagangan | 55.276.957.615 | 50.805.535.433 | 91,91 | 46.263.829.324 |
| 7 | Perindustrian | 66.707.296.217 | 62.786.804.681 | 94,12 | 102.725.851.024 |
| **IV** | **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** | **2.361.003.417.864** | **2.266.547.374.141** | **96,00** | **2.182.729.677.500** |
| 1 | Sekretariat Daerah | 1.504.619.343.744 | 1.450.604.453.707 | 96,41 | 1.412.902.105.296 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 856.384.074.120 | 815.942.920.434 | 95,28 | 769.827.572.204 |
| **V** | **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** | **4.659.753.798.707** | **2.991.577.985.109** | **64,20** | **2.809.707.455.104** |
| 1 | Perencanaan | 176.787.234.044 | 165.767.555.504 | 93,77 | 120.142.823.053 |
| 2 | Keuangan | 4.141.144.313.424 | 2.519.599.086.837 | 60,84 | 2.432.059.695.795 |
| 3 | Kepegawaian | 234.078.887.664 | 205.774.319.289 | 87,91 | 157.542.734.250 |
| 4 | Pendidikan dan Pelatihan | 100.126.413.121 | 93.152.101.379 | 93,03 | 98.415.261.406 |
| 5 | Penelitian dan Pengembangan | 7.616.950.454 | 7.284.922.100 | 95,64 | 1.546.940.600 |
| **VI** | **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan** | **241.644.019.498** | **198.488.489.660** | **82,14** | **164.905.452.694** |
| 1 | Inspektorat Daerah | 241.644.019.498 | 198.488.489.660 | 82,14 | 164.905.452.694 |
| **VII** | **Unsur Kewilayahan** | **5.294.789.160.355** | **5.145.549.347.575** | **97,18** | **4.941.531.029.169** |
| 1 | Kecamatan Administrasi | 3.074.338.659.192 | 3.024.135.809.634 | 98,37 | 2.979.376.794.645 |
| 2 | Kota Administrasi | 2.092.061.112.523 | 2.000.052.042.439 | 95,60 | 1.841.857.205.696 |
| 3 | Kabupaten Administrasi | 128.389.388.640 | 121.361.495.502 | 94,53 | 120.297.028.828 |
| **VIII** | **Kesatuan Bangsa dan Politik** | **989.454.881.713** | **982.061.548.321** | **99,25** | **1.244.116.309.531** |
| 1 | Kesatuan Bangsa dan Politik | 989.454.881.713 | 982.061.548.321 | 99,25 | 1.244.116.309.531 |
| | **Jumlah (I. II. III. IV. V. VI. VII. dan VIII)** | **76.023.113.210.933** | **70.012.717.839.886** | **92,09** | **66.770.609.628.414** |

**a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengelolaan Pendidikan | 9.679.779.777.502 | 8.904.201.517.745 | 91,99 |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 8.101.051.975.865 | 7.881.910.645.138 | 97,29 |
| **Jumlah** | | **17.780.831.753.367** | **16.786.112.162.883** | **94,41** |

**2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 6.422.070.204.223 | 6.120.607.249.260 | 95,31 |
| 2. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 2.848.735.747.202 | 2.752.804.914.427 | 96,63 |
| 3. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1.574.265.029.299 | 1.527.091.732.070 | 97,00 |
| 4. | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 528.938.455 | 514.743.000 | 97,32 |
| 5. | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | 275.968.307 | 258.483.000 | 93,66 |
| **Jumlah** | | **10.845.875.887.486** | **10.401.277.121.757** | **95,90** |

**3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 2.050.685.548.907 | 1.829.815.735.712 | 89,23 |
| 2. | Program Penyelenggaraan Jalan | 1.908.700.900.429 | 1.652.290.016.276 | 86,57 |
| 3. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.602.730.295.241 | 1.514.049.592.684 | 94,47 |
| 4. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | 916.029.345.920 | 888.464.544.709 | 96,99 |
| 5. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 659.333.715.040 | 483.737.685.134 | 73,37 |
| 6. | Program Penataan Bangunan Gedung | 766.373.472.109 | 445.286.233.429 | 58,10 |
| 7. | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 134.019.098.206 | 127.049.949.841 | 94,80 |
| 8. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 22.266.374.312 | 20.404.747.385 | 91,64 |
| 9. | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 482.830.886 | 430.977.164 | 89,26 |
| **Jumlah** | | **8.060.621.581.050** | **6.961.529.482.334** | **86,36** |

**4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 565.861.327.964 | 537.372.766.140 | 94,97 |
| 2. | Program Pengembangan Perumahan | 452.524.707.988 | 437.392.871.999 | 96,66 |
| 3. | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 415.132.083.193 | 371.227.006.684 | 89,42 |
| **Jumlah** | | **1.433.518.119.145** | **1.345.992.644.823** | **93,89** |

**5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.925.648.123.912 | 1.831.168.954.633 | 95,09 |
| 2. | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran | 357.464.445.377 | 340.537.097.491 | 95,26 |
| 3. | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 280.006.679.170 | 274.753.990.681 | 98,12 |
| 4. | Program Penanggulangan Bencana | 103.006.497.669 | 97.037.314.337 | 94,21 |
| **Jumlah** | | **2.666.125.746.128** | **2.543.497.357.142** | **95,40** |

**6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 749.140.348.344 | 719.136.164.823 | 95,99 |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 359.560.543.933 | 341.267.689.771 | 94,91 |
| 3. | Program Rehabilitasi Sosial | 293.805.295.886 | 284.563.992.435 | 96,85 |
| 4. | Program Penanganan Bencana | 38.250.636.529 | 35.257.044.218 | 92,17 |
| 5. | Program Pemberdayaan Sosial | 20.161.094.032 | 18.556.997.860 | 92,04 |
| **Jumlah** | | **1.460.917.918.724** | **1.398.781.889.107** | **95,75** |

**b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Realisasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 321.788.886.222 | 301.552.954.940 | 93,71 |
| 2. | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 105.760.383.117 | 103.442.917.581 | 97,81 |
| 3. | Program Penempatan Tenaga Kerja | 30.225.467.429 | 29.471.129.199 | 97,50 |
| 4. | Program Pengawasan Ketenagakerjaan | 3.677.518.676 | 3.604.240.890 | 98,01 |
| 5. | Program Hubungan Industrial | 2.089.165.000 | 2.087.310.000 | 99,91 |
| 6. | Program Perencanaan Tenaga Kerja | 205.906.090 | 188.029.040 | 91,32 |
| **Jumlah** | | **463.747.326.534** | **440.346.581.650** | **94,95** |

**2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No. | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Perlindungan Perempuan | 16.617.221.664 | 16.324.776.976 | 98,24 |
| 2. | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 2.459.563.794 | 2.402.082.153 | 97,66 |
| 3. | Program Perlindungan Khusus Anak | 2.198.817.547 | 2.166.301.465 | 98,52 |
| 4. | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 1.753.470.000 | 1.749.075.796 | 99,75 |
| 5. | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), | 908.299.229 | 878.267.060 | 96,69 |
| 6. | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | 97.635.000 | 96.435.000 | 98,77 |
| **Jumlah** | | **24.035.007.234** | **23.616.938.450** | **98,26** |

**3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No. | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 795.373.542.140 | 793.000.639.099 | 99,70 |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 224.919.432.287 | 211.739.320.753 | 94,14 |
| 3. | Program Pengawasan Keamanan Pangan | 2.782.243.693 | 2.697.439.290 | 96,95 |
| **Jumlah** | | **1.023.075.218.120** | **1.007.437.399.142** | **98,47** |

### 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No. | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penatagunaan Tanah | 2.563.377.046 | 2.527.787.500 | 98,61 |
| **Jumlah** | | **2.563.377.046** | **2.527.787.500** | **98,61** |

### 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No. | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengelolaan Persampahan | 3.279.261.371.029 | 3.194.798.389.841 | 97,42 |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.037.407.741.690 | 938.320.359.506 | 90,45 |
| 3. | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | 899.052.739.577 | 869.487.843.215 | 96,71 |
| 4. | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | 106.726.954.624 | 104.951.201.514 | 98,34 |
| 5. | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 5.167.302.333 | 5.093.933.708 | 98,58 |
| 6. | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 2.700.833.332 | 2.484.211.966 | 91,98 |
| 7. | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | 2.849.767.004 | 2.267.096.738 | 79,55 |
| 8. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 1.434.537.918 | 1.360.730.750 | 94,85 |
| 9. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 629.312.352 | 544.654.280 | 86,55 |
| **Jumlah** | | **5.335.230.559.859** | **5.119.308.421.518** | **95,95** |

### 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 320.592.224.819 | 302.233.765.954 | 94,27 |
| 2. | Program Pendaftaran Penduduk | 63.678.272.500 | 62.790.059.654 | 98,61 |
| 3. | Program Pencatatan Sipil | 6.297.553.416 | 5.046.248.558 | 80,13 |
| 4. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 2.103.756.201 | 2.101.297.691 | 99,88 |
| 5. | Program Pengelolaan | 328.156.506 | 324.543.345 | 98,90 |

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| | Profil Kependudukan | | | |
| **Jumlah** | | **392.999.963.442** | **372.495.915.202** | **94,78** |

**7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 467.033.126.924 | 465.756.946.911 | 99,73 |
| **Jumlah** | | **467.033.126.924** | **465.756.946.911** | **99,73** |

**8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 177.786.738.263 | 168.216.091.215 | 94,62 |
| 2. | Program Pembinaan Keluarga Berencana | 9.060.007.967 | 8.610.047.494 | 95,03 |
| 3. | Program Pengendalian Penduduk | 8.558.052.429 | 8.011.297.090 | 93,61 |
| 4. | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | 1.841.757.747 | 1.824.100.850 | 99,04 |
| **Jumlah** | | **197.246.556.406** | **186.661.536.649** | **94,63** |

**9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 6.269.558.691.719 | 5.705.198.220.669 | 91,00 |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 856.741.629.586 | 812.987.434.642 | 94,89 |
| 3. | Program Pengelolaan Pelayaran | 39.767.739.396 | 35.829.816.457 | 90,10 |
| 4. | Program Pengelolaan Perkeretaapian | 3.939.602.119 | 3.615.327.522 | 91,77 |
| **Jumlah** | | **7.170.007.662.820** | **6.557.630.799.290** | **91,46** |

**10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 591.983.240.816 | 502.571.846.010 | 84,90 |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan | 116.930.860.996 | 105.973.192.772 | 90,63 |

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| | Daerah Provinsi | | | |
| 3. | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 64.849.022.541 | 56.482.865.785 | 87,10 |
| **Jumlah** | | **773.763.124.353** | **665.027.904.567** | **85,95** |

### 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 181.050.903.519 | 171.861.892.367 | 94,92 |
| 2. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | 65.338.433.349 | 62.395.498.177 | 95,50 |
| 3. | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 748.445.752 | 735.079.390 | 98,21 |
| 4. | Program Pengembangan UMKM | 233.596.279 | 226.627.800 | 97,02 |
| 5. | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 241.519.279 | 193.487.400 | 80,11 |
| 6. | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 7.800.000 | 7.800.000 | 100,00 |
| **Jumlah** | | **247.620.698.178** | **235.420.385.134** | **95,07** |

### 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 608.224.623.701 | 582.286.415.513 | 95,74 |
| 2. | Program Pelayanan Penanaman Modal | 143.024.571.319 | 141.118.649.082 | 98,67 |
| 3. | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 16.773.782.238 | 16.350.316.335 | 97,48 |
| 4. | Program Promosi Penanaman Modal | 8.723.336.557 | 7.995.671.845 | 91,66 |
| 5. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 2.794.386.163 | 2.575.682.398 | 92,17 |
| 6. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 2.390.606.032 | 2.276.750.100 | 95,24 |
| **Jumlah** | | **781.931.306.010** | **752.603.485.273** | **96,25** |

### 13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengembangan daya saing keolahragaan | 1.147.748.617.563 | 1.109.734.386.483 | 96,69 |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan | 372.338.257.800 | 351.197.598.199 | 94,32 |

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| | Daerah Provinsi | | | |
| 3. | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 22.530.330.842 | 21.461.383.041 | 95,26 |
| 4. | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 4.563.695.161 | 4.427.906.842 | 97,02 |
| **Jumlah** | | **1.547.180.901.366** | **1.486.821.274.565** | **96,10** |

### 14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 7.883.316.582 | 6.448.874.000 | 81,80 |
| **Jumlah** | | **7.883.316.582** | **6.448.874.000** | **81,80** |

### 15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | 8.041.176.320 | 7.205.840.040 | 89,61 |
| **Jumlah** | | **8.041.176.320** | **7.205.840.040** | **89,61** |

### 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 273.266.570.748 | 254.596.289.649 | 93,17 |
| 2. | Program Pengembangan Kebudayaan | 117.715.007.792 | 104.004.096.092 | 88,35 |
| 3. | Program Pengelolaan Permuseuman | 61.189.878.800 | 58.459.851.019 | 95,54 |
| 4. | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | 13.373.732.589 | 12.665.723.965 | 94,71 |
| **Jumlah** | | **465.545.189.929** | **429.725.960.725** | **92,31** |

### 17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pembinaan Perpustakaan | 103.462.049.943 | 100.778.710.156 | 97,41 |
| 2. | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | 890.107.782 | 885.681.919 | 99,50 |
| **Jumlah** | | **104.352.157.725** | **101.664.392.075** | **97,42** |

### 18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 142.539.525.367 | 137.102.328.200 | 96,19 |
| 2. | Program Pengelolaan Arsip | 22.002.878.287 | 20.794.678.057 | 94,51 |
| **Jumlah** | | **164.542.403.654** | **157.897.006.257** | **95,96** |

**c. Urusan Pemerintahan Pilihan**

Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 10.012.467.092 | 9.629.135.799 | 96,17 |
| 2. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 8.738.560.772 | 8.316.359.268 | 95,17 |
| 3. | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 8.325.911.790 | 7.967.455.970 | 95,69 |
| 4. | Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 4.731.890.068 | 4.353.582.813 | 92,01 |
| 5. | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 1.270.548.300 | 1.135.511.248 | 89,37 |
| **Jumlah** | | **33.079.378.022** | **31.402.045.098** | **94,93** |

**2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 191.724.404.662 | 177.052.671.706 | 92,35 |
| 2. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 98.191.726.392 | 91.696.962.544 | 93,39 |
| 3. | Program Pemasaran Pariwisata | 73.322.121.902 | 68.672.225.255 | 93,66 |
| 4. | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 42.991.437.317 | 40.323.799.266 | 93,79 |
| 5. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 6.021.915.365 | 5.698.982.959 | 94,64 |
| **Jumlah** | | **412.251.605.638** | **383.444.641.730** | **93,01** |

**3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 14.136.988.238 | 13.293.258.118 | 94,03 |

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Program Penyuluhan Pertanian | 11.322.309.939 | 11.121.749.904 | 98,23 |
| 3. | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 9.477.251.030 | 9.381.938.906 | 98,99 |
| 4. | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 8.731.656.096 | 8.479.902.617 | 97,12 |
| 5. | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 979.433.720 | 972.161.895 | 99,26 |
| **Jumlah** | | **44.647.639.023** | **43.249.011.440** | **96,87** |

**4) Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 375.842.554.668 | 343.451.258.950 | 91,38 |
| 2. | Program Pengelolaan Hutan | 30.081.330.204 | 28.941.441.513 | 96,21 |
| 3. | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | 588.914.786 | 542.307.876 | 92,09 |
| 4. | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | 348.131.101 | 331.172.625 | 95,13 |
| 5. | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | 142.021.356 | 134.006.170 | 94,36 |
| **Jumlah** | | **407.002.952.115** | **373.400.187.134** | **91,74** |

**5) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengelolaan Aspek Kegeologian | 17.699.999.922 | 15.589.187.922 | 88,07 |
| 2. | Program Pengelolaan Energi Terbarukan | 7.675.850.009 | 6.854.780.000 | 89,30 |
| 3. | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | 7.436.175.833 | 5.172.794.648 | 69,56 |
| **Jumlah** | | **32.812.025.764** | **27.616.762.570** | **84,17** |

**6) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 40.775.161.309 | 37.101.178.822 | 90,99 |
| 2. | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | 7.762.410.578 | 7.357.891.202 | 94,79 |

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Program Pengembangan Ekspor | 6.485.224.350 | 6.125.311.109 | 94,45 |
| 4. | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 254.161.378 | 221.154.300 | 87,01 |
| **Jumlah** | | **55.276.957.615** | **50.805.535.433** | **91,91** |

**7) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | 66.697.488.468 | 62.777.054.681 | 94,12 |
| 2. | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 9.807.749 | 9.750.000 | 99,41 |
| **Jumlah** | | **66.707.296.217** | **62.786.804.681** | **94,12** |

**d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

Realisasi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**1) Sekretariat Daerah**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.027.895.989.377 | 985.367.307.163 | 95,86 |
| 2. | Program Kesejahteraan Rakyat | 350.505.480.298 | 344.753.042.345 | 98,36 |
| 3. | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 81.752.409.742 | 81.680.048.868 | 99,91 |
| 4. | Program Penataan Organisasi | 34.174.191.573 | 29.544.323.372 | 86,45 |
| 5. | Program Perekonomian dan Pembangunan | 4.145.662.900 | 3.586.419.900 | 86,51 |
| 6. | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | 3.571.874.195 | 3.208.705.840 | 89,83 |
| 7. | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 2.361.091.463 | 2.264.376.219 | 95,90 |
| 8. | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | 212.644.196 | 200.230.000 | 94,16 |
| **Jumlah** | | **1.504.619.343.744** | **1.450.604.453.707** | **96,41** |

**2) Sekretariat DPRD**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 478.928.429.390 | 454.299.800.902 | 94,86 |

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 377.455.644.730 | 361.643.119.532 | 95,81 |
| **Jumlah** | | **856.384.074.120** | **815.942.920.434** | **95,28** |

**e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

Belanja Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan sampai dengan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**1) Urusan Perencanaan**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 148.030.755.501 | 139.769.124.308 | 94,42 |
| 2. | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 25.219.405.981 | 22.545.839.696 | 89,40 |
| 3. | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 3.537.072.562 | 3.452.591.500 | 97,61 |
| **Jumlah** | | **176.787.234.044** | **165.767.555.504** | **93,77** |

**2) Urusan Keuangan**

Program -program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.686.956.858.271 | 1.474.537.709.995 | 87,41 |
| 2. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 1.983.849.937.666 | 610.896.313.360 | 30,79 |
| 3. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 367.732.343.565 | 339.366.640.267 | 92,29 |
| 4. | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 102.605.173.922 | 94.798.423.215 | 92,39 |
| **Jumlah** | | **4.141.144.313.424** | **2.519.599.086.837** | **60,84** |

**3) Urusan Kepegawaian**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 168.049.661.234 | 162.029.915.257 | 96,42 |
| 2. | Program Kepegawaian Daerah | 66.029.226.430 | 43.744.404.032 | 66,25 |
| | **Jumlah** | **234.078.887.664** | **205.774.319.289** | **87,91** |

**4) Pendidikan dan Pelatihan**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 66.702.582.370 | 62.844.589.349 | 94,22 |
| 2. | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 33.423.830.751 | 30.307.512.030 | 90,68 |
| **Jumlah** | | **100.126.413.121** | **93.152.101.379** | **93,03** |

**5) Penelitian dan Pengembangan**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penelitian dan Pengembangan | 7.616.950.454 | 7.284.922.100 | 95,64 |
| **Jumlah** | | **7.616.950.454** | **7.284.922.100** | **95,64** |

**f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

Realisasi Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**1) Inspektorat**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pembangunan Daerah Provinsi | 181.300.048.882 | 163.159.047.955 | 89,99 |
| 2. | Program Penyelenggara Pengawasan | 40.297.704.820 | 21.660.021.280 | 53,75 |
| 3. | Program Perumusan kebijakan Pendampingan dan Asistensi | 20.046.265.796 | 13.669.420.425 | 68,19 |
| **Jumlah** | | **241.644.019.498** | **198.488.489.660** | **82,14** |

**g. Unsur Kewilayahan**

Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Kewilayahan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**1) Kecamatan Administrasi**

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pembangunan Daerah Provinsi | 2.520.657.356.719 | 2.488.535.350.251 | 98,73 |
| 2. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 535.976.188.413 | 518.517.832.333 | 96,74 |
| 3. | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 17.705.114.060 | 17.082.627.050 | 96,48 |
| **Jumlah** | | **3.074.338.659.192** | **3.024.135.809.634** | **98,37** |

### 2) Kota Administrasi

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 2.077.004.371.457 | 1.985.920.792.906 | 95,61 |
| 2. | Program Pengelolaan Kota Administrasi | 15.056.741.066 | 14.131.249.533 | 93,85 |
| **Jumlah** | | **2.092.061.112.523** | **2.000.052.042.439** | **95,60** |

### 3) Kabupaten Administrasi

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 127.851.130.670 | 120.951.622.302 | 94,60 |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan | 538.257.970 | 409.873.200 | 76,15 |
| **Jumlah** | | **128.389.388.640** | **121.361.495.502** | **94,53** |

## h. Unsur Pemerintahan Umum

Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 747.592.996.551 | 745.922.814.003 | 99,78 |
| 2. | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 154.338.566.086 | 153.635.139.766 | 99,54 |
| 3. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 58.166.791.596 | 54.813.475.054 | 94,23 |
| | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 17.174.288.192 | 16.584.414.681 | 96,57 |
| 4. | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 10.099.039.624 | 9.029.807.493 | 89,41 |
| 6. | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 2.083.199.664 | 2.075.897.324 | 99,65 |
| **Jumlah** | | **989.454.881.713** | **982.061.548.321** | **99,25** |

### 5.1.3 Surplus/Defisit

Surplus/Defisit pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar (Rp1.076.287.351.044,00). Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.939.376.306.649,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 74.946.825.859.889 | 72.952.104.892.735 |
| Belanja Daerah | 76.023.113.210.933 | 70.012.728.586.086 |
| Belanja Operasi | 61.283.505.927.677 | 58.623.946.263.023 |
| Belanja Modal | 12.989.055.827.469 | 11.004.785.255.543 |
| Belanja Tidak Terduga | 1.365.518.170.267 | - |
| Belanja Transfer | 385.033.285.520 | 383.997.067.520 |
| Surplus/Defisit | (1.076.287.351.044) | 2.939.376.306.649 |

### 5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan anggaran masing-masing Rp10.255.502.731.787,00 dan Rp9.179.215.380.743,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 pada Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan masing-masing Rp9.343.797.504.127,00 dan Rp7.849.321.126.348,00. Berdasarkan nilai realisasi tersebut maka nilai Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp1.494.476.377.779,00. Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut:

#### 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp10.255.502.731.787,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.343.797.504.127,00 atau 91,11%. Tidak optimalnya realisasi tersebut disebabkan oleh realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah yang hanya mencapai Rp2.801.304.537.758,00 atau 75,44% dari anggaran sebesar Rp3.713.081.611.718,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.886.564.884.056,00, maka terdapat peningkatan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp457.232.620.071,00 atau 5,15%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.28
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2024 | | % | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 1 | Penggunaan SiLPA | 6.542.421.120.069 | 6.542.421.120.069 | 100,00 | 8.600.096.664.254 |
| 2 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 3.713.081.611.718 | 2.801.304.537.758 | 75,44 | 286.277.630.136 |

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2024 | | % | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 0 | 71.846.300 | ~ | 190.589.666 |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **10.255.502.731.787** | **9.343.797.504.127** | **91,11** | **8.886.564.884.056** |

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

**5.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA**

Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.542.421.120.069,00 dan Rp8.600.096.664.254,00. Nilai anggaran dan realisasi SiLPA Tahun 2024 merupakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diaudit oleh BPK-RI.

**5.1.4.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah**

Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.713.081.611.718,00. Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.801.304.537.758,00 atau 75,44%, mengalami kenaikan sebesar Rp2.515.026.907.622,00 atau 878,53% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp286.277.630.136,00. Penerimaan Pinjaman Daerah tersebut merupakan Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat untuk Proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta berdasarkan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1295/DSMI/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang kemudian dijadikan penyertaan modal kepada PT *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta. Kurang optimalnya Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024 disebabkan adanya pergeseran jadwal pekerjaan, penurunan nilai kontrak, dan penyesuaian kurs aktual atas penerimaan pinjaman proyek MRT Jakarta.

**5.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman tersebut merupakan Penyetoran Pokok Dana Bergulir Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ke Kas Daerah. Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.846.300,00 atau 100%, mengalami penurunan sebesar Rp118.743.366,00 atau 62,30% bila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp190.589.666,00.

**5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp9.179.215.380.743,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp7.849.321.126.348,00 atau 85,51%. Tidak optimalnya realisasi

disebabkan oleh realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang hanya mencapai Rp5.988.136.019.949 atau 81,83% dari anggaran sebesar Rp7.317.545.546.679. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada berikut.

Tabel 5.29
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2024 | | % | Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 7.317.545.546.679 | 5.988.136.019.949 | 81,83 | 4.836.397.306.901 |
| 2 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 1.861.669.834.064 | 1.861.185.106.399 | 99,97 | 1.802.671.036.394 |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **9.179.215.380.743** | **7.849.321.126.348** | **85,51** | **6.639.068.343.295** |

Penjelasan lebih lanjut realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.849.321.126.348,00 adalah sebagai berikut:

#### 5.1.4.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.317.545.546.679,00. Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.988.136.019.949,00 atau 81,83%, mengalami kenaikan sebesar Rp1.151.738.713.048,00 atau 23,81% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.836.397.306.901,00. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a. Penyertaan Modal Daerah pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung sebesar Rp225.000.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun Anggaran 2024 Nomor 700/HK.01.11 tanggal 23 Desember 2024;
b. Penyertaan Modal Daerah pada PT Jakarta Propertindo sebesar Rp2.183.400.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Tambahan (adendum) II atas Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2023 Nomor 606/HK.01.11 tanggal 11 November 2024;
c. Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank DKI Jakarta sebesar Rp2.190.760.167,00 Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Bank DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor 646/HK.01.11 tanggal 4 Desember 2024;

d. Penyertaan Modal Daerah pada PT *Mass Rapid Transit* Jakarta sebesar Rp3.377.545.259.782,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 330 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas *Mass Rapid Transit* Jakarta (Perseroan Daerah) Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta *Phase* I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan *Phase II* (Bundaran HI – Kota); dan
e. Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah sebesar Rp200.000.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Penjamin Kredit Daerah Tahun Anggaran 2024 nomor 50/HK.01.11 tanggal 19 Januari 2024.

#### 5.1.4.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Tahun Anggaran 2024 merupakan pengeluaran pembayaran atas utang kepada Pemerintah Pusat atas proyek JEDI dan pendanaan PEN. Pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.861.669.834.064,00 dengan realisasi sebesar Rp1.861.185.106.399,00 atau 99,97%. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp58.514.070.005,00 atau 3,25% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.802.671.036.394,00. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo terdiri dari pembayaran cicilan melalui mekanisme pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp922.491.898.278,00 dan melalui mekanisme pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp938.693.208.121,00.

### 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.433.850.834.046,00 yang merupakan perhitungan dari realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp72.952.092.296.153,00, realisasi Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp70.012.717.839.886,00 dan Pembiayaan Neto sebesar Rp1.494.476.377.779,00.

## 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan. Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.433.850.834.046,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Tahun 2023 | | |
| SAL per 31 Desember 2023 | | 6.542.421.120.069,00 |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan | | (6.542.421.120.069,00) |
| Subtotal | | 0,00 |
| Tahun 2024 | | |
| Pendapatan | 72.952.092.296.153,00 | |
| Belanja dan Transfer | (70.012.717.839.886,00) | |
| Surplus | | 2.939.374.456.267,00 |
| Penerimaan Pembiayaan | 9.343.797.504.127,00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan | (7.849.321.126.348,00) | |
| Pembiayaan Neto | | 1.494.476.377.779,00 |
| SAL 31 Desember 2024 | | 4.433.850.834.046,00 |

Rincian SAL/SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.433.850.834.046,00 adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Kas Daerah | 3.416.945.253.102,00 |
| 2 | Pendapatan yang Belum Disetor | 346.000,00 |
| 3 | Sisa Belanja UP/GU/TU | 3.060.877.881,00 |
| 4 | Kas BLUD - Kas Tunai | 700.266.859,00 |
| 5 | Kas BLUD - Kas di Bank | 937.293.659.466,00 |
| 6 | Kas Bank BOS | 74.981.577.371,00 |
| 7 | Kas Bank BOP Kesetaraan | 166.000.907,00 |
| 8 | Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga | 506.527.225,00 |
| 9 | Uang Muka Belanja BLUD | 196.325.233,00 |
| 10 | Pembulatan | 2,00 |
| | **Jumlah** | **4.433.850.834.046,00** |

SAL/SiLPA sebesar Rp4.433.850.834.046,00 tersebut berbeda dengan saldo kas di Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.438.778.793.507,00. Saldo Kas merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selisih antara SiLPA Tahun Anggaran 2024 dengan Kas di Neraca sebesar Rp4.927.959.461,00 dirinci sebagai berikut.

| **Rincian Selisih Saldo Kas dengan SiLPA:** | |
|---|---|
| Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 1.373.166.939,00 |
| Uang Muka Pasien RSUD/K | 565.419.352,00 |

| | |
|---|---|
| Uang Jaminan Kerja Sama | 60.000.000,00 |
| Uang Titipan | 2.400.510.747,00 |
| Uang Muka Jasa BLUD | 142.697.100,00 |
| Kas di Bendahara Sekolah Lainnya | 958.997.783,00 |
| Kas Lainnya | 130.020.000,00 |
| Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga | (506.527.225,00) |
| Uang Muka Belanja BLUD | (196.325.233,00) |
| Pembulatan | (2,00) |
| **Total** | **4.927.959.461,00** |

## 5.3 Neraca

### 5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

#### 5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar merupakan jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun.

##### 5.3.1.1.1 Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh *item*. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

###### 5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.416.945.253.102,00 dan Rp5.454.632.626.327,00. Dalam rangka

pengelolaan kas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyimpan dana dalam bentuk giro. Rincian dari saldo Kas di Kas Daerah tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.30

Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Nama Bank | Nomor rekening | Peruntukan Rekening | Dasar Penetapan Rekening | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank DKI Cab. Utama Balaikota | 108-02-01575-9 | Rekening Penampungan Penerimaan dan Pengeluaran | Kepgub No. 529 Tahun 2023 | 3.333.798.389.403 | 5.436.711.258.110 |
| 2 | Bank DKI Cab. Utama Juanda | 101.02.06015-3 | Rekening Penampungan Jasa Giro dan Penerimaan Lainnya | Kepgub No. 529 Tahun 2023 | 76.019 | 56.981 |
| 3 | Bank Mandiri Cab. Wisma Alia | 1.230.098.157.979 | Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta | Kepgub No. 529 Tahun 2023 | 34.903 | 1.957.641 |
| 4 | Bank BTN Cab. Harmoni | 00014.01.30.001756.6 | Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta | Kepgub No. 529 Tahun 2023 | 2.452.473 | 2.233.584 |
| 5 | B S I | 7268763869 | Rekening Khusus Penerimaan Bunga Deposito | Keputusan Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta No. 18 Tahun 2024 | 4.697 | 0 |
| 6 | BRI Cabang Jakarta Tanah Abang | 0018-01-004391-30-7 | Rekening Khusus Penerimaan Pajak | Keputusan Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta No. 18 Tahun 2024 | 147.662.309 | 0 |
| 7 | Bank DKI | 108.16.17010.7 | Rekening Khusus SIMPAD | Kepgub No. 529 Tahun 2023 | 0 | 1.600.000 |
| 8 | Bank DKI | 108.16.17009.3 | Rekening Khusus SIMPAD | Kepgub No. 529 Tahun 2023 | 22.588.820.233 | 1.016.683.842 |
| 9 | Bank DKI | 108.16.17095.6 | Rekening Khusus Pajak Daerah | Kepgub No. 529 Tahun 2023 | 16.614.596 | 320.115.900 |
| 10 | Bank DKI | 108.16.17094.8 | Rekening Khusus Pajak Daerah | Kepgub No. 529 Tahun 2023 | 54.373.349.975 | 12.973.650.209 |
| 11 | Bank Mandiri | 104-00-22062017 | Rekening Khusus Pajak Daerah | Kepgub No. 529 Tahun 2023 | 1.651.119.829 | 2.982.912.557 |
| 12 | Bank BNI | 6000686867 | Rekening Khusus Pajak Daerah | Kepgub No. 529 Tahun 2023 | 47.348.173 | 359.596.408 |
| 13 | Bank CIMB Niaga | 800034210900 | Rekening Khusus Pajak Daerah | Kepgub No. 529 Tahun 2023 | 4.262.532.696 | 95.507.807 |
| 14 | BJB (PBB) | 0067263332400 | Rekening Khusus Pajak Daerah | Kepgub No. 529 Tahun 2023 | 15.042.300 | 0 |
| 15 | Bank Danamon | 3600807519 | Rekening Khusus Pajak Daerah | Kepgub No. 529 Tahun 2023 | 0 | 1.600.473 |

| No | Nama Bank | Nomor rekening | Peruntukan Rekening | Dasar Penetapan Rekening | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bank OCBC NISP | 545800052213 | Rekening Khusus Pajak Daerah | Kepgub No. 529 Tahun 2023 | 18.043.083 | 78.188.543 |
| 17 | BANK MEGA | 107-4001100-1860 | Rekening Khusus Pajak Daerah | Kepgub No. 529 Tahun 2023 | 1.764.023 | 0 |
| 18 | PT POS Indonesia | | Rekening Penerimaan Pajak Daerah (*Escrow*) | | 21.998.390 | 87.264.272 |
| | | **Jumlah** | | | **3.416.945.253.102** | **5.454.632.626.327** |

Kas di Kas Daerah pada Bank BJB nomor rekening 0067263332400 per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.042.300,00 termasuk setoran dalam perjalanan *(Deposit in Transit)* sebesar Rp5.000,00 yang merupakan kekurangan pelimpahan oleh Bank atas Pendapatan Pajak Daerah, dan telah diterima di Kas Umum Daerah pada tanggal 3 Januari 2025.

#### 5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp346.000,00 dan Rp109.645.250,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan berupa kas tunai yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan akhir periode 31 Desember 2024 atas Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, dikarenakan adanya penerimaan Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah (UPPD) pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang telah melewati batas waktu operasional Bank DKI.

#### 5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.181.233.945,00 dan Rp329.382.648,00, dengan rincian sebagai berikut.

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sisa Belanja UP/GU | 2.527.302 | 329.382.648 |
| 2 | Sisa Belanja TU | 3.058.350.579 | 0 |
| 3 | Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor | 120.356.064 | 0 |
| | **Jumlah** | **3.181.233.945** | **329.382.648** |

Rincian dan penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Sisa Belanja UP/GU**

Sisa Belanja UP/GU merupakan sisa kas dari pencairan SP2D UP/GU yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember

2024. Sisa Belanja UP/GU per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.527.302,00 dan Rp329.382.648,00.

Sisa Belanja UP/GU per 31 Desember 2024 terdapat di Dinas Perhubungan sebesar Rp1.624.991,00, Suku Dinas Pendidikan I Jakarta Selatan sebesar Rp871.750,00, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Jakarta Selatan sebesar Rp30.461,00, dan Suku Badan Kepegawaian Jakarta Barat sebesar Rp100,00.

**b. Sisa Belanja TU**

Sisa Belanja TU merupakan sisa kas dari pencairan SP2D TU yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Sisa Belanja TU per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.058.350.579,00 dan Rp0,00.

Sisa Belanja TU per 31 Desember 2024 terdapat di Sudin Pendidikan I Jakarta Selatan sebesar Rp3.049.936.472,00 dan Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Jakarta Selatan sebesar Rp8.414.107,00.

**c. Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor**

Saldo Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp120.356.064,00 dan Rp0,00. Saldo Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor per 31 Desember 2024 terdapat di Sekretariat DPRD sebesar Rp120.000,00 dan Sudin Pendidikan II Jakarta Pusat sebesar Rp120.236.064,00.

**5.3.1.1.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD**

Kas dan Setara Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD meliputi Kas BLUD, Setara Kas BLUD, Potongan PFK di BLUD, Uang Muka Pelayanan dan lainnya.

Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp942.341.899.395,00 dan Rp1.008.514.643.569,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kas Tunai | 700.266.859 | 1.197.791.647 |
| 2 | Kas di Bank | 937.293.659.466 | 1.000.840.280.678 |
| 3 | Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor | 941.418.323 | 123.669.297 |
| 4 | Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor | 237.927.548 | 134.902.031 |
| 5 | Uang Muka Pasien RSUD/K | 565.419.352 | 375.151.361 |
| 6 | Uang Jaminan Kerja sama | 60.000.000 | 3.289.499.147 |
| 7 | Uang Titipan | 2.400.510.747 | 2.474.424.408 |
| 8 | Uang Muka Jasa BLUD | 142.697.100 | 78.925.000 |
| | **Jumlah** | **942.341.899.395** | **1.008.514.643.569** |

Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 terdapat pada unit sebagai berikut.

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Unit Pengelola Dana Perumahan | 25.870.662.517 | 17.448.397.226 |
| 2 | Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan | 3.815.320.349 | 7.104.503.363 |
| 3 | Unit Pengelola Perparkiran | 1.929.781.332 | 11.665.718.611 |
| 4 | Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang | 101.241.330 | 681.842.881 |
| 5 | BLUD di bawah koordinasi Dinas Kesehatan | 308.521.628.310 | 812.428.462.579 |
| 6 | BLUD di bawah koordinasi Dinas Pendidikan | 1.352.360.577 | 1.181.862.044 |
| 7 | Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik | 1.939.035.838 | 1.029.808.571 |
| 8 | Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung | 2.813.716.865 | 8.396.044.390 |
| 9 | Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan | 4.324.765.344 | 4.281.907.067 |
| 10 | Unit Pengelola Jakarta *Asset Management Center* | 580.141.667.456 | 143.278.215.776 |
| 11 | Unit Pengelola Sampah Terpadu | 8.998.688.528 | 420.513.813 |
| 12 | Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki | 1.281.696.901 | - |
| 13 | Unit Pengelola Jakarta *Smart City* | 1.251.334.048 | 597.367.248 |
| | **Jumlah** | **942.341.899.395** | **1.008.514.643.569** |

Rincian dan Penjelasan Kas dan Setara Kas BLUD tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Kas Tunai dan Kas di Bank**

Saldo Kas Tunai per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp700.266.859,00 dan Rp1.197.791.647,00, sedangkan saldo Kas di Bank per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp937.293.659.466,00 dan Rp1.000.840.280.678,00.

**b. Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor**

Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp941.418.323,00 dan Rp123.669.297,00 merupakan potongan pajak yang berasal dari dana operasional BLUD yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2024.

Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor tersebut telah dilakukan penyetoran pada Tahun 2025.

**c. Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor**

Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp237.927.548 dan Rp134.902.031,00. Nilai tersebut merupakan potongan Iuran BPJS Kesehatan dan Pajak Perhotelan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. BLUD RSUD Cipayung sebesar Rp32.255.472,00 untuk Iuran BPJS Kesehatan;

2. BLUD RSUD Koja sebesar Rp78.817.337,00 untuk Iuran BPJS Kesehatan;
3. BLUD RSUD Budhi Asih sebesar Rp3.749.876,00 untuk Iuran BPJS Kesehatan; dan
4. BLUD SMK Negeri 57 Jakarta sebesar Rp123.104.863,00 untuk pajak perhotelan atas pelayanan yang diberikan.

Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor tersebut telah dilakukan penyetoran pada awal Tahun 2025 kecuali pada BLUD SMK Negeri 57 Jakarta sebesar Rp68.922.951,00.

**d. Uang Muka Pasien RSUD/K**

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD adalah dana yang dibayarkan oleh pasien rawat inap kepada RSUD/RSKD sebagai uang muka di awal sebelum dilakukan tindakan terhadap pasien. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka.

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp565.419.352,00 dan Rp375.151.361,00. Rincian saldo tersebut adalah sebagai berikut.

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Pasar Minggu | 19.932.284 | 10.625.000 |
| 2 | RSUD Koja | 10.571.257 | 17.226.433 |
| 3 | RSUD Tarakan | 60.968.800 | 259.097.149 |
| 4 | RSUD Cengkareng | 459.647.011 | 79.002.779 |
| 5 | RSUD Pasar Rebo | 8.800.000 | 9.200.000 |
| 6 | RSUD Duren Sawit | 5.500.000 | |
| | **Jumlah** | **565.419.352** | **375.151.361** |

**e. Uang Jaminan Kerja Sama**

Uang Jaminan Kerja Sama merupakan uang jaminan yang diserahkan oleh pihak yang melakukan kerja sama pengelolaan kawasan parkir dengan BLUD RSUD Koja. Uang Jaminan kerja sama akan dikembalikan saat perjanjian kerja sama tersebut berakhir. Uang Jaminan Kerja Sama per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp3.289.499.147,00. Uang Jaminan Kerja Sama per 31 Desember 2024 terdapat pada RSUD Koja atas penyewaan lahan parkir dengan PT Stellar sebesar Rp60.000.000,00 dalam bentuk Kas di Bank.

**f. Uang Titipan**

Uang Titipan adalah uang pihak ketiga yang terdapat di Rekening Bank BLUD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.400.510.747,00 dan sebesar Rp2.474.424.408,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUD RSUD Matraman | 2.398.597.850 | 2.398.597.850 |
| 2 | BLUD Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan | 0 | 41.156.603 |
| 3 | BLUD RSUD Koja | 0 | 29.854.958 |
| 4 | BLUD Unit Pengelola Perparkiran | 0 | 2.497.100 |
| 5 | BLUD RSUD Pasar Minggu | 1.912.897 | 1.912.897 |
| 6 | BLUD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta | 0 | 405.000 |
| | **Jumlah** | **2.400.510.747** | **2.474.424.408** |

1. Saldo uang titipan pada RSUD Matraman sebesar Rp2.398.597.850,00 merupakan sisa saldo Penerimaan Kelebihan Pembayaran Piutang Klaim Covid-19 Kemenkes RI yang diterima pada Tahun 2021. Penerimaan Kelebihan Pembayaran Piutang Klaim Covid-19 Kemenkes RI merupakan Pendapatan Diterima di Muka yang akan diperhitungkan dengan pengajuan klaim pada tahun berikutnya; dan
2. Saldo uang titipan yang terdapat di RSUD Pasar Minggu sebesar Rp1.912.897,00 terdiri dari uang titipan atas kelebihan penerimaan transaksi non tunai melalui mesin *EDC* sebesar Rp866.460,00 dan kelebihan penerimaan atas transfer dari Bank DKI sebesar Rp1.046.437,00.

**g. Uang Muka Jasa BLUD**

Uang Muka Jasa BLUD adalah dana yang dibayarkan oleh pengguna Jasa BLUD kepada BLUD sebagai uang muka sebelum jasa diberikan selain Uang Muka Pasien RSUD/K. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan BLUD.

Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp142.697.100,00 dan Rp78.925.000,00. Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2024 terdapat pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta sebesar Rp8.500.000,00 merupakan uang muka sewa gedung dan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta sebesar Rp134.197.100,00 merupakan uang muka jasa layanan hotel sebesar Rp7.250.000,00 dan uang muka pemesanan makanan sebesar Rp126.947.100,00.

Rincian saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tersaji pada lampiran 2.

**5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp76.180.041.065,00 dan Rp85.056.746.795,00. Saldo ini berada di 2.008 sekolah pada rekening BOS, rekening BOP Kesetaraan,

rekening penerimaan hibah, rekening kegiatan *Teaching Factory* (TeFa) dan kas tunai dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Jenis Saldo Kas | | Saldo per 31 Desember 2024 |
|---|---|---|---|
| **1** | **Kas Dana BOS** | **Rp** | **75.054.503.815,00** |
| **2** | **Kas Dana BOP Kesetaraan** | **Rp** | **166.539.467,00** |
| **3** | **Kas di Bendahara Sekolah Lainnya** | **Rp** | **958.997.783,00** |
| | *a. Kas Kegiatan TeFa* | *Rp* | *839.742.481,00* |
| | Kas Tunai (Kegiatan TeFa) | Rp | 480.023.644,00 |
| | Rekening Kegiatan TeFa | Rp | 359.718.837,00 |
| | *b.Hak Pihak Lain di Rekening BOS* | *Rp* | *118.944.852,00* |
| | *c.Sisa Dana Hibah* | *Rp* | *310.450,00* |
| | Rekening Hibah | Rp | 310.250,00 |
| | Kas Tunai (sisa dana hibah) | Rp | 200,00 |
| | **Jumlah** | **Rp** | **76.180.041.065,00** |

Pencatatan saldo Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Pasal 36 ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa Sisa Dana BOSP pada akhir tahun anggaran dilaporkan ke PPKD selaku BUD dan tetap di rekening bank satuan pendidikan serta diakui sebagai SiLPA. Pasal 36 ayat 6 menyatakan bahwa SiLPA Dana BOSP diperhitungkan pada penyaluran anggaran tahun berikutnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Non Fisik.

Penjelasan Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan secara rinci sebagai berikut.

Tabel 5.31

Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan

Per 31 Desember 2024

| No. | Jenjang | | Rekening Bank (Rp) | Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp) | Saldo Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan Per 31 Desember 2024 (Rp) | Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp) | SiLPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp) | SiLPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp) | Total SiLPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 = 3 - 4 | 6 | 7 = 5 - 6 | 8 | 9 = 7 + 8 |
| **Kas Dana BOS** | | | | | | | | | |
| 1 | Sekolah Dasar | SD | 21.430.900.045 | 35.543.711 | 21.395.356.334 | 61.430.209 | 21.333.926.125 | 72.435.028 | 21.406.361.153 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama | SMP | 17.555.538.982 | 3.923.927 | 17.551.615.055 | 4.276.642 | 17.547.338.413 | 478.940 | 17.547.817.353 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas | SMA | 21.500.604.152 | 30.739.732 | 21.469.864.420 | 3.185.500 | 21.466.678.920 | 14.304.900 | 21.480.983.820 |
| 4 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK | 14.118.904.096 | 48.737.482 | 14.070.166.614 | 4.034.093 | 14.066.132.521 | 34.769.315 | 14.100.901.836 |
| 5 | Sekolah Luar Biasa | SLB | 567.501.392 | 0 | 567.501.392 | 0 | 567.501.392 | 0 | 567.501.392 |
| **Jumlah Dana BOS** | | | **75.173.448.667** | **118.944.852** | **75.054.503.815** | **72.926.444** | **74.981.577.371** | **121.988.183** | **75.103.565.554** |
| **Kas Dana BOP Kesetaraan** | | | | | | | | | |

| No. | Jenjang | | Rekening Bank (Rp) | Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp) | Saldo Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan Per 31 Desember 2024 (Rp) | Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp) | SiLPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp) | SiLPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp) | Total SiLPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 = 3 - 4 | 6 | 7 = 5 - 6 | 8 | 9 = 7 + 8 |
| 6 | Sanggar Kegiatan Belajar | SKB | 125.894.127 | 0 | 125.894.127 | 538.560 | 125.355.567 | 0 | 125.355.567 |
| 7 | Kelompok Belajar | KB | 5.152.340 | 0 | 5.152.340 | 0 | 5.152.340 | 0 | 5.152.340 |
| 8 | Satuan PAUD Sejenis | SPS | 4.886.187 | 0 | 4.886.187 | 0 | 4.886.187 | 0 | 4.886.187 |
| 9 | Taman Kanak-Kanak | TK | 27.500.756 | 0 | 27.500.756 | 0 | 27.500.756 | 0 | 27.500.756 |
| 10 | Taman Penitipan Anak | TPA | 3.106.057 | 0 | 3.106.057 | 0 | 3.106.057 | 0 | 3.106.057 |
| **Jumlah Dana BOP Kesetaraan** | | | **166.539.467** | **0** | **166.539.467** | **538.560** | **166.000.907** | **0** | **166.000.907** |
| **Jumlah Dana BOS dan BOP Kesetaraan** | | | **75.339.988.134** | **118.944.852** | **75.221.043.282** | **73.465.004** | **75.147.578.278** | **121.988.183** | **75.269.566.461** |

**a. Kas Dana BOS**

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp75.054.503.815,00 dan Rp84.918.734.579,00. Kas Dana BOS terdiri dari:

1) Kas Bank BOS

Saldo Kas Bank BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp74.981.577.371,00 tersebar di 1.802 sekolah. Rincian per jenjang sesuai dengan kolom 7 pada Tabel Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan Per 31 Desember 2024.

2) Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor

Saldo potongan PFK Dana BOS yang belum disetor atau utang pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.926.444,00 tersebar di 88 sekolah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 68 SD Negeri | Rp | 61.430.209,00 |
| 9 SMP Negeri | Rp | 4.276.642,00 |
| 6 SMA Negeri | Rp | 3.185.500,00 |
| 5 SMK Negeri | Rp | 4.034.093,00 |
| Jumlah | Rp | 72.926.444,00 |

**b. Kas Dana BOP Kesetaraan**

Saldo Kas Dana BOP Kesetaraan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp166.539.467,00 dan Rp138.012.216,00. Kas Dana BOP Kesetaraan terdiri dari:

1) Kas Bank BOP Kesetaraan

Saldo Kas Bank BOP Kesetaraan per 31 Desember 2024 sebesar Rp166.000.907,00 tersebar di 206 sekolah. Rincian per jenjang sesuai

dengan kolom 7 pada Tabel Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan Per 31 Desember 2024.

2) Potongan PFK Dana BOP Kesetaraan yang Belum Disetor

Saldo potongan PFK Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor atau utang pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp538.560,00 pada SKB Negeri 36.

**c. Kas di Bendahara Sekolah Lainnya**

Saldo Kas di Bendahara Sekolah Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp958.997.783,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Saldo Kas SMK Non BLUD dari Kegiatan *Teaching Factory* (TeFa) sebesar Rp839.742.481,00 berupa kas tunai sebesar Rp480.023.644,00 dan rekening TeFa sebesar Rp359.718.837,00.

Terdapat 21 SMK Non BLUD yang melakukan kegiatan *Teaching Factory* (TeFa). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2015 menyebutkan pabrik dalam sekolah (*teaching factory*) adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata Industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan. Penjelasan rinci sebagai berikut.

Tabel 5.32

Saldo Kas SMK Non BLUD dari Kegiatan *Teaching Factory* (TeFa)

Per 31 Desember 2024

| No | Nama Sekolah | Saldo awal (Per 31 Desember 2023) (Rp) | Pendapatan (Rp) | Belanja (Rp) | Saldo akhir (Per 31 Desember 2024) (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = ( 3 + 4 - 5 ) |
| 1 | SMK Negeri 1 | 25.611.000,00 | 29.712.500,00 | 17.708.000,00 | 37.615.500,00 |
| 2 | SMK Negeri 2 | 8.230.000,00 | 210.561.750,00 | 191.885.800,00 | 26.905.950,00 |
| 3 | SMK Negeri 3 | 28.206.380,00 | 212.270.019,00 | 225.568.358,00 | 14.908.041,00 |
| 4 | SMK Negeri 6 | 5.073.788,00 | 307.529.895,00 | 295.318.015,00 | 17.285.668,00 |
| 5 | SMK Negeri 7 | 15.543.200,00 | 190.359.100,00 | 174.076.025,00 | 31.826.275,00 |
| 6 | SMK Negeri 11 | 19.595.000,00 | 250.786.650,00 | 207.914.186,00 | 62.467.464,00 |
| 7 | SMK Negeri 12 | 4.323.901,00 | 95.690.189,00 | 80.428.515,00 | 19.585.575,00 |
| 8 | SMK Negeri 16 | 126.421.307,00 | 242.947.613,00 | 211.649.568,00 | 157.719.352,00 |
| 9 | SMK Negeri 18 | 0 | 126.299.956,00 | 105.586.019,00 | 20.713.937,00 |
| 10 | SMK Negeri 22 | 55.923.150,00 | 198.803.000,00 | 214.047.126,00 | 40.679.024,00 |
| 11 | SMK Negeri 23 | 11.402.939,00 | 183.187.000,00 | 157.876.700,00 | 36.713.239,00 |
| 12 | SMK Negeri 25 | 40.273.327,00 | 54.743.451,00 | 61.566.006,00 | 33.450.772,00 |
| 13 | SMK Negeri 31 | 52.789.500,00 | 248.662.500,00 | 229.624.000,00 | 71.828.000,00 |
| 14 | SMK Negeri 42 | 12.000.000,00 | 234.699.300,00 | 216.050.400,00 | 30.648.900,00 |
| 15 | SMK Negeri 45 | 50.844.387,00 | 286.588.053,00 | 282.749.608,00 | 54.682.832,00 |
| 16 | SMK Negeri 46 | 11.252.800,00 | 204.848.000,00 | 195.380.793,00 | 20.720.007,00 |
| 17 | SMK Negeri 47 | 43.865.000,00 | 436.818.180,00 | 435.089.735,00 | 45.593.445,00 |

| No | Nama Sekolah | Saldo awal (Per 31 Desember 2023) (Rp) | Pendapatan (Rp) | Belanja (Rp) | Saldo akhir (Per 31 Desember 2024) (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = ( 3 + 4 - 5 ) |
| 18 | SMK Negeri 50 | 52.235.000,00 | 216.754.000,00 | 213.823.000,00 | 55.166.000,00 |
| 19 | SMK Negeri 52 | 15.163.000,00 | 50.480.000,00 | 39.023.000,00 | 26.620.000,00 |
| 20 | SMK Negeri 55 | 6.582.000,00 | 41.646.000,00 | 26.895.500,00 | 21.332.500,00 |
| 21 | SMK Negeri 58 | 8.800.000,00 | 4.480.000,00 | 0 | 13.280.000,00 |
| **Jumlah** | | **594.135.679,00** | **3.827.867.156,00** | **3.582.260.354,00** | **839.742.481,00** |

2) Saldo Rekening yang masih harus dikembalikan ke pihak ketiga atas retur pembayaran dan kelebihan pengembalian belanja sebesar Rp118.944.852,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 22 SD Negeri | Rp | 35.543.711,00 |
| 7 SMP Negeri | Rp | 3.923.927,00 |
| 13 SMA Negeri | Rp | 30.739.732,00 |
| 3 SMK Negeri | Rp | 48.737.482,00 |
| **Jumlah** | **Rp** | **118.944.852,00** |

3) Saldo Dana Hibah dari Bank Indonesia sebesar Rp310.450,00 berada di rekening hibah sebesar Rp310.250,00 dan kas tunai sebesar Rp200,00.
Sisa dana hibah pengembangan perpustakaan dari Bank Indonesia dengan rincian sebagai berikut:
   a) Suku Dinas Pendidikan 2 – Jakpus sebesar Rp274.450,00 pada SMA Negeri 5 di rekening BNI 0297291975 a.n. SMAN 5 Jakarta.
   b) Suku Dinas Pendidikan 1 – Jakpus sebesar Rp200.000 pada SMK Negeri 19 berupa kas tunai dan sebesar Rp35.800,00 pada SMA Negeri 1 di rekening BRI 035601002082560 a.n. Perpustakaan Bung Hatta

Saldo Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan per 31 Desember 2024 secara rinci disajikan pada lampiran 3.

#### 5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp130.020.000,00 dan Rp13.543.921.396,00. Saldo tersebut merupakan bagian dari dana bantuan sosial di Dinas Pendidikan sebesar Rp114.300.000,00 dan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan sebesar Rp15.720.000,00 yang tidak berhasil disalurkan di antaranya karena rekening tujuan tutup dan pindah domisili. Atas saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.800.000,00 pada bulan Januari 2025 dan sisanya akan disetorkan kembali ke Kas Daerah pada bulan Mei 2025.

#### 5.3.1.1.2 Piutang

##### 5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah terjadi pada saat hak daerah untuk menagih timbul yaitu pada saat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan. Piutang pajak daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp13.241.938.790.492,00 dan Rp11.679.786.241.137,00 dengan rincian sebagai berikut.

| | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piutang Pajak Kendaraan Bermotor | 131.848.667.679 | 127.437.900.750 | 3,46 |
| 2 | Piutang Pajak Hotel | - | 31.223.713.068 | (100,00) |
| 3 | Piutang Pajak Restoran | - | 141.327.184.933 | (100,00) |
| 4 | Piutang Pajak Hiburan | - | 77.344.622.956 | (100,00) |
| 5 | Piutang Pajak Reklame | 616.967.500.306 | 555.601.209.780 | 11,05 |
| 6 | Piutang Pajak Parkir | - | 12.081.179.716 | (100,00) |
| 7 | Piutang Pajak Air Tanah | 591.869.625.756 | 591.166.273.424 | 0,12 |
| 8 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 11.395.000.473.511 | 9.926.116.872.186 | 14,80 |
| 9 | Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 230.805.014.096 | 217.487.284.324 | 6,12 |
| 10 | Piutang Pajak Alat Berat | 710.000 | - | - |
| 11 | Pajak Barang dan Jasa Tertentu | 275.446.799.144 | - | - |
| | **Jumlah** | **13.241.938.790.492** | **11.679.786.241.137** | **13,37** |

Pada Tahun 2024, terjadi kenaikan nilai piutang pajak daerah sebesar 13,37% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan nilai piutang pajak daerah tersebut berasal dari 6 (enam) jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3,46%, Pajak Reklame sebesar Rp11,05%, Pajak Air Tanah (PAT) sebesar 0,12%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 6,12%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar 14,80% dan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 5,14% secara rinci disajikan pada Lampiran 4.

**a. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp131.848.667.679,00 dan Rp127.437.900.750,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

| | Piutang PKB | | |
|---|---|---|---|
| **a.** | **Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024** | | |
| | Saldo Piutang Per 31 Desember 2023 | Rp. | 127.437.900.750 |
| | Pembetulan | Rp. | (7.793.863.871) |
| | **Saldo atas Piutang yang Diperoleh sebelum Tahun 2024** | **Rp.** | **119.644.036.879** |
| **b.** | **Mutasi Piutang Tahun 2024** | | |
| | Ketetapan Piutang | Rp. | 927.565.937.935 |
| | Penerimaan Pembayaran | Rp. | (915.361.307.135) |
| | **Saldo atas Piutang yang Diperoleh pada Tahun 2024** | **Rp.** | **12.204.630.800** |
| **c.** | **Saldo Piutang Per 31 Desember 2024 (a+b)** | **Rp.** | **131.848.667.679** |

Piutang PKB dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan dan belum terbayar sampai dengan akhir tahun. Hal ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengenai Piutang Pajak yang menjelaskan bahwa piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Pada Tahun 2024, terdapat pembetulan SKP atas Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp7.793.863.871,00 karena telah terbit ketetapan baru pada Tahun 2024.

Mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, menjelaskan bahwa Surat Ketetapan Pajak PKB diterbitkan setelah dilakukan tahapan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) kendaraan bermotor. Hal tersebut sejalan dengan Surat Jawaban Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atas pertanyaan Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Se-Indonesia (APPDI) Nomor: S-12.2/K.1/ KSAP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 terkait dengan Pengakuan Piutang PKB dan BBNKB.

Sedangkan untuk kendaraan Bermotor (KBm) yang telah jatuh tempo pembayaran dan belum melakukan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) dikategorikan sebagai kendaraan bermotor yang belum daftar ulang atau yang lebih dikenal dengan KBm BDU. Terhadap KBm BDU tersebut tidak terbit surat ketetapan pajak sehingga KBm BDU tidak dicatat sebagai piutang PKB, melainkan merupakan perkiraan penerimaan PKB.

Terhitung sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat 3.056.134 KBm yang belum melakukan daftar ulang dengan perkiraan penerimaan PKB sebesar Rp2.525.319.141.800,00. Perkiraan penerimaan PKB tersebut dihitung dengan menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun terutang.

Berikut disajikan tabel Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Perhitungan Perkiraan Penerimaan PKB Periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel 5.33

Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Perhitungan Perkiraan Penerimaan PKB Periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024

| No | Jenis | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KBM | PKB POKOK (Rp) | KBM | PKB POKOK (Rp) | KBM | PKB POKOK (Rp) | KBM | PKB POKOK (Rp) | KBM | PKB POKOK (Rp) | KBM | PKB POKOK (Rp) |
| 1 | Sedan dan Sejenisnya | 8.073 | 19.598.121.025 | 6.620 | 15.939.186.601 | 8.665 | 26.297.636.855 | 13.405 | 50.527.383.600 | 24.234 | 119.024.040.950 | 60.997 | 231.386.369.031 |
| 2 | Jeep Segala Merk | 2.951 | 14.065.743.325 | 2.544 | 12.735.201.400 | 4.357 | 23.991.927.826 | 9.710 | 63.629.844.050 | 23.256 | 171.600.188.200 | 42.818 | 286.022.904.801 |
| 3 | Mini Bus, Micro Bus | 25.289 | 64.758.766.890 | 20.846 | 54.384.796.300 | 36.769 | 102.225.105.349 | 79.011 | 242.518.498.250 | 178.650 | 599.204.774.225 | 340.565 | 1.063.091.941.014 |

| No | Jenis | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KBM | PKB POKOK (Rp) | KBM | PKB POKOK (Rp) | KBM | PKB POKOK (Rp) | KBM | PKB POKOK (Rp) | KBM | PKB POKOK (Rp) | KBM | PKB POKOK (Rp) |
| 4 | Pick Up, Light Truck, Truck dan Sejenisnya | 4.808 | 7.068.594.845 | 4.115 | 6.426.965.255 | 5.355 | 8.794.364.812 | 7.893 | 13.969.364.200 | 13.233 | 24.718.622.375 | 35.404 | 60.977.911.487 |
| 5 | Bus Tingkat, Wagon, Box, Delivery Van | 2.853 | 7.418.371.555 | 2.700 | 7.007.537.450 | 3.612 | 10.354.039.028 | 5.599 | 17.327.280.850 | 12.574 | 40.429.210.425 | 27.338 | 82.536.439.308 |
| 6 | Dum Truck, Truck Tangki dan Sejenisnya | 1.717 | 6.315.607.750 | 1.442 | 5.640.765.340 | 1.441 | 4.115.446.100 | 2.166 | 5.642.041.100 | 3.976 | 11.524.013.700 | 10.742 | 33.237.873.990 |
| 7 | Otolet/Opelet, Microlet | 589 | 71.418.200 | 421 | 53.169.365 | 320 | 41.372.800 | 384 | 53.855.500 | 850 | 121.056.400 | 2.564 | 340.872.265 |
| 8 | Kendaraan Bermotor Roda Tiga | 5.292 | 347.085.800 | 2.841 | 193.497.705 | 2.431 | 170.736.761 | 2.841 | 252.670.600 | 3.977 | 377.552.000 | 17.382 | 1.341.542.866 |
| 9 | Sepeda Motor | 433.803 | 109.477.388.125 | 338.584 | 85.161.613.011 | 386.695 | 107.703.173.542 | 530.257 | 160.394.739.020 | 811.061 | 256.136.558.800 | 2.500.400 | 718.873.472.498 |
| 10 | Alat-Alat Berat | 2.168 | 5.413.682.855 | 1.882 | 4.606.778.435 | 2.068 | 5.062.270.400 | 3.634 | 10.918.205.800 | 8.172 | 21.508.877.050 | 17.924 | 47.509.814.540 |
| Total | | 487.543 | 234.534.780.370 | 381.995 | 192.149.510.862 | 451.713 | 288.756.073.473 | 654.900 | 565.233.882.970 | 1.079.983 | 1.244.644.894.125 | 3.056.134 | 2.525.319.141.800 |

Terhadap kendaraan bermotor yang belum daftar ulang tersebut di atas, telah dilakukan upaya optimalisasi agar wajib pajak segera melakukan daftar ulang (registrasi dan identifikasi) dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun upaya yang dilakukan meliputi:

1) Penyampaian surat himbauan kendaraan bermotor yang belum daftar ulang kepada wajib pajak perorangan dan badan secara mandiri, maupun dengan menggunakan pihak ketiga seperti PT. Pos Indonesia. Selain itu penyampaian surat himbauan juga dilakukan dengan melibatkan Walikota, Camat dan Lurah.
2) Melakukan pemanggilan dan konfirmasi kepada Wajib Pajak Badan (Perusahaan) terkait dengan Kendaraan Bermotor yang belum daftar ulang;
3) Razia gabungan kendaraan bermotor secara *door to door* dengan Kepolisian Republik Indonesia, Jasa Raharja dan Bank DKI;
4) Pemberian sosialisasi dan pelayanan pembayaran pajak pada setiap Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi wajib pajak untuk melakukan daftar ulang di antaranya:

1) Masih adanya wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya namun tidak melaporkan ke samsat dan tidak melakukan blokir atas kendaraan yang telah dijual serta pembeli belum melakukan balik nama kendaraan bermotor.
2) Adanya kendaraan yang hilang, rusak, dicuri yang tidak dilaporkan ke Kepolisian.
3) Adanya kendaraan bekas kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang tidak dilakukan pemutakhiran data.
4) Adanya wajib pajak yang telah berpindah alamat dan tidak melakukan pemutakhiran data.
5) Adanya alamat wajib pajak yang tidak ditemukan, tidak jelas di lapangan, Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya dan tidak dikenal.

**b. Piutang Pajak Hotel**

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp31.223.713.068,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel mengalami perubahan nomenklatur menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan. Lebih lanjut penjelasan terkait Piutang Pajak Hotel dijelaskan pada Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

**c. Piutang Pajak Restoran**

Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp141.327.184.933,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel mengalami perubahan nomenklatur menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Makan dan/atau Minuman. Lebih lanjut penjelasan terkait Piutang Pajak Restoran dijelaskan pada Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

**d. Piutang Pajak Hiburan**

Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp77.344.622.956,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel mengalami perubahan nomenklatur menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan. Lebih lanjut penjelasan terkait Piutang Pajak Hiburan dijelaskan pada Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

**e. Piutang Pajak Reklame**

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing Rp616.967.500.306,00 dan Rp555.601.209.780,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

| | **Piutang Pajak Reklame** | | |
|---|---|---|---|
| **a.** | **Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024** | | |
| | Saldo Piutang Per 31 Desember 2023 | Rp. | 555.601.209.780 |
| | Penerimaan Pembayaran | Rp. | (74.180.416.776) |
| | Pembetulan SKP | Rp. | 603.381.225 |
| | PDM atas ketetapan sebelum Tahun 2024 | Rp. | 1 |
| | **Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024** | **Rp.** | **482.024.174.230** |
| **b.** | **Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024** | | |
| | Ketetapan Piutang | Rp. | 1.021.861.559.348 |
| | Penerimaan Pembayaran | Rp. | (887.192.315.927) |
| | PDM atas ketetapan Tahun 2024 | Rp. | 274.082.655 |
| | **Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024** | **Rp.** | **134.943.326.076** |
| **c.** | **Piutang Per 31 Desember 2024 (a+b)** | **Rp.** | **616.967.500.306** |

Pembetulan atas SKPD pajak reklame tahun lalu di Tahun 2024 sebesar Rp603.381.225,00 dilakukan karena kurang catat atas ketetapan reklame. Pembetulan SKPD Reklame dilaksanakan berdasarkan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Pada Tahun 2024, terdapat PDM atas ketetapan sebelum Tahun 2024 sebesar Rp1,00 dan tahun berjalan sebesar Rp274.082.655,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum Tahun 2024 dan tahun berjalan.

Optimalisasi penagihan piutang Pajak Reklame dilakukan melalui :

1. Penyampaian surat himbauan kepada 3.837 Objek Pajak atas piutang 3.672 SKPD Pajak Air Tanah khususnya SKPD yang belum kadaluwarsa penagihan.
2. Penagihan dengan melakukan kegiatan penempelan *sticker* penunggak pajak kepada 201 Objek Pajak atas 662 SKPD yang belum melakukan pembayaran setelah dilakukan penyampaian surat himbauan pembayaran.
3. Melakukan upaya penagihan aktif dalam bentuk pemberian 328 surat teguran atas 541 SKPD Pajak Reklame yang belum dibayar, kemudian menindaklanjutinya dengan membacakan surat paksa atas 23 Objek Pajak dari 42 SKPD Pajak Reklame.

**f. Piutang Pajak Parkir**

Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp12.081.179.716,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel mengalami perubahan nomenklatur menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir. Lebih lanjut penjelasan terkait Piutang Pajak Parkir dijelaskan pada Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

**g. Piutang Pajak Air Tanah (PAT)**

Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp591.869.625.756,00 dan Rp591.166.273.424,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

| Piutang PAT | | | |
|---|---|---|---|
| **a.** | **Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024** | | |
| | Saldo Piutang Per 31 Desember 2023 | Rp. | 591.166.273.424 |
| | Penerimaan Pembayaran | Rp. | (13.993.125.544) |

| | Piutang PAT | | |
|---|---|---|---|
| | Pembetulan Piutang | Rp. | 1.066.565.225 |
| | PDM atas ketetapan sebelum Tahun 2024 | Rp. | 27.293.735 |
| | **Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024** | **Rp.** | **578.267.006.840** |
| **b.** | **Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024** | | |
| | Ketetapan Piutang | Rp. | 87.291.778.840 |
| | Penerimaan Pembayaran | Rp. | (73.691.721.041) |
| | PDM atas ketetapan Tahun 2024 | Rp. | 2.561.117 |
| | **Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024** | **Rp.** | **13.602.618.916** |
| **c.** | **Piutang Per 31 Desember 2024 (a+b)** | **Rp.** | **591.869.625.756** |

Pada Tahun 2024, terdapat PDM tahun lalu sebesar Rp27.293.735,00 dan PDM tahun berjalan sebesar Rp2.561.117,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum Tahun 2024 dan tahun berjalan.

Optimalisasi penagihan piutang Pajak Air Tanah (PAT) dilakukan melalui :

1. Penyampaian surat himbauan kepada 471 Objek Pajak atas piutang 3.836 SKPD Pajak Air Tanah khususnya SKPD yang belum kadaluwarsa penagihan.
2. Penagihan dengan melakukan kegiatan penempelan *sticker* penunggak pajak kepada 17 Objek Pajak atas 68 SKPD yang belum melakukan pembayaran setelah dilakukan penyampaian surat himbauan pembayaran.
3. Melakukan upaya penagihan aktif dalam bentuk pemberian 18 surat teguran atas 38 SKPD yang belum dibayar.

**h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)**

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp11.395.000.473.511,00 dan Rp9.926.116.872.186,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

| | Piutang PBBP2 | | |
|---|---|---|---|
| **a.** | **Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024** | | |
| | Saldo Piutang Per 31 Desember 2023 | Rp. | 9.926.116.872.186 |
| | Penerimaan Pembayaran | Rp. | (843.045.135.009) |
| | Kompensasi | Rp. | (37.691.298) |
| | Pemindahbukuan | Rp. | (1.976.120.939) |
| | Pembebasan | Rp. | (17.388.532.739 |
| | Pengenaan | Rp. | (1.887.134.877) |
| | Pengurangan | Rp. | (32.872.126.560) |
| | Keringanan | Rp. | (69.714.246.554) |
| | Pembetulan | Rp. | (12.454.891.772) |
| | PDM atas ketetapan sebelum Tahun 2024 | Rp. | 281.534.544 |
| | **Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024** | **Rp.** | **8.947.022.526.982** |
| **b.** | **Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024** | | |
| | Ketetapan Piutang | Rp. | 14.945.548.391.332 |
| | Penerimaan Pembayaran | Rp. | (9.113.833.148.336) |
| | Kompensasi | Rp. | (210.000.039) |
| | Pemindahbukuan | Rp. | (2.935.291.718) |
| | Pembebasan | Rp. | (2.180.522.465.151) |
| | Pengenaan | Rp. | (147.118.065.306) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Piutang PBBP2** | | |
| | Pengurangan | Rp. | (120.561.751.738) |
| | Keringanan | Rp. | (940.996.721.710) |
| | Pembetulan | Rp. | 6.811.705.565 |
| | PDM atas ketetapan Tahun 2024 | Rp. | 1.795.293.630 |
| | **Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024** | **Rp.** | **2.447.977.946.529** |
| **c.** | **Piutang Per 31 Desember 2024 (a+b)** | **Rp.** | **11.395.000.473.511** |

Pada Tahun 2024, terdapat mutasi kurang piutang tahun lalu sebesar Rp37.691.298,00 dan tahun berjalan sebesar Rp210.000.039,00 karena adanya kompensasi pembayaran PBBP2. Kompensasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah. Kompensasi pembayaran pajak adalah pembayaran pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke rekening kas daerah.

Selain itu, terdapat mutasi kurang piutang tahun lalu sebesar Rp1.976.120.939,00 dan tahun berjalan sebesar Rp2.935.291.718,00 karena adanya pemindahbukuan pembayaran pajak reklame. Pemindahbukuan pajak reklame adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak reklame untuk dibukukan pada penerimaan pajak reklame yang sesuai. Pemindahbukuan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017.

Pada Tahun 2024, terdapat PDM atas ketetapan sebelum Tahun 2024 sebesar Rp281,534,544,00 dan tahun berjalan sebesar Rp1.795.293.630,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum Tahun 2024 dan tahun berjalan.

Pembebasan dan Keringanan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur 5 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan ekonomi Tahun 2023 memberikan pembebasan sebesar 100% (seratus persen) kepada Objek PBBP2 Tahun Pajak 2023 atas Rumah Tapak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan Wajib Pajak orang pribadi dengan NJOP PBBP2 s.d kurang dari Rp2.000.000.000,00.

Peraturan Gubernur tersebut juga memberikan pembebasan sebagian ketetapan PBB tahun pajak 2024 terhadap Objek PBBP2 dengan NJOP PBBP2 Rp2.000.000.000,00 atau lebih berupa:

a. pembebasan sebagian untuk bumi seluas 60$m^2$ dan bangunan seluas 36 $m^2$ dari PBB terutang; dan
b. tambahan pembebasan sebagian sebesar 5% dari sisa PBBP2 yang terutang setelah diberikan pembebasan pada poin a.

Selain itu, Gubernur juga memberikan pembebasan sebagian terhadap objek PBBP2 di luar rumah tapak berupa pembebasan sebagian sebesar 10% dari PBBP2 yang terutang.

Kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran ketetapan PBBP2 Tahun Pajak 2024 pada periode tertentu diberikan keringanan sebesar 5%-10% dan untuk ketetapan sebelum Tahun 2024 diberikan keringanan sebesar 10%-20%. Adapun besaran keringanan PBBP2 yang diberikan selama Tahun 2024 atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp69.714.246.554,00 dan sebesar Rp940.996.721.710,00 atas ketetapan tahun berjalan.

Sedangkan besaran pembebasan atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp17.388.532.739,00 dan ketetapan tahun berjalan sebesar Rp2.180.522.465.151,00. Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Kebijakan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk rumah sakit swasta, telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kepada Rumah Sakit Swasta. Bersamaan dengan hal tersebut, Gubernur juga membuat kebijakan di bidang pendidikan yang dituangkan pada Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan Swasta.

Adapun besaran pengenaan PBBP2 yang diberikan selama Tahun 2024 atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp1.887.134.877,00 dan sebesar Rp147.118.065.306,00 atas ketetapan tahun berjalan.

Kebijakan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun besaran pengurangan PBBP2 yang diberikan selama Tahun 2024 atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp32.872.126.560,00 dan sebesar Rp120.561.751.738,00 atas ketetapan tahun berjalan.

Pembetulan SPPT PBBP2 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Adapun besaran pembetulan PBBP2 selama Tahun 2024 atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp12.454.891.772,00 dan sebesar Rp6.811.705.565,00 atas ketetapan tahun berjalan.

Dalam rangka validasi dan pemutakhiran piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), telah dilakukan langkah pembatalan ketetapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pembatalan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memastikan data piutang pajak yang akurat dan mutakhir, sehingga laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Adapun besaran pembatalan atas ketetapan PBBP2 sebesar Rp68.953.874.825,00 dengan salah satu kriteria diantaranya: 1). Objek PBBP2 yang telah terdaftar secara sistem namun tidak ditemukan lokasinya di lapangan, 2). Objek PBBP2 yang terdaftar atas 2 (dua) atau Jebih Nomor Objek Pajak sehingga diterbitkan SPPT PBBP2 lebih dari 1 (satu) pada tahun pajak yang sama, 3). Objek PBBP2 telah menjadi sarana, prasarana utilitas yang telah dibebaskan dan diserahkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Namun demikian terhadap pembatalan ketetapan tersebut belum ditindaklanjuti dengan pemutakhiran pada data piutang PBBP2.

Optimalisasi penagihan piutang PBBP2 dilakukan melalui :

1. Penyampaian surat himbauan kepada 2.916 Objek Pajak atas piutang 20.226 SPPT PBBP2 khususnya SKPD yang belum kadaluwarsa penagihan.
2. Penagihan dengan melakukan kegiatan penempelan *sticker* penunggak pajak kepada 234 Objek Pajak atas 1.861 SPPT PBBP2 yang belum melakukan pembayaran setelah dilakukan penyampaian surat himbauan pembayaran.
3. Melakukan upaya penagihan aktif dalam bentuk pemberian 237 surat teguran atas 1.096 SPPT PBBP2 yang belum dibayar, kemudian menindaklanjutinya dengan membacakan surat paksa atas 65 Objek Pajak dari 35 SPPT PBB dan melakukan penyitaan terhadap 8 objek pajak dari 71 SPPT PBB.

**i. Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan**

Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp230.805.014.096,00 dan Rp217.487.284.324,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

| | Piutang BPHTB | | |
|---|---|---|---|
| **a.** | **Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024** | | |
| | Saldo Piutang Per 31 Desember 2023 | Rp. | 217.487.284.324 |
| | Penerimaan Pembayaran | Rp. | (1.746.586.048) |
| | **Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024** | **Rp.** | **215.740.698.276** |
| **b.** | **Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024** | | |
| | Ketetapan Piutang | Rp. | 24.747.593.353 |
| | Penerimaan Pembayaran | Rp. | (9.683.277.533) |
| | **Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024** | **Rp.** | **15.064.315.820** |
| **c.** | **Piutang Per 31 Desember 2024 (a+b)** | **Rp.** | **230.805.014.096** |

Optimalisasi penagihan BPHTB dilakukan melalui :

a. Penyampaian surat himbauan pembayaran BPHTB kepada 4.790 wajib pajak yang memiliki status kurang bayar BPHTB
b. Menggiatkan kembali upaya *tax clearance* sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 pada saat wajib pajak mengajukan pelayanan pelaporan BPHTB;
c. Pemberitahuan (notifikasi) atas kurang bayar wajib pajak melalui aplikasi/akun pajak *online* wajib pajak/*email* wajib pajak.

**j. Piutang Pajak Alat Berat**

Piutang Pajak Alat Berat per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp710.000,00 dan Rp0,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

| | Piutang Pajak Alat Berat | | |
|---|---|---|---|
| **A** | **Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024** | | |
| | Saldo Piutang Per 31 Desember 2023 | Rp. | 0 |
| | Penerimaan Pembayaran | Rp. | 0 |
| | **Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024** | **Rp.** | 0 |
| | Saldo Piutang Per 31 Desember 2023 | Rp. | 0 |
| **b.** | **Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024** | | |
| | Ketetapan Piutang | Rp. | 6.688.000 |
| | Penerimaan Pembayaran | Rp. | (5.978.000) |
| | **Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024** | **Rp.** | **710.000** |
| **c.** | **Piutang Per 31 Desember 2024 (a+b)** | **Rp.** | **710.000** |

Optimalisasi penagihan piutang PAB dilakukan melalui Penyampaian surat himbauan kepada Objek PAB yang belum membayar untuk segera melaksanakan kewajiban pajaknya.

**a. Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa jenis pajak berbasis konsumsi mengalami perubahan nomenklatur menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PBJT didefinisikan sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, meliputi: 1) Jasa Perhotelan; 2) Makanan dan/atau Minuman; 3) Jasa Kesenian dan Hiburan; 4) Tenaga Listrik; dan 5) Jasa Parkir. Perubahan nomenklatur nama jenis pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Nama Jenis Pajak sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 dan Perda No. 1 Tahun 2024 | Nama Jenis Pajak sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 dan Perda No. 1 Tahun 2024 | Nilai Saldo Piutang Pajak Per 31 Desember 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Hotel | PBJT Jasa Perhotelan | 31.223.713.068 |
| 2 | Pajak Restoran | PBJT Jasa Makan dan/atau Minuman | 141.327.184.933 |
| 3 | Pajak Hiburan | PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan | 77.344.622.956 |
| 4 | Pajak Penerangan Jalan | PBJT Tenaga Listrik | - |
| 5 | Pajak Parkir | PBJT Jasa Parkir | 12.081.179.716 |
| **Total** | | | **261.976.700.673** |

Konsekuensi dari perubahan nomenklatur jenis pajak tersebut adalah penyesuaian pada pencatatan piutang pajak. Saldo awal piutang PBJT untuk Tahun 2024, yang mencapai Rp261.976.700.673,00, merupakan agregasi dari saldo piutang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir per tanggal 31 Desember 2023. Sedangkan untuk saldo Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp275.446.799.144,00 dengan detail mutasi piutang sebagai berikut

| | Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | | |
|---|---|---|---|
| **a.** | **Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024** | | |
| | Saldo Piutang Per 31 Desember 2023 | Rp. | 261.976.700.673 |
| | Penerimaan Pembayaran | Rp. | (27.163.235.342) |
| | PDM atas ketetapan sebelum Tahun 2024 | Rp. | 1.318.862.423 |
| | **Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024** | **Rp.** | **236.132.327.754** |
| **b.** | **Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024** | | |
| | Ketetapan Piutang | Rp. | 108.409.854.287 |
| | Penerimaan Pembayaran | Rp. | (69.118.565.905) |
| | PDM atas ketetapan tahun berjalan | Rp. | 23.183.008 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)** | | |
| | **Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024** | **Rp.** | **39.314.471.390** |
| **c.** | **Piutang Per 31 Desember 2024 (a+b)** | **Rp.** | **275.446.799.144** |

Optimalisasi penagihan piutang PBJT dilakukan melalui :

1. Penyampaian surat himbauan kepada Objek PBJT yang menunggak pajak.
2. Penagihan dengan melakukan kegiatan penempelan *sticker* penunggak pajak kepada Objek Pajak yang belum melakukan pembayaran setelah dilakukan penyampaian surat himbauan pembayaran.
3. Melakukan upaya penagihan aktif dalam bentuk pemberian 130 surat teguran atas 135 SKPDKB yang belum dibayar, kemudian menindaklanjutinya dengan membacakan surat paksa atas 54 Objek Pajak dari 107 SKPDKB dan melakukan penyitaan terhadap 7 objek pajak dari 18 SKPDKB.
4. Melaksanakan penagihan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta..
5. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi penagihan pajak daerah secara serentak untuk Wajib Pajak Group yang memiliki tunggakan pajak untuk objek pajak yang berada di seluruh wilayah DKI Jakarta.
6. Peningkatan kapabilitas pegawai melalui optimalisasi teknologi dan komunikasi dalam upaya penagihan pajak dan *in house training*.

**Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih**

Penyisihan Piutang Pajak Daerah adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

Persentase penyisihan piutang pajak tak tertagih tergantung pada kualitas piutang yang penggolongannya didasarkan pada jatuh tempo dan upaya penagihan piutang. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp5.657.257.403.961,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp13.241.938.790.492,00 dikurangi dengan penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp7.584.681.386.531,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2024 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.34

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Per 31 Desember 2024

| No | Jenis Pajak | Kriteria Piutang | | | | Jumlah Piutang Per Jenis Pajak (Rp) | NRV (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Piutang Pokok Lancar (X < 1 Tahun) | Piutang Pokok Kurang Lancar ( 1< X< 3 Tahun) | Piutang Pokok Diragukan ( 3 < X < 5 Tahun) | Piutang Pokok Macet ( X > 5 Tahun) | | |
| | | Penyisihan Piutang (Rp) | Penyisihan Piutang (Rp) | Penyisihan Piutang (Rp) | Penyisihan Piutang (Rp) | | |
| | | 0,50% | 10% | 50% | 100% | | |
| 1 | PKB | 12.204.630.800 | 7.227.279.400 | 15.876.644.393 | 96.540.113.086 | 131,848,667,679 | **26.586.481.303** |
| | | 61.023.154 | 722.727.940 | 7.938.322.197 | 96.540.113.086 | 105,262,186,377 | |
| 2 | PAT | 13.602.618.916 | 10.689.030.269 | 10.654.915.774 | 556.923.060.797 | 591,869,625,756 | **28.482.190.951** |
| | | 68.013.095 | 1.068.903.027 | 5.327.457.887 | 556.923.060.797 | 563,387,434,805 | |
| 3 | PBJT | 39.314.471.390 | 3.038.107.477 | 20.819.049.483 | 212.275.170.794 | 275,446,799,144 | **52.261.720.504** |
| | | 196.572.357 | 303.810.748 | 10.409.524.742 | 212.275.170.794 | 223,185,078,640 | |
| 4 | REKLAME | 134.943.326.076 | 14.788.155.666 | 45.055.257.588 | 422.180.760.976 | 616,967,500,306 | **170.105.578.339** |
| | | 674.716.630 | 1.478.815.567 | 22.527.628.794 | 422.180.760.976 | 446,861,921,967 | |
| 5 | BPHTB | 15.064.315.820 | 11.815.960.699 | 147.508.181.492 | 56.416.556.085 | 230,805,014,096 | **99.377.449.616** |
| | | 75.321.579 | 1.181.596.070 | 73.754.090.746 | 56.416.556.085 | 131,427,564,480 | |
| 6 | PBBP2 | 2.447.977.946.529 | 1.443.182.562.347 | 3.091.681.827.780 | 4.412.158.136.855 | 11,395,000,473,511 | **5.280.443.276.799** |
| | | 12.239.889.733 | 144.318.256.235 | 1.545.840.913.890 | 4.412.158.136.855 | 6,114,557,196,712 | |
| 7 | PAB | 710.000 | - | - | - | 710,000 | **706.450** |
| | | 3.550 | - | - | - | 3,550 | |
| **TOTAL** | | **2,663,108,019,531** | **1.490.741.095.858** | **3.331.595.876.510** | **5.756.493.798.593** | **13.241.938.790.492** | **5.657.257.403.961** |
| | | **13,315,540,098** | **149.074.109.586** | **1.665.797.938.255** | **5.756.493.798.593** | **7.584.681.386.531** | |

#### 5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis Retribusi Daerah berdasarkan objeknya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp287.659.874.500,00 dan Rp68.096.444.794,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Piutang Retribusi Jasa Umum | 163.484.366.548 | 7.795.430.587 |
| 2 | Piutang Retribusi Jasa Usaha | 115.392.799.146 | 51.635.978.940 |
| 3 | Piutang Retribusi Perizinan Tertentu | 8.782.708.806 | 8.665.035.267 |
| | **Jumlah** | **287.659.874.500** | **68.096.444.794** |

**a. Piutang Retribusi Jasa Umum**

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp163.484.366.548,00 merupakan nilai piutang yang telah dikurangi eliminasi piutang internal SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp332.965.955,00. Piutang Retribusi Jasa Umum tersebut di antaranya terdapat pada:

1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp44.905.895.810,00 di antaranya merupakan Piutang Retribusi Pengangkutan Sampah dari Lokasi Industri dan sejenisnya dan Piutang Retribusi Pengangkutan Sampah dari Lokasi Pedagang Kaki Lima/Usaha Mikro. Atas Piutang Retribusi tersebut terdapat eliminasi

antar SKPD sebesar Rp2.831.550,00 yang merupakan piutang kepada Puskesmas Kemayoran dan Puskesmas Kecamatan Senen Jakarta Pusat;

2) Rumah Sakit Umum Daerah Koja Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp42.786.120.067,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa dan Piutang Hasil Kerja Sama BLUD sewa lahan. Atas Piutang Retribusi tersebut terdapat eliminasi antar SKPD sebesar Rp120.041.814,00 yang merupakan piutang kepada beberapa Rumah Sakit Umum Daerah;
3) Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp23.217.059.638,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa. Atas Piutang Retribusi tersebut terdapat eliminasi antar SKPD sebesar Rp43.998.091,00 yang merupakan piutang kepada beberapa Rumah Sakit Umum Daerah;
4) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.877.084.063,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa berupa pelayanan BPJS dan Klaim Covid Kemenkes dan Piutang Hasil Kerja Sama BLUD berupa sewa lahan;
5) Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.374.247.154,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis, Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa berupa pelayanan BPJS, Piutang Hasil Kerja Sama BLUD berupa sewa lahan dan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah;
6) Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.946.275.647,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa berupa pelayanan BPJS dan Klaim Covid Kemenkes dan Piutang Hasil Kerja sama BLUD. Atas Piutang Retribusi tersebut terdapat eliminasi antar SKPD sebesar Rp38.475.000,00 yang merupakan piutang kepada beberapa Rumah Sakit Umum Daerah;
7) Unit Pengelola Sampah Terpadu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.638.852.285,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Piutang Penjualan RDF; dan
8) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.949.718.350,00

merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Perlengkapannya dan Piutang Retribusi Kios;

**b. Piutang Retribusi Jasa Usaha**

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp115.392.799.146,00 di antaranya terdapat pada:

1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp58.784.604.386,00 merupakan Piutang Pemakaian Unit Hunian dan Unit Usaha;
2) Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center sebesar Rp42.961.990.899 merupakan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang bersumber dari Hasil Sewa Barang Milik Daerah, Hasil Kerja Sama Daerah dalam bentuk BOT, BTO dan KSP, serta Hasil Pemilihan Mitra Sewa Titik Reklame;
3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.476.867.440,00 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian tempat usaha di lokasi binaan usaha kecil dan Piutang Retribusi Pemakaian tempat usaha di lokasi promosi dan pusat perdagangan UKM;
4) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.666.294.091,00 merupakan Retribusi Pemakaian Penginapan Graha Wisata Ragunan dan retribusi Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan;
5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.863.585.500,00 merupakan Piutang Retribusi Penyediaan sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap dan Piutang Retribusi Pemakaian Alat;
6) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp879.183.281,00 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian mobil derek dan Pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus; dan
7) Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Rp643.331.540,00 merupakan Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan dan Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan.

**c. Piutang Retribusi Perizinan Tertentu**

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp8.782.708.806,00 terdapat pada:

1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.729.647.206,00 dengan bagian terbesar

berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Piutang Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing; dan

2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp53.061.600,00 merupakan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung periode 2008 sampai dengan 2014.

**Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih**

Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sebesar Rp80.754.644.103,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp287.659.874.500,00 dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp206.905.230.397,00.

Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) retribusi berdasarkan jenis retribusi per 31 Desember 2024 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.35

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

Per 31 Desember 2024

| No | Jenis Retribusi | Kriteria Piutang | | | | Jumlah Piutang Per Jenis Retribusi (Rp) | NRV (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Piutang Pokok Lancar (0 s.d 1 Bulan) | Piutang Pokok Kurang Lancar (1 s.d 3 Bulan) | Piutang Pokok Diragukan (3 s.d 12 bulan) | Piutang Pokok Macet lebih dari 12 bulan | | |
| | | Penyisihan Piutang (Rp) | Penyisihan Piutang (Rp) | Penyisihan Piutang (Rp) | Penyisihan Piutang (Rp) | | |
| | | 0,50% | 10% | 50% | 100% | | |
| 1 | Retribusi Jasa Umum | 18.749.808.901 | 14.202.053.866 | 38.852.623.222 | 91.679.880.559 | 163.484.366.548 | **50.864.219.948** |
| | | 93.749.042 | 1.420.205.387 | 19.426.311.612 | 91.679.880.559 | 112.620.146.600 | |
| 2 | Retribusi Jasa Usaha | 12.126.999.733 | 9.422.977.202 | 11.811.382.974 | 82.031.439.237 | 115.392.799.146 | **26.452.735.703** |
| | | 60.634.998 | 942.297.720 | 5.905.691.488 | 82.031.439.237 | 88.940.063.443 | |
| 3 | Retribusi Perizinan Tertentu | 2.807.493.500 | 160.278.200 | 999.964.080 | 4.814.973.026 | 8.782.708.806 | **3.437.688.452** |
| | | 14.037.468 | 16.027.820 | 499.982.040 | 4.814.973.026 | 5.345.020.354 | |
| **Total** | | **33.684.302.134** | **23.785.309.268** | **51.663.970.276** | **178.526.292.822** | **287.659.874.500** | **80.754.644.103** |
| | | **168.421.508** | **2.378.530.927** | **25.831.985.140** | **178.526.292.822** | **206.905.230.397** | |

### 5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah piutang selain Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah di antaranya piutang hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, denda pajak, denda retribusi, BLUD, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.416.172.018.863,00 dan Rp3.030.838.594.857,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.36
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 |
|---|---|---|---|
| | | (Rp) | (Rp) |
| 1. | Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan | 540.968.971 | 540.968.971 |
| 2. | Piutang Jasa Giro | 0 | 1.775.710.904 |
| 3. | Piutang Pendapatan Bunga | 0 | 4.787 |
| 4. | Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 17.088.993.346 | 17.053.387.096 |
| 5. | Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 1.330.103.591 | 1.130.615.950 |
| 6. | Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 1.266.505.150 | 0 |
| 7. | Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah | 905.539.466.873 | 865.718.779.090 |
| 8. | Piutang Pendapatan Denda Retribusi | 20.236.913.612 | 17.821.739.466 |
| 9. | Piutang Pendapatan dari Pengembalian | 525.889.003.130 | 16.431.747.538 |
| 10. | Piutang BLUD | 449.977.840.530 | 414.630.180.236 |
| 11. | Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 26.335.832.350 | 26.743.584.888 |
| 12. | Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 1.894.389.875 | 6.390.310.880 |
| 13. | Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah | 0 | 44.146.360.933 |
| 14. | Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya | | |
| 1) | Piutang Kompensasi Rumah Susun Murah/ Sederhana | 709.188.171.009 | 842.311.305.796 |
| 2) | Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit eks BPPN | 41.880.534.592 | 41.923.253.432 |
| 3) | Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun | 28.893.574.595 | 26.444.238.419 |
| 4) | Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) | 17.988.000 | 121.230.000 |
| 5) | Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) | 686.091.733.239 | 707.655.176.471 |
| **Jumlah** | | **3.416.172.018.863** | **3.030.838.594.857** |

#### 5.3.1.1.2.3.1 Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penerimaan atas hasil penjualan barang milik daerah. Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan masing-masing per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp540.968.971,00 dan Rp540.968.971,00. Saldo Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan tersebut merupakan tagihan atas penjualan barang bergerak berupa kendaraan dinas.

**Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan**

Nilai Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp540.968.971,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp540.968.971,00. Nilai penyisihan piutang sama dengan nilai piutang karena piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang macet.

Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dikategorikan macet karena klasifikasi umur piutang sudah melebihi 5 tahun, dan upaya yang sedang dilakukan adalah tetap memberikan surat penagihan dan melakukan peninjauan untuk diusulkan penghapusan.

#### 5.3.1.1.2.3.2 Piutang Jasa Giro

Piutang Jasa Giro adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan jasa giro yang berasal dari penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk giro. Piutang Jasa Giro dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Piutang jasa giro per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.775.710.904,00.

#### 5.3.1.1.2.3.3 Piutang Pendapatan Bunga

Piutang Pendapatan Bunga adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan bunga yang berasal dari penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito. Piutang Pendapatan Bunga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.787,00.

#### 5.3.1.1.2.3.4 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penyetoran/pengembalian baik kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Institusi Pengawas baik internal maupun eksternal. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 berupa Piutang Kerugian Uang Daerah. Saldo Piutang Kerugian Uang Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp17.088.993.346,00 dan Rp17.053.387.096,00.

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut merupakan Piutang TP/TGR yang telah ditetapkan berdasarkan SKTJM dan Keputusan Pembebanan dari Majelis Pertimbangan TP/TGR. Jumlah tersebut tidak termasuk tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penuntutan, dalam proses pencatatan, dalam proses penghapusan dan informasi kerugian daerah,

yang belum diakui sebagai piutang. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

**Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih**

Nilai Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp83.428.219,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp17.088.993.346,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih sebesar Rp17.005.565.127,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging)* berdasarkan jenis tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.37

Jenis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Per 31 Desember 2024

| No | Uraian | Penggolongan Kualitas Piutang | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lancar (Rp) | Kurang Lancar (Rp) | Diragukan (Rp) | Macet (Rp) | |
| 1 | Badan Peradilan | 0 | 0 | 0 | 900.648.727 | 900.648.727 |
| 2 | Kasus Kehilangan Mobil | 0 | 0 | 0 | 676.219.939 | 676.219.939 |
| 3 | Kasus Kehilangan Motor | 0 | 0 | 0 | 22.305.625 | 22.305.625 |
| 4 | Kasus Ketekoran Kas | 35.606.250 | 0 | 96.000.000 | 13.647.035.942 | 13.778.642.192 |
| 5 | Kasus Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 9.200.000 | 9.200.000 |
| 6 | Kasus Biro Perlengkapan (P3D) | 0 | 0 | 0 | 88.695.279 | 88.695.279 |
| 7 | Kasus Walikotamadya Jakarta Selatan | 0 | 0 | 0 | 393.181.816 | 393.181.816 |
| 8 | Wisma Jaya raya | 0 | 0 | 0 | 1.220.099.767 | 1.220.099.767 |
| | **Jumlah Piutang TGR (I)** | **35.606.250** | **0** | **96.000.000** | **16.957.387.096** | **17.088.993.346** |
| | **Persentase Penyisihan (II)** | **0,50%** | **10%** | **50%** | **100%** | |
| | **Jumlah Penyisihan Piutang TGR Tak Tertagih (I x II) 2024** | **178.031** | **0** | **48.000.000** | **16.957.387.096** | **17.005.565.127** |
| | **Nilai Piutang Neto 2024** | **35.428.219** | **0** | **48.000.000** | **0** | **83.428.219** |

### 5.3.1.1.2.3.5 Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa dan kerja sama oleh Pemerintah Daerah.

Saldo Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.330.103.591,00 dan Rp1.130.615.950,00, merupakan Piutang Penerimaan komisi bagi hasil Premi Program Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK) pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi.

**Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya**

Nilai Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net* Realizable *Value*) adalah sebesar Rp1.323.453.073,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.330.103.591,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya sebesar Rp6.650.518,00. Seluruh nilai Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya termasuk dalam kategori lancar.

**5.3.1.1.2.3.6 Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya denda sebagai akibat dari keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja.

Saldo Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.266.505.150,00 dan Rp0,00 di antaranya terdapat pada:

a. Pembangunan Waduk Marunda dan Bangunan Penunjang pada wilayah pesisir Jakarta sebesar Rp657.564.554,00 pada Dinas Sumber Daya Air;
b. Pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp217.991.137,00 pada Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah; dan
c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja sebesar Rp115.303.048,00 pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

**Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Nilai Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net* Realizable *Value*) adalah sebesar Rp1.266.505.150,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.266.505.150,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp0,00.

**5.3.1.1.2.3.7 Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp905.539.466.873,00 dan Rp865.718.779.090,00 sedangkan untuk Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp589.754.317.602,00.

Rincian Piutang Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.38

Rincian Piutang Denda Pajak Daerah

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Jenis Piutang Denda Pajak | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor | 31,709,101,519 | 30,721,221,254 |
| 2 | Piutang Pendapatan Denda PBBKB | 4,369,445,675 | 4,122,218,865 |
| 3 | Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel | 76,134,271,042 | 68,298,990,900 |
| 4 | Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran | 225,386,001,889 | 204,724,555,666 |
| 5 | Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan | 108,096,798,872 | 105,535,767,767 |
| 6 | Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame | 115,072,345,442 | 114,364,258,147 |
| 7 | Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan | 1,643,376,150 | 0 |
| 8 | Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir | 29,533,792,455 | 28,822,994,356 |
| 9 | Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | 32,155,093,677 | 31,368,589,198 |
| 10 | Piutang Pendapatan Denda PBBP2 | 82,983,459,180 | 80,620,906,199 |
| 11 | Piutang Pendapatan Denda BPHTB | 198,455,780,972 | 197,139,276,738 |
| | **Jumlah Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah** | **905,539,466,873** | **865,718,779,090** |

**Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Nilai Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value)* adalah sebesar Rp315.785.149.270,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp905.539.466.873,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Tak Tertagih sebesar Rp589.754.317.603,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) berdasarkan jenis denda pajak per 31 Desember 2024 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.39

Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah Tak Tertagih

Per 31 Desember 2024

| No | Jenis Pajak | Kriteria Piutang (Rp) | | | | Jumlah Piutang Per Jenis Pajak (Rp) | NRV (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Piutang Pokok Lancar (X < 1 Tahun) | Piutang Pokok Kurang Lancar ( 1 s.d 2 Tahun) | Piutang Pokok Diragukan ( 2 s.d 5 Tahun) | Piutang Pokok Macet ( X > 5 Tahun) | | |
| | | Penyisihan Piutang | Penyisihan Piutang | Penyisihan Piutang | Penyisihan Piutang | | |
| | | 0.50% | 10% | 50% | 100% | | |
| 1 | Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor | 2.119.794.850 | 1.275.024.650 | 4.277.304.525 | 24.036.977.494 | 31.709.101.519 | **5.395.370.323** |
| | | 10.598.974 | 127.502.465 | 2.138.652.263 | 24.036.977.494 | 26.313.731.196 | |
| 2 | Piutang Pendapatan Denda PBBKB | 242.788.816 | 432.195.484 | 982.848.194 | 2.711.613.181 | 4.369.445.675 | **1.121.974.905** |
| | | 1.213.944 | 43.219.548 | 491.424.097 | 2.711.613.181 | 3.247.470.770 | |
| 3 | Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel | 10.670.951.923 | 3.605.806.615 | 10.864.443.752 | 50.993.068.752 | 76.134.271.042 | **19.295.044.993** |
| | | 53.354.760 | 360.580.662 | 5.432.221.876 | 50.993.068.752 | 56.839.226.049 | |
| 4 | Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran | 25.697.439.090 | 13.930.685.620 | 37.838.229.738 | 147.919.647.440 | 225.386.001.888 | **57.025.683.822** |
| | | 128.487.195 | 1.393.068.562 | 18.919.114.869 | 147.919.647.440 | 168.360.318.066 | |
| 5 | Piutang Pendapatan Denda | 3.983.689.172 | 2.038.784.191 | 8.703.245.785 | 93.371.079.725 | 108.096.798.873 | **10.150.299.391** |

| No | Jenis Pajak | Kriteria Piutang (Rp) | | | | Jumlah Piutang Per Jenis Pajak (Rp) | NRV (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Piutang Pokok Lancar (X < 1 Tahun) | Piutang Pokok Kurang Lancar ( 1 s.d 2 Tahun) | Piutang Pokok Diragukan ( 2 s.d 5 Tahun) | Piutang Pokok Macet ( X > 5 Tahun) | | |
| | | Penyisihan Piutang | Penyisihan Piutang | Penyisihan Piutang | Penyisihan Piutang | | |
| | | 0.50% | 10% | 50% | 100% | | |
| | Pajak Hiburan | 19.918.446 | 203.878.419 | 4.351.622.893 | 93.371.079.725 | 97.946.499.482 | |
| 6 | Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame | 805.928.700 | 8.471.528.733 | 45.349.899.335 | 60.444.988.674 | 115.072.345.442 | **31.101.224.584** |
| | | 4.029.644 | 847.152.873 | 22.674.949.668 | 60.444.988.674 | 83.971.120.858 | |
| 7 | Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan | 1.643.376.150 | 0 | 0 | 0 | 1.643.376.150 | **1.635.159.269** |
| | | 8.216.881 | 0 | 0 | 0 | 8.216.881 | |
| 8 | Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir | 1.153.020.423 | 823.226.178 | 2.646.919.388 | 24.910.626.466 | 29.533.792.455 | **3.211.618.575** |
| | | 5.765.102 | 82.322.618 | 1.323.459.694 | 24.910.626.466 | 26.322.173.880 | |
| 9 | Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | 794.334.074 | 1.159.009.322 | 1.357.152.828 | 28.844.597.453 | 32.155.093.677 | **2.512.047.207** |
| | | 3.971.670 | 115.900.932 | 678.576.414 | 28.844.597.453 | 29.643.046.470 | |
| 10 | Piutang Pendapatan Denda PBBP2 | 2.809.383.390 | 5.442.973.079 | 44.510.693.238 | 30.220.409.473 | 82.983.459.180 | **29.949.358.863** |
| | | 14.046.917 | 544.297.308 | 22.255.346.619 | 30.220.409.473 | 53.034.100.317 | |
| 11 | Piutang Pendapatan Denda BPHTB | 1.707.957.403 | 143.020.503.501 | 47.938.993.143 | 5.788.326.926 | 198.455.780.973 | **154.387.367.338** |
| | | 8.539.787 | 14.302.050.350 | 23.969.496.572 | 5.788.326.926 | 44.068.413.635 | |
| **TOTAL** | | **51,628,663,991** | **180.199.737.373** | **204.469.729.926** | **469.241.335.584** | **905.539.466.873** | **315,785,149,270** |
| | | **258,143,320** | **18.019.973.737** | **102.234.864.963** | **469.241.335.584** | **589.754.317.603** | |

#### 5.3.1.1.2.3.8 Piutang Pendapatan Denda Retribusi

Piutang Pendapatan Denda Retribusi adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah setelah jatuh tempo yang bersumber dari pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu. Piutang Pendapatan Denda Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp20.236.913.612,00 dan Rp17.821.739.466,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.40
Piutang Pendapatan Denda Retribusi
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum | 2.927.910.707 | 1.049.823.841 |
| 2 | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha | 16.907.879.739 | 16.129.398.947 |
| 3 | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu | 401.123.166 | 642.516.678 |
| | **Jumlah** | **20.236.913.612** | **17.821.739.466** |

Penjelasan secara lebih rinci atas piutang pendapatan denda retribusi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.927.910.707,00 terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp1.169.213.736,00 dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.758.696.971,00.

b) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp16.907.879.739,00 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp15.799.293.873,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp14.094.553,00, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp1.067.829.312,00, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp1.606.747,00 dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian sebesar Rp25.055.254,00.

c) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp401.123.166,00 terdapat pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp401.123.166,00.

**Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih**

Nilai Piutang Pendapatan Denda Retribusi per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp1.392.556.750,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp20.236.913.612,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih sebesar Rp18.844.356.862,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) berdasarkan denda retribusi per 31 Desember 2024 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.41

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Jenis Denda Retribusi | Kriteria Piutang | | | | Jumlah Piutang Per Jenis Denda Retribusi (Rp) | NRV (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Piutang Pokok Lancar (X < 1 Tahun) | Piutang Pokok Kurang Lancar ( 1< X< 3 Tahun) | Piutang Pokok Diragukan ( 3 < X < 5 Tahun) | Piutang Pokok Macet ( X > 5 Tahun) | | |
| | | Penyisihan Piutang (Rp) | Penyisihan Piutang (Rp) | Penyisihan Piutang (Rp) | Penyisihan Piutang (Rp) | | |
| | | 0,50% | 10% | 50% | 100% | | |
| 1 | Denda Retribusi | 6.864.522 | 332.441.214 | 2.173.058.953 | 17.724.548.923 | 20.236.913.612 | 1.392.556.750 |
| | | 34.322 | 33.244.136 | 1.086.529.481 | 17.724.548.923 | 18.844.356.862 | |
| Total | | 6.864.522 | 332.441.214 | 2.173.058.953 | 17.724.548.923 | 20.236.913.612 | 1.392.556.750 |
| | | 34.322 | 33.244.136 | 1.086.529.481 | 17.724.548.923 | 18.844.356.862 | |

### 5.3.1.1.2.3.9 Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Piutang Pendapatan dari Pengembalian merupakan piutang yang timbul karena belum diterimanya nilai pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja tahun berjalan dan telah disetorkan pada tahun berikutnya. Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp525.889.003.130,00,00 dan Rp16.431.747.538,00.

Nilai Piutang Pendapatan dari Pengembalian yang berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja yang telah disetorkan di tahun berikutnya di antaranya terdapat pada:

1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebesar Rp516.156.429.677 merupakan pengembalian hibah uang untuk KPU dan Bawaslu;
2. Biro Kerja Sama Daerah sebesar Rp1.798.965.064,00 terdiri dari pengembalian biaya tiket pesawat selama Tahun 2024 sebesar Rp1.155.990.442,00 dan pengembalian belanja hibah MPU sebesar Rp642.974.622,00;
3. Dinas Bina Marga sebesar Rp1.303.188.774,00,00 merupakan kekurangan volume atas pekerjaan pemeliharaan berkala jalan, pekerjaan pembangunan JPO, dan pekerjaan pembangunan trotoar serta pengembalian atas pengadaan aspal instan, cat, tiner, dan besi untuk kegiatan pemeliharaan jalan;
4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp1.290.564.389,00 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran atas beberapa kegiatan, antara lain kegiatan festival malam tahun baru 2025, kegiatan pemilihan Abang dan None Jakarta 2024, kegiatan pemasangan iklan media cetak di luar negeri, dan acara kegiatan Jakarta International Coffee Conference;
5. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Selatan sebesar Rp442.205.706,00 merupakan kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan sistem saluran penghubung Dharmawangsa.
6. Sekretariat DPRD sebesar Rp418.972.052,00 terdiri dari kekurangan volume atas pekerjaan sipil gedung rehab dan perpindahan ruang dewan sebesar Rp417.575.492,00 dan pengembalian belanja pegawai sebesar Rp1.396.560,00; dan
7. Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp383.487.758,00 merupakan kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan Waduk Pondok Ranggon dan Waduk Marunda
8. Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp249.924.202,00 merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran Individu.

#### 5.3.1.1.2.3.10 Piutang BLUD

Piutang BLUD adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD, Pendapatan Hibah BLUD, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD, dan Pendapatan Lain-Lain BLUD yang sah.

Piutang BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp449.977.840.530,00 dan Rp414.630.180.236,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023, pada Tahun 2024 terjadi kenaikan saldo Piutang BLUD yang antara lain disebabkan peningkatan pelayanan BLUD.

Rincian saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.42

Piutang BLUD

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **1** | **Piutang Jasa Layanan Umum BLUD, terdiri dari:** | **405.487.457.213** | **381.034.672.279** |
| **a.** | **Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa** | **405.487.457.213** | **381.034.672.279** |
| | Pusat Kesehatan Masyarakat | 9.075.046.123 | 5.075.943.970 |
| | RSUD/RSKD | 392.639.475.638 | 370.652.952.005 |
| | Laboratorium Kesehatan Daerah | 0 | 282.621.000 |
| | Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan | 0 | 12.650.000 |
| | Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda) | 93.985.512 | 93.985.512 |
| | Unit Pengelola Perparkiran | 0 | 721.254.452 |
| | Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung | 3.678.949.940 | 4.195.265.340 |
| **b.** | **Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (neto)** | **0** | **0** |
| | Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 0 | 271.278.000 |
| | Eliminasi Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 0 | (271.278.000) |
| **2** | **Piutang Hasil Kerja sama BLUD, terdiri dari:** | **39.836.942.886** | **31.553.049.422** |
| a. | RSUD Tanjung Priok | 0 | 800.000 |
| b. | RSU Adhyaksa | 0 | 250.000 |
| c. | RSUD Koja | 793.150.080 | 550.263.352 |
| d. | RSUD Tarakan | 2.483.942.846 | 2.219.962.242 |
| e. | RSUD Cengkareng | 758.385.825 | 728.658.325 |
| f. | RSUD Budhi Asih | 843.674.000 | 22.400.000 |
| g. | RSUD Pasar Minggu | 0 | 225.532.000 |
| i. | RSUD Pasar Rebo | 114.340.500 | 0 |
| h. | Puskesmas Pasar Minggu | 0 | 680.000 |
| i. | Puskesmas Pasar Rebo | 0 | 2.700.000 |
| j. | Unit Pengelola Perparkiran | 2.512.373.522 | 1.570.103.645 |
| k. | Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung | 30.726.018.000 | 24.341.578.000 |
| l. | Unit Pengelola Sampah Terpadu | 1.605.058.113 | 1.890.121.858 |
| **3** | **Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri dari:** | **4.653.440.431** | **2.042.458.535** |
| | RSUD/RSKD | 201.770.333 | 317.641.168 |
| | Puskesmas | 11.669.923 | 41.152.910 |
| | Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung | 4.440.000.175 | 1.683.664.457 |

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| | **Jumlah** | **449.977.840.530** | **414.630.180.236** |

**a) Piutang Jasa Layanan Umum BLUD**

**1. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa**

**i. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Kesehatan Masyarakat**

Saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.075.046.123,00 dan Rp5.075.943.970,00.

Saldo Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.075.046.009,00 terdiri dari:

i) Piutang Klaim Pelayanan BPJS sebesar Rp8.250.245.114,00;
ii) Piutang Klaim Global Fund sebesar Rp791.884.000,00; dan
iii) Piutang KB sebesar Rp32.917.009,00.

**Piutang Klaim Pelayanan BPJS**

Saldo Piutang BPJS Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.250.245.114,00 dicatat berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) yang terbit atas pelayanan Tahun 2024 namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayar, dengan penjelasan mutasi sebagai berikut.

| | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| (a) | Saldo awal piutang Tahun 2023 *audited* | 5.009.942.961 |
| | Mutasi kurang: | |
| (b) | - Pengurangan piutang atas koreksi Tahun 2023 | 197.220.000 |
| (c) | - Penerimaan Pembayaran atas piutang pelayanan Tahun 2023 dan tahun sebelumnya yang telah diterima selama Tahun 2024 | 4.812.722.961 |
| (d) | Saldo Piutang Tahun 2023 setelah koreksi dan pembayaran (d= a-b-c) | 0 |
| | Mutasi tambah tahun berjalan: | |
| (e) | - Jumlah klaim layanan kesehatan periode 2024 hasil verifikasi BPJS atas klaim yang diajukan | 41.081.330.497 |
| | Mutasi kurang tahun berjalan: | |
| (f) | - Pembayaran klaim dari BPJS per 31 Desember 2024 | 32.831.085.383 |
| (g) | Saldo Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Desember 2024 (g=d+e-f) | 8.250.245.114 |

Piutang BPJS per 31 Desember 2024 tersebut di atas tidak termasuk piutang layanan kesehatan periode 2024 yang belum diajukan klaim ke BPJS dan klaim yang masih dalam proses verifikasi BPJS.

**Piutang Klaim Global Fund**

Saldo Piutang Global Fund Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp791.884.000,00 merupakan klaim kepada Global Fund atas jasa pemeriksaan Tuberkulosis (TB), Tuberkulosis Resisten Obat (TB-RO), Diabetes Melitus (DM), dan Tes Cepat Molekuler (TCM) *Xpert.*

**Piutang KB**

Saldo Piutang KB Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.917.009,00 merupakan piutang atas pelayanan KB pada Puskesmas Kebon Jeruk dan Puskesmas Taman Sari.

**ii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD**

Saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp392.639.475.638,00 dan Rp370.652.952.005,00.

Saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp392.639.475.638,00 terdiri dari:

i) Piutang Klaim Pelayanan BPJS sebesar Rp369.560.731.310,00;
ii) Piutang Klaim Covid terhadap Kementerian Kesehatan sebesar Rp15.126.736.613,00;
iii) Piutang Klaim Global Fund sebesar Rp715.275.459,00;
iv) Piutang KB sebesar Rp1.775.000,00; dan
v) Piutang Lainnya sebesar Rp7.234.957.256,00.

Rincian saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.43

Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan | 77.681.300.061 | 77.922.180.036 |
| 2 | Rumah Sakit Umum Daerah Koja | 47.006.698.006 | 81.147.611.547 |
| 3 | Rumah Sakit Umum Cengkareng | 42.664.216.203 | 22.879.548.294 |
| 4 | Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo | 41.999.529.620 | 11.736.984.868 |
| 5 | Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih | 28.989.487.005 | 33.560.210.385 |
| 6 | Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit | 28.210.690.945 | 36.042.255.464 |
| 7 | Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu | 27.783.692.817 | 29.349.543.998 |
| 8 | Rumah Sakit Umum Adhyaksa | 0 | 3.107.896.280 |
| 9 | RSUD 5 wilayah kota administrasi | 98.303.860.981 | 74.906.721.133 |
| | **Jumlah** | **392.639.475.638** | **370.652.952.005** |

**Piutang Klaim Pelayanan BPJS RSUD**

Saldo Piutang BPJS RSUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp369.560.731.310,00 dicatat berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) yang terbit atas pelayanan Tahun 2024 namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayar, dengan penjelasan mutasi sebagai berikut.

| | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| (a) | Saldo awal piutang Tahun 2023 *audited* | 255.131.747.665 |
| | Mutasi tambah: | |
| (b) | - Penambahan piutang atas koreksi Tahun 2023 | 130.100.820.772 |
| | Mutasi kurang: | |
| (c) | - Pengurangan piutang atas koreksi Tahun 2023 | 70.224.285 |
| (d) | - Penerimaan Pembayaran atas piutang pelayanan Tahun 2023 dan tahun sebelumnya yang telah diterima selama Tahun 2024 | 381.049.639.264 |
| (e) | Saldo Piutang Tahun 2023 setelah koreksi dan pembayaran (e= a+b-c-d) | 4.112.704.888 |
| | Mutasi tambah tahun berjalan: | |
| (f) | - Jumlah klaim layanan kesehatan periode 2024 hasil verifikasi BPJS atas klaim yang diajukan | 2.318.831.124.246 |
| | Mutasi kurang tahun berjalan: | |
| (g) | - Pembayaran klaim dari BPJS per 31 Desember 2024 | 1.950.838.228.909 |
| (h) | - Hibah Piutang Klaim Covid RSU Adhyaksa ke Kejaksaan Agung RI Tahun 2024 | 2.544.868.915 |
| (i) | Saldo Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Desember 2024 (i=e+f-g-h) | 369.560.731.310 |

Piutang BPJS per 31 Desember 2024 tersebut di atas tidak termasuk piutang layanan kesehatan periode 2024 yang belum diajukan klaim ke BPJS dan klaim yang masih dalam proses verifikasi BPJS.

**Piutang Klaim Covid RSUD**

Saldo Piutang Klaim Covid RSUD kepada Kemenkes sebesar Rp15.126.736.613,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

| | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| (a) | Saldo awal piutang Tahun 2023 *audited* | 12.559.125.710 |
| (b) | Mutasi tambah: | |
| | - Penambahan piutang atas koreksi Tahun 2023 | 4.078.320.580 |
| (c) | Mutasi kurang: | |
| | - Pengurangan piutang atas koreksi Tahun 2023 | 1.378.562.277 |
| (d) | Nilai Piutang Tahun 2023 setelah koreksi dan pembayaran (d= a+b-c) | 15.258.884.013 |
| | Mutasi kurang tahun berjalan: | |

| | | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| (e) | - | Hibah Piutang Klaim Covid RSU Adhyaksa ke Kejaksaan Agung RI Tahun 2024 | 132.147.400 |
| (f) | | Saldo Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Desember 2024 (f= d-e) | 15.126.736.613 |

**Piutang Klaim Global Fund**

Piutang Klaim Global Fund RSUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp715.275.459,00 merupakan klaim kepada Global Fund atas jasa pemeriksaan Tuberkulosis (TB), Tuberkulosis Resisten Obat (TB-RO), Diabetes Melitus (DM), dan Tes Cepat Molekuler (TCM) *Xpert*.

**Piutang KB**

Piutang KB RSUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.775.000,00 terdapat pada RSUD Tanah Abang.

**Piutang Lainnya**

Piutang Lainnya RSUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.234.957.256,00 merupakan Piutang Jampersal, Jamkesmas dan Jamkesda pada RSUD Koja dan RSKD Duren Sawit.

**iii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Laboratorium Kesehatan Daerah**

Saldo Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp282.621.000,00 merupakan piutang pelayanan laboratorium kepada pihak di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Saldo Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah per 31 Desember 2024 menjadi nihil disebabkan adanya reklasifikasi akun Piutang Pendapatan BLUD menjadi akun Piutang Retribusi sebagai dampak implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

**iv. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan**

Saldo Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp12.650.000,00, merupakan piutang atas jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi.

**v. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda**

Saldo Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama yaitu sebesar Rp93.985.512,00. Saldo tersebut merupakan saldo piutang sewa *tenant* di BLUD UPT Stadion Lebak Bulus. Pada tahun 2015 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus dilikuidasi, selama proses pemeriksaan oleh Inspektorat pencatatan piutang disajikan sebagai piutang di Dinas Pemuda dan Olah Raga.

**vi. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Perparkiran**

Saldo Piutang BLUD Unit Pengelola Perparkiran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp721.254.452,00 di antaranya adalah piutang pada operator penyedia jasa parkir.

**vii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung**

Saldo Piutang BLUD Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.678.949.940,00 dan Rp4.195.265.340,00. Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.44
Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Piutang Sewa SKH | 3.648.913.400 | 4.182.228.800 |
| 2 | Piutang Tanah Kavling Siap Bangun | 11.596.540 | 11.596.540 |
| 3 | Piutang Tanah Sarana Kerja dan Hunian | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 4 | Piutang Administrasi Jasa Layanan Kontrak | 17.000.000 | 0 |
| | **Jumlah** | **3.678.949.940** | **4.195.265.340** |

**2. Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah piutang antar BLUD di bawah Dinas Kesehatan. Saldo piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp271.278.000,00. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi sehingga tidak disajikan dalam Neraca Provinsi DKI Jakarta.

**b) Piutang Hasil Kerja Sama BLUD**

Saldo Piutang Hasil Kerja sama BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp39.836.942.886,00 dan Rp31.553.049.422,00. Rincian Piutang Hasil Kerja sama BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.45
Rincian Piutang Hasil Kerjasama BLUD
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Puskesmas Pasar Minggu | 0 | 680.000 |
| 2 | Puskesmas Pasar Rebo | 0 | 2.700.000 |
| 3 | RSUD Pasar Rebo | 114.340.500 | 0 |
| 4 | RSUD Pasar Minggu | 0 | 225.532.000 |
| 5 | RSUD Tanjung Priok | 0 | 800.000 |
| 6 | RSU Adhyaksa | 0 | 250.000 |
| 7 | RSUD Koja | 793.150.080 | 550.263.352 |
| 8 | RSUD Tarakan | 2.483.942.846 | 2.219.962.242 |
| 9 | RSUD Cengkareng | 758.385.825 | 728.658.325 |
| 10 | RSUD Budhi Asih | 843.674.000 | 22.400.000 |
| 11 | Unit Pengelola Perparkiran | 2.512.373.522 | 1.570.103.645 |
| 12 | Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung | 30.726.018.000 | 24.341.578.000 |
| 13 | Unit Pengelola Sampah Terpadu | 1.605.058.113 | 1.890.121.858 |
| | **Jumlah** | **39.836.942.886** | **31.553.049.422** |

**c) Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah**

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.653.440.431,00 dan Rp2.042.458.535,00. Saldo piutang tersebut di antaranya merupakan Piutang denda keterlambatan pelaksanaan pembangunan Bisnis Center PT Albamas Sinar Purnama atas PKS Bangun Serah Guna Gedung Pusat Grosir PIK (PGP) sebesar Rp1.782.868.770,00 dan Piutang Biaya Pra Operasional Bisnis Center sebesar Rp1.274.052.348,00 pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung dan saldo piutang denda sebesar Rp191.711.234,00 pada RSUD Cengkareng.

**Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih**

Nilai Piutang BLUD per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sebesar Rp399.572.364.522,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp449.977.840.530,00 dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp50.405.476.008,00.

Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) BLUD berdasarkan jenis pendapatan BLUD per 31 Desember 2024 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.46

Klasifikasi umur piutang (*aging*) BLUD berdasarkan jenis pendapatan BLUD

Per 31 Desember 2024

| No | Uraian | Penggolongan Kualitas Piutang (Rp) | | | | Jumlah Piutang per Jenis Pendapatan BLUD (Rp) | Jumlah Penyisihan Piutang per Jenis Pendapatan BLUD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lancar | Kurang Lancar | Diragukan | Macet | | |
| | | 0 s.d 1 Tahun | 1 s.d 2 Tahun | 2 s.d 5 Tahun | lebih dari 5 Tahun | | |
| 1 | Piutang Jasa Layanan Umum BLUD | 387.505.822.596 | 8.881.406.800 | 571.850.000 | 8.528.377.817 | 405.487.457.213 | 11.633.486.192 |
| 2 | Piutang Hasil Kerjasama BLUD | 4.236.571.418 | 273.455.185 | 2.125.252.282 | 33.201.664.001 | 39.836.942.886 | 34.312.818.518 |
| 3 | Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah | 21.729.022 | 191.711.234 | 0 | 4.440.000.175 | 4.653.440.431 | 4.459.171.298 |
| **Jumlah Piutang BLUD** | | **391.764.123.036** | **9.346.573.219** | **2.697.102.282** | **46.170.041.993** | **449.977.840.530** | **50.405.476.008** |
| Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih | | 1.958.665.972 | 928.216.902 | 1.348.551.141 | 46.170.041.993 | 50.405.476.008 | |
| ***NRV* Piutang BLUD** | | **389.805.457.064** | **8.418.356.317** | **1.348.551.141** | **0** | **399.572.364.522** | |

#### 5.3.1.1.2.3.11 Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan denda atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyetorkan pokok sewa atau kontribusi Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) ke Kas Daerah sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset. Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dikelola oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp26.335.832.350,00 dan Rp26.743.584.888,00.

Rincian saldo Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD | 19.263.176.632 | 19.788.879.170 |

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 2 | Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur | 7.072.655.718 | 6.954.705.718 |
| | **Jumlah** | **26.335.832.350** | **26.743.584.888** |

**Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Nilai Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp449.735.337,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp26.335.832.350,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tak Tertagih sebesar Rp25.886.097.013,00.

Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.47
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD
yang Tidak Dipisahkan Per 31 Desember 2024

| No | Uraian | Kualitas Piutang | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lancar (Rp) | Kurang Lancar (Rp) | Diragukan (Rp) | Macet (Rp) | |
| 1 | Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD | 55.197.600 | 106.557.301 | 124.390.957 | 18.977.030.774 | 19.263.176.632 |
| 2 | Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur | 117.950.000 | 132.618.252 | 0 | 6.822.087.466 | 7.072.655.718 |
| | Jumlah Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan (I) | 173.147.600 | 239.175.553 | 124.390.957 | 25.799.118.240 | 26.335.832.350 |
| | Persentase Penyisihan (II) | 0.50% | 10% | 50% | 100% | |
| | Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tak Tertagih (I x II) | 865.738 | 23.917.555 | 62.195.479 | 25.799.118.240 | 25.886.097.013 |
| | **Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)** | 172.281.862 | 215.257.998 | 62.195.478 | 0 | 449.735.337 |

### 5.3.1.1.2.3.12 Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan yang berasal dari denda atas pelanggaran Peraturan Daerah. Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.894.389.875,00 dan Rp6.390.310.880,00. Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2023 merupakan Piutang Pendapatan Denda Kelebihan Debit Air Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup

sebesar Rp1.336.257.738,00 dan Piutang Pelanggaran atas Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp558.132.137,00 yang mengalami perubahan kode rekening berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019.

**Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**

Nilai Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp529.540.967,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.894.389.875,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp1.364.848.908,00.

| No | Uraian | Kualitas Piutang | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lancar (Rp) | Kurang Lancar (Rp) | Diragukan (Rp) | Macet (Rp) | |
| 1 | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | | | | | |
| | Piutang Pelanggaran atas Mendirikan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 1.336.257.738 | 1.336.257.738 |
| 2 | **Dinas Lingkungan Hidup** | | | | | |
| | Piutang Hasil Kerja Sama Daerah | 286.547.825 | 271.584.312 | 0 | 0 | 558.132.137 |
| - | **Jumlah Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah (I)** | 286.547.825 | 271.584.312 | 0 | 1.336.257.738 | 1.894.389.875 |
| - | Persentase Penyisihan (II) | 0,50% | 10% | 50% | 100% | |
| - | Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah (I x II) | 1.432.739 | 27.158.431 | 0 | 1.336.257.738 | 1.364.848.908 |
| - | **Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)** | **285.115.086** | **244.425.881** | **0** | **0** | **529.540.967** |

### 5.3.1.1.2.3.13 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah merupakan piutang yang berasal dari:

a) Piutang hasil sewa barang milik daerah atas hak tagih pemerintah atas pemberian fasilitas/jasa kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa.
b) Piutang hasil lelang titik reklame atas hak tagih pemerintah atas pemanfaatan titik reklame oleh pihak ketiga pada aset milik Pemerintah Daerah.
c) Piutang hasil kerja sama daerah atas hak tagih pemerintah atas kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian kerja sama pemanfaatan aset dalam bentuk Bangun Guna Serah (*Build, Operate, Transfer/BOT*) atau Bangun Serah Guna (*Build, Transfer, Operate/BTO*).

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp44.146.360.933,00 dirinci sebagai berikut.

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| I | Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah | 0 | 37.301.370.242 |
| II | Piutang Hasil Lelang Titik Reklame | 0 | 2.871.178.295 |
| III | Piutang Hasil Kerja Sama Daerah | 0 | 3.973.812.396 |
| **Total Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah** | | **0** | **44.146.360.933** |

Pada Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan reklasifikasi Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp42.961.990.890,00 yang semula pada akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah menjadi Piutang Retribusi Jasa Usaha pada akun Pendapatan Retribusi Daerah.

**Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah**

Nilai Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp19.640.321.312,00.

### 5.3.1.1.2.3.14 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya

**1) Piutang Kompensasi Rumah Susun Murah/Sederhana**

Piutang Kompensasi Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S) adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya kompensasi kewajiban untuk membangun rumah susun sederhana yang dikonversi dalam bentuk dana/konstruksi/barang. Piutang Kompensasi RSM/S per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp709.188.171.009,00 dan Rp842.311.305.796,00.

Piutang Kompensasi RSM/S adalah kewajiban para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) untuk membiayai dan membangun rumah susun sederhana yang dapat dikonversi dalam bentuk:

a) Pembangunan rumah susun;
b) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan/atau
c) Pengadaan barang.

Pencatatan Piutang Kompensasi RSM/S diukur berdasarkan nilai yang termuat dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Ketentuan Pengenaan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana sebagai berikut:

Ketentuan pemberian SP3L sebagai berikut:

a) Sesuai Keputusan Gubernur No. 540 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan

Lokasi/Lahan Atas Bidang Tanah Untuk Pembangunan Fisik Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyatakan bahwa pembebasan terhadap lahan dengan luas 5.000m$^2$ atau lebih terhadap lahan yang peruntukannya sebagai hunian dan/atau terdapat hunian di lahan tersebut, maka pemohon SIPPT diwajibkan membiayai dan membangun RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersial. Ketentuan lokasi dan persyaratan penjualan RSM tersebut ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di lahan milik pemegang SIPPT maka bangunan RSM menjadi milik pemegang SIPPT.

b) Keputusan Gubernur No. 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyatakan bahwa pemegang SIPPT yang membebaskan lahan seluas 5.000m$^2$ atau lebih tanpa Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dikenakan sanksi berupa:
    1. Membiayai dan membangun sampai siap huni RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersial dengan ketentuan bahwa lokasi, jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di atas lahan milik pemegang SIPPT, maka lahan dan bangunan RSM adalah milik pemegang SIPPT.
    2. Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan yang lokasi, jenis dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
    3. Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lainnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Ketentuan penyelesaian konversi kewajiban RSM/S mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan RSM/S Melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang. Sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang pasal 9 ayat (9) maka pencatatan saldo Piutang Kompensasi Rumah

Susun, Susun Sederhana/Murah dialihkan secara bertahap ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Saldo Piutang Kompensasi RSM/S per 31 Desember 2024 sebesar Rp709.188.171.009,00 terdapat pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp76.801.418.133,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp632.386.752.876,00.

Tahun 2024 terdapat mutasi pengurangan Piutang Kompensasi RSM/S sebesar Rp133.123.134.787,00 dengan rincian pengurangan piutang pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp2.937.992.400,00 dikarenakan adanya pengalihan piutang pendapatan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas PT Lintas Cipta Development sesuai Izin Prinsip Konversi Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana No.4/C.46/31.74.04.1007.29.K-1.b/1/TM.12/2024 tanggal 13 September 2024 dan pengurangan piutang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp130.185.142.387,00.

Rincian Piutang Kompensasi RSM/S per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

| No. | Nama Pengembang | Persetujuan Prinsip | | Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | Tanggal | Nomor | |
| | **Tercatat di Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup:** | | | |
| 1 | PT Pardhika Wisti Sarana | 06-Apr-16 | 2149/-1.711.534 | 9.652.950.000 |
| 2 | PT Aryakencana Semesta | 13-Jan-17 | 32/-1.711.534 | 36.106.425.000 |
| 3 | PT Sedayu Sejahtera Abadi | 27-Jan-17 | 27/-1.711.534 | 24.059.448.933 |
| 4 | PT Kode Sukses Sejahtera | 21-Jul-17 | 1717/-1.711.534 | 6.982.594.200 |
| | | | **Jumlah** | **76.801.418.133** |
| | **Tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:** | | | |
| 1 | PT Almaron Perkasa | 30-Jan-20 | 42/-1.796.3 | 4.326.363.603 |
| 2 | PT Adhi Karya (Persero) TBK | 01-Sep-20 | 3/C.46/31.75.09.1001.02.022.R.9/1/-1.711.32/2020 | 4.611.946.133 |
| 3 | PT Karyagraha Nusantara | 02-Sep-20 | 4/C.46/31.74.03.1005.04.015.K.1.a.b/1/-1.711.32/2020 | 461.701.844 |
| 4 | PT Prakarsa Semesta Alam | 04-Sep-20 | 7/C.46/31.74.07.1010.01.015.R.7/1/-1.711.32/2020 | 35.875.133.400 |
| 5 | PT Mandiri Eka Abadi | 05-Apr-21 | 5/C.46/31.74.07.100.01.009.R.10/-1.711.32/2021 | 29.145.253.038 |
| 6 | PT Mitra Sindo Makmur | 05-Apr-21 | 6/C.46/31.75.06.100.09.001.R.7.b/1-1.711.32/2021 | 117.210.107.685 |
| 7 | PT Global Budi Perkasa | 03-Mei-21 | 9/C.46/31.73.01.100.01.008.R.10/1/-1.711.32/2021 | 22.491.838.178 |
| 8 | PT Karyabangun | 28-Mei-21 | 11/C.46/31.74.02.108.03.049.K.1.a.b/1/-1.711.32/2021 | 3.700.559.263 |
| 9 | Greenwood Sejahtera, PT | 21-Okt-21 | 15/C.46/31.71.07.1003.04.005.K.1.a.b/1/-1.711.32/2021 | 42.260.447.250 |
| 10 | Pondok Indah Land, PT | 21-Okt-21 | 14/C.46/31.73.08.1006.02.004.K.1.a.b/1/-1.711.32/2021 | 14.533.533.600 |
| 11 | Sdr/i Rahmad Abadi dan Melania Maria | 31-Des-21 | 18/C.46/31.71.07.1003.04.005.K.1.a.b/1/-1.711.32/2021 | 4.383.946.263 |

| No. | Nama Pengembang | Persetujuan Prinsip | | Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | Tanggal | Nomor | |
| | Theresia Merlina | | | |
| 12 | PT Trimitra Multi Sukses Selaras | 01-Des-22 | 1/C.46/31.71.05.1001.12.003.K.1.a.b/1/-1.711.32/2022 | 45.600.926.760 |
| 13 | PT Astra Modern Land (PT. Asya Mandira Land) | 28-Jun-22 | 2/C.46/31.75.06.1004.06.001.R.4.b/ 1/-1.711.32/2022 | 140.432.025.200 |
| 14 | PT Perkasa Internusa Mandiri | 13-Sep-22 | 4/C.46/31.72.05.1003.04.001.K.1.a.b/1/-1.711.32/2022 | 10.040.274.886 |
| 15 | PT Menara Sinar Terang | 13-Okt-22 | 5/C.46/31.73.06.1001.05.019.C.1/1/-1.711,32/2022 | 7.010.250.000 |
| 16 | PT Citra Mas Pentama | 13-Okt-22 | 6/C.46/31.73.06.1005.03.007.K.1/-1.711.32/2022 | 32.777.831.064 |
| 17 | PT Citra Adyapataka | 13-Okt-22 | 7/C.46/31.73.06.1002.09.012.R.4/1/-1.711.32/2022 | 15.157.754.880 |
| 18 | PT Teras Laras | 13-Okt-22 | 8/C.46/31.74.06.1001.04.009.R.4/1/-1.711.32/2022 | 3.204.182.610 |
| 19 | PT Aplikanusa Lintasarta | 13-Okt-22 | 9/C.46/31.74.06.1001.01.001.K.1.b/1/-1.711.32/2022 | 4.849.564.590 |
| 20 | PT Metropolitan Kentjana | 13-Okt-22 | 10/C.46/31.74.10.1002.01.010.R.6.b/1/-1.711.32/2022 | 2.213.527.500 |
| 21 | PT Metropolitan Kentjana | 13-Okt-22 | 11/C.46/31.74.05.1002.01.017.R.4/1/-1.711.32/2022 | 1.676.307.984 |
| 22 | PT. Kencana Indah Sejahtera | 13-Okt-22 | 12/C.46/31.72.06.1002.02.017.R.6/1/-1.711.32/2022 | 7.742.493.000 |
| 23 | PT Astra Internasional | 13-Okt-22 | 13/C.46/31.75.04.1007.02.021.R.6/1/-1.711.32/2022 | 4.407.518.700 |
| 24 | PT Samadista Karya | 27-Des-23 | 4/C.46/31.74.06.1002.K-1.b/1/TM.12/2023 | 9.277.048.980 |
| 25 | PT Ramayana Lestari Sentosa | 21-Nov-23 | 2/C.46/31.75.09.1002.35.K-3/1/TM.12/2023 | 1.298.780.280 |
| 26 | PT Lintas Cipta Development | 21-Nov-23 | 3/C.46/31.74.10.1002.30.R-1/1/TM.12/2023 | 794.936.405 |
| 27 | PT. Jantra Swarna Dipta Qq Pt. Jan Darmadi Investindo | 22-Mei-24 | 1/C.46/31.74.07.1007.25.R-2/1/TM.12/2024 | 39.901.495.200 |
| 28 | PT Kuningan Graha Samatas | 13-Sep-24 | 3/C.46/31.74.02.1003.31.K-1.B/1/PM.12/2024 | 19.879.089.660 |
| 29 | PT Lestari Kirana Persada | 13-Sep-24 | 4/C.46/31.74.04.1007.29.K-1.B/1/PM.12/2024 | 2.937.992.400 |
| 30 | PT. Nuansa Ayu Karamba | 13-Sep-24 | 5/C.46/31.01.01.1001.44.W/1/PM.12/2024 TGL 13 SEPT 2024 | 466.233.300 |
| 31 | PT. So Good Food | 13-Sep-24 | 6/C.46/31.75.06.1007.33.KPI/1/PM.12/2024 TGL 13 SEPT 2024 | 3.717.689.220 |
| | | | **Jumlah** | **632.386.752.876** |
| | | | **Jumlah Piutang** | **709.188.171.009** |

**Penyisihan Piutang Kompensasi Rumah Susun Murah/Sederhana Tak Tertagih**

Nilai Piutang Kompensasi RSM/S per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp353.858.420.095,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp709.188.171.009,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp355.329.750.914,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.48

Penyisihan Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah Tak Tertagih Per 31 Desember 2024

| No | Nama SKPD Pengampu | Nilai Piutang per 31 Desember 2024 (Rp) | Penyisihan Piutang (Rp) | | | | Jumlah (Rp) | Piutang Neto (NRV) (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lancar (0,5%) | Kurang Lancar (10%) | Diragukan (50%') | Macet (100%) | | |
| 1 | Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup | **76.801.418.133** | **0** | **0** | **0** | **76.801.418.133** | **76.801.418.133** | **0** |
| 2 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | **632.386.752.876** | **334.512.499** | **1.137.076.566** | **277.056.743.716** | **0** | **278.528.332.781** | **353.858.420.095** |
| | **Jumlah** | **709.188.171.009** | **334.512.499** | **1.137.076.566** | **277.056.743.716** | **76.801.418.133** | **355.329.750.914** | **353.858.420.095** |

**2) Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN**

Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN merupakan hibah aset kredit Eks BPPN pada tahun 2003 dengan nilai Rp205.509.066.573,00 sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

Saldo Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 atas pokok piutang adalah sebesar Rp41.880.534.592,00 dan Rp41.923.253.432,00.

Total hasil tagihan eks BPPN yang diterima dari tahun 2005 sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp165.418.776.708,00 yang telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah. Sampai dengan Tahun 2024 Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN yang telah digunakan sebagai menambah modal PT Bank DKI Jakarta adalah sebesar Rp163.185.297.701,00 dan sisanya sebesar Rp2.233.479.007,00 masih terdapat pada Kas Daerah (belum digunakan sebagai penambah modal PT Bank DKI Jakarta).

**Penyisihan Piutang Hasil Tagih Tak Tertagih**

Nilai Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp41.880.534.592,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp41.880.534.592,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.49

Penyisihan Piutang Hasil Tagih Tak Tertagih

Per 31 Desember 2024

| No | Uraian | Penggolongan Kualitas Piutang | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lancar (Rp) | Kurang Lancar (Rp) | Diragukan (Rp) | Macet (Rp) | |
| 1 | Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN | 0 | 0 | 0 | 41.880.534.592 | 41.880.534.592 |
| | **Jumlah Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN (I)** | **0** | **0** | **0** | **41.880.534.592** | **41.880.534.592** |
| | **Persentase Penyisihan (II)** | **0,50%** | **10%** | **50%** | **100%** | |
| | **Jumlah Penyisihan Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN Tak Tertagih (I x II) 2024** | **0** | **0** | **0** | **41.880.534.592** | **41.880.534.592** |
| | **Nilai Piutang Neto 2024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**3) Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun**

Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pembayaran sarana dan prasarana fasilitas rumah susun berupa penyediaan air dan listrik bagi para penghuni. Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp28.893.574.595,00 dan Rp26.444.238.419,00. Piutang ini terdiri dari:

**a) Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa**

Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa adalah Piutang atas penggunaan air para penghuni rumah susun sewa yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Unit Pengelola Rumah Susun.

Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp28.073.794.506,00 dan Rp25.517.673.358,00.

**Penyisihan Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa**

Nilai Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp4.254.566.710,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp28.073.794.506,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp23.819.227.796,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.50

Penyisihan Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa

Per 31 Desember 2024

| No | Uraian | Kualitas Piutang | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lancar (Rp) | Kurang Lancar (Rp) | Diragukan (Rp) | Macet (Rp) | |
| 1 | Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa | 882.330.060 | 1.363.346.250 | 4.299.273.350 | 21.528.844.846 | 28.073.794.506 |
| | Persentase Penyisihan | 0,50% | 10% | 50% | 100% | |
| | Jumlah penyisihan pembayaran air rusun sewa tak tertagih | 4.411.650 | 136.334.625 | 2.149.636.675 | 21.528.844.846 | 23.819.227.796 |
| | **Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)** | **877.918.410** | **1.227.011.625** | **2.149.636.675** | **0** | **4.254.566.710** |

**b) Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa**

Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa adalah Piutang atas penggunaan listrik para penghuni rumah susun sewa yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Unit Pengelola Rumah Susun.

Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp819.780.089,00 dan Rp926.565.061,00.

**Penyisihan Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa**

Nilai Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value)* adalah sebesar Rp2.003.242,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp819.780.089,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp817.776.847,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.51

Penyisihan Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa

Per 31 Desember 2024

| No | Uraian | Kualitas Piutang | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lancar (Rp) | Kurang Lancar (Rp) | Diragukan (Rp) | Macet (Rp) | |
| 1 | Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa | 0 | 402.896 | 3.281.271 | 816.095.922 | 819.780.089 |
| | Persentase Penyisihan | 0,50% | 10% | 50% | 100% | |
| | Jumlah penyisihan pembayaran listrik rusun sewa tak tertagih | 0 | 40.290 | 1.640.636 | 816.095.922 | 817.776.847 |
| | **Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)** | **0** | **362.606** | **1.640.636** | **0** | **2.003.242** |

**4) Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)**

Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) merupakan piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan Izin Penyelenggaraan Reklame Non Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan penyelenggara reklame. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp17.988.000,00 dan Rp121.230.000,00.

**Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)**

Nilai Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp8.994.000,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp17.988.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp8.994.000,00.

**5) Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)**

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bentuk disinsentif yang dikenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan yang ingin meningkatkan KLB pada daerah yang mendapat Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus (kode a) sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Dokumen sumber yang menjadi dasar pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan adalah Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai KLB selanjutnya disebut PPK-KLB.

PPK-KLB merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga untuk menyerahkan bentuk kompensasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan nilai KLB yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.

Kompensasi Pelampauan KLB diakui sebagai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB sebesar jumlah yang tercantum dalam PPK-KLB.

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB dinilai berdasarkan nilai yang tercantum dalam PPK-KLB dikurangi dengan nilai pemenuhan kewajiban kompensasi KLB yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp686.091.733.239,00 dan Rp707.655.176.471,00.

Saldo Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2024 sebesar Rp686.091.733.239,00 merupakan saldo piutang per 31 Desember

2023 sebesar Rp707.655.176.471,00 dikurangi pemenuhan kewajiban Tahun 2024 sebesar Rp21.563.443.232,00.

Rincian Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.52

Daftar Nilai Piutang Kompensasi Pelampauan

Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Uraian | Tanggal Perjanjian | Bentuk Kompensasi | Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp) | Mutasi (Rp) | | Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Penambahan | Pengurangan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6-7 |
| 1 | Sampoerna Land, PT | 7 Juni 2016 | Rumah susun 3 Tower di Daan Mogot | 488.385.180.216 | 0 | 0 | 488.385.180.216 |
| 2 | Singa Propertindo Haryono, PT | 12 Oktober 2016 adendum 12 Juli 2018, 5 Agustus 2020 | Pekerjaan tata pamer dan pembangunan pintu masuk baru disisi jl pintu besar utara | 744.211.924 | 0 | 744.211.924 | 0 |
| 3 | Putragaya Wahana, PT | 16 November 2016 adendum 1 Juli 2019 | Rumah Susun 3 Tower di Pulo Gebang | 5.287.537.440 | 0 | 0 | 5.287.537.440 |
| 4 | Kepland Investama, PT | 7 Desember 2016 adendum 20 Maret 2019 dan 28 Oktober 2022 | Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot | 30.443.684.415 | 0 | 20.819.231.308 | 9.624.453.108 |
| 5 | PT Ambal Aqar | 25 September 2020 | a. Revitalisasi Waduk Setiabudi Barat dengan ruang lingkup Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi (Landscape, Pengerukan Waduk, Perkuat Tebing, Pembangunan Instalasi Pengolahan IPALD Kapasitas 30 lps, Revitalisasi Pompa Setiabudi Barat, Evaluasi Sistem Kali Cideng dan Pompa Mobile) dan Pengawasan<br>b. Revitalisasi Kanal Banjir Barat (Segmen Stasiun Karet s.d Shangrila dan Segmen Landmark s.d Jembatan Jl HOS Cokroaminoto sepanjang 500 m d dengan ruang lingkup Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi (*Landscape*, Jembatan Penghubung ke Waduk Setiabudi Barat) dan Pengawasan | 178.787.374.200 | 0 | 0 | 178.787.374.200 |
| 7 | PT Cempaka Wenang Jaya | 6 Oktober 2017 | a. Lahan Masjid Habib Cikini beserta bangunan pendukungnya<br>b. Renovasi Bangunan Masjid, Gereja dan Gedung Kesenian Masjid Luar Batang | 4.007.188.276 | 0 | 0 | 4.007.188.275 |
| | **Jumlah** | | | **707.655.176.471** | **0** | **21.563.443.232** | **686.091.733.239** |

**Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Luas Bangunan) Tak Tertagih**

Nilai Piutang Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp89.393.687.100,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp686.091.733.239,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp596.698.046.139,00.

#### 5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.370.741.523.000,00 dan Rp8.295,00. Piutang tersebut dicatat sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024. Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan Piutang Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil dengan rincian sebagai berikut.

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 23.574.776.000 | 3.052 |
| 2 | Penerimaan PPh Pasal 21 | 2.275.715.565.000 | 961 |
| 3 | Penerimaan PPh PODN (Pasal 25 dan Pasal 29) | 27.279.767.000 | 1.659 |
| 4 | Bagi hasil dari Cukai Hasil Tembakau | 96.772.000 | 504 |
| 5 | Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi | 44.074.643.000 | 2.119 |
| | **Jumlah** | **2.370.741.523.000** | **8.295** |

#### 5.3.1.1.2.5 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp383.637.070.506,00 dan Rp374.339.155.304,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.53

Rincian Piutang Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

| No. | Jenis Piutang Lainnya | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Uang Muka | 200.957.354.942 | 229.757.096.738 |
| 2 | Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga | 506.527.225 | 406.051.698 |
| 3 | Piutang Tunjangan DPRD | 4.255.540.000 | 4.419.140.000 |
| 4 | Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta | 130.085.082.350 | 130.297.979.742 |
| 5 | Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah | 9.292.376.530 | 9.458.887.126 |
| 6 | Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi | 38.540.189.459 | 0 |
| **Jumlah** | | **383.637.070.506** | **374.339.155.304** |

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

**1) Uang Muka**

Uang Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp200.957.354.942,00 dan Rp229.757.096.738,00. Uang Muka sebesar Rp200.957.354.942,00 merupakan Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

a) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp186.978.479.789,00 merupakan uang muka kerja pada 2 Paket kegiatan sebagai berikut:
   1. Pekerjaan Jakarta *Sewerage Development Project* (JSDP) Zona 1 Pekerjaan Konstruksi Jaringan Pipa Air Limbah Jakarta *Sewerage System* Zona 1 Paket 5 (Area 2-1), SPK No. 3550/Kr.01.00 Tgl. 12-04-2023 (Nindya Modern, KSO) sebesar Rp76.821.608.160,00;
   2. Pekerjaan Jakarta *Sewerage Development Project* (JSDP) Zona 1 Pekerjaan Konstruksi Jaringan Pipa Alim JSDP Zone 1 Paket 6 (Area 2-2), SPK No. 3551/Kr.01.00 Tgl. 12-04-2023 (Adhi-Hutama KSO) sebesar Rp53.006.561.870,00;
   3. Pekerjaan Tanggul Pengaman Pantai dan Infrastruktur Pengendali Banjir Pesisir Pantai Tahap I Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1, SPK No. 5956/Kr.01.02 Tgl. 12.01.2024 (Abipraya - Guntur, KSO) sebesar Rp19.246.713.277,00; dan
   4. Pekerjaan Tanggul Pengaman Pantai dan Infrastruktur Pengendali Banjir Pesisir Pantai Tahap I Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 2, SPK No. 40911/Kr.01.02 Tgl. 06-08-2024 (PT. Nindya Karya) sebesar Rp37.903.596.482,00.

b) Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp13.978.875.153,00 merupakan uang muka kerja pada 3 Paket kegiatan sebagai berikut:
   1. Pekerjaan Rehab Total Gedung PKBM N 39 (PT. Citra Prasasti - Cakra Wibowo, KSO) sebesar Rp2.660.912.668,00;
   2. Pekerjaan Rehab Total Gedung SDN Cipayung 05 (PT. Citra Prasasti - Cakra Wibowo, KSO) sebesar Rp6.223.476.871,00; dan
   3. Rehab Total Gedung SDN Rambutan 05 (PT. Citra Prasasti - Cakra Wibowo, KSO) sebesar Rp5.094.485.614,00.

**2) Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga**

Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp506.527.225,00 dan

Rp406.051.698,00. Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 terdiri dari:

a) kelebihan pembayaran pajak atas rehabilitasi gedung SMKN 64 Jakarta oleh Dinas Pendidikan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp373.147.291,00. Saldo kelebihan pembayaran pajak Per 31 Desember 2020 sebesar Rp485.091.478,00 yang merupakan kelebihan pembayaran pajak uang muka kerja atas kontrak yang dibatalkan. Pada tahun 2021 terdapat kompensasi PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp111.944.187,00 maka tersisa sebesar Rp373.147.291,00 atas penyetoran PPN PT Bangun Abipraya Bennatin KSO Masa Pajak Juli 2019 yang belum dapat di kompensasi;
b) kelebihan pembayaran pajak, biaya admin bank maupun pembayaran pihak ketiga atas transaksi BOS pada 30 Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan sebesar Rp121.988.183,00 yang telah diterima kembali di rekening BOS di Tahun 2025;
c) kelebihan pembayaran pajak di RSUD Koja sebesar Rp10.903.037,00 yang terdiri atas kelebihan pembayaran PPh 21 atas nama RSUD Koja Rp5.686.537,00, kelebihan pembayaran PPN dan PPh 22 atas nama CV Chandra Karya sebesar Rp3.333.666,00, kelebihan pembayaran PPN dan PPh atas nama PT Trasti Global Konverta sebesar Rp1.882.823,00, dan kelebihan pembayaran kepada PT. Anara Trisakti Medika sebesar Rp11,00; dan
d) saldo rekening penerimaan BLUD di RSUD Sawah Besar yang didebit oleh PT Bank DKI tanpa pemberitahuan dan penjelasan sebesar Rp488.714,00. RSUD Sawah Besar telah bersurat ke PT Bank DKI, tetapi belum mendapatkan surat balasan ataupun tindak lanjut.

**3) Piutang Tunjangan DPRD**

Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.255.540.000,00 dan Rp4.419.140.000,00. Piutang Tunjangan DPRD berasal dari Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan yang sudah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan tersebut, jumlah tunjangan yang harus dikembalikan seluruhnya sebesar Rp6.063.640.000,00. Selama tahun 2010 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.644.500.000,00, tahun 2011 sampai dengan Tahun 2023 tidak ada penyetoran atas piutang tersebut, dan pada Tahun 2024 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp163.600.000,00 sehingga saldo Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp4.255.540.000,00.

**Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD Tak Tertagih**

Nilai Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp4.255.540.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang DPRD Tak Tertagih sebesar Rp4.255.540.000,00.

**4) Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta**

Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta adalah piutang atas uang muka kerja (UMK) yang telah dibayarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta atas pengadaan bus pada tahun anggaran 2013 namun belum dilakukan penyelesaian pekerjaan sampai dengan saat ini. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp130.085.082.350,00 dan Rp130.297.979.742,00. Rincian saldo Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta per 31 Desember 2024 dijelaskan sebagai berikut:

a) UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta tahun 2013.

   Pada tahun 2013 Dinas Perhubungan melaksanakan 8 (delapan) paket kegiatan pengadaan bus Transjakarta dengan melakukan pembayaran UMK namun belum dilakukan penyelesaian pekerjaan akibat proses hukum terkait tindak pidana korupsi. Para penyedia belum melakukan pembatalan kontrak atas 8 (delapan) paket pengadaan dan hingga kini masih terdapat sengketa hukum antara instansi dan penyedia. Sebagian penyedia tersebut sudah dinyatakan pailit sehingga potensi UMK untuk tidak dikembalikan menjadi sangat tinggi.

   Adapun rincian dari UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta sebagai berikut.

Tabel 5.54

UMK Paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta

| No | Uraian Paket | Penyedia | Uang Muka (Rp) | Penerimaan Tahun 2021 (Rp) | Penerimaan Tahun 2024 (Rp) | Sisa (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Articulated Bus | PT Saptaguna Dayaprima | 32.160.895.800 | 411.154.418 | 0 | 31.749.741.382 |
| 2 | Bus Sedang | | | | | |
| 3 | Single Bus | PT Ifani Dewi | 30.743.900.000 | 0 | 212.897.392 | 30.531.002.608 |
| 4 | Bus Sedang | | | | | |
| 5 | Single Bus | PT Industri Kereta Api | 13.752.000.000 | 0 | 0 | 13.752.000.000 |
| 6 | Bus Sedang | PT Putera Adi Karyajaya | 11.251.710.360 | 0 | 0 | 11.251.710.360 |
| 7 | Bus Sedang | PT Adi Tehnik Equipindo | 11.242.968.000 | 0 | 0 | 11.242.968.000 |
| 8 | Articulated Bus | PT Putriasi Utama Sari | 7.735.200.000 | 0 | 0 | 7.735.200.000 |
| | | | **106.886.674.160** | **411.154.418** | **212.897.392** | **106.262.622.350** |

Dari 6 (enam) penyedia sebagaimana disebutkan di atas, terdapat 4 (empat) penyedia yang dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri, yaitu:

1. PT Saptaguna Dayaprima telah dinyatakan pailit pada tahun 2017 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan hak pembagian harta pailit sebesar Rp411.154.418,00 pada 22 April 2021 atau hanya menerima pengembalian sebesar 1,28% dari total ter piutang melalui rekening 108-02615756 atas nama BPKD Provinsi DKI Jakarta dan diakui sebagai pengurang Uang Muka pada tahun berjalan;
2. PT Putera Adi Karyajaya telah dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tahun 2018. Berdasarkan Surat Permohonan No 3795/-193 tanggal 12 Agustus 2021, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa atas Temuan Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan DKI Jakarta No. 16.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti;
3. PT Adi Tehnik Equipindo juga telah dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 068/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tahun 2017; dan
4. PT Ifani Dewi telah dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 329/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Tahun 2024, dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan hak pembagian

harta pailit sebesar Rp212.897.392,00 pada 22 November 2024 atau hanya menerima pengembalian sebesar 0,69% dari total ter piutang melalui rekening 108-02615756 atas nama BPKD Provinsi DKI Jakarta dan diakui sebagai pengurang Uang Muka pada tahun berjalan.

Terhadap 2 (dua) penyedia lainnya, yaitu PT Industri Kereta Api dan PT Putriasi Utama Sari, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah berupaya menagih pengembalian Uang Muka sebagai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK kepada bersangkutan.

**Penyisihan UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta**

Penyisihan atas UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta per 31 Desember 2024 sebesar Rp106.262.622.350,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.55
Penyisihan UMK paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta
Per 31 Desember 2024

| No | Nama Perusahaan | Lancar (<1 tahun/5%) (Rp) | Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%) (Rp) | Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%) (Rp) | Macet (di atas 5 tahun/100%) (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Saptaguna Dayaprima | 0 | 0 | 0 | 31.749.741.382 | 31.749.741.382 |
| 2 | PT Ifani Dewi | 0 | 0 | 0 | 30.531.002.608 | 30.531.002.608 |
| 3 | PT Industri Kereta Api | 0 | 0 | 0 | 13.752.000.000 | 13.752.000.000 |
| 4 | PT Putera Adi Karyajaya | 0 | 0 | 0 | 11.251.710.360 | 11.251.710.360 |
| 5 | PT Adi Tehnik Equipindo | 0 | 0 | 0 | 11.242.968.000 | 11.242.968.000 |
| 6 | PT Putriasi Utama Sari | 0 | 0 | 0 | 7.735.200.000 | 7.735.200.000 |
| | Jumlah | **0** | **0** | **0** | **106.262.622.350** | **106.262.622.350** |

b) UMK pada kegiatan Pengadaan Bus *Single* Transjakarta Tahun 2013.

Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK pengadaan Transjakarta atas kegiatan Pengadaan Bus *Single* Transjakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama sebesar Rp23.822.460.000,00.

Pada tahun 2013 Dinas Perhubungan melakukan Pengadaan Bus *Single* Transjakarta dengan melakukan pembayaran UMK kepada PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Tehnik Equipindo sebesar Rp12.188.880.000,00 dan Rp12.763.580.000,00. Atas pengadaan bus tersebut dilakukan pembatalan kontrak, yang mengakibatkan kewajiban pengembalian pembayaran UMK oleh kedua perusahaan tersebut yang pembayarannya secara angsuran selama lebih dari 3 tahun. Bagian lancar tuntutan pengembalian UMK pengadaan Transjakarta merupakan piutang atas

pembatalan kontrak Pengadaan Bus *Single* Transjakarta Paket III dan Paket V.

Pada Tahun 2024 belum terdapat pembayaran angsuran atas pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta, hal tersebut disebabkan PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Tehnik Equipindo selaku pihak penyedia bus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. PT Adi Tehnik Equipindo dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 068/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 6 Februari 2018, saat ini PT Adi Tehnik Equipindo sudah menjalani proses lelang harta pailit yang kedua, namun mendapat gugatan dari Direktorat Jenderal Pajak sehingga proses lelang masih menunggu hasil gugatan tersebut. Sedangkan PT Putera Adi Karyajaya dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 September 2018. Rincian dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.56

UMK pada kegiatan Pengadaan Bus *Single* Transjakarta Tahun 2013

| No. | Uraian | Angsuran Pokok (Rp) | Jadwal Pembayaran | Pembayaran Angsuran (Rp) | Sisa Pokok Angsuran (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6) = (3) - (5)* | *(7)* |
| | Pembatalan PT Adi Tehnik Equipindo | | | | | |
| 1 | Angsuran 1 s.d. 16 | 400.000.000,00 | 5 Okt 2015 - 28 Des 2016 | 400.000.000 | 0 | Lunas |
| 2 | Angsuran 17 s.d. 28 | 5.010.000.000,00 | 28 Jan - 28 Des 2017 | 165.000.000 | 4.845.000.000 | |
| 3 | Angsuran 29 s.d. 40 | 6.600.000.000,00 | 28 Jan - 28 Des 2018 | 0 | 6.600.000.000 | |
| 4 | Angsuran 41 s.d. 42 | 753.580.000,00 | 28 Jan - 28 Maret 2019 | 0 | 753.580.000 | |
| | **Jumlah** | **12.763.580.000,00** | | **565.000.000** | **12.198.580.000** | |
| | Pembatalan PT Putera Adi Karyajaya | | | | | |
| 1 | Angsuran 1 s.d. 16 | 400.000.000,00 | 5 Okt 2015 - 28 Des 2016 | 400.000.000 | 0 | Lunas |
| 2 | Angsuran 17 s.d. 28 | 5.010.000.000,00 | 28 Jan - 28 Des 2017 | 165.000.000 | 4.845.000.000 | |
| 3 | Angsuran 29 s.d. 40 | 6.600.000.000,00 | 28 Jan - 28 Des 2018 | 0 | 6.600.000.000 | |
| 4 | Angsuran 41 | 178.880.000,00 | 28 Jan - 28 Mar 2019 | 0 | 178.880.000 | |
| | **Jumlah** | **12.188.880.000,00** | | **565.000.000** | **11.623.880.000** | |

**Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta**

Penyisihan atas Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta sebesar Rp23.822.460.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.57

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK

Pengadaan Transjakarta Tahun 2024

| No | Nama Perusahaan | Lancar (<1 tahun/5%) (Rp) | Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%) (Rp) | Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%) (Rp) | Macet (diatas 5 tahun/100%) (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PT Adi Tehnik Equipindo | 0 | 0 | 0 | 12.198.580.000 | 12.198.580.000 |
| 2. | PT Putera Adi Karyajaya | 0 | 0 | 0 | 11.623.880.000 | 11.623.880.000 |
| | Jumlah | **0** | **0** | **0** | **23.822.460.000** | **23.822.460.000** |

**5) Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah**

Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah merupakan jumlah yang sudah jatuh tempo pembayaran atas nilai Tagihan Penjualan Angsuran dengan nilai per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.292.376.530,00 dan Rp9.458.887.126,00. Selama Tahun 2024 nilai Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah berkurang sebesar Rp166.510.596,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) mutasi tambah sebesar Rp3.027.193.978,00 yang merupakan reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran sebesar Rp642.770.638,00, kolektabilitas piutang sebesar Rp2.159.821.535,00, dan mutasi penambahan lainnya sebesar Rp224.601.805,00; dan

b) mutasi kurang sebesar Rp3.193.704.574,00 yang merupakan pembayaran sebesar Rp481.567.370,00, reklasifikasi ke tagihan penjualan angsuran sebesar Rp493.649.821,00, kolektabilitas piutang sebesar Rp2.159.821.535,00 dan mutasi pengurangan lainnya sebesar Rp58.665.848,00.

Pencatatan pada laporan keuangan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan secara wajar dengan membentuk penyisihan.

**Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Tak Tertagih**

Penyisihan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp5.809.753.554,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.58

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/

Cicilan Penjualan Rumah Tak Tertagih Tahun 2024

| No | Nama Rusun | Jumlah Unit | Lancar (Rp) (1 tahun/0,5%) | Kurang Lancar (Rp) (1 s.d 2 tahun/10%) | Diragukan (Rp) (2 s.d 5 tahun/50%) | Macet (Rp) (> 5 tahun/100%) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tambora III | 98 | 3.894.216 | 25.735.978 | 0 | 1.041.851.223 | 1.071.481.417 |
| 2 | Bendungan Hilir II | 614 | 0 | 0 | 39.368.098 | 713.163.819 | 752.531.917 |
| 3 | Jatibunder | 40 | 0 | 0 | 0 | 69.660.003 | 69.660.003 |
| 4 | Tanah Tinggi | 428 | 0 | 0 | 7.883.604 | 18.670.470 | 26.554.074 |
| 5 | Petamburan | 600 | 11.411.893 | 424.151.938 | 855.818.936 | 741.759.940 | 2.033.142.707 |
| 6 | Karet Tengsin II | 308 | 345.572.988 | 845.215.261 | 3.012.840.192 | 589.488.650 | 4.793.117.091 |

| No | Nama Rusun | Jumlah Unit | Lancar (Rp) (1 tahun/0,5%) | Kurang Lancar (Rp) (1 s.d 2 tahun/10%) | Diragukan (Rp) (2 s.d 5 tahun/50%) | Macet (Rp) (> 5 tahun/100%) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tebet Barat I | 320 | 0 | 0 | 0 | 431.783.256 | 431.783.256 |
| 8 | Tebet Barat II | 120 | 0 | 0 | 0 | 114.106.065 | 114.106.065 |
| **Total** | | **2.528** | **360.879.097** | **1.295.103.177** | **3.915.910.830** | **3.720.483.426** | **9.292.376.530** |
| **Penyisihan** | | | **1.804.395** | **129.510.318** | **1.957.955.415** | **3.720.483.426** | **5.809.753.554** |

**6) Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi**

Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi merupakan piutang atas kelebihan pencairan tagihan subsidi prasarana dan sarana pada PT MRT dan PT Transjakarta di Tahun Anggaran 2024. Saldo Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp38.540.189.459,00 dan Rp0,00. Kelebihan pencairan tagihan subsidi prasarana dan sarana Tahun 2024 pada PT MRT sebesar Rp36.893.350.383,00 dan pada PT Transjakarta sebesar Rp1.646.839.076,00. Hal tersebut dikarenakan pembayaran atas bulan Desember 2024 masih menggunakan nilai proforma.

### 5.3.1.1.3 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp655.570.616.904,00 dan Rp501.750.677.798,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Beban Barang Dibayar di Muka | 314.989.120.601 | 198.718.344.133 |
| 2 | Beban Jasa Dibayar di Muka | 286.739.131.617 | 290.653.783.872 |
| 3 | Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka | 53.842.364.686 | 12.378.549.793 |
| | **Jumlah** | **655.570.616.904** | **501.750.677.798** |

**a. Beban Barang Dibayar di Muka**

Beban Barang Dibayar di Muka sebesar Rp314.989.120.601,00 terdiri dari pembayaran di muka atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Sekda Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pembayaran Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2025 dan pembayaran deposit BBM.

Pembayaran di muka atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran sesuai Surat Edaran Sekda Nomor 33 Tahun 2024 sebesar Rp224.474.608.004,00 terdapat pada:

1) Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp73.865.551.506,00;
2) Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp62.407.506.456,00;

3) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp53.343.840.778,00;
4) Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp15.265.994.388,00;
5) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.761.198.990,00;
6) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp3.999.201.699,00;
7) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.980.953.392,00;
8) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.361.584.046,00; dan
9) Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah sebesar Rp1.488.776.749,00.

Beban dibayar di muka atas deposit BBM sebesar Rp90.514.512.597,00 di antaranya terdapat pada:

1) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat sebesar Rp9.070.581.432,00;
2) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.931.257.760,00; dan
3) Unit Pengelola Angkutan Sekolah sebesar Rp4.203.139.395,00.

**b. Beban Jasa Dibayar di Muka**

Beban Jasa Dibayar di Muka sebesar Rp286.739.131.617,00 terdiri dari pembayaran di muka atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Sekda Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pembayaran Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2025 dan pembayaran jasa lainnya.

Pembayaran di muka atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran sesuai Surat Edaran Sekda Nomor 33 Tahun 2024 sebesar Rp36.287.420,00 terdapat pada:

1) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp30.939.273,00; dan
2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.348.147,00.

Beban Jasa Dibayar di Muka lainnya sebesar Rp286.702.844.197,00 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp197.602.450.000,00. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku tuan rumah pelaksanaan Kegiatan Balap Mobil Formula E musim ke enam tahun 2020 kepada *Formula E Operation* (FEO) telah dibayarkan *commitment fee* dengan total sebesar £31.000.000,00 yang terdiri atas kewajiban untuk tahap 1 dan tahap 2 Tahun 2019 sebesar £20.000.000,00 serta kewajiban tahap 1 Tahun 2020 sebesar £11.000.000,00 sesuai kontrak jangka panjang dalam *City Host Agreement*.

   Namun karena adanya pandemi Covid-19 dan penundaan pelaksanaan Formula E, PT Jakpro melakukan negosiasi dengan pihak FEO yang menghasilkan kesepakatan Penyelenggaraan Formula E yang sebelumnya direncanakan diadakan selama 5 tahun pada tahun 2020-2024, menjadi dilaksanakan selama 3 tahun mulai 2022-2024 dengan total *commitment fee* sebesar £36.000.000,00 dan telah dibayarkan sebesar £31.000.000,00 sehingga sisa kewajiban *commitment fee* adalah sebesar £5.000.000,00 dan akan dilakukan pembayaran oleh PT Jakpro tanpa menggunakan dana APBD Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2023.

   Rincian ketentuan *commitment fee* Formula E adalah sebagai berikut:

   *Season* 2021/2022 = £7.000.000,00

   *Season* 2022/2023 = £14.000.000,00

   *Season* 2023/2024 = £15.000.000,00

   Atas terlaksananya kegiatan Formula E pada bulan Juni 2022 dan Juni 2023 maka dilakukan amortisasi terhadap Beban Jasa Dibayar di Muka sesuai dengan ketentuan biaya yang sudah ditetapkan. Total *commitment fee* yang telah dibayarkan adalah sebesar £31.000.000,00, dan pelaksanaan telah direalisasikan sebanyak dua kali pada bulan Juni 2022 dan Juni 2023 dengan jumlah £21.000.000,00 sehingga Beban Jasa Dibayar di Muka Dinas Pemuda dan Olahraga atas penyelenggaraan kegiatan Formula E per 31 Desember 2023 adalah sebesar £10.000.000,00 atau setara Rp197.602.450.000,00. Pada Tahun 2024 tidak dilakukan kegiatan Formula E sehingga nilai Beban Jasa Dibayar di Muka Per 31 Desember 2024 sama dengan 31 Desember 2023.

   Penjelasan lebih lanjut atas penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E terdapat pada Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan;

2) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp61.034.497.702,00 merupakan *lisensi software*; dan
3) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.248.093.682,00 merupakan asuransi alat berat dan KDO, layanan server dan *software*.

**b. Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka**

Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka sebesar Rp53.842.364.686,00 terdiri dari pembayaran di muka atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Sekda Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pembayaran Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2025 dan pembayaran pemeliharaan lainnya.

Pembayaran di muka atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran sesuai Surat Edaran Sekda Nomor 33 Tahun 2024 sebesar Rp67.537.321,00 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka lainnya sebesar Rp53.774.827.365,00 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp16.392.187.404,00 merupakan pemeliharaan *software*;
2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp15.561.729.655,00 merupakan perpanjangan lisensi dan *software*; dan
3) Unit Pengelola *Jakarta Smart City* sebesar Rp15.466.925.000,00 merupakan perpanjangan lisensi.

#### 5.3.1.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.347.138.009.623,00 dan Rp1.263.775.601.406,00. Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan di gudang untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat/kepada pihak di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan pada SKPD/UKPD berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2024 dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO). Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.59

Persediaan

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Barang Pakai Habis | 1.339.998.488.548 | 1.256.899.948.763 |
| 2 | Barang Tak Habis Pakai | 7.139.175.643 | 6.875.652.643 |
| 3 | Barang Bekas Dipakai | 345.432 | 0 |
| **Jumlah** | | **1.347.138.009.623** | **1.263.775.601.406** |

Penjelasan lebih lanjut nilai Persediaan Per 31 Desember 2024 antara lain sebagai berikut:

**a. Barang Pakai Habis**

Barang Pakai Habis sebesar Rp1.339.998.488.548,00 terdiri dari barang yang akan diserahkan ke luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan barang yang digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdapat pada:

1) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp65.888.068.147,00, di antaranya merupakan persediaan perbekalan farmasi berupa vaksin dan obat-obatan dan persediaan untuk penanganan Covid-19;
2) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp51.777.521.914,00 merupakan peralatan (armatur) penerangan jalan umum dan pekerjaan pemeliharaan jalan yang akan diserahkan kepada instansi vertikal;
3) Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp46.519.530.687,00 di antaranya cairan *reagen* (bahan kimia);
4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp46.328.121.497,00 berupa blangko KTP elektronik;
5) RSUD Pasar Minggu sebesar Rp29.459.046.448,00 berupa obat-obatan dan alat kesehatan; dan
6) Barang yang digunakan untuk operasional di 745 PD/UPD sebesar Rp1.100.026.199.855,00.

**b. Barang Tak Habis Pakai**

Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp7.139.175.643,00, terdapat pada:

1) Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp2.701.890.196,00, berupa Pipa *PVC*;
2) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan sebesar Rp758.404.694,00, berupa Pipa *PVC*;
3) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat sebesar Rp626.820.470,00, berupa Pipa *PVC*; dan
4) Barang Tak Habis Pakai lainnya di 44 PD/UPD sebesar Rp3.052.060.283,00.

**c. Barang Bekas Dipakai**

Barang Bekas Dipakai sebesar Rp345.432,00 terdapat pada PSBI Bangun Daya 2 berupa kran air.

Pada Periode Januari s.d Desember 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima hibah barang-barang Persediaan sebesar Rp403.481.210.367,00, di antaranya terdapat pada:

1) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp288.906.548.512,00 yang di antaranya merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa vaksin dan obat-obatan;
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp53.348.536.262,00 berupa blangko KTP elektronik.
3) Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp36.892.643.437,00 yang di antaranya merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa *reagen viral load HIV*; dan
4) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp11.711.518.092,00 yang di antaranya berupa alat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi.

Dari Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.363.090.847.492,00 termasuk persediaan berupa barang-barang *slow moving* sebesar Rp20.051.217.595,00, yang terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16.255.606.629,00, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.795.610.966,00.

Nilai Persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 tidak termasuk persediaan yang sudah usang atau rusak sebesar Rp27.934.503.396,00 sebagaimana dirinci pada Lampiran 5, di antaranya berupa bukti lulus uji kendaraan bermotor, obat-obatan kadaluwarsa, alat kontrasepsi dan cetakan yang informasinya sudah tidak relevan. Persediaan yang telah usang tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD sebagai berikut:

1) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng sebesar Rp6.614.190.385,00;
2) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke sebesar Rp4.999.805.656,00;
3) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp3.180.950.367,00;
4) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing sebesar Rp2.916.926.889,00; dan

5) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp2.337.934.095,25.

Dari jumlah persediaan yang usang atau rusak tersebut telah diusulkan pemusnahannya sebesar Rp24.085.489.089,00.

#### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp93.176.692.451.917,00 dan Rp84.559.599.245.749,00.

##### 5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang bersumber dari APBD kelompok pembiayaan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana bergulir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari waktu ke waktu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) sejak tahun 2001 sampai dengan 2007, dan dialihkan ke UPT Dana Bergulir di bawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Dana Bina Ekonomi PPMK bertujuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha perekonomian masyarakat. Namun, dalam pengelolaannya terdapat permasalahan antara lain berupa sulitnya pengembalian dana dari masyarakat penerima manfaat (menunggak), penyalahgunaan dana, dan dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh pengelola.

   Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPPAPP dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terus berupaya melakukan penyelesaian permasalahan keuangan dana bergulir pada Dewan Kelurahan, Koperasi Jasa Keuangan PEMK, dan Koperasi Masyarakat penerima dana bergulir; dan

b) Program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dikelola oleh Unit Pengelola Dana Perumahan di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Adapun program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dana bergulir tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui Bank pelaksana.

Bentuk kerja sama dengan Bank Pelaksana adalah *Executing Agency* berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Perumahan dan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Unit Pengelola Dana Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT Bank DKI Nomor 761/-072 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Oleh PT Bank DKI, di mana tanggung jawab untuk menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir ada pada Bank Pelaksana. Atas hal tersebut maka Bank Pelaksana akan memperoleh bagian dari bagi hasil atas penyaluran Dana Bergulir sebesar 3,1% dari nilai total persentase bunga sebesar 5%.

Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing tercatat sebesar Rp550.000.000.000,00. Adapun nilai pokok Dana Bergulir dan akumulasi penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

| Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|
| Dana Bergulir | 1.099.708.355.664 | 1.099.780.201.964 |
| Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih | (549.708.355.664) | (549.780.201.964) |
| Nilai Investasi Non Permanen | 550.000.000.000 | 550.000.000.000 |

Nilai Pokok Dana Bergulir dan Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp71.846.300,00,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya penyetoran pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah.

Rincian pokok Dana Bergulir sebesar Rp1.099.708.355.664,00, disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.60

Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)

Per 31 Desember 2024

| NO. | URAIAN | Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007) (Rp) | UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2016) (Rp) | Unit Pengelola Dana Perumahan (Rp) | Total (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3+4+5 |
| I | Dana Awal | 560.895.943.615 | 324.977.125.000 | 550.000.000.000 | 1.435.873.068.615 |
| II | Dana yang dialihkan dari PPMK ke UPDB | (124.544.360.537) | 124.544.360.537 | 0 | 0 |
| III | Pendapatan Jasa Pemanfaatan | 0 | 11.314.522.622 | 0 | 11.314.522.622 |
| IV | Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah s.d Tahun 2023 | (7.014.892.937) | (340.392.496.336) | 0 | (347.407.389.273) |
| V | Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah Tahun 2023 | (16.846.300) | (55.000.000) | | (71.846.300) |
| **VI** | **Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III+IV)** | **429.319.843.841** | **120.388.511.823** | **550.000.000.000** | **1.099.708.355.664** |
| | **Posisi** | | | | |
| VII | Saldo Kas dan Bank | 0 | 0 | 295.450.001.937 | 295.450.001.937 |
| VIII | Dana di Pemanfaat | 421.662.006.310 | 120.388.511.823 | 254.549.998.063 | 796.600.516.196 |
| **IX** | **Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (VI+VII)** | **421.662.006.310** | **120.388.511.823** | **550.000.000.000** | **1.092.050.518.133** |
| **X** | **Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (V-VIII)** | **7.657.837.531** | **0** | **0** | **7.657.837.531** |

**a. Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK**

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh DPPAPP secara keseluruhan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp560.895.943.615,00. Dana tersebut bersumber dari APBD untuk dimanfaatkan secara bergulir oleh masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Selain itu, terdapat dana pengalihan kepada UPT Dana Bergulir sebesar Rp124.544.360.537,00 dan Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp7.031.739.237,00 sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp429.319.843.841,00, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.60.

**Mutasi Tahun 2024**

Nilai investasi yang tercatat pada Bina Ekonomi PPMK (DPPAPP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp429.319.843.841,00. Dari nilai investasi tersebut, sebesar Rp421.662.006.310,00 berada di pemanfaat, dan sisanya sebesar Rp7.657.837.531,00 merupakan selisih dana belum terjelaskan karena kelemahan pengadministrasian dana PPMK.

Mutasi Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK selama Tahun 2024 berkurang sebesar Rp16.846.300,00 dikarenakan terdapat pengembalian pokok pinjaman masyarakat dari rekening Dekel/ Satgas PPMK yang dipindahbukukan ke Kas Daerah, sehingga nilai Investasi Non Permanen

pada ex Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp429.319.843.841,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.61

Rekapitulasi Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK

Per 31 Desember 2024

| No | Uraian | Saldo Awal 31 Desember 2023 (Rp) | Mutasi Tahun 2024 | | Saldo Akhir 31 Desember 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengembalian dari Rek Dekel/ Satgas PPMK | Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah | |
| 1. | Saldo Kas dan Bank | 0 | 16.846.300 | (16.846.300) | 0 |
| 2. | Dana di Pemanfaat | 421.678.852.610 | (16.846.300) | 0 | 421.662.006.310 |
| 3. | Selisih Dana belum terjelaskan | 7.657.837.531 | 0 | 0 | 7.657.837.531 |
| | **Jumlah** | **429.336.690.141** | **0** | **(16.846.300)** | **429.319.843.841** |

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Keuangan Dana Bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007 maka Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk sampai dengan Tahun 2024 telah berupaya melakukan penyelesaian permasalahan keuangan dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 sebesar Rp429.319.843.841,00 yang terdapat di 295.400 pemanfaat/peminjam dengan melakukan proses identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 berdasarkan data laporan hasil audit KAP Tahun 2009 di seluruh kelurahan di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Satgas Kelurahan.

Dalam proses pelaksanaan identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan tersebut, para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi terus melakukan koordinasi dan memfasilitasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk terkait sosialisasi kebijakan, dan tata cara penagihan dan pengembalian serta penyelesaian secara administrasi permasalahan yang ada di pemanfaat.

Hasil identifikasi dan verifikasi data faktual terhadap 295.400 pemanfaat/peminjam dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 adalah sebagai berikut.

| No | Wilayah | Jumlah Pemanfaat | Mampu Mengembalikan | Tidak Mampu Mengembalikan | Tidak Diketahui | Telah Melunasi | Tidak Meminjam | Jumlah Teridentifikasi dan Verifikasi | Jumlah Tidak Teridentifikasi dan Verifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta Pusat | 56.463 | 476 | 22.959 | 22.926 | 5.911 | 4.073 | 56.345 | 118 |
| 2 | Jakarta Utara | 40.590 | 1.065 | 6.340 | 24.079 | 5.879 | 3.227 | 40.590 | 0 |
| 3 | Jakarta Barat | 60.474 | 550 | 17.338 | 30.983 | 6.798 | 3.864 | 59.533 | 941 |
| 4 | Jakarta Selatan | 62.113 | 2.275 | 18.867 | 25.933 | 9.934 | 5.104 | 62.113 | 0 |
| 5 | Jakarta Timur | 69.666 | 2.191 | 15.582 | 31.843 | 13.935 | 6.115 | 69.666 | 0 |
| 6 | Kepulauan Seribu | 6.094 | 0 | 5.337 | 615 | 142 | 0 | 6.094 | 0 |

| No | Wilayah | Jumlah Pemanfaat | Mampu Mengembalikan | Tidak Mampu Mengembalikan | Tidak Diketahui | Telah Melunasi | Tidak Meminjam | Jumlah Teridentifikasi dan Verifikasi | Jumlah Tidak Teridentifikasi dan Verifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jumlah** | **295.400** | **6.557** | **86.423** | **136.379** | **42.599** | **22.383** | **294.341** | **1.059** |

Atas hasil identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan terhadap 0295.400 pemanfaat/peminjam dengan jumlah dana sebesar Rp429.319.843.841,00 tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun proses identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan hingga saat ini masih terus dilakukan untuk percepatan penyelesaian permasalahan dana Bina Ekonomi PPMK.

**b. Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir**

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh ex UPT Dana Bergulir secara keseluruhan sejak tahun 2008 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp460.836.008.159,00, terdiri dari dana awal sebesar Rp324.977.125.000,00, ditambah dana pengalihan dari Bina Ekonomi PPMK sebesar Rp124.544.360.537,00, dan 30% alokasi dari pendapatan jasa pemanfaatan yang digunakan untuk pengguliran kembali sebesar Rp11.314.522.622,00. Selain itu, terdapat Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp340.447.496.336,00 yang mengurangi pencatatan nilai investasi, sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp120.388.511.823,00, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.60.

**Mutasi Tahun 2024**

Nilai investasi yang tercatat pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp120.388.511.823,00. Dari nilai investasi tersebut tercatat sebesar Rp120.388.511.823,00 berada di pemanfaat.

Mutasi Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir selama Tahun 2024 berkurang sebesar Rp55.000.000,00 dikarenakan terdapat pengembalian pokok pinjaman dari Koperasi Jasa Keuangan (KJK) ke Kas Daerah, sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp120.388.511.823,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.62

Rekapitulasi Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir

Per 31 Desember 2024

| No | Uraian | Saldo Awal (Rp) | Mutasi Tahun 2024 (Rp) | | Saldo Akhir (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 Des 2023 (Audited) | Pengembalian dari KJK | Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah | 31 Des 2024 |
| 1. | Saldo Kas dan Bank | 0 | 55.000.000 | (55.000.000) | **0** |
| 2. | Dana di Pemanfaat (a+b): | 120.443.511.823 | (55.000.000) | 0 | **120.388.511.823** |
| | a. teridentifikasi | 121.193.494.258 | (53.000.000) | 0 | **121.140.494.258** |
| | b. tidak teridentifikasi | (749.982.435) | (2.000.000) | 0 | **(751.982.435)** |
| | **JUMLAH (1+2)** | **120.443.511.823** | **0** | **(55.000.000)** | **120.388.511.823** |

**c. Investasi Non Permanen di Unit Pengelola Dana Perumahan**

Nilai investasi yang tercatat pada Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp550.000.000.000,00.

UDP merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pengelolaan dana menggunakan dua rekening yang ditempatkan di Bank DKI, yaitu nomor rekening 110-02-00000-1 untuk transaksi dana investasi dan 110-02-11111-3 untuk transaksi dana operasional.

**Mutasi Tahun 2024**

Nilai investasi yang tercatat pada Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp550.000.000.000,00. Dari nilai investasi tersebut sebesar Rp295.450.001.937,00 berada pada rekening dana bergulir, dan sebesar Rp254.549.998.063,00 berada di pemanfaat. Atas saldo awal investasi tersebut terdapat koreksi sebesar Rp1,00 yang disebabkan oleh pembulatan sehingga saldo awal investasi dana bergulir pada UPDP menjadi sebesar Rp295.450.001.936,00 berada pada rekening dana bergulir, dan sebesar Rp254.549.998.064,00 berada di pemanfaat.

Sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat penyaluran ke masyarakat sebesar Rp19.272.088.450,00 dan pengembalian dari masyarakat sebesar Rp15.422.976.651,00, sehingga nilai investasi dana bergulir pada UPDP per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp291.600.890.137,00 yang berada pada rekening dana bergulir dan sebesar Rp258.399.109.863,00 berada di pemanfaat.

Mutasi Investasi Non Permanen di Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.63

Rekapitulasi Investasi Non Permanen di Unit Pengelola Dana Perumahan

Per 31 Desember 2024

| No | Uraian | Saldo Awal 31 Desember 2023 (Rp) | Koreksi | Saldo Awal 1 Januari 2024 (Rp) | Mutasi Tahun 2024 (Rp) | | Saldo Akhir 31 Desember 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Penyaluran ke Masyarakat | Pengembalian dari Masyarakat | |
| 1 | Saldo Kas dan Bank | 295.450.001.937 | (1) | 295.450.001.936 | (19.272.088.450) | 15.422.976.651 | 291.600.890.137 |
| 2 | Dana di Pemanfaat | 254.549.998.063 | 1 | 254.549.998.064 | 19.272.088.450 | (15.422.976.651) | 258.399.109.863 |
| | **Jumlah** | **550.000.000.000** | **0** | **550.000.000.000** | **0** | **0** | **550.000.000.000** |

**Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih**

Sejak tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan kriteria kualitas piutang dana bergulir dengan menggunakan metode *executing agency* di mana kualitas piutang ditetapkan berdasarkan kualitas lancar dan kualitas macet.

Nilai Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp550.000.000.000,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.099.708.355.664,00 dikurangi dengan penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih sebesar Rp549.708.355.664,00.

Tabel 5.64

Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Per 31 Desember 2024

| No | Uraian | Macet (Rp) | Akumulasi Penyisihan per 31 Des 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | 100% | |
| I | Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir | 120.388.511.823 | 120.388.511.823 |
| **II** | **Penyisihan** | **120.388.511.823** | **120.388.511.823** |
| III | Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK | 429.319.843.841 | 429.319.843.841 |
| **IV** | **Penyisihan** | **429.319.843.841** | **429.319.843.841** |

### 5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Pemerintah Daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika Pemerintah Daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari peraturan daerah, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp92.626.692.451.917,00 dan Rp84.009.599.245.749,00, dengan rincian dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.65

Investasi Permanen

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Nama | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas | 92.332.188.496.917 | 83.715.095.290.749 |
| 2 | Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Biaya | 294.503.955.000 | 294.503.955.000 |
| | **Jumlah Investasi Permanen** | **92.626.692.451.917** | **84.009.599.245.749** |

Rincian perhitungan Investasi Permanen disajikan pada lampiran 6 Ikhtisar Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah.

**a. Investasi dengan Metode Ekuitas**

Penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas, didasarkan pada persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah yang lebih dari 51%, misalnya pada Perumda Air Minum Jaya (100%), PT Food Station Tjipinang (99,98%), dan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (72%). Penilaian penyertaan modal menggunakan metode ekuitas juga dilakukan pada kepemilikan 20% sampai 50% jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pengaruh/pengendalian yang signifikan pada perusahaan tersebut dengan variabel sebagai berikut:

1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Penilaian investasi dengan metode ekuitas pada perusahaan daerah dengan kepemilikan 20% sampai 50% adalah sebagai berikut:

1) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (50,00%)
   Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Direktur Keuangan;
2) PT Pembangunan Jaya (38,80%)
   Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 1 (satu) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris Utama;
3) PT Delta Jakarta Tbk (26,25%)
   Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris Independen (Komisaris Utama) dan 1 (satu) Komisaris; dan

4) PT Ratax Armada (28,00%)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris dan 1 (satu) Direktur, yang saat ini telah mengundurkan diri dan perusahaan tidak beroperasi.

Pada penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi yang diumumkan oleh perusahaan setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham, yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurangi nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai investasi permanen dengan metode ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp92.332.188.496.917,00 dan Rp83.715.095.290.749,00. Dengan rincian dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.66

Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Nama | % Kepemilikan | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perumda Air Minum Jaya | 100,00% | 4.067.208.731.415 | 3.449.544.925.780 |
| 2 | Perumda Dharma Jaya | 100,00% | 439.088.897.611 | 466.125.029.737 |
| 3 | Perumda Pembangunan Sarana Jaya | 100,00% | 5.572.106.346.809 | 5.554.928.504.064 |
| 4 | Perumda Pasar Jaya | 100,00% | 1.532.218.565.464 | 1.530.748.892.361 |
| 5 | Perumda PAL Jaya | 100,00% | 1.262.788.357.311 | 1.246.431.260.941 |
| | **Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah** | | **12.873.410.898.610** | **12.247.778.612.883** |
| 6 | PT Jakarta Propertindo | 99,998% | 24.868.736.897.996 | 23.991.197.246.177 |
| 7 | PT Mass Rapid Transit Jakarta | 99,998% | 27.282.827.509.869 | 23.887.901.546.678 |
| 8 | PT Bank DKI Jakarta | 99,98% | 11.350.312.689.538 | 10.982.535.682.062 |
| 9 | PT Food Station Tjipinang | 99,98% | 627.365.823.104 | 617.635.223.340 |
| 10 | PT Transportasi Jakarta | 99,70% | 4.842.878.703.074 | 4.701.221.698.896 |
| 11 | PT Jakarta Tourisindo | 99,58% | 658.158.455.150 | 567.235.405.681 |
| 12 | PT Penjamin Kredit Daerah | 99,17% | 632.776.241.327 | 413.139.843.427 |
| 13 | PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk | 72,00% | 1.234.296.000.471 | 1.185.955.200.453 |
| | **Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Perseroan Daerah** | | **71.497.352.320.529** | **66.346.821.846.714** |
| 14 | PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung | 53,05% | 3.079.860.074.757 | 187.918.474.113 |
| 15 | PT Pembangunan Jaya | 38,80% | 4.659.453.593.788 | 4.688.253.593.788 |
| 16 | PT Ratax Armada | 28,00% | 0 | 0 |
| 17 | PT Delta Djakarta, Tbk | 26,25% | 222.111.609.233 | 244.322.763.251 |
| | **Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Patungan** | | **7.961.425.277.778** | **5.120.494.831.152** |
| | **Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas** | | **92.332.188.496.917** | **83.715.095.290.749** |

Mutasi pencatatan Investasi yang menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

1) Perumda Air Minum Jaya

   Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023 disajikan sebesar Rp3.449.544.925.780,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp617.663.805.635,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

   a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp735.414.791.576,00 yang merupakan pengumuman laba Perumda Air Minum Jaya Tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024, dikalikan dengan 100% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
   b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp62.367.973.726,00 yang merupakan setoran dividen Perumda Air Minum Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 20 Tahun 2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perumda Air Minum Jaya Tahun Buku 2023 dan telah diterima Kas Daerah; dan
   c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp55.383.012.215,00 yang merupakan keuntungan aktuarial atas pengukuran kembali program imbalan kerja pada Laporan Keuangan Perumda Air Minum Jaya *Audited* 2024.

   Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Jaya per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp4.067.208.731.415,00.

2) Perumda Dharma Jaya

   Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Dharma Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp466.125.029.737,00. Nilai investasi Tahun 2024 berkurang sebesar Rp27.036.132.126,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

   a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional

berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp13.725.800.439,00 terdiri dari:

1. pengumuman laba Perumda Dharma Jaya Tahun 2024 dikalikan dengan 100% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.612.943.003,00; dan
2. penambah ekuitas Perumda Dharma Jaya berupa cadangan umum dan pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain sebesar Rp6.112.857.436,00.

b) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp40.761.932.565,00 terdiri dari:

1. penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.683.051.248,00; dan
2. pengurang ekuitas Perumda Dharma Jaya berupa pengukuran kembali atas liabilitas program imbalan pasti sebesar Rp1.078.881.317,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Dharma Jaya per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp439.088.897.611,00.

3) Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp5.554.928.504.064,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp17.177.842.745,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp29.019.129.297,00 terdiri dari:

1. pengumuman laba Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2024, dikalikan dengan 100% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp27.679.181.674,00; dan
2. penambah ekuitas Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2024 berupa penghasilan komprehensif lain sebesar Rp1.339.947.623,00.

b) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp11.841.286.552,00 berupa penyesuaian saldo laba.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp5.572.106.346.809,00.

4) Perumda Pasar Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp1.530.748.892.361,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp1.469.673.103,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp23.434.191.960,00 terdiri dari:
   1. pengumuman laba Perumda Pasar Jaya Tahun 2024, dikalikan dengan 100% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp19.445.669.969,00; dan
   2. penambah ekuitas Perumda Pasar Jaya Tahun 2024 berupa penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3.988.521.991,00.

b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp21.964.518.857,00 yang merupakan setoran dividen Perumda Pasar Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 18 Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perumda Pasar Jaya Tahun Buku 2023 dan telah diterima Kas Daerah.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Jaya per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp1.532.218.565.464,00.

5) Perumda PAL Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda PAL Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp1.246.431.260.941,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp16.357.096.370,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional

berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp34.726.471.812,00 yang merupakan pengumuman laba komprehensif Perumda PAL Jaya Tahun 2024, dikalikan dengan 100% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp18.369.375.441,00 yang merupakan penyetoran dividen Perumda PAL Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 16 Tahun 2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perumda PAL Jaya Tahun Buku 2023, dan telah diterima Kas Daerah; dan

c) pembulatan sebesar Rp1,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda PAL Jaya per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp1.262.788.357.311,00.

6) PT Jakarta Propertindo

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp23.991.197.246.177,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp877.539.651.819,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp2.183.400.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo, sesuai dengan Perjanjian Tambahan )adendum) II atas Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2023 Nomor 606/HK.01.11 tanggal 11 November 2024;

b) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp18.737.400.022,00 terdiri dari:

1. penambah ekuitas PT Jakarta Propertindo Tahun 2024 berupa penghasilan komprehensif lain sebesar Rp18.674.657.941,00; dan

2. penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan PT Jakarta Propertindo Tahun 2024 sebesar Rp62.742.081,00

c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp1.324.597.748.203,00 terdiri dari:

1. penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp804.792.901.781,00;
2. pengumuman rugi PT Jakarta Propertindo Tahun 2024, dikalikan dengan 99,998% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp517.180.237.172,00; dan
3. pengurang ekuitas PT Jakarta Propertindo berupa penghasilan komprehensif lain sebesar Rp2.624.609.250,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp24.868.736.897.996,00.

7) PT Mass Rapid Transit Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp23.887.901.546.678,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp3.394.925.963.191,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD Rp3.377.545.259.782,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta, yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta *Phase* II (Bundaran HI – Kota);

b) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp17.451.091.779,00 terdiri dari:

1. pengumuman laba PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun 2024, dikalikan dengan 99,997% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rp8.895.815.291,00;

2. penambah ekuitas PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun 2024 berupa penghasilan komprehensif lain sebesar Rp8.509.823.305,00; dan
3. penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun 2024 sebesar Rp45.453.183,00.

c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp70.388.370,00 berupa penyesuaian pengurang ekuitas PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun 2024.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp27.282.827.509.869,00.

8) PT Bank DKI Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp10.982.535.682.062,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp367.777.007.476,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp2.190.760.167,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Bank DKI Jakarta, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Bank DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor 646/HK.01.11 tanggal 4 Desember 2024;

b) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp791.458.399.575,00 terdiri dari:
1. pengumuman laba PT Bank DKI Jakarta Tahun 2024, dikalikan dengan 99,98% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp778.920.228.937,00; dan
2. penambah ekuitas PT Bank DKI Jakarta berupa pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti setelah pajak tangguhan sebesar Rp12.538.170.638,00.

c) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD

sebesar Rp326.362.883.842,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Bank DKI Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 11 tanggal 22 Maret 2024 dan telah diterima Kas Daerah; dan

d) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp99.509.268.424,00 terdiri dari:
   1. pengurang ekuitas PT Bank DKI berupa penghasilan komprehensif lainnya dan dana kesejahteraan sebesar Rp99.508.544.911,00; dan
   2. penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan sebesar Rp723.513,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp11.350.312.689.538,00.

9) PT Food Station Tjipinang

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp617.635.223.340,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp9.730.599.764,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp11.587.556.512,00 terdiri dari:
   1. pengumuman laba PT Food Station Tjipinang Tahun 2024, dikalikan dengan 99,98% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp11.587.276.026,00; dan
   2. penambah ekuitas PT Food Station Tjipinang sebesar Rp280.486,00.

b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp1.856.956.748,00, yang merupakan penyetoran dividen PT Food Station Tjipinang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 3 tanggal 30 April 2024 dan telah diterima Kas Daerah.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp627.365.823.104,00.

10) PT Transportasi Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp4.701.221.698.896,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp141.657.004.178,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp199.965.480.155,00 berupa pengumuman laba PT Transportasi Jakarta Tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024, dikalikan dengan 99,70% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp55.452.326.932,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Transportasi Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 9 tanggal 21 Juni 2024 dan telah diterima Kas Daerah; dan
c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp2.856.149.045,00 terdiri dari:
    1. pengurang ekuitas PT Transportasi Jakarta berupa penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp2.855.453.298,00; dan
    2. pengurang ekuitas PT Transportasi Jakarta sebesar Rp695.747,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp4.842.878.703.074,00.

11) PT Jakarta Tourisindo

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023 yaitu sebesar Rp567.235.405.681,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp90.923.049.469,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp140.074.752.369,00 terdiri dari:
   1. penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.861.920.574,00;
   2. penambah ekuitas PT Jakarta Tourisindo berupa selisih penilaian kembali properti investasi dan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp123.163.936.926,00; dan
   3. penambah ekuitas PT Jakarta Tourisindo berupa penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan sebesar Rp48.894.869,00.

b) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp49.151.702.900,00 berupa pengumuman rugi PT Jakarta Tourisindo Tahun 2024, dikalikan dengan 99,58% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp658.158.455.150,00.

12) PT Penjamin Kredit Daerah

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp413.139.843.427,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp219.636.397.900,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp200.000.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Penjamin Kredit Daerah, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Penjamin Kredit Daerah Tahun Anggaran 2024 nomor 50/HK.01.11 tanggal 19 Januari 2024;
b) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp27.694.623.285,00, yang terdiri dari:

1. pengumuman laba PT Penjamin Kredit Daerah Tahun 2024, dikalikan dengan 99,17% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp27.174.234.990,00;
2. penghasilan komprehensif sebagai penambah ekuitas PT Penjamin Kredit Daerah sebesar Rp476.282.432,00; dan
3. penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan sebesar Rp44.105.863,00.

c) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp7.686.754.330,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Penjamin Kredit Daerah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 59 tanggal 22 Maret 2024 dan telah diterima Kas Daerah; dan

d) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp371.471.055,00 yang merupakan penghasilan komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp632.776.241.327,00.

13) PT Pembangunan Jaya Ancol

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp1.185.955.200.453,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp48.340.800.018,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp128.009.520.049,00 yang merupakan pengumuman laba PT Pembangunan Jaya Ancol Tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024, dikalikan dengan 72,00% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp128.009.520.049,00;

b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD Rp36.863.999.968,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya Ancol kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 23 tanggal 23 Februari 2024 dan telah diterima Kas Daerah; dan

c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp42.804.720.063,00 yang merupakan kerugian komprehensif lain.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp1.234.296.000.471,00.

14) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp187.918.474.113,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp2.891.941.600.644,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp225.000.000.000,00 tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun Anggaran 2024 Nomor 700/HK.01.11 tanggal 23 Desember 2024;

b) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp2.770.834.560.453,00, yang terdiri dari:

1. pengumuman laba PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun 2024, dikalikan dengan 53,06% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.769.277.455.230,00; dan
2. penghasilan komprehensif lainnya sebagai penambah ekuitas PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun 2024 sebesar Rp1.557.105.223,00.

c) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp9.127.128.545,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam

akta notaris nomor 53 tanggal 28 Juni 2024 dan telah diterima Kas Daerah.

d) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp94.765.831.264,00 terdiri dari:
   1. pengurang ekuitas PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) berupa penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp82.693.832,00; dan
   2. pengurang ekuitas PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) berupa penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan berdasarkan laporan final penilaian 100% ekuitas milik PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) oleh KJPP sebesar Rp94.683.137.432,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp3.079.860.074.757,00

15) PT Pembangunan Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp4.688.253.593.788,00. Nilai investasi Tahun 2024 berkurang sebesar Rp28.800.000.000,00 yang merupakan mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD berupa penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tidak terdapat mutasi lain karena sampai dengan disusunnya laporan keuangan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mendapatkan Laporan keuangan Audited PT Pembangunan Jaya Tahun 2024. Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp4.659.453.593.788,00.

16) PT Ratax Armada

Investasi pada PT Ratax Armada disajikan sebesar nol rupiah karena PT Ratax Armada memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PT Ratax Armada *Unaudited* tahun 2014 menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp2.054.694.000. Pada saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian rencana divestasi PT Ratax Armada hal ini dilakukan

untuk mengantisipasi kerugian yang semakin besar akibat penurunan nilai saham PT Ratax Armada.

17) PT Delta Djakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp244.322.763.251,00. Nilai investasi Tahun 2024 berkurang sebesar Rp22.211.154.018,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp37.352.048.974,00, yang terdiri dari:
   1. pengumuman laba PT Delta Djakarta Tahun 2024, dikalikan dengan 26,26% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp37.352.048.960,00; dan
   2. pembulatan sebesar Rp14,00.

b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp59.066.396.700,00 berupa penyetoran dividen PT Delta Djakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 7 tanggal 16 Mei 2024 dan telah diterima Kas Daerah; dan

c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp496.806.292,00 berupa rugi komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp222.111.609.233,00.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang dalam pengajuan perwakilan direksi kepada pemilik saham mayoritas PT Delta Djakarta. Hasil konfirmasi atas pengajuan tersebut memungkinkan terjadi perubahan penilaian investasi menjadi metode biaya pada penyusunan Laporan Keuangan tahun berikutnya.

**b. Investasi dengan Metode Biaya**

Penilaian investasi dengan menggunakan metode biaya, didasarkan pada persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah yang kurang dari 51%. Pada penilaian investasi dengan

menggunakan metode biaya investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut, berupa dividen, diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai investasi permanen dengan metode biaya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama, yaitu sebesar Rp294.503.955.000,00, dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.67

Investasi Permanen dengan Metode Biaya

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Nama | Persentase Kepemilikan | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PT Cemani Toka | 27,42% | 27.059.360.000 | 27.059.360.000 |
| 2. | PT Kawasan Berikat Nusantara | 26,85% | 209.692.695.000 | 209.692.695.000 |
| 3. | PT Jakarta International Expo | 13,125% | 39.375.000.000 | 39.375.000.000 |
| 4. | PT Grahasahari Suryajaya | 8,08% | 3.951.000.000 | 3.951.000.000 |
| 5. | PT Asuransi Bangun Askrida | 4,10% | 13.080.000.000 | 13.080.000.000 |
| 6. | PT Pakuan International | 1,11% | 1.345.900.000 | 1.345.900.000 |
| | **Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Biaya** | | **294.503.955.000** | **294.503.955.000** |

Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah disajikan pada Lampiran 7 dan 8.

#### 5.3.1.3 Properti Investasi

Sebagai bentuk penerapan PSAP 17 tentang Properti Investasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021, pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pencatatan atas aset Properti Investasi. Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa, meningkatkan nilai aset, atau keduanya. Aset Properti Investasi tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dalam produksi atau penyediaan barang/jasa, tidak untuk tujuan administratif, dan tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu pada PSAP 17, Properti Investasi diukur sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp5.746.069.265.613,00. Selama Tahun 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima realisasi pendapatan yang dihasilkan dari Properti Investasi tersebut sebesar Rp60.510.115.279,00. Rincian saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanah | 4.178.110.485.462 | 3.367.064.778.502 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 1.553.795.480.328 | 1.542.937.242.079 |
| 3 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 14.163.299.823 | 14.163.299.823 |
| | **Jumlah** | **5.746.069.265.613** | **4.924.165.320.404** |

Selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp832.206.035.209,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp10.302.090.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a. Mutasi Penambahan** | | | |
| 1) | Reklasifikasi dari Aset Tetap | Rp | 497.059.353.000 |
| 2) | Reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan | Rp | 163.800.000 |
| 3) | Reklasifikasi dari Aset Tetap - Fasos Fasum | Rp | 312.482.122.529 |
| 4) | Reklasifikasi dari Aset Idle | Rp | 22.500.759.680 |
| **Jumlah Penambahan** | | **Rp** | **832.206.035.209** |
| **b. Mutasi Pengurangan** | | | |
| 1) | Reklasifikasi menjadi Aset Tetap | Rp | 10.302.090.000 |
| **Jumlah Pengurangan** | | **Rp** | **10.302.090.000** |

Rincian penambahan dan pengurangan Properti Investasi dijelaskan sebagai berikut:

**a. Mutasi Penambahan**

**1) Reklasifikasi dari Aset Tetap**

Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp497.059.353.000,00 berupa Tanah dan Gedung dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah yang berlokasi di Jalan Harhono RM nomor 10 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebesar Rp51.767.856.000,00;
- Tanah yang terletak di Jalan Genteng Ijo, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sebesar Rp31.668.459.000,00;
- Tanah yang terletak di Jl. RS. Fatmawati No. 20 Jakarta Selatan sebesar Rp3.648.000.000,00;
- Tanah yang terletak di Bedugul sebesar Rp52.372.300.000,00;
- Tanah yang terletak di Jalan TB. Simatupang / Lebak Bulus Raya, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sebesar Rp88.568.724.000,00;
- Tanah yang terletak di Jalan Raya Bogor KM. 28 Pekayon Pasar Rebo, Jakarta Timur sebesar Rp11.350.220.000,00;
- Tanah yang terletak di Green Bay Pluit, Jalan Pluit Karang Ayu, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara sebesar Rp236.948.796.000,00;
- Lahan di Jalan Peta Selatan Kalideres, Kalideres, Jakarta Barat sebesar Rp13.957.713.000,00; dan

- Lahan di Jalan Pejaten Barat Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebesar Rp6.777.285.000,00.

**2) Reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan**

Reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan sebesar Rp163.800.000,00 berupa Tanah yang terletak di Jalan Belimbing Raya Blok B.5 Komplek Perumahan Bojong Indah, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

**3) Reklasifikasi dari Aset Tetap - Fasos Fasum**

Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum sebesar Rp312.482.122.529,00 berupa Tanah dan Gedung dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah yang terletak di Perumahan Menteng Metropolitan sebesar Rp5.167.371.000,00;
- Tanah yang terletak di Jalan Kedoya Pesing Komplek Perumahan Sunrise Garden, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat sebesar Rp10.382.344.000,00;
- Tanah yang terletak di Kelapa Gading sebesar Rp3.025.750.000,00;
- Tanah yang terletak di Perumahan Citra 3 Ext sebesar Rp60.800.000,00;
- Tanah yang terletak di Perumahan Taman Permata Buana sebesar Rp273.436.000,00;
- Tanah yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua RT 001 / RW 003, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara sebesar Rp18.299.250.000,00;
- Tanah yang terletak di Perumahan Taman Surya 5 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat sebesar Rp12.730.500.000,00;
- Tanah yang terletak di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara sebesar Rp89.064.885.000,00;
- Tanah yang terletak di Pulau Tengah, Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp154.739.548.280,00;
- Gedung yang terletak di Perumahan Citra Garden City Blok BI.12 Citra 2 ext Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat sebesar Rp5.502.538.249,00;
- Gedung yang terletak di Perumahan Taman Meruya Ilir Blok F-1, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat sebesar Rp5.355.700.000,00; dan
- Tanah yang terletak di Jalan Manggarai Utara 7, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan sebesar Rp7.880.000.000.

**4) Reklasifikasi dari Aset Idle**

Reklasifikasi dari Aset Idle sebesar Rp22.500.759.680,00 berupa Tanah normalisasi kali Pesanggrahan di Jalan Meruya Ilir, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

**b. Mutasi Pengurangan**

Mutasi pengurangan Properti Investasi merupakan Reklasifikasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp10.302.090.000,00 merupakan Tanah yang terletak di Komplek ITC Fatmawati/Duta Mas. JL RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

Daftar mutasi Aset Properti Investasi per 31 Desember 2024 tersaji di Lampiran 9.

**Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp456.072.090.311,00 dan Rp448.002.283.626,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.68
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| Properti Investasi | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | Akumulasi Penyusutan | Beban Penyusutan | Koreksi Penyusutan | Akumulasi Penyusutan |
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gedung dan Bangunan | 447.294.118.634 | 2.563.282.580 | 4.090.194.124 | 453.947.595.338 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 708.164.992 | 708.164.991 | 708.164.990 | 2.124.494.973 |
| **Jumlah** | **448.002.283.626** | **3.271.447.571** | **4.798.359.114** | **456.072.090.311** |

Nilai Buku Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.289.997.175.302,00 dengan rincian pada tabel berikut.

| Jenis Properti Investasi | 31 Desember 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
| Tanah | 4.178.110.485.462 | 0 | 4.178.110.485.462 |
| Gedung dan Bangunan | 1.553.795.480.328 | (453.947.595.338) | 1.099.847.884.990 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 14.163.299.823 | (2.124.494.973) | 12.038.804.850 |
| **Jumlah** | **5.746.069.265.613** | **(456.072.090.311)** | **5.289.997.175.302** |

### 5.3.1.4 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp677.659.441.516.748 dan Rp661.657.277.836.888,00. Selama Tahun 2024 mutasi penambahan sebesar Rp26.858.952.295.809,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp10.856.788.615.949,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.69

Mutasi Aset Tetap

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Uraian | 31 Desember 2023 (Rp) | Mutasi Tambah (Rp) | Mutasi Kurang (Rp) | 31 Desember 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah | 515.882.640.362.479 | 13.343.534.099.240 | 1.970.731.579.795 | 527.255.442.881.924 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 32.771.280.763.093 | 3.174.099.475.763 | 5.483.053.876.614 | 30.462.326.362.242 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 47.160.243.335.958 | 2.959.684.971.375 | 1.665.075.510.928 | 48.454.852.796.405 |
| 4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 61.937.757.653.148 | 4.520.226.464.364 | 548.794.043.581 | 65.909.190.073.931 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 1.388.435.196.833 | 99.331.273.130 | 373.662.117.295 | 1.114.104.352.668 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 2.516.920.525.377 | 2.762.076.011.937 | 815.471.487.736 | 4.463.525.049.578 |
| | **Total** | **661.657.277.836.888** | **26.858.952.295.809** | **10.856.788.615.949** | **677.659.441.516.748** |

Daftar mutasi aset tetap per 31 Desember 2024 tersaji pada Lampiran 10.

#### 5.3.1.4.1 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp527.255.442.881.924,00 dan Rp515.882.640.362.479,00 Selama Tahun 2024 mutasi penambahan sebesar Rp13.343.534.099.240,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.970.731.579.795,00 dengan rincian sebagai berikut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a. Mutasi Penambahan** | | | |
| 1) | Belanja Modal Tanah TA 2024 yang Menjadi Aset Tetap | Rp | 424.288.474.547 |
| | a) Belanja Modal Tanah TA 2024 | Rp | 433.525.287.650 |
| | b) Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap atau tidak menghasilkan Aset Tetap perolehan 2024 | Rp | (9.236.813.103) |
| | 1. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap | Rp | (6.715.345.213) |
| | 2. Belanja Modal Tahun 2024 yang masih dalam proses pengadaan | Rp | (2.521.467.890) |
| 2) | Reklasifikasi antar Aset Tetap selain Tanah | Rp | 109.459.885.610 |
| | a) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan | Rp | 109.124.912.000 |
| | b) Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan | Rp | 334.973.610 |
| 3) | Reklasifikasi dari Aset Lainnya | Rp | 12.097.342.802.083 |
| | a) Reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga | Rp | 15.887.256.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | b) Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain | Rp | 12.081.455.546.083 |
| 4) | Reklasifikasi dari Properti Investasi | Rp | 10.302.090.000 |
| 5) | Kurang Catat | Rp | 702.140.847.000 |
| **Jumlah Penambahan** | | **Rp** | **13.343.534.099.240** |
| **b. Mutasi Pengurangan** | | | |
| 1) | Penghapusan | Rp | 90.630.000.000 |
| 2) | Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah | Rp | 13.962.083.754 |
| 3) | Reklasifikasi ke Aset Lainnya | Rp | 39.862.885.352 |
| | a) Reklasifikasi ke Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga | Rp | 37.140.411.000 |
| | b) Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud | Rp | 553.845.600 |
| | c) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain | Rp | 2.168.628.752 |
| 4) | Reklasifikasi ke Properti Investasi | Rp | 497.059.353.000 |
| 5) | Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria | Rp | 1.789.567.000 |
| 6) | Lebih Catat | Rp | 1.327.427.690.689 |
| **Jumlah Pengurangan** | | **Rp** | **1.970.731.579.795** |

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

**a. Mutasi Penambahan**

1) Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp424.288.474.547,00 terdiri dari:
   - tanah untuk aliran sungai dalam rangka normalisasi sungai Ciliwung, tanah untuk waduk Jagakarsa, waduk Cilincing, waduk Pondok Ranggon, waduk Rawa Lindung, Waduk Dukuh, tanah untuk Situ Srengseng dan Situ Belibis, pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp364.488.398.425,00;
   - tanah untuk jalan provinsi pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp57.631.447.370,00; dan
   - tanah untuk pembangunan MRT Fase 2 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.168.628.752,00.
2) Penambahan Aset Tetap Tanah karena Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Tanah sebesar Rp109.459.885.610,00 terdiri dari:
   a) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang sebelumnya tercatat sebagai bangunan kantor, berupa Tanah untuk Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang berlokasi di Jalan Rawa Bebek Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, sebesar Rp109.124.912.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
   b) Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang telah selesai sebelum Tahun 2024, berupa Tanah untuk Jalan Provinsi sebesar Rp334.973.610,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
3) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Lainnya sebesar Rp12.097.342.802.083,00 terdiri dari:

a) Reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp15.887.256.000,00 terdiri dari :
   - Reklasifikasi dari Aset Kerjasama Bangun Serah Guna berupa tanah untuk bangunan masjid sebesar Rp13.326.720.000,00 pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre; dan
   - Reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan berupa tanah hutan taman nasional sebesar Rp2.560.536.000,00 yang telah dilakukan mutasi transfer ke Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre dengan BAST nomor 1752/PU.04.00 pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre

b) Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain sebesar Rp12.081.455.546.083,00 terdiri dari:
   - Reklasifikasi dari Aset Fasos-Fasum sebesar Rp12.050.278.563.786,00 berupa tanah untuk jalan provinsi sebanyak 72 unit, tanah hutan taman nasional sebanyak 96 unit, tanah untuk bangunan air kotor dan tanah dengan peruntukkan lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
   - Reklasifikasi dari Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset Idle) berupa tanah bangunan kantor pemerintah sebesar Rp3.763.536.000,00 pada Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
   - Reklasifikasi dari Kas Konsinyasi berupa tanah untuk pembangunan MRT Fase 2 sebesar Rp27.413.446.297,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

4) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi dari Aset Properti Investasi berupa tanah untuk taman sebesar Rp10.302.090.000,00 pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre.

5) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Kurang Catat karena koreksi kurang catat barang sebesar Rp702.140.847.000,00, terdiri dari:
   - tanah untuk taman hutan kota yang berlokasi di Jalan Bukit Gading Raya 1, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara sebesar Rp289.054.885.000,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara;
   - tanah untuk jalan provinsi yang berlokasi di Jalan Karet Pasar Baru Timur I, II dan III sebesar Rp117.321.165.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- tanah lapangan tempat penimbunan sampah yang berlokasi di Jalan Bukit Gading Raya 1, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara sebesar Rp79.180.325.000,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara;
- tanah untuk bangunan sarana pendidikan yang berlokasi di TK Negeri Bintaro, TK Negeri Cipete, SDN Bintaro 09, SDN Jagakarsa 03, SMA Negeri 66 dan SLB Negeri 12 dengan total sebesar Rp30.199.882.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
- Selain pada empat PD/UPD tersebut di atas, penambahan Aset Tetap Tanah dari kurang catat barang juga terdapat pada 14 PD/UPD dengan total sebesar Rp186.384.590.000,00.

**b. Mutasi Pengurangan**

1) Penghapusan Aset Tetap Tanah berupa tanah bangunan rumah negara yang terletak di Graha Pejaten, Jl. Pejaten Raya, Pasar Minggu berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ±6.000 m² (Lebih Kurang Enam Ribu Meter Persegi) sebesar Rp90.630.000.000,00 pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah berupa pemasangan pagar panel beton untuk pengamanan aset tanah, pembangunan menara tower air dan perbaikan gedung ruangan, penyediaan air bersih dan perbaikan fasilitas toilet dan ibadah, pemasangan kabel instalasi listrik*, smart TV, PC Unit, tablet, handy talkie, keyboard, laser pointer, laptop, server, scanner, hard disk*, monitor, papan nama pemasangan aset, pengadaan plang tanda bahaya, tiang pipa, kursi kerja kantor sebesar Rp13.962.083.754,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
3) Pengurangan Aset Tetap Tanah ke Reklasifikasi Aset Lainnya sebesar Rp39.862.885.352,00 di antaranya:
    a) Reklasifikasi ke Aset Kemitraan Pihak Ketiga yang merupakan Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan berupa tanah untuk bangunan gedung tempat ibadah permanen, tanah kosong yang sudah diperuntukkan dan tanah untuk bangunan masjid sebesar Rp37.140.411.000,00 pada Jakarta Aset Management Centre;
    b) Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Tetap Berwujud sebesar Rp553.845.600,00 atas *software* komputer pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan

c) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain yang merupakan Reklasifikasi Aset Tetap ke Kas Konsinyasi sebesar Rp2.168.628.752,00 atas penitipan ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Fase 2 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

4) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah menjadi Properti Investasi berupa tanah untuk jalan provinsi, tanah yang sudah diperuntukkan, tanah bangunan kantor pemerintah dan tanah lainnya sebesar Rp497.059.353.000,00 pada *Jakarta Asset Management Centre*;

5) Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria atas Belanja Modal sebelum Tahun 2024 dan direklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp1.789.567.000,00. pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;

6) Pengurangan Aset Tetap Tanah karena Lebih Catat sebesar Rp1.327.427.690.689,00 terdiri dari:

a) Tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga tertutup seluas 3.543 m² sebesar Rp95.372.400.000,00 yang tercatat ganda pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat yang terletak di Jalan Tanah Abang I No. 2 RT 011/RW 008 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selanjutnya, Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat melakukan koreksi pencatatan ganda atas salah satu bidang tanah tersebut;

b) Pencatatan ganda atas register tanah sebesar Rp11.622.584.000,00 pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pemukinan Pulogadung terdiri dari 8 register Tanah kampung yang terletak di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Tanah HPL 00001/Penggilingan.yang tercatat pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung. Selanjutnya Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung melakukan koreksi pencatatan ganda atas salah satu bidang tanah tersebut;

c) Koreksi Lebih Catat Barang atas Aset Tetap Tanah sebesar Rp10.665.760.000,00 berupa tanah untuk bangunan kantor pemerintah yang terletak di Jl. Gading Elok Barat III Blok DF No.1 Jakarta Utara untuk kantor lurah seluas 2.848 m² pada Kelurahan Kelapa Gading Timur Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

d) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 7.000 m² sebesar Rp 8.750.000.000,00 pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Utara dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta -

Pejabat Pengelola Aset Daerah (PPAD) Fasos Fasum yang terletak di Kelapa Puan Raya Blok EF1 Kota Administrasi Jakarta Utara Kecamatan Kelapa Gading Kelurahan Kelapa Gading Timur Kota Administrasi Jakarta Utara. Selanjutnya Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Utara melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI - Pejabat Pengelola Aset Daerah (PPAD) Fasos Fasum;

e) Tanah hutan taman nasional seluas 836 m² sebesar 8.740.380.000,00 yang tercatat ganda pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Kelurahan Guntur yang terletak di Jl. Salak 17 Rt.8/Rw.2 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Kelurahan Guntur Kota Administrasi Jakarta Selatan;

f) Pencatatan ganda atas register tanah seluas 3.450 m² sebesar Rp7.500.000.000,00 pada Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terletak di Jl. Komplek PIK Blok D Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur yang tercatat ganda pada Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. Selanjutnya Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;

g) Tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga seluas 6.307 m² sebesar Rp4.402.950.000,00 pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat yang tercatat ganda dengan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat yang terletak di Jalan Mutiara No. 4 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selanjutnya Unit Pengelola

Gelanggang Jakarta Pusat melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- Pengurangan aset tetap Tanah dari Koreksi Pencatatan Ganda lainnya pada 36 PD/UPD dengan total sebesar Rp1.180.373.616.689,00.

Nilai Aset Tetap Tanah tersebut di atas sudah termasuk Kas Dikonsinyasikan dengan saldo per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp223.719.524.696,00 dan Rp209.482.676.696,00 yang terdapat pada OPD berikut ini.

Tabel 5.70
Kas Dikonsinyasikan
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Uraian | 31 Desember 2023 (Rp) | Mutasi Tambah (Rp) | Mutasi Kurang (Rp) | 31 Desember 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Bina Marga | 107.214.674.212 | 15.861.614.000 | 1.624.766.000 | 121.451.522.212 |
| 2 | Dinas Sumber Daya Air | 102.268.002.484 | 0 | 0 | 102.268.002.484 |
| | **Jumlah** | **209.482.676.696** | **15.861.614.000** | **1.624.766.000** | **223.719.524.696** |

Selama Tahun 2024 Saldo Kas Konsinyasi terdapat mutasi penambahan sebesar Rp15.861.614.000,00 dan mutasi pengurangan Rp1.624.766.000,00 pada Dinas Bina Marga, sebagai berikut:

Mutasi Penambahan berasal dari dua kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 yang merupakan penitipan saldo kas konsinyasi baru di antaranya sebagai berikut:

1) Penitipan Kas Konsinyasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Konsinyasi Peta Bidang atas nama Poenjoto Thijono berlokasi di Jalan Pegangsaan Dua Kel Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp835.234.000,00); dan
2) Penitipan Kas Konsinyasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Konsinyasi Peta Bidang atas nama David Ridwan Sukotjo yang berlokasi di Jalan Arjuna Selatan Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp15.026.380.000,00)

Mutasi Pengurangan berasal dari Kas Konsinyasi yang sudah diserahkan dari Pengadilan ke pihak terkait, yang merupakan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Pegangsaan Dua Kel. Pegangsaan Dua Kec.

Kelapa Gading peta bidang 39 atas nama Poenjoto Thijono sebesar Rp1.624.766.000,00.

Selain Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanah hasil pembebasan lahan dan tanah berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Tanah hasil pembebasan merupakan tanah Eks BPPT seluas 76.928 $m^2$ di Kelurahan Meruya Selatan yang belum tercatat. Walikota Administrasi Jakarta Barat masih dalam proses inventarisasi, legalisasi dan penyelesaian permasalahan tanah Eks BPPT. Adapun tanah berstatus HPL terdiri 45 sertifikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 13.035.227 $m^2$ dengan rincian sebagaimana disajikan dalam lampiran 11.

Selama Tahun 2024 telah dilakukan rekonsiliasi data Hak Pengelolaan antara Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan Kantor Pertanahan Wilayah. Dari rekonsiliasi tersebut diketahui bahwa HPL No. 2/Pulo Gebang dengan luas 575.155 meter persegi yang semula tercatat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkonfirmasi merupakan HPL atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyesuaikan pencatatannya menjadi 45 HPL

HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang yang mewakili negara. Pemegang hak pengelolaan adalah instansi pemerintah, jawatan, atau badan milik Negara.
Lahan dengan sertifikat HPL tersebut di antaranya digunakan sebagai aset fasilitas umum, untuk pembangunan gedung pemerintah, dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset, dan dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah.
Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam proses identifikasi dan inventarisasi bentuk pemanfaatan tanah HPL pada beberapa lokasi sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta hak yang terbit di atasnya.

#### 5.3.1.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp30.462.326.362.242,00 dan Rp32.771.280.763.093,00. Selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp3.174.099.475.763,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp5.483.053.876.614,00 dengan rincian sebagai berikut.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **a. Mutasi Penambahan** | | | | |
| 1) | Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 yang menjadi Aset Tetap terdiri dari: | | Rp | 2.747.113.814.731 |
| | a) | Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 | Rp | 2.961.717.289.383 |
| | b) | Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 yang tidak menghasilkan Aset Tetap | Rp | (214.603.474.652) |
| | | 1. Pembayaran Utang atas Aset Peralatan dan Mesin yang telah Diakui Tahun Sebelumnya | Rp | (1.234.347.102) |
| | | 2. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap | Rp | (12.887.497.756) |
| | | 3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 yang masih Dalam Proses Pengerjaan | Rp | (149.801.506.774) |
| | | 4. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka | Rp | (1.488.776.749) |
| | | 5. Belanja Modal atas pekerjaan kontraktual belum selesai dengan mekanisme RPBATA | Rp | (48.702.830.358) |
| | | 6. Pengembalian Belanja Modal atas Temuan, Klaim, Bank Garansi dan Koreksi Lainnya | Rp | (488.515.913) |
| 2) | Kapitalisasi selain dari Belanja Modal | | Rp | 74.331.542.666 |
| | a) | Kapitalisasi dari Belanja Barang | Rp | 62.419.572.392 |
| | b) | Kapitalisasi dari Belanja Jasa | | 244.826.000 |
| | c) | Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan | Rp | 11.667.144.274 |
| 3) | Beban Dibayar Di Muka tahun sebelumnya | | Rp | 442.800.000 |
| 4) | Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | | Rp | 70.643.667.583 |
| 5) | Pengadaan yang belum dibayarkan | | Rp | 3.871.507.873 |
| 6) | Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin | | Rp | 233.704.983.955 |
| | a) | Reklasifikasi dari Aset Tetap dari Gedung dan Bangunan / JIJ | Rp | 184.855.896.377 |
| | b) | Reklasifikasi dari KDP yang Sudah Selesai Dikerjakan | | 48.849.087.578 |
| 7) | Reklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap | | Rp | 43.880.007.841 |
| 8) | Kurang Catat | | Rp | 111.151.114 |
| **Jumlah Penambahan** | | | **Rp** | **3.174.099.475.763** |
| **b. Mutasi Pengurangan** | | | | |
| 1) | Penghapusan | | Rp | 19.462.275.885 |
| 2) | Hibah ke Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | | | 145.771.000 |
| 3) | Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin | | Rp | 44.721.685.220 |
| 4) | Reklasifikasi ke Aset Lainnya | | Rp | 5.417.926.918.982 |
| | a) | Reklasifikasi ke Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga | Rp | 1.093.780.000 |
| | b) | Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud | Rp | 6.397.795.130 |
| | c) | Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Lain-Lain | Rp | 5.410.435.343.852 |
| 5) | Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria | | Rp | 700.114.637 |
| 6) | Pengembalian atas temuan pemeriksaan | | Rp | 2.483.600 |
| 7) | Lebih Catat | | Rp | 94.627.290 |
| **Jumlah Pengurangan** | | | **Rp** | **5.483.053.876.614** |

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Mutasi Penambahan**

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp2.747.113.814.731,00 di antaranya:

- peralatan penunjang sekolah berupa komputer, laptop, *A.C. split*, dan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp294.086.721.560,00;
- peralatan angkutan berupa truk sampah, kendaraan *sweeper*, peralatan laboratorium berupa *air quality monitoring system* dan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp 242.991.344.948,00;
- peralatan angkutan berupa mobil pemadam kebakaran, sepeda motor, peralatan besar berupa perlengkapan *rescue,* dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp141.089.408.382,00; dan
- peralatan komputer berupa *storage modul disk* (peralatan *mainframe*), *switch*, peralatan studio berupa *interactive display*, dan peralatan mesin lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp135.532.254.028,00.

2) Kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp74.331.542.666,00 terdiri dari:
   a) Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp62.419.572.392,00 di antaranya:
      - alat khusus keamanan, mesin pengering, dan meja lipat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp18.325.238.000;
      - *distress signal unit* dan kandang logam pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp15.883.230.000,00; dan
      - kipas angin*, white board*, dan *loudspeaker* pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp10.717.799.808,00.
   b) Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp244.826.000,00 terdiri dari:
      - ayunan, jungkat jungkit dan perosotan pada Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp146.076.000,00; dan
      - sepeda motor, *rescue truck,* dan *rescue car* pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp98.750.000,00.
   c) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp11.667.144.274,00 di antaranya:

- *P.C Unit,* meja sekolah, lemari kaca dan peralatan dan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp2.414.533.287,00;
- *charge over switch,* A.C sentral, dan Jaringan listrik penerangan jalan umum pada Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp2.013.699.285,00; dan
- *A.C floor standing* pada Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp1.713.230.000,00.

3) Beban Dibayar di Muka Tahun 2023 berdasarkan SE Sekda No.46/SE/2023 dan penyelesaian pekerjaannya dilakukan di Tahun 2024. Berupa penyelesaian pengadaan mesin gergaji (*power hacksaw machine*) pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp442.800.000,00.
4) Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp70.643.667.583,00 merupakan perolehan Aset Tetap dari instansi di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di antaranya:
   - *ultra sono graphy* (USG) *internal medicine*, *antropometri kit*, laptop dan peralatan mesin lainnya dari Kementerian Kesehatan RI pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp55.365.867.800,00;
   - alat simulator pendidikan, *electronic robot*, mesin frais dan peralatan mesin lainnya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp2.844.163.190,00; dan
   - *welding machine*, P.C unit, mesin CNC dan peralatan mesin lainnya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp2.356.386.798,00.
5) Pengadaan yang Belum Dibayarkan merupakan perolehan Aset Tetap yang diterima lebih dulu tanpa disertai pengeluaran kas dari APBD maupun BLUD sebesar Rp3.871.507.873,00 di antaranya:
   - peralatan ukur berupa *GPS geodetic* pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.981.819.439,00;
   - peralatan komputer berupa *NComputing* pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dengan total sebesar Rp468.729.485,00; dan

- peralatan kedokteran berupa *cold plate*, *dressing forceps*, *heacting set* dan alat partus *set* pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan total sebesar Rp176.563.373,00.

6) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp233.704.983.955,00 terdiri dari:
   a) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal TA 2024 dari sebesar Rp184.855.896.377,00 di antaranya:
      - Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa *submersible pump*, *genset, rail lifter* dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp55.482.683.945,00;
      - Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa stationary water pump dan genset pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp23.634.359.532,00; dan
      - reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa *elevator/lift, floating fire pump* (pompa punggung kecil), *elektrik panel cintrol,* dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp23.103.845.561,00.
   b) Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan berupa pekerjaan pengembangan *ITS Traffic Light (Intelligent Traffic Control System)* berupa *NComputing* dengan total sebesar Rp48.849.087.578,00 pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.

7) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp43.880.007.841,00 terdiri dari:
   a) Reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan Reklasifikasi yang diperoleh dari Aset Pinjam Pakai berupa mini bus dan sedan pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.921.586.129,00; dan
   b) Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain sebesar Rp41.958.421.712,00 terdiri dari:
      - Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat dilakukan berdasarkan pendalaman PD/UPD bahwa Aset Rusak Berat tersebut masih dapat digunakan kembali sebesar Rp10.278.101.723,00 di antaranya:
        1) Alat angkutan berupa *tug boat* + *attachment* pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp8.448.037.580,00;

2) alat angkutan berupa *truck + attachment* dan sepeda motor patroli pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp426.209.343,00; dan
3) alat angkutan berupa *speed boat* / motor tempel Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp297.000.000,00.

- Reklasifikasi yang diperoleh dari Aset Lain-lain - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset Idle) berupa televisi pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp364.333.728,00.
- Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum berupa kapal motor, penangkal petir, pompa hidrolik, dan peralatan mesin lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp31.256.735.937,00;
- Reklasifikasi dari Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset berupa sepeda motor pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp59.250.324,00;

8) Kurang Catat sebesar Rp111.151.114,00 terdiri dari:
   a) Kurang Catat Nilai sebesar Rp1.722.359 terdiri dari :
      - *Digita l video recording (DVR)* pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.292.479,00; dan
      - peralatan personal komputer (*CPU*) pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp429.880,00.
   b) Kurang Catat Barang sebesar Rp 109.428.755,00 di antaranya:
      - *patient monitor, suction pump, emergency trolley* dan lap top pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing dengan total sebesar Rp79.041.617,00
      - dispenser, *kitchen set*, tangga alumunium dan peralatan dan mesin lainnya pada Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp15.169.260,00;
      - tenis meja, *camera control television system (CCTV)* pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp4.107.000,00.

**b. Mutasi Pengurangan**

1) Penghapusan sebesar Rp19.462.275.885,00 di antaranya:
   - penghapusan berupa *ct-scan*, *x-ray unit*, *laboratory sieve set*, dan peralatan dan mesin lainnya pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit dengan total sebesar Rp16.208.286.498,00;
   - penghapusan berupa *ventilator internal medicine,* mesin diesel, mesin *fotocopy* folio, dan peralatan dan mesin lainnya pada Pusat Krisis Kesehatan dan Kegawatdaruratan Daerah dengan total sebesar Rp2.026.260.893,00; dan
   - penghapusan berupa *p.c unit*, mesin absensi, papan visual / papan nama, dan peralatan dan mesin lainnya pada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp256,235,525,00.
2) Hibah ke Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa rak kayu sebesar Rp145.771.000,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat.
3) Reklasifikasi ke Aset Tetap Selain Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp44.721.685.220,00 di antaranya:
   - reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa pemasangan panel dinding sebesar Rp8.968.985.800,00 pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
   - reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa jaringan *warning system* sebesar Rp8.640.000.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
   - reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa instalasi pengolahan sampah organik sistem pembakaran sebesar Rp7.364.211.968,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
4) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp5.417.926.918.982,00 terdiri dari:
   a) Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan Reklasifikasi menjadi Aset Pinjam Pakai berupa sedan, *mini bus*, mobil *pick up* sebesar Rp1.093.780.000,00 pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
   b) Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp6.397.795.130,00 di antaranya:

- *software* komputer sistem informasi mitigasi bencana ROB sebesar Rp3.382.384.600,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
- *software veeam* (*software back up data*) sebesar Rp2.035.000.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- lisensi *software radiologi information system* sebesar Rp427.350.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu.

c) Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Lain-Lain sebesar Rp5.410.435.343.852,00 terdiri dari:
- Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp3.758.339.073.619,00 di antaranya:
  1) alat angkutan berupa mobil pemadam kebakaran, *rapid invention vehicle*, mobil *ambulance*, dan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp431.171.274.078,00;
  2) *tool kit set, netware interface external, out side broad cast van radio*, dan peralatan dan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp218.775.910.468,00; dan
  3) *unit tape recorder*, mesin absensi, alat simulator pendidikan, dan peralatan dan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp194.359.655.423,00.
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya berupa *gene amp pcr system*, *ecg recorder single channel*, *pneumatic transfer system*, dan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp95.389.999.667,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- Reklasifikasi ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp1.556.706.270.566,00 di antaranya:
  1) *stationary water pump, sumersible pump, concrete vibrator*, dan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp395.184.091.884,00;

2) *tool kit set, audio video selector* (peralatan *studio audio*), *kit* analisa kimia, dan peralatan dan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp153.688.731.436,00; dan
3) *unit tranceiver uhf stationary*, *mainframe* (komputer jaringan), *server*, dan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp99.993.089.836,00.

5) Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria atas Belanja Modal sebelum Tahun 2024 dan direklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp700.114.637,00 terdiri dari:
   a) Reklasifikasi ke Beban Barang sebesar Rp458.355.527,00 di antaranya:
      - tenda yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp89.400.000,00 pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
      - kursi rapat sebesar Rp79.201.700,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
      - *flash disk/memory card, cable, camera adaptor* dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp66.861.210,00;
      - kasur pasien *(hospital bed), wheel chair* (alat kesehatan rehabilitasi medis), kipas angin, dan peralatan mesin lainnya Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih dengan total sebesar Rp63.943.890,00;
      - buku kurikulum sebesar Rp36.300.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Barat; dan
      - *cable* sebesar Rp28.728.000,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
   b) Reklasifikasi ke Beban Jasa berupa *software conf off-line computer* dan *software*/aplikasi lainnya sebesar Rp140.610.000,00 pada Pusat Data dan Informasi Perhubungan;
   c) Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp101.149.110,00 terdiri dari:
      - *full body harness, ascender*, tali kamantel statis dan peralatan mesin lainnya pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan total sebesar Rp69.901.584,00;
      - timbangan Bbi kapasitas 100 Kg sebesar Rp27.000.000,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat; dan

- *microphone cable* dan *TV connector* pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dengan total sebesar Rp4.247.526,00.

6) Pengembalian atas temuan pemeriksaan berupa *microphone/wireless MIC* sebesar Rp2.483.600,00 pada Kelurahan Pulau Harapan.

7) Lebih Catat sebesar Rp94.627.290,00 terdiri dari:
   a) Lebih Catat Nilai berupa *vertical blind* sebesar Rp2.269.740,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; dan
   b) Lebih Catat Barang berupa *power amplifier, loudspeaker, microphone* pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional dengan total sebesar Rp92.357.550,00.

#### 5.3.1.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp48.454.852.796.405,00 dan Rp47.160.243.335.958,00. Selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp2.959.684.971.375,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.665.075.510.928,00 dengan rincian sebagai berikut.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **a. Mutasi Penambahan** | | | | |
| 1) | Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 yang menjadi Aset Tetap terdiri dari: | | Rp | 1.582.058.726.009 |
| | a) | Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 | Rp | 2.385.010.773.455 |
| | b) | Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi kriteria/tidak menghasilkan Aset Tetap | Rp | (802.952.047.446) |
| | | 1. Pembayaran Utang atas Aset Gedung dan Bangunan yang telah Diakui Tahun Sebelumnya | Rp | (75.771.592.587) |
| | | 2. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap | Rp | (11.172.050.076) |
| | | 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang masih dalam proses pengerjaan | Rp | (673.903.210.435) |
| | | 4. Belanja Modal yang diakui sebagai Uang Muka | Rp | (13.978.875.153) |
| | | 5. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka | Rp | (24.607.733.525) |
| | | 6. Belanja Modal atas pekerjaan kontraktual belum selesai dengan mekanisme RPBATA | Rp | (2.398.606.038) |
| | | 7. Pengembalian Belanja Modal atas Temuan, Klaim, Bank Garansi dan Koreksi Lainnya | Rp | (1.119.979.632) |
| 2) | Kapitalisasi selain dari Belanja Modal | | Rp | 76.970.647.140 |
| | a) | Kapitalisasi dari Belanja Barang | Rp | 963.578.915 |
| | b) | Kapitalisasi dari Belanja Jasa | Rp | 8.212.909.480 |
| | c) | Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan | Rp | 67.794.158.745 |
| 3) | Pengadaan tahun sebelumnya yang tercatat sebagai Uang Muka | | Rp | 35.337.761.418 |
| 4) | Pengadaan tahun sebelumnya yang tercatat sebagai Beban Dibayar di Muka | | Rp | 42.793.221.592 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5) | Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Rp | 8.961.568.871 |
| 6) | Pengadaan yang belum dibayarkan | Rp | 83.674.239.214 |
| 7) | Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan | Rp | 645.357.493.851 |
| | a) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan – APBD | Rp | 101.144.777.503 |
| | b) Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan | Rp | 544.212.716.348 |
| 8) | Reklasifikasi dari Aset Lainnya | Rp | 385.649.452.936 |
| | a) Reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga | Rp | 16.760.750.000 |
| | b) Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain | Rp | 368.888.702.936 |
| 9) | Reklasifikasi dari Ekstrakomtabel | Rp | 56.566.321 |
| 10) | Koreksi Kurang Catat | Rp | 98.825.294.023 |
| **Jumlah Penambahan** | | **Rp** | **2.959.684.971.375** |
| **b. Mutasi Pengurangan** | | | |
| 1) | Penghapusan | Rp | 28.495.579.432 |
| 2) | Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan | Rp | 949.570.449.253 |
| 3) | Reklasifikasi ke Aset Lainnya | Rp | 283.862.128.696 |
| 4) | Reklasifikasi ke Beban | Rp | 54.446.523.347 |
| 5) | Koreksi Lebih Catat | Rp | 348.700.830.200 |
| **Jumlah Pengurangan** | | **Rp** | **1.665.075.510.928** |

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Mutasi Penambahan**

1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp1.582.058.726.009,00 di antaranya:
   - bangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 74 Jakarta, bangunan gedung sekolah SDN Pondok Pinang 05 Jakarta, bangunan gedung sekolah SDN Pasar Baru 01/03/05 dan TK Negeri Sawah Besar 01 Jakarta, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp695.334.266.403,00;
   - bangunan rumah susun Jagakarsa Jakarta Selatan, rumah susun Daan Mogot Jakarta Barat, rumah susun Marunda Jakarta Utara, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp297.164.206.486,00; dan
   - bangunan gedung Palang Merah Indonesia DKI Jakarta, bangunan tempat parkir umum Jatibaru Jakarta Pusat, rumah negara golongan I tipe A permanen, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp86.734.524.199,00.

2) Kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp76.970.647.140,00 terdiri dari:

a) Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp963.578.915,00 di antaranya:
   - bangunan gedung pos satpam, panggung literasi dan kreasi, gapura, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp221.456.481,00;
   - bangunan gedung kantor sebesar Rp218.528.000,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu; dan
   - bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat sebesar Rp193.845.960,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kalideres.

b) Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp8.212.909.480,00 di antaranya:
   - biaya konsultan untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan rehabilitasi gedung kantor A dan gedung kantor B Dinas Sosial, biaya konsultan untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan rehabilitasi gedung Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1 Cengkareng, biaya konsultan untuk kegiatan pengawasan rehabilitasi gedung Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1 Cengkareng, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.976.806.414,00;
   - biaya konsultan untuk kegiatan pengawasan perbaikan gedung SAMSAT, biaya konsultan untuk pengawasan kegiatan perbaikan gedung kantor Abdul Muis Jakarta, biaya konsultan untuk kegiatan pengawasan perbaikan gedung kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.003.650.867,00; dan
   - biaya konsultan untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan rehabilitasi gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) sebesar Rp952.000.000,00 pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat.

c) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp67.794.158.745,00 di antaranya:
   - pemeliharaan bangunan gedung kantor ruang Fraksi DPRD sebesar Rp28.597.896.020,00 pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta;

- pemeliharaan bangunan gedung kantor Blok G, Blok A, Blok B, dan Blok H Balaikota Jakarta sebesar Rp13.761.186.449,00 pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- pemeliharaan turap dan pagar pengaman di Rumah Susun Rawa Bebek, pemeliharaan turap dan pagar pengaman di Rumah Susun Marunda, pemeliharaan gapura di Rumah Susun BLK Pasar Rebo, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp10.004.992.475,00.

3) Pengadaan tahun sebelumnya yang tercatat sebagai Uang Muka berupa pembangunan rumah susun Jagakarsa di Jalan Margasatwa, Jakarta Selatan sebesar Rp35.337.761.418,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

4) Pengadaan Tahun 2023 yang tercatat sebagai Beban Dibayar di Muka berdasarkan SE Sekda No.46/SE/2023 dan penyelesaian pekerjaannya dilakukan di Tahun 2024, sebesar Rp42.793.221.592,00 di antaranya:
   - pembangunan gelanggang remaja Kecamatan Pasar Rebo, pembangunan gelanggang remaja Kecamatan Kramat Jati, pembangunan gelanggang remaja Kecamatan Cakung, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp35.788.771.444,00;
   - revitalisasi pelabuhan Pulau Sabira sebesar Rp6.223.983.621,00 pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah; dan
   - rehab total bangunan gedung pendidikan permanen TKN Kalideres 01, rehab total bangunan gedung pendidikan permanen SMA N 31, pemagaran SDN Kalideres 09 Pagi Jakarta, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp409.376.079,00.

5) Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.961.568.871,00 merupakan perolehan Aset Tetap dari instansi di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang di antaranya:
   - bangunan Masjid At-Tarbiyah yang terletak di jalan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara sebesar Rp1.400.000.000,00 yang berasal dari Ketua komite Alumni SMPN 122, bangunan Musholla AL-IQRA kompleks SDN Penjaringan 06,07,08 dan 09 Pagi yang terletak di Penjaringan, Jakarta Utara sebesar Rp228.505.000,00 yang berasal dari Ketua Pelaksana Pembangunan Musholla, bangunan

Musholla SDN Pejagalan 09 yang terletak di Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara sebesar Rp176.851.420,00 yang berasal dari Swadaya Masyarakat, bangunan Musholla Nurul Ilmi SDN Pademangan Timur 01 yang terletak di Pademangan Timur, Jakarta Utara sebesar Rp176.472.200,00 yang berasal dari Ketua Pelaksana Pembangunan Musholla, bangunan Musholla Darul Ilmi SMPN 112 yang terletak di Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara sebesar Rp163.765.500,00 yang berasal dari Ketua Pelaksana Pembangunan Musholla, dan bangunan gudang yang terletak di Pademangan Timur, Jakarta Utara sebesar Rp15.000.000,00 yang berasal dari Ketua Komite SMPN 23 yang diterima oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara;

- bangunan pertokoan/koperasi SMKN 43 yang terletak di Jalan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebesar Rp898.383.000,00 yang berasal dari Kementerian Pendidikan, bangunan Musholla SDN Bintaro 05 Pagi yang terletak di Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan sebesar Rp300.000.000,00 yang berasal dari Ketua Pelaksana Pembangunan Musholla, dan bangunan gedung praktik siswa SMKN 41 yang terletak di Jalan Margasatwa, Pondok Labu, Jakarta Selatan sebesar Rp286.951.000,00 yang berasal dari Kementerian Pendidikan yang diterima oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
- bangunan ruang praktik siswa SMKN 50 yang terletak di Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur sebesar Rp553.394.000,00 yang berasal dari Kementerian Pendidikan, bangunan ruang praktik siswa teknik mekatronika SMKN 69 yang terletak di Jalan Rawa Badung, Cakung, Jakarta Timur sebesar Rp484.300.000,00 yang berasal dari Kementerian Pendidikan, bangunan Musholla Daarul Ulum yang terletak di jalan Galur Sari, Matraman, Jakarta Timur sebesar Rp244.504.000,00 yang berasal dari Ketua komite SDN Utan Kayu Selatan 20, dan gedung pertemuan permanen yang terletak di Jalan Lingkar Duren Sawit, Duren Sawit, Jakarta Timur sebesar Rp80.000.000,00 berasal dari Ketua komite Alumni SMPN 167 dan telah diterima oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur.

6) Pengadaan yang belum dibayarkan di Tahun 2024 sebesar Rp83.674.239.214,00 terdiri dari:

a) Penambahan aset dari pengadaan yang belum dibayarkan dari dana APBD sebesar Rp79.082.792.589,00 di antaranya:

- rehabilitasi total bangunan gedung pendidikan permanen SDN Pasar Baru 01/03/05 dan TK Negeri Sawah Besar 01 Jakarta, rehabilitasi total bangunan gedung pendidikan permanen SDN Utan Kayu Utara 01, rehabilitasi total bangunan gedung pendidikan permanen SDN Kebon Bawang 01/03/07 Jakarta, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp66.353.648.116,00;
- pembangunan gedung Sekretariat Resimen Mahasiswa Jayakarta, pembangunan gedung Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, pembangunan gedung parkir umum di Dinas Teknis Jatibaru, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp6.366.865.883,00; dan
- pembangunan rumah susun 3 Marunda Jakarta Utara, rumah susun Yos Sudarso Jakarta Utara, rumah susun permanen Komarudin Jakarta Timur, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.665.702.649,00.

b) Penambahan aset dari pengadaan yang belum dibayarkan dari dana BLUD sebesar Rp4.591.446.625,00 terdiri dari:
- Pembangunan gedung rumah sakit sebesar Rp4.307.591.030,00 pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit; dan
- pembangunan ruang *Central Sterile Supply Department* (CSSD), dan pemasangan *vinyl* di ruang ICU pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung dengan total sebesar Rp283.855.595,00.

7) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp645.357.493.851,00 terdiri dari:

a) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan dari belanja modal APBD sebesar Rp101.144.777.503,00 di antaranya:
- reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar Rp14.417.799.017,00 berupa bangunan gedung dan pendidikan permanen, dan pagar pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan;
- reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp13.420.535.816,00 berupa

bangunan halte/shelter dan pagar pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan

- reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.968.985.800,00 berupa bangunan gedung kantor pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

b) Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai sebesar Rp544.212.716.348,00 di antaranya:

- bangunan gelanggang remaja Kecamatan Kemayoran, bangunan gelanggang remaja Kecamatan Johar Baru, bangunan gelanggang remaja Kecamatan Pasar Rebo, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp224.645.013.331,00;
- bangunan gedung sekolah SDN Kembangan Utara 04 Pagi dan USB SMP, bangunan gedung sekolah SDN Grogol 05 Pagi dan USB SMP, bangunan gedung sekolah SDN Utan Kayu Utara 01, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp126.947.803.846,00; dan
- bangunan rumah susun Jagakarsa di jalan Raya Margasatwa Jakarta Selatan sebesar Rp64.816.219.031,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

8) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp385.649.452.936,00 terdiri dari:

a) Reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp16.760.750.000,00 yang terdiri dari:

- reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan sebesar Rp11.476.550.000,00 berupa bangunan gedung tempat ibadah permanen pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- reklasifikasi dari Aset Bangun Serah Guna sebesar Rp5.284.200.000,00 di antaranya berupa bangunan gedung tempat ibadah permanen, bangunan gedung pendidikan permanen dan gedung bangunan lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

b) Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain sebesar Rp368.888.702.936,00 terdiri dari:

- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat sebesar Rp19.775.317.854,00 di antaranya:
  - bangunan gedung kantor dan bangunan gudang terbuka sebesar Rp14.547.520.000,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - bangunan gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) sebesar Rp1.763.098.644,00 pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
  - bangunan gedung pendidikan SKB Negeri 03 dan bangunan gedung pendidikan SDN Rawa Badak Selatan II sebesar Rp1.337.512.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Reklasifikasi dari Aset Lain – Lain – Aset Tetap yang tidak Digunakan Operasional Pemerintah sebesar Rp71.995.900.136,00 berupa bangunan tempat bermain anak pada Badan Pengelolaan Aset daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Reklasifikasi dari Fasos Fasum sebesar Rp277.117.484.946,00 di antaranya berupa flat/rumah susun permanen, bangunan gedung kantor permanen, bangunan gedung pertemuan permanen, dan gedung bangunan lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

9) Reklasifikasi dari Ekstrakomtabel sebesar Rp56.566.321,00 berupa penambahan ruangan bangunan gedung kantor pada Kecamatan Kemayoran.
10) Kurang Catat sebesar Rp98.825.294.023,00 terdiri dari:
    a) Kurang Catat Nilai sebesar Rp4.111.010,00 berupa bangunan gedung kantor Kelurahan Palmeriam Matraman pada Kota Administrasi Jakarta Timur.
    b) Kurang Catat Barang sebesar Rp98.821.183.013,00 di antaranya:
       - kurang catat bangunan gedung olah raga, bangunan gedung pendidikan, bangunan gedung tempat ibadah, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp33.421.202.698,00;
       - kurang catat asrama putra SMKN 1, asrama putra SMA N 69 Jakarta, ruang praktik laboratorium tata boga, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp10.280.212.000,00; dan

- kurang catat bangunan gedung tata hidang, gedung pertemuan Graha 57, bangunan Masjid As Salam, dan gedung bangunan lainnya pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta dengan total sebesar Rp9.396.735.000,00.

**b. Mutasi Pengurangan**

1) Penghapusan sebesar Rp28.495.579.432,00 terdiri dari:
   - Bangunan Graha Pejaten Sesuai SK Penghapusan No.73 Tahun 2024 sebesar Rp15.453.687.732,00 pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Jakarta Selatan; dan
   - Bangunan Pendidikan SDN Karet Kuningan 01, Bangunan Pendidikan SDN Pejaten Timur 11, Bangunan Tempat Ibadah SDN Pejaten Timur 07, dan Bangunan Gedung Lainnya sesuai SK Penghapusan No.75 Tahun 2024 dan SK Penghapusan No.143 Tahun 2024 dengan total sebesar Rp13.041.891.700,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Selatan.
2) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp949.570.449.253,00 di antaranya:
   - Uang Muka Rehabilitasi Total SDN Kebon Bawang, Uang Muka Rehabilitasi Total SMKN 74 Jakarta, Uang Muka Rehabilitasi Total SDN Pondok Pinang 05 yang direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp493.772.067.162,00;
   - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah di Jalan Rawa Bebek yang direklasifikasi ke Tanah, dan *GPS Receiver* yang direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp112.903.352.000,00; dan
   - Dermaga Jetski Ancol, *Septic tank*, Saluran Drainase yang direklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp101.776.963.407,00.
3) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp283.862.128.696,00 terdiri dari:
   a) Reklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai sebesar Rp7.900.945.803,00 berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen dan Bangunan Gedung Rumah Tahanan Kelas II pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
   b) Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp275.961.182.893,00 di antaranya:

- Gedung dan Bangunan SDN Jati Pulo 08, Gedung dan Bangunan SDN Grogol 05, Gedung dan Bangunan SDN Kembangan Utara 04, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Barat dengan total sebesar Rp27.211.754.091,00;
- Gedung dan Bangunan SMKN 55 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Utara dengan total sebesar Rp20.674.000.000,00; dan
- Bangunan Gudang, Gedung Kantor, Rumah Dinas, dan Gedung bangunan lainnya pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp19.675.385.529,00.

4) Reklasifikasi ke Beban sebesar Rp54.446.523.347,00 terdiri dari:
   a) Reklasifikasi ke Beban Barang sebesar Rp11.495.909.301,00 di antaranya:
      - Batu Nisan sebesar Rp5.921.810.918,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara;
      - *Vertikal Garden* sebesar Rp5.538.599.683,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Utara; dan
      - Lampu Tiang Antik sebesar Rp26.640.000,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
   b) Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp407.407.611,00 di antaranya:
      - Biaya Jasa Konsultan Pembangunan Taman sebesar Rp179.366.761,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur;
      - Biaya Jasa Konsultan Renovasi Gedung Kantor, Gedung Pertemuan, dan Gedung Asrama dengan total sebesar Rp122.063.600,00 pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2; dan
      - Biaya Jasa Penataan dan Pemasangan Peralatan Pelatihan sebesar Rp64.102.500,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur.
   c) Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp42.543.206.435,00 di antaranya:
      - Rehabilitasi Kantor Hidroponik Cilangkap, Rehabilitasi Rumah Hijau di Kebun Bibit Cilangkap dan Sukapura, Rehabilitasi Bangunan Laboratorium Anggrek dan gedung bangunan lainnya

pada Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman dengan total sebesar Rp7.905.996.055,00;

- Renovasi Gedung Museum sebesar Rp6.677.014.487,00 pada Unit Pengelola Museum Seni; dan
- Pemeliharaan Gedung Serbaguna, Gedung Pengelola, dan Gedung Asrama dengan total sebesar Rp5.363.469.208,00 pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar.

5) Koreksi Lebih Catat sebesar Rp348.700.830.200,00 terdiri dari:
   a) Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp418.070.510,00 berupa:
      - Koreksi Lebih Catat Hutang Rehabilitasi Berat SDN Rawa Badak Selatan 11, Koreksi Lebih Catat Hutang Rehabilitasi Berat SDN Tengah 01, Koreksi Lebih Catat Hutang Rehabilitasi Berat SDN Cipete Utara dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp413.959.500,00; dan
      - Koreksi Nilai Gedung Kantor sebesar Rp4.111.010,00 pada Kota Administrasi Jakarta Timur.
   b) Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp348.282.759.690,00 di antaranya:
      - Gedung Unit Pengelola Pendapatan Daerah Mampang Prapatan yang tercatat ganda dengan Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan sebesar Rp7.781.469.283,00 dan koreksi Lebih Catat Barang berupa Gedung Blok H Balaikota sebesar Rp314.197.570.481,00 dan gedung dan bangunan lainnya dengan total Rp345.178.249.612,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
      - Balai Warga Pulau Panggang yang tercatat ganda dengan Kelurahan Pulau Panggang, dan SWRO Pulau Karya yang tercatat ganda dengan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp1.126.739.375,00 pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
      - Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat yang tercatat ganda dengan Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.052.324.033,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Barat.

#### 5.3.1.4.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing - masing sebesar Rp65.909.190.073.931,00 dan

Rp61.937.757.653.148,00. Selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp4.520.226.464.364,00 dan mutasi pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp548.794.043.581,00 dengan rincian sebagai berikut.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **a. Mutasi Penambahan** | | | | |
| 1) | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 yang menjadi Aset Tetap | | Rp | 3.223.138.724.365 |
| | a) | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 | Rp | 4.975.949.887.118 |
| | b) | Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak menghasilkan Aset Tetap | Rp | (1.752.811.162.753) |
| | | 1. Pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya | Rp | (77.926.504.446) |
| | | 2. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap | Rp | (25.881.455.082) |
| | | 3. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang masih dalam proses pengerjaan | Rp | (1.462.143.558.321) |
| | | 4. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yang diakui Sebagai Uang Muka | Rp | (57.150.309.759) |
| | | 5. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka | Rp | (127.286.127.282) |
| | | 6. Belanja Modal atas pekerjaan kontraktual belum selesai dengan mekanisme RPBATA | Rp | (529.486.942) |
| | | 7. Pengembalian Belanja Modal atas Temuan, Klaim, Bank Garansi dan Koreksi Lainnya | Rp | (1.893.720.921) |
| 2) | Kapitalisasi selain dari Belanja Modal | | Rp | 44.780.482.402 |
| 3) | Pengadaan tahun sebelumnya yang tercatat sebagai Uang Muka | | Rp | 64.591.165.290 |
| 4) | Pengadaan tahun sebelumnya yang tercatat sebagai Beban Dibayar Di Muka | | Rp | 104.760.307.176 |
| 5) | Pengadaan yang belum dibayarkan | | Rp | 21.538.828.641 |
| 6) | Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | Rp | 453.885.533.488 |
| | a) | Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan | Rp | 275.148.675.230 |
| | b) | Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan | Rp | 178.736.858.258 |
| 7) | Reklasifikasi dari Aset Lainnya | | Rp | 598.029.442.568 |
| 8) | Kurang catat | | Rp | 9.501.980.434 |
| **Jumlah Penambahan** | | | **Rp** | **4.520.226.464.364** |
| **b. Mutasi Pengurangan** | | | | |
| 1) | Penghapusan | | Rp | 1.051.485.490 |
| 2) | Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | Rp | 163.917.603.057 |
| 3) | Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya | | Rp | 41.093.513.250 |
| 4) | Aset Tetap tidak memenuhi kriteria | | Rp | 310.179.967.724 |
| 5) | Koreksi Lebih Catat | | Rp | 32.551.474.060 |
| **Jumlah Pengurangan** | | | **Rp** | **548.794.043.581** |

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Mutasi Penambahan**

1) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp3.223.138.724.365,00 di antaranya:

- pembangunan jembatan penyebrangan orang di jalan Dukuh - Dewi Sartika, pembangunan jembatan penyebrangan orang jalan K.H Mas Mansyur, dan *manhole* pembangunan prasarana jaringan utilitas pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp935.791.326.502,00;
- pembangunan tanggul pengaman banjir, pembangunan pekerjaan jaringan pipa air limbah, dan pembangunan polder pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp809.975.738.993,00; dan
- saluran drainage, bangunan pelimpah sampah, dan embung/waduk lapangan pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp129.774.028.421,00.

2) Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp44.780.482.402,00 terdiri dari:
   a) Kapitalisasi dari Beban Jasa sebesar Rp6.934.778.649,00 di antaranya berupa:
      - biaya perencanaan pembangunan tempat pengolahan sampah (TPS3R) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.618.145.900,00;
      - belanja jasa saringan sampah di wilayah TB Simatupang pada Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp1.610.653.300,00; dan
      - biaya perolehan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu *(RDF Plan)* pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan total sebesar Rp1.338.594.090,00.
   b) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp25.900.891.129,00 di antaranya:
      - jembatan antar kampung dan jalan lingkungan sebesar Rp18.307.550.984,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat;
      - biaya pemeliharaan pekerjaan saluran di wilayah Jakarta Timur pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp5.728.062.200,00;
      - biaya pemeliharaan pekerjaan revitalisasi panel utama tegangan rendah sebesar Rp1.162.228.830,00 pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah; dan
      - biaya pemeliharaan sumur resapan reservoir (RO) sebesar Rp643.412.145,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

c) Kapitalisasi dari Belanja Persediaan berupa saringan sampah di wilayah TB Simatupang sebesar Rp11.944.812.624,00 pada Unit Penanganan Sampah Badan Air.

3) Pengadaan tahun sebelumnya yang tercatat sebagai Uang Muka berupa pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat (JSDP) sebesar Rp64.591.165.290,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

4) Pengadaan Tahun 2023 yang tercatat sebagai Beban Dibayar di Muka berdasarkan SE Sekda No.46/SE/2023 dan penyelesaian pekerjaannya dilakukan di Tahun 2024, sebesar Rp104.760.307.176,00 terdiri dari:
   - jaminan pembayaran Bank DKI untuk pekerjaan pembangunan polder, jaminan pembayaran PT Basuki R.P untuk pembangunan *breakwater*, dan jaminan pembayaran PT Nindya Beton untuk pembangunan cagar budaya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp102.706.862.403,00;
   - pekerjaan pembangunan rumah pompa pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp1.254.668.173,00; dan
   - pekerjaan pembangunan tempat pengolahan sampah (TPS3R) pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp798.776.600,00.

5) Pengadaan yang belum dibayarkan sebesar Rp21.538.828.641,00 di antaranya berupa:
   - pembangunan rumah pompa pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp11.713.768.380,00;
   - jalan provinsi dan biaya pengawasan jalan provinsi di wilayah Jakarta Selatan pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp7.115.548.934,00; dan
   - pembangunan pintu air kali Blencong & pembangunan pintu air pantai utara Marunda pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.709.511.327,00.

6) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp453.885.533.488,00 terdiri dari:
   a) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp275.148.675.230,00 di antaranya berupa:
      - Reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan berupa dermaga, jalan khusus lainnya, dan bak penampung kolam pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp96.098.301.071,00;

- Reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan berupa jalan khusus kompleks, sumur dengan pompa (bangunan pengambilan pengembangan sumber air), instalasi air buangan domestik kapasitas sedang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp66.010.600.663,00; dan
- Instalasi pengolahan sampah organik sistem pembakaran yang sebelumnya tercatat sebagai Peralatan dan Mesin sebesar Rp 7.364.211.968,00 dan instalasi pengolahan sampah organik sistem pembakaran yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.105.402.441,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

b) Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan sebesar Rp178.736.858.258,00 di antaranya:
- reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa pekerjaan pembangunan polder, pembangunan infrastruktur Pulau Cagar Budaya, dan pembangunan *breakwater* pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp143.824.675.175,00;
- reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa pembangunan dermaga pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebesar Rp 22.104.952.070,00; dan
- reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa pembangunan tempat pengelolaan sampah (TPS 3R) pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp12.661.976.013,00.

7) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp598.029.442.568,00 terdiri dari:
a) Reklasifikasi dari Rusak Berat berupa bangunan penampung air baku sebesar Rp46.259.550,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah; dan
b) Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum berupa jalan provinsi arteri, jalan provinsi lokal, instalasi pengolahan sampah non organik daur ulang non logam dan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan lainnya sebesar Rp597.983.183.018,00 pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

8) Koreksi kurang catat sebesar Rp9.501.980.434,00 terdiri dari:
a) Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp23.093.293,00 terdiri dari kurang catat nilai berupa pemeliharaan dermaga Pulau Untung Jawa

pada Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan kurang catat nilai berupa instalasi pengolahan sampah non organik daur ulang non logam pada Unit Pengelola Sampah Terpadu; dan

b) Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp9.478.887.141,00 di antaranya berupa:
   - Koreksi kurang catat barang berupa tempat pengolahan sampah *(RDF Plan)* Rorotan pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan total sebesar Rp4.372.585.260,00;
   - Koreksi kurang catat barang berupa bangunan hydrant umum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.019.366.600,00; dan
   - Koreksi kurang catat barang berupa jalan untuk pejalan kaki atau motor yang berlokasi di samping Gedung PPOP pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar sebesar Rp884.926.491,00.

**b. Mutasi Pengurangan**

1) Penghapusan sebesar Rp1.051.485.490,00 terdiri dari:
   - instalasi pengolahan sampah organik Dipo Tebet dan instalasi pengolahan sampah organik Dipo Cilincing sesuai SK Penghapusan No. 5 Tahun 2024 sebesar Rp603.710.680,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; dan
   - bangunan penampung air baku sesuai dengan SK Penghapusan No. 142 Tahun 2024 sebesar Rp447.774.810,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp163.917.603.057,00 di antaranya:
   - *submersible pump, genset,* dan *rail lifter* ke peralatan dan mesin dengan total sebesar Rp49.974.334.995,00 dan tanaman keras pohon tabebuya ke aset tetap lainnya sebesar Rp316.899.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
   - *stationary water pump* dan *genset* ke peralatan dan mesin dengan total sebesar Rp23.634.359.532,00, rumah panel ke Gedung dan bangunan sebesar Rp4.613.656.761,00, dan tanaman keras ke aset tetap lainnya sebesar Rp2.624.182.500,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
   - rumah pompa ke konstruksi dalam pengerjaan dengan total sebesar Rp29.211.077.355,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur.

3) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp41.093.513.250,00 terdiri dari:
   a) Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp16.115.243.250,00 di antaranya:
      - bangunan hydrant umum, sumur resapan, instalasi buangan besar air domestik, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp15.437.447.546,00;
      - instalasi air buangan kapasitas sedang pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp251.500.000,00; dan
      - bangunan pengambilan dari sumber air dan bangunan penampung air baku dengan total sebesar Rp190.161.550,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah.
   b) Reklasifikasi Ke Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya berupa jaringan rumah tangga sebesar Rp1.752.000.000,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
   c) Reklasifikasi Ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset berupa jaringan listrik tegangan 300KVA sebesar Rp23.226.270.000,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
4) Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria atas Belanja Modal sebelum Tahun 2024 dan direklasifikasi ke Beban sebesar Rp310.179.967.724,00 terdiri dari:
   a) Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2024) ke Beban Barang sebesar Rp310.087.153.724,00 yang terdiri dari:
      - sumur resapan sebesar Rp307.638.733.444,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
      - bangunan tempat menampung sampah lingkungan pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp2.301.863.100,00; dan
      - jaringan distribusi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp146.557.180,00.
   b) Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2024) ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp92.814.000,00 terdiri dari :
      - biaya pemeliharaan jalan Karet Pasar Baru Timur I, jalan Karet Pasar Baru Timur II, dan jalan Karet Pasar Baru Timur III dengan total sebesar Rp89.817.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan

- biaya pemeliharaan mesin RO (Reverse Osmosis) di Pulau Onrust dan Pulau Cipir sebesar Rp2.997.000,00 pada Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta.

5) Koreksi lebih catat karena pencatatan ganda sebesar Rp32.551.474.060,00 terdiri dari :
   - instalasi pusat pengatur listrik kapasitas besar sebesar Rp29.163.695.000,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
   - saluran sekunder (bangunan pembawa irigasi sebesar Rp3.019.779.060,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
   - bangunan pengambilan dari air laut sebesar Rp368.000.000,00 pada Kelurahan Pulau Kelapa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

#### 5.3.1.4.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.114.104.352.668,00 dan Rp1.388.435.196.833,00. Selama Tahun 2024 mutasi penambahan sebesar Rp99.331.273.130,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp373.662.117.295,00 dengan rincian sebagai berikut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a. Mutasi Penambahan** | | | |
| 1) | Belanja Modal TA 2024 yang menjadi Aset Tetap terdiri dari: | Rp | 85.633.503.655 |
| | a) Belanja Modal TA 2024 | Rp | 119.496.671.697 |
| | b) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap | Rp | (33.863.168.042) |
| 2) | Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Rp | 179.367.606 |
| 3) | Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya | Rp | 9.223.614.254 |
| 4) | Reklasifikasi dari Aset Lainnya | Rp | 1.295.062.203 |
| 5) | Kapitalisasi dari Belanja Barang | Rp | 22.497.660 |
| 6) | Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan | Rp | 2.977.227.752 |
| **Jumlah Penambahan** | | **Rp** | **99.331.273.130** |
| **b. Mutasi Pengurangan** | | | |
| 1) | Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya | Rp | 14.867.755.351 |
| 2) | Reklasifikasi ke Aset Lainnya | Rp | 263.673.955.661 |
| 3) | Aset Tetap tidak memenuhi kriteria | Rp | 95.070.537.658 |
| 4) | Koreksi Lebih Catat Nilai | Rp | 49.868.625 |
| **Jumlah Pengurangan** | | **Rp** | **373.662.117.295** |

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Mutasi Penambahan**

1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp85.633.503.655,00 di antaranya:
   - bahan perpustakaan berupa buku ilmu pengetahuan umum, buku referensi, buku monograf dan Aset Tetap Lainnya pada Dinas

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp75.576.846.895,00;

- bahan perpustakaan berupa buku ilmu pengetahuan umum, buku monograf, dan audio visual berupa pasangan suara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.461.630.569,00; dan
- barang bercorak kesenian berupa alat musik modern/band dan alat musik tradisional/daerah pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp1.647.783.000,00.

2) Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp179.367.606,00 merupakan perolehan Aset Tetap dari instansi di luar Pemprov DKI Jakarta di antaranya:
   - bahan perpustakaan berupa buku *Ensyclopedia,* Kamus, Buku Referensi, buku ilmu pengetahuan umum, buku umum dan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Yayasan Bank Indonesia dan telah diserahkan kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp81.666.200,00;
   - bahan perpustakaan berupa buku ilmu pengetahuan, buku *Ensyclopedia,* Kamus, Buku Referensi, dan buku fiksi yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan telah diserahkan kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp31.206.400,00; dan
   - bahan perpustakaan berupa buku ilmu pengetahuan umum, buku *Ensyclopedia,* Kamus, Buku Referensi dan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Yayasan Bank Indonesia dan telah diserahkan kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp26.813.675,00.
3) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.223.614.254,00 dari Belanja Modal APBD di antaranya:
   - tanaman keras berupa pohon tabebuya kuning sebesar Rp2.624.182.500,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat;
   - tanaman keras berupa pohon tabebuya kuning dan tanaman hias *bougenvile* pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp1.933.140.000,00; dan
   - tanaman keras berupa pohon tabebuya kuning dan pohon kayu putih sebesar Rp1.352.241.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara.

4) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp1.295.062.203,00 terdiri dari:
   a) Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat dilakukan berdasarkan pendalaman PD/UPD bahwa Aset Rusak Berat tersebut masih dapat digunakan kembali berupa aset tetap lainnya dalam renovasi sebesar Rp593.883.364,00 pada Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
   b) Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum berupa permainan dan alat olahraga sebesar Rp701.178.839,00 pada Badan Pengelolaan Aset Daerah.
5) Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp22.497.660,00 terdiri dari:
   - bahan perpustakaan buku kimia sebesar Rp21.800.000,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu; dan
   - peta benua sebesar Rp697.660,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
6) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan berupa Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi sebesar Rp2.977.227.752,00 pada Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin.

**b. Mutasi Pengurangan**

1) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp14.867.755.351,00 di antaranya:
   - reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa biaya renovasi ruang data center atas gedung Blok G dan Blok B dan ruang kerja UP JSC pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp8.014.957.446,00;
   - reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa taman semi permanen sebesar Rp1.652.736.833,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
   - reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa alat musik tradisional/daerah dan alat musik modern/band pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp1.647.783.000,00.
2) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp263.673.955.661,00 terdiri dari:
   a) Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp259.117.339.399,00 di antaranya:
      - bahan perpustakaan berupa buku etnografi, cerita rakyat, buku fisika dan mekanika, buku kimia, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp58.382.164.098,00;

- bahan perpustakaan berupa buku pengetahuan bahasa inggris, buku matematika, buku ilmu pengetahuan umum, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp45.771.757.248,00; dan
- reklasifikasi ke Aset Rusak Berat bahan perpustakaan berupa buku laporan penelitian, buku ekonomi, buku pendidikan, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp41.227.996.557,00.

b) Reklasifikasi Ke Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya berupa Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp4.556.616.262,00.

3) Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria atas Belanja Modal sebelum Tahun 2024 dan direklasifikasi ke Beban sebesar Rp95.070.537.658,00 terdiri dari:

a) Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2024) ke Beban Barang sebesar Rp94.754.888.384,00 di antaranya:
   - bahan perpustakaan berupa buku ilmu pengetahuan umum, buku agama Islam, buku pengetahuan bahasa Indonesia, dan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp23.878.551.570,00;
   - bahan perpustakaan berupa buku pengetahuan bahasa inggris, buku ilmu pengetahuan umum, ensyclopedia, kamus, buku referensi, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp14.595.552.238,00; dan
   - bahan perpustakaan berupa *ensyclopedia*, kamus, buku referensi, buku ilmu pengetahuan umum, buku bitani, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp10.129.521.939,00.

b) Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2024) ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp315.649.274,00 di antaranya:
   - tanaman hias pewarna alami sebesar Rp96.836.805,00 pada Unit Museum Seni;
   - tanaman hias rumput gajah sebesar Rp95.356.256,00 pada Kelurahan Semper Barat; dan
   - tanaman hias pucuk dan tanaman rumput gajah pada Kelurahan Marunda dengan total sebesar Rp32.469.250,00.

4) Koreksi Lebih Catat Nilai berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi sebesar Rp49.868.625,00 pada Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara.

#### 5.3.1.4.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.463.525.049.578,00 dan Rp2.516.920.525.377,00. Selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp2.762.076.011.937,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp815.471.487.736,00 dengan rincian sebagai berikut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a. Mutasi Penambahan** | | | |
| 1) | Belanja Modal Tahun 2024 yang menjadi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan, terdiri dari: | Rp | 2.215.625.202.382 |
| | a) Belanja Modal Tahun 2024 yang masih dalam proses pengerjaan | Rp | 2.288.369.743.420 |
| | b) Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka | Rp | (71.168.705.446) |
| | c) Belanja Modal atas pekerjaan kontraktual belum selesai dengan mekanisme RPBATA | Rp | (1.242.459.446) |
| | d) Pengembalian Belanja Modal atas Temuan, Klaim, Bank Garansi dan Koreksi Lainnya | Rp | (333.376.146) |
| 2) | Reklasifikasi dari Aset Tetap selain KDP | Rp | 546.450.809.555 |
| **Jumlah Penambahan** | | **Rp** | **2.762.076.011.937** |
| **b. Mutasi Pengurangan** | | | |
| 1) | Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah/ Peralatan dan Mesin/ Gedung dan Bangunan/ Jalan Irigasi dan Jaringan/ Aset Tetap Lainnya | Rp | 811.042.744.078 |
| | a) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP atas penyelesaian pekerjaan pada Tahun 2024 | Rp | 771.798.662.184 |
| | b) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP atas penyelesaian pekerjaan sebelum Tahun 2024 | Rp | 39.244.081.894 |
| 2) | Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan - LO | Rp | 3.958.243.918 |
| 3) | Reklasifikasi Ke Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah | Rp | 470.499.740 |
| **Jumlah Pengurangan** | | **Rp** | **815.471.487.736** |

Adapun rincian penambahan dan pengurangan KDP dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Mutasi Penambahan**

1) Belanja Modal Tahun 2024 yang menjadi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.215.625.202.382,00 di antaranya:

- perencanaan pembangunan *sitepile* dan pembangunan RDF di Provinsi DKI Jakarta, pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan total sebesar Rp1.172.239.418.835,00;
- pembangunan sistem hidran Balaikota, pekerjaan penggantian dan pemasangan mesin pendingin AHU Blok G Balaikota, pembangunan gedung PMI DKI Jakarta, Perencanaan anjungan

Taman Mini dan perencanaan pembangunan rumah negara golongan I Tipe A pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp324.062.784.393,00; dan

- pekerjaan konstruksi pembuatan polder Sunter Greenville, pekerjaan pompa vertikal kapasitas 2000, pembangunan tanggul pengaman pantai, dan pembangunan lainnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp281.524.498.644,00.

2) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain KDP sebesar Rp546.450.809.555,00 di antaranya:

- reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan berupa uang muka rehab total, jasa konsultan dan pengawasan pembangunan sekolah sebelum Tahun 2024 dengan total sebesar Rp493.772.067.162,00 pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa pembangunan rumah pompa stasioner untuk saluran penghubung (PHb) Cipa (Cililitan Kebon Pala) sebesar Rp29.211.077.355,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan berupa Jasa Konsultansi Perencanaan x-1 Rehab Total Pembangunan Puskesmas Penggilingan, Jasa Konsultansi Perencanaan x-1 Rehab Total Pembangunan Puskesmas Kelurahan Gedong, Jasa Konsultansi Perencanaan x-1 Rehab Total Pembangunan Puskesmas Kecamatan Matraman, Jasa Konsultansi Perencanaan x-1 Pembangunan PKM Kelurahan Kayu Putih, dan Jasa Konsultansi Perencanaan x-1 Rehab Berat Gedung Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp10.536.782.650,00 pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur.

**b. Mutasi Pengurangan**

1) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP sebesar Rp811.042.744.078,00 terdiri dari:

a) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP atas penyelesaian pekerjaan pada Tahun 2024 sebesar Rp771.798.662.184,00 di antaranya:

- bangunan Gelanggang Remaja Wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan GOR Cakung Barat sebesar Rp224.645.013.331,00

pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;

- bangunan polder kolam retensi, bangunan pengaman pulau cagar budaya I, bangunan *breakwater* Jakarta Utara, dan pengawasan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan total sebesar Rp143.824.675.175,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
- biaya perencanaan, pengawasan, pemagaran dan konstruksi rehab berat bangunan sekolah di Provinsi DKI Jakarta total sebesar Rp126.947.803.846,00 pada Unit Pengelola Prasarana Dan Sarana Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

b) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP atas penyelesaian pekerjaan sebelum Tahun 2024 sebesar Rp39.244.081.894,00 di antaranya:

- biaya perencanaan, pengawasan, pemagaran dan konstruksi rehab berat bangunan sekolah di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp14.417.799.017,00 pada Unit Pengelola Prasarana Dan Sarana Pendidikan Provinsi DKI;
- pekerjaan trotoar jalan tembus Lebak Bulus I-III Tahun 2022, pekerjaan saluran drainase jalan tembus Lebak Bulus I-III Tahun 2022, biaya pelayanan pendaftaran pelepasan Hak Sebagian dan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang, biaya konsultasi dan appraisal pembebasan tanah, biaya pembuatan akta pelepasan hak PPAT/Notaris, inventarisasi dan pembebasan tanah jalan akses menuju Rusun Pulo Gebang dengan total nilai sebesar Rp11.743.397.483,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
- jasa konsultan perencanaan pembangunan Kelurahan Kamal Muara, jasa konsultan perencanaan pembangunan Kelurahan Kelapa Gading, jasa konsultan perencanaan pembangunan Kelurahan Pademangan Barat, jasa konsultan perencanaan pembangunan Kelurahan Tugu Selatan, jasa konsultan perencanaan pembangunan Kelurahan Tanjung Priok, jasa konsultan perencanaan pembangunan Kelurahan Cilincing dan jasa konsultan perencanaan pembangunan Kelurahan Rawa Badak Selatan dengan total sebesar Rp7.213.721.460,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Kota Administrasi Jakarta Utara.

2) Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.958.243.918,00 di antaranya:

a) jasa konsultan perencanaan gedung parkir Dinas Teknis Abdul Muis, perancangan dasar Rusun Terminal Pulo Gadung, perancangan dasar Rusun Rawa Kerbau, perancangan dasar Rusun BLK Pasar Rebo dengan total sebesar Rp2.214.898.707,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
b) perencanaan gedung Jakarta Islamic Center dan perencanaan Masjid Raya Jakarta Timur dengan total sebesar Rp634.172.000,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; dan
c) biaya perencanaan peningkatan Taman Teluk Ratai Kelurahan Kelapa Gading Barat, biaya perencanaan peningkatan Raman Lontar Kelurahan Tugu Utara, Biaya Perencanaan RTH Makam TPU Jembatan Sampi, biaya perencanaan peningkatan RTH Taman Rorotan dengan total sebesar Rp324.632.441,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara.

3) Reklasifikasi Ke Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp470.499.740,00 di antaranya:
a) Jasa perencanaan rehab Kantor Camat Tambora dan jasa perencanaan rehab Kantor Camat Cengkareng dengan total sebesar Rp392.122.640,00 pada Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
b) Jasa perencanaan Masjid dan Rusun Pegadungan dengan total sebesar Rp78.377.100,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

Dari nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.463.525.049.578,00 termasuk progres fisik per 31 Desember 2024 atas pekerjaan dengan mekanisme RPBATA sebanyak 35 paket pekerjaan sebesar Rp110.330.249.046,00 yang telah diselesaikan pada Tahun 2025.

#### 5.3.1.4.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015 dengan mekanisme perhitungan penyusutan sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyusutan Aset Tetap Pertama Kali. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dengan masa manfaat Aset Tetap yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp83.920.518.130.702,00 dan Rp82.370.545.608.448,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.71
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| Aset Tetap | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Beban Penyusutan (Rp) | Koreksi Penyusutan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) |
| Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peralatan dan Mesin | 26.998.498.994.240 | 2.184.267.229.896 | 5.224.337.070.112 | 23.958.429.154.024 |
| Gedung dan Bangunan | 24.426.328.768.702 | 1.897.876.424.755 | 344.012.937.258 | 25.980.192.256.199 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 30.843.293.737.787 | 3.094.384.341.814 | 54.776.521.218 | 33.882.901.558.383 |
| Aset Tetap Lainnya | 102.424.107.719 | 3.182.155.730 | 6.611.101.353 | 98.995.162.096 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | **82.370.545.608.448** | **7.179.710.152.195** | **5.629.737.629.941** | **83.920.518.130.702** |

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp593.738.923.386.046,00 dengan rincian sebagai berikut.

| Aset Tetap | 31 Desember 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
| Tanah | 527.255.442.881.924 | 0 | 527.255.442.881.924 |
| Peralatan dan Mesin | 30.462.326.362.242 | 23.958.429.154.024 | 6.503.897.208.218 |
| Gedung dan Bangunan | 48.454.852.796.405 | 25.980.192.256.199 | 22.474.660.540.206 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 65.909.190.073.931 | 33.882.901.558.383 | 32.026.288.515.548 |
| Aset Tetap Lainnya | 1.114.104.352.668 | 98.995.162.096 | 1.015.109.190.572 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 4.463.525.049.578 | 0 | 4.463.525.049.578 |
| **Jumlah** | **677.659.441.516.748** | **83.920.518.130.702** | **593.738.923.386.046** |

#### 5.3.1.4.8 Catatan Penting atas Aset Tetap

**a. Tindak Lanjut Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)**

Inventarisasi merupakan aktivitas utama di antara aktivitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 telah menetapkan hasil inventarisasi Aset Tetap.

Atas barang hasil inventarisasi yang belum teridentifikasi dan/atau tidak ditemukan dapat disajikan dengan rincian sebagai berikut.

| No | Jenis Aset | Jumlah | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanah (KIB A) | 1.579 | 5.615.338.906.505 |
| 2 | Peralatan dan Mesin (KIB B) | 82.808 | 851.562.576.411 |
| 3 | Gedung dan Bangunan (KIB C) | 1.379 | 448.767.327.264 |
| 4 | Jalan. Irigasi dan Jaringan (KIB D) | 1.749 | 3.566.831.360.592 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya (KIB E) | 65.204 | 82.836.736.335 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) | 39 | 2.041.504.137 |
| **Jumlah** | | **152.758** | **10.567.378.411.244** |

Menindaklanjuti hasil inventarisasi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pendalaman dan penyelesaian yang menghasilkan dua tindak lanjut, yaitu dilakukan koreksi atau dicatat sebagai Aset Lain-lain Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA).

Sampai dengan Tahun 2024 telah dilakukan penyelesaian atas hasil inventarisasi 2018 melalui pelaksanaan sidang Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) sebesar Rp2.638.160.906.804,00 diantaranya sebagaimana tercantum dalam peraturan berikut ini:

- SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1666 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tanah Yang Tidak di Temukan Fisiknya;
- SK Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor;
- SK Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan;
- SK Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor;
- SK Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor; dan
- SK Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2022 Perubahan dari SK Sekda Nomor 32 Tahun 2021 tentang penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor.

Selain itu, dari hasil pendalaman dan penelusuran kembali, terdapat barang yang ditemukan sehingga dilakukan reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp4.891.030.047.462,00.

Selama kurun waktu 2019 s.d 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan inventarisasi sehingga terdapat penambahan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) sebesar Rp3.017.513.401.537,00, sehingga saldo Aset Dalam Proses Penyelesaian

Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp6.055.700.858.515,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Jenis Aset | Jumlah | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanah (KIB A) | 734 | 2.253.216.195.700 |
| 2 | Peralatan dan Mesin (KIB B) | 148.981 | 2.101.022.521.216 |
| 3 | Gedung dan Bangunan (KIB C) | 791 | 547.656.940.860 |
| 4 | Jalan. Irigasi dan Jaringan (KIB D) | 3.253 | 1.128.652.852.566 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya (KIB E) | 30.665 | 23.377.560.089 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) | 30 | 1.774.788.084 |
| **Jumlah** | | 184.454 | 6.055.700.858.515 |

**b. Pengungkapan Pelaksanaan Inventarisasi atas Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 – 2027, dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2024.

Sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah tersebut yang merupakan objek inventarisasi adalah Peralatan dan Mesin yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2024, serta melakukan 4 tahapan dalam pelaksanaan inventarisasi yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahap tindaklanjut.

Sampai Tahun 2024 kegiatan inventarisasi barang milik daerah telah selesai dilaksanakan dan diteruskan dengan pendataan dan pendalaman hasil inventarisasi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

**c. Pelaksanaan Penanganan Aset Tanah dan/atau Bangunan Bermasalah**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan atensi khusus berkaitan dengan penanganan tanah dan/atau bangunan bermasalah milik Provinsi DKI Jakarta yang berada dalam penguasaan SKPD/UKPD (tercatat dalam KIB A SKPD/UKPD) atau berada dalam pengelolaan Pengelola Barang (tercatat atau belum tercatat dalam KIB A Pengelola Barang) yang dikuasai/diklaim/disomasi/diadukan pihak lain/sedang berproses/telah berproses di pengadilan, termasuk tanah fasos fasum yang bermasalah.

Penanganan tanah dan/atau bangunan bermasalah bertujuan untuk:

1) Membangun *database* tanah dan/atau bangunan bermasalah;
2) Mengetahui perkembangan tanah dan/atau bangunan bermasalah; dan
3) Melaksanakan tindak lanjut tanah dan/atau bangunan bermasalah.

Tanah Bermasalah yang sedang berproses di Pengadilan di antaranya sebagai berikut:

| No | Alamat | Wilayah | SKPD/UKPD/ Pihak Lain | Upaya/Progres | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taman Asuhan Anak Pertiwi Jl. A.M. Sangaji No.21. Petojo Utara | Jakarta Pusat | Dinas Sosial | 1. Sertifikat No.92/Desa Petojo Utara a.n. Pemda DKI Jakarta<br>2. digugat oleh Ny. Aminah binti Mochammad Thalib | Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara |
| 2 | Lapangan Bola Tondano Jl. Danau Tondano. Bendungan Hilir. Tanah Abang | Jakarta Pusat | Dinas Olahraga dan Pemuda | 1. SHP No.389 a.n Pemda DKI Jakarta<br>2. digugat oleh ahli waris Pangean Aria Jipang dengan dasar Verponding No.6651 | Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara |
| 3 | Aset Taman Kota Rawasari Jl. Jenderal Ahmad Yani. Kelurahan Rawasari. Kecamatan Cempaka Putih | Jakarta Pusat | Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat | 1. Diadukan oleh Djuremi ke PN<br>2. Fisik telah dikuasai;<br>3. Telah dipasangkan papan nama tanah;<br>4. Belum bersertifikat. | Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara |
| 4 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 38 Jakarta Jl. Karet Pasar Baru Timur. Kelurahan Karet Tengsin. Kecamatan Tanah Abang | Jakarta Pusat | Sudin Pendidikan 2 | 1. Diadukan oleh ahli waris Alm Moch Muktar ke PN<br>2. Fisik telah dikuasai;<br>3. Telah dipasangkan papan nama tanah;<br>4. Keputusan PN Pemerintah Provinsi menang<br>5. Belum bersertifikat. | Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara |
| 5 | Tanah Kosong Jl.Yos Sudarso No.19. Sungai Bambu. Tanjung Priok. Jakarta Utara. | Jakarta Utara | | 1. Diadukan oleh Darianus Lungguk Sitorus ke PN<br>2. Belum dipasangi papan nama tanah;<br>3. Telah bersertifikat. SHP no.538/Sungai Bambu an. Pemda DKI Jakarta | Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara |
| 6 | Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok (Samping Kodim 0502/JU) | Jakarta Utara | PPAD | Hasil koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan upaya banding kembali. Dalam amar putusan tidak menyebutkan siapa pemilik tanah tersebut dan hanya membatalkan sertifikatnya saja. untuk selanjutnya dari Biro Hukum akan mengajukan upaya hukum lainnya | Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara |
| 7 | Jl. Assakinah Raya RT. 03 RW. 02 Kel. Kebagusan. Kec. Pasar Minggu | Jakarta Selatan | Sudin Pendidikan 2 | Dikuasai IR. Agus Bakri Bin H. Bakri | Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara |
| 8 | Taman Marga Satwa Ragunan. Jalan Harsono No. 1 Ragunan. Pasar Minggu. Jakarta Selatan | Jakarta Selatan | UPT TMR Ragunan | Digugat Ir. Alimin Abdullah | Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara |
| 9 | Kav. Cermai RT. 004 RW.03 Ke. Petukangan Utara. Kec. Pesanggrahan. Jakarta Selatan | Jakarta Selatan | PPAD | 1. PN Jaksel Menolak kasasi dari Panggabean-menang NO (Niet Ontvankelijke atau merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dari cacat Formal<br>2. Digugat oleh Wayan Denada dan masih berlangsung di PN Jaksel | Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara |

| No | Alamat | Wilayah | SKPD/UKPD/ Pihak Lain | Upaya/Progres | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Saat ini plang aset diduga dirusak oleh Ali Said Bin Tinggal<br>4. Kepala BPAD agar bersurat ke Biro Hukum untuk melaporkan ke Polisi atas dugaan pengerusakan Plang Aset.<br>5. lokasi tersebut agar segera dibuatkan SK Penggunaan untuk SKPD | |
| 10 | Jl. Delman Elok VI. Kp. Peninggaran RT. 007 RW.011 Kel. Kebayoran Lama Utara. Kec. Kebayoran Lama | Jakarta Selatan | Dinas Kehutanan | Digugat Niharoh dkk | Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara |
| 11 | eks. Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jl. Rambutan RT. 02 RW. 04 Kel. Pejaten Barat. Kec. Pasar Minggu. Kota Administrasi Jakarta Selatan | Jakarta Selatan | BPAD/PPAD | Digugat oleh M. Yazid | Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara |
| 12 | Jl. Lenteng Agung Raya. Kel. Lenteng Agung. Kec. Jagakarsa. Kota Administrasi Jakarta Selatan | Jakarta Selatan | Dinas Kehutanan | digugat oleh R. Ivone Felicia | Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara |
| 13 | Jl. Cikoko Barat I RT. 001 RW.05. Kel.Cikoko. Kec. Pancoran | Jakarta Selatan | - | Digugat oleh Masyarakat. Dikuasai Fauzi untuk kandang sapi | Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara |
| 14 | Jl. Cipinang Muara III Rt. 09/015 | Jakarta Timur | - | Digugat Hj. Eliya Kurniawati | Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara |
| 15 | Kel. Bidara Cina (Sodetan Kali Ciliwung) | Jakarta Timur | - | Proses PTUN dan Dikuasai masyarakat | Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara |
| 16 | Jl. Bambu Kuning Rt. 012/002 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung | Jakarta Timur | Dinas KPKP | - | Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara |

**d. Aset Konsesi Jasa**

Berdasarkan PSAP 16 Konsesi Jasa adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penugasan pembangunan aset kepada beberapa BUMD dalam rangka penyediaan layanan kepada publik, sebagaimana daftar berikut.

| No | Aset Penugasan | BUMD |
|---|---|---|
| 1 | *Light Rapid Transit* (LRT) | PT Jakarta Propertindo |
| 2 | Jakarta International Velodrome | PT Jakarta Propertindo |
| 3 | Jakarta International Equestrian Park (JIEP) | PT Jakarta Propertindo |
| 4 | Jakarta International Stadium (JIS) | PT Jakarta Propertindo |
| 5 | Taman Ismail Marzuki | PT Jakarta Propertindo |
| 6 | MRT | PT MRT Jakarta |

Berdasarkan PSAP 16, maka terdapat 2 (dua) penugasan yang berpotensi memenuhi kriteria Aset Perjanjian Konsesi Jasa, yaitu LRT pada PT Jakarta Propertindo dan MRT pada PT MRT Jakarta. Menindaklanjuti hal tersebut saat ini masih dilakukan kajian atas penugasan LRT pada PT Jakpro. Atas penugasan pada PT MRT Jakarta telah dilakukan penelitian dengan hasil sebagai berikut:

1) Berdasarkan hasil audit KAP atas Laporan Keuangan PT MRT, aset penugasan tersebut tidak disajikan sebagai Aset Perjanjian Konsesi Jasa sesuai dengan ISAK 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa, melainkan disajikan sebagai Aset Tetap BUMD.
2) Tidak ada intensi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi PT MRT untuk menyerahkan Aset Penugasan.
3) Perlu ada penyelarasan berdasarkan ketentuan di antaranya Perda No. 9 Tahun 2019, Perjanjian Penyelenggaraan tahun 2017 dan Pergub No. 29 tahun 2020.

**e. Pengungkapan Lainnya**

1) Aset ex. UP Transjakarta Busway

   Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 tersebut termasuk aset ex. UP Transjakarta Busway yang saat ini masih dicatat sebagai aset Dinas Perhubungan dari masih menunggu Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan Aset Tetap. Proses penilaian atas aset inbreng kepada BUMD PT Transjakarta telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 797 Tahun 2019 tentang Rincian Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Aset Tetap Pada PT Transportasi Jakarta.

   Untuk masa transisi telah diterbitkan Pergub No. 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Keputusan Gubernur Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta dengan ketentuan Menetapkan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh PT Transjakarta, berupa lahan depo, halte dan sarana pendukung, bangunan gedung kantor, sarana penunjang dan inventaris kantor, kendaraan dinas operasional dan bus. Pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan penyerahan Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal (inbreng). PT Transjakarta dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau

mengubah peruntukannya tanpa seizin tertulis Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2) Aset dalam Permasalahan Hukum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menyelesaikan perkara hukum terkait aset tanah, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

Monitoring atas klaim/gugatan atas tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

| No | Perkara Pada Tingkat | Menang | Kalah | Proses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadilan Negeri | 18 | 6 | 10 | 34 |
| 2 | Pengadilan Tinggi | 14 | 5 | 6 | 25 |
| 3 | Mahkamah Agung (Kasasi) | 6 | 3 | 8 | 17 |
| 4 | Mahkamah Agung (PK) | 5 | 4 | 7 | 16 |
| | **JUMLAH** | **43** | **18** | **31** | **92** |

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengamanan atas tanah dalam sengketa tersebut, antara lain melalui pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah.

Permasalahan atas sengketa tanah lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Permasalahan Tanah Aset di Kelurahan Meruya Selatan

Bidang tanah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Kelurahan Meruya Selatan yang diklaim oleh PT Portanigra telah diterbitkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 132/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brt tanggal 20 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2009/PTDKI tanggal 10 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 585 PK/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014 yang amarnya antara lain menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp291.422.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dan ganti rugi imateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada PT Portanigra.

Atas Putusan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan *Aanmaning* (teguran) Nomor 21/2012 Eks. jo. Nomor 132/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 untuk diberikan Aanmaning (teguran) melaksanakan 132/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brt tanggal 20 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2009/PTDKI tanggal 10 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 585 PK/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014.

Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta telah menghadiri Aanmaning (teguran) dimaksud, yang pada intinya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat menegur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) di mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada PT Portanigra sebesar Rp391.442.000.000,00.

Terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak dengan alasan di dalam Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan No. 10/2007 Eks. Jo. No. 161/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 10 Maret 2016 dan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan No. 11/2007 Eks. Jo. No. 364/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 10 Maret 2016, pada intinya menyebutkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melaksanakan eksekusi pada tanggal 10 Maret 2016 dan ditetapkan bahwa atas tanah yang di atasnya terdapat objek-objek yang dipergunakan sebagai fasos dan fasum milik Pemerintah serta fasos dan fasum lainnya yang dipergunakan sebagai tempat ibadah, tidak dilaksanakan eksekusi dan/atau dikeluarkan dari objek eksekusi. Selain itu, terkait ganti rugi materiil dan imateriil kepada PT Portanigra sebesar Rp391.442.000.000,00 tidak dapat dilakukan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap sebagai pemilik tanah aset berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 500/PDT/2009/PT.DKI tanggal 16 Desember 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 168/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar

tanggal 11 Oktober 2007, di mana putusan ini tidak pernah dibatalkan sehingga masih berlaku.

b) Permasalahan Tanah Pengadaan Lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Terhadap permasalahan pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) telah memberikan jawaban melalui surat Nomor 07/YKSW/IX/2017 tanggal 14 September 2017 perihal Jawaban Atas Permintaan Pemulihan Indikasi Kerugian Daerah yang menyatakan bahwa Yayasan Kesehatan Sumber Waras menolak untuk membayar kerugian daerah tersebut.

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas pada lahan yang dibeli tersebut, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengupayakan untuk berkoordinasi dan membuat kesepakatan untuk merealisasikan akses jalan bersama dari Jalan Kyai Tapa menuju lokasi tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

c) Tanah Aset Gedung dan Bangunan hasil penyerahan dari Pengembang Reklamasi Pada Tahun 2015, penerimaan aset gedung dan bangunan sebagai tambahan kontribusi reklamasi dari pengembang reklamasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berasal dari:

1. PT Muara Wisesa Samudera selaku Pengembang Pulau G, berupa bangunan Rusunawa Daan Mogot sebesar Rp89.655.700.000,00; dan
2. PT Jaladri Kartika Pakci selaku Pengembang Pulau I, berupa bangunan Rusunawa Muara Baru sebesar Rp90.539.800.000,00.

Terkait Reklamasi Pulau G, terdapat gugatan yang diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup diwakili oleh Gobang, Dkk sebagai Penggugat terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat dan PT Muara Wisesa Samudera sebagai Tergugat II Intervensi dengan objek sengketa Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah terbit Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tanggal 31 Mei 2016 jo. Putusan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/B/2016/PTTUN.JKT tanggal 17 Oktober 2016 yang amar putusannya menyatakan gugatan tidak

diterima, di mana selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan upaya hukum, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada dipihak yang menang dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tetap sah dan berlaku.

Sedangkan terkait dengan Reklamasi Pulau I, PT Jaladri Kartika Pakci telah mengajukan gugatan terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nomor 1049 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi, khususnya sepanjang menyangkut pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I atas nama PT Jaladri Kartika Pakci, dan telah diputus dengan register Putusan 32 PK/TUN/2021 tanggal 4 Maret 2021 jo Nomor 98/B/2020/PTUN-JKT tanggal 28 April 2019 jo Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2019, yang amar putusannya pada pokoknya menolak gugatan seluruhnya, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada dipihak yang menang dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1049 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tetap sah dan berlaku.

d) Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian menerima hibah tanah dari Kodam Jaya berdasarkan Berita Acara Serah Terima BAST Nomor B.A./005-Zi/II/1989 tanggal 15 Desember 1985. Tanah tersebut tercatat pada Kartu Inventaris Barang Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian seluas 60.000 m2 sebesar Rp76.440.000.000,00, berlokasi di Jalan Bambu Apus Raya (sekarang Jl. Mpok Nori) yang saat ini dimanfaatkan oleh BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan dan telah terbangun kantor usaha dan promosi peternakan, kantor laboratorium kesehatan masyarakat dan veteriner, bangunan mes dan gerai, gudang, kandang ternak dan Masjid Al Falah.

Pada tanah tersebut terdapat gugatan pengadilan dari R.E. Baringbing, S.H. & Ny. Sondang Siagian Baringbing. Yang bersangkutan mengklaim tanah yang merupakan Aset Tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 2.430 m2 yang terletak di Jalan Bambu Kuning RT. 012 RW. 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung (dahulu Kecamatan Pasar Rebo), Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 370 tertanggal

30 April 1990 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta dengan bukti hak Girik C Nomor 573 Persil 44 Blok D-II atas nama Gendul bin Miri.

Gugatan pengadilan tersebut terdiri dari dua register, yaitu:

1) Perkara Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim.
   a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Januari 2012, Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
   b) Putusan Tingkat Banding Nomor 598/PDT/2012/PT. DKI.
      Biro Hukum selaku kuasa Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (DKPKP) memohon upaya hukum banding yang telah diputus Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 598/PDT/2012/PT.DKI tanggal 6 Maret 2013 dengan putusan menguatkan putusan nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. Tingkat Kasasi Nomor 1934 K/Pdt/2014Perkara Nomor 217/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim.
      Atas putusan tersebut, Biro Hukum selaku kuasa Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (DKPKP) memohon upaya hukum banding yang telah diputus Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 598/PDT/2012/PT.DKI tanggal 6 Maret 2013 dengan putusan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
   c) Putusan PK Nomor 319 PK/Pdt/2021
      Atas putusan kasasi tersebut, Biro Hukum selaku kuasa DKPKP mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang telah diputus Mahkamah Agung RI Nomor 319 PK/Pdt/2021 tanggal 5 Mei 2021, yang amarnya Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali. Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada dalam posisi kalah.
2) Perkara Nomor 217/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim
   a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 217/PDT.G/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 1 November 2016 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

b) Putusan Tingkat Banding Nomor 267/PDT/2017/PT. DKI

Atas putusan tersebut, Biro Hukum selaku kuasa Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (DKPKP) memohon upaya hukum banding yang telah diputus Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor Nomor 267/PDT/2017/PT.DKI tanggal 10 Juli 2017, yang amarnya Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 217/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 1 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

c) Putusan Tingkat Kasasi 971 K/PDT/2018

Atas putusan banding tersebut, Biro Hukum selaku kuasa Kepala DKPKP memohon upaya hukum kasasi yang telah diputus Mahkamah Agung RI Nomor 971 K/PDT/2018 tanggal 25 Juni 2018 dengan putusan ditolak;

d) Putusan PK Nomor 525 PK/Pdt/2023

Atas putusan kasasi tersebut, Biro Hukum selaku kuasa hukum DKPKP mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang telah diputus Mahkamah Agung RI Nomor 525 PK/Pdt/2023, yang amarnya Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali.

Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan Perkara Nomor 217/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim merupakan Putusan Kondemnator (*dapat dieksekusi*) yang memerintahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembalikan/menyerahkan penguasaan atas tanah objek perkara, yang adalah kelanjutan dari Perkara Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang sebelumnya bersifat Deklarator (*tidak dapat dieksekusi*).

**f. Aset Bersejarah**

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sudah termasuk nilai bangunan-bangunan bersejarah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan di DKI Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, di antaranya adalah; Gedung Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Taman Prasasti, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bahari, Museum Tekstil, Museum Djoeang 45, Museum Taman Arkeologi, Gedung Eks KODIM 0505, Gedung Eks Imigrasi, Gedung Balai Konservasi, Gedung Kesenian,

Monumen Nasional, Jembatan Kota Intan, dan Museum M.H. Thamrin. Pencatatan Aset Bersejarah berupa gedung sebagai Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa untuk bangunan bersejarah yang digunakan dalam kegiatan operasional dan memberikan potensi manfaat, diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap.

Selain aset bersejarah yang sudah diputuskan dalam Surat Keputusan Gubernur di atas terdapat juga aset yang terindikasi bersejarah pada museum-museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1) Unit Pengelola Museum Seni mempunyai 3 Museum bersejarah yaitu:
   a) Museum Wayang memiliki 4.893 unit aset yang dikelompokkan dalam benda sejarah lainnya seperti wayang, pahatan kayu, barang kerajinan, lukisan, dan alat kesenian lain-lain;
   b) Museum Tekstil memiliki 1.075 unit aset yang dikelompokkan dalam benda sejarah lainnya seperti koleksi busana nusantara dan barang kerajinan seni;
   c) Museum Seni Rupa dan Keramik 1.860 unit aset yang dikelompokkan dalam benda sejarah lainnya berupa lukisan, keramik (guci), pahatan kayu, dan pahatan lain-lain.
2) Pusat Konservasi Cagar Budaya memiliki 1 unit aset berupa jangkar besi.
3) Unit Pengelola Taman Ismail Marzuki memiliki 6 unit aset berupa alat kesenian, dan karya seni (album foto dan partitur lagu).
4) Unit Pengelola Museum Kebaharian memiliki 155 unit aset berupa lukisan, benda-benda purbakala, dan benda-benda bersejarah lain-lain.
5) Unit Pengelola Museum Kesejarahan memiliki 256 unit aset berupa buku.
6) Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya memiliki 5 unit aset berupa bangunan bersejarah.
7) Unit Pengelola Monas memiliki 52 unit aset berupa Monumen Proklamator, Patung Diponegoro, dan karya seni (patung dan miniatur).

#### 5.3.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp37.263.185.897.518,00,00 dan Rp31.969.187.415.594,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.72

Aset Lainnya

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Aset Lainnya | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Tagihan Penjualan Angsuran** | **35.662.823.855** | **36.651.951.367** |
| **2.** | **Kemitraan dengan Pihak Ketiga (neto)** | **6.129.962.547.440** | **6.130.597.356.223** |
| | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 6.524.180.701.395 | 6.524.489.356.721 |
| | Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga | (394.218.153.955) | (393.892.000.498) |
| **3.** | **Aset Tidak Berwujud (neto)** | **163.211.933.228** | **96.967.954.202** |
| | Aset Tidak Berwujud | 715.084.977.785 | 634.599.864.666 |
| | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (551.873.044.557) | (537.631.910.464) |
| **4.** | **Aset Lain-lain (neto)** | **30.934.348.592.995** | **25.704.970.153.802** |
| | Aset Lain-lain | 43.707.111.197.345 | 33.076.672.679.419 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | (12.772.762.604.350) | (7.371.702.525.617) |
| | **Jumlah (1+2+3+4)** | **37.263.185.897.518** | **31.969.187.415.594** |

#### 5.3.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI kepada penghuni rusun yang melakukan pembelian unit rusun secara angsuran.

Pembelian unit rusun di bagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Pembelian unit rusun untuk warga terprogram diperuntukkan bagi warga yang terkena pembebasan lahan atau korban kebakaran yang mendapat ganti rugi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk pembelian terprogram apabila dilakukan secara angsuran maka akan dikenakan *rate* sebesar 5%.
b. Pembelian unit rusun tambahan untuk warga terprogram diperuntukkan bagi warga yang tanahnya terkena pembangunan unit rumah susun tersebut dengan luas tanah 50m$^2$ s.d 100m$^2$ yang akan mendapatkan hak pembelian 2 unit rusun dengan harga jual dikalikan 2 dari pembelian warga terprogram
c. Pembelian unit rusun untuk warga tidak terprogram merupakan warga yang tidak terekomendasi untuk mendapatkan unit rumah susun namun karena tidak memiliki tanah di lokasi tersebut sehingga membeli unit rusun dari orang yang melakukan pembelian terprogram. Harga jual untuk warga tidak terprogram dikalikan 3 dari pembelian warga terprogram karena sudah tidak disubsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada neraca merupakan tagihan penjualan angsuran rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang pada 31 Desember 2024 belum jatuh tempo. Untuk Tagihan Penjualan Angsuran yang sudah jatuh tempo akan disajikan di Neraca pada

Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah dan dibentuk penyisihan atas kualitas tagihan.

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp35.662.823.855,00 dan Rp36.651.951.367,00. Selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan yang berasal dari reklasifikasi dari bagian lancar ke tagihan penjualan angsuran sebesar Rp493.649.821,00 dan koreksi penambahan lainnya sebesar Rp313.788.471,00 serta mutasi pengurangan yang berasal dari pembayaran unit sebesar Rp1.115.326.810,00, pengurangan ke bagian lancar sebesar Rp642.770.638,00 dan koreksi pengurangan lainnya sebesar Rp38.468.356,00.

Tabel 5.73
Rincian Tagihan Penjualan Angsuran
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Nama Rusun | 31 Desember 2023 (Rp) | Penambahan dari Bagian Lancar (+) (Rp) | Koreksi Penambahan (+) (Rp) | Pembayaran (-) (Rp) | Pengurangan ke Bagian Lancar (-) (Rp) | Koreksi Pengurangan Lainnya (-) (Rp) | 31 Desember 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tambora III | 684.683.957 | - | - | 29.364.630 | 3.894.216 | - | 651.425.111 |
| 2 | Bendungan Hilir II | 2.966.389.918 | - | 38.432.166 | 51.325.588 | - | 552.231 | 2.952.944.265 |
| 3 | Jatibunder | 147.715.812 | - | - | - | - | - | 147.715.812 |
| 4 | Tanah Tinggi | 2.417.186.724 | - | 163.044.400 | 169.222.345 | - | 37.916.115 | 2.373.092.664 |
| 5 | Karet Tengsin I | 438.486.632 | - | 6.118.966 | 13.650.137 | - | - | 430.955.461 |
| 6 | Petamburan | 15.674.900.844 | - | - | 90.973.380 | 11.411.893 | 10 | 15.572.515.561 |
| 7 | Karet Tengsin II | 5.923.687.563 | 493.649.821 | 96.759.518 | 725.714.590 | 627.464.529 | - | 5.160.917.783 |
| 8 | Tebet Barat I | 1.914.281.323 | - | - | - | - | - | 1.914.281.323 |
| 9 | Tebet Barat II | 786.404.560 | - | - | - | - | - | 786.404.560 |
| 10 | Bidara Cina | 5.698.214.034 | - | 9.433.421 | 35.076.140 | - | - | 5.672.571.315 |
| | **Jumlah** | **36.651.951.367** | **493.649.821** | **313.788.471** | **1.115.326.810** | **642.770.638** | **38.468.356** | **35.662.823.855** |

#### 5.3.1.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari Aset kekayaan daerah yang disewakan, Aset kerja sama pemanfaatan, Aset bangun guna serah, Aset bangun serah guna dan Aset kekayaan daerah yang dipinjampakaikan.

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.524.180.701.395,00 dan Rp6.524.489.356.721,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74
Rincian Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Tahun 2024 dan 2023

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan | 1.052.854.485.000 | 1.029.914.960.000 |
| 2 | Aset Kerjasama Pemanfaatan | 1.901.175.286.258 | 1.901.175.286.258 |
| 3 | Aset Bangun Guna Serah (Build. Operate and Transfer/BOT) | 1.209.114.512.500 | 1.209.123.512.500 |

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 4 | Aset Bangun Serah Guna (Build. Transfer and Operate/BTO) | 1.015.013.208.858 | 1.045.325.528.858 |
| 5 | Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan | 1.346.023.208.779 | 1.338.950.069.105 |
| | **Jumlah** | **6.524.180.701.395** | **6.524.489.356.721** |

Daftar rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 tersaji di Lampiran 12.1 dan 12.2. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dijelaskan sesuai dengan klasifikasi aset berikut.

#### 5.3.1.5.2.1 Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan

Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan merupakan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai dengan menggunakan tarif layanan sosial. Saldo Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.052.854.485.000,00 dan Rp1.029.914.960.000,00. Selama Tahun 2024, terdapat mutasi penambahan sebesar Rp37.140.411.000,00 dan terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp14.200.886.000,00. Mutasi pengurangan Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan adalah sebagai berikut:

**a. Mutasi Penambahan**

Penambahan selama Tahun 2024 berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp37.140.411.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah yang dikerjasamakan dengan Yayasan Madha Tantri sebesar Rp2.631.216.000,00; dan
2) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah yang dikerjasamakan dengan Gereja Tiberias Indonesia sebesar Rp34.509.195.000,00;

**b. Mutasi Pengurangan**

Pengurangan selama Tahun 2024 sebesar Rp14.200.886.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Reklasifikasi aset berupa tanah menjadi Properti Investasi yang dikerjasamakan dengan Yayasan Muslim Bojong Indah sebesar Rp163.800.000,00;
2) Reklasifikasi aset berupa bangunan yang sebelumnya dikerjasamakan dengan Yayasan Al Hikmah Taman Aries menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp627.000.000,00;
3) Reklasifikasi aset bangunan yang dikerjasamakan dengan Yayasan Muslim Bojong Indah menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.471.250.000;

4) Reklasifikasi aset yang dikerjasamakan dengan Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Kosambi Baru menjadi Aset Tetap Tanah sebesar Rp2.560.536.000,00 dan bangunan sebesar Rp9.378.300.000,00.

**5.3.1.5.2.2 Aset Kerja Sama Pemanfaatan**

Aset Kerja Sama Pemanfaatan adalah aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Saldo Aset Kerja Sama Pemanfaatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama yaitu sebesar Rp1.901.175.286.258,00 dan yang berasal dari:

a. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dengan PT. Bakrie Swasakti Utama sebesar Rp1.782.128.066.258,00; dan
b. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dengan PT. Cakra Sarana Persada sebesar Rp119.047.220.000,00.

Selama Tahun 2024 tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan pada Aset Kerja Sama Pemanfaatan.

**5.3.1.5.2.3 Aset Kerjasama Bangun Guna Serah *(Build, Operate, and Transfer/BOT)***

Aset Kerjasama Bangun Guna Serah adalah aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan / atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati.

Saldo Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer / BOT*) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.209.114.512.500,00 dan Rp1.209.123.512.500,00. Selama Tahun 2024 terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp9.000.000,00 berupa bangunan halte yang direklasifikasi menjadi Aset yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (*Aset Idle*).

**5.3.1.5.2.4 Aset Kerjasama Bangun Serah Guna *(Build, Transfer, and Operate/BTO)***

Aset Kerjasama Bangun Serah Guna adalah aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga / investor mendirikan bangunan dan / atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Saldo Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate / BTO*) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.015.013.208.858,00 dan Rp1.045.325.528.858,00. Selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp5.284.200.000,00 dan mutasi

pengurangan sebesar Rp35.596.520.000,00. Penjelasan atas mutasi penambahan dan pengurangan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*) sebagai berikut:

**a. Mutasi Penambahan**

Penambahan selama Tahun 2024 berasal dari koreksi kurang catat barang atas perjanjian pemanfaatan dengan Yayasan Al Muhajirin berdasarkan BAST Nomor 1412/PU.04.00 tanggal 28 Mei 2024 berupa Gedung Bangunan sebesar Rp5.284.200.000,00.

**b. Mutasi Pengurangan**

Pengurangan selama Tahun 2024 sebesar Rp35.596.520.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Reklasifikasi aset yang dikerjasamakan dengan Yayasan Al Muhajirin yang menjadi Aset Tetap Tanah sebesar Rp13.326.720.000,00 dan Gedung Bangunan sebesar Rp5.284.200.000,00; dan
2) Koreksi lebih catat barang berupa Gedung Bangunan masjid Yayasan Al Muhajirin sebesar Rp11.105.605.000,00 dan berupa tanah bangunan pendidikan dan Latihan yang terletak di taman Meruya Ilir Blok E7 Kembangan Jakarta Barat sebesar Rp5.880.000.000,00.

Selain itu, pada kerjasama Bangun, Serah, Guna (BSG) atau *Build, Transfer, Operate* (BTO) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Albamas Sinar Purnama (PT ASP), terdapat pengembalian dana talangan, pendapatan *goodwill* dan kontribusi, pendapatan denda keterlambatan, serta Gedung Pusat Grosir PIK yang belum diterima oleh UPK PPKUKMP Pulo Gadung. Pada tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendaftarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap PT ASP. Gugatan ini didasarkan pada dugaan tindakan wanprestasi oleh PT ASP atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) tanggal 1 Desember 2004. Meskipun gugatan telah didaftarkan, jumlah ganti rugi yang akan diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum dapat dipastikan karena proses hukum masih berjalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memantau perkembangan kasus ini dan mengungkapkan informasi lebih lanjut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku setelah ada keputusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

#### 5.3.1.5.2.5 Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan

Aset Kekayaan Daerah Yang Dipinjampakaikan adalah aset yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

Saldo Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.346.023.208.779,00 dan Rp1.338.950.069.105,00. Selama Tahun 2024, terdapat mutasi penambahan sebesar Rp8.994.725.803,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.921.586.129,00. Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan adalah sebagai berikut:

**a. Mutasi Penambahan**

Penambahan selama Tahun 2024 berasal dari reklasifikasi dari aset tetap sebesar Rp8.994.725.803,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dipinjampakaikan kepada Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebesar Rp6.782.025.803,00;
2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dipinjampakaikan kepada Rumah Tahanan Pondok Bambu sebesar Rp1.118.920.000,00; dan
3) Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan yang dipinjampakaikan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebesar Rp1.093.780.000,00.

**b. Mutasi Pengurangan**

Pengurangan selama Tahun 2024 sebesar Rp1.921.586.129,00 berupa kendaraan penumpang 14 orang ke bawah yang telah berakhir masa Perjanjian Pinjam Pakai sehingga di reklasifikasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

**Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp394.218.153.955,00 dan Rp393.892.000.498,00 dengan rincian yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.75
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 31 Desember 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Beban Penyusutan (Rp) | Koreksi Penyusutan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) |
| | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan | 11.053.796.400 | 685.900.400 | (5.086.405.000) | 6.653.291.800 |
| Aset Kerjasama Pemanfaatan | 46.926.468.758 | 0 | 0 | 46.926.468.758 |
| Aset Bangun Guna Serah (BOT) | 2.700.000 | 0 | (2.700.000) | 0 |

| Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 31 Desember 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Beban Penyusutan (Rp) | Koreksi Penyusutan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) |
| | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Aset Bangun Serah Guna (BTO) | 285.579.528.800 | 12.162.292.129 | (8.884.480.000) | 288.857.340.929 |
| Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan | 50.329.506.540 | 4.568.944.172 | (3.117.398.244) | 51.781.052.468 |
| **Jumlah** | **393.892.000.498** | **17.417.136.701** | **(17.090.983.244)** | **394.218.153.955** |

Nilai buku Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.129.962.547.440,00 dengan rincian yang dapat dijelaskan sebagai berikut

| Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | 31 Desember 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
| Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa | 1.052.854.485.000 | (6.653.291.800) | 1.046.201.193.200 |
| Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan | 1.901.175.286.258 | (46.926.468.758) | 1.854.248.817.500 |
| Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer / BOT) | 1.209.114.512.500 | (0) | 1.209.114.512.500 |
| Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Transfer and Operate / BTO) | 1.015.013.208.858 | (288.857.340.929) | 726.155.867.929 |
| Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan | 1.346.023.208.779 | (51.781.052.468) | 1.294.242.156.311 |
| **Jumlah** | **6.524.180.701.395** | **(394.218.153.955)** | **6.129.962.547.440** |

**a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa**

Saldo Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.653.291.800,00 dan Rp11.053.796.400,00. Rincian Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.76

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| Jenis Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa | 31 Desember 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
| Tanah | 1.039.060.203.000 | 0 | 1.039.060.203.000 |
| Peralatan dan Mesin | 264.985.000 | (264.985.000) | 0 |
| Gedung dan Bangunan | 2.961.387.000 | (2.856.607.200) | 104.779.800 |
| Jalan Irigasi Jaringan | 10.544.000.000 | (3.531.699.600) | 7.012.300.400 |
| Aset Lainnya | 23.910.000 | 0 | 23.910.000 |
| **Jumlah** | 1.052.854.485.000 | (6.653.291.800) | 1.046.201.193.200 |

**b. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama Pemanfaatan**

Saldo Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama Pemanfaatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama yaitu sebesar Rp46.926.468.758,00. Rincian Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama Pemanfaatan per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.77

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama Pemanfaatan Per 31 Desember 2024 dan 2023

| Jenis Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan | 31 Desember 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
| Tanah | 1.735.201.597.500 | 0 | 1.735.201.597.500 |
| Gedung dan Bangunan | 46.926.468.758 | (46.926.468.758) | 0 |
| **Jumlah** | **1.782.128.066.258** | **(46.926.468.758)** | **1.735.201.597.500** |

**c. Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT)***

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.700.000,00. Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*) per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.78

Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah Per 31 Desember 2024 dan 2023

| Jenis Aset *BOT* | 31 Desember 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
| Tanah | 1.209.114.512.500 | 0 | 1.209.114.512.500 |
| **Jumlah** | 1.209.114.512.500 | **0** | 1.209.114.512.500 |

**d. Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna *(Build, Transfer and Operate/BTO)***

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp288.857.340.929,00 dan Rp285.579.528.800,00. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*) per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.79

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-
Kerjasama Bangun Serah Guna
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| Jenis Aset *BTO* | 31 Desember 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
| Tanah | 717.033.729.050 | 0 | 717.033.729.050 |
| Peralatan dan Mesin | 1.919.950.000 | (1.919.950.000) | 0 |
| Gedung dan Bangunan | 296.059.529.808 | (286.937.390.929) | 9.122.138.879 |
| **Jumlah** | 1.015.013.208.858 | (288.857.340.929) | 726.155.867.929 |

**e. Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yang Dipinjampakaikan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp51.781.052.468,00 dan Rp50.329.506.540,00. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yang Dipinjampakaikan per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.80
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| Jenis Aset Kekayaan Daerah yang dipinjampakai | 31 Desember 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
| Tanah | 1.261.269.811.000 | 0 | 1.261.269.811.000 |
| Peralatan dan Mesin | 22.871.292.996 | (22.323.735.378) | 547.557.618 |
| Gedung dan Bangunan | 61.882.104.783 | (29.457.317.090) | 32.424.787.693 |
| **Jumlah** | 1.346.023.208.779 | (51.781.052.468) | 1.294.242.156.311 |

### 5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp715.084.977.785,00,00 dan Rp634.599.864.666,00. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 terdiri atas lisensi, *software*, dan aset tidak berwujud lainnya. Selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp143.773.131.390,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp63.288.018.271,00 dengan rincian sebagai berikut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a. Mutasi Penambahan** | | | |
| 1) | Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 yang menjadi Aset Tidak Berwujud | Rp | 126.163.939.740 |
| | a) Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 | Rp | 129.085.346.240 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | b) Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 yang tidak menghasilkan Aset Tidak Berwujud perolehan Tahun 2024Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 yang tidak menghasilkan Aset Tidak Berwujud perolehan Tahun 2024 | Rp | (2.921.406.500) |
| 2) | Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud | Rp | 6.951.640.730 |
| 3) | Kapitalisasi dari Belanja Jasa | | 9.696.330.000 |
| 4) | Koreksi Kurang Catat Barang | Rp | 961.220.920 |
| **Jumlah Penambahan** | | **Rp** | **143.773.131.390** |
| **b. Mutasi Pengurangan** | | | |
| 1) | Reklasifikasi ke Beban Jasa | Rp | 63.236.428.271 |
| 2) | Reklasifikasi ke Aset dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | Rp | 51.590.000 |
| **Jumlah Pengurangan** | | **Rp** | **63.288.018.271** |

**a. Mutasi Penambahan**

Penambahan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp143.773.131.390,00 terdiri dari:

1. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 yang menjadi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp126.163.939.740,00 di antaranya berupa:
   - *Software sinkronasi & collecting* data transaksi ATS, *Software SAS Viya Enterprise,* dan *Software SAS Government Operation Monitoring Premier* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp113.463.364.940,00;
   - *Synxchro Standard Document Management Platform* dan *Synxchro Standard Data Synchronization Platform* pada Pusat Data dan Informasi Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.999.897.500,00; dan
   - *Software 3D Building Permit Assessment* dan Lisensi *Software PTV VISSIM Advance* pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.826.615.000,00.
2. Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp6.951.640.730,00 di antaranya berupa:
   - Sistem pemutakhiran data dan penguatan *capacity building* dalam rangka pengembangan sistem informasi mitigasi bencana dan Sistem pengelolaan data dan pengamanan aset yang perolehannya berasal dari belanja tanah dan belanja peralatan mesin pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp3.936.230.200,00;
   - *Software* Sinkronasi & *Collecting* data transaksi ATS, *Software* SAS VIYA *Enterprise* dan *Software* SAS *Government Operation Monitoring Premier* yang perolehannya berasal dari belanja peralatan mesin pada

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp 2.035.000.000,00; dan

- *Software Radiologi Information System* yang perolehannya berasal dari belanja peralatan mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp427.350.000,00.

3. Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp9.696.330.000,00 berupa Konten Imersif Museum Joang 45, Konten Maket *Projection Mapping*, Konten Peta Digitalisasi Museum, dan Konten Museum lainnya pada Unit Pengelola Museum Kesejarahan.
4. Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp961.220.920,00 berupa Lisensi *Oracle Database Enterprise Edition* pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

**b. Mutasi Pengurangan**

Pengurangan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp63.288.018.271,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi ke Beban Jasa (Selain Belanja Modal 2024) sebesar Rp63.236.428.271,00 yang terdiri dari:
   - *Software Redhat OpenShift Container Platform* dan *Redhat Openshift Cointainer Platform with Integration, Premium* (64 *core or* 128 VCPUS) - 1 *year* pada Unit Pengelola Jakarta Smart City dengan total sebesar Rp63.190.372.271,00; dan
   - Lisensi *software Redhat* (pengolah data SQL) sebesar Rp46.056.000,00 pada Pusat Data Dan Informasi Keluarga.
2. Reklasifikasi ke Aset dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset karena belum diketahui keberadaannya sebesar Rp51.590.000,00 berupa *website* informasi jalan pada Sudin Bina Marga Jakarta Selatan.

**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan amortisasi dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi yang dilakukan pada Aset Tidak Berwujud untuk aset yang memiliki masa manfaat terbatas berupa *software*, sistem/aplikasi, dan jenis aset tidak berwujud lainnya. Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Laporan Keuangan per 31

Desember 2024. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Saldo akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp551.873.044.557,00 dan Rp537.631.910.464,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Akumulasi Amortisasi 2023 | : | Rp | 537.631.910.464,00 |
| Beban Amortisasi 2024 | : | Rp | 66.105.306.292,00 |
| Koreksi Amortisasi 2024 | : | Rp | (51.864.172.199,00) |
| **Akumulasi Amortisasi 2024** | : | **Rp** | **551.873.044.557,00** |

Nilai Buku untuk Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp163.211.933.228,00,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Harga Perolehan | : | Rp | 715.084.977.785,00 |
| Akumulasi Amortisasi | : | Rp | (551.873.044.557,00) |
| **Nilai Buku Aset per 31 Desember 2024** | **:** | **Rp** | **163.211.933.228,00** |

#### 5.3.1.5.4 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp43.707.111.197.345,00 dan Rp33.076.672.679.419,00. Rincian Aset Lain-lain disajikan tabel berikut.

Tabel 5.81
Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| Aset Lain-lain | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|
| 1. Aset Rusak Berat/Usang | 8.224.981.762.728 | 4.382.335.026.906 |
| 2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah | 926.659.033.718 | 489.746.555.352 |
| 3. Aset Tetap - Belum ditetapkan statusnya | 1.075.481.299.172 | 973.782.683.243 |
| 4. Aset Tetap - Fasos Fasum | 22.380.891.194.269 | 16.290.870.877.648 |
| 5. Kas dikonsinyasikan | 2.168.628.752 | 27.413.446.297 |
| 6. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) | 548.652.428.827 | 573.280.906.692 |
| 7. Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 6.055.700.858.515 | 4.475.775.978.273 |
| 8. Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya | 10.697.454.729 | 10.697.454.729 |
| 9. Kas yang Dibatasi Penggunaannya | 4.481.878.536.635 | 5.852.769.750.279 |
| **Jumlah** | **43.707.111.197.345** | **33.076.672.679.419** |

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

#### 5.3.1.5.4.1 Aset Rusak Berat/Usang

Saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.224.981.762.728,00 dan Rp4.382.335.026.906,00. Selama Tahun 2024, terdapat mutasi penambahan Rp4.309.954.870.382,00 dan mutasi pengurangan Rp467.308.134.560,00 dengan rincian sebagai berikut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a. Mutasi Penambahan** | | | |
| 1) | Reklasifikasi dari Aset Tetap | Rp | 4.309.532.839.161 |
| 2) | Koreksi Kurang Catat Barang | Rp | 422.031.221 |
| | **Jumlah Penambahan** | **Rp** | **4.309.954.870.382** |
| **b. Mutasi Pengurangan** | | | |
| 1) | Penghapusan | Rp | 436.614.572.069 |
| 2) | Reklasifikasi ke Aset Tetap | Rp | 30.693.562.491 |
| | **Jumlah Pengurangan** | **Rp** | **467.308.134.560** |

**a. Mutasi Penambahan**

Penambahan Aset Rusak Berat selama Tahun 2024 sebesar Rp4.309.954.870.382,00 terdiri dari:

1) Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp4.309.532.839.161,00 di antaranya terdiri dari:
   - Mobil pemadam kebakaran, Trailer kuda, alat pembantu kebakaran dan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp431.171.274.078,00;
   - Podium, *Uninterruptible Power Supply* (UPS), *Unit Power Supply* dan peralatan dan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp256.419.611.186,00; dan
   - *Unit Tape Recorder*, Alat Simulator Pendidikan, Bangunan Gedung Pendidikan dan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp227.965.593.181,00.
2) Kurang Catat Barang sebesar Rp422.031.221,00 terdiri dari:
   - *Dental Panoramic*, *Ginekologi Tabel*, Televisi, dan peralatan dan mesin lainnya pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora dengan total sebesar Rp222.265.828,00;
   - *Auto panel call control*, *Amplifier unit, Drum band* dan peralatan dan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp193.707.060,00; dan
   - *Laboratory Refrigerators, Filling Cabinet* Besi, Lemari besi, dan peralatan dan mesin lainnya pada Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah dengan total sebesar Rp6.058.333,00.

**b. Mutasi Pengurangan**

Pengurangan Aset Rusak Berat selama Tahun 2024 sebesar Rp467.308.134.560,00 terdiri dari:

1) Penghapusan sebesar Rp436.614.572.069,00 di antaranya terdiri dari:
   - Mainframe IBM z series, Alat Komunikasi UHF *Tetra*, Telepon PABX, dan aset rusak berat lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp45.442.520.106,00;
   - *Pressure switch*, saluran telepon lokal (STLO), AC *ducting* dan aset rusak berat lainnya pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dengan total sebesar Rp42.831.386.321,00; dan
   - *CT Scanner,* Alat kimia klinik, Alat USG*,* dan aset rusak berat lainnya pada Rumah Sakit umum Daerah Cengkareng Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp34.865.197.097,00.
2) Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp30.693.562.491,00 di antaranya terdiri dari:
   - Bangunan gudang terbuka, Bangunan gedung kantor dan Bangunan penampung air baku pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah dengan total sebesar Rp14.593.779.550,00;
   - Mobil pemadam kebakaran, *Thermal Imaging Camera,* Gerobak air dan aset rusak berat lainnya pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp8.448.037.580,00; dan
   - 7 Bangunan gedung SKKT (Sasana Krida Karang Taruna) pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp1.763.098.644,00.

Dari nilai Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.194.769.394.157,00, terdapat Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp24.134.152.173,00 yang telah diambil oleh pemenang lelang pada Tahun 2024, namun tidak dapat dihapuskan dari daftar Barang Milik Daerah dikarenakan penetapan keputusan penghapusan atas Aset Rusak Berat/Usang tersebut dikeluarkan di Tahun 2025. SK Penghapusan sebagian aset tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 17 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 atas nilai aset sebesar Rp5.774.917.347,00;
- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 14 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 atas nilai aset sebesar Rp15.221.080.500,00; dan

- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 atas nilai aset sebesar Rp1.611.425.000,00.

Untuk satu register aset lainnya sebesar Rp1.226.729.326,00 belum diterbitkan SK Penghapusan.

**Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/ Usang**

Saldo akumulasi penyusutan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.065.393.887.354,00. Nilai Buku untuk Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.159.587.875.374,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut.

| | |
|---|---|
| Harga Perolehan | Rp 8.224.981.762.728,00 |
| Akumulasi Penyusutan | Rp (7.065.393.887.354,00) |
| **Nilai Buku Aset per 31 Desember 2024** | **Rp 1.159.587.875.374,00** |

### 5.3.1.5.4.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan aset KDP yang Dihentikan Permanen.

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing - masing sebesar Rp926.659.033.718,00 dan Rp489.746.555.352,00. Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2024 terdiri dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp811.099.070.415,00 dan KDP yang dihentikan Permanen yang berasal dari 8 OPD sebesar Rp115.559.963.303,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No | Klasifikasi | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1. | Tanah | 544.515.648.000 |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 5.182.894.769 |
| 3. | Gedung dan Bangunan | 252.866.162.769 |
| 4. | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 8.534.364.877 |
| | **Jumlah** | **811.099.070.415** |
| 5 | KDP yang dihentikan permanen | 115.559.963.303 |
| | **Jumlah** | **926.659.033.718** |

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp811.099.070.415,00 selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan Rp535.066.508.170,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp98.624.529.544,00 dengan rincian sebagai berikut.

| **a. Mutasi Penambahan** | | | |
|---|---|---|---|
| 1) | Koreksi Kurang Catat Barang | Rp | 5.891.811.500 |
| 2) | Reklasifikasi dari Aset Tetap Fasos Fasum | Rp | 529.165.696.670 |
| 3) | Reklasifikasi dari Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (BTO) | Rp | 9.000.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Jumlah** | **Rp** | **535.066.508.170** |
| **b. Mutasi Pengurangan** | | | |
| 1) | Reklasifikasi ke Aset Tetap | Rp | 76.123.769.864 |
| 2) | Reklasifikasi ke Properti Investasi | Rp | 22.500.759.680 |
| | **Jumlah** | **Rp** | **98.624.529.544** |

**a. Mutasi Penambahan**

Penambahan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp535.066.508.170,00 terdiri dari:

1) Koreksi Kurang Catat Barang berdasarkan hasil inventarisasi sebesar Rp5.891.811.500,00 yang terdiri dari:
   - Tanah Kantor Pemerintahan seluas 6.528 m² sebesar Rp3.505.536.000,00 yang berada di Jalan Rusun Flamboyan RT 12 RW 10 - Eks Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat Kelurahan Cengakreng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
   - Bangunan Kantor Pemerintahan seluas 1.970 m² sebesar Rp2.386.275.500,00 yang berada di Jalan Rusun Flamboyan RT 12 RW 10 - Eks Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
2) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp529.165.696.670,00 di antaranya terdiri dari :
   - Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan sebesar Rp198.670.000.000,00 yang berada di Jalan Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
   - Tanah Untuk Bangunan Rumah Adat sebesar Rp.66.211.000.000,00 yang berada di Jalan Muara Baru Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
   - PT. Nusantara Pasifik Investama sebesar Rp50.073.500.000,00 berupa Tanah Kosong yang sudah diperuntukkan yang berada di Jalan Rawa Kuning RT 01 RW 07 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur.
3) Reklasifikasi Aset BOT ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp9.000.000,00 terdiri dari PT. Duta Pertiwi, Tbk. berupa dua Bangunan Stasiun Bus Permanen yang berada di Jalan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

**b. Mutasi Pengurangan**

Pengurangan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp98.624.529.544,00 merupakan Reklasifikasi ke Aset Tetap yang di antaranya terdiri dari:

1) Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp76.123.769.864,00 yang di antaranya terdiri dari:
   - Bangunan Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 8.820 m² sebesar Rp61.305.822.746,00 yang berada di Jalan Ahmad Yani / Jalan Pemuda RT 001 / RW 002 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur;
   - Eks Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat sebesar Rp5.891.811.500,00 berupa Tanah Kantor Pemerintahan - Eks Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Bangunan Kantor Pemerintah - Eks Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat yang berada di Jalan Rusun Flamboyan RT 12 RW 10 - Eks Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
   - Bangunan Tempat Bermain Anak RPTRA Edelweiss PQT seluas 1.088 m² sebesar Rp1.510.013.730,00 yang berada di Jalan Komplek Perumahan Qaryah Thoyyibah Blok C RT 05 RW 01 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat.
2) Reklasifikasi ke Properti Investasi sebesar Rp22.500.759.680 berupa Tanah Aliran Sungai (Normalisasi Kali Pesanggrahan) seluas 1.476 m² yang berada di Jalan Meruya Ilir RT 012 RW 07 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2024 atas KDP yang dihentikan Permanen sebesar Rp115.559.963.303,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah yang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Aset Fisik dan Biaya Non Fisik dengan rincian konstruksi fisik sebagai berikut:
   - Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 register sebesar Rp6.118.241.600,00;

- Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota – Jakut sebanyak 1 register sebesar Rp224.639.615,00;
- Dinas Pemuda dan Olah Raga sebanyak 1 register sebesar Rp945.289.000,00;
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 1 register sebesar Rp16.030.275.500,00; dan
- Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 1 register sebesar Rp84.535.189.400,00.

b. Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah yang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian konstruksi fisik sebagai berikut:
   - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 1 register sebesar Rp3.215.932.000,00; dan
   - Dinas Pendidikan sebanyak 1 register sebesar Rp2.905.376.448,00.

c. Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah berupa DED atas konstruksi fisik yang statusnya dihentikan sementara pada Unit Pengelola Angkutan Jalan sebanyak 1 register sebesar Rp1.114.520.000,00;

d. Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah berupa biaya perencanaan atas rehab total gedung kantor Kecamatan Cengkareng yang statusnya dihentikan karena lokasi lahan terdampak proyek nasional jalan tol dan Kecamatan Tambora yang statusnya dihentikan karena perubahan kondisi gedung yang memerlukan perencanaan ulang, pada Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 2 register sebesar Rp392.122.640,00; dan

e. Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah berupa biaya perencanaan atas konstruksi fisik masjid yang statusnya dihentikan karena terdampak efisiensi dan asrama yang statusnya dihentikan karena kenaikan harga material yang tidak sesuai dengan rencana awal, pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 register sebesar Rp78.377.100,00.

**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah**

Saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2024 sebesar

Rp421.464.019.883,00. Nilai Buku untuk Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp505.195.013.835,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Harga Perolehan | : | Rp | 926.659.033.718,00 |
| Akumulasi Penyusutan | : | Rp | (421.464.019.883,00) |
| **Nilai Buku Aset per 31 Desember 2024** | **:** | **Rp** | **505.195.013.835,00** |

#### 5.3.1.5.4.3 Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.075.481.299.172,00 dan Rp973.782.683.243,00. Selama Tahun 2024, terdapat mutasi penambahan Rp101.698.615.929,00 dan mutasi pengurangan Rp0,00.

Penambahan Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp101.698.615.929,00 merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap pada Dinas Kesehatan atas peralatan dan mesin, jaringan rumah tangga, dan aset tetap lainnya.

Saldo Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

| No | Perangkat Daerah | Jumlah Register | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Sumber Daya Air | 1 | 5.194.315.000 |
| 2 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) | 6 | 706.476.085.211 |
| 3 | Dinas Perhubungan | 1 | 261.256.190.002 |
| 4 | Sudin Perhubungan Jakarta Timur | 131 | 508.596.000 |
| 5 | Dinas Bina Marga | 1 | 15.025.750 |
| 6 | Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap | 4 | 332.471.280 |
| 7 | Dinas Kesehatan | 3.326 | 101.698.615.929 |
| | **Total** | **3.470** | **1.075.481.299.172** |

Rincian atas aset tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dinas Sumber Daya Air atas Tanah Kali Pesanggrahan yang terindikasi *double* catat dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp5.194.315.000,00;
b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp706.476.085.211,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Aset Tanah Cengkareng Barat aset yang dibeli pada tahun 2015 sebesar Rp668.557.654.500,00. Atas aset ini, terdapat gugatan tuntutan perdata dari Pihak Ketiga.
   - Aset Tetap Rusunami sebesar Rp29.474.929.576,00 yang masih dalam penelusuran dan pemutakhiran data.

- Aset Tetap Rusunami Benhil I, Rusunami Karet Tengsin, dan Rusunami Kebon Kacang sebesar Rp8.443.501.135,00 yang masih dilakukan penelusuran lebih lanjut atas status kepemilikannya.

Tuntutan Perdata atas Aset Tanah Cengkareng Barat tersebut berasal dari Toeti NZ Soekarno, dkk yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2016 dengan Nomor Gugatan 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.

Materi gugatan penggugat yaitu atas indikasi perbuatan melawan hukum oleh DKPKP yang mencatat Aset Tanah Penggugat seluas 46.913 m² dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) DKPKP, dengan tuntutan antara lain;

- pencatatan Tanah dalam KIB A DKPKP melanggar hukum;
- kerugian material karena adanya penahanan penundaan pembayaran sebesar Rp200.000.000.000,00;
- *lost opportunity* sebesar Rp500.000.000,00; dan
- kerugian imateriil Rp800.000.000,00.

Dalam Laporan Keuangan DKPKP per 31 Desember 2015 tercatat Aset Tanah sebesar Rp2.955.165.380.885,00 yang terdiri dari 142 bidang tanah seluas 2.742.827,31 m², di antaranya seluas 101.395 m² digunakan sebagai kebun pembibitan di Kecamatan Cengkareng Barat, termasuk di dalamnya lahan seluas 46.913 m² yang digugat.

Adapun tuntutan kuperdatakan tersebut di atas, tidak terlepas dari adanya mutasi penambahan Aset Tetap Tanah yang bersumber dari pembelian Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) seluas 46.913 m² yang terdiri dari 3 Sertifikat yaitu SHM Nomor 13069/Cengkareng Barat seluas 34.503 m², SHM Nomor 13293/Cengkareng Barat seluas 9.359 m² dan SHM Nomor 13430/Cengkareng Barat seluas 3.061 m².

Atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2017 dengan Amar Putusan:

a. Dalam Eksepsi:
   Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.
b. Dalam Pokok Perkara:
   - Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; dan
   - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Perkara ini telah diputus pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018 yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2017 dengan amar putusan:

- menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juni 2017, Nomor: 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding.
- menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018, Para Penggugat tidak mengajukan kasasi sehingga perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas permasalahan pembelian lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, Cs: Laporan di Bareskrim Mabes POLRI.

- Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta melaporkan Toeti NZ Soekarno, dkk dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/673/VI/2016/Bareskrim tanggal 29 Juni 2016.
- Toeti NZ Soekarno, dkk. Melaporkan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/670/VI/2016/Bareskrim tanggal 28 Juni 2016.
- Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes POLRI melalui Laporan Polisi No. LP/656/VI/2016/Bareskrim telah melakukan penyidikan ada dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, dkk.
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah bersurat kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor 67/-076.2 tanggal 19 Januari 2018 Hal Permohonan Informasi Terkait Perkembangan Pemeriksaan Laporan Polisi Atas Tanah Aset Kebon Bibit Cengkareng Barat, yang pada intinya meminta informasi perkembangan pemeriksaan laporan dimaksud sebagaimana huruf a dan angka 2 di atas.
- Dinas Perumahan telah beberapa kali mengundang Toeti NZ Soekarno Cs dan kuasanya dalam rangka musyawarah pembatalan Akta Jual Beli

(AJB), namun musyawarah tidak berhasil karena pihak Toeti NZ Soekarno Cs tidak hadir sampai dengan rapat terakhir tanggal 27 Februari 2018.

Pada 06 Maret 2024 telah terbit Putusan Mahkamah Agung Nomor 591 K/Pdt/2023 jo No.244/PDT/2022/PT.DKI jo No.1120/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt dengan amar putusan:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta C.q.. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, dan 2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta C.q.. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

c. Dinas Perhubungan sebesar Rp261.256.190.002,00 sudah dilakukan sidang penetapan Status Barang Milik Daerah dan menunggu hasil keputusan sidang tersebut;

d. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 131 register berupa peralatan dan mesin sebesar Rp508.596.000,00 yang sudah dilakukan usul ke Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah;

e. Dinas Bina Marga sebanyak 1 register berupa sepeda motor yang hilang sebesar Rp15.025.750,00 dan masih dalam proses kajian TIM TP TGR; dan

f. Pejabat Pengelola Aset Daerah – Aset Tetap sebanyak 4 register barang berupa gedung pos jaga permanen sebesar Rp332.471.280,00 yang merupakan tindak lanjut dari hasil inventarisasi aset pengelola yang sudah diusulkan Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.

g. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3.326 register barang yang terdiri dari :

- Peralatan dan mesin sebanyak 3.275 register barang sebesar Rp95.389.999.667,00;
- Jaringan rumah tangga (jarut) sebesar Rp1.752.000.000,00; dan
- Aset tetap lainnya sebanyak 50 register barang sebesar Rp4.556.616.262,00.

Aset tetap tersebut direklasifikasi ke Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 dikarenakan menunggu berita acara/naskah hibah Provinsi DKI Jakarta kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 2344/ TG.02 (No : B-0359.I/ C.3.4/Cum.4/ 02/2025) tanggal 17 Februari 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyerahkan aset dan kewajiban pada neraca Rumah Sakit Adhyaksa kepada Kejaksaan Republik Indonesia. DPRD Provinsi DKI Jakarta juga telah memberikan persetujuan hibah berdasarkan surat dengan No. 391/BP.06.00 tanggal 7 Mei 2025 perihal Persetujuan DPRD Provinsi DKI

Jakarta terhadap Hibah Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin, Jaringan dan Aset Tetap Lainnya kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Terhadap proses hibah Provinsi DKI Jakarta kepada Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, saat ini sedang dalam proses penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya**

Saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp90.786.883.873,00 yang merupakan akumulasi penyusutan saat dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap. Nilai Buku untuk Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp984.694.415.299,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Harga Perolehan | : | Rp | 1.075.481.299.172,00 |
| Akumulasi Penyusutan | : | Rp | 90.786.883.873,00 |
| **Nilai Buku Aset per 31 Desember 2024** | **:** | **Rp** | **984.694.415.299,00** |

### 5.3.1.5.4.4 Aset Tetap – Fasos Fasum

Aset Tetap Fasos Fasum merupakan aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban pemegang Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (IPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Prinsip Kewajiban Lainnya (Sanksi). Saldo Aset Tetap – Fasos Fasum per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp22.380.891.194.269,00 dan Rp16.290.870.877.648,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.82
Aset Tetap Fasos Fasum
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Uraian | 31 Desember 2023 (Rp) | Mutasi Tambah (Rp) | Mutasi Kurang (Rp) | 31 Desember 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanah | 13.341.948.097.518 | 19.431.927.716.615 | 13.028.398.499.066 | 19.745.477.315.067 |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 24.262.249.894 | 48.161.226.164 | 31.256.735.937 | 41.166.740.121 |
| 3. | Gedung dan Bangunan | 1.179.931.055.828 | 119.578.144.303 | 438.015.737.865 | 861.493.462.266 |
| 4. | Jalan. Irigasi. dan Jaringan | 1.727.587.288.654 | 586.655.544.264 | 597.983.183.018 | 1.716.259.649.900 |
| 5. | Aset Tetap Lainnya | 17.142.185.754 | 53.020.000 | 701.178.839 | 16.494.026.915 |
| | **Total** | **16.290.870.877.648** | **20.186.375.651.346** | **14.096.355.334.725** | **22.380.891.194.269** |

Rincian mutasi Aset Tetap – Fasos Fasum adalah sebagai berikut:

#### 5.3.1.5.4.4.1 Fasos Fasum – Tanah

Saldo Aset Fasos Fasum Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp19.745.477.315.067,00 dan Rp13.341.948.097.518,00. Pada Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan

sebesar Rp19.431.927.716.615,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp13.028.398.499.066,00 sebagai berikut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a. Mutasi Penambahan** | | | |
| 1) | Donasi/Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI | Rp | 60.564.345.000 |
| 2) | Penerimaan atas Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga | Rp | 17.946.618.397.730 |
| 3) | Koreksi Kurang Catat | Rp | 1.424.744.973.885 |
| **Jumlah Penambahan** | | **Rp** | **19.431.927.716.615** |
| **b. Mutasi Pengurangan** | | | |
| 1) | Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset Idle) | Rp | 379.125.682.000 |
| 2) | Reklasifikasi Menjadi Aset Tetap | **Rp** | 12.050.278.563.786 |
| 3) | Reklasifikasi Menjadi PI | **Rp** | 301.623.884.280 |
| 4) | Koreksi Pencatatan Ganda | **Rp** | 297.370.369.000 |
| **Jumlah Pengurangan** | | **Rp** | **13.028.398.499.066** |

**a. Mutasi Penambahan**

Penambahan Aset Fasos Fasum Tanah selama Tahun 2024 sebesar Rp19.431.927.716.615,00 sebagai berikut:

1) Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp60.564.345.000,00 yang di antaranya terdiri dari :
   - PT Propertis Investindo Bhaktitama sebesar Rp31.561.280.000,00 berupa Tanah Taman yang berada di Perumahan Bukit Gading Mediterania Jalan Casablanca IX Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
   - Ahli Waris Alm. H. Muhamadong SH (Daeng Sidjaja) sebesar Rp402.675.000,00 berupa Tanah Peruntukan Jalan yang berada di Jalan Akses Penghubung Ke Jalan Sahid RT 002 RW 01 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan;
   - PT. Angkasa Pancabersaudara sebesar Rp28.600.390.000,00 berupa Tanah Untuk Jalan yang berada di Perumahan Gading Kirana (-6.143557 106.896300) Jalan Gading Kirana Barat 1 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.

2) Penerimaan atas Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga sebesar Rp17.946.618.397.730,00 yang di antaranya terdiri dari:
   - PT. Taman Kedoya Barat Indah sebesar Rp4.045.531.875.000,00 berupa 28 bidang tanah dengan peruntukkan Lahan Marga Jalan dan Lahan Penyempurna Hijau Taman yang berada di Komplek Perumahan Green Garden Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat;
   - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp2.554.070.400.000,00 berupa 3 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Jalan, Tanah Saluran, dan Tanah Jalur Hijau yang berada di Perumahan Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;
   - PT. Citra Abadi Mandiri sebesar Rp2.011.915.500.000,00 berupa 4 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Taman Kota / Lingkungan, Tanah Jalur Hijau, Tanah Terbuka Biru, dan Tanah Prasarana Jalan yang berada di Jalan Raya Pegangsaan Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur;
   - PT. Indo Sandang City qq PT. Sinjaya sebesar Rp1.412.253.750.000,00 berupa 3 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Marga Jalan, Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht), dan Tanah Suka Sarana Ibadah (Ssi) yang berada di Jalan Patal Senayan 1 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan;
   - PT. Graha Rekayasa Abadi sebesar Rp839.822.385.000,00 berupa 29 bidang tanah peruntukkan Tanah Sekolah, Tanah Saluran, Tanah PHU / Taman, Tanah Rencana Rel KA, Tanah Rencana Jalan yang berada di Jalan Pegangsaan Dua (Perumahan Gading Arcadia RW 022) (-6.164658  106.917717) Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.

3) Koreksi kurang catat atas penerimaan aset sebelum Tahun 2024 sebesar Rp1.424.744.973.885,00 yang di antaranya terdiri dari :
   - PT. Copylas Indonesia sebesar Rp1.398.341.605.000,00 berupa 11 bidang tanah dengan peruntukkan Lahan Taman Kota / Lingkungan, Lahan Hijau Tegangan Tinggi, Lahan Jalur Hijau, Lahan Prasarana Pelayanan Umum, Lahan Prasarana Jalan, Lahan Prasarana Olahraga dan Rekreasi, Lahan Prasarana Pendidikan, Lahan Prasarana Ibadah, dan Lahan Jalur Hijau yang berada di

Perumahan Puri Botanical Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat;

- PT. Town City Properties sebesar Rp9.919.140.000,00 berupa Tanah Taman yang berada di Jalan Patra Raya Blok M – 13 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp3.570.455.885,00 berupa 1 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan yang berada di Jalan Lebak Bulus III Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Pencatatan atas bidang tanah yang sudah bersertifikat SHP 264 /Meruya Selatan sebesar Rp3.241.512.000,00 yang berada di Jalan Putri Bungsu RT 05 RW 06 Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Pencatatan Aset tanah yang sudah bersertifikat SHP 265/Meruya Selatan sebesar Rp3.065.040.000,00 yang berada di Jalan Cemara RT 004 RW 006 Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat.

**b. Mutasi Pengurangan**

Pengurangan Aset Fasos Fasum Tanah sebesar Rp13.028.398.499.066,00 sebagai berikut :

1) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset *Idle*) sebesar Rp379.125.682.000,00 diantaranya berasal dari :
   - Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan sebesar Rp198.670.000.000,00 yang berada di Jalan Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
   - Tanah Untuk Bangunan Rumah Adat sebesar Rp66.211.000.000,00 yang berada di Jalan Muara Baru Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara
   - PT. Nusantara Pasifik Investama sebesar Rp50.073.500.000,00 berupa Tanah Kosong yang sudah diperuntukkan yang berada di Jalan Rawa Kuning RT 01 RW 07Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan sebesar Rp24.435.000.000,00 yang berada di Jalan Taman Sunda Kelapa No.16A RT 06 RW 04 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- Tanah Bangunan Gudang sebesar Rp12.605.625.000,00 yang berada di Jalan Kerapu Nomor 5 (Tongkol) Pasar Ikan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara;

2) Reklasifikasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp12.050.278.563.786,00 yang diantaranya berasal dari :
   - PT. Taman Kedoya Barat Indah sebesar Rp4.045.531.875.000,00 sebanyak 28 bidang tanah berupa lahan marga jalan dan lahan penyempurna hijau taman yang berada di Komplek Perumahan Green Garden Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat;

   - PT. Citra Abadi Mandiri sebesar Rp2.011.915.500.000,00 berupa Tanah Taman Kota / Lingkungan, Tanah Jalur Hijau, Tanah Terbuka Biru, dan Tanah Prasarana Jalan yang berada di Jalan Raya Pegangsaan Kelurahan rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur;

   - PT. Indo Sandang City qq PT. Sinjaya sebesar Rp1.272.003.750.000,00 berupa 2 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Marga Jalan dan Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht) yang berada di Jalan Patal Senayan 1 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan;

   - PT. Pangestu Luhur sebesar Rp617.615.658.000,00 berupa 12 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Marga Jalan dan Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht) yang berada di Perumahan Mitra Gading Villa -6.143696 106.904243 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;

   - PT. Agung Sedayu Propertindo sebesar Rp546.352.695.000,00 berupa Tanah Yang Terkena Rencana Jalan yang berada di Jalan Mangga Dua Raya / Jalan Mangga Dua Abdad Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat.

3) Reklasifikasi Menjadi PI sebesar Rp301.623.884.280,00 yang diantaranya berasal dari:

- PT. Setiautama Island sebesar Rp154.739.548.280,00 berupa Tanah Kosong Yang Sudah diperuntukkan yang berada di Pulau Tengah (-5.858778 106.604762) Kelurahan Pulau Pari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

- Penyerahan aset fasos fasum dari BPAD ke JAMC sebesar Rp89.064.885.000,00 berupa Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan yang berada di Jalan Pantai Mutiara (Mulai Dari Café Jetski, Polairud, Basarnas) Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;

- PT. Astra Honda Motor sebesar Rp18.299.250.000,00 berupa 4 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Prasarana Jalan dan Tanah Penyempurna Hijau Umum (PHU) / Jalur Hijau yang berada di Jalan Pegangsaan Dua RT 001 / RW 003 (-6.158471 106.920735) Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;

- PT. Satwika Permai Indah sebesar Rp12.730.500.000,00 berupa Lahan Suka Pendidikan yang berada di Perumahan Taman Surya 5 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;

- PT. Sunrise Garden sebesar Rp10.382.344.000,00 berupa Tanah Bangunan Tempat Ibadah - Permohonan Pemanfaatan Yayasan Islam Taman Cahaya yang berada di Jalan Kedoya Pesing Komplek Perumahan Sunrise Garden Kelurahan Kedoya Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat;

4) Koreksi Pencatatan Ganda sebesar Rp297.370.369.000,00 yang terdiri dari :
   - Tanah Kampung sebesar Rp166.149.585.000,00 yang berada di Jalan Kartini dan Jalan TB. Simatupang RT 0016 RW 006 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan.
   - Tanah sebesar Rp82.410.000.000,00 berupa 2 bidang Tanah Kosong yang Sudah diperuntukkan yang berada di Jalan Rawa Kepiting Nomor 5 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdapat pencatatan ganda dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;

- Tanah sebesar Rp17.444.700.000,00 yang berada di Jalan Bangka II Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terdapat pencatatan ganda dengan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Tanah sebesar Rp11.796.696.000,00 yang berada di Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi. Aset ini dicatat dua kali pada KIB PPAD.
- Tanah sebesar Rp9.740.500.000,00 yang berada di Jalan Kebon Sirih Nomor 79 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

#### 5.3.1.5.4.4.2 Fasos Fasum – Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Fasos Fasum Peralatan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp41.166.740.121,00 dan Rp24.262.249.894,00. Pada Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp48.161.226.164,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp31.256.735.937,00 sebagai berikut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a. Mutasi Penambahan** | | | |
| 1) | Donasi/Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI | Rp | 28.402.749.584 |
| 2) | Koreksi Kurang Catat Barang | Rp | 2.019.222.650 |
| 3) | Penerimaan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga | Rp | 17.739.253.930 |
| **Jumlah Penambahan** | | **Rp** | **48.161.226.164** |
| **b. Mutasi Pengurangan** | | | |
| 1) | Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin | **Rp** | 31.256.735.937 |
| **Jumlah Pengurangan** | | **Rp** | **31.256.735.937** |

**a. Mutasi Penambahan**

Penambahan Aset Fasos Fasum Peralatan dan Mesin sebesar Rp48.161.226.164,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp28.402.749.584,00 yang di antaranya berasal dari :
   - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp11.734.261.074,00 Jetter Combi Besar - Mobil Tangki Air Merk Isuzu tahun pembuatan 2015.
   - Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp10.722.455.202,00 berupa Kapal Motor dengan spesifikasi Main Unit and Front EndInterceptor 001 dan Equipment Interceptor 001;

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp4.702.371.323,00 berupa Jetter Combi Besar - Mobil Tangki Air (2015) Merk Isuzu tahun perolehan 2015;
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp545.372.000,00 berupa 85 unit AC Split dengan merk Panasonic type CS-YN7WKJ dan type Wall Mounted Split Standard 3/4 PK -;
- PT Paiton Energy sebesar Rp481.740.000,00 berupa 2 unit Mobil Golf Listrik dengan spesifikasi Baterai Lithium Garansi 5 Tahun dan Smart Charging 5-6 Jam yang saat ini digunakan di Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan.

2) Koreksi kurang catat atas penerimaan aset sebelum Tahun 2024 sebesar Rp2.019.222.650,00 yang di antaranya berasal dari :
   - PT. Bangun Mustika Inti Persada sebesar Rp1.875.500.000,00 berupa 4 buah escalator yang berada di Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan'
   - Yayasan Wahana Visi Indonesia sebesar Rp143.722.650,00 berupa peralatan mesin yang berada di RPTRA Vlaboean di Jalan Dermaga Raya Nomor 27 A Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;

3) Penerimaan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga sebesar Rp17.739.253.930,00 yang di antaranya berasal dari:
   - PT. Asya Mandira Land (Dahulu PT. Astra Modern Land) sebesar Rp12.530.040.685,00 berupa peralatan dan mesin di Revitalisasi Stadion Tugu Tahap Pendahuluan dan Tahap 1 (Pertama) yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Nomor 9 RT 009 RW 004 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
   - PT. TCP Internusa sebesar Rp5.157.803.245,00 berupa peralatan mesin perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung Gedung PKK Melati Jaya dengan ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi (Fisik), Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan KJPP di Jalan Kebagusan Raya Nomor 42 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan;
   - PT. Wiranusa Grahatama sebesar Rp51.410.000,00 berupa Panel Listrik PHB Induk dan Pembagi yang berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 5 - 7 (-6.222849 106.817195) Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

**b. Mutasi Pengurangan**

Pengurangan Aset Fasos Fasum Peralatan dan Mesin Rp31.256.735.937,00 merupakan reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang di antaranya berasal dari :

- PT. Asya Mandira Land (Dahulu PT. Astra Modern Land) sebesar Rp12.530.040.685,00 berupa peralatan dan mesin di Revitalisasi Stadion Tugu Tahap Pendahuluan dan Tahap 1 (Pertama) yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Nomor 9 RT 009 RW 004 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp10.722.455.202,00 berupa Kapal Motor dengan spesifikasi Main Unit and Front EndInterceptor 001 dan Equipment Interceptor 001;
- PT. TCP Internusa sebesar Rp5.157.803.245,00 berupa peralatan mesin perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung Gedung PKK Melati Jaya dengan ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi (Fisik), Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan KJPP di Jalan Kebagusan Raya Nomor 42 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- PT Metropolitan Land, Tbk sebesar Rp1.007.651.397,00 berupa Pembangunan Fasilitas Publik Pembangunan Peningkatan Fasilitas Rumah Susun (KSD 58) Dengan Ruang Lingkup Program Kebun Kota D (Konstruksi) yang terletak di Rumah Susun Daan Mogot Tower 6 dan 7 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
- PT. Dwibina Prima sebesar Rp567.400.753,00 berupa Pembangunan Fasilitas Publik Pembangunan Peningkatan Fasilitas Rumah Susun (KSD 58) Dengan Ruang Lingkup Program Utama A (Pembangunan Coworking Space, Café, dan Lounge Serta Toilet Dilantai 2) Dan Konsultan Perencana ) yang terletak di Rusun Tower Daan Mogot Tower 6 dan 7 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

#### 5.3.1.5.4.4.3 Fasos Fasum – Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Fasos Fasum Gedung Bangunan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp861.493.462.266,00 dan Rp1.179.931.055.828,00 Pada Tahun 2024 mutasi pertambahan sebesar Rp119.578.144.303,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp438.015.737.865,00 dengan rincian sebagai berikut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a. Mutasi Penambahan** | | | |
| 1) | Donasi / Hibah | Rp | 6.459.289.605 |
| 2) | Penerimaan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga | Rp | 105.670.930.969 |
| 3) | Koreksi Kurang Catat Barang | Rp | 7.447.923.729 |
| **Jumlah Penambahan** | | **Rp** | **119.578.144.303** |
| **b. Mutasi Pengurangan** | | | |
| 1) | Reklasifikasi ke Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset Idle) | Rp | 150.040.014.670 |
| 2) | Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan | Rp | 277.117.484.946 |
| 3) | Reklasifikasi ke PI | Rp | 10.858.238.249 |
| **Jumlah Pengurangan** | | **Rp** | **438.015.737.865** |

**a. Mutasi Penambahan**

Penambahan Aset Fasos Fasum Gedung dan Bangunan sebesar Rp119.578.144.303,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.459.289.605,00 yang di antaranya berasal dari :
   - Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp5.250.856.311,00 berupa Konstruksi Taman Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) di Jalan Pattimura Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan;
   - PT MRT Jakarta (Perseroda) sebesar Rp946.202.094,00 berupa Rehabilitasi Gudang penyimpanan arkeologi yang berada di Jalan Tongkol Nomor 5 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara.
   - Ketua RW 014 Kelurahan Semper Barat - Musafir Maddamang sebesar Rp262.231.200,00 berupa Gedung bangunan Balai Warga yang berada di Jalan Lorong F Nomor 21 A Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
2) Penerimaan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga sebesar Rp105.670.930.969,00 di antaranya:
   - PT. Asya Mandira Land (Dahulu PT. Astra Modern Land) sebesar Rp53.687.544.859,00 berupa Revitalisasi Stadion Tugu Tahap 1 yang berada di Pegangsaan Dua Nomor 9 RT 09 RW 04 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
   - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp11.353.857.295,00 berupa Konstruksi Jalur Hijau yang berada di Perumahan Pantai

Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;

- PT. Mitra Sindo Sukses sebesar Rp9.472.708.600,00 berupa Konstruksi Sarana Pendidikan an Konstruksi Sarana Ibadah yang terletak di Jalan Kayu Tinggi Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur;
- PT. Mitra Sindo Makmur sebesar Rp7.631.199.195,00 berupa Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya GPIB Jemaat Koinonia yang berada di Jalan Matraman Raya Nomor 216 Kelurahan Balimester Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;
- PT. Metropolitan Land, Tbk sebesar Rp6.951.100.000,00 berupa Konstruksi Sarana Sosial Ibadah (Masjid) yang berada di Perumahan Metland Menteng Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur.

3) Koreksi kurang catat atas penerimaan aset sebelum Tahun 2024 sebesar Rp7.447.923.729,00 yang di antaranya berasal dari

- PT. Candrasa Pranaguna sebesar Rp5.502.538.249,00 berupa Bangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang berada di Perumahan Citra Garden City Blok BI.12 Citra 2 Ext Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Yayasan Wahana Visi Indonesia sebesar Rp1.341.485.480,00 berupa bangunan gedung yang berada di RPTRA Vlaboean di Jalan Dermaga Raya Nomor 27 A Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;
- PT. Bangun Mustika Inti Persada sebesar Rp603.900.000,00 berupa Halte Busway Koridor 13 (Nilai Dikapitalisasi) yang berada di Halte Cipulir - Jalan Ciledug Raya Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan.

**b. Mutasi Pengurangan**

Pengurangan Aset Fasos Fasum Gedung dan Bangunan sebesar Rp438.015.737.865,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset Idle) sebesar Rp.150.040.014.670,00 di antaranya :

- Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp.133.430.569.000,00 yang berada di Jalan Raya PKP, RT.1/RW.8 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Bangunan Gedung Kantor Permanan sebesar Rp9.172.478.115,00 yang berada di Jalan Raya PKP, RT.1/RW.8 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Bangunan Gedung sebesar Rp5.516.667.545,00 yaitu berupa 16 bangunan gedung yang berada di Rutan Pondok Bambu - Jalan Pahlawan Revolusi No.38, RT.4/RW.3, Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Bangunan Gedung Tertutup Permanen sebesar Rp1.464.000.000,00 yang berada di Jalan Kerapu Nomor 5 (Tongkol) Pasar Ikan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen sebesar Rp456.300.000,00 yang berada di Jalan Letnan Jenderal MT. Haryono Kavling 52-53 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan;

2) Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp277.117.484.946,00 yang di antaranya berasal dari :
   - PT. Cahaya Lestari Sentosa sebesar Rp.97.059.600.000,00 berupa Konstruksi Waduk yang berada di Perumahan Duta Mas Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat;
   - PT. Duta Pertiwi sebesar Rp62.789.351.726,00 berupa Rumah Susun Bagi Warga Eks Kampung Bukit Duri yang berada di Jalan Kav DPR (Kampung Pulo Jahe) PIK Pulogadung Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur;
   - PT. Asya Mandira Land (Dahulu PT. Astra Modern Land) sebesar Rp53.687.544.859,00 berupa Revitalisasi Stadion Tugu Tahap 1 yang berada di Pegangsaan Dua Nomor 9 RT 09 RW 04 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
   - PT Karyabangun Nusantara sebesar Rp17.040.641.987,00 berupa Pembangunan Rumah Susun bagi Warga Eks Kampung Kunir (Bangunan Rumah Susun) yang berada di Jalan Kemukus Nomor 2 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat;
   - Gedung Bangunan Pemerintah - Gedung Pinjam Pakai Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.445.055.000,00 yang berada di Jl. Taman Jati Baru No.1 RT.17/RW.1 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat;

3) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke PI sebesar Rp10.858.238.249,00 di antaranya berasal dari:
   - PT. Candrasa Pranaguna sebesar Rp5.502.538.249,00 berupa Bangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang berada di Perumahan Citra Garden City Blok BI.12 Citra 2 Ext Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.
   - Yayasan Al-Ikhwan Meruya sebesar Rp5.355.700.000,00 berupa Bangunan Masjid Al-Ikhwan Meruya Beserta Fasilitas (Kantor Pendopo Tempat Wudhu Sekolah TK) yang berada di Taman Meruya Ilir Blok F 1 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat;

#### 5.3.1.5.4.4.4 Fasos Fasum – Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Aset Fasos Fasum Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.716.259.649.900,00 dan Rp1.727.587.288.654,00. Pada Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp586.655.544.264,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp597.983.183.018,00 dengan rincian sebagai berikut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a. Mutasi Penambahan** | | | |
| 1) | Penerimaan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga | Rp | 449.483.418.802 |
| 2) | Donasi/Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta | Rp | 137.172.125.462 |
| **Jumlah Penambahan** | | **Rp** | **586.655.544.264** |
| **b. Mutasi Pengurangan** | | | |
| 1) | Reklasifikasi Menjadi Aset Tetap JIJ | Rp | 597.983.183.018 |
| **Jumlah Pengurangan** | | **Rp** | **597.983.183.018** |

**a. Mutasi Penambahan**

1) Penambahan aset fasos fasum Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp449.483.418.802,00 merupakan Penerimaan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga yang di antaranya berasal dari:
   - PT. Cakradigdaya Lokaraya sebesar Rp99.529.500.000,00 berupa Konstruksi Prasarana Jalan yang berada di Jalan Peta Barat Komplek Citra 8 Citra Garden City Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
   - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp51.970.169.000,00 berupa Konstruksi Jalan, Konstruksi Saluran, dan Konstruksi Koker yang berada di Perumahan Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;

- PT. Mandiri Eka Abadi sebesar Rp50.710.926.071,00 berupa Penataan Kawasan Kota Tua (Jalan Kemukus dan Jalan Lada Dalam) yang berada di Jalan Kemukus dan Jalan Lada Dalam Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat;
- PT. Summarecon Agung Tbk sebesar Rp43.171.529.957,00 berupa Konstruksi Marga Drainase (Saluran), dan Konstruksi Marga Jalan (Berm) yang berada di Jalan Boulevard Raya (sisi Barat Timur Utara Selatan) - Jalan Kelapa Nias dan Jalan Kelapa Hybrida Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
- PT. Aruna Kirana sebesar Rp39.070.131.002,00 berupa Penataan Kawasan Kota Tua Dengan Ruang Lingkup Jalan Lada dan Jalan Kali Besar Timur yang berada di Jalan Lada dan Jalan Kalibesar Timur Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat;

2) Penambahan aset fasos fasum Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp137.172.125.462,00 merupakan Donasi/Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta yang di antaranya berasal dari:

- PT Paiton Energy sebesar Rp146.520.000,00 berupa Instalasi Pembangkit Listrik tenaga Surya di SMKN 54 Jakarta yang berada di Jalan Bendungan Jago No.53, RT.5/RW.3, Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp137.025.605.462,00 berupa Pembangunan Stasiun Pompa Pasar Ikan - Jl. Kerapu 1, RT.1/RW.8 (Tahun 2012), Pembangunan Stasiun Pompa Wijaya Kusuma - Jl. Pangeran Tubagus Angke, RT.8/RW.4, (Tahun 2013), Pembangunan IPAL Setiabudi - Jl. HOS. Cokroaminoto No.14, RT.14/RW.6 (Tahun 2013), dan Pekerjaan Renovasi Pedestrian / Trotoar dan Saluran Drainase - Jl. Pattimura No.20, RT.4/RW.1,Jl. Pattimura No.20, RT.4/RW.1, (Tahun 2021).

**b. Mutasi Pengurangan**

Pengurangan Aset Fasos Fasum Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp597.983.183.018,00 merupakan Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan di antaranya:

- PT. Mitra Panca Persada sebesar Rp.336.377.200.000,00 berupa Simpang Susun Semanggi yang berada di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- PT. Cakradigdaya Lokaraya sebesar Rp99.529.500.000,00 berupa Konstruksi Prasarana Jalan yang berada di Jalan Peta Barat Komplek

Citra 8 Citra Garden City Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;

- PT. Summarecon Agung Tbk sebesar Rp43.171.529.957,00 berupa Konstruksi Marga Drainase (Saluran), dan Konstruksi Marga Jalan (Berm) yang berada di Jalan Boulevard Raya (sisi Barat Timur Utara Selatan) - Jalan Kelapa Nias dan Jalan Kelapa Hybrida Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
- PT. Summarecon Agung Tbk sebesar Rp24.803.200.000,00 berupa Konstruksi Marga Drainase (Saluran), dan Konstruksi Marga Jalan (Berm) yang berada di Perumahan RW 12 , RW 06, RW 11, RW 15 , dan RW 18 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
- PT. Summarecon Agung Tbk sebesar Rp13.257.200.000,00 berupa Konstruksi Marga Jalan (Badan Jalan), Konstruksi Marga Drainase (Saluran), dan Konstruksi Marga Jalan (Berm) yang berada di Perumahan RW 14 17 18 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.

#### 5.3.1.5.4.4.5 Fasos Fasum – Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Fasos Fasum Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp16.494.026.915,00 dan Rp17.142.185.754,00. Pada Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp53.020.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp701.178.839,00 rinciannya sebagai berikut

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a. Mutasi Penambahan** | | | |
| 1) | Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta | Rp | 28.860.000 |
| 2) | Koreksi Kurang Catat Barang | Rp | 24.160.000 |
| **Jumlah Penambahan** | | **Rp** | **53.020.000** |
| **b. Mutasi Pengurangan** | | | |
| 1) | Reklasifikasi Menjadi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya | Rp | 701.178.839 |
| **Jumlah Pengurangan** | | **Rp** | **701.178.839** |

**a. Mutasi Penambahan**

1) Penambahan Aset Fasos Fasum Aset Tetap Lainnya sebesar Rp28.860.000,00 merupakan Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta berasal dari Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp28.860.000,00 berupa Pembuatan Maket Taman ASEAN (Skala Maket Studio) yang berada di Taman Pekerjaan Umum dan Tenaga

Listrik (PUTL) Jalan Pattimura Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan;

2) Penambahan Aset Fasos Fasum Aset Tetap Lainnya sebesar Rp24.160.000,00 merupakan koreksi kurang catat atas penerimaan aset sebelum Tahun 2024 berasal dari Yayasan Wahana Visi Indonesia sebesar Rp24.160.000,000 berupa aset tetap lainnya yang berada di RPTRA Vlaboean di Jalan Dermaga Raya Nomor 27 A Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.

**b. Mutasi Pengurangan**

Pengurangan Aset Fasos Fasum Aset Tetap Lainnya sebesar Rp701.178.839,00 seluruhnya merupakan reklasifikasi menjadi Aset Tetap yang di antaranya berasal dari:

- PT Metropolitan Land, Tbk sebesar Rp677.018.839,00 dalam rangka Pembangunan Fasilitas Publik Pembangunan Peningkatan Fasilitas Rumah Susun (KSD 58) Dengan Ruang Lingkup Program Kebun Kota D (Konstruksi) yang terletak di Rumah Susun Daan Mogot Tower 6 dan 7 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Yayasan Wahana Visi Indonesia sebesar Rp24.160.000,00 berupa Aset Tetap Lainnya yang berada di RPTRA Vlaboean di Jalan Dermaga Raya Nomor 27 A Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.

**Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Fasos Fasum per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.051.770.742.962,00 dan Rp2.193.154.079.554,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.83
Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| Jenis Aset Tetap Fasos Fasum | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Mutasi Tambah (Rp) | Mutasi Kurang (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) |
| Tanah | - | - | - | - |
| Peralatan dan Mesin | (21.058.533.165) | (18.301.909.801) | (358.790.812) | (39.001.652.154) |
| Gedung dan Bangunan | (813.782.078.036) | (24.622.874.933) | (171.889.922.731) | (666.515.030.238) |
| Jalan. Irigasi dan Jaringan | (1.342.850.407.298) | (110.564.333.079) | (107.166.451.805) | (1.346.248.288.572) |
| Aset Tetap Lainnya | (15.463.061.055) | (5.868.000) | (15.463.157.057) | (5.771.998) |
| **Jumlah** | **(2.193.154.079.554)** | **(153.494.985.813)** | **(294.878.322.405)** | **(2.051.770.742.962)** |

Nilai buku Aset Tetap Fasos Fasum per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.329.120.451.307,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84

Nilai Buku Aset Fasos Fasum

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| Jenis Aset Tetap Fasos Fasum | 31 Desember 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
| Tanah | 19.745.477.315.067 | - | 19.745.477.315.067 |
| Peralatan dan Mesin | 41.166.740.121 | (39.001.652.154) | 2.165.087.967 |
| Gedung dan Bangunan | 861.493.462.266 | (666.515.030.238) | 194.978.432.028 |
| Jalan. Irigasi dan Jaringan | 1.716.259.649.900 | (1.346.248.288.572) | 370.011.361.328 |
| Aset Tetap Lainnya | 16.494.026.915 | (5.771.998) | 16.488.254.917 |
| **Jumlah** | **22.380.891.194.269** | **(2.051.770.742.962)** | **20.329.120.451.307** |

#### 5.3.1.5.4.5 Kas yang Dikonsinyasikan

Kas yang Dikonsinyasikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.168.628.752,00,00 dan Rp27.413.446.297,00. Saldo Kas yang Dikonsinyasikan sebesar Rp2.168.628.752,00,00 terdapat pada Dinas Perhubungan yang merupakan ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Fase 2 yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebesar Rp2.168.628.752,00.

#### 5.3.1.5.4.6 Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) merupakan nilai aset yang diterima atas pelampauan KLB/KDB yang belum diterbitkan SK Penggunaannya.

Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp548.652.428.827,00 dan Rp573.280.906.692,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.85

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Uraian | 31 Desember 2023 (Rp) | Mutasi Tambah (Rp) | Mutasi Kurang (Rp) | 31 Desember 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah | 46.370.625.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 1.022.307.620 | 0 | 0 | 1.022.307.622 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 327.826.135.885 | 922.915.825 | 0 | 328.749.051.710 |
| 4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 197.967.388.187 | 20.819.231.308 | 0 | 218.786.619.495 |

| No | Uraian | 31 Desember 2023 (Rp) | Mutasi Tambah (Rp) | Mutasi Kurang (Rp) | 31 Desember 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 94.450.000 | 0 | 0 | 94.450.000 |
| **Total** | | **573.280.906.692** | **21.742.147.133** | **0** | **548.652.428.827** |

Penjelasan atas rincian mutasi tambah aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB adalah sebagai berikut:

Penyelesaian kewajiban pemenuhan denda Koefisien Lantai Bangunan sebesar Rp21.742.147.133,00 berasal dari:

- PT. Singapropertindo Haryono sebesar Rp922.915.825,00 berupa Perbaikan Interior Jakarta Creative Hub (Co-Working Space) Beserta Fasilitas Pendukungnya pada Gedung Jakarta UKM Center Promosi Waduk Melati, Pekerjaan Tata Pamer Museum Sejarah Jakarta (Pekerjaan di Bangunan Utama) , dan Pekerjaan di Pintu Masuk Alternatif di Bangunan Etnografi Museum Sejarah Jakarta;
- PT. Kepland Investama sebesar Rp20.819.231.308,00 berupa Hasil Revitalisasi Taman Kota Tebet untuk pekerjaan Perimeter Trotoar, Pekerjaan Penanaman dan Pekerjaan Penyempurnaan berlokasi di Taman Kota Tebet Kelurahan Tebet Barat dan Tebet Timur Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan.

**Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)**

Saldo akumulasi penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2024 sebesar Rp112.078.627.721,00.

Nilai Buku untuk Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Harga Perolehan | : | Rp | 548.652.428.827,00 |
| Akumulasi Penyusutan | : | Rp | 112.078.627.721,00 |
| **Nilai Buku Aset per 31 Desember 2024** | **:** | **Rp** | **436.573.801.106,00** |

**5.3.1.5.4.7 Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)**

Aset dalam proses penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) merupakan Barang Milik Daerah yang belum teridentifikasi dan/atau tidak ditemukan antara lain berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2018, 2023, dan 2024. Saldo aset dalam proses penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.055.700.858.515,00 dan Rp4.475.775.978.273,00. Selama Tahun 2024

mutasi pertambahan sebesar Rp1.579.984.130.566,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp 59.250.324,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a. Mutasi Penambahan** | | | |
| 1) | Reklasifikasi Antar Aset Lainnya | Rp | 51.590.000,00 |
| 2) | Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | Rp | 1.579.932.540.566,00 |
| **Jumlah Penambahan** | | **Rp** | **1.579.984.130.566,00** |
| **b. Mutasi Pengurangan** | | | |
| 1) | Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | **Rp** | **59.250.324,00** |

**a. Mutasi Penambahan**

Penambahan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) dari Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp1.579.984.130.566,00 terdiri dari :

1. Penambahan Reklasifikasi dari Aset Lainnya berupa software komputer sebesar Rp51.590.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Penambahan Reklasifikasi Ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp1.579.932.540.566,00, di antaranya:
   - Suction dredger, stationary water pump, mobil tangki air, global positioning system, concrete vibrator, sumersible pump, alat pengukur curah hujan, dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total Rp395.184.091.884,00
   - Toolkit set, lemari penyimpan, lemari besi/metal, rak kayu, filling cabinet besi, lemari kaca, papan pengumuman dan peralatan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total Rp153.688.731.436,00
   - Transistor Tester Semitest I, Overhead Projector, Wireless, Televisi, Stabilisator, Megaphone, Closed Circuit Television (CCTV), Switch dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan total Rp99.993.089.836,00.
   - Server, screen pembaras, alat khusus keamanan lainnya, NComputing, buffet kaca, home theater, PC workstation dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dengan total Rp92.308.232.319,00; dan
   - Pemadat sampah, tool kit set lemari penyimpan, lemari besi/metal, rak kayu, filling cabinet besi, lemari kaca, lemari kayu dan peralatan

mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total Rp78.539.376.032,00.

**b. Mutasi Pengurangan**

Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset menjadi Aset Tetap berupa kendaraan dinas operasional sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor sebesar Rp59.250.324,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 46 Tahun 2023 tentang penghapusan Barang Milik Daerah pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur.

**Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Status Aset (MPSA)**

Saldo akumulasi penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.031.268.442.581,00 merupakan akumulasi penyusutan saat dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap.

Nilai Buku untuk Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Harga Perolehan | : | Rp6.055.700.858.515,00 |
| Akumulasi Penyusutan | : | Rp(3.031.268.442.581,00) |
| **Nilai Buku Aset per 31 Desember 2024** | **:** | **Rp3.024.432.415.934,00** |

**5.3.1.5.4.8 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyajikan akun Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya untuk pengakuan atas Kerugian Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah, terdapat 3 kategori Akuntansi Kerugian Negara/Daerah sebagai berikut:

a. Kerugian Negara/Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara,
b. Kerugian Negara/Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara,
c. Kerugian Negara/Daerah Berdasarkan Putusan Pengadilan.

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp10.697.454.729,00 dan Rp10.697.454.729,00. Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

| No. | Kategori | | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| a. | Kasus Kerugian Daerah dalam Proses | Rp | 6.973.458.546 |
| b. | Informasi Kerugian Daerah - LHP BPK | Rp | 3.605.265.130 |
| c. | Kasus Kas Operasional BLUD Belum Dipertanggungjawabkan pada Puskesmas Tanah Abang | Rp | 108.531.053 |
| d. | Kasus Kehilangan KDO pada Sudin Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Utara | Rp | 10.200.000 |
| | **Jumlah** | **Rp** | **10.697.454.729** |

Saldo Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 belum termasuk kerugian terkait Aset Tetap dan kerugian pada pihak ketiga dengan nilai Rp537.202.435.699,00. Kerugian tersebut sedang dalam proses rekonsiliasi dengan data Aset Tetap. Rincian atas kerugian terkait Aset Tetap dan kerugian pada pihak ketiga sebagai berikut.

| No. | Kategori | Keterangan | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| a. | Kasus Kerugian Daerah dalam Proses | Aset Tetap | 87.825.000 |
| b. | Informasi Kerugian Daerah - LHP BPK | Pihak Ketiga | 471.962.069.890 |
| | | Aset Tetap | 103.651.679 |
| c. | Informasi Kerugian Daerah - LHP APIP | Pihak Ketiga | 65.048.889.130 |
| | **Jumlah** | | **537.202.435.699** |

### 5.3.1.5.4.9 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.481.878.536.635,00 dan Rp5.852.769.750.279,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kategori | | Nilai |
|---|---|---|---|
| a | Treasury Deposit Facility (TDF) | Rp | 3.978.745.231.361,00 |
| b | RPBATA (Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun Anggaran) | Rp | 287.254.844.083,00 |
| c | Bantuan Sosial | Rp | 200.839.374.330,00 |
| d | Hak Pihak Ketiga | Rp | 15.021.154.181,00 |
| e | Dana yang masih dalam proses identifikasi kepemilikannya | Rp | 17.932.680,00 |
| | Jumlah | Rp | 4.481.878.536.635,00 |

**a. *Treasury Deposit Facility* (TDF)**

Dana Bagi Hasil secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.08/2022 dengan mutasi sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo awal Tahun 2024** | **Rp** | **5.635.471.860.000,00** |
| • Penambahan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan KMK 44 Tahun 2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH Pada Tahun 2024 yang penyalurannya dilakukan dalam bentuk non tunai | Rp | 727.840.687.000,00 |
| • Pengurang alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan KMK 44 Tahun 2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH Pada Tahun 2024 yang penyalurannya dilakukan dalam bentuk non tunai | Rp | (3.034.835.000,00) |
| • Penyaluran pada tanggal 25 Maret 2024 dari rekening TDF ke RKUD berdasarkan KMK Nomor 164 Tahun 2024 Tanggal 22 Maret 2024 Tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (yaitu THR) | Rp | (1.189.691.682.627,00) |
| • Penyaluran pada tanggal 12 Juni 2024 dari rekening TDF ke RKUD berdasarkan KMK Nomor 267 Tahun 2024 Tanggal 6 Juni 2024 Tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Gaji Ketiga Belas Di Daerah Tahun Anggaran 2024 | Rp | (1.191.840.798.012,00) |
| **Saldo akhir Tahun 2024** | **Rp** | **3.978.745.231.361,00** |

**b. RPBATA (Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun Anggaran)**

1) **Penjelasan RPBATA**

Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 31/SE/2024 tentang Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2024, Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun Anggaran adalah rekening khusus milik BUD untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan SPM sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2024 dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Tahun Anggaran 2024 dan diberi kesempatan untuk dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2025.

Berikut penjelasan singkat mengenai mekanisme pembayaran pekerjaan kontraktual dengan RPBATA:

a) SKPD mengajukan SPM-LS Kontraktual kepada SBPKD selaku Kuasa BUD di antara batas akhir pengajuan SPM sampai dengan

31 Desember 2024 dengan dengan menghitung sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sebagai dasar perhitungan potongan jaminan pembayaran melalui RPBATA;

b) atas sisa pekerjaan yang belum terselesaikan tersebut dihitung sebagai nilai potongan jaminan pembayaran dalam potongan SPM-LS Kontraktual;

c) potongan jaminan pembayaran dalam potongan SPM-LS Kontraktual ditampung dalam RPBATA yang dikelola oleh SBPKD selaku Kuasa BUD sesuai lingkup wilayah kerja;

d) SKPD mengajukan Surat Permintaan Pencairan Uang Jaminan sesuai dengan BAST pekerjaan;

e) Kuasa BUD melakukan pemindahbukuan ke:

(1) Penyedia

- Kontrak Harga Satuan:
  Pemindahbukuan sebesar bobot pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia.
- Kontrak Termin:
  Pemindahbukuan sebesar nilai termin yang telah diselesaikan oleh penyedia.

(2) RKUD

Pemindahbukuan sebesar bobot/ termin yang tidak dapat diselesaikan oleh penyedia.

2) **Saldo RPBATA Per 31 Desember 2024**

Saldo RPBATA per 31 Desember 2024 sebesar Rp 287.254.844.083,00 dengan mutasi sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Penampungan potongan jaminan pembayaran ke RPBATA | Rp | 299.362.569.753,00 |
| Pemindahbukuan ke pihak penyedia di Tahun 2024 | Rp | (12.107.725.670,00) |
| Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024 | Rp | 287.254.844.083,00 |

a) Posisi Saldo RPBATA per 31 Desember 2024

Pengusulan SPM-LS Kontraktual dengan potongan jaminan pembayaran RPBATA dilakukan di SBPKD selaku Kuasa BUD sesuai lingkup wilayah kerja. Berikut posisi saldo potongan jaminan pembayaran per 31 Desember 2024.

| Nama Rekening | No Rekening Bank DKI | Saldo 31 Des 2024 |
|---|---|---|
| RKPBATA SBPKD Jakarta Pusat | 11152800212 | 136.010.480.200,00 |
| RKPBATA SBPKD Jakarta Utara | 20152800220 | 15.400.479.584,00 |

| | | |
|---|---|---|
| RKPBATA SBPKD Jakarta Barat | 30352800231 | 4.891.602.712,00 |
| RKPBATA SBPKD Jakarta Selatan | 40452800243 | 13.960.993.986,00 |
| RKPBATA SBPKD Jakarta Timur | 50352800250 | 116.991.287.601,00 |
| **Jumlah** | | **287.254.844.083,00** |

b) Posisi Pekerjaan menggunakan RPBATA

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya di RPBATA atas penyelesaian pekerjaan kontraktual akhir tahun pada 16 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama SKPD | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Dinas Lingkungan Hidup | 121.145.021.884,00 |
| 2 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 39.005.328.999,00 |
| 3 | Satuan Polisi Pamong Praja | 18.853.050.000,00 |
| 4 | Dinas Sumber Daya Air | 16.893.201.840,00 |
| 5 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 16.326.683.559,00 |
| 6 | Dinas Kesehatan | 13.131.730.326,00 |
| 7 | Badan Kepegawaian Daerah | 13.040.461.637,00 |
| 8 | Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah | 10.305.116.086,00 |
| 9 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan | 8.229.343.009,00 |
| 10 | Inspektorat | 7.597.280.000,00 |
| 11 | Dinas Sosial | 6.894.703.021,00 |
| 12 | Dinas Perhubungan | 5.303.133.852,00 |
| 13 | Badan Pendapatan Daerah | 5.119.087.134,00 |
| 14 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 3.706.773.294,00 |
| 15 | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi | 1.397.376.442,00 |
| 16 | Sekretariat DPRD | 306.553.000,00 |
| **Jumlah** | | **287.254.844.083,00** |

Penjelasan atas pekerjaan dengan RPBATA per 31 Desember 2024 di antaranya:

- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp121.145.021.884,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian Pekerjaan | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| *Dinas Lingkungan Hidup* | | |
| 1 | Pengadaan KDO khusus | 48.046.332.950,00 |
| 2 | Pengadaan alat laboratorium untuk pemantauan dan pemulihan kualitas udara | 38.480.000.000,00 |
| 3 | Rehabilitasi Gedung Dinas Lingkungan Hidup | 8.231.679.460,00 |
| 4 | Penyusunan kajian dan kebijakan pengolahan sampah | 2.057.540.400,00 |
| 5 | Penyusunan kajian dan kebijakan teknis penanganan sampah | 1.755.548.250,00 |
| 6 | Penyusunan kajian dan kebijakan pengelolaan Sampah | 358.724.250,00 |
| 7 | Sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 235.000.000,00 |
| | *Jumlah Dinas Lingkungan Hidup* | *99.164.825.310,00* |
| *Unit Penanganan Sampah Badan Air* | | |
| 1 | Pembangunan fasilitas pendukung Saringan Sampah TB. Simatupang | 9.524.210.390,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Pengadaan penunjang penanganan sampah | 3.309.420.600,00 |
| | *Jumlah Unit Penanganan Sampah Badan Air* | *12.833.630.990,00* |
| *Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara* | | |
| 1 | Peningkatan TPS menjadi TPS 3R | 4.529.073.570,00 |
| | *Jumlah Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara* | *4.529.073.570,00* |
| *Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur* | | |
| 1 | Peningkatan TPS menjadi TPS 3R | 3.153.742.014,00 |
| | *Jumlah Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur* | *3.153.742.014,00* |
| *Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat* | | |
| 1 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 1.463.750.000,00 |
| | *Jumlah Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat* | *1.463.750.000,00* |
| | **Jumlah** | **121.145.021.884,00** |

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk pembangunan rumah susun Jagakarsa – Jakarta Selatan sebesar Rp39.005.328.999,00;
- Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp18.853.050.000,00 dengan rincian untuk pengadaan seragam kerja Satpol PP sebesar Rp18.283.770.000,00 dan pengadaan alat kelengkapan/ atribut lapangan *(multi tactical tools)* sebesar Rp569.280.000,00;
- Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp16.893.201.840,00 dengan rincian Dinas Sumber Daya Air untuk pembangunan Waduk Marunda dan bangunan kelengkapannya di pesisir Jakarta sebesar Rp12.432.186.006,00 dan pengadaan alat monitoring penurunan tanah dan pengembangan kawasan pesisir pantai sebesar Rp3.230.318.122,00 serta Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Pembangunan Saluran, Saluran PHB dan kelengkapannya sebesar Rp1.230.697.712,00; dan
- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp16.326.683.559,00 dengan rincian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk penyelenggaraan Festival Malam Tahun Baru sebesar Rp12.665.778.559,00 dan Unit Pengelola Kawasan Kota Tua untuk penyelenggaraan *Jakarta Lights Festival* sebesar Rp3.660.905.000,00.

3) **Penyelesaian RPBATA**

Atas pekerjaan yang mendapatkan kesempatan penyelesaian melewati periode pelaporan sebesar Rp287.254.844.083,00, mekanisme pemindahbukuan sampai dengan tanggal 7 Januari 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| Penyelesaian RPBATA | Penyedia | RKUD | Total |
|---|---|---|---|
| • Pemindahbukuan penuh ke penyedia | 258.099.239.034,00 | 0 | 258.099.239.034,00 |
| • Pemindahbukuan sebagian ke penyedia dan sebagian ke RKUD | 21.148.819.817,00 | 2.909.190.397,00 | 24.058.010.214,00 |
| • Pemindahbukuan penuh ke RKUD | 0 | 5.097.594.835,00 | 5.097.594.835,00 |
| **Jumlah** | **279.248.058.851,00** | **8.006.785.232,00** | **287.254.844.083,00** |

a) Pemindahbukuan dari RPBATA ke penyedia sepenuhnya

Pemindahbukuan sebesar Rp258.099.239.034,00 ke penyedia atas sisa pekerjaan yang dapat diselesaikan seluruhnya di antaranya terdapat pada:

- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp98.622.755.310,00 atas semua pekerjaan kecuali 2 kontrak pengadaan KDO khusus; dan
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp39.005.328.999,00 untuk pembangunan rumah susun Jagakarsa – Jakarta Selatan.

b) Pemindahbukuan dari RPBATA sebagian ke penyedia dan sebagian ke RKUD

Pemindahbukuan sebesar Rp21.148.819.817,00 ke penyedia atas sisa pekerjaan dengan kontrak harga satuan yang telah diselesaikan dan pemindahbukuan ke RKUD sebesar Rp2.909.190.397,00 di antaranya terdapat pada:

- Badan Kepegawaian Daerah atas pengadaan mebel dalam rangka renovasi ruang kerja, pemindahbukuan sebesar Rp9.658.015.299,00 ke penyedia dan sebesar Rp951.307.644,00 ke RKUD.
- Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah atas pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemindahbukuan sebesar Rp6.941.657.949,00 ke penyedia dan sebesar Rp896.091.403,00.

c) Pemindahbukuan dari RPBATA ke RKUD sepenuhnya

Pemindahbukuaan sebesar Rp5.097.594.835,00 ke RKUD atas pekerjaan dengan kontrak termin yang tidak dapat diselesaikan di antaranya terdapat pada:

- Dinas Sumber Daya Air atas pengadaan alat monitoring penurunan tanah dan pengembangan kawasan pesisir pantai sebesar Rp3.230.318.122,00;
- Dinas Sosial atas pembuatan *Detail Engineering Design* (DED) dan rehab berat gedung panti sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 4 Ciracas sebesar Rp1.179.501.288,00.

**c. Bantuan Sosial**

Saldo rekening khusus pada Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan merupakan dana bantuan sosial yang akan disalurkan ke penerima pada tahun anggaran berikutnya sebesar Rp200.839.374.330,00 dengan rincian sebagai berikut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | KJP Plus TA 2023 | Rp | 9.042.835.200,00 |
| 2. | KJP Plus TA 2024 | Rp | 154.978.743.130,00 |
| 3. | KJMU TA 2024 | Rp | 27.333.000.000,00 |
| 4. | BPMS TA 2024 | Rp | 9.424.796.000,00 |
| 5. | Beasiswa Anak Nakes TA 2024 | Rp | 60.000.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 200.839.374.330,00 |

**d. Hak Pihak Ketiga**

Hak pihak ketiga yang masih ada di rekening per 31 Desember 2024 dan akan dikembalikan sebesar Rp15.021.154.181,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Saldo rekening khusus pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.484.107.833,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a) sebesar Rp7.699.352.973,00 berupa Uang Titipan Sewa Rumah ber-SIP yang di mana rumah tersebut merupakan rumah milik warga negara asing yang meninggalkan Indonesia pada saat kemerdekaan dan tidak berpenghuni saat itu. Sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 tentang Urusan Perumahan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemakaian suatu perumahan hanya sah, apabila untuk itu lebih dahulu diberikan sehelai surat izin oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Sosial”. Selanjutnya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta penyelesaian atas rumah Ber-SIP dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
   b) sebesar Rp784.754.860,00 berupa Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa yang merupakan uang yang dititipkan oleh pemilik sah rumah kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diperuntukkan sebagai kompensasi atas pengosongan rumah kepada penyewa.
2) Saldo rekening khusus pada Unit Pengelola Perparkiran sebesar Rp3.869.544.020,00 merupakan uang jaminan pihak ke 3 dalam rangka

Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan perparkiran. Per 31 Desember 2024, terdapat 73 Perusahaan yang melakukan pengikatan kerja sama dengan UP Perparkiran. Saldo ini masih terdapat uang jaminan lebih setor sebesar Rp24.324.999,00 dan uang jaminan belum dicairkan sehubungan dengan telah berakhir masa kontraknya sebesar Rp351.200.000,00.

3) Saldo rekening khusus pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.504.261.554,00 merupakan uang jaminan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk penyelenggaraan pajak hiburan insidental.
4) Saldo rekening khusus pada Dinas Pendidikan sebesar Rp107.270.270,00 merupakan dana untuk pembayaran ke PT Avant Solusi Servispro atas jasa sewa mesin fotocopy periode Oktober 2024 – Desember 2024.
5) Saldo rekening khusus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp55.970.504,00 dengan rincian sebagai berikut:
    a) sebesar Rp43.562.242,00 pada rekening khusus pajak di bank CIMB Niaga atas kelebihan transfer yang belum diretur ke wajib pajak;
    b) sebesar Rp9.515.707,00 pada rekening khusus pajak di BRI atas kelebihan transfer yang belum diretur ke wajib pajak;
    c) sebesar Rp1.591.487,00 pada rekening khusus pajak di Bank Mandiri atas pembayaran ganda yang belum diretur ke wajib pajak; dan
    d) sebesar Rp1.301.068,00 merupakan jasa giro rekening penerima hibah milik BPSK yang tertarik oleh BUD.

**e. Dana yang masih dalam proses identifikasi kepemilikannya**

Saldo rekening khusus per 31 Desember 2024 yang masih dalam proses identifikasi kepemilikannya sebesar Rp17.932.680,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Sebesar Rp16.063.067,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
    a) pada Rekening Khusus Penerimaan Pajak nomor 0019-01-001755-30-2 di PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk sebesar Rp10.774.004,00;
    b) pada Rekening Khusus Penerimaan Pajak nomor 0018-01-004391-30-7 di PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk sebesar Rp5.282.046,00; dan
    c) pada Rekening Khusus Pajak Daerah nomor 104-00-22062017 di PT Bank Mandiri, Tbk sebesar Rp7.017,00.

2) Sebesar Rp1.869.613,00 pada Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

a) pada rekening BOS Sekolah Dasar Negeri merupakan penerimaan lain-lain pada SDN Rawa Badak Selatan 07 sebesar Rp50.000,00 dan kelebihan pengembalian saldo rekanan pada SDN Pademangan Barat 09 Pagi Jakarta sebesar Rp600,00;

b) pada Rekening PKBM Negeri sebesar Rp1.500.000,00 merupakan saldo peng-nonaktifan rekening sekolah (rekening *dormant*) agar rekening tersebut tidak mati yang terdapat di tiga belas jenjang PKBM Negeri dengan rincian sebagai berikut.

| No | Jenjang | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | PKBM Negeri 23 | 100.000 |
| 2 | PKBM Negeri 08 | 50.000 |
| 3 | PKBM Negeri 11 | 150.000 |
| 4 | PKBM Negeri 10 | 100.000 |
| 5 | PKBM Negeri 25 | 100.000 |
| 6 | PKBM Negeri 35 | 50.000 |
| 7 | PKBM Negeri 33 | 50.000 |
| 8 | PKBM Negeri 13 | 100.000 |
| 9 | PKBM Negeri 22 | 250.000 |
| 10 | PKBM Negeri 38 | 150.000 |
| 11 | PKBM Negeri 30 | 150.000 |
| 12 | PKBM Negeri 06 | 150.000 |
| 13 | PKBM Negeri 37 | 100.000 |
| | **Jumlah** | **1.500.000** |

c) pada Rekening TPA Negeri Bina Tunas Jaya X sebesar Rp4.610,00 merupakan penerimaan lain-lain yang terdapat di satu jenjang TPA Negeri; dan

d) pada Rekening TK Negeri sebesar Rp314.403,00 merupakan pembelian cek yang menggunakan dana sendiri yang disetor ke rekening TK yang terdapat di tiga TK Negeri dengan rincian di bawah ini.

| No | Jenjang | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | TK Negeri Pulau Kelapa 01 | 214.403 |
| 2 | TK Negeri Pulau Kelapa 01 | 50.000 |
| 3 | TK Negeri Cilincing 01 | 50.000 |
| | **Jumlah** | **314.403** |

### 5.3.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp18.006.116.758.451,00 dan Rp17.426.015.191.033,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.86

Kewajiban

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Jenis Kewajiban | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kewajiban Jangka Pendek | 4.023.225.107.246 | 4.263.242.971.187 |
| 2. | Kewajiban Jangka Panjang | 13.982.891.651.205 | 13.162.772.219.846 |
| **JUMLAH** | | **18.006.116.758.451** | **17.426.015.191.033** |

### 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.023.225.107.246,00 dan Rp4.263.242.971.187,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.87

Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1. | Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 1.615.238.139 | 652.047.503 |
| 2. | Utang Bunga Pinjaman | 15.646.130.966 | 14.739.619.252 |
| 3. | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 1.981.669.834.064 | 1.861.669.834.064 |
| 4. | Pendapatan Diterima Di muka | 221.835.170.345 | 216.488.454.965 |
| 5. | Utang Belanja | 1.780.943.311.694 | 2.147.127.573.272 |
| 6. | Utang Jangka Pendek Lainnya | 15.141.616.464 | 16.377.359.980 |
| 7. | Utang Jaminan | 6.373.805.574 | 6.188.082.151 |
| | **Jumlah** | **4.023.225.107.246** | **4.263.242.971.187** |

#### 5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.615.238.139,00 dan Rp652.047.503,00. Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak seperti PPN, Pajak Penghasilan, atau pungutan lainnya. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.88

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Jenis Utang PFK di SKPD | 31 Desember 2024 (Rp) | | 31 Desember 2023 (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PPKD | SKPD | PPKD | SKPD |
| **A.** | **Utang PFK Pajak** | | | | |
| 1. | Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD | 242.071.200 | 136.199.339 | 242.071.200 | 10.127.516 |

| No. | Jenis Utang PFK di SKPD | 31 Desember 2024 (Rp) | | 31 Desember 2023 (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PPKD | SKPD | PPKD | SKPD |
| 2. | Utang PPh 21 Dana BLUD | 0 | 7.358.272 | 0 | 4.236.597 |
| 3. | Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD | 0 | 806.207 | 0 | 0 |
| 4. | Utang PPh 22 Dana BLUD | 0 | 85.338.007 | 0 | 9.407.912 |
| 5. | Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD | 0 | 3.055.388 | 0 | 3.731.557 |
| 6. | Utang PPh 23 Dana BLUD | 0 | 29.745.099 | 0 | 17.412.406 |
| 7. | Utang PPN di SKPD dan PPKD | 0 | 53.760.134 | 0 | 136.394.402 |
| 8. | Utang PPN Dana BLUD | 0 | 818.976.945 | 0 | 92.612.382 |
| **B.** | **Utang Asuransi** | | | | |
| 11. | Utang BPJS Kesehatan | 0 | 114.822.685 | 0 | 111.955.006 |
| 12. | Utang BPJS Ketenagakerjaan | 0 | 0 | 0 | 22.947.025 |
| **C.** | **Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lain-Lain** | | | | |
| 13. | Utang PFK Lainnya | 0 | 123.104.863 | 0 | 1.151.500 |
| | **Jumlah** | **242.071.200** | **1.373.166.939** | **242.071.200** | **409.976.303** |
| | **Jumlah Utang PFK** | **1.615.238.139** | | **652.047.503** | |

Secara lebih rinci Utang PFK dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di BPKD, SKPD, dan BLUD**

Utang PFK Tahun 2024 merupakan keseluruhan potongan atau pungutan yang dilakukan oleh BUD, bendahara SKPD dan Bendahara BLUD yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetorkan kepada pihak yang berhak. Utang PFK tersebut terdiri dari:

1) **Utang PFK Pajak di BPKD**

Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang PFK Pajak di BPKD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp242.071.200,00. Utang PFK Pajak di BPKD tersebut merupakan utang PPH Pusat. Hal tersebut merupakan kasus tuntutan perbendaharaan bendahara pengeluaran di Walikota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2009. Surat pembebanan Sementara untuk kasus kerugian ini telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1212 Tahun 2014 tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara atas Nama Febuardianto, S.E. NIP 197102261998031009 Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat. Berdasarkan hasil Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) kasus tersebut tidak dapat ditindak lanjuti.

2) **Utang PFK Pajak di SKPD**

Utang PFK Pajak di SKPD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang

sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum disetor ke Kas Negara. Utang PFK di SKPD terdapat di Dinas Pendidikan pada 89 sekolah (sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah).

Utang PFK Pajak di SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp193.821.068,00 dan Rp150.253.475,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.89
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Jenis Utang PFK di SKPD | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1. | Utang Pemotongan PPh Pasal 21 | 136.199.339 | 10.127.516 |
| 2. | Utang Pemotongan PPh Pasal 22 | 806.207 | 0 |
| 3. | Utang Pemotongan PPh Pasal 23 | 3.055.388 | 3.731.557 |
| 4. | Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) | 0 | 0 |
| 5. | Utang Pemotongan PPN | 53.760.134 | 136.394.402 |
| | **Jumlah** | **193.821.068** | **150.253.475** |

3) **Utang PFK Pajak di BLUD**

Utang PFK Pajak di BLUD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di BLUD atas dana BLUD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum disetor ke Kas Negara. Utang PFK Pajak di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp941.418.323,00 dan Rp123.669.297,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.90
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Jenis Utang PFK di BLUD | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1. | Utang Pemotongan PPh Pasal 21 | 7.358.272 | 4.236.597 |
| 2. | Utang Pemotongan PPh Pasal 22 | 85.338.007 | 9.407.912 |
| 3. | Utang Pemotongan PPh Pasal 23 | 29.745.099 | 17.412.406 |
| 4. | Utang Pemotongan PPN | 818.976.945 | 92.612.382 |
| | **Jumlah** | **941.418.323** | **123.669.297** |

Utang PFK di BLUD dengan jumlah dua terbesar terdapat pada RSUD Kalideres sebesar Rp545.656.474,00 dan RSUD Koja sebesar Rp395.687.690,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.91
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD Tiga Terbesar
Per 31 Desember 2024

| No. | Jenis Pajak | RSUD Kalideres (Rp) | RSUD Koja (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1. | Utang Pemotongan PPh Pasal 21 | 7.358.272 | 0 |
| 2. | Utang Pemotongan PPh Pasal 22 | 49.272.123 | 36.001.445 |
| 3. | Utang Pemotongan PPh Pasal 23 | 17.061.761 | 12.673.618 |
| 4. | Utang Pemotongan PPN | 471.964.318 | 347.012.627 |
| | **Jumlah** | **545.656.474** | **395.687.690** |

**b. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan**

Utang PFK BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum disetor ke BPJS.

Utang PFK BPJS Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp114.822.685,00 dan Rp111.955.006,00.

Utang PFK BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp22.947.025,00.

Pada Tahun 2024 Utang BPJS Kesehatan tercatat pada:

1) RSUD Koja Jakarta Utara sebesar Rp78.817.337,00;
2) RSUD Cipayung Jakarta Timur sebesar Rp32.255.472,00; dan
3) RSUD Budhi Asih Jakarta Timur sebesar Rp3.749.876,00.

**c. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya**

Utang PFK Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 Rp123.104.863,00 dan Rp1.151.500,00. Utang PFK Lainnya di antaranya terdapat pada SMKN 57 sebesar Rp123.104.863,00 merupakan utang pajak perhotelan yang belum disetor sampai 31 Desember 2024.

**5.3.2.1.2 Utang Bunga Pinjaman**

Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp15.646.130.966,00 dan Rp14.739.619.252,00. Utang bunga kepada Pemerintah Pusat merupakan perhitungan akrual atas:

a. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang berupa pinjaman dari Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) proyek JEDI nomor SLA–1247/DSMI/2012 penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang rupiah. Utang bunga pinjaman proyek JEDI per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.207.413.707,00. Perhitungan Utang Bunga pinjaman proyek JEDI per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.92

Perhitungan Utang Bunga (Akrual) JEDI

Per 31 Desember 2024

| No | Jenis Pinjaman | Periode Bunga | Utang | Bunga Berjalan (Rp) | Utang Bunga Akrual per 31 Des 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=4/3*5** |
| 1 | SLA–1247/DSMI/2012 | 6 bulan | 4 bulan | 13.811.120.560 | 9.207.413.707 |

b. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang berupa pinjaman dari Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) proyek MRT *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) nomor SLA 1263/DSMI/2016 dan *phase II* nomor SLA 1295/DSMI/2023 (Jakarta Kota – Bundaran HI) penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang yen yang dikonversi ke dalam rupiah. Nilai bunga sebesar Rp4.694.656.722,00 dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2024 sebesar Rp102,36 per 1 yen. Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.93

Perhitungan Utang Bunga (Akrual) MRT

Per 31 Desember 2024

| No | Jenis Pinjaman | Utang Pokok (Yen) | Suku Bunga (%) | Jumlah Hari Akrual s.d. 31 Des | Jumlah Periode 1 tahun | Kurs Tengah BI Akhir Tahun 2024 (Rp) * | Utang Bunga per 31 Des 24 (Yen) | Utang Bunga per 31 Des 24 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=((4*3*5)/6)** | **9=7*8** |
| **I** | **MRT *Phase* I** | | | | | | | |
| 1 | Konstruksi | 53.111.965.130 | 0,44% | 11 | 365 | 102,36 | 7.042.792 | 720.917.444 |
| 2 | Konsultan | 3.849.036.997 | 0,35% | 11 | 365 | 102,36 | 405.994 | 41.558.541 |
| | **Total *Phase* I** | | | | | | **7.448.786** | **762.475.985** |
| **II** | **MRT *Phase* II terdiri atas 74 transaksi perhitungan bunga** | | | | | | | |
| | **Total *Phase* II** | | | | | | **38.414.289** | **3.932.180.737** |
| **TOTAL *Phase* I & II** | | | | | | | **45.863.075** | **4.694.656.722** |

** Pembulatan dari nilai kurs tengah BI sebesar Rp102,36245*

c. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang berupa Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional dari Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-239B/SMI/1221 Tanggal 30 Desember 2021 yang telah dinyatakan kembali dengan Akta No. 85 Tanggal 23 September 2021. Nilai bunga sebesar Rp1.744.060.537,00 dihitung dengan menggunakan Rupiah. Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.94

Perhitungan Utang Bunga Per 31 Desember 2024

| No | Jenis Pinjaman | Nilai yang ditarik pemerintah (Rp) | Periode Bunga | Periode Utang | Pembayaran Bunga Per 25 Jan 2025 (Rp) | Utang Bunga Akrual per 31 Des 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 / 4 * 6 |
| 1 | PEN_PT SMI | 4.074.967.079.587 | 31 hari | 7 hari | 7.723.696.663 | 1.744.060.537 |
| TOTAL | | | | | | 1.744.060.537 |

#### 5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.981.669.834.064,00 dan Rp1.861.669.834.064,00. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 merupakan nilai yang akan dibayarkan pada Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

a. Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)

   Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI) merupakan bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat atas Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Proyek JEDI Nomor SLA–1247/DSMI/2012 sebesar Rp33.629.623.430,00 yang penilaiannya menggunakan mata uang Rupiah. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

b. Bagian Lancar Utang – PEN

   Bagian Lancar Utang – PEN merupakan bagian lancar utang yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) atas pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN yang didasarkan atas Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-181/SMI/1220 tanggal 21 Desember 2020 atas Perubahan I Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020, Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor 8 tanggal 12 April 2021, dan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor 85 tanggal 23 September 2021. Saldo Bagian Lancar Utang – PEN Per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.828.040.210.634,00.

c. Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1263 (Proyek MRT)

   Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1263 (Proyek MRT) merupakan bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat atas Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Proyek MRT Nomor SLA–1263/DSMI/2016 sebesar JPY933.817.622 yang dikonversi ke dalam rupiah sebesar

Rp120.000.000.000,00. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta *Phase* I (Lebak Bulus – Bundaran HI).

#### 5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah pembayaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum diberikannya pelayanan. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp221.835.170.345,00 dan Rp216.488.454.965,00. Perbandingan tersebut digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.95
Pendapatan Diterima di Muka
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah | 2.511.423.274 | 3.506.186.150 |
| 2 | Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah | 198.463.584.362 | 24.944.175.550 |
| 3 | Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa | 0 | 112.033.643.034 |
| 4 | Pendapatan Diterima di Muka Hasil Lelang Titik Reklame | 0 | 0 |
| 5 | Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah | 0 | 39.266.042.398 |
| 6 | Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna | 0 | 910.687.396 |
| 7 | Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD | 3.175.331.199 | 2.988.648.669 |
| 8 | Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama pihak lain BLUD | 17.684.831.510 | 19.909.645.124 |
| 9 | Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD yang sah | 0 | 12.929.419.406 |
| 10 | Pendapatan Diterima di Muka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan | 0 | 7.238 |
| | **Total** | **221.835.170.345** | **216.488.454.965** |

**a. Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah**

Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah disajikan sebesar Rp2.511.423.274,00 yang merupakan perolehan pajak yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah yang berasal dari kelebihan pembayaran pokok pajak daerah terdiri dari Pajak PBBP2 sebesar Rp2.076.828.174,00, Pajak Reklame sebesar Rp274.082.656,00, Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebesar Rp130.657.592,00, dan Pajak Air Tanah sebesar Rp29.854.852,00.

**b. Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah**

Pendapatan Diterima Di muka Retribusi Daerah sebesar Rp198.463.584.362,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.96

Pendapatan Diterima Di muka Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| NO | SKPD | Uraian | Pendapatan Diterima di Muka s.d Desember 2024 (Rp) | Pendapatan Diterima di Muka s.d Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian | Retribusi Pemakaian Fasilitas Sarana Prasarana Perikanan. | 654.086.000 | 601.772.280 |
| 2 | Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 3.155.000 | 21.905.384 |
| 3 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Retribusi Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun | 0 | 135.544.445 |
| 4 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Sewa Tanah Makam Tumpangan 25% | 0 | 468.655.972 |
| 5 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Perpanjangan Sewa Tanah Makam | 0 | 20.974.861.389 |
| 6 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 9.520.309.861 | 0 |
| 7 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing | 60.525.868.675 | 0 |
| 8 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Retribusi Kios | 1.549.366.000 | 1.549.366.000 |
| 9 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Retribusi Pemakaian Ruangan | 97.110.000 | 97.110.000 |
| 10 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Retribusi Penyediaan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan | 1.094.960.080 | 1.094.960.080 |
| 11 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Retribusi Sewa Rusunawa | 9.708.063.550 | 0 |
| 12 | Badan Pengelolaan Aset Daerah | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 115.310.665.196 | 0 |
| | | **Jumlah** | **198.463.584.362** | **24.944.175.550** |

Saldo Pendapatan Diterima Di muka Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Aset Daerah sebesar Rp115.310.665.196,00 semula berasal dari :

1) Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa sebesar Rp72.228.358.503,00;
2) Pendapatan Diterima di Muka Hasil Lelang Titik Reklame sebesar Rp Rp35.697.485.620,00;
3) Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah sebesar Rp Rp6.677.254.124,00; dan
4) Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna sebesar Rp707.566.949,00.

**c. Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa**

Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 dan Rp112.033.643.034,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa mengalami perubahan klasifikasi menjadi Pendapatan Diterima Di Muka Retribusi Daerah. Lebih lanjut penjelasan terkait Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa dijelaskan pada Pendapatan Diterima Di Muka Retribusi Daerah.

**d. Pendapatan Diterima di Muka Hasil Lelang Titik Reklame**

Pendapatan Diterima Di muka Hasil Lelang Titik Reklame sebesar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 dan Rp,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Diterima Di muka Hasil Lelang Titik Reklame mengalami perubahan klasifikasi menjadi Pendapatan Diterima Di Muka Retribusi Daerah. Lebih lanjut penjelasan terkait Pendapatan Diterima Di muka Hasil Lelang Titik Reklame dijelaskan pada Pendapatan Diterima Di Muka Retribusi Daerah.

**e. Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah**

Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 dan Rp39.266.042.398,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah mengalami perubahan klasifikasi menjadi Pendapatan Diterima Di Muka Retribusi Daerah. Lebih lanjut penjelasan terkait Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah dijelaskan pada Pendapatan Diterima Di Muka Retribusi Daerah.

**f. Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna**

Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 dan Rp910.687.396,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Bangun Serah Guna mengalami perubahan klasifikasi menjadi Pendapatan Diterima Di Muka Retribusi Daerah. Lebih lanjut penjelasan terkait Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna dijelaskan pada Pendapatan Diterima Di Muka Retribusi Daerah.

**g. Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD**

Pendapatan Diterima Di muka Jasa Layanan Umum BLUD disajikan sebesar Rp3.175.331.199,00 merupakan:

1) Uang Muka Pasien dan Uang Titipan BLUD Kesehatan sebesar Rp3.025.930.099,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No. | SKPD | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu | 21.845.181 |
| 2 | BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Matraman | 2.398.597.850 |
| 3 | BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Koja | 70.571.257 |
| 4 | BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan | 60.968.800 |
| 5 | BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng | 459.647.011 |
| 6 | BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo | 8.800.000 |
| 7 | BLUD Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit | 5.500.000 |
| **Total BLUD Kesehatan** | | **3.025.930.099** |

2) Uang Muka Jasa BLUD Non Kesehatan sebesar Rp149.401.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No. | SKPD | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | SMKN 27 Jakarta | 8.500.000 |
| 2 | SMKN 57 Jakarta | 134.197.100 |
| 3 | Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung | 6.704.000 |
| **Total BLUD Non Kesehatan** | | **149.401.100** |

**h. Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD**

Pendapatan Diterima Di muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD sebesar Rp17.684.831.510,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.97

Pendapatan Diterima Di muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD

| No. | SKPD | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu | 1.105.262.787 |
| 2 | Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres | 2.963.261.364 |
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama | 21.241.600 |
| 4 | Rumah Sakit Umum Daerah Koja | 1.201.993.322 |
| 5 | Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan | 2.391.187.019 |
| 6 | Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng | 176.069.550 |
| 7 | Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo | 805.825.000 |
| 8 | Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih | 12.693.057 |
| 9 | Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit | 428.837.122 |
| 10 | Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan | 4.768.122.130 |
| 11 | Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung | 1.246.746.333 |

| No. | SKPD | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 12 | Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang | 2.563.592.226 |
| | **Total** | **17.684.831.510** |

#### 5.3.2.1.5 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing Rp1.780.943.311.694,00 dan Rp2.147.127.573.272,00. Dari nilai saldo utang belanja per 31 Desember 2024 tersebut dijelaskan secara rinci pada Lampiran 13.1, Lampiran 13.2 dan Lampiran 13.3. Adapun rincian saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.98
Rincian Saldo Utang Belanja
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Rekening | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Utang Belanja Pegawai | 773.782.580.212 | 897.763.135.326 |
| 2 | Utang Belanja Barang | 19.922.520.581 | 12.002.332.272 |
| 3 | Utang Belanja Jasa Non TALI | 257.558.168.325,00 | 119.392.881.363 |
| 4 | Utang Belanja TALI | 57.070.645.240 | 56.801.584.954 |
| 5 | Utang Belanja Pemeliharaan | 30.746.012.909,00 | 27.093.304.167 |
| 6 | Utang Belanja Perjalanan Dinas | 5.807.866.453 | 0 |
| 7 | Utang Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 39.621.750.000 | 1.133.137.500 |
| 8 | Utang Belanja Modal Tanah | 159.840.000 | 0 |
| 9 | Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 77.630.836.424 | 234.425.902 |
| 10 | Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 160.290.717.717 | 77.447.682.079 |
| 11 | Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 36.308.552.213 | 72.808.520.333 |
| 12 | Utang Belanja Pegawai BLUD | 13.507.051.040 | 14.696.755.850 |
| 13 | Utang Belanja Barang Jasa BLUD | 230.510.277.449 | 176.808.371.586 |
| 14 | Utang Belanja Modal BLUD | 5.187.082.639 | 2.118.428.162 |
| 15 | Utang Belanja Subsidi | 72.839.410.492 | 688.827.013.778 |
| | **Jumlah** | **1.780.943.311.694** | **2.147.127.573.272** |

Penjelasan lebih rinci atas akun Utang Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Utang Belanja Pegawai**

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp773.782.580.212,00 dan Rp897.763.135.326,00. Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) Utang belanja TPP Bulan Desember 2024 sebesar Rp766.288.144.830,00 tercatat pada seluruh SKPD Penggabung;

2) Utang kekurangan pembayaran Tunjangan PPh pegawai sebesar Rp7.457.682.952,00 di antaranya tercatat pada Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp3.091.417.751,00;
3) Utang kekurangan pembayaran TPP selain bulan Desember 2024 sebesar Rp36.053.670,00 tercatat pada Dinas Pendidikan;
4) Utang kekurangan pembayaran gaji pegawai sebesar Rp698.760,00 di antaranya tercatat pada Dinas Kebudayaan.

Rincian Utang Belanja Pegawai disajikan dalam Lampiran 13.1.

**b. Utang Belanja Barang**

Saldo Utang Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp19.922.520.581,00 dan Rp12.002.332.272,00. Utang Belanja Barang merupakan pembelian barang operasional SKPD. Utang belanja Barang per 31 Desember 2024 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) Satpol PP sebesar Rp18.853.050.000,00 di antaranya merupakan utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
2) UP Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp421.730.876,00 yang di antaranya merupakan utang atas pengadaan alat lab, *integrated library equipment*, bangku, papan tulis dan mikroskop *digital* observasi;
3) Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp187.327.914,00 merupakan utang atas bahan bakar minyak;
4) Dinas Sosial sebesar Rp165.906.250,00 merupakan utang atas penyediaan bahan pangan kampung siaga bencana; dan
5) Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp160.191.031,00 merupakan utang atas bahan bakar minyak.

Rincian Utang Belanja Barang disajikan dalam Lampiran 13.2.

**c. Utang Belanja Jasa Non TALI**

Saldo Utang Jasa Non TALI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp257.558.168.325,00 dan Rp119.392.881.363,00. Utang belanja Jasa Non TALI per 31 Desember 2024 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) UP Jaminan Kesehatan Jakarta sebesar Rp219.230.240.125,00 merupakan utang kekurangan pencairan dana Iuran dan Bantuan Iuran Peserta PBPU/BP Kelas III Tahun 2024;

2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp11.364.870.040,00 merupakan utang belanja jasa atas penyelenggaraan festival malam tahun baru;
3) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sebesar Rp9.409.024.683,00 di antaranya merupakan utang belanja jasa pengawasan konstruksi bangunan gedung; dan
4) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.383.312.900,00 merupakan utang belanja jasa konsultasi penelitian dan bantuan teknik penanganan sampah; dan
5) Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp3.795.599.544,00 di antaranya merupakan utang belanja jasa konsultasi layanan khusus Pembangunan fasilitas pendukung Saringan Sampah TB. Simatupang.

Rincian Utang Belanja Jasa Non Tali disajikan dalam Lampiran 13.2.

**d. Utang Belanja Jasa TALI**

Saldo Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 57.070.645.240,00 dan Rp56.801.584.954,00. Utang Belanja TALI per 31 Desember 2024 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) Dinas Bina Marga sebesar Rp20.089.781.663,00;
2) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp7.103.701.037,00;
3) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sebesar Rp1.952.721.402,00;
4) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.860.029.121,00; dan
5) Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp1.825.962.305,00.

Rincian Utang Belanja TALI disajikan dalam Lampiran 13.2.

**e. Utang Belanja Pemeliharaan**

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp30.746.012.909,00 dan Rp27.093.304.167,00. Utang belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2024 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp18.464.285.228,00 yang merupakan utang Pengerjaan Pengerukan situ Kodamar, situ Rawa Dongkal, situ Mangga Bolong;
2) Suku Dinas Bina Marga Kota Jakarta Pusat sebesar Rp6.488.905.438,00 yang merupakan utang pemeliharaan jalan (layer hotmix);

3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp3.706.773.294,00 yang merupakan utang pemeliharaan gedung kantor;
4) Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah sebesar Rp1.345.744.154,00 yang merupakan utang pemeliharaan bangunan gedung kantor; dan
5) Dinas Bina Marga sebesar Rp740.304.795,00 yang merupakan utang pemeliharaan trotoar Jalan Yos Sudarso dan trotoar Bus Transjakarta.

Rincian Utang Belanja Pemeliharaan disajikan dalam Lampiran 13.2.

**f. Utang Belanja Perjalanan Dinas**

Saldo Utang Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.807.866.453,00 dan Rp0,00. Utang belanja perjalanan dinas per 31 Desember 2024 terdapat pada Biro Kerjasama Daerah.

Rincian Utang Belanja Perjalanan Dinas disajikan dalam Lampiran 13.2.

**g. Utang Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Saldo Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp39.621.750.000,00 dan Rp1.133.137.500,00. Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2024 terdapat pada Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari utang PPh 21 penghargaan event PEPERNAS XVII dan PON XXI Tahun 2024.

Rincian Utang Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat disajikan dalam Lampiran 13.2.

**h. Utang Belanja Modal Tanah**

Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp159.840.000,00 dan Rp0,00.
Rincian Utang Belanja Modal Tanah disajikan dalam Lampiran 13.2.

**i. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp77.630.836.424,00 dan Rp234.425.902,00. Utang belanja modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut :

1) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp43.156.848.450,00 di antaranya merupakan utang pengadaan KDO;
2) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp12.089.153.993,00 di antaranya merupakan utang pengadaan mebel;
3) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp6.955.938.180,00 di antaranya merupakan utang pengadaan alat kedokteran umum;
4) Inspektorat sebesar Rp6.426.235.908,00 di antaranya merupakan utang pengadaan mebel; dan
5) Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp3.309.420.600,00 di antaranya merupakan utang pengadaan pagar.

Dari Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin di atas, terdapat 11 Pekerjaan sebesar Rp73.299.461.021,00 yang telah diselesaikan pembayaran melalui mekanisme RPBATA.

Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam Lampiran 13.2.

**j. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp160.290.717.717,00 dan Rp77.447.682.079,00. Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) UP Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp68.752.723.748,00 di antaranya merupakan utang atas pekerjaan rehab total dan rehab berat Gedung beberapa SDN;
2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp41.836.394.526,00 merupakan utang atas penyusunan dokumen lingkungan dan KMRLL rumah susun;
3) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp13.405.323.498,00 di antaranya merupakan utang pembangunan Gedung sekretariat resimen mahasiswa Jayakarta; dan
4) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp8.051.321.650,00 merupakan utang atas rehabilitasi Gedung Dinas Lingkungan Hidup.
5) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp4.825.918.260,00 di antaranya merupakan utang atas pekerjaan konstruksi perbaikan gedung Samsat – Termin V.

Dari Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan di atas, terdapat 7 Pekerjaan sebesar Rp80.285.603.025,00 yang telah diselesaikan pembayaran melalui mekanisme RPBATA.

Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan di SKPD disajikan dalam Lampiran 13.2.

**k. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp36.308.552.213,00 dan Rp72.808.520.333,00. Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp16.192.606.573,00 merupakan utang pembangunan Pintu Air Kali Blencong dan Pantai Utara Marunda dan pembangunan SPALD *Severage* Taman Jagakarsa dan *interceptor* saluran PHB Sentra Primer Barat; dan
2) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jaktim sebesar Rp12.398.035.720,00 merupakan utang Pembangunan Rumah Pompa PHB Cipa dan Kelengkapannya;
3) Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp3.653.843.520,00 di antaranya merupakan utang Pembangunan fasilitas pendukung Saringan Sampah TB. Simatupang;
4) Sudin Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp2.606.827.726,00 di antaranya merupakan pengamanan pantai Pendalaman Kolam Labuh dan Alur Masuk; dan
5) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakbar sebesar Rp1.387.238.674,00 merupakan pembangunan sheetpile, rumah pompa, dan pembangunan kolam kolakan.

Dari Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di atas, terdapat 5 Pekerjaan sebesar Rp19.993.554.964,00 yang telah diselesaikan pembayaran melalui mekanisme RPBATA.

Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di SKPD disajikan dalam Lampiran 13.2.

**l. Utang Belanja Pegawai BLUD**

Utang Belanja Pegawai BLUD merupakan utang kepada pegawai yang antara lain terdiri atas gaji dokter, honorarium *shift* paramedis, honor lembur dan honor petugas gadar. Sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp13.507.051.040,00 dan Rp14.696.755.850,00.

Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2024 di antaranya terdapat pada SKPD:

1) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp2.845.638.587,00;

2) Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp2.444.731.835,00;
3) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebesar Rp2.152.021.976,00;
4) Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp2.070.968.145,00;dan
5) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebesar Rp1.721.853.524,00.

Rincian Utang Belanja Pegawai BLUD disajikan dalam Lampiran 13.3.

**m. Utang Belanja Barang Jasa BLUD**

Utang Belanja Barang Jasa BLUD merupakan utang yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp230.510.277.449,00 dan Rp176.808.371.586,00.

Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.99
Utang Belanja Barang Jasa BLUD
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD | 222.225.985.549 | 170.360.424.126 |
| 2 | Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Dinkes | 7.141.783.081 | 5.571.207.402 |
| 3 | Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan | 1.142.508.819 | 876.740.058 |
| **Jumlah** | | **230.510.277.449** | **176.808.371.586** |

Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD sebesar Rp222.225.985.549,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.100
Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | SKPD | 31-Des-24 (Rp) | 31-Des-23 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Kesehatan (eks kewajiban RSUD Adhyaksa) | 0 | 7.892.189.410 |
| 2 | RSUD Pasar Rebo | 7.060.367.778 | 5.968.719.892 |
| 3 | RSUD Koja | 54.698.304.868 | 55.869.065.905 |
| 4 | RSUD Cengkareng | 12.986.987.252 | 19.936.963.912 |
| 5 | RSUD Tarakan | 61.205.084.642 | 16.203.100.837 |
| 6 | BLUD RS Budhi Asih | 26.483.918.891 | 8.995.639.775 |
| 7 | RSUD Pasar Minggu | 16.525.943.212 | 15.138.289.766 |
| 8 | RSUD Tugu Koja | 3.607.134.895 | 804.712.017 |
| 9 | RSUD Kalideres | 366.903.412 | 438.137.568 |
| 10 | RSUD Tanjung Priok | 117.026.916 | 394.831.077 |

| No. | SKPD | 31-Des-24 (Rp) | 31-Des-23 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 11 | RSUD Kebayoran Lama | 27.190.894 | 69.467.021 |
| 12 | RSUD Jagakarsa | 91.108.168 | 95.768.963 |
| 13 | RSUD Kemayoran | 2.373.303.597 | 2.110.121.951 |
| 14 | RSKD Duren Sawit | 4.990.421.578 | 5.440.944.660 |
| 15 | RSUD Tebet | 5.079.874.765 | 5.404.686.458 |
| 16 | RSUD Pademangan | 1.764.015.432 | 2.087.843.698 |
| 17 | RSUD Kramat Jati | 1.432.971.490 | 1.732.023.149 |
| 18 | RSUD Sawah Besar | 568.908.910 | 16.573.022 |
| 19 | RSUD Cempaka Putih | 1.227.055.862 | 277.546.923 |
| 20 | RSUD Johar Baru | 506.800.785 | 28.750.000 |
| 21 | RSUD Mampang Prapatan | 4.469.930.396 | 5.764.987.380 |
| 22 | RSUD Tanah Abang | 122.305.956 | 114.237.781 |
| 23 | RSUD Ciracas | 1.551.069.416 | 2.449.943.263 |
| 24 | RSUD Cilincing | 7.224.311.928 | 6.449.244.390 |
| 25 | RSUD Pesanggrahan | 1.358.580.302 | 1.076.666.850 |
| 26 | RSUD Matraman | 1.544.536.580 | 4.157.873.589 |
| 27 | RSUD Kembangan | 2.155.497.313 | 23.646.665 |
| 28 | RSUD Cipayung | 671.551.992 | 18.701.194 |
| 29 | RSUD Jati Padang | 18.625.584 | 51.430.000 |
| 30 | RSUD Kepulauan Seribu | 14.884.422 | 10.435.868 |
| 31 | RSUD Tamansari | 1.981.368.313 | 901.961.281 |
| 32 | RSUD Kebayoran Baru | 0 | 435.919.861 |
| **Jumlah** | | **222.225.985.549** | **170.360.424.126** |

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat sebesar Rp7.141.783.081,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.101

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | SKPD | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Puskesmas Kecamatan Cakung - Jaktim | 1.144.800.367 | 1.548.893.666 |
| 2 | Laboratorium Kesehatan Daerah | 3.774.837.656 | 1.209.684.361 |
| 3 | Puskesmas Kecamatan Cipayung - Jaktim | 1.781.550 | 782.945.079 |
| 4 | Puskesmas Kecamatan Jagakarsa - Jaksel | 3.699.421 | 482.932.562 |
| 5 | Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok - Jakut | 0 | 383.846.791 |
| 6 | Puskesmas Kecamatan Kemayoran - Jakpus | 749.370.184 | 223.794.812 |
| 7 | Puskesmas Kecamatan Kep.Seribu Selatan | 0 | 168.305.199 |
| 8 | Pusat Layanan Kesehatan Pegawai | 110.537.220 | 85.597.872 |
| 9 | Puskesmas Kecamatan Kalideres - Jakbar | 376.541.534 | 82.162.110 |
| 10 | Puskesmas Kecamatan Duren Sawit - Jaktim | 67.655.215 | 76.171.251 |
| 11 | Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan – Jaksel | 117.649.405 | 74.615.160 |
| 12 | Puskesmas Kecamatan Matraman - Jaktim | 2.495.746 | 61.694.899 |

| No. | SKPD | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 13 | Puskesmas Kecamatan Palmerah - Jakbar | 54.103.137 | 58.519.627 |
| 14 | Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar | 53.475.421 | 57.043.240 |
| 15 | Puskesmas Kecamatan Cengkareng - Jakbar | 49.187.945 | 56.063.501 |
| 16 | Puskesmas Kecamatan Kembangan - Jakbar | 48.534.789 | 48.714.133 |
| 17 | Puskesmas Kecamatan Kep.Seribu Utara | 0 | 36.168.328 |
| 18 | Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim | 6.426.600 | 27.960.000 |
| 19 | Puskesmas Kecamatan Tebet - Jaksel | 345.410.315 | 14.604.000 |
| 20 | Puskesmas Kecamatan Pulogadung - Jaktim | 3.401.007 | 12.327.660 |
| 21 | Puskesmas Kecamatan Tambora - Jakbar | 11.115.550 | 11.115.550 |
| 22 | Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel | 820.000 | 8.996.590 |
| 23 | Puskesmas Kecamatan Tanah Abang - Jakpus | 3.693.951 | 7.131.514 |
| 24 | Puskesmas Kecamatan Kramat Jati - Jaktim | 7.284.114 | 6.783.409 |
| 25 | Puskesmas Kecamatan Makasar - Jaktim | 0 | 5.621.050 |
| 26 | Puskesmas Kecamatan Taman Sari - Jakbar | 5.089.360 | 5.505.610 |
| 27 | Puskesmas Kecamatan Ciracas - Jaktim | 47.779.084 | 5.413.480 |
| 28 | Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus | 4.921.995 | 4.943.656 |
| 29 | Puskesmas Kecamatan Koja – Jakut | 0 | 4.852.780 |
| 30 | Puskesmas Kecamatan Setiabudi - Jaksel | 48.005.520 | 3.681.224 |
| 31 | Puskesmas Kecamatan Johar Baru - Jakpus | 3.517.590 | 3.570.870 |
| 32 | Puskesmas Kecamatan Menteng - Jakpus | 1.559.550 | 3.166.830 |
| 33 | Puskesmas Kecamatan Jatinegara - Jaktim | 24.711.480 | 2.739.753 |
| 34 | Puskesmas Kecamatan Gambir - Jakpus | 0 | 2.282.160 |
| 35 | Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan – Jakbar | 410.700 | 2.128.980 |
| 36 | Puskesmas Kecamatan Pademangan - Jakut | 1.827.910 | 1.039.695 |
| 37 | Puskesmas Kecamatan Sawah Besar - Jakpus | 190.000 | 190.000 |
| 38 | Puskesmas Kecamatan Pancoran - Jaksel | 66.390.756 | 0 |
| 39 | Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel | 3.799.009 | 0 |
| 40 | Puskesmas Kecamatan Cilandak - Jaksel | 0 | 0 |
| 41 | Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah | 759.000 | 0 |
| **Jumlah** | | **7.141.783.081** | **5.571.207.402** |

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan sebesar Rp1.142.508.819,00 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.102

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1. | Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Pemukiman Pulogadung | 784.350.752 | 599.561.495 |
| 2. | Unit Pengelola Perparkiran | 11.036.898 | 41.473.625 |
| 3. | SMKN 57 | 100.707.576 | 0 |

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 4. | Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan | 246.413.593 | 235.704.938 |
| | **Jumlah** | **1.142.508.819** | **876.740.058** |

Rincian Utang Belanja Barang Jasa BLUD disajikan dalam Lampiran 13.3.

**n. Utang Belanja Modal BLUD**

Utang Belanja Modal BLUD merupakan utang-utang pembelian Aset Tetap pada BLUD yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.187.082.639,00 dan Rp2.118.428.162,00.

Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2024 terdiri dari:

1) Saldo utang belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp420.958.949,00 di antaranya terdapat pada BLUD berikut:
   a. RSUD Koja sebesar Rp176.563.373,00;
   b. RSUD Mampang Prapatan sebesar Rp60.200.000,00;dan
   c. RSUD Tarakan sebesar Rp56.856.500,00.
2) Saldo utang belanja modal Gedung dan Bangunan BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.591.446.625,00 terdapat pada RSKD Duren Sawit sebesar Rp4.307.591.030,00 dan RSUD Cipayung sebesar Rp283.855.595,00;
3) Saldo utang belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp174.677.065,00 terdapat pada RSUD Pasar Minggu.

Rincian Utang Belanja Modal BLUD disajikan dalam Lampiran 13.3.

**o. Utang Belanja Subsidi**

Utang belanja subsidi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp72.839.410.492,00 dan Rp688.827.013.778,00. Utang belanja subsidi per 31 Desember 2024 tercatat pada Dinas Perhubungan merupakan utang belanja subsidi transportasi pada PT Transjakarta. Rincian mutasi utang belanja subsidi dapat dijelaskan sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| Utang subsidi per 31 Desember 2023 *Audited* | : | 688.827.013.778 |
| <u>Penambahan :</u> | | |
| Utang subsidi PT Transjakarta PSO Tahun 2023 sesuai dengan BA Verifikasi no. 317/PH.05.00 tanggal 17 Mei 2024 | : | 13.178.105.296 |

| | | |
|---|---|---|
| Utang subsidi prasarana dan sarana LRT Jakarta Tahun 2024 | : | 2.120.518.427 |
| Pengurangan : | | |
| Pembayaran utang subsidi PT.MRT | : | (109.479.054.097) |
| Pembayaran utang subsidi LRT Jakarta | : | (105.884.366.450) |
| Penyesuaian PSO PT Transjakarta tahun 2018,2019 | : | (415.922.806.462) |
| **Utang belanja subsidi per 31 Desember 2024** | **:** | **72.839.410.492** |

#### 5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp15.141.616.464,00 dan Rp16.377.359.980,00, dengan rincian sebagai berikut:

| | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Utang Kompensasi Pajak | 4.341.069.296 | 4.247.474.531 |
| 2 | Utang Restitusi Pajak | 2.011.990.094 | 1.178.722.745 |
| 3 | Utang Kelebihan Pembayaran Transfer | 0 | 169.040.000 |
| 4 | Utang Kelebihan Pembayaran PAD | 60.301.439 | 60.600.192 |
| 5 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 8.710.322.955 | 10.628.454.363 |
| 6 | Kewajiban – Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan | 17.932.680 | 93.068.149 |
| | **Jumlah** | **15.141.616.464** | **16.377.359.980** |

**a. Utang Kompensasi Pajak**

Utang Kompensasi Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.341.069.296,00 dan Rp4.247.474.531,00 merupakan kewajiban berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPD-LB) atas kelebihan pembayaran pajak daerah yang dapat digunakan untuk pembayaran kurang bayar pajak daerah atau utang pajak. Kompensasi dapat dimanfaatkan pada masa pajak selanjutnya atau terhadap jenis pajak lainnya. Berikut rincian perhitungan Utang Kompensasi Pajak.

Tabel 5.103

Perhitungan Utang Kompensasi Pajak

| No | Jenis Pajak | Utang Awal (Rp) | Kompensasi (Rp) | Sisa Utang Awal (Rp) | Utang Berjalan (Rp) | Kompensasi (Rp) | Sisa Utang Berjalan (Rp) | Total Utang (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) | 6 | 7 | 8 (6-7) | 9 (5+8) |
| 1 | Pajak Air Tanah | 307.432 | - | 307.432 | - | - | - | 307.432 |
| 2 | Pajak Reklame | 242.274.131 | - | 242.274.131 | - | - | - | 242.274.131 |

| No | Jenis Pajak | Utang Awal (Rp) | Kompensasi (Rp) | Sisa Utang Awal (Rp) | Utang Berjalan (Rp) | Kompensasi (Rp) | Sisa Utang Berjalan (Rp) | Total Utang (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) | 6 | 7 | 8 (6-7) | 9 (5+8) |
| 3 | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 721.208.836 | 29.949.456 | 691.259.380 | 197.488.048 | 50.481.840 | 147.006.208 | 838.265.588 |
| 4 | Pajak Bumi dan Bangunan | 1.755.579.934 | 34.394.543 | 1.721.185.391 | 201.077.947 | 190.145.391 | 10.932.556 | 1.732.117.947 |
| 5 | Pajak Barang dan Jasa Tertentu | 1.528.104.198 | - | 1.528.104.198 | - | - | - | 1.528.104.198 |
| **TOTAL** | | **4.247.474.531** | **64.343.999** | **4.183.130.532** | **398.565.995** | **240.627.231** | **157.938.764** | **4.341.069.296** |

**b. Utang Restitusi Pajak**

Utang Restitusi Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp2.011.990.094,00 dan Rp1.178.722.745,00 merupakan kewajiban pengembalian pembayaran pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah atas kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBJT atas Jasa Perhotelan yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayarkan kepada Wajib Pajak.

**c. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer**

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp169.040.000,00. Utang Kelebihan Transfer Tahun 2023 merupakan pengembalian Dana BOS ke RKUN berdasarkan Hasil verifikasi Inspektorat atas pengembalian Dana BOS SD Islam Al-Azhar Syuhada tahun 2016 dan 2017.

**d. Utang Kelebihan Pembayaran PAD**

Utang Kelebihan Pembayaran PAD per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp60.301.439,00 dan Rp60.600.192,00 merupakan hak pihak ketiga yang wajib dikembalikan dengan rincian sebagai berikut:

a) sebesar Rp43.562.242,00 pada rekening khusus pajak di bank CIMB Niaga atas kelebihan transfer yang belum diretur ke wajib pajak;
b) sebesar Rp9.515.707,00 pada rekening khusus pajak di BRI atas kelebihan transfer yang belum diretur ke wajib pajak;
c) sebesar Rp1.591.487,00 pada rekening khusus pajak di Bank Mandiri atas pembayaran ganda yang belum diretur ke wajib pajak;
d) sebesar Rp1.301.068,00 merupakan jasa giro rekening penerima hibah milik BPSK yang tertarik oleh BUD; dan
e) sebesar Rp4.330.935,00 merupakan kelebihan pembayaran retribusi pemanfaatan aset daerah.

**e. Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp8.710.322.955,00 dan Rp10.628.454.363,00 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.484.107.833,00 yang merupakan uang titipan sewa rumah ber-SIP sebesar Rp7.699.352.973,00 dan Santunan pengosongan rumah bersengketa sebesar Rp784.754.860,00 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp226.215.122,00 yang merupakan retur pembayaran dan kelebihan pengembalian pihak ketiga pada rekening BOS 45 Satuan Pendidikan sebesar Rp118.944.852,00 dan dana untuk pembayaran ke PT Avant Solusi Servispro atas jasa sewa mesin fotocopy periode Oktober 2024 – Desember 2024 pada rekening khusus Dinas Pendidikan sebesar Rp107.270.270,00.

**f. Kewajiban – Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan**

Kewajiban - Penerimaan Kas Yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp17.932.680,00 dan Rp93.068.149,00. Terdapat di PPKD sebesar Rp16.063.067,00 yang merupakan penerimaan kas di rekening penampungan penerimaan kas daerah yang belum teridentifikasi kepemilikannya dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.869.613,00 yang merupakan rekening dorman BOP Sekolah.

### 5.3.2.1.7 Utang Jaminan

Utang Jaminan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.373.805.574,00 dan Rp6.188.082.151,00 dengan rincian sebagai berikut:

**a. Utang Jaminan Pajak Daerah**

Utang Jaminan Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.504.261.554,00 dan Rp2.958.583.004,00 merupakan jaminan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk penyelenggaraan Pajak atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat insidental pada Badan Pendapatan Daerah.

**b. Utang Jaminan BLUD**

Utang Jaminan BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.869.544.020,00 dan Rp3.229.499.147,00 merupakan uang jaminan yang diberikan oleh pihak penyelenggara parkir yang bekerja sama dalam pengelolaan kawasan perparkiran dengan Unit Pengelola Perparkiran.

Per 31 Desember 2024 terdapat 76 (tujuh puluh enam) PKS yang aktif dan 4 (empat) PKS yang sudah selesai namun uang jaminan masih belum diambil pada Unit Pengelola Perparkiran, masing-masing dari pihak penyelenggara tersebut memberikan uang jaminan atas PKS yang dibuat dengan Unit

Pengelola Perparkiran sesuai dengan nilai yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut.

| No | Bentuk Jaminan | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Rekening Penampungan Uang Jaminan PKS Parkir | 3.295.181.520 |
| 2 | Bank Garansi | 574.362.500 |
| | **Jumlah** | **3.869.544.020** |

#### 5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Provinsi DKI Jakarta berupa Utang Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp13.982.891.651.205,00 dan Rp13.162.772.219.846,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Kewajiban Jangka Panjang | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Utang Dalam Negeri - IBRD (Proyek JUFMP/JEDI) | 219.097.501.569 | 252.727.124.999 |
| 2 | Utang Dalam Negeri - JICA (Proyek MRT) | 10.257.674.464.002 | 7.576.369.926.244 |
| 3 | Utang PEN | 3.506.119.685.634 | 5.333.675.168.603 |
| | **Jumlah** | **13.982.891.651.205** | **13.162.772.219.846** |

Uraian Kewajiban (Utang) Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dijelaskan sebagai berikut :

**a. Utang Dalam Negeri – IBRD (Proyek JUFMP/JEDI)**

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor IBRD SLA 1247 tanggal 16 Mei 2012 yang penilaiannya menggunakan mata uang rupiah untuk pembiayaan proyek JEDI kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Saldo utang proyek JEDI per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp219.097.501.569,00 dan Rp252.727.124.999,00. Rincian atas Utang Dalam Negeri – IBRD (Proyek JUFMP/JEDI) sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Pokok Utang | Rp504.949.300.724,00 |
| Pembayaran s.d 31 Desember 2024 | (Rp252.222.175.725,00) |
| **Utang Per 31 Desember 2023** | **Rp252.727.124.999,00** |
| Bagian Lancar Tahun 2024 | ( Rp33.629.623.430,00) |
| **Utang per 31 Desember 2024** | **Rp219.097.501.569,00** |

**b. Utang Dalam Negeri – JICA (Proyek MRT)**

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1263/DSMI/2016 tanggal 4 Februari 2016 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta *Phase* I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1295/DSMI/2023 tanggal 2 Oktober 2023 untuk

pembiayaan Proyek MRT Jakarta *Phase* II (Jakarta Kota – Bundaran HI). Pencatatan pokok utang proyek MRT berdasarkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI yang memuat nilai utang dalam mata uang JPY dan Rupiah. Saldo utang proyek MRT per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp10.257.674.464.002,00 dan Rp7.576.369.926.244,00. Nilai bagian lancar Tahun 2024 merupakan nilai anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang terdapat pada APBD Tahun 2025. Rincian atas Utang Dalam Negeri – JICA (Proyek MRT) sebagai berikut:

Tabel 5.104

Rincian atas Utang Dalam Negeri – JICA (Proyek MRT)

| No | Pinjaman Daerah | Utang Per 31 Des 2023 | | Penambahan Pokok Utang Tahun 2024 | | Bagian Lancar Tahun 2024 | | Utang Per 31 Des 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (JPY) | (Rp) | (JPY) | (Rp) | (JPY) | (Rp) | (JPY) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (3 + 5 – 7) | 10 = (4 + 6 – 8) |
| 1 | SLA 1263/DS MI/2016 | 56.961.002.127 | 7.290.092.296.108 | 0 | 0 | 933.817.622 | 120.000.000.000 | 56.027.184.505 | 7.170.092.296.108 |
| 2 | SLA 1295/DS MI/2023 | 2.750.267.796 | 286.277.630.136 | 26.747.443.658 | 2.801.304.537.758 | 0 | 0 | 29.497.711.454 | 3.087.582.167.894 |
| | **TOTAL** | **59.711.269.923** | **7.576.369.926.244** | **26.747.443.658** | **2.801.304.537.758** | **933.817.622** | **120.000.000.000** | **85.524.895.959** | **10.257.674.464.002** |

**c. Utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

Utang Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.506.119.685.634,00 dan Rp5.333.675.168.603,00, yang terdiri atas.

Tabel 5.105

Rincian atas Utang Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

31 Desember 2024 dan 2023

| No | Nilai Penarikan Pinjaman | Penarikan Dana Pinjaman | Pembayaran s.d 2023 | Bagian lancar 2023 | Utang PEN per 31 Des 2023 | Bagian lancar 2024 | Utang PEN Per 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Rp) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 - 4 – 5 | 7 | 8 = 6 - 7 |
| 1 | PEN Tahun 2020 | 2.664.083.583.739 | 712.154.134.313 | 390.385.927.362 | 1.561.543.522.064 | 390.385.927.362 | 1.171.157.594.702 |
| 2 | PEN Tahun 2021 | 3.192.635.570.093 | 472.622.445.581 | 532.105.970.916 | 2.187.907.153.596 | 532.105.970.916 | 1.655.801.182.680 |
| 3 | Dukungan PEN Tahun 2021 | 4.074.967.079.587 | 1.585.194.274.288 | 905.548.312.356 | 1.584.224.492.943 | 905.063.584.691 | 679.160.908.252 |
| | **TOTAL** | **9.931.686.233.419** | **2.769.970.854.182** | **1.828.040.210.634** | **5.333.675.168.603** | **1.827.555.482.969** | **3.506.119.685.634** |

**1) Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2020**

Merupakan dana pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Pemerintah Pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) atas Pinjaman PEN Daerah pada tahun 2020 sesuai Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 yang ditandatangani

oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 24 September 2020 dan telah diubah melalui Perubahan I Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 Nomor PERJ-181/SMI/1220 tanggal 21 Desember 2020 dengan jumlah pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp2.664.083.583.739,00. Penarikan dana pinjaman seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp2.664.083.583.739,00.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, pinjaman Program PEN digunakan untuk mendanai pelaksanaan dan penyelesaian program kegiatan pembangunan dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 telah digunakan dalam bentuk:

a) Penyertaan Modal Daerah (PMD) Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp1.382.000.000.000,00.
b) Belanja Daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan sebesar Rp1.282.083.583.739,00.

Berikut rincian realisasi per kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah.

Tabel 5.106

Rincian Realisasi Per Kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah

| No | Jenis Pinjaman SKPD/BUMD | Plafon PEN (Akta No. 24 Tanggal 24-09-2020 serta Perubahan I Tanggal 21-12-2020) (Rp) | Penarikan Dana Pinjaman (Rp) | % | Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp) | % | Saldo (Sisa) (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4:3 | 6 | 7 = 6:3 | 8 = 4-6 |
| | **Pinjaman PEN (Bunga 0%)** | | | | | | |
| 1 | Infrastruktur Pengendali Banjir **(Dinas Sumber Daya Air)** | 711.421.299.715 | 711.421.299.715 | 100,00 | 421.127.354.911 | 59,20 | 290.293.944.804 |
| 2 | Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Layanan Air Minum **(Dinas Sumber Daya Air)** | 12.320.572.237 | 12.320.572.237 | 100,00 | 11.938.335.091 | 96,90 | 382.237.146 |
| 3 | Peningkatan Infrastruktur Transportasi **(Dinas Bina Marga)** | 473.340.301.771 | 473.340.301.771 | 100,00 | 442.248.276.770 | 93,43 | 31.092.025.001 |

| No | Jenis Pinjaman SKPD/BUMD | Plafon PEN (Akta No. 24 Tanggal 24-09-2020 serta Perubahan I Tanggal 21-12-2020) (Rp) | Penarikan Dana Pinjaman (Rp) | % | Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp) | % | Saldo (Sisa) (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4:3 | 6 | 7 = 6:3 | 8 = 4-6 |
| 4 | Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta **(Dinas Lingkungan Hidup)** | 85.001.410.016 | 85.001.410.016 | 100,00 | 85.001.410.016 | 100,00 | 0 |
| 5 | Revitalisasi Taman Ismail Marzuki **(PT Jakarta Propertindo (Perseroda))** | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 | 100,00 | 200.000.000.000 | 100,00 | 0 |
| 6 | Peningkatan Infrastruktur Olahraga (Pembangunan Jakarta International Stadium) **(PT Jakarta Propertindo (Perseroda))** | 1.182.000.000.000 | 1.182.000.000.000 | 100,00 | 1.182.000.000.000 | 100,00 | 0 |
| | **Jumlah Total** | **2.664.083.583.739** | **2.664.083.583.739** | **100,00** | **2.342.315.376.788** | **87,92** | **321.768.206.951** |

Bahwa atas saldo (sisa) dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 sebesar Rp321.768.206.951,00 telah dilakukan pengembalian kepada PT SMI (Persero) tanggal 20 Desember 2022 dengan Nomor SP2D 1 040233/SP2D/XII/2022 yang diperlakukan sebagai pembayaran pokok pinjaman dipercepat sesuai Pasal 11 Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 beserta perubahannya.

**2) Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021**

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) Nomor PERJ-196/SMI/2020 yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2020 dan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 8 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 12 April 2021 serta Perjanjian Perubahan Pertama Terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-239B/SMI/1221 Tanggal 30 Desember 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dana pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp3.192.635.570.093,00 dengan masa penarikan/pencairan pinjaman (*Availability Period*) sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Penarikan pinjaman dilakukan secara bertahap dengan mekanisme berikut:

a) Penarikan pertama setinggi-tingginya sebesar 25% dari limit pinjaman.
b) Penarikan kedua sebesar 45% dari limit pinjaman setelah dana yang ditarik pada penarikan pertama terserap/direalisasikan minimal 75% pada kegiatan.

c) Penarikan ketiga dilakukan sebesar nilai sisa kebutuhan penyelesaian pekerjaan setelah dana yang ditarik sebelumnya terserap/direalisasikan minimal 90% pada kegiatan.

Bahwa penarikan dana Pinjaman PEN Daerah seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 dan tahun 2022 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp3.192.635.570.093,00. Penarikan tahap terakhir Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp957.790.671.029,00 pada tanggal 1 April 2022.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 merupakan kegiatan lanjutan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020, yang disalurkan dalam bentuk belanja daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan. Berikut rincian realisasi per kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah sampai dengan 31 Desember 2022.

Tabel 5.107
Rincian Realisasi Per Kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah
s.d 31 Desember 2022

| No | Uraian Kegiatan SKPD/BUMD | Plafon PEN (Akta No. 24 Tanggal 24-09-2020 serta Perubahan I Tanggal 21-12-2020) (Rp) | Nilai Penarikan Pinjaman PEN (Rp) | Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp) | % | Estimasi Saldo (Sisa) (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5:4 | 7 = 4 - 5 |
| **PINJAMAN PEN DAERAH TAHUN 2021** | | | | | | |
| **a** | **Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir** | **2.840.433.114.045** | **2.840.433.114.045** | **2.741.479.310.308** | **96,52** | **98.953.803.737** |
| | Peningkatan Infrastruktur Pengendali Banjir **(Dinas Sumber Daya Air)** | 2.754.137.508.989 | 2.754.137.508.989 | 2.655.826.449.928 | 96,43 | 98.311.059.061 |
| | Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir - Pengendalian Banjir Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi **(Diskominfotik & Dinas Sumber Daya Air)** | 86.295.605.056 | 86.295.605.056 | 85.652.860.380 | 99,26 | 642.744.676 |
| **b** | Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Layanan Air Minum **(Dinas Sumber Daya Air)** | 56.784.547.380 | 56.784.547.380 | 37.854.104.382 | 66,66 | 18.930.442.998 |
| **c** | Peningkatan Infrastruktur Transportasi **(Dinas Bina Marga)** | 62.985.831.748 | 62.985.831.748 | 62.984.946.846 | 100,00 | 884.902 |
| **d** | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (Transformasi Digital) **(Diskominfotik)** | 232.432.076.920 | 232.432.076.920 | 232.432.076.920 | 100,00 | 0 |
| | **Jumlah** | **3.192.635.570.093** | **3.192.635.570.093** | **3.074.750.438.456** | **96,31** | **117.885.131.637** |

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa per 31 Desember 2022 masih terdapat estimasi saldo (sisa) dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 pada RKUD Dana Pinjaman PEN sebesar Rp117.885.131.637,00.

Bahwa atas saldo (sisa) dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 sebesar Rp117.885.131.637,00 telah dilakukan pengembalian kepada PT SMI (Persero) tanggal 29 Desember 2023 dengan Nomor SP2D 1 042081/SP2D/XII/2023 yang diperlakukan sebagai pembayaran pokok pinjaman dipercepat sesuai Pasal 11 Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 beserta perubahannya.

**3) Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021**

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) Nomor 85 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 23 September 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dana pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp4.075.000.000.000,00 dengan masa pencairan pinjaman (*Availability Period*) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022. Jangka waktu pinjaman selama 60 bulan termasuk masa tenggang/*grace period* pembayaran pokok pinjaman selama 6 bulan dengan bunga pinjaman sebesar 5,66% per tahun. Penarikan pinjaman dilakukan secara bertahap dengan mekanisme berikut:

a) Penarikan pertama setinggi-tingginya sebesar 55% dari limit pinjaman.
b) Penarikan kedua dilakukan sebesar nilai sisa kebutuhan penyelesaian pekerjaan setelah dana yang ditarik pada penarikan sebelumnya terserap/direalisasikan minimal 90% pada kegiatan.

Penarikan dana pinjaman seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp4.074.967.079.587,00.

Dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 telah digunakan dalam bentuk:

a) Penyertaan Modal Daerah (PMD) Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp3.703.121.000.000,00.
b) Belanja Daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan sebesar Rp371.846.079.587,00.

Berikut rincian realisasi per kegiatan atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2022:

Tabel 5.108

Rincian Realisasi Per Kegiatan atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 s.d 31 Desember 2022

| No | Uraian Kegiatan SKPD/BUMD | Pagu Pinjaman PEN (Rp) | Nilai Penarikan Pinjaman PEN (Rp) | Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp) | % | Estimasi Saldo (Sisa) (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5:4 | 7 = 4 - 5 | 8 |
| **Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021** | | | | | | | |
| a | Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah **(Dinas Lingkungan Hidup)** | 371.879.000.000 | 371.846.079.587 | 371.361.351.922 | 99,87 | 484.727.665 | |
| b | Peningkatan Infrastruktur Olahraga Proyek Pembangunan Jakarta International Stadium **(PT Jakarta Propertindo (Perseroda))** | 2.460.000.000.000 | 2.460.000.000.000 | 2.460.000.000.000 | 100,00 | 0 | Berupa Penyertaan Modal Daerah |
| c | Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan (Revitalisasi Taman Ismail Marzuki/TIM) **(PT Jakarta Propertindo (Perseroda))** | 1.243.121.000.000 | 1.243.121.000.000 | 1.243.121.000.000 | 100,00 | 0 | Berupa Penyertaan Modal Daerah |
| | **Jumlah** | **4.075.000.000.000** | **4.074.967.079.587** | **4.074.482.351.922** | **99,99** | **484.727.665** | |

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa per 31 Desember 2022 masih terdapat saldo (sisa) dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 pada RKUD Dana Pinjaman PEN sebesar Rp484.727.665,00.

Bahwa atas saldo (sisa) dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 sebesar Rp484.727.665,00 telah dilakukan pengembalian kepada PT SMI (Persero) tanggal 19 Desember 2023 dengan Nomor SP2D 1 038823/SP2D/XII/2023 yang diperlakukan sebagai pembayaran pokok pinjaman dipercepat sesuai Pasal 11 Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 beserta perubahannya.

### 5.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp727.950.219.245.598,00 dan Rp698.072.284.621.375,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.6.

## 5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### 5.4.1 Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2024, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp30.629.872.757.835,00. Nilai tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp100.121.357.370.829,00 dikurangi dengan jumlah Beban-LO sebesar Rp69.491.484.612.994,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut.

#### 5.4.1.1 Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah.

Pendapatan-LO Tahun 2024 sebesar Rp100.121.357.370.829,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp76.562.506.738.972,00, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp22.335.089.174.685,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp1.223.761.457.172,00.

Rincian Pendapatan-LO Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.109
Rekapitulasi Pendapatan-LO
Tahun 2024 dan 2023

| No | Uraian | Tahun 2024 (Rp) | Tahun 2023 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Asli Daerah | 76.562.506.738.972 | 76.505.455.312.665 | 57.051.426.307 | 0,07 |
| 2. | Pendapatan Transfer | 22.335.089.174.685 | 23.778.953.501.314 | (1.443.864.326.629) | (6,07) |
| 3. | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 1.223.761.457.172 | 3.584.721.532.629 | (2.360.960.075.457) | (65,86) |
| **Jumlah** | | **100.121.357.370.829** | **103.869.130.346.608** | **(3.747.772.975.779)** | **(3,61)** |

Pada Tahun 2024 terjadi penurunan Pendapatan – LO sebesar 3,61% dibandingkan tahun lalu. Penurunan Pendapatan – LO tersebut berasal dari 3 Jenis Pendapatan – LO yaitu Kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,07%, Penurunan Pendapatan Transfer 6,07%, dan Penurunan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 65,86%.

##### 5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp76.562.506.738.972,00 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.110
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO
Tahun 2024 dan 2023

| No | Uraian | Tahun 2024 (Rp) | Tahun 2023 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Pajak Daerah-LO | 46.010.295.342.977 | 44.365.069.145.521 | 1.645.226.197.456 | 3,71 |
| 2. | Pendapatan Retribusi Daerah-LO | 1.401.893.769.313 | 461.646.047.887 | 940.247.721.426 | 203,67 |
| 3. | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | 5.005.268.401.929 | 3.393.855.897.994 | 1.611.412.503.935 | 47,48 |
| 4 | Lain-lain PAD Yang Sah-LO | 24.145.049.224.753 | 28.284.884.221.263 | (4.139.834.996.510) | (14,64) |
| **Jumlah** | | **76.562.506.738.972** | **76.505.455.312.665** | **57.051.426.307** | **0,07** |

Bila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp76.505.455.312.665,00 terjadi kenaikan sebesar Rp57.051.426.307,00 atau 0,07%. Penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO adalah sebagai berikut.

#### 5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO adalah pendapatan yang diakui ketika adanya realisasi kas diterima atau penetapan ketetapan, di mana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau RKUD tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan ketetapan.

Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan sistem *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Perpajakan. Timbulnya hak menagih adalah pada saat telah diterbitkannya ketetapan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Perpajakan-LO.

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp46.010.295.342.977,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp44.365.069.145.521,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.645.226.197.456,00 atau 3,71%. Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.111
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah-LO
Tahun 2024 dan 2023

| No | Jenis Pajak Daerah | Tahun 2024 (Rp) | Tahun 2023 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor | 9.655.338.125.600 | 9.416.151.829.440 | 239.186.296.160 | 2,54 |

| No | Jenis Pajak Daerah | Tahun 2024 (Rp) | Tahun 2023 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 6.644.445.800.800 | 6.643.605.545.100 | 840.255.700 | 0,01 |
| 3 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 1.795.757.431.976 | 1.680.813.642.600 | 114.943.789.376 | 6,84 |
| 4 | Pajak Rokok | 883.986.065.225 | 855.303.949.037 | 28.682.116.188 | 3,35 |
| 5 | Pajak Barang dan Jasa Tertentu | 8.322.517.925.368 | 7.886.999.999.183 | 435.517.926.185 | 5,52 |
| 6 | Pajak Reklame | 1.024.313.376.462 | 966.696.053.486 | 57.617.322.976 | 5,96 |
| 7 | Pajak air tanah | 88.358.360.981 | 98.876.897.239 | (10.518.536.258) | (10,64) |
| 8 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 11.423.395.398.303 | 9.750.581.424.261 | 1.672.813.974.042 | 17,16 |
| 9 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 6.172.176.170.262 | 7.066.039.805.175 | (893.863.634.913) | (12,65) |
| 10 | Pajak Alat Berat | 6.688.000 | 0 | 6.688.000 | 0 |
| **Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO** | | **46.010.295.342.977** | **44.365.069.145.521** | **1.645.226.197.456** | **3,71** |

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

**a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO Tahun 2024 mencapai Rp9.655.338.125.600,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp9.416.151.829.440,00, terjadi kenaikan sebesar Rp239.189.296.160,00 atau 2,54%. Rincian Pendapatan PKB-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

| No | Keterangan | Pendapatan PKB-LO (Rp) |
|---|---|---|
| **A** | **Ketetapan** | **927.565.937.935** |
| | Surat Ketetapan Pajak (SKP) Terbit 2024 | 927.565.937.935 |
| **B** | **Pendapatan:** | **8.735.566.051.536** |
| | Pembayaran SKKP 2024 | 8.735.566.051.536 |
| **C** | **Koreksi** | **(7.793.863.871)** |
| | Pembatalan SKP | (7.793.863.871) |
| **D** | **Pendapatan PKB-LO (a + b + c)** | **9.655.338.125.600** |

Pendapatan PKB-LO merupakan nilai pemungutan pajak yang ditetapkan secara *Official Assessment* dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) ditambah dengan pembayaran Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP). SKP adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang dengan masa pajak terutang lebih dari 12 (dua belas) bulan, sedangkan SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya PKB untuk masa pajak kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pendapatan PKB-LO tidak termasuk kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah jatuh tempo tetapi Belum Daftar Ulang (BDU) ke Samsat. Jumlah

Kendaraan yang telah jatuh tempo pada Tahun 2024 tetapi BDU sebanyak 3.056.134 Kendaraan Bermotor dengan potensi penerimaan PKB sebesar Rp2.525.319.141.800,00. Berikut disajikan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah yang berasal dari BDU di Wilayah Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.112
Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Daerah Yang Berasal Dari BDU di Wilayah Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2024

| NO | JENIS | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK |
| 1 | Sedan Dan Sejenisnya | 8.073 | 19.598.121.025 | 6.620 | 15.939.186.601 | 8.665 | 26.297.636.855 | 13.405 | 50.527.383.600 | 24.234 | 119.024.040.950 | 60.997 | 231.386.369.031 |
| 2 | Jeep Segala Merk | 2.951 | 14.065.743.325 | 2.544 | 12.735.201.400 | 4.357 | 23.991.927.826 | 9.710 | 63.629.844.050 | 23.256 | 171.600.188.200 | 42.818 | 286.022.904.801 |
| 3 | Mini Bus, Micro Bus | 25.289 | 64.758.766.890 | 20.846 | 54.384.796.300 | 36.769 | 102.225.105.349 | 79.011 | 242.518.498.250 | 178.650 | 599.204.774.225 | 340.565 | 1.063.091.941.014 |
| 4 | Pick Up, Light Truck, Truck Dan Sejenisnya | 4.808 | 7.068.594.845 | 4.115 | 6.426.965.255 | 5.355 | 8.794.364.812 | 7.893 | 13.969.364.200 | 13.233 | 24.718.622.375 | 35.404 | 60.977.911.487 |
| 5 | Bus Tingkat, Wagon, Box, Delivery Van | 2.853 | 7.418.371.555 | 2.700 | 7.007.537.450 | 3.612 | 10.354.039.028 | 5.599 | 17.327.280.850 | 12.574 | 40.429.210.425 | 27.338 | 82.536.439.308 |
| 6 | Dum Truck, Truck Tangki Dan Sejenisnya | 1.717 | 6.315.607.750 | 1.442 | 5.640.765.340 | 1.441 | 4.115.446.100 | 2.166 | 5.642.041.100 | 3.976 | 11.524.013.700 | 10.742 | 33.237.873.990 |
| 7 | Otolet/Opelet, Microlet | 589 | 71.418.200 | 421 | 53.169.365 | 320 | 41.372.800 | 384 | 53.855.500 | 850 | 121.056.400 | 2.564 | 340.872.265 |
| 8 | Kendaraan Bermotor Roda Tiga | 5.292 | 347.085.800 | 2.841 | 193.497.705 | 2.431 | 170.736.761 | 2.841 | 252.670.600 | 3.977 | 377.552.000 | 17.382 | 1.341.542.866 |
| 9 | Sepeda MOTOR | 433.803 | 109.477.388.125 | 338.584 | 85.161.613.011 | 386.695 | 107.703.173.542 | 530.257 | 160.394.739.020 | 811.061 | 256.136.558.800 | 2.500.400 | 718.873.472.498 |
| 10 | Alat-Alat Berat | 2.168 | 5.413.682.855 | 1.882 | 4.606.778.435 | 2.068 | 5.062.270.400 | 3.634 | 10.918.205.800 | 8.172 | 21.508.877.050 | 17.924 | 47.509.814.540 |
| **TOTAL** | | **487.543** | **234.534.780.370** | **381.995** | **192.149.510.862** | **451.713** | **288.756.073.473** | **654.900** | **565.233.882.970** | **1.079.983** | **1.244.644.894.125** | **3.056.134** | **2.525.319.141.800** |

**b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO**

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO Tahun 2024 mencapai Rp6.644.445.800.800,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp6.643.605.545.100,00, terjadi kenaikan sebesar Rp840.255.700,00 atau 0,01%. Rincian Pendapatan BBNKB-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

| No | Keterangan | Pendapatan BBNKB-LO (Rp) |
|---|---|---|
| **a** | **Pendapatan:** | **6.644.445.800.800** |
| | Pembayaran SKKP Tahun 2024 | 6.644.445.800.800 |
| **b** | **Pendapatan BBNKB-LO** | **6.644.445.800.800** |

Pendapatan BBNKB-LO merupakan nilai pendapatan pajak secara *official assessment* yang dihitung berdasarkan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) yang terbit.

**c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO**

Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO Tahun 2024 mencapai Rp1.795.757.431.976,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.680.813.642.600,00, terjadi kenaikan sebesar

Rp114.943.789.376,00 atau 6,84%. Rincian Pendapatan PBBKB-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

| No | Keterangan | Pendapatan PBBKB-LO (Rp) |
|---|---|---|
| a | **Pendapatan:** | **1.795.757.431.976** |
| | Setoran Masa PBBKB | 1.795.757.431.976 |
| b | **Pendapatan PKB-LO** | **1.795.757.431.976** |

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*, di mana nilai Pendapatan PBBKB-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima (setoran masa) pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Dalam *self-assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

**d. Pajak Rokok-LO**

Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun 2024 mencapai Rp883.986.065.225,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp855.303.949.037,00, terjadi kenaikan sebesar Rp28.682.116.188,00 atau 3,35%. Rincian Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

| No | Keterangan | Pendapatan Pajak Rokok-LO (Rp) |
|---|---|---|
| a | **Pendapatan:** | **883.986.065.225** |
| | Setoran Pajak Rokok | 883.986.065.225 |
| b | **Pendapatan Pajak Rokok-LO** | **883.986.065.225** |

Pajak Rokok memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*, di mana nilai Pendapatan Pajak Rokok-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penyetoran Pajak Rokok dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

**e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO**

Pendapatan PBJT-LO Tahun 2024 mencapai Rp8.322.517.925.368,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp7.886.999.999.183,00, terjadi kenaikan sebesar Rp435.517.926.185,00 atau 5,52%. Rincian Pendapatan PBJT-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

| No | Keterangan | Pendapatan PBJT-LO (Rp) |
|---|---|---|
| a | **Ketetapan** | **108.409.854.287** |
| | SKPDKB Tahun 2024 | 108.409.854.287 |
| b | **Pendapatan:** | **8.212.922.209.269** |
| | Setoran Masa PBJT | 8.212.910.233.976 |
| | Pengakuan PDM atas Lebih Bayar SKPDKB 2023 | 11.975.293 |
| c | **Koreksi** | **1.185.861.812** |
| | Pembetulan Ketetapan | 1.185.861.812 |
| d | **Pendapatan Pajak PBJT-LO (a + b + c)** | **8.322.517.925.368** |

PBJT memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*. Pendapatan PBJT-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self-assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

**f. Pajak Reklame-LO**

Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun 2024 mencapai Rp1.024.313.376.462,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp966.696.053.486,00 terjadi kenaikan sebesar Rp57.617.322.976,00 atau 5,96%. Rincian Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

| No | Keterangan | Pendapatan Pajak Reklame-LO (Rp) |
|---|---|---|
| **a** | **Ketetapan** | **1.021.861.559.348** |
| | Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2024 | 1.021.861.559.348 |
| **b** | **Pendapatan:** | **1.848.435.889** |
| | Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka | 1.848.435.889 |
| **c** | **Koreksi:** | **603.381.225** |
| | Pembetulan Ketetapan | 603.381.225 |
| **d** | **Pendapatan Pajak Reklame-LO (a + b + c)** | **1.024.313.376.462** |

Pendapatan Pajak Reklame-LO merupakan nilai pendapatan pajak secara *official assessment* yang dihitung berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang terbit.

**g. Pajak Air Tanah-LO**

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun 2024 mencapai Rp88.358.360.981,00, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp98.876.897.239,00, terjadi penurunan sebesar Rp10.518.536.258,00 atau 10,64%. Rincian Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

| No | Keterangan | Pendapatan Pajak Air Tanah-LO (Rp) |
|---|---|---|
| **a** | **Ketetapan** | **87.291.778.840** |
| | Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2024 | 87.291.778.840 |
| **b** | **Pendapatan:** | **16.916** |
| | Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka | 16.916 |
| **c** | **Koreksi:** | **1.066.565.225** |
| | Pembetulan ketetapan | 1.066.565.225 |
| **d** | **Pendapatan Pajak Air Tanah-LO (a + b + c)** | **88.358.360.981** |

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO merupakan nilai pendapatan pajak secara *official assessment* yang dihitung berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang terbit.

**h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO**

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO Tahun 2024 mencapai Rp11.423.395.398.303,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp9.750.581.424.261,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.672.813.974.042,00 atau 17,16%. Rincian Pendapatan PBBP2-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

| No | Keterangan | Pendapatan PBBP2-LO (Rp) |
|---|---|---|
| **a** | **Ketetapan** | **11.560.015.801.235** |
| | Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Tahun 2024 | 14.945.548.391.332 |
| | Kompensasi/pbk atas ketetapan Tahun 2024 | (3.145.291.757) |
| | Pembebasan Ketetapan Tahun 2024 | (2.180.522.465.151) |
| | Pengenaan Ketetapan (dhi.pengurangan atas ketetapan pajak pada bidang pendidikan swasta) Tahun 2024 | (147.118.065.306) |
| | Pengurangan Ketetapan Tahun 2024 | (120.561.751.738) |
| | Keringanan Ketetapan Tahun 2024 | (940.996.721.710) |
| | Pembetulan Ketetapan Tahun 2024 | 6.811.705.565 |
| **b** | **Pendapatan:** | **(313.120.180)** |
| | Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka | 1.633.783.052 |
| | Restitusi | (1.946.903.232) |
| **c** | **Koreksi** | **(136.307.282.752)** |
| | Utang Kompensasi | 23.461.987 |
| | Kompensasi/pbk atas ketetapan tahun sebelumnya | (2.013.812.237) |
| | Pembebasan Ketetapan Tahun Sebelumnya | (17.388.532.739) |
| | Pengenaan Ketetapan Tahun Sebelumnya | (1.887.134.877) |
| | Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya | (32.872.126.560) |
| | Keringanan Ketetapan Tahun Sebelumnya | (69.714.246.554) |
| | Pembetulan Ketetapan Tahun Sebelumnya | (12.454.891.772) |
| **d** | **Pendapatan PBBP2-LO (a + b + c)** | **11.423.395.398.303** |

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO merupakan nilai pendapatan pajak secara *official assessment* yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)yang terbit.

**i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO**

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO Tahun 2024 mencapai Rp6.172.176.170.262,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp7.066.039.805.175,00, terjadi penurunan sebesar Rp893.863.634.913,00 atau 12.65%. Rincian Pendapatan BPHTB-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

| No | Keterangan | Pendapatan BPHTB-LO (Rp) |
|---|---|---|
| **a** | **Ketetapan:** | **24.747.593.353** |
| | SKPDKB dan STPD Tahun 2024 | 24.747.593.353 |
| **b** | **Pendapatan:** | **6.148.378.901.010** |
| | Pembayaran Setoran BPHTB | 6.150.759.655.905 |
| | Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka | 11.975.000 |
| | Restitusi | (2.392.729.895) |
| **c** | **Koreksi:** | **(950.324.101)** |
| | Utang Kompensasi | (117.056.752) |
| | Penambahan Utang Restitusi | (833.267.349) |
| **d** | **Pendapatan BPHTB-LO (a + b + c)** | **6.172.176.170.262** |

BPHTB memiliki sistem pemungutan secara s*elf-assessment*. Pendapatan BPHTB-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang merupakan hasil penelitian.

**j. Pajak Alat Berat (PAB)-LO**

Pendapatan Pajak Alat Berat-LO Tahun 2024 mencapai Rp6.688.000,00. Rincian Pendapatan Pajak Alat Berat-LO Tahun 2024 sebagai

| No | Keterangan | Pendapatan Pajak Alat Berat-LO (Rp) |
|---|---|---|
| **a** | **Pendapatan:** | **6.688.000,00** |
| | Setoran Pajak Alat Berat | 6.688.000,00 |
| **b** | **Pendapatan Pajak Alat Berat-LO** | **6.688.000,00** |

| No | Keterangan | Pendapatan Pajak Alat Berat-LO (Rp) |
|---|---|---|
| **a** | **Pendapatan:** | **6.688.000,00** |
| | Setoran Pajak Alat Berat | 6.688.000,00 |
| **b** | **Pendapatan Pajak Alat Berat-LO** | **6.688.000,00** |

Pendapatan Pajak Alat Berat-LO merupakan nilai pendapatan pajak secara *official assessment* yang dihitung berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang terbit.

#### 5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO diakui apabila SKPD/UKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.401.893.769.313,00 dan Rp461.646.047.887,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dibandingkan dengan 2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp940.247.721.426,00 atau 203,67%. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.113
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Tahun 2024 dan 2023

| No | Uraian | Tahun 2024 (Rp) | Tahun 2023 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Jasa Umum-LO | 469.966.776.766 | 133.274.713.759 | 336.692.063.007 | 252,63 |
| 2 | Retribusi Jasa Usaha-LO | 720.741.786.309 | 90.834.578.853 | 629.907.207.456 | 693,47 |
| 3 | Retribusi Perizinan Tertentu-LO | 211.185.206.238 | 237.536.755.275 | (26.351.549.037) | (11,09) |
| **Jumlah** | | **1.401.893.769.313** | **461.646.047.887** | **940.247.721.426** | **203,67** |

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Per 31 Desember 2024 terdiri dari Penetapan Retribusi Daerah setelah keringanan Peraturan Gubernur yang berlaku dan Pembatalan SKRD dikurangi Retribusi Diterima Dimuka yang belum menjadi Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2024 ditambah Pengakuan Retribusi Diterima Dimuka yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024. Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.114
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024

| No | Jenis Retribusi | Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2024 (Rp) | Keringanan (Pergub No. 36 Tahun 2023) (Rp) | Pengurangan (Kepgub No.835 Tahun 2024) (Rp) | Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Rp) | Penetapan Retribusi Daerah setelah Keringanan (Pergub No. 36 Tahun 2023), Pengurangan (Kepgub No.835 Tahun 2024) dan Pembatalan SKRD (Rp) | Retribusi Diterima Dimuka yang belum menjadi Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2024 | Pengakuan Retribusi Diterima Dimuka yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 | Pendapatan Retribusi Daerah-LO Per 31 Desember 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3-4-5-6 | 8 | 9 | 10 = 7-8+9 |
| 1 | Retribusi Jasa Umum–LO | 417.640.142.361 | 60.014.000 | 1.296.775.000 | 44.927.022 | 416.238.426.339 | 12.756.607.188 | 66.484.957.615 | 469.966.776.766 |
| 2 | Retribusi Jasa Usaha–LO | 723.175.486.418 | 15.523.663 | 1.428.500.000 | 956.113.110 | 720.775.349.645 | 654.086.000 | 620.522.664 | 720.741.786.309 |
| 3 | Retribusi Perizinan Tertentu–LO | 274.275.581.406 | 0 | 0 | 2.564.506.493 | 271.711.074.913 | 60.525.868.675 | 0 | 211.185.206.238 |
| | **Jumlah** | **1.415.091.210.185** | **75.537.663** | **2.725.275.000** | **3.565.546.625** | **1.408.724.850.897** | **73.936.561.863** | **67.105.480.279** | **1.401.893.769.313** |

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 sebagai berikut:

**a. Retribusi Jasa Umum – LO**

Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp469.966.776.766,00 dan Rp133.274.713.759,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum–LO Tahun 2024 dibandingkan dengan

2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp336.692.063.007,00 atau 252,63%. Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.115

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2024

| No | SKPD/UKPD | Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2024 (Rp) | Keringanan (Pergub No. 36 Tahun 2023) (Rp) | Pengurangan (Kepgub No. 835 Tahun 2024) (Rp) | Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Rp) | Penetapan Retribusi Daerah setelah Keringanan (Pergub No. 36 Tahun 2023), Pengurangan (Kepgub No.835 Tahun 2024) dan Pembatalan SKRD (Rp) | Retribusi Diterima Dimuka yang belum menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2024 | Pengakuan Retribusi Diterima Dimuka yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Umum-LO Tahun 2024 | Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Per 31 Desember 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3-4-5-6 | 8 | 9 | 10 = 7-8+9 |
| 1 | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 2.550.000 | 0 | 0 | 2.550.000 |
| 2 | Dinas Lingkungan Hidup | 54.348.714.535 | 0 | 0 | 0 | 54.348.714.535 | 3.236.297.328 | 44.905.895.810 | 96.018.313.017 |
| 3 | Unit Pengelola Sampah Terpadu | 26.774.411.062 | 0 | 0 | 0 | 26.774.411.062 | 0 | 0 | 26.774.411.062 |
| 4 | Dinas Perhubungan | 433.119.000 | 60.014.000 | 0 | 0 | 373.105.000 | 0 | 0 | 373.105.000 |
| 5 | Unit Pengelola Perparkiran | 23.359.211.001 | 0 | 0 | 0 | 23.359.211.001 | 0 | 0 | 23.359.211.001 |
| 6 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 417.096.481 | 0 | 0 | 29.927.022 | 387.169.459 | 9.520.309.860 | 21.579.061.805 | 12.445.921.404 |
| 7 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2.376.475.000 | 0 | 1.296.775.000 | 15.000.000 | 1.064.700.000 | 0 | 0 | 1.064.700.000 |
| 8 | 78 UKPD di bawah koordinasi Dinas Kesehatan (PPK BLUD) | 309.928.565.282 | 0 | 0 | 0 | 309.928.565.283 | 0 | 0 | 309.928.565.283 |
| | **Jumlah** | **417.640.142.361** | **60.014.000** | **1.296.775.000** | **44.927.022** | **416.238.426.339** | **12.756.607.188** | **66.484.957.615** | **469.966.776.766** |

**b. Retribusi Jasa Usaha – LO**

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp720.741.786.309,00 dan Rp90.834.578.853,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2024 dibandingkan 2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp629.907.207.456,00 atau 693,47%. Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Usaha-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.116

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO

Tahun 2024

| No | SKPD/UKPD | Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2024 (Rp) | Keringanan (Pergub No. 36 Tahun 2023) (Rp) | Pengurangan (Kepgub No. 835 Tahun 2024) (Rp) | Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Rp) | Penetapan Retribusi Daerah setelah Keringanan (Pergub No. 36 Tahun 2023), Pengurangan (Kepgub No. 835 Tahun 2024) dan Pembatalan SKRD (Rp) | Retribusi Diterima Dimuka yang belum menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2024 | Pengakuan Retribusi Diterima Dimuka yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Usaha-LO Tahun 2024 | Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Per 31 Desember 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3-4-5-6 | 8 | 9 | 10 = 7-8+9 |
| 1 | Dinas Bina Marga | 4.109.294.400 | 0 | 0 | 0 | 4.109.294.400 | 0 | 0 | 4.109.294.400 |
| 2 | Dinas Sumber Daya Air | 3.230.898.450 | 0 | 0 | 131.097.610 | 3.099.800.840 | 0 | 0 | 3.099.800.840 |
| 3 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 76.031.875.048 | 0 | 0 | 9.052.000 | 76.022.823.048 | 0 | 0 | 76.022.823.048 |
| 4 | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | 680.695.000 | 0 | 0 | 0 | 680.695.000 | 0 | 0 | 680.695.000 |
| 5 | Dinas Sosial | 53.150.000 | 0 | 0 | 0 | 53.150.000 | 0 | 0 | 53.150.000 |
| 6 | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi | 2.784.066.032 | 0 | 0 | 172.715.640 | 2.611.350.392 | 0 | 0 | 2.611.350.392 |
| 7 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 21.789.030.390 | 0 | 0 | 267.445.984 | 21.521.584.406 | 654.086.000 | 620.522.664 | 21.488.021.070 |
| 8 | Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan | 13.093.769.094 | 0 | 0 | 0 | 13.093.769.094 | 0 | 0 | 13.093.769.094 |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup | 6.484.429.250 | 0 | 0 | 0 | 6.484.429.250 | 0 | 0 | 6.484.429.250 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 9.641.435.366 | 15.523.663 | 0 | 0 | 9.625.911.703 | 0 | 0 | 9.625.911.703 |
| 11 | Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang | 2.321.296.000 | 0 | 0 | 0 | 2.321.296.000 | 0 | 0 | 2.321.296.000 |
| 12 | Unit Pengelola Perparkiran | 10.019.871.837 | 0 | 0 | 0 | 10.019.871.837 | 0 | 0 | 10.019.871.837 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 9.671.879.598 | 0 | 0 | 90.256.000 | 9.581.623.598 | 0 | 0 | 9.581.623.598 |
| 14 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 15.793.079.954 | 0 | 0 | 31.620.376 | 15.761.459.578 | 0 | 0 | 15.761.459.578 |
| 15 | Dinas Kebudayaan | 9.528.671.750 | 0 | 0 | 12.502.500 | 9.516.169.250 | 0 | 0 | 9.516.169.250 |
| 16 | Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki | 3.215.675.000 | 0 | 0 | 0 | 3.215.675.000 | 0 | 0 | 3.215.675.000 |
| 17 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 14.182.899.500 | 0 | 0 | 0 | 14.182.899.500 | 0 | 0 | 14.182.899.500 |
| 18 | Dinas Pertamanan dan Hutan Kota | 1.748.062.506 | 0 | 0 | 0 | 1.748.062.506 | 0 | 0 | 1.748.062.506 |
| 19 | Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan | 15.666.917.125 | 0 | 0 | 0 | 15.666.917.125 | 0 | 0 | 15.666.917.125 |
| 20 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 8.572.815.900 | 0 | 1.428.500.000 | 241.423.000 | 6.902.892.900 | 0 | 0 | 6.902.892.900 |
| 21 | Badan Pengelolaan Aset Daerah | 563.320.000 | 0 | 0 | 0 | 563.320.000 | 0 | 0 | 563.320.000 |
| 22 | Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik | 1.938.600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.938.600.000 | 0 | 0 | 1.938.600.000 |
| 23 | Unit Pengelola Jakarta Smart City | 650.892.644 | 0 | 0 | 0 | 650.892.644 | 0 | 0 | 650.892.644 |
| 24 | Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center | 483.530.987.476 | 0 | 0 | 0 | 483.530.987.476 | 0 | 0 | 483.530.987.476 |
| 25 | 12 UKPD di bawah koordinasi Dinas Pendidikan (PPK BLUD) | 4.865.750.056 | 0 | 0 | 0 | 4.865.750.056 | 0 | 0 | 4.865.750.056 |
| 26 | 10 UKPD di bawah koordinasi Dinas | 3.006.124.042 | 0 | 0 | 0 | 3.006.124.042 | 0 | 0 | 3.006.124.042 |

| No | SKPD/UKPD | Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2024 (Rp) | Keringanan (Pergub No. 36 Tahun 2023) (Rp) | Pengurangan (Kepgub No. 835 Tahun 2024) (Rp) | Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Rp) | Penetapan Retribusi Daerah setelah Keringanan (Pergub No. 36 Tahun 2023), Pengurangan (Kepgub No. 835 Tahun 2024) dan Pembatalan SKRD (Rp) | Retribusi Diterima Dimuka yang belum menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2024 | Pengakuan Retribusi Diterima Dimuka yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Usaha-LO Tahun 2024 | Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Per 31 Desember 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3-4-5-6 | 8 | 9 | 10 = 7-8+9 |
| | Kesehatan (PPK BLUD) | | | | | | | | |
| | **Jumlah** | **723.175.486.418** | **15.523.663** | **1.428.500.000** | **956.113.110** | **720.775.349.645** | **654.086.000** | **620.522.664** | **720.741.786.309** |

**c. Retribusi Perizinan Tertentu – LO**

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp211.185.206.238,00 dan Rp237.536.755.275,00. Jika realisasi ~~P~~endapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2024 dibandingkan dengan 2023, maka terdapat penurunan sebesar Rp26.351.549.037,00 atau 11,09%. Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.117

Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Tahun 2024

| No | SKPD/UKPD | Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2024 (Rp) | Keringanan (Pergub No.36 Tahun 2023) (Rp) | Pengurangan (Kepgub No. 835 Tahun 2024) (Rp) | Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Rp) | Penetapan Retribusi Daerah setelah Keringanan (Pergub No. 36 Tahun 2023), Pengurangan (Kepgub No. 835 Tahun 2024) dan Pembatalan SKRD (Rp) | Retribusi Diterima Dimuka yang belum menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu-LO Tahun 2024 | Pengakuan Retribusi Diterima Dimuka yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah Perizinan Tertentu-LO Tahun 2024 | Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Per 31 Desember 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3-4-5-6 | 8 | 9 | 10 = 7-8+9 |
| 1 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 274.275.581.406 | 0 | 0 | 2.564.506.493 | 271.711.074.913 | 60.525.868.675 | 0 | 211.185.206.238 |
| | **Jumlah** | **274.275.581.406** | **0** | **0** | **2.564.506.493** | **271.711.074.913** | **60.525.868.675** | **0** | **211.185.206.238** |

**5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.005.268.401.929,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan dividen atas investasi dengan metode biaya dan pendapatan dari kenaikan nilai investasi dengan metode ekuitas.

Pencatatan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode biaya, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Sedangkan pencatatan

investasi dengan menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) tidak diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Tetapi kenaikan nilai investasi yang diperoleh dari bagian laba perusahaan diakui sebagai pendapatan LO.

Rekapitulasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.118

Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 dan 2023

| No | Uraian | Tahun 2024 (Rp) | Tahun 2023 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Kawasan Berikat Nusantara | 22.309.541.092 | 10.050.867.798 | 12.258.673.294 | 121,97 |
| 2 | PT Cemani Toka | 3.361.871.240 | 1.758.443.960 | 1.603.427.280 | 91,18 |
| 3 | PT Asuransi Bangun Askrida | 0 | 2.302.711.241 | (2.302.711.241) | (100,00) |
| 4 | PT Pakuan International | 111.171.340 | 0 | 111.171.340 | ~ |
| 5 | Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi | 4.979.485.818.257 | 3.379.743.874.995 | 1.599.741.943.262 | 47,33 |
| **Jumlah** | | **5.005.268.401.929** | **3.393.855.897.994** | **1.611.412.503.935** | **47,48** |

**a. PT Kawasan Berikat Nusantara**

Penerimaan dividen dari PT Kawasan Berikat Nusantara Tahun 2024 sebesar Rp22.309.541.092,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 16 tanggal 28 Juni 2024. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

**b. PT Cemani Toka**

Penerimaan dividen dari PT Cemani Toka Tahun 2024 sebesar Rp3.361.871.240,00, sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 1 tanggal 6 Juni 2024. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

**c. PT Pakuan International**

Penerimaan dividen dari PT Pakuan International Tahun 2024 sebesar Rp111.171.340,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 52 tanggal 14 Juni 2024. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

**d. Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi**

Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi sebesar Rp4.979.485.818.257,00 merupakan pendapatan atas laba dan komponen ekuitas lainnya BUMD dan PT Patungan yang menggunakan metode ekuitas, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.119

Pendapatan Atas Laba dan Komponen Ekuitas Lainnya BUMD dan PT Patungan yang Menggunakan Metode Ekuitas

| No. | Perusahaan Daerah | % Kepemilikan | Bagian Laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 (Rp) | Komponen Ekuitas Lainnya Tahun 2023 (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 |
| 1 | Perumda Air Minum Jaya | 100% | 735.414.791.576 | 0 | 735.414.791.576 |
| 2 | Perumda Dharma Jaya | 100% | 7.612.943.003 | 6.112.857.436 | 13.725.800.439 |
| 3 | Perumda Pembangunan Sarana Jaya | 100% | 27.679.181.674 | 1.339.947.623 | 29.019.129.297 |
| 4 | Perumda Pasar Jaya | 100% | 19.445.669.969 | 3.988.521.991 | 23.434.191.960 |
| 5 | Perumda PAL Jaya | 100% | 34.726.471.812 | 0 | 34.726.471.812 |
| 6 | PT Food Station Tjipinang | 99,98% | 11.587.276.026 | 280.486 | 11.587.556.512 |
| 7 | PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung | 53,05% | 2.769.277.455.230 | 1.557.105.223 | 2.770.834.560.453 |
| 8 | PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi) | 26,25% | 37.352.048.960 | 14 | 37.352.048.974 |
| 9 | PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi) | 72,00% | 128.009.520.049 | 0 | 128.009.520.049 |
| 10 | PT Jakarta Propertindo | 99,998% | 0 | 18.737.400.022 | 18.737.400.022 |
| 11 | PT Bank DKI Jakarta | 99,98% | 778.920.228.937 | 12.538.170.638 | 791.458.399.575 |
| 12 | PT Jakarta Tourisindo | 99,58% | 0 | 140.074.752.369 | 140.074.752.369 |
| 13 | PT Mass Rapid Transit Jakarta | 99,998% | 8.895.815.291 | 8.555.276.488 | 17.451.091.779 |
| 14 | PT Transportasi Jakarta | 99,70% | 199.965.480.155 | 0 | 199.965.480.155 |
| 15 | PT Penjamin Kredit Daerah | 99,17% | 27.174.234.990 | 520.388.295 | 27.694.623.285 |
| | **TOTAL** | | **4.786.061.117.672** | **193.424.700.585** | **4.979.485.818.257** |

#### 5.4.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang sah-LO merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah-LO meliputi antara lain jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dari pengembalian, dari penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan, dari angsuran/cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, BLUD dan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum dapat diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya dokumen penagihan atau ketetapan. Dalam hal hak atas pendapatan diterima atau direalisasi tanpa penetapan, maka pendapatan LO diakui ketika hak diterima atau direalisasi.

Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum diukur sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan / Surat Tagihan / dokumen ketetapan lainnya / naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan. Pendapatan LO berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi.

Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-LO per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp24.145.049.224.753,00 dan Rp28.284.884.221.263,00. Bila dibandingkan dengan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp4.139.834.996.510,00 atau 14,64% Realisasi penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.120

Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Tahun 2024 dan 2023

| NO | Uraian | Tahun 2024 (Rp) | Tahun 2023 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | 3.370.200.000 | 3.145.400.000 | 224.800.000 | 7,15 |
| b | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | 168.596.429.440 | 23.736.855.686.349 | (23.568.259.256.909) | (99,29) |
| c | Jasa Giro-LO | 137.201.843.322 | 165.515.031.835 | (28.313.188.513) | (17,11) |
| d | Pendapatan Bunga-LO | 488.490.082.693 | 350.699.194.121 | 137.790.888.572 | 39,29 |
| e | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO | 10.408.965.208 | 13.259.035.958 | (2.850.070.750) | (21,50) |
| f | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO | 19.862.665.976 | 15.489.416.067 | 4.373.249.909 | 28,23 |
| g | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO | 73.838.014.172 | 42.527.904.716 | 31.310.109.456 | 73,62 |
| h | Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO | 357.135.318.003 | 478.008.631.155 | (120.873.313.152) | (25,29) |
| i | Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO | 5.077.640.543 | 1.045.541.564 | 4.032.098.979 | 385,65 |
| j | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO | 71.391.895 | 204.862.000 | (133.470.105) | (65,15) |
| k | Pendapatan dari Pengembalian-LO | 60.200.114.036 | 26.850.883.877 | 33.349.230.159 | 124,20 |
| l | Pendapatan BLUD-LO | 2.990.733.136.658 | 3.364.232.258.340 | (373.499.121.682) | (11,10) |

| NO | Uraian | Tahun 2024 (Rp) | Tahun 2023 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| m | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO | 67.241.729.190 | 86.440.088.006 | (19.198.358.816) | (22,21) |
| n | Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | 117.950.000 | 610.287.275 | (492.337.275) | (80,67) |
| o | Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO | 19.762.703.743.617 | 0 | 19.762.703.743.617 | ~ |
| | **Jumlah** | **24.145.049.224.753** | **28.284.884.221.263** | **(4.139.834.996.510)** | **(14,64)** |

Penjelasan lebih lanjut Penerimaan Lain-lain PAD-LO Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

**a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO**

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2024 sebesar Rp3.370.200.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp3.145.400.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp224.800.000,00 atau 7,15%.

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO merupakan penerimaan atas biaya kompensasi bekas tanah Brandgang yang berada di 1 (satu) lokasi yang sebelumnya tidak tercatat sebagai Aset Tetap atau Aset Lainnya.

Hasil penjualan tersebut diakui pada saat Surat Keputusan Gubernur tentang Biaya Kompensasi Penggunaan/pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang terbit, sedangkan nilainya diukur berdasarkan besaran biaya kompensasi yang tercantum pada SK Gubernur.

**b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO**

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO adalah pendapatan yang bersumber dari hasil sewa BMD, hasil kerja sama pemanfaatan BMD, hasil dari Bangun Guna Serah (BGS), dan hasil dari Bangun Serah Guna (BSG).

Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO berupa hasil sewa BMD, BGS, dan BSG diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun sesuai dengan hak Pemerintah Daerah yang sudah dapat diakui di tahun berkenaan. Nilai Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen Surat Tagihan kepada pihak ketiga.

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp168.596.429.440,00,00 dan sebesar Rp23.736.855.686.349,00, terjadi penurunan sebesar Rp23.568.259.256.909,00 atau 99,29%.

Adapun rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

| No | Nama Akun | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Hasil Sewa BMD-LO | 128.419.699.646 |
| 2 | Hasil dari Bangun Guna Serah-LO | 39.266.042.398 |
| 3 | Hasil dari Bangun Serah Guna-LO | 910.687.396 |
| | **Jumlah** | **168.596.429.440** |

**c. Jasa Giro – LO**

Jasa Giro-LO adalah penerimaan jasa giro atas penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur, baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah maupun Bendaharawan Daerah.

Pendapatan Jasa Giro-LO diakui secara periodik, yaitu pada saat hak Pemerintah Daerah atas penerimaan jasa giro telah jatuh tempo setiap bulan. Sedangkan nilainya diukur sebesar nilai nominal yang tercantum pada Bukti Penerimaan beserta dokumen ketetapan piutang jasa giro pada akhir periode penyusunan laporan keuangan.

Pendapatan Jasa Giro-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp137.201.843.322,00 dan sebesar Rp165.515.031.835,00.

Pendapatan Jasa Giro-LO Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Pendapatan Jasa Giro-LO Tahun 2023 sebesar Rp165.515.031.835,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp28.313.188.513,00 atau 17,11%. Adapun rincian Pendapatan Jasa Giro-LO sebagai berikut.

| No | Nama Akun | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Jasa Giro pada Kas Daerah-LO | 131.115.477.159 |
| 2 | Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO | 3.920.283.552 |
| 3 | Jasa Giro pada Rekening Dana BOS | 2.166.082.611 |
| | **Jumlah** | **137.201.843.322** |

**d. Pendapatan Bunga – LO**

Pendapatan Bunga-LO adalah pendapatan bunga yang berasal dari penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito, obligasi, dan lain sebagainya.

Pendapatan Bunga-LO diakui sesuai dengan hak pendapatan Pemerintah Daerah atas pendapatan bunga yang timbul selama periode laporan keuangan. Sedangkan nilainya disajikan sebesar nilai nominal deposito/obligasi/lainnya.

Pendapatan Bunga-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp488.490.082.693,00 dan sebesar Rp350.699.194.121,00, yang diakui berdasarkan nilai pendapatan penempatan dana dalam pada rekening bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 dan pengakuan bunga akrual berdasarkan jatuh tempo deposito. Pendapatan Bunga-LO Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Pendapatan Bunga-LO Tahun 2023

sebesar Rp350.699.194.121,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp137.790.888.572,00 atau 39,29%.

**e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO**

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO adalah penyetoran/pengembalian baik kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Institusi Pengawas baik internal maupun eksternal. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari TP/TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO diakui berdasarkan penetapan tuntutan ganti rugi dan Surat Tagih yang ditetapkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi pada Tahun 2023.

Nilai Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO diukur berdasarkan nilai (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara SKP2KS.

Pada Tahun 2024 seluruh Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO berbentuk uang. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp10.408.965.208,00 dan sebesar Rp13.259.035.958,00, atau terjadi penurunan sebesar Rp2.850.070.750,00 atau 21,50%.

**f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO**

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO adalah penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa, dan kerja sama oleh Pemerintah Daerah. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO diakui saat timbulnya dokumen ketetapan. Sedangkan nilainya diukur sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Tahun 2024 tercatat sebesar Rp19.862.665.976,00, terdiri atas:

1) sebesar Rp14.807.082.260,00 merupakan penerimaan komisi bagi hasil Premi Program Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK) pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi;
2) sebesar Rp633.580.881,00 merupakan penerimaan angsuran/cicilan uang muka rumah susun dan sewa beli rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
3) sebesar Rp4.422.002.835,00 merupakan pendapatan atas SMK non BLUD pada Dinas Pendidikan.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp15.489.416.067,00, terjadi peningkatan sebesar Rp4.373.249.909,00 atau 28,23%.

**g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO**

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO adalah penerimaan atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama dan didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO diakui ketika terbitnya dokumen ketetapan berupa Berita Acara Serah Terima (BAST). Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen BAST.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Tahun 2024 sebesar Rp73.838.014.172,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Tahun 2023 sebesar Rp42.527.904.716,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp31.310.109.456,00 atau 73,62%.

**h. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO**

Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO adalah pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah setelah jatuh tempo, keterlambatan pendaftaran atau keterlambatan pelaporan. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO diakui saat terbit Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Sedangkan nilainya dihitung berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen STPD/SKPD/SKPDKB.

Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO Tahun 2024 tercatat sebesar Rp357.135.318.003,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp478.008.631.155,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp120.873.313.152,00 atau 25,29%. dengan rincian sebagai berikut.

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO | 211.755.267.784 |
| 2 | Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO | 1.485.372.690 |
| 3 | Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO | 327.640.252 |
| 4 | Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO | 14.500.432.525 |
| 5 | Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO | 42.202.269.321 |
| 6 | Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO | 9.243.531.032 |
| 7 | Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO | 9.080.058.014 |
| 8 | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan-LO | 1.643.376.150 |
| 9 | Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO | 2.765.551.112 |
| 10 | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO | 1.527.867.587 |
| 11 | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO | 52.940.127.080 |
| 12 | Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO | 9.663.824.456 |
| | **Jumlah** | **357.135.318.003** |

**i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO**

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO adalah Pendapatan denda Retribusi Daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah setelah jatuh tempo, yang bersumber dari pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO diakui pada saat dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terbit. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai tercantum pada dokumen SKRD.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 tercatat sebesar Rp5.077.640.543,00, merupakan pendapatan sanksi retribusi sesuai dengan ketetapan SKRD. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp1.045.541.564,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.032.098.979,00 atau 385,65%. Adapun rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum | 2.923.224.969 |
| 2 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha | 2.154.415.574 |
| | **Jumlah** | **5.077.640.543** |

**j. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO**

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO adalah pendapatan yang bersumber dari hasil eksekusi atas jaminan pengadaan barang/jasa. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, BUD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan. Nilai Pendapatan Hasil Eksekusi atas

Jaminan-LO diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO Tahun 2024 sebesar Rp71.391.895,00 seluruhnya merupakan hasil eksekusi atas jaminan pemeliharaan pembangunan *amphiteater* Taman Benyamin Suaeb di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya pada Dinas Kebudayaan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp204.862.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp133.470.105,00 atau 65,15%.

**k. Pendapatan dari Pengembalian-LO**

Pendapatan dari Pengembalian-LO merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja sebelum Tahun 2024 yang diterima pada Tahun 2024.

Pendapatan dari Pengembalian-LO diakui pada saat pengembalian diterima atau hak atas pengembalian ditetapkan, di antaranya melalui penerbitan dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pengembalian belanja. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen STS atau dokumen ketetapan lainnya.

Pendapatan dari Pengembalian-LO Tahun 2024 sebesar Rp60.200.114.036,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp26.850.883.877,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp33.349.230.159,00 atau 124,20%. Adapun rincian Pendapatan dari Pengembalian-LO Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas | 3.500.000 |
| 2 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa | 3.224.588.086 |
| 3 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal | 500.000 |
| 4 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang | 44.233.291 |
| 5 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa | 160.991.966 |
| 6 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan | 192.475.661 |
| 7 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 18.738.887.404 |
| 8 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 14.961.379 |
| 9 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 10.105.712.596 |
| 10 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah | 20.924.081.689 |
| 11 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung | 3.301.337.601 |

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 12 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan | 715.103.994 |
| 13 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air | 645.069.258 |
| 14 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota | 1.649.975.960 |
| 15 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO | 478.695.151 |
| | **Jumlah** | **60.200.114.036** |

**l. Pendapatan BLUD-LO**

Pendapatan-LO dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum BLUD, pendapatan hibah BLUD, pendapatan hasil kerja sama BLUD, dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah.

Pendapatan BLUD diakui dengan kriteria:

1) telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi Pendapatan dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut;
2) telah diterbitkan surat ketetapan; dan atau
3) telah diterbitkan surat penagihan.

Pendapatan-LO dari BLUD-LO Tahun 2024 sebesar Rp2.990.733.136.658,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp3.364.232.258.340,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp373.499.121.682,00 atau 11,10%. Adapun rincian Pendapatan-LO dari BLUD-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan | 2.895.288.235.567 |
| 2 | Pendapatan BLUD dari Hibah | 5.514.674.765 |
| 3 | Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain | 58.002.417.718 |
| 4 | Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah | 31.927.808.608 |
| | **Jumlah** | **2.990.733.136.658** |

**m. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO**

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO adalah pendapatan yang berasal dari denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO diakui pada saat terbitnya dokumen penetapan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai tercantum pada dokumen penetapan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp67.241.729.190,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp86.440.088.006,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp19.198.358.816,00 atau 22,21%.

**n. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO**

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO adalah pendapatan denda yang timbul atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyetorkan pokok hasil kerja sama penyediaan infrastruktur dan hasil dari pengakhiran sewa BMD ke Kas Daerah sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset.

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO diakui pada saat dokumen Surat Tagih terbit. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen Surat Tagih.

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2024 sebesar Rp117.950.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp610.287.275,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp492.337.275,00 atau 80,67%.

**o. Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO**

Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO adalah pendapatan terkait pemenuhan kewajiban pihak ketiga atas penerbitan SIPPT dan SP3L berupa Aset Fasos Fasum yang nilainya diakui berdasarkan BAST.

Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp19.762.703.743.617,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp0,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp19.762.703.743.617,00 atau 100,00%.

#### 5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Transfer (LO) merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan. Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp22.335.089.174.685,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang

tercatat sebesar Rp23.778.953.501.314,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp1.443.864.326.629,00 atau 6,07%. Rekapitulasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.121
Rekapitulasi Pendapatan Transfer-LO
Tahun 2024 dan 2023

| No | Uraian | Tahun 2024 (Rp) | Tahun 2023 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Bagi Hasil (DBH) - LO | 18.746.603.810.943 | 20.669.456.449.952 | (1.922.852.639.009) | (9,30) |
| 2 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 368.173.270.201 | 22.179.718.000 | 345.993.552.201 | 1.559,95 |
| 3 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO | 0 | 3.076.020.400 | (3.076.020.400) | (100,00) |
| 4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO | 3.176.221.876.541 | 3.049.066.285.962 | 127.155.590.579 | 4,17 |
| 5 | Insentif Fiskal - LO | 44.090.217.000 | 35.175.027.000 | 8.915.190.000 | 0 |
| **Jumlah** | | **22.335.089.174.685** | **23.778.953.501.314** | **(1.443.864.326.629)** | **(6,07)** |

Rincian Pendapatan Transfer-LO terdiri dari sebagai berikut:

#### 5.4.1.1.2.1 Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Realisasi DBH-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp18.746.603.810.943,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp20.669.456.449.952,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp1.922.852.639.009,00 atau 9,30%. DBH-LO Tahun 2024 terdiri dari penetapan pendapatan transfer, penetapan kurang bayar, dan penetapan lebih bayar, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. penetapan dan realisasi pendapatan transfer dana bagi hasil Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 sebesar Rp15.561.026.726.000,00;
b. Realisasi kurang bayar dana bagi hasil berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 sebesar Rp29.711.000,00;
c. Penyesuaian kurang dan lebih bayar tahun berjalan 2024 berdasarkan PMK 89 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar, yang diakui sebagai Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 sebesar Rp3.095.547.373.943,00.

#### 5.4.1.1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Penetapan DAU Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 sebesar Rp368.173.270.201,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp22.179.718.000,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp345.993.552.201,00 atau 1.559,95 %.

#### 5.4.1.1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp3.076.020.400,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp3.076.020.400,00 atau 100%.

#### 5.4.1.1.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

DAK Non Fisik-LO Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 sebesar Rp3.176.221.876.541,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp3.049.066.285.962,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp127.155.590.579,00 atau 4,17%. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO terdiri dari:

a. realisasi DAK Non Fisik Tahun 2024 sebesar Rp3.187.483.559.919,00; dan
b. pengembalian DAK Non Fisik-BOS Reguler ke RKUN berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat sebesar Rp11.261.683.378,00.

#### 5.4.1.1.2.5 Insentif Fiskal-LO

Insentif Fiskal-LO adalah sebesar Rp44.090.217.000,00 yang terdiri dari Penetapan Insentif Fiskal Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 sebesar Rp32.358.203.000,00 dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Fiskal Tahun 2024 Kinerja Tahun Berjalan sebesar Rp11.732.014.000,00.

### 5.4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah-LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diakui pada saat hak diterima atau terealisasi berdasarkan dokumen penetapan pendapatan-LO terkait. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diukur berdasarkan pada nilai yang tercantum pada dokumen pendapatan-LO terkait.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.223.761.457.172,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.584.721.532.629,00, sehingga terdapat penurunan sebesar 65,86%. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 diantaranya terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk Pembangunan MRT dan Pendapatan Hibah dari Jasa Raharja kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dengan total nilai sebesar Rp589.167.782.024,00;

b. Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Tanah, Peralatan dan Mesin, dan Gedung dan Bangunan dengan total nilai Rp140.402.658.292,00 kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD);
c. Pendapatan Hibah dari Kementerian Kesehatan dalam bentuk Vaksin, Obat-obatan dan Laptop sebesar Rp368.280.252.004,00 kepada Dinas Kesehatan;
d. Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya (Buku) sebesar Rp12.574.277.582,00 kepada Dinas Pendidikan;
e. Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp510.438.153,00 kepada Dinas Sosial;
f. Pendapatan Hibah dari BKKBN berbentuk Alat Kontrasepsi dan Non Alat Kontrasepsi sebesar Rp11.711.518.092,00 kepada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
g. Pendapatan Hibah dari PAM Jaya dalam bentuk TV dan Bank DKI dalam bentuk Laptop dan Printer sebesar Rp18.043.000,00 kepada Kota Administrasi Jakarta Pusat;
h. Pendapatan Hibah dari Perpustakaan Nasional dalam bentuk PC Komputer, Printer dan Router sebesar Rp36.257.000,00 kepada Kota Administrasi Jakarta Timur;
i. Pendapatan Hibah dari BPJS Kesehatan dalam bentuk Persediaan Tempat Sampah sebesar Rp37.500.000,00 kepada Kabupaten Kepulauan Seribu;
j. Pendapatan Hibah dari Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp53.348.536.262,00; dan
k. Pendapatan Hibah dari BNPB dalam bentuk Persediaan Fasilitas Isolasi *Covid-19* sebesar Rp6.561.338.500,00 kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### 5.4.1.2 Beban Daerah

Beban Daerah Tahun 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sehubungan dengan berlalunya waktu, terjadinya konsumsi aset saat adanya pengeluaran kas maupun konsumsi aset non kas, dan timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Nilai beban dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen tagihan pihak ketiga atau dokumen sumber seperti *listing* pegawai, nota perjanjian, Surat Keputusan dan dokumen lainnya yang direkonsiliasi dengan Utang, reklasifikasi, kapitalisasi Belanja, Beban Dibayar di Muka, dan akun lainnya.

Beban Tahun 2024 sebesar Rp69.491.484.612.994,00 terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp61.717.405.243.317,00, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp7.390.364.255.277,00, dan Beban Transfer sebesar Rp383.715.114.400,00. Beban Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,29% atau sebesar Rp886.434.870.667,00 dari tahun sebelumnya. Kenaikan terbesar berasal dari Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang meningkat 252,65% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dikarenakan meningkatnya partisipasi dalam kompetisi olahraga sehingga terjadi kenaikan dalam pemberian penghargaan kepada atlet, pelatih dan asisten pelatih berprestasi.

Selain itu, terdapat beberapa penurunan Beban Daerah Tahun 2024 yang salah satunya disebabkan oleh penurunan Beban Bantuan Sosial sebesar 19,12% dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan adanya mekanisme verifikasi pemberian bantuan sosial yang lebih selektif dibandingkan dengan yang sebelumnya. Lebih rinci mengenai Beban Daerah Tahun 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.122
Rekapitulasi Beban Daerah
Tahun 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 (Rp) | Tahun 2023 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beban Operasi** | | **61.717.405.243.317** | **61.040.642.496.716** | **676.762.746.601** | **1,11** |
| 1 | Beban Pegawai | 19.064.896.423.259 | 17.978.251.780.755 | 1.086.644.642.504 | 6,04 |
| 2 | Beban Barang | 8.210.467.578.487 | 8.368.039.918.686 | (157.572.340.199) | (1,88) |
| 3 | Beban Jasa | 15.899.306.134.614 | 15.897.400.048.649 | 1.906.085.965 | 0,01 |
| 4 | Beban Pemeliharaan | 2.374.946.418.584 | 2.347.768.127.910 | 27.178.290.674 | 1,16 |
| 5 | Beban Perjalanan Dinas | 214.123.989.688 | 144.239.199.856 | 69.884.789.832 | 48,45 |
| 6 | Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat | 632.244.815.800 | 179.286.179.744 | 452.958.636.056 | 252,65 |
| 7 | Beban Bunga | 181.645.376.709 | 229.413.542.369 | (47.768.165.660) | (20,82) |
| 8 | Beban Subsidi | 5.637.232.604.654 | 5.482.558.366.839 | 154.674.237.815 | 2,82 |
| 9 | Beban Hibah | 2.791.383.055.853 | 3.623.927.568.369 | (832.544.512.516) | (22,97) |
| 10 | Beban Bantuan Sosial | 3.478.730.711.035 | 4.300.981.697.194 | (822.250.986.159) | (19,12) |
| 11 | Beban Penyisihan Piutang | 1.394.832.288.718 | 1.018.310.129.789 | 376.522.158.929 | 36,98 |

| No. | Uraian | Tahun 2024 (Rp) | Tahun 2023 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Beban Lain-lain | 1.837.595.845.916 | 1.470.465.936.556 | 367.129.909.360 | 24,97 |
| **Beban Penyusutan dan Amortisasi** | | **7.390.364.255.277** | **7.207.960.765.111** | **182.403.490.166** | **2,53** |
| 1 | Beban Penyusutan | 7.324.258.948.985 | 7.093.345.755.464 | 230.913.193.521 | 3,26 |
| 2 | Beban Amortisasi | 66.105.306.292 | 114.615.009.647 | (48.509.703.355) | (42,32) |
| **Beban Transfer** | | **383.715.114.400** | **356.446.480.500** | **27.268.633.900** | **7,65** |
| 1 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 383.715.114.400 | 356.446.480.500 | 27.268.633.900 | 7,65 |
| **Jumlah Beban** | | **69.491.484.612.994** | **68.605.049.742.327** | **886.434.870.667** | **1,29** |

#### 5.4.1.3 Beban Operasi

Beban Operasi disajikan berdasarkan perhitungan belanja-belanja operasi pada Tahun 2024 yang direkonsiliasi dengan nilai utang per 31 Desember 2024 dan 2023, Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023, koreksi lebih/kurang catat utang Tahun 2023, reklasifikasi Belanja Modal dan Aset Tetap ke Beban Operasi, kapitalisasi belanja ke Aset Tetap dan akun-akun terkait lainnya.

Beban Operasi Tahun 2024 sebesar Rp61.717.405.243.317,00 terdiri dari beban berikut ini.

#### 5.4.1.3.1.a Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp19.064.896.423.259,00 disajikan berdasarkan pengeluaran Belanja Pegawai yang di antaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai Tahun 2024 yang diperhitungkan dengan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023. Apabila dibandingkan dengan Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp17.978.251.780.755,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.086.644.642.504,00 atau 6,04%.

| No | Uraian | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | **Beban Pegawai - Non BLUD** | **18.859.300.728.826** |
| | Beban Gaji dan Tunjangan | 6.233.852.759.810 |
| | Beban Non Gaji dan Tunjangan | 12.625.447.969.016 |
| 2 | **Beban Pegawai – BLUD** | **205.595.694.433** |
| | **Jumlah** | **19.064.896.423.259** |

Beban Pegawai Tahun 2024 di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.722.115.148.274,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp2.076.622.351.225,00, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp888.080.857.430,00, Satpol PP sebesar Rp825.581.759.822,00, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp758.158.026.434,00.

#### 5.4.1.3.1.b Beban Barang

Beban Barang merupakan beban yang mencatat pemakaian persediaan dan pembayaran atas pengeluaran barang lainnya selama Tahun 2024. Beban Barang Tahun 2024 sebesar Rp8.210.467.578.487,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Barang Tahun 2023 sebesar Rp8.368.039.918.686,00, terjadi penurunan sebesar Rp157.572.340.199,00 atau 1,88%. Beban Barang Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

| No | Uraian | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Beban barang di SKPD | 4.735.908.713.623 |
| 2 | Beban barang di BLUD | 3.474.558.864.864 |
| | **Total** | **8.210.467.578.487** |

Beban barang di SKPD sebesar Rp4.735.908.713.623,00 tersebut terdiri atas Beban Persediaan dan Beban Non-persediaan yang masing-masing nilainya sebesar Rp2.102.277.704.046,00 dan Rp2.633.631.009.577,00. Nilai beban persediaan dicatat sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber dan telah memperhitungkan persediaan awal Tahun 2024, pembelian atau perolehan persediaan selama Tahun 2024, persediaan akhir per 31 Desember 2024, belanja barang dibayar di muka dan transaksi-transaksi penambahan/pengurangan persediaan lainnya. Atas beban persediaan sebesar Rp2.102.277.704.046,00 tersebut, terdapat beban persediaan yang terjadi karena persediaan usang sebesar Rp4.772.152.879,00.

Beban Barang sebesar Rp8.210.467.578.487,00 di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp611.159.585.510,00, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp372.575.239.253,00, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp359.800.336.203,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp319.304.725.584,00, dan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp312.917.407.284,00

#### 5.4.1.3.1.c Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp15.899.306.134.614,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Jasa Tahun 2023 sebesar Rp15.897.400.048.649,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.906.085.965,00 atau 0,01%. Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp15.899.306.134.614,00 dapat dirinci sebagai berikut.

| No | Uraian | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Beban Jasa Kantor | 12.231.964.156.507 |
| 2 | Beban Jasa Iuran Jaminan/Asuransi | 2.256.071.910.018 |
| 3 | Beban Jasa Sewa Aset Tetap | 984.575.818.000 |
| 4 | Beban Jasa Konsultasi | 343.643.892.205 |
| 5 | Beban Jasa Pendidikan dan Pelatihan | 80.373.089.745 |

| No | Uraian | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| 6 | Beban Jasa Insentif ASN | 2.677.268.139 |
| | **Jumlah** | **15.899.306.134.614** |

Beban jasa di antaranya terdapat pada Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta sebesar Rp2.185.487.509.353,00, Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp457.515.687.877,00, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik sebesar Rp418.368.535.278,00, Dinas Bina Marga sebesar Rp286.865.494.073,00, dan Sudin Pendidikan I – Jakarta Timur sebesar Rp250.497.860.274,00.

#### 5.4.1.3.1.d Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp2.374.946.418.584,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp2.347.768.127.910,00, terjadi kenaikan sebesar Rp27.178.290.674,00 atau 1,16%. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp2.374.946.418.584,00 dapat dirinci sebagai berikut.

| No | Uraian | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Beban Pemeliharaan Tanah | 993.086.456 |
| 2 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.089.021.666.229 |
| 3 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 897.131.343.584 |
| 4 | Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 382.176.593.039 |
| 5 | Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 599.379.159 |
| 6 | Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud | 5.024.350.117 |
| | **Jumlah** | **2.374.946.418.584** |

Beban pemeliharaan tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp100.504.070.274,00, Sudin Pendidikan I – Jakarta Timur sebesar Rp98.607.589.766,00, Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp85.234.537.515,00, Sudin Pendidikan II – Jakarta Timur sebesar Rp84.882.679.117,00, dan Sudin Sumber Daya Air – Jakarta Utara sebesar Rp82.070.431.945,00.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024 di antaranya termasuk belanja modal Tahun 2024 yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp61.227.257.766,00.

#### 5.4.1.3.1.e Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp214.123.989.688,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp144.239.199.856,00, terjadi kenaikan sebesar Rp69.884.789.832,00 atau

48,45%. Beban Perjalanan Dinas terdiri dari beban perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas luar negeri. Beban Perjalanan Dinas tersebut di antaranya terdapat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp97.141.324.059,00, Biro Kerja Sama Daerah sebesar Rp80.766.476.066,00, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp8.433.334.224,00, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp6.983.276.025,00, dan Inspektorat sebesar Rp6.664.500.000,00.

**5.4.1.3.1.f Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp632.244.815.800,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 sebesar Rp179.286.179.744,00, terjadi kenaikan sebesar Rp452.958.636.056,00 atau 252,65%. Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diantaranya terdapat pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp498.302.515.240,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp56.830.000.000,00, Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga – Jakarta Selatan sebesar Rp7.336.999.326,00, Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga – Jakarta Timur sebesar Rp6.687.237.669,00, dan Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Jakarta Utara sebesar Rp4.364.476.000,00.

Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat di antaranya merupakan pemberian penghargaan untuk atlet, pelatih, dan asisten pelatih berprestasi pada acara olahraga tingkat nasional, regional, dan internasional pada Dinas Pemuda dan Olah.

**5.4.1.3.1.g Beban Bunga**

Beban Bunga Tahun 2024 sebesar Rp181.645.376.709,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Bunga Tahun 2023 sebesar Rp229.413.542.369,00, terjadi penurunan sebesar Rp47.768.165.660,00 atau 20,82%. Beban Bunga Tahun 2024 dirinci sebagai berikut.

| No | Uraian | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Beban Bunga Proyek JEDI | 30.562.295.493 |
| 2 | Beban Bunga Proyek MRT | 32.661.824.265 |
| 3 | Beban Bunga Program PEN | 118.421.256.951 |
| | **Jumlah** | **181.645.376.709** |

**a. Beban Bunga Proyek JEDI**

Beban Bunga Proyek JEDI sebesar Rp30.562.295.493,00 merupakan beban bunga yang timbul atas Utang kepada Pemerintah Pusat untuk pekerjaan proyek JEDI sesuai dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Nomor SLA-1247/DSMI/2012. Pinjaman tersebut diberikan untuk

pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

**b. Beban Bunga Proyek MRT**

Beban Bunga Proyek MRT sebesar Rp32.661.824.265,00 merupakan beban bunga yang timbul atas Utang kepada Pemerintah Pusat untuk pekerjaan proyek MRT sesuai dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Nomor 1263/DSMI/2016. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembangunan proyek MRT *Phase* I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan *Phase* II (Jakarta Kota – Bundaran HI).

**c. Beban Bunga Program PEN**

Beban Bunga Program PEN sebesar Rp118.421.256.951,00 merupakan beban bunga yang timbul atas pinjaman dalam rangka mendukung program PEN Provinsi DKI Jakarta. Pinjaman tersebut diberikan antara lain untuk pembangunan fasilitas RDF *Plant* dan fasilitas *Landfill Mining* TPST Bantargebang.

#### 5.4.1.3.1.h Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp5.637.232.604.654,00. Nilai tersebut telah direkonsiliasi dengan utang belanja subsidi Tahun 2024 dan 2023. Apabila dibandingkan dengan Beban Subsidi Tahun 2023 sebesar Rp5.482.558.366.839,00, terjadi kenaikan sebesar Rp154.674.237.815,00 atau 2,82%. Beban Subsidi Tahun 2024 yang diberikan kepada BUMD dirinci sebagai berikut.

| No | Uraian | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | PT Transjakarta | 3.640.197.202.964 |
| 2 | Perumda Dharma Jaya | 435.158.599.225 |
| 3 | PT Food Tjipinang Station | 356.020.548.809 |
| 4 | PT MRT Jakarta | 764.583.610.396 |
| 5 | PT LRT Jakarta | 441.272.643.260 |
| | **Jumlah** | **5.637.232.604.654** |

#### 5.4.1.3.1.i Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp2.791.383.055.853,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp3.623.927.568.369,00, terjadi penurunan sebesar Rp832.544.512.516,00 atau 22,97%.

Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp2.791.383.055.853,00 dirinci sebagai berikut.

| No | Uraian | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat | 525.190.033.597 |
| 2 | Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat | 1.494.580.805.623 |
| 3 | Beban Hibah Dana BOS ke SD Swasta | 314.507.817.875 |
| 4 | Beban Hibah Dana BOS ke SMP/SMPT/SMA Swasta | 395.393.866.484 |
| 5 | Beban Hibah Dana BOS ke Sekolah Khusus/SLB | 19.546.159.794 |
| 6 | Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 41.759.385.000 |
| 7 | Beban Hibah aset yang diserahkan ke pihak lain di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 404.987.480 |
| | **Jumlah** | **2.791.383.055.853** |

Beban Hibah tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.602.254.768.581,00, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp390.497.673.558,00, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp376.920.180.002,00, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp333.601.750.874,00, dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebesar Rp50.910.000.000,00.

#### 5.4.1.3.1.j Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp3.478.730.711.035,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp4.300.981.697.194,00, terjadi penurunan sebesar Rp822.250.986.159,00 atau 19,12%. Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dirinci sebagai berikut.

| No | Uraian | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat | 8.841.910.000 |
| 2 | Bantuan Sosial Kepada Individu | 3.469.888.801.035 |
| | **Jumlah** | **3.478.730.711.035** |

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 tidak termasuk dengan belanja bantuan sosial yang belum disalurkan kepada penerima di tahun berjalan dan yang akan disalurkan di Tahun 2025. Pencatatan belanja bantuan sosial tersebut disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

Bantuan Sosial yang diberikan antara lain Bantuan Sosial Kepada Individu berupa uang yang diberikan untuk biaya personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS), beasiswa pendidikan untuk anak tenaga kesehatan yang

meninggal karena Covid-19, serta pemenuhan kebutuhan dasar untuk penyandang disabilitas dan lansia.

#### 5.4.1.3.1.k Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan risiko ketidaktertagihan piutang. Penentuan tingkat risiko ketidaktertagihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang penelitiannya dilakukan berdasarkan umur piutang pada tanggal laporan keuangan.

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp1.394.832.288.718,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp1.018.310.129.789,00, terjadi kenaikan sebesar Rp376.522.158.929,00 atau 36,98%. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp1.394.832.288.718,00 dirinci per jenis piutang sebagai berikut

| No | Uraian | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah | 1.198.564.439.683 |
| 2 | Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | 105.285.735.949 |
| 3 | Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 90.982.113.086 |
| | **Jumlah** | **1.394.832.288.718** |

#### 5.4.1.3.1.l Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun 2024 sebesar Rp1.837.595.845.916,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp1.470.465.936.556,00, terjadi kenaikan sebesar Rp367.129.909.360,00 atau 24,97%. Beban Lain-lain Tahun 2024 sebagian besar terdiri atas beban kerugian penghapusan Aset Tetap (selain diperhitungkan surplus defisit) sebesar Rp114.985.528.967,00 yang terdapat pada Pejabat Pengelolaan Aset Daerah, koreksi saldo awal yang berdampak pada pengurangan ekuitas atas PT Jakarta Propertindo sebesar Rp804.792.901.781,00 dan atas PD Dharma Jaya sebesar Rp39.683.051.300,00, serta terdapat beban penurunan nilai investasi sebesar Rp878.134.363.920,00 atas pengumuman rugi BUMD dan PT patungan Tahun 2024 dengan metode pencatatan ekuitas dan kejadian lain yang mengurangi ekuitas dalam laporan keuangan *unaudited investee* dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.123

Beban Penurunan Nilai Investasi BUMD dan PT Patungan Tahun 2024 dengan Metode Pencatatan Ekuitas

Tahun 2024 dan 2023

| No. | Nama | Rugi Tahun 2024 (Rp) | Pengakuan Beban atas Kejadian selain Pengumuman Rugi (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PD AM Jaya | 0 | 55.383.012.215 | 55.383.012.215 |
| 2 | PD Dharma Jaya | 0 | 1.078.881.317 | 1.078.881.317 |
| 3 | PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi) | 0 | 11.841.286.552 | 11.841.286.552 |
| 4 | PD PAL Jaya | 0 | 1 | 1 |
| 5 | PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung | 0 | 94.765.831.264 | 94.765.831.264 |
| 6 | PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi) | 0 | 496.806.292 | 496.806.292 |
| 7 | PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi) | 0 | 42.804.720.063 | 42.804.720.063 |
| 8 | PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi) | 517.180.237.172 | 2.624.609.250 | 519.804.846.422 |
| 9 | PT Bank DKI Jakarta | 0 | 99.509.268.424 | 99.509.268.424 |
| 10 | PT Jakarta Tourisindo | 49.151.702.900 | 0 | 49.151.702.900 |
| 11 | PT Mass Rapid Transit Jakarta | 0 | 70.388.370 | 70.388.370 |
| 12 | PT Transportasi Jakarta | 0 | 2.856.149.045 | 2.856.149.045 |
| 13 | PT Penjamin Kredit Daerah | 0 | 371.471.055 | 371.471.055 |
| | **Jumlah** | **566.331.940.072** | **311.802.423.848** | **878.134.363.920** |

#### 5.4.1.3.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.390.364.255.277,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp7.207.960.765.111,00, mengalami kenaikan sebesar Rp182.403.490.166,00 atau 2,53%.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Beban Amortisasi adalah alokasi nilai Aset Tidak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.390.364.255.277,00 terdiri dari beban berikut ini.

**a. Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp7.324.258.948.985,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp7.093.345.755.464,00, terjadi kenaikan sebesar Rp230.913.193.521,00 atau 3,26%. Beban Penyusutan Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut

| No | Uraian | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 2.184.267.229.896 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 1.897.876.424.755 |
| 3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 3.094.384.341.814 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | 3.182.155.730 |
| 5 | Aset Lainnya | 143.154.731.399 |
| 6 | Properti Investasi – Gedung dan Bangunan | 685.900.400 |
| 7 | Properti Investasi – Jalan, Irigasi dan Jaringan | 708.164.991 |
| | **Jumlah** | **7.324.258.948.985** |

Beban Penyusutan Tahun 2024 di antaranya terdapat di Dinas Bina Marga sebesar Rp1.622.983.277.971,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp485.378.755.185,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp390.447.369.767,00, Sudin Bina Marga – Jakbar sebesar Rp171.642.200.759,00 dan Sudin Sumber Daya Air – Jakpus sebesar Rp144.611.433.330,00.

**b. Beban Amortisasi**

Beban Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp66.105.306.292,00 yang merupakan amortisasi atas aset tidak berwujud antara lain Lisensi Oracle dan *Operating System Windows*. Apabila dibandingkan dengan Beban Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp114.615.009.647,00, terjadi penurunan sebesar Rp48.509.703.355,00 atau 42,32%.

Beban Amortisasi antara lain terdapat pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp27.773.592.721,00, Unit Pengelola Jakarta Smart City sebesar Rp19.712.885.801,00, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp5.988.592.399,00, Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp4.236.297.257,00, dan Pusat Data dan Informasi Keuangan sebesar Rp1.337.918.107,00.

### 5.4.1.3.3 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Belanja Transfer.

Beban Transfer Tahun 2024 sebesar Rp383.715.114.400,00 merupakan Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Kabupaten/Kota. Apabila dibandingkan dengan

Beban Transfer Tahun 2023 sebesar Rp356.446.480.500,00, terjadi kenaikan sebesar Rp27.268.633.900,00 atau 7,65%.

### 5.4.2 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional terdiri dari Surplus Non Operasional dan Beban Non Operasional yang dihasilkan dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2024, surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp23.759.653.274,00 yang berasal dari selisih antara Surplus dan Defisit Non Operasional. Penjelasan lebih lanjut mengenai Surplus Non Operasional dan Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

#### 5.4.2.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional merupakan surplus yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, di mana nilai kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih besar daripada nilai bukunya.

Selama periode Tahun 2024, Surplus Non Operasional merupakan Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar berupa penjualan aset non lancar sebesar Rp27.717.897.192,00. Sedangkan nilai Surplus Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp3.722.940.118,00.

#### 5.4.2.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional merupakan defisit yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban. Defisit Non Operasional Tahun 2024 merupakan Defisit dari Penghentian Aset Non Lancar sebesar Rp3.958.243.918,00, yang di antaranya berasal dari Penghentian Aset non lancar di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.214.898.707,00 dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp634.172.000,00.

### 5.4.3 Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar (Rp3.025.742.350,00).

### 5.4.4 Surplus – LO

Surplus - LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp30.653.632.411.109,00. Perhitungan Surplus – LO adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Pendapatan – LO | 100.121.357.370.829 | |
| Beban | ( 69.491.484.612.994) | |
| Surplus Kegiatan Operasional | | 30.629.872.757.835 |
| Surplus Kegiatan Non Operasional | | 23.759.653.274 |
| Pos Luar Biasa | | 0 |
| **Surplus – LO** | | **30.653.632.411.109** |

## 5.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2024.

### 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2024, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp70.598.385.967.701,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp58.172.616.250.008,00 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.425.769.717.693,00. Sedangkan untuk Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp67.759.383.857.593,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp57.127.148.778.536,00 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.632.235.079.057,00. Terdapat kenaikan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp1.793.534.638.636,00 yang di antaranya disebabkan oleh kenaikan arus kas masuk atas penerimaan pajak sebesar Rp931.593.220.027,00 dan penerimaan dana bagi hasil Rp805.251.679.995,00.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Bagi Hasil, Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Dana Insentif Fiskal, dan Penerimaan Hibah. (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang, Pembayaran Bunga, Pembayaran Subsidi, Pembayaran Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Bantuan Keuangan, dan Pembayaran Tak Terduga.

Secara rinci nilai Arus Kas Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.124

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| **1** | **ARUS KAS MASUK:** | | |
| a. | Penerimaan Pajak Daerah | 44.448.074.892.860 | 43.516.481.672.833 |
| b. | Penerimaan Retribusi Daerah | 713.719.914.819 | 454.697.560.911 |
| c. | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 653.700.898.761 | 545.869.249.987 |
| d. | Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah | 4.895.435.469.115 | 4.583.119.605.650 |
| e. | Penerimaan Dana Bagi Hasil | 17.110.097.019.361 | 16.304.845.339.366 |
| f. | Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | - | 3.076.020.400 |
| g. | Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 2.352.167.225.584 | 2.263.034.544.382 |
| h. | Penerimaan Dana Alokasi Umum | 368.173.270.201 | 22.179.718.000 |
| i. | Penerimaan Dana Insentif Fiskal | 44.090.217.000 | 35.175.027.000 |
| j. | Penerimaan Hibah | 12.927.060.000 | 30.905.119.064 |
| | **JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)** | **70.598.385.967.701** | **67.759.383.857.593** |
| **2** | **ARUS KAS KELUAR:** | | |
| a. | Pembayaran Pegawai | 19.190.554.701.043 | 17.977.776.327.870 |
| b. | Pembayaran Barang | 26.572.367.215.305 | 25.824.444.605.296 |
| c. | Pembayaran Bunga | 180.738.864.995 | 229.704.491.741 |
| d. | Pembayaran Subsidi | 5.875.837.590.937 | 5.539.653.281.534 |
| e. | Pembayaran Hibah | 2.472.491.761.571 | 2.835.482.114.927 |
| f. | Pembayaran Bantuan Sosial | 3.496.629.048.637 | 4.363.641.476.668 |
| g. | Pembayaran Bantuan Keuangan | 383.997.067.520 | 356.446.480.500 |
| | **JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)** | **58.172.616.250.008** | **57.127.148.778.536** |
| | **ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (I-II)** | **12.425.769.717.693** | **10.632.235.079.057** |

#### 5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

#### 5.5.1.1.a Penerimaan Pajak Daerah

Arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp44.448.074.892.860,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp931.593.220.027,00 atau 2,14% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp43.516.481.672.833,00. Rincian penerimaan Pajak Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.1.

#### 5.5.1.1.b Penerimaan Retribusi Daerah

Arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp713.719.914.819,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp259.022.353.908,00 atau 56,97% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp454.697.560.911,00. Rincian penerimaan Retribusi Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.2.

**5.5.1.1.c Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp653.700.898.761,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp107.831.648.774,00 atau 19,75% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp545.869.249.987,00. Rincian penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.3.

**5.5.1.1.d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp4.895.435.469.115,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp312.315.863.465,00 atau 6,81% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp4.583.119.605.650,00.

**5.5.1.1.e Penerimaan Dana Bagi Hasil**

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp17.110.097.019.361,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp805.251.679.995,00 atau 4,94% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp16.304.845.339.366,00.

**5.5.1.1.f Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus Fisik tercatat sebesar Rp0,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.076.020.400,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Alokasi Khusus Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp3.076.020.400,00.

**5.5.1.1.g Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.352.167.225.584,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp89.132.681.202,00 atau 3,94% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp2.263.034.544.382,00.

**5.5.1.1.h Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)**

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp368.173.270.201,00. Arus kas masuk tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp345.993.552.201,00 atau 1.559,95% jika

dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp22.179.718.000,00. Rincian Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1.2.

**5.5.1.1.i Penerimaan Insentif Fiskal**

Arus kas masuk dari Dana Insentif Fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp44.090.217.000,00. Arus kas masuk tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp8.915.190.000,00 atau 25,35% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Insentif Fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp35.175.027.000,00. Rincian Penerimaan Dana Insentif Fiskal disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.2.

**5.5.1.1.j Penerimaan Hibah**

Arus kas masuk dari Penerimaan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp12.927.060.000,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp17.978.059.064,00 atau 58,17% jika dibandingkan dengan Penerimaan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp30.905.119.064,00.

**5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi**

**5.5.1.2.a Pembayaran Pegawai**

Pembayaran Pegawai menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai belanja pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2024.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp19.190.554.701.043,00. Arus kas keluar tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.212.778.373.173,00 atau 6,75% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp17.977.776.327.870,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Pegawai disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.1.a.

**5.5.1.2.b Pembayaran Barang**

Pembayaran Barang adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Barang pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp26.572.367.215.305,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp747.922.610.009,00 atau 2,90% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Barang pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp25.824.444.605.296,00. Rincian

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Barang disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.1.b.

**5.5.1.2.c Pembayaran Bunga**

Pembayaran Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang pinjaman. Arus kas keluar untuk Pembayaran Bunga pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp180.738.864.995,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.c. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp48.965.626,746,00 atau 21,32% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Bunga pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp229.704.491.741,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Bunga disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.1.c.

**5.5.1.2.d Pembayaran Subsidi**

Pembayaran Subsidi merupakan pembayaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Arus kas keluar untuk Pembayaran Subsidi pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp5.875.837.590.937,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.d. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp336.184.309.403,00 atau 6,07% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Subsidi pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp5.539.653.281.534,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Subsidi disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.d.

**5.5.1.2.e Pembayaran Hibah**

Pembayaran Hibah merupakan jumlah yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Hibah pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp2.472.491.761.571,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp362.990.353.356,00 atau 12,80% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Hibah pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.835.482.114.927,00.

**5.5.1.2.f Pembayaran Bantuan Sosial**

Pembayaran Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga pada periode yang berakhir 31 Desember 2024. Arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan Sosial pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp3.496.629.048.637,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp867.012.428.031,00 atau 19,87% jika dibandingkan dengan arus kas keluar

untuk Pembayaran Bantuan Sosial pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp4.363.641.476.668,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Bantuan Sosial disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.1.f.

**5.5.1.2.g Pembayaran Bantuan Keuangan**

Pembayaran Bantuan Keuangan menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan keuangan atau sejenisnya. Arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan Keuangan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp383.997.067.520,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.4. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp27.550.587.020,00 atau 7,73% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan keuangan pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp356.446.480.500,00.

### 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang. Selama periode Tahun 2024 terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp31.159.943.492,00 dan terdapat arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp13.615.376.015.710,00 sehingga terdapat penurunan arus kas bersih sebesar Rp13.584.216.072.218,00. Sedangkan selama periode Tahun 2023 terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp7.058.929.784,00 dan terdapat arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp11.672.131.043.673,00 sehingga terdapat penurunan arus kas bersih sebesar Rp11.665.072.113.889,00.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk: Pelepasan Hak atas Tanah Brandgang, Penjualan Aset Tetap, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (2) Arus Kas Keluar: Perolehan Aset Tetap dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.126
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Arus Kas Masuk:** | | |
| a. | Pelepasan Hak Atas Tanah *Brandgang* | 3.370.200.000 | 3.145.400.000 |
| b. | Penjualan Aset Tetap: | 27.717.897.192 | 3.722.940.118 |
| c. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 71.846.300 | 190.589.666 |
| | **Jumlah Arus Kas Masuk (I)** | **31.159.943.492** | **7.058.929.784** |

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **2** | **Arus Kas Keluar:** | | |
| a. | Perolehan Aset Tetap: | 11.004.785.255.543 | 8.857.260.068.298 |
| b. | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 2.610.590.760.167 | 2.814.870.975.375 |
| | **Jumlah Arus Kas Keluar (II)** | **13.615.376.015.710** | **11.672.131.043.673** |
| **Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (I- II)** | | **(13.584.216.072.218)** | **(11.665.072.113.889)** |

**5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi**

Arus Kas Masuk berasal dari Penjualan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga dan adanya Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen.

**5.5.2.1.a Pelepasan Hak atas Tanah *Brandgang***

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 terdapat arus kas masuk dari pelepasan hak atas tanah *brandgang* sebesar Rp3.370.200.000,00 pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Arus kas masuk ini mengalami penurunan sebesar Rp224.800.000,00 atau 7,15% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari pelepasan hak atas tanah *brandgang* untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp3.145.400.000,00.

**5.5.2.1.b Penjualan Aset Tetap**

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas masuk dari penjualan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp27.717.897.192,00. Arus kas masuk ini mengalami kenaikan sebesar Rp23.994.957.074,00 atau 644,52% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari penjualan Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp3.722.940.118,00.

**5.5.2.1.c Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Kembali Penerimaan Investasi Non Permanen sebesar Rp71.846.300,00. Arus kas masuk ini mengalami penurunan sebesar Rp118.743.366,00 atau 62,30% dibandingkan dengan arus kas masuk dari penerimaan kembali Investasi Non Permanen untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp190.589.666,00.

**5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi**

Arus Kas Keluar berasal dari Perolehan Aset Tetap dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

**5.5.2.2.a Perolehan Aset Tetap**

Perolehan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk membiayai belanja aktivitas fisik yang bersifat menambah Aset Tetap dan akan menambah Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

memperoleh Aset Tetap yang mengakibatkan adanya arus kas keluar sebesar Rp11.004.785.255.543,00. Arus kas atas perolehan Aset Tetap pemerintah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.147.525.187.245,00 atau 24,25% dibandingkan dengan perolehan Aset Tetap pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp8.857.260.068.298,00.

**5.5.2.2.b Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Jaya, Perumda Dharma Jaya, PT Jakarta Propertindo, dan PT Jakarta Tourisindo sebesar Rp2.814.870.975.375,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.610.590.760.167,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1) | PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung | 225,000,000,000 |
| 2) | PT Jakarta Propertindo | 2,183,400,000,000 |
| 3) | PT Bank DKI Jakarta | 2,190,760,167 |
| 4) | PT Penjamin Kredit Daerah | 200.000.000.000 |
| | **Jumlah** | **2.610.590.760.167** |

### 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang. Selama Tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Sedangkan selama Tahun 2024 dan 2023 terdapat arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp938.693.208.121,00 dan Rp1.057.547.795.088.

Rincian Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.126
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Arus Kas Masuk:** | | |
| | Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan | 0 | 0 |
| | **Jumlah Arus Kas Masuk (I)** | **0** | **0** |
| **2** | **Arus Kas Keluar:** | | |

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat | 938.693.208.121 | 1.057.547.795.088 |
| | **Jumlah Arus Kas Keluar (II)** | **938.693.208.121** | **1.057.547.795.088** |
| **Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (I-II)** | | **(938.693.208.121)** | **(1.057.547.795.088)** |

#### 5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

#### 5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat Arus kas keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat sebesar Rp938.693.208.121,00. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran Utang Pokok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang kepada Pemerintah Pusat. Sementara itu Pembayaran Utang Pokok Pinjaman untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.057.547.795.088,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp118.854.586.967,00 atau 11,24%.

### 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening umum Negara/daerah. Selama Tahun 2024 terdapat arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp4.414.125.028.711,00 dan terdapat arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp4.440.393.638.543,00 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar minus Rp26.268.609.832,00. Sedangkan selama Tahun 2023 terdapat arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp3.804.167.278.024,00 dan terdapat arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp3.790.246.749.756,00 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp13.920.528.268,00.

Rincian Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.127
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Arus Kas Masuk:** | | |
| a. | Reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Kas Lainnya (Bansos) | 20.617.619.270 | 0 |
| b. | Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga | 21.512.667 | 1 |
| c. | Reklasifikasi Kas dibatasi penggunaannya ke Kas di Bendahara Sekolah Lainnya | 958.997.783 | 0 |
| d. | Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama | 961.411.902 | 1.684.920.147 |
| e. | Penerimaan Deposit Pasien – BLUD | 5.246.548.583 | 6.759.297.420 |
| f. | Penerimaan Deposit Jasa BLUD | 1.723.693.572 | 1.487.097.500 |
| g. | Penerimaan Uang Titipan | 67.290.000 | 1.701.917.859 |
| h. | Penerimaan Kas Lainnya | 235.238.706 | 13.543.921.396 |
| i. | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 4.384.292.716.228 | 3.778.990.123.701 |
| | **Jumlah Arus Kas Masuk (I)** | **4.414.125.028.711** | **3.804.167.278.024** |
| 2 | **Arus Kas Keluar:** | | |
| a. | Penyetoran Kas BOSP ke RKUN | 11.430.723.378 | 0 |
| b. | Reklasifikasi Kas Lainnya ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya | 34.266.759.372 | 0 |
| c. | Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama | 321.367.029 | 448.402.500 |
| d. | Penyetoran Asuransi pada Kas Bendahara Penerimaan | 1.151.500 | 0 |
| e. | Pengembalian Uang Titipan BLUD | 141.203.661 | 1.743.395.823 |
| f. | Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga | 318.313.427 | 22.001.380 |
| g. | Reklasifikasi ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya | 3.869.544.020 | 0 |
| h. | Pengeluaran Deposit Pasien – BLUD | 5.056.280.592 | 6.978.631.689 |
| I. | Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD | 1.659.921.472 | 1.412.672.500 |
| j. | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 4.383.328.374.092 | 3.779.641.645.864 |
| | **Jumlah Arus Kas Keluar (II)** | **4.440.393.638.543** | **3.790.246.749.756** |
| **Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (I-II)** | | **(26.268.609.832)** | **13.920.528.268** |

**5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris**

**5.5.4.1.a Reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Kas Lainnya (Bansos)**

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas masuk dari Reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Kas Lainnya (Bansos) sebesar Rp20.617.619.270,00 sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 tidak terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris atas Reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Kas Lainnya (Bansos).

**5.5.4.1.b Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Pembayaran Pihak Ketiga**

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat penerimaan kas atas Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Pembayaran Pihak Ketiga

sebesar Rp21.512.667,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat penerimaan kas atas aktivitas arus kas masuk tersebut sebesar Rp1,00.

**5.5.4.1.c Reklasifikasi Kas dibatasi penggunaannya ke Kas di Bendahara Sekolah Lainnya**

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas masuk dari aktivitas operasi atas Reklasifikasi Kas dibatasi Penggunaannya ke Kas di Bendahara Sekolah Lainnya sebesar Rp958.997.783,00.

**5.5.4.1.d Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama**

Selama Tahun 2024 terdapat arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp961.411.902,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas masuk dari reklasifikasi ke uang jaminan kerja sama sebesar Rp1.684.920.147,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp723.508.245,00 atau 42,94%.

**5.5.4.1.e Penerimaan Deposit Pasien – BLUD**

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Pasien – BLUD sebesar Rp5.246.548.583,00 yang merupakan penerimaan uang muka pasien selama Tahun 2024, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 arus kas masuk Penerimaan Deposit Pasien – BLUD adalah sebesar Rp6.759.297.420,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.512.748.837,00 atau 22,38%.

**5.5.4.1.f Penerimaan Deposit Jasa – BLUD**

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Jasa BLUD sebesar Rp1.723.693.572,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Jasa BLUD adalah sebesar Rp1.487.097.500,00. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp236.596.072,00 atau 15,91%.

**5.5.4.1.g Penerimaan Uang Titipan**

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 arus kas masuk dari Penerimaan Uang Titipan sebesar Rp67.290.000,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 arus kas masuk dari Penerimaan Uang Titipan adalah sebesar Rp1.701.917.859,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.634.627.859,00 atau 96,05%.

**5.5.4.1.h Penerimaan Kas Lainnya**

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat Arus Kas Masuk atas Penerimaan Kas Lainnya sebesar Rp235.238.706,00 yaitu merupakan kas yang akan dikembalikan ke Kas Daerah. Sementara itu, pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Kas Lainnya sebesar

Rp13.543.921.396,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp13.308.682.690,00 atau 98,26%.

**5.5.4.1.i Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp4.384.292.716.228,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan potongan pajak dan potongan-potongan lain. Sementara itu, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp3.778.990.123.701,00.

Tabel 5.128
Penerimaan Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Per 31 Desember 2024

| No. | Uraian | Kas Di Kas Daerah - Potongan PFK (Rp) | Kas Di Bendahara Pengeluaran - Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor (Rp) | Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan yang Belum Disetor (Rp) | Kas BLUD - Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3+4+5+6 |
| | **Penerimaan PFK** | | | | | |
| 1 | PPh Pasal 21 | 1.691.693.660.974 | 9.415.483.489 | 1.615.002.149 | 82.318.171.871 | 1.785.042.318.483 |
| 2 | PPh Pasal 22 | 57.012.559.747 | 7.242.720.801 | 141.275.702 | 16.178.155.581 | 80.574.711.831 |
| 3 | PPh Pasal 23 | 43.963.304.238 | 13.917.164.026 | 270.966.542 | 6.504.605.719 | 64.656.040.525 |
| 4 | PPh Pasal 4 (2) | 165.371.810.835 | 400.683.950 | 16.641.499 | 3.235.522.621 | 169.024.658.905 |
| 5 | PPN | 1.358.599.243.708 | 20.824.094.751 | 8.184.628.240 | 164.460.478.231 | 1.552.068.444.930 |
| 6 | PPh Pasal 15 | 0 | 674.270 | 0 | 0 | 674.270 |
| 7 | PPh Pasal 26 | 0 | 0 | 0 | 96.613 | 96.613 |
| 8 | BPJS Kesehatan | 395.514.393.018 | 0 | 0 | 52.128.907.488 | 447.643.300.506 |
| 9 | BPJS Ketenagakerjaan | | 0 | 0 | 65.359.127.050 | 65.359.127.050 |
| 10 | Dana Pensiun | 116.786.037.254 | 0 | 0 | 0 | 116.786.037.254 |
| 11 | Tabungan Hari Tua | 102.705.161.335 | 0 | 0 | 0 | 102.705.161.335 |
| 12 | Taperum | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 13 | Pot Non Pajak Lainnya | 0 | 0 | 0 | 432.069.526 | 432.069.526 |
| | **Jumlah** | **3.931.646.246.109** | **51.800.821.287** | **10.228.514.132** | **390.617.134.700** | **4.384.292.716.228** |

**5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris**

**5.5.4.2.a Penyetoran Kas BOSP ke RKUN**

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar untuk aktivitas transitoris atas penyetoran kas BOSP ke RKUN sebesar Rp11.430.723.378,00 yang dikarenakan terdapat penerima BOSP yang telah tutup/tidak bersedia menerima dana/satuan pendidikan dikelola oleh kementerian atau lembaga lain sehingga diharuskan untuk disetorkan ke RKUN melalui RKUD. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 tidak terdapat arus kas untuk aktivitas transitoris tersebut.

**5.5.4.2.b Reklasifikasi Kas Lainnya ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya**

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar untuk aktivitas transitoris atas Reklasifikasi Kas Lainnya ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp34.266.759.372,00. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 tidak terdapat arus kas untuk aktivitas transitoris tersebut.

**5.5.4.2.c Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama**

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar untuk Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama sebesar Rp321.367.029,00. Sementara itu pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas keluar untuk Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama sebesar Rp448.402.500,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp127.035.471,00 atau 28,33%

**5.5.4.2.d Penyetoran Asuransi pada Kas Bendahara Penerimaan**

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar untuk Penyetoran Asuransi pada Kas Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.151.500,00 sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 tidak terdapat arus kas keluar untuk aktivitas tersebut.

**5.5.4.2.e Pengembalian Uang Titipan BLUD**

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar untuk Pengembalian Uang Titipan BLUD sebesar Rp141.203.661,00 sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas keluar untuk aktivitas tersebut sebesar Rp1.743.395.823,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.602.192.162,00 atau 91,90%.

**5.5.4.2.f Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga**

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 arus kas keluar atas Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp318.313.427,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas keluar atas Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga adalah sebesar Rp22.001.380,00. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp296.312.047,00 atau 1346,79%.

**5.5.4.2.g Reklasifikasi ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya**

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar atas Reklasifikasi ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp3.869.544.020,00. Sedangkan pada periode 31 Desember 2023 tidak terdapat arus kas keluar atas Reklasifikasi ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya. ‘

### 5.5.4.2.h Pengeluaran Deposit Pasien – BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar atas Pengeluaran Deposit Pasien BLUD sebesar Rp5.056.280.592,00 yang merupakan pengembalian uang muka pasien yang telah diterima selama Tahun 2023, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat Pengembalian Deposit Pasien – BLUD sebesar Rp6.978.631.689,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.922.351.097,00 atau 27,55%

### 5.5.4.2.i Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar dari Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp1.659.921.472,00. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas keluar dari Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp1.412.672.500,00. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp247.248.972,00 atau 17,50%.

### 5.5.4.2.j Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp4.383.328.374.092,00. Nilai tersebut merupakan pengeluaran atas potongan pajak dan potongan-potongan lain. Sedangkan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp3.779.641.645.864,00. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp603.686.728.228,00 atau 15,97% Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5.129
Pengeluaran Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Per 31 Desember 2024

| No. | Uraian | Kas Di Kas Daerah - Potongan PFK (Rp) | Kas Di Bendahara Pengeluaran - Potongan PFK Di SKPD Yang Belum Disetor (Rp) | Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan Yang Belum Disetor (Rp) | Kas BLUD - Potongan PFK Di BLUD Yang Belum Disetor (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3+4+5+6 |
| | **Penyetoran PFK** | | | | | |
| 1 | PPh Pasal 21 | 1.691.693.660.974 | 9.295.247.425 | 1.609.166.390 | 82.315.050.196 | 1.784.913.124.985 |
| 2 | PPh Pasal 22 | 57.012.559.747 | 7.242.720.801 | 140.469.495 | 16.102.225.486 | 80.497.975.529 |
| 3 | PPh Pasal 23 | 43.963.304.238 | 13.917.044.026 | 271.762.711 | 6.492.273.026 | 64.644.384.001 |
| 4 | PPh Pasal 4 (2) | 165.371.810.835 | 400.683.950 | 16.641.499 | 3.235.522.621 | 169.024.658.905 |
| 5 | PPN | 1.358.599.243.708 | 20.824.094.751 | 8.267.262.508 | 163.734.113.668 | 1.551.424.714.635 |
| 6 | PPh Pasal 15 | 0 | 674.270 | 0 | 0 | 674.270 |
| 7 | PPh Pasal 26 | 0 | 0 | 0 | 96.613 | 96.613 |
| 8 | BPJS Kesehatan | 395.514.393.018 | 0 | 0 | 52.126.039.809 | 447.640.432.827 |

| No. | Uraian | Kas Di Kas Daerah - Potongan PFK (Rp) | Kas Di Bendahara Pengeluaran - Potongan PFK Di SKPD Yang Belum Disetor (Rp) | Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan Yang Belum Disetor (Rp) | Kas BLUD - Potongan PFK Di BLUD Yang Belum Disetor (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3+4+5+6 |
| 9 | BPJS Ketenagakerjaan | 0 | 0 | 0 | 65.382.074.075 | 65.382.074.075 |
| 10 | Dana Pensiun | 116.786.037.254 | 0 | 0 | 0 | 116.786.037.254 |
| 11 | Tabungan Hari Tua | 102.705.161.335 | 0 | 0 | 0 | 102.705.161.335 |
| 12 | Taperum | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 13 | Pot Non Pajak Lainnya | 0 | 0 | 0 | 308.964.663 | 308.964.663 |
| | **Jumlah** | **3.931.646.246.109** | **51.680.465.223** | **10.305.302.603** | **389.696.360.157** | **4.383.328.374.092** |

### 5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas

Berdasarkan perhitungan arus kas bersih pada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris, selisih kurs dan koreksi, maka terdapat penurunan kas bersih sebesar Rp2.123.408.172.478,00 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024. Dengan total saldo awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas dan Setara Kas BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah, dan Kas Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.562.186.965.985,00, maka saldo akhir total Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas dan Setara Kas BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah, dan Kas Lainnya menjadi sebesar Rp4.438.778.793.507,00.

## 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi ekuitas, dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 berasal dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya selama periode Tahun 2024. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 adalah sebesar Rp727.950.219.245.598,00. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 terdapat pada tabel berikut:

Tabel 5.130
Rinci Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2024

| No | Keterangan | Tahun 2024 | Tahun 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekuitas Awal | 698.072.284.621.375 | 665.549.886.851.294 |
| 2 | Surplus/Defisit – LO | 30.653.632.411.109 | 35.264.777.802.049 |
| 3 | Koreksi Ekuitas | (775.697.786.886) | (2.742.380.031.968) |
| 4 | Ekuitas Akhir | 727.950.219.245.598 | 698.072.284.621.375 |

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**5.6.1 Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah Rp698.072.284.621.375,00.

**5.6.2 Surplus/Defisit Laporan Operasional**

Surplus/Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp30.653.632.411.109,00 yang dijelaskan pada CaLK 5.4.4 Surplus-LO.

**5.6.3 Koreksi Ekuitas**

Koreksi Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 adalah sebesar (Rp775.697.786.886,00), yang terdiri dari:

**5.6.3.a Koreksi Penyajian Piutang**

Koreksi Ekuitas atas Penyajian Piutang adalah sebesar Rp100.775.674.212,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No | Jenis Koreksi | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Koreksi Kurang Catat Piutang | 104.113.044.342 |
| 2 | Koreksi Lebih Catat Piutang | (2.736.324.820) |
| 3 | Koreksi Beban Dibayar di Muka atas Pekerjaan Lewat Tahun | (600.801.944) |
| 4 | Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang Obat | (243.366) |
| | **Jumlah** | **100.775.674.212** |

1) Koreksi Kurang Catat Piutang sebesar Rp104.113.044.342,00 di antaranya terdapat pada:
   a) Dinas Kesehatan sebesar Rp92.952.928.159,00 merupakan koreksi atas piutang BPJS yang disebabkan Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) Piutang BPJS atas pelayanan sebelum Tahun 2024 baru dicatat pada Tahun 2024 yang di antaranya terdapat pada RSUD Tarakan sebesar Rp68.483.670.704,00, RSUD Budhi Asih sebesar Rp15.314.340.513,00, dan RSUD Koja sebesar Rp2.650.351.361,00; dan
   b) Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung sebesar Rp8.782.868.770,00 atas piutang pemanfaatan barang milik daerah dan denda keterlambatan pelaksanaan pembangunan.
   c) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp835.886.410,00 yang terdiri dari koreksi kurang catat Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2) Koreksi Lebih Catat Piutang sebesar (Rp2.736.324.820,00), di antaranya terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp2.040.172.748,00) merupakan koreksi pengurangan atas piutang BPJS yang disebabkan terdapat koreksi

BAHV atas pelayanan sebelum Tahun 2024 yang baru dicatat pada Tahun 2024 yang di antaranya terdapat pada RSKD Duren Sawit sebesar (Rp713.619.000,00), RSUD Koja sebesar (Rp582.902.819,00), dan RSUD Tarakan sebesar (Rp317.573.700,00).

3) Koreksi Beban Dibayar di Muka atas Pekerjaan Lewat Tahun sebesar (Rp600.801.944,00); dan

4) Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang Obat sebesar (Rp243.366,00).

**5.6.3.b Koreksi Penyajian Penyisihan Piutang**

Koreksi Ekuitas atas Penyajian Penyisihan Piutang adalah sebesar Rp14.868.906.540,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No | Jenis Koreksi | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang | 65.246.564 |
| 2 | Penyisihan atas Piutang yang terbayar/Pembatalan Penyisihan Piutang | 25.505.031.337 |
| 3 | Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang | (10.701.371.361) |
| | **Jumlah** | **14.868.906.540** |

1) Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang sebesar Rp65.246.564,00 di antaranya terdapat pada SKPD berikut:
   a) Dinas Kesehatan sebesar Rp46.191.668 merupakan dampak dari penyesuaian piutang yang di antaranya terdapat pada RSUD Budhi Asih sebesar Rp39.461.641,00, RSKD Duren Sawit sebesar Rp3.568.095,00, dan RSUD Tarakan sebesar Rp1.587.869,00; dan
   b) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp12.478.600,00 yang merupakan koreksi lebih catat Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha; dan

2) Penyisihan atas Piutang yang Terbayar/Pembatalan Penyisihan Piutang sebesar Rp25.505.031.337,00 di antaranya terdapat pada SKPD berikut:
   a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp23.571.482.429,00 yaitu atas Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB yang telah dibayar dan pembatalan penyisihan piutang denda retribusi; dan
   b) Unit Pengelola Jakarta *Asset Management Center* sebesar Rp1.034.573.990,00 yaitu koreksi lebih catat atas Penyisihan Piutang yang terbayar/pembatalan Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD dan Piutang Pendapatan Denda.

3) Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang sebesar (Rp10.701.371.361,00) di antaranya terdapat pada SKPD berikut:
   a) Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebesar (Rp8.782.868.770,00) yang merupakan kurang penyisihan atas

pemanfaatan barang milik daerah dan denda keterlambatan pelaksanaan pembangunan; dan

b) Dinas Kesehatan sebesar (Rp1.225.939.279,00) yang di antaranya terdapat pada RSUD Budhi Asih sebesar (Rp864.693.060,00) dan RSUD Tarakan sebesar (Rp342.418.354,00).

**5.6.3.c Koreksi Penyajian Persediaan**

Koreksi Ekuitas pada Penyajian Persediaan yaitu sebesar Rp749.286.737,00 yang di antaranya terdapat pada SKPD berikut:

1) Koreksi Kurang Catat Persediaan Awal sebesar Rp1.333.748.153,00 yang di antaranya terdapat pada:
   a) Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat sebesar Rp474.000.000,00;
   b) RSUD Kramat Jati sebesar Rp349.485.732,00; dan
   c) Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian sebesar Rp84.959.406,00.
2) Lebih Catat Persediaan Awal sebesar (Rp584.461.416,00) yang di antaranya terdapat pada:
   a) Puskesmas Kepulauan Seribu Utara sebesar Rp537.319.253,00;
   b) Dinas Pendidikan sebesar Rp37.993.881,00; dan
   c) Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian sebesar Rp9.148.282,00.

**5.6.3.d Koreksi Penyajian investasi**

Koreksi Ekuitas Penyajian Investasi yaitu sebesar Rp71.846.300,00 yang merupakan koreksi atas penyajian Investasi Non Permanen terkait pembatalan atas penyisihan Piutang Dana Bergulir yang telah terbayar di Tahun 2024.

**5.6.3.e Koreksi Penyajian Saldo Awal Aset Tetap dan Aset Lainnya**

Koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar (Rp1.257.534.477.431,00) dengan rincian sebagai berikut.

| No | Jenis Koreksi | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Kurang Catat Aset Tetap dan Lainnya | 811.962.524.712 |
| 2 | Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap | 56.566.321 |
| 3 | Lebih Catat Aset Tetap dan Lainnya | (2.069.551.084.864) |
| 4 | Koreksi Belanja Modal Sebelum Tahun 2024 atas Temuan | (2.483.600) |
| | **Jumlah** | **(1.257.534.477.431,00)** |

1) Kurang catat Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp811.962.524.712,00 merupakan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang tahun perolehannya sebelum Tahun 2024 namun baru dilakukan pencatatan pada Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada CaLK bagian Aset Tetap dan aset lainnya. Aset-aset tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

| Nama Akun | CaLK | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| Tanah | 5.3.1.4.1.6) | 702.140.847.000 |
| Peralatan dan Mesin | 5.3.1.4.2.8) | 111.151.114 |

| Nama Akun | CaLK | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| Gedung dan Bangunan | 5.3.1.4.3.10) | 98.825.294.023 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 5.3.1.4.4.8) | 9.501.980.434 |
| Aset Tidak Berwujud | 5.3.1.5.3.3) | 961.220.920 |
| Aset Tetap - Rusak Berat | 5.3.1.5.4.1.2) | 422.031.221 |
| **Jumlah** | | **811.962.524.712** |

2) Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap sebesar Rp56.566.321,00 merupakan koreksi yang sebelumnya berada di Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap yang terdapat pada Aset Tetap – Gedung dan Bangunan di Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat.

3) Lebih catat saldo awal Aset Tetap dan Aset Lain-lain sebesar (Rp2.069.551.084.864,00) merupakan kelebihan pencatatan aset yang disebabkan karena aset tercatat ganda, penghapusan yang SK Penghapusan diterbitkan tahun sebelumnya, dan koreksi kelebihan nilai aset sebagaimana dijelaskan dalam CaLK bagian Aset Tetap dan Aset Lain-lain. Koreksi lebih catat Aset Tetap dan Aset Lain-lain dapat dirinci sebagai berikut.

| Nama Akun | CaLK | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| Tanah | 5.5.1.4.1.b.4) | (1.327.427.690.689) |
| Peralatan dan Mesin | 5.5.1.4.2.b.6) | (94.627.290) |
| Gedung dan Bangunan | 5.5.1.4.3.b.7) | (348.700.830.200) |
| Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.5.1.4.4.b.5) | (32.551.474.060) |
| Aset Tetap Lainnya | 5.3.1.4.5.b.4) | (49.868.625) |
| Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) | 5.3.1.5.2.4.b.2) | (16.985.600.000) |
| Aset Tetap - Fasos Fasum | 5.3.1.5.4.4 | (297.370.369.000) |
| Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) | 5.3.1.5.4.6 | (46.370.625.000) |
| **Jumlah** | | **(2.069.551.084.864)** |

4) Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2024 atas Temuan sebesar (Rp2.483.600,00) merupakan pengurangan nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang diperoleh sebelum Tahun 2024 di Kelurahan Pulau Harapan Kabupaten Kepulauan Seribu.

### 5.6.3.f Koreksi Penyajian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya

Koreksi Penyajian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar (Rp50.102.248.068,00) dapat dirinci sebagai berikut.

| No | Jenis Koreksi | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi | 628.082.419.513 |
| 2 | Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya, Denda | 496.720 |
| 3 | Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel | 849.505 |
| 4 | Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi | (678.186.013.806) |
| | **Jumlah** | **(50.102.248.068)** |

1) Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Rp628.082.419.513,00 merupakan koreksi lebih catat akumulasi penyusutan dengan rincian sebagai berikut.

| Nama Akun | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 4.532.059.893 |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 474.111.247.031 |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 97.464.203.605 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 99.228.375 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate*/BTO) | 8.884.480.002 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan | 1.195.812.115 |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya | 24.347.612.868 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang | 1.984.714.537 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum | 15.463.061.062 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 24 |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan Bangunan | 1 |
| **Jumlah** | **628.082.419.513** |

2) Koreksi lebih catat atas Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya, Denda sebesar Rp496.720,00 merupakan Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya, Denda atas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Kelurahan Pulau Harapan Kabupaten Kepulauan Seribu.
3) Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel Rp849.505,00 merupakan koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
4) Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi (Rp678.186.013.806,00) merupakan koreksi kurang catat akumulasi penyusutan dengan rincian sebagai berikut.

| Nama Akun | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (7.208.912.319) |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (421.244.629.174) |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | (99.291.354.423) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | (276.767.225) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan | (49) |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya | (144.183.138) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang | (44.573.846.955) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum | (9) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) | (214) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah | (104.738.155.310) |

| Nama Akun | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi | (708.164.990) |
| **Jumlah** | **(678.186.013.806)** |

### 5.6.3.g Koreksi Penyajian Kewajiban

Koreksi Ekuitas Penyajian Kewajiban sebesar Rp406.979.281.332,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No | Nama Akun | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Utang Belanja Modal | 519.860.785 |
| 2 | Utang Belanja Pemeliharaan | 445.940.400 |
| 3 | Utang Belanja Barang Jasa | 21.677.562 |
| 4 | Utang Belanja Subsidi | 415.922.806.462 |
| 5 | Utang Barang Jasa BLUD | (222.940.327) |
| 6 | Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima di Muka | (9.708.063.550) |
| | **Jumlah** | **406.979.281.332** |

1) Koreksi Penyajian Kewajiban atas Utang Belanja Modal sebesar Rp519.860.785,00 di antaranya terdapat pada:
   a) Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp413.959.500,00 yang merupakan koreksi lebih catat atas utang belanja modal Gedung dan Bangunan; dan
   b) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp105.847.280,00 yang merupakan utang belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2) Koreksi Penyajian Kewajiban atas Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp445.940.400,00 yang terdapat pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Timur;
3) Koreksi Penyajian Kewajiban atas Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp21.677.562,00 yang terdapat pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Timur;
4) Koreksi Penyajian Kewajiban atas Utang Subsidi sebesar Rp415.922.806.462,00 yang terdapat pada Dinas Perhubungan;
5) Koreksi Ekuitas atas Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar (Rp222.940.327,00); dan
6) Koreksi atas kurang catat pendapatan diterima di muka sebesar (Rp9.708.063.550,00) merupakan koreksi atas retribusi penyewaan tanah dan bangunan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

### 5.6.3.h Koreksi Penyesuaian Lainnya

Koreksi Ekuitas atas Penyesuaian Lainnya Tahun 2024 terdiri dari:

1) Hasil Perkembangbiakan Hewan/Tanaman sebesar Rp8.375.908.492,00 yang terdapat pada Pusat Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil

Perikanan sebesar Rp7.462.280.900,00 dan Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan sebesar Rp913.627.592,00;

2) Koreksi Uang Titipan Kas BLUD sebesar (Rp405.000,00) yang terdapat pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta; dan

3) Penerimaan Pengembalian Bansos sebelum Tahun 2024 sebesar Rp118.440.000,00

### 5.6.4 Ekuitas Akhir

Berdasarkan perhitungan atas perubahan nilai ekuitas akhir yang diperoleh dari ekuitas awal, surplus laporan operasional, dan koreksi ekuitas. Maka nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp727.950.219.245.598,00.

# BAB VI

## PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

# BAB VI

# CATATAN PENTING LAINNYA

## 6.1 Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom tingkat provinsi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas yaitu dengan Laut Jawa di sebelah utara, dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten di sebelah barat, dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat di sebelah selatan, serta dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat di sebelah timur. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administratif yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Bentuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah otonomi yang diletakkan pada tingkat provinsi, adapun penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah sebesar 7.660 km², dengan luas daratan termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu sebesar 662 km² serta luas lautan sebesar 6.998 km². DKI Jakarta terletak pada posisi 50 19’ 12” Lintang Selatan - 60 23’ 54” Lintang Selatan dan 1060 22’ 42” Bujur Timur - 1060 58’ 18” Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki kewenangan khusus di bidang keuangan daerah, di antaranya terkait dengan kewenangan atas sumber dan tarif pendapatan tertentu, penerusan pinjaman dari lembaga asing, dan pengaturan kekhususan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan susunan organisasi perangkat daerah. Selain itu pada aspek pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan pengaturan kekhususan yang mendukung pencapaian Kota Global, di antaranya terkait dengan pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan investasi dan pengusulan pemanfaatan barang milik negara yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

## 6.2 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, yang telah diundangkan pada tanggal 10 Juni 2022 dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013, yang bertujuan sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan periode Tahun 2023-2026 lingkup Perangkat Daerah;
b. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di mana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
c. Mewujudkan implementasi kebijakan daerah dan nasional terkait penanganan dan pemulihan akibat pandemi COVID-19 di berbagai bidang pembangunan.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yaitu:

a. Visi

   Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 adalah “Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”.

   Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

   1) Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
   2) Jakarta yang aman bermakna terciptanya kehidupan yang tertib, tenteram, damai dan mampu mengatasi ancaman bencana alam, cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
   3) Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya ruang kehidupan yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia.

4) Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik di mana masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, damai dan memiliki keseimbangan lahir dan batin.
5) Jakarta yang produktif bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan memberikan hasil dan manfaat serta nilai tambah yang secara ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota.
6) Jakarta yang berkelanjutan bermakna terwujudnya proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan keutuhan, kelestarian, keasrian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan kehidupan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7) Jakarta yang berdaya saing global bermakna terbangunnya kemampuan dan kapasitas daerah yang mampu bersaing dalam peningkatan standar kehidupan warganya, pengembangan aktivitas ekonomi dan penyediaan pelayanan yang luas dan berkualitas.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
2) Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang andal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
3) Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera.
4) Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.
5) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
6) Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam

menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong-royong. Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan dalam 3 (tiga) strategi utama yaitu:

1) Keadilan dan keberpihakan;
2) Orientasi pada warga dan ruang interaksi;
3) Birokrasi efektif dan penguatan tata kelola.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 digambarkan dengan tahapan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dituangkan melalui kebijakan yaitu:

a. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana Program Pembangunan Daerah. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam Belanja Prioritas I yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan 23 Janji Kerja, Program pembangunan daerah yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya Pembangunan Jakarta, Panca Upaya Pembangunan Jakarta merupakan upaya pembangunan yang dijabarkan dalam lima bagian besar yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari dan Simpul Kemajuan.

b. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kriteria umum dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu menjadi perhatian antara lain:

1) Pemahaman standar pelayanan publik minimal di daerah;
2) Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah;
3) Keseimbangan anggaran, terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;

4) Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
5) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi masyarakat.

Dari kriteria umum tersebut, ditetapkan mengenai kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

   Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelompokan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi:

   a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
      Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.
   b) Dana Perimbangan, terdiri dari:
      Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
   c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

   Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi:

   a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
   b) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;
   c) Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.

2) Kebijakan Belanja Daerah

   Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelompokan belanja daerah terbagi menjadi:

   a) Belanja Daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari; Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah Dan Bantuan Sosial), Belanja Modal, Belanja Tak Terduga Dan Belanja Transfer;
   b) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari; urusan wajib dan urusan pilihan;
   c) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

   Arah kebijakan belanja daerah antara lain:

   a) Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah;

b) Menjalankan *participatory program* and *budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi;
c) Melakukan efisiensi belanja;
d) Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*),
e) Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD;
f) Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan dan UPT;
g) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

2) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

### 6.3 Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk mempercepat penanganan pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 pasal 15, Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah untuk melaksanakan Program PEN dalam bentuk Pemberian Pinjaman kepada BUMN, Pemberian Pinjaman kepada Lembaga, dan/atau Pinjaman PEN Daerah.

Realisasi Pinjaman PEN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 – 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.1

Realisasi Pinjaman PEN Tahun 2020 – 2022

| Uraian | SKPD/UKPD Pengguna | Nilai Pinjaman (Rp) | Penggunaan Dana PEN (Rp) | | | | Pengembalian (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TA 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4+5+6 | 8 = 3 - 7 |
| **PINJAMAN PEN DAERAH** | | | | | | | |
| Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir | Dinas Sumber Daya Air | 3.465.558.808.704 | 421.127.354.911 | 1.572.528.175.155 | 1.083.298.274.773 | 3.076.953.804.839 | 388.605.003.865 |
| Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Pelayanan Air Minum | Dinas Sumber Daya Air | 69.105.119.617 | 11.938.335.091 | 37.854.104.382 | 0 | 49.792.439.473 | 19.312.680.144 |
| Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah | Unit Pengelola Sampah Terpadu | 85.001.410.016 | 85.001.410.016 | 0 | 0 | 85.001.410.016 | 0 |
| Peningkatan Infrastruktur Transportasi | Dinas Bina Marga | 536.326.133.519 | 442.248.276.770 | 47.881.945.368 | 15.103.001.478 | 505.233.223.616 | 31.092.909.903 |
| Peningkatan Infrastruktur Pengendalian | UP Jakarta *Smart City* (Dinas | 86.295.605.056 | 0 | 85.652.860.380 | 0 | 85.652.860.380 | 642.744.676 |

| Uraian | SKPD/UKPD Pengguna | Nilai Pinjaman (Rp) | Penggunaan Dana PEN (Rp) | | | | Pengembalian (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TA 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4+5+6 | 8 = 3 - 7 |
| Banjir-Pengendalian Banjir Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi | Komunikasi, Informatika dan Statistik) | | | | | | |
| Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (Transformasi Digital) | UP Jakarta *Smart City* (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik) | 232.432.076.920 | 0 | 232.432.076.920 | 0 | 232.432.076.920 | 0 |
| **Jumlah Pinjaman PEN Daerah (I)** | | **4.474.719.153.832** | **960.315.376.788** | **1.976.349.162.205** | **1.098.401.276.251** | **4.035.065.815.244** | **439.653.338.588** |
| **PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PEN** | | | | | | | |
| Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah | Dinas Lingkungan Hidup | 371.846.079.587 | 0 | 105.084.302.456 | 266.277.049.466 | 371.361.351.922 | 484.727.665 |
| Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan (Revitalisasi Taman Ismail Marzuki/TIM) | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PMD kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda)) | 1.443.121.000.000 | 200.000.000.000 | 1.243.121.000.000 | 0 | 1.443.121.000.000 | 0 |
| Peningkatan Infrastruktur Olahraga Proyek Jakarta International Stadium | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PMD kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda)) | 3.642.000.000.000 | 1.182.000.000.000 | 2.460.000.000.000 | 0 | 3.642.000.000.000 | 0 |
| **Jumlah Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN (II)** | | **5.456.967.079.587** | **1.382.000.000.000** | **3.808.205.302.456** | **266.277.049.466** | **5.456.482.351.922** | **484.727.665** |
| **Jumlah Pendanaan PEN (I + II)** | | **9.931.686.233.419** | **2.342.315.376.788** | **5.784.554.464.661** | **1.364.678.325.717** | **9.491.548.167.166** | **440.138.066.253** |

Sisa pinjaman PEN per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.333.675.168.603,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No | Nilai Penarikan Pinjaman | Nilai Pinjaman (Rp) | Pembayaran (Rp) | Sisa Pinjaman (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PEN Tahun 2020 | 2.664.083.583.739 | 1.102.540.061.675 | 1.561.543.522.064 |
| 2 | PEN Tahun 2021 | 3.192.635.570.093 | 1.004.728.416.497 | 2.187.907.153.596 |
| 3 | Dukungan PEN Tahun 2021 | 4.074.967.079.587 | 2.490.742.586.644 | 1.584.224.492.943 |
| | **Total** | **9.931.686.233.419** | **4.598.011.064.816** | **5.333.675.168.603** |

## 6.4 Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 104 BLUD yang berasal dari 12 SKPD Penggabung, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.2

Daftar Badan Layanan Umum Daerah dan SKPD Penggabungannya Tahun 2024

| No. | Nama SKPD Penggabung | Nama OPD | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Dinas Pendidikan | 1 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 13 Jakarta |

| No. | Nama SKPD Penggabung | Nama OPD | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| | | 2 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 20 Jakarta |
| | | 3 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 24 Jakarta |
| | | 4 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 26 Jakarta |
| | | 5 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta |
| | | 6 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 32 Jakarta |
| | | 7 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 33 Jakarta |
| | | 8 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 36 Jakarta |
| | | 9 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 37 Jakarta |
| | | 10 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 51 Jakarta |
| | | 11 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta |
| | | 12 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta |
| 2 | Dinas Kesehatan | 13 | Laboratorium Kesehatan Daerah |
| | | 14 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung - Jaktim |
| | | 15 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus |
| | | 16 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cengkareng - Jakbar |
| | | 17 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilandak - Jaksel |
| | | 18 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing - Jakut |
| | | 19 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung - Jaktim |
| | | 20 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciracas - Jaktim |
| | | 21 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit - Jaktim |
| | | 22 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Gambir - Jakpus |
| | | 23 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar |
| | | 24 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa - Jaksel |
| | | 25 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara - Jaktim |
| | | 26 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Johar Baru - Jakpus |
| | | 27 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kalideres - Jakbar |
| | | 28 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru - Jaksel |
| | | 29 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama - Jaksel |
| | | 30 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar |
| | | 31 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kelapa Gading - Jakut |
| | | 32 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemayoran - Jakpus |
| | | 33 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kembangan - Jakbar |
| | | 34 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Selatan - Kep. Seribu |
| | | 35 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Utara - Kep. Seribu |
| | | 36 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Koja - Jakut |
| | | 37 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati - Jaktim |
| | | 38 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Makassar - Jaktim |
| | | 39 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel |
| | | 40 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman - Jaktim |
| | | 41 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menteng - Jakpus |
| | | 42 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pademangan - Jakut |
| | | 43 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pal Merah - Jakbar |

| No. | Nama SKPD Penggabung | Nama OPD | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| | | 44 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran - Jaksel |
| | | 45 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel |
| | | 46 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim |
| | | 47 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Penjaringan - Jakut |
| | | 48 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel |
| | | 49 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pulo Gadung - Jaktim |
| | | 50 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sawah Besar - Jakpus |
| | | 51 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Senen - Jakpus |
| | | 52 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Setiabudi - Jaksel |
| | | 53 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Taman Sari - Jakbar |
| | | 54 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora - Jakbar |
| | | 55 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanah Abang - Jakpus |
| | | 56 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Priok - Jakut |
| | | 57 | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet - Jaksel |
| | | 58 | Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah |
| | | 59 | Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah |
| | | 60 | Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai |
| | | 61 | Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit |
| | | 62 | Rumah Sakit Umum Adhyaksa |
| | | 63 | Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih |
| | | 64 | Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih |
| | | 65 | Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng |
| | | 66 | Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing |
| | | 67 | Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung |
| | | 68 | Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas |
| | | 69 | Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa |
| | | 70 | Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang |
| | | 71 | Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru |
| | | 72 | Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres |
| | | 73 | Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru |
| | | 74 | Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama |
| | | 75 | Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran |
| | | 76 | Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan |
| | | 77 | Rumah Sakit Umum Daerah Koja |
| | | 78 | Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati |
| | | 79 | Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan |
| | | 80 | Rumah Sakit Umum Daerah Matraman |
| | | 81 | Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan |
| | | 82 | Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu |
| | | 83 | Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo |
| | | 84 | Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan |
| | | 85 | Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar |
| | | 86 | Rumah Sakit Umum Daerah Tamansari |
| | | 87 | Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang |

| No. | Nama SKPD Penggabung | Nama OPD | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| | | 88 | Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok |
| | | 89 | Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan |
| | | 90 | Rumah Sakit Umum Daerah Tebet |
| | | 91 | Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja |
| | | 92 | Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu |
| 3 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 93 | Unit Pengelola Dana Perumahan |
| 4 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 94 | Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan |
| 5 | Dinas Lingkungan Hidup | 95 | Unit Pengelola Sampah Terpadu |
| 6 | Dinas Perhubungan | 96 | Unit Pengelola Perparkiran |
| | | 97 | Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik |
| | | 98 | Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang |
| 7 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 99 | Unit Pengelola Jakarta Smart City |
| 8 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 100 | Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung |
| 9 | Dinas Pertamanan dan Hutan Kota | 101 | Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan |
| 10 | Dinas Kebudayaan | 102 | Unit Pengelola Taman Ismail Marzuki |
| 11 | Badan Pengelolaan Aset Daerah | 103 | Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center |
| 12 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 104 | Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik |

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Pada komponen Laporan Operasional BLUD Tahun 2024, total Pendapatan BLUD Tahun 2024 sebesar Rp8.288.957.392.809,00 yang terdiri dari Pendapatan Dana BLUD sebesar Rp3.917.058.450.967,00 dan Pendapatan Alokasi APBD sebesar Rp4.371.898.941.842,00. Beban BLUD Tahun 2024 sebesar Rp7.462.905.047.631,00, sehingga total keseluruhan BLUD terdapat Defisit sebesar Rp3.544.951.820.272,00. Pada komponen Neraca BLUD Tahun 2024, total Aset BLUD Tahun 2024 sebesar Rp17.990.612.967.635,00, total Kewajiban BLUD Tahun 2024 sebesar Rp406.316.002.476,00, dan total Ekuitas sebesar Rp17.584.296.965.159,00.

Rincian kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2024 disajikan pada lampiran 15 dan lampiran 16.

## 6.5 Potensi Piutang

Selain nilai Aset dan Piutang yang telah diuraikan pada BAB V, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi penerimaan aset sebagai pemenuhan kewajiban dari pihak ketiga, yaitu potensi penerimaan aset atas pemenuhan kewajiban yang bersumber dari penerbitan Surat Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan Potensi SIPPT/IPPT/IPPR yang Dikenakan Kewajiban RSM/S:

**a. Potensi Penerimaan Aset atas Pemenuhan Kewajiban yang bersumber dari SIPPT**

SIPPT diterbitkan sejak tahun 1971 yang diberikan kepada badan dan/atau perusahaan *real estate* dan/atau perusahaan properti dan/atau *developer* dan/atau yayasan dan/atau

perorangan untuk membangun perumahan, perkantoran, perdagangan dan/atau kegiatan fisik lainnya dan/atau permohonan hak atas tanah dalam wilayah DKI Jakarta.

Terdapat 3 kelompok jenis SIPPT terkait dengan pemenuhan kewajibannya:

1) SIPPT yang tidak mencantumkan secara jelas jenis dan luasan/besaran kewajiban penyerahan dan/atau penyediaan fasos fasum;
2) SIPPT yang mencantumkan jenis dan luasan/besaran kewajiban penyerahan dan/atau penyediaan fasos fasum berbentuk lahan, di antaranya berupa sub zona Marga Jalan (Mjl), Penyempurna Hijau Umum (Phu), Penyempurna Hijau Taman (Pht), Prasarana Jalan (Pj), dan lain-lain; dan
3) SIPPT yang hanya mencantumkan kewajiban untuk menyediakan Fasos Fasum.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Inspektorat, Badan Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu, dan Walikota di 5 Wilayah Kota Administrasi pada tanggal 26 Februari 2025 jumlah seluruh dokumen SIPPT yang terbit dari tahun 1971 sampai dengan 2024 adalah sebanyak 3.621 dokumen SIPPT/IPPT/IPPR yang meliputi SIPPT/IPPT/IPPR Baru, Pembaharuan, Pemecahan, Penyempurnaan, Perpanjangan, Revisi, Pengalihan, dan SK Penetapan Kewajiban dengan rincian sebagai berikut.

| Uraian | Jumlah SIPPT |
|---|---|
| **Data SIPPT yang terhitung pada Tahun 2023** | |
| Tahun 2023 | 3.618 |
| **Data SIPPT Tahun 2023 setelah Koreksi** | **3.618** |
| **Penambahan Baru SIPPT Tahun 2024** | |
| Dokumen SIPPT Tahun 2024 | 3 |
| **Total Penambahan Baru SIPPT Tahun 2024** | **3** |
| **Total SIPPT yang diterbitkan s.d Tahun 2024** | **3.621** |

Pada proses rekonsiliasi, dari keseluruhan dokumen SIPPT/IPPT/IPPR yang telah diinventarisasi, selanjutnya dilakukan pengelompokan data dengan tahapan sebagai berikut:

1) Pemutakhiran *database* SIPPT/IPPT/IPPR;
2) Pengelompokan dokumen SIPPT/IPPT/IPPR berbasis lokasi fisik lahan;
3) Pemilahan per lokasi fisik SIPPT/IPPT/IPPR yang memiliki kewajiban penyerahan lahan/tanah Fasos Fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
4) Penetapan SIPPT/IPPT/IPPR Efektif, yaitu SIPPT/IPPT/IPPR hasil pemilahan berbasis lokasi dan memiliki kewajiban penyerahan lahan/tanah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

SIPPT/IPPT/IPPR Efektif yang dimaksud di dalam Laporan Keuangan ini adalah lokasi efektif dari seluruh penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR baru maupun SIPPT/IPPT/IPPR turunannya yang meliputi SIPPT/IPPT/IPPR Pembaharuan, Pemecahan, Penyempurnaan, Perpanjangan, Revisi dan Pengalihan, dan merupakan lokasi efektif yang dalam penerbitannya telah mencantumkan dan mendefinisikan jenis dan luasan/besaran kewajiban menyerahkan dan menyediakan Fasos Fasum berbentuk lahan, misalnya lahan sub zona Marga Jalan (Mjl), Penyempurna Hijau Umum (Phu), Penyempurna Hijau Taman (Pht), dan lain-lain.

Di samping itu, SIPPT/IPPT/IPPR Efektif juga termasuk surat Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan yang diterbitkan dalam rangka penetapan kembali jenis dan/atau luasan kewajiban fasos Fasum SIPPT/IPPT/IPPR yang menjadi acuan pihak Walikota dalam melakukan penagihan kewajiban Fasos Fasum kepada para pemegang SIPPT/IPPT/IPPR.

Hasil pengelompokan 3621 dokumen SIPPT/IPPT/IPPR yang sudah terbit sampai dengan Tahun 2024, jumlah SIPPT/IPPT/IPPR yang terhitung Efektif adalah sebanyak 1.314 lokasi, dengan total luas kewajiban lahan Fasos Fasum yaitu seluas 26.923.090 $m^2$, dijabarkan dalam tabel rincian per wilayah kota administrasi / kabupaten administrasi sebagai berikut.

| No. | Wilayah | Dokumen SIPPT yang terbit 1971-2024 | SIPPT berbasis Lokasi Fisik | Pengelompokan SIPPT/IPPT/IPPR Efektif (1971-2024) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah Lokasi | Luas Lahan Kewajiban ($m^2$) |
| 1 | Jakarta Pusat | 493 | 375 | 126 | 360.723 |
| 2 | Jakarta Utara | 571 | 457 | 259 | 7.788.118 |
| 3 | Jakarta Barat | 716 | 545 | 293 | 9.114.498 |
| 4 | Jakarta Selatan | 1.163 | 809 | 380 | 2.644.845 |
| 5 | Jakarta Timur | 651 | 542 | 236 | 5.964.588 |
| 6 | Kepulauan Seribu | 27 | 26 | 20 | 1.050.318 |
| | **Jumlah** | **3.621** | **2.754** | **1.314** | **26.923.090** |

Apabila dibandingkan dengan jumlah SIPPT/IPPT/IPPR Efektif yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2023 sebanyak 1.312 lokasi dengan total luas kewajiban penyerahan lahan fasos fasum yaitu seluas 26.273.675 $m^2$ terdapat koreksi data sebagaimana pada tabel berikut.

| Uraian | Jumlah SIPPT Efektif | Luas Kewajiban ($m^2$) |
|---|---|---|
| **Koreksi Terhadap Data SIPPT yang terhitung pada Tahun 2023** | | |
| Tahun 2023 | 1.312 | 26.273.675 |
| **Mutasi Tambah** | | |
| SIPPT Tahun 1971 - 2024 yang baru tercatat efektif berdasarkan hasil rekonsiliasi SIPPT | 4 | 175.367 |
| Pembaharuan Data Luasan Kewajiban SIPPT Tahun 1971-2024 hasil rekonsiliasi | 0 | 529.968 |
| ***Subtotal Mutasi Tambah*** | **4** | **705.335** |
| **Mutasi Kurang** | | |
| Pembaharuan Data Luasan Kewajiban SIPPT Tahun 1971-2024 hasil rekonsiliasi | 0 | 46.083 |
| *Cleansing* Data SIPPT 1971-2024 dari lokasi efektif | 2 | 9.837 |
| ***Subtotal Mutasi Kurang*** | **2** | **55.920** |
| **Total SIPPT Tahun 2023 setelah Koreksi** | **1.314** | **26.923.090** |
| **Penambahan Baru SIPPT Tahun 2024** | | |
| SIPPT Tahun 2024 yang menambah SIPPT Efektif | 0 | 0 |
| **Total Penambahan Baru Tahun 2024** | **0** | **0** |
| **Total SIPPT Efektif dan Luas Kewajiban s/d 2024** | **1.314** | **26.923.090** |

Koreksi data SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dan Luas Kewajiban lahan Fasos Fasum Tahun 2024 terdiri dari:

1) Koreksi atas mutasi tambah SIPPT/IPPT/IPPR Efektif yaitu terdapat 4 SIPPT/IPPT/IPPR tercatat Efektif yang sebelumnya telah tercatat dalam master data SIPPT/IPPT/IPPR berbasis lokasi, namun berstatus Tidak Aktif (*cleansing data* pada kategori SIPPT yang kewajibannya tidak terdefinisi dengan jelas), dengan rincian sebagai berikut:
   a) 1 SIPPT karena telah ditetapkan jenis dan luasan kewajiban fasos fasumnya melalui surat Penetapan Kewajiban.

b) 3 SIPPT dilakukan pencatatan kewajiban fasos fasumnya atas kewajiban yang diserahterimakan pada Tahun 2024 sesuai dokumen BAST yang diterbitkan.

2) Koreksi atas mutasi kurang SIPPT/IPPT/IPPR atas 2 SIPPT yang masuk kategori cleansing data SIPPT Efektif karena penggabungan delineasi lahan perencanaan SIPPT dan peninjauan kembali rencana kota melalui surat Penetapan Kewajiban.
3) Koreksi atas mutasi kurang dan mutasi tambah luasan kewajiban fasos fasum, yang mengacu pada:
   a) Terdapat surat Penetapan Kewajiban atas penetapan kembali bentuk dan luasan kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR sebagaimana diterbitkan 29 surat Penetapan Kewajiban;
   b) Dokumen BAST yang diterbitkan Tahun 2024, atas identifikasi sebanyak 39 SIPPT melakukan serah terima kewajiban Fasos Fasum; dan
   c) Pemutakhiran data kewajiban Fasos Fasum pada beberapa SIPPT.
4) Terdapat penambahan 2 IPPR yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas IPPR yang telah diterbitkan sebelumnya sehingga berstatus Aktif Administratif (tidak diperhitungkan sebagai SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dalam Laporan Keuangan Tahun 2024).

Mempertimbangkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4580/1999 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D-Iv-8125/Ee/21/1975 tanggal 20 Desember 1975 tentang Penguasaan Perencanaan dan Peruntukan Penggunaan Tanah di Sepanjang Jalur-Jalur Jalan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta mempertimbangkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 209 Tahun 2016 tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang, maka telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pelaksanaan Rekonsiliasi yang diselenggarakan oleh Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada tanggal 26 Februari 2025 (surat undangan Nomor e-0064/KR.04.00 tanggal 21 Februari 2024) yang dihadiri oleh unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, unsur Inspektorat, unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah, unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan unsur Walikota di lima Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, bahwa akan dilakukan pembaruan potensi SIPPT/IPPT/IPPR terhadap perhitungan lokasi efektif.

Pembaharuan perhitungan SIPPT/IPPT/IPPR Efektif yang telah berbasis lokasi dilakukan sebagaimana tahapan berikut:

1) Mengecualikan data SIPPT yang luas lahannya kurang dari 5.000 m2;
2) Mengecualikan data SIPPT/IPPT/IPPR yang kepemilikan lahan dan/atau penyelenggaraan kegiatannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD;

3) Mengecualikan data dengan kategori SIPPT/IPPT/IPPR yang kewajiban fasos fasumnya tidak terdefinisi dengan jelas; dan
4) Memutakhirkan data SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dengan kategori sebagai berikut:
   a) Terdapat penetapan jenis dan luas kewajiban Fasos Fasum melalui surat Penetapan Kewajiban;
   b) Terdapat pencatatan kewajiban Fasos Fasum dari dokumen BAST terhadap SIPPT yang belum terdefinisi dengan jelas kewajibannya; dan
   c) Mengakomodasi IPPR yang diterbitkan oleh DPMPTSP pada Tahun 2024.

Pengelompokan pada angka 2 (dua) di atas tidak dilakukan terhadap SIPPT/IPPT/IPPR milik Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD yang telah menyerahkan lahan kewajiban fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2023.

Sampai dengan Tahun 2024, total BAST Kewajiban Fasos Fasum yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 571 lokasi SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dengan total perolehan luas lahan aset seluas 18.244.850 m2, dengan rincian sebagai berikut.

| No | Wilayah | SIPPT/IPPT/IPPR Yang Telah BAST Tahun 1971-2024 | |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah Lokasi | Luas Lahan ($m^2$) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Jakarta Pusat | 56 | 157.373 |
| 2 | Jakarta Utara | 126 | 5.419.917 |
| 3 | Jakarta Barat | 150 | 6.652.543 |
| 4 | Jakarta Selatan | 138 | 1.605.890 |
| 5 | Jakarta Timur | 96 | 4.201.874 |
| 6 | Kepulauan Seribu | 5 | 207.253 |
| | **Jumlah** | **571** | **18.244.850** |

Perbandingan antara data lokasi SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dengan data BAST Fasos Fasum yang terbit hingga Tahun 2024, diperoleh sisa kewajiban sebagai berikut.

| No. | Wilayah | SIPPT Efektif (1971-2023) | | BAST (1971-2023) | | Sisa Kewajiban SIPPT Efektif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Lokasi | Luas Lahan Kewajiban ($m^2$) | Jumlah Lokasi BAST | Luas Lahan ($m^2$) | Jumlah Lokasi | Luas Lahan ($m^2$) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8=3- 5** | **9=4-7** |
| 1 | Jakarta Pusat | 126 | 360.723 | 56 | 157.373 | 70 | 203.350 |
| 2 | Jakarta Utara | 259 | 7.788.118 | 126 | 5.419.917 | 133 | 2.368.201 |
| 3 | Jakarta Barat | 293 | 9.114.498 | 150 | 6.652.543 | 143 | 2.461.955 |
| 4 | Jakarta Selatan | 380 | 2.644.845 | 138 | 1.605.890 | 242 | 1.038.955 |
| 5 | Jakarta Timur | 236 | 5.964.588 | 96 | 4.201.874 | 140 | 1.762.714 |
| 6 | Kepulauan Seribu | 20 | 1.050.318 | 5 | 207.253 | 15 | 843.065 |
| | **Jumlah** | **1.314** | **26.923.090** | **571** | **18.244.850** | **743** | **8.678.240** |

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi penerimaan aset sebagai pemenuhan kewajiban dari pihak ketiga berupa konstruksi bangunan Fasos fasum yang saat ini masih memerlukan proses rekonsiliasi dengan SKPD terkait.

Dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban dari para pemegang SIPPT/IPPT/IPPR, sejak tahun 2009 sampai dengan 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dengan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) antara pihak pemegang SIPPT/IPPT/IPPR dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam dokumen PPK dituangkan bentuk dan luasan kewajiban yang harus diserahkan dan/atau disediakan, serta batas waktu penyelesaian masing-masing kewajiban fasos fasum. Namun demikian, baik dokumen SIPPT/IPPT/IPPR maupun PPK tidak menyebutkan nilai dari kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR, sehingga Fasos Fasum yang berpotensi menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat diukur dan diestimasi secara andal dalam satuan rupiah tertentu, dan sangat mungkin nilainya berbeda dengan nilai pada saat dilakukan serah terima kewajiban.

Atas kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR yang belum diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka kewajiban tersebut belum diakui dan dicatat sebagai Piutang pada neraca karena belum memenuhi kualifikasi pencatatan aset (belum ada nilai yang pasti). Nilai aset baru diketahui secara pasti pada saat ditandatanganinya dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai perhitungan nilai appraisal yang dicantumkan di BAST. Nilai tersebut kemudian digunakan sebagai nilai wajar atas potensi nilai pendapatan dari kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR.

Di samping itu, tingkat ke tertagihan atas pemenuhan kewajiban Fasos Fasum SIPPT/IPPT/IPPR mempunyai nilai ketidakpastian yang tinggi, antara lain disebabkan oleh:

1) Adanya penguasaan lahan SIPPT yang tidak tuntas;
2) Adanya pembaharuan SIPPT/IPPT/IPPR karena perubahan kepemilikan;
3) Adanya pembaharuan SIPPT/IPPT/IPPR karena habis masa berlaku;
4) Adanya perubahan kegiatan utama yang diselenggarakan di lokasi SIPPT/IPPT/IPPR, misalnya pada SIPPT/IPPT/IPPR awal kegiatan yang diselenggarakan adalah untuk hunian namun kemudian SIPPT diperbarui menjadi penyelenggaraan kegiatan bisnis/komersial;
5) Adanya fasos fasum yang dibangun tidak sesuai dengan penetapan kewajiban dalam SIPPT/IPPT/IPPR;
6) Rencana kota yang dinamis;
7) SIPPT/IPPT/IPPR belum dimanfaatkan sesuai tujuan penerbitannya (belum ada pembangunan di lokasi);
8) Pengembang pailit atau sulit ditemukan keberadaannya; dan
9) Belum adanya sanksi yang jelas atas keterlambatan penyelesaian kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan Aset Tetap – Fasos Fasum yang berasal dari pemenuhan kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya perbaikan penatausahaan Aset Tetap – Fasos Fasum melalui:

1) Kegiatan rekonsiliasi secara periodik atas pemenuhan kewajiban Fasos Fasum, dengan membandingkan data lokasi SIPPT/IPPT/IPPR dengan jumlah kewajiban yang sudah diserahkan pada lokasi tersebut;
2) Melakukan pengkajian dan penetapan kewajiban Fasos Fasum di antaranya terhadap SIPPT/IPPT/IPPR yang belum terdefinisi jelas jenis dan besaran/luasan kewajibannya;
3) Melakukan penagihan kepada pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang belum menyelesaikan kewajibannya;
4) Melakukan pemutakhiran basis data SIPPT/IPPT/IPPR, kewajiban Fasos Fasum, dan progres BAST penyerahan kewajiban Fasos Fasum; dan
5) Melakukan pengembangan sistem informasi terintegrasi mulai dari penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR sampai dengan pencatatan penerimaan Aset Tetap – Fasos Fasum.

**b. Potensi SIPPT/IPPT/IPPR yang Dikenakan Kewajiban RSM/S**

Selain nilai piutang di atas, terdapat potensi SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban membiayai dan membangun RSM/S. Pada tanggal 20 Maret 2025 telah dilakukan pembahasan bersama Perangkat Daerah terkait serta penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Jumlah SIPPT/IPPT/IPPR yang Dikenakan Kewajiban Membiayai dan Membangun Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S) sampai dengan 31 Desember 2024. Adapun hasil sementara proses rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| Jumlah potensi pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban RSM/S per 31 Desember 2023 berdasarkan CaLK LKPD Tahun Anggaran 2023 | | 425 |
| **A. Mutasi Tambah** | | |
| 1 | SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban membiayai dan membangun RSM/S, namun belum terakomodasi dalam potensi yang tercantum pada CaLK LKPD Tahun Anggaran 2024 | 324 |
| **Jumlah Mutasi Tambah** | | **324** |
| **Jumlah seluruh pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban RSM/S per 31 Desember 2024** | | **749** |
| **B. Mutasi Kurang** | | |
| 1 | SIPPT/IPPT/IPPR yang telah melaksanakan konversi kewajiban RSM/S melalui mekanisme penyetoran dana tunai sesuai SK Gubernur Nomor 1934 Tahun 2002 | 135 |
| 2 | SIPPT/IPPT/IPPR yang telah melaksanakan pembangunan Rumah Susun | 21 |
| 3 | SIPPT/IPPT/IPPR yang telah memperoleh pembebasan atau pengecualian kewajiban RSM/S | 23 |
| 4 | SIPPT/IPPT/IPPR yang penerbitannya guna penyertifikatan hak atas tanah | 24 |
| 5 | SIPPT/IPPT/IPPR yang sudah ditetapkan nilai konversinya namun belum menyelesaikan sehingga masih tercatat sebagai piutang | 3 |
| 6 | SIPPT/IPPT/IPPR yang melaksanakan konversi kewajiban RSM/S melalui pembangunan fasilitas publik (PSU) sesuai Pergub No. 112 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah melalui Pergub No. 78 Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut: | |
| | a. SIPPT/IPPT/IPPR yang telah menandatangani berita acara nilai konversi dan/atau melaksanakan pembangunan PSU belum sesuai nilai konversi | 63 |
| | b. SIPPT/IPPT/IPPR yang melaksanakan pembangunan PSU telah BAST sesuai nilai konversi | 17 |
| **Jumlah Mutasi Kurang** | | **286** |
| **Total Potensi Sementara Terkait SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban membiayai dan membangun RSM/S s.d 31 Desember 2024** | | **463** |

Rincian SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban RSM/S per Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang diuraikan sebagai berikut:

| Wilayah | Jenis Pengenaan Kewajiban RSM/S | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SK Gub 540 | SK Gub 640 | SK Gub 540 & SK Gub 640 | Kewajiban RSM/S | Luas Lahan Efektif ($M^2$) |
| Jakarta Pusat | 14 | 19 | 5 | 38 | 722,280 |
| Jakarta Utara | 20 | 54 | 13 | 87 | 4,076,768 |
| Jakarta Selatan | 59 | 75 | 16 | 150 | 3,710,815 |
| Jakarta Barat | 33 | 60 | 12 | 105 | 6,572,179 |
| Jakarta Timur | 18 | 58 | 5 | 81 | 4,696,321 |
| Kepulauan Seribu | 0 | 2 | 0 | 2 | 47,679 |
| **Total** | **144** | **268** | **51** | **463** | **19,826,042** |

Nilai potensi tersebut masih terus dilakukan pembaruan, dengan kriteria antara lain:

1. SIPPT/IPPT/IPPR yang telah menyelesaikan kewajiban melalui mekanisme pembangunan rumah susun,
2. SIPPT/IPPT/IPPR yang telah menyelesaikan kewajiban melalui mekanisme konversi berupa pembangunan fasilitas publik,
3. SIPPT/IPPT/IPPR yang memperoleh pengecualian dari kewajiban RSM/S, dan/atau
4. Dimungkinkan ditemukannya data SIPPT/IPPT/IPPR lainnya yang akan diperhitungkan dalam pelaksanaan rekonsiliasi kewajiban RSM/S berikutnya.

## 6.6 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Sedangkan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP merupakan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada Tahun 2024 dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

**a. Dasar Hukum Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi**

Dasar hukum pelaksanaan Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

**b. Tugas Pembantuan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 21 ayat (2) bahwa penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada APBN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk Tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta menerima tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Untuk Tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta menerima tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Pagu anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp4.901.522.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.170.265.379,00 atau 85,08%. Adapun instansi penerima TP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.3

Daftar Tugas Pembantuan Tahun 2024

| No. | OPD | K/L | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. | Kementerian Kelautan dan Perikanan RI | 1.441.252.000 | 1.089.591.298 | 75,60 |
| | | 2. | Kementerian Pertanian RI | 592.213.000 | 379.426.784 | 64,07 |
| 2. | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 3. | Kementerian Pariwisata dan | 1.520.000.000 | 1.439.936.897 | 94,73 |

| No. | OPD | K/L | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ekonomi Kreatif RI | | | |
| 3. | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 4. | Kementerian Perindustrian RI | 1.079.081.000 | 1.054.933.000 | 97,76 |
| | | 5. | Kementerian Perdagangan | 268.976.000 | 206.377.400 | 76,73 |
| **Jumlah** | | | | **4.901.522.000** | **4.170.265.379** | **85,08** |

**c. Dekonsentrasi**

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dibebankan pada APBN melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk Tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta menerima dana dekonsentrasi dengan pagu anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp18.593.238.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp16.937.810.557,00 atau 91,10%. Adapun instansi penerima dana dekonsentrasi secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.4

Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta

Per 31 Desember 2024

| No. | OPD | K/L | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biro Pemerintahan | 1. | Kementerian Dalam Negeri RI | 226.279.000 | 224.601.519 | 99,26 |
| 2. | Dinas Kesehatan | 2. | Kementerian Kesehatan RI | 6.150.107.000 | 5.832.269.456 | 94,83 |
| 3 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 3. | Kementerian Pertanian RI | 826.342.000 | 783.270.349 | 94,79 |
| | | 4. | Badan Pangan Nasional RI | 2.440.325.000 | 2.396.879.504 | 98,22 |
| 4. | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 5. | Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI | 1.670.298.000 | 1.094.147.100 | 65,51 |
| | | 6. | Kementerian Perdagangan RI | 129.560.000 | 124.956.660 | 96,45 |
| 5. | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi | 7. | Kementerian Ketenagakerjaan RI | 5.066.114.000 | 4.485.487.568 | 88,54 |
| 6. | Dinas Pemuda dan Olahraga | 8. | Kemenpora RI | 1.376.550.000 | 1.375.642.600 | 99,93 |
| 7. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 9. | Badan Koordinasi Penanaman Modal RI | 499.137.000 | 473.515.000 | 94,87 |
| 8. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 10. | Perpusnas RI | 208.526.000 | 147.040.801 | 70,51 |
| **Jumlah** | | | | **18.593.238.000** | **16.937.810.557** | **91,10** |

## 6.7 Penugasan kepada BUMD

Penugasan kepada BUMD merujuk pada Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur yang di antaranya adalah penugasan Pemerintah Daerah. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan Pemerintah kepada BUMD tertuang dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menjelaskan bahwa penugasan kepada BUMD dilakukan untuk mendukung perekonomian daerah dan

menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD. Pelaksanaan penugasan pada BUMD dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lingkup usaha/kegiatan BUMD dengan aspek pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penugasan kepada BUMD yang masih berlangsung sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.5

Penugasan kepada BUMD yang Masih Berlangsung Sampai Dengan Tahun 2024

| No | BUMD | Dasar Aturan | Penugasan | Bentuk Dukungan Pendanaan dari Pemerintah Provinsi DKI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | PT Food Station Tjipinang Jaya dan Dharma Jaya | Pergub Nomor 208 Tahun 2016 | Penyediaan dan pendistribusian pangan murah bagi masyarakat tertentu. | Subsidi |
| 2 | PT Food Station Tjipinang Jaya | Pergub Nomor 140 Tahun 2016 | Penyediaan Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Tidak ada |
| 3 | PD AM Jaya | Pergub Nomor 62 Tahun 2019 | Penugasan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum dengan teknologi *Sea Water Reverse* Osmosis di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. | - Pengurangan biaya sewa pemanfaatan aset IPA SWRO<br>- Pemberian subsidi air minum IPA SWRO |
| 4 | PT Transportasi Jakarta | Pergub Nomor 160 Tahun 2016 | Pelayanan Transjakarta gratis dan bus gratis bagi masyarakat. | Subsidi |
| | | Pergub Nomor 62 Tahun 2016 | Kewajiban pelayanan publik dan pemberian subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta. | Subsidi |
| | | Pergub Nomor 52 Tahun 2022 (Perubahan Atas Pergub 20 tahun 2019) | Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk melaksanakan Pembangunan, revitalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan halte dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka integrasi transportasi umum | Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk 4 Halte Revitalisasi:<br>1. Pulogadung<br>2. Kalideres<br>3. Kampung Melayu<br>4. Ragunan |
| | | Kepgub Nomor 1326 Tahun 2021 | Penetapan Penambahan Halte terkait Penugasan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Halte dalam Rangka Integrasi Transportasi Umum | |
| | | Kepgub Nomor 1049 Tahun 2020.Kepgub Nomor 2348 Tahun 2015 | Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Mengintegrasikan Sistem Angkutan Umum Pengumpan Dengan Mobil Bus Sedang Ke Dalam Sistem Bus Rapid Transit | |
| 5 | PT MRT Jakarta | Pergub Nomor 136 Tahun 2019 | Penugasan PT MRT Jakarta untuk melaksanakan kerja sama dengan Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PERSERO) dalam pengintegrasian perkeretaapian umum. | Direncanakan PMD |
| | | Pergub Nomor 53 Tahun 2017 | Penugasan kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan sarana dan prasarana Mass Rapid Transit. | 1. PMD (APBD+LOAN)<br>2. Subsidi |
| | | Pergub Nomor 140 Tahun 2017 | Penugasan PT MRT Jakarta sebagai operator utama pengelola kawasan transit oriented development koridor (utara-selatan) fase I Mass Rapit Transit Jakarta. | Tidak ada |
| | | Pergub Nomor 15 Tahun 2020 jo. Pergub 65 Tahun 2021 | Penugasan PT MRT Jakarta sebagai operator utama pengelola kawasan *transit oriented development* koridor (utara-selatan) fase I *Mass Rapit Transit* Jakarta. | Pendanaan infrastruktur dapat |

| No | BUMD | Dasar Aturan | Penugasan | Bentuk Dukungan Pendanaan dari Pemerintah Provinsi DKI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| | | | | menggunakan APBD |
| 6 | Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Perumda Pasar Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Bank DKI dan PT Jamkrida Jakarta | Pergub Nomor 51 Tahun 2019 | Penugasan kepada BUMD terkait untuk penyediaan dan pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. | PMD |
| 7 | Perumda Pembangunan Sarana Jaya | Pergub Nomor 134 Tahun 2019 | Penugasan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam pengelolaan alat produksi PT Jakarta Tourisindo. | PMD |
| | | Pergub Nomor 71 Tahun 2020 | Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam penyelenggaraan fasilitas pengelolaan sampah antara di dalam kota. | Tidak ada |
| | | Pergub Nomor 70 Tahun 2020 | Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu. | Tidak ada |
| | | Pergub Nomor 41 Tahun 2014 | Pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang di Kelurahan Kampung Bali dan kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat. | PMD |
| 8 | PT Jakarta Propertindo (Perseroda) | Pergub Nomor 14 Tahun 2019 | Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam pengembangan kawasan olahraga terpadu. | PMD |
| | | Pergub Nomor 118 Tahun 2019 | Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan infrastruktur. | Tidak ada |
| | | Pergub Nomor 63 Tahun 2019 | Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki. | PMD |
| | | Pergub Nomor 33 Tahun 2018 | Penugasan lanjutan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan fasilitas pengolahan sampah di dalam kota/ *intermediate treatment facility*. | Direncanakan PMD |
| | | Pergub Nomor 65 Tahun 2019 | Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan fasilitas pengolahan sampah antara di dalam kota. | Tidak ada |
| | | Pergub Nomor 94 Tahun 2019 | Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam pengelolaan Jakarta International Velodrome. | PMD |
| | | Pergub Nomor Nomor 110 Tahun 2019 | Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu | Tidak ada |
| | | Pergub Nomor 154 Tahun 2017 | Penugasan kepada perseroan terbatas Jakarta Propertindo untuk penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta api ringan/LRT | 1. PMD<br>2. Subsidi |
| | | Pergub Nomor 83 Tahun 2019<br>Pergub Nomor 30 Tahun 2022 | Penugasan kepada perseroan terbatas Jakarta Propertindo (perseroan daerah) dalam penyelenggaraan kegiatan formula e | - |
| 9 | PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) | Pergub Nomor 38 Tahun 2022 | Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) untuk Penyelenggaraan Aktivasi Ruang Publik, Sarana dan Prasarana Pariwisata, dan Produk Kreatif | PMD |

Berdasarkan tabel di atas salah satu penugasan kepada PT Jakarta Propertindo adalah penyelenggaraan kegiatan Formula E dengan penjelasan sebagai berikut:

**Penyelenggaraan Kegiatan Balap Mobil Formula E**

Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 adalah "Jakarta Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global". Selain itu, dalam visi jangka menengah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2017-2022 dinyatakan "Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam RPJMD 2017-2022 antara lain:

a. Misi kelima "Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebinekaan";
b. Tujuan ketiga "Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian Kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia";
c. Sasaran Pertama "Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional"; dan
d. Strategi pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan *E-Tourism*.

Dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, secara resmi pada Tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan kota-kota lainnya di dunia, untuk menjadi bagian dari kota penyelenggara Kegiatan balap mobil Formula E pada tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024. Kejuaraan balap mobil Formula E adalah kejuaraan balap mobil internasional dengan teknologi ramah lingkungan yang sedang tumbuh menjadi salah satu ajang kejuaraan global yang diselenggarakan oleh kota-kota global di dunia.

Untuk memberikan informasi atas manfaat dan dampak ekonomi dari penyelenggaraan balap mobil tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan *SMG Insight* telah membuat studi kelayakan atas dampak ekonomi penyelenggaraan Formula E di Jakarta yang hasilnya menyatakan bahwa dampak Ekonomi bagi Jakarta atas Penyelenggaraan Formula E diperkirakan sebesar £78,3 juta atau Rp1,2 Triliun per tahun.

Sedangkan potensi jangkauan global pelaksanaan Jakarta *E-Prix* sebagai berikut:

a. 38.500 potensi jumlah penonton umum (*general admission*) lokal dan internasional;
b. 3.500 potensi jumlah penonton khusus (*hospitality attendees*) lokal dan internasional; dan
c. 197 jumlah negara yang menyiarkan Formula E secara langsung.

Di samping itu, penyelenggaraan Formula E memberikan dampak yang lebih luas dalam kebijakan dan inisiatif baik Pemerintah Daerah maupun pusat, antara lain:

a. Menggerakkan sektor riil;
b. Kampanye ramah lingkungan;
c. Kampanye perubahan iklim;
d. Menggiatkan olahraga dengan Jakarta sebagai kota global kejuaraan motor sport dunia;
e. Promosi wisata internasional;
f. Rekognisi global melalui media eksposur;
g. Kampanye kendaraan listrik dan ekosistemnya; dan
h. Menguatkan daya tarik Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan olahraga berskala global.

Secara ringkas, hasil studi kelayakan penyelenggaraan Formula E adalah sebagai berikut:

a. Formula E merupakan salah satu kejuaraan internasional balap dengan teknologi ramah lingkungan yang sedang tumbuh menjadi salah satu ajang kejuaraan global yang diselenggarakan oleh kota-kota global seperti New York, London, Paris dan Berlin.
b. Indonesia, khususnya Jakarta, melalui kejuaraan Jakarta *E-Prix* Formula E memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan visibilitas positifnya di mata dunia, mendorong dampak ekonomi lokal dan kawasan, dan menjadi pionir kota global ramah lingkungan.
c. Jakarta *E-Prix* akan memberikan dorongan kuat bagi ekonomi lokal, hal ini diproyeksikan untuk memberikan total £78,3 juta atau sekitar Rp1,2 Triliun per tahun untuk kota tuan rumah melalui pengeluaran yang berdampak, baik langsung dan tidak langsung ke sektor-sektor lain juga.
d. Perhitungan perkiraan keuntungan atas terselenggaranya Formula E di Jakarta tidak semata-mata hanya memperhitungkan untung dan rugi dari sisi finansial, namun juga mengedepankan dampak kontribusi peningkatan ekonomi dan citra Kota Jakarta secara keseluruhan.

Sebagai kebijakan pembiayaan penganggaran atas penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan:

a. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2019 kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tentang Dukungan dalam Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Formula E.

   Hal ini selaras dengan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah kewenangan Bidang Keolahragaan, yang meliputi:

   1) Penetapan, dalam bentuk penyelenggaraan keolahragaan;
   2) Pelaksanaan, aktivitas keolahragaan skala daerah, nasional, dan internasional;
   3) Koordinasi bidang olahraga, dalam bentuk koordinasi antar dinas/ instansi terkait;
   4) Pembinaan dan pengawasan, dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.

   Selain itu kegiatan Formula E merupakan salah satu bentuk kegiatan Internasional yang merupakan implementasi bahwa Jakarta sebagai wilayah strategis memiliki potensi pengembangan untuk menjadi wilayah yang bertaraf internasional.

b. Surat Kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk menandatangani *Parent Company Guarantee* (Jaminan Perusahaan Induk) kegiatan Formula E. *Parent Company Guarantee* tersebut merupakan bentuk perjanjian jaminan Pemerintah DKI Jakarta kepada pihak FEO yang menjamin kewajiban-kewajiban PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak FEO.
c. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT Jakpro dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E di Provinsi DKI Jakarta. Rencana pelaksanaan Formula E yang dilakukan oleh PT Jakpro berdasarkan lisensi dari pihak FEO Ltd. selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E. Penunjukan PT Jakpro sebagai penyelenggara didasarkan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri yang memberikan pertimbangan bahwa kontrak perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Formula E dengan pihak FEO Ltd. bersifat komersial (*business to business*). Atas penugasan tersebut, PT Jakpro telah melakukan perjanjian kerjasama yang mengikat (*Binding Agreement*) dengan pihak FEO Ltd.

Proses penganggaran penyelenggaraan Formula E telah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Pembahasan anggaran *commitment fee* dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Komisi E di mana Komisi E menyetujui penganggaran *commitment fee* dibayarkan dalam DPA Dinas Pemuda dan Olahraga;
b. Pembahasan kegiatan Formula E dilakukan antara TAPD dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD baik di Komisi E maupun Rapat Banggar;
c. Pembahasan APBD disahkan dalam sidang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dan ditetapkan dalam Persetujuan Bersama antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang di dalamnya termasuk alokasi anggaran *commitment fee* penyelenggaraan Formula E di DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
d. Dokumen Rancangan Perda APBD disampaikan dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD.

Dalam hal persiapan kegiatan penyelenggaraan Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait sebagai berikut:
a. Berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI terkait fasilitasi dan rekomendasi penyelenggaraan Formula E tahun 2020 dan Kemenpora telah memberikan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan Formula E dengan pokok-pokok dukungan sebagai berikut:
    1) Mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Formula E.
    2) Segala hal yang berkaitan dengan pendanaan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penggunaan APBD Provinsi DKI Jakarta.

b. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait:
   1) Permohonan rekomendasi dan fasilitasi kerja sama terkait penyelenggaraan Formula E Tahun 2020; dan
   2) Permintaan saran dan pendapat terkait penganggaran dan penyelenggaraan Formula E Tahun 2020.

   Kementerian Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi saran, pertimbangan dan dukungan atas rencana penyelenggaraan Formula E 2020 dengan pokok-pokok sebagai berikut:
   1) Pada prinsipnya Kementerian Dalam Negeri menyambut baik terhadap rencana penyelenggaraan kejuaraan Formula E di Jakarta, yang akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing dan akan memicu peningkatan pendapatan ekonomi di masyarakat;
   2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam pengalokasian dan penggunaan APBD untuk membiayai sebagian atau keseluruhan penyelenggaraan kejuaraan Formula E;
   3) Penyediaan alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan dimaksud harus cukup tersedia dalam APBD; dan
   4) Pendapatan atas hasil penyelenggaraan Formula E dimaksud, yang menjadi hak daerah harus dimasukkan dalam APBD.
c. Berkoordinasi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) DKI Jakarta terkait persiapan pelaksanaan Formula E.

Pelaksanaan kegiatan Formula E dalam kontrak awal direncanakan akan dilaksanakan dalam lima musim, mulai tahun 2020 s.d 2024. Dalam kontrak awal tersebut biaya penyelenggaraan Formula E yang akan dikeluarkan terdiri dari biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (v*ariable cost*). Total biaya tetap berupa *commitment fee* yang setiap tahun wajib dibayarkan selama lima musim penyelenggaraan adalah sebesar GBP122.102.000,00. Sedangkan asumsi biaya variabel berupa biaya pelaksanaan Formula E yang akan dikeluarkan oleh PT Jakpro adalah sebesar Rp1.239.000.000.000,00.

Penyelenggaraan Formula E pada tahun 2022 tertunda karena dampak dari pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan studi kelayakan kembali penyelenggaraan Formula E dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19. Hasil studi kelayakan tersebut menyatakan bahwa kelanjutan penyelenggaraan Formula E akan dilakukan dengan pembiayaan mandiri oleh PT Jakpro dengan skema *Business to Business*. Selain itu hasil studi kelayakan juga menunjukkan bahwa terdapat potensi manfaat finansial, manfaat ekonomi dan manfaat reputasional. Berdasarkan hasil studi kelayakan tersebut maka penyelenggaraan Formula E layak dilaksanakan.

Selain itu, PT Jakpro telah melakukan negosiasi dengan pihak FEO dengan hasil kesepakatan Formula E akan dilaksanakan selama 3 tahun mulai 2022 s.d. 2024 dan akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022. Total *commitment fee* untuk 3 (tahun) penyelenggaraan adalah sebesar

£36.000.000,00 dan sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar £31.000.000,00 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sisa kewajiban *commitment fee* sebesar £5.000.000,00 akan dibayarkan oleh PT Jakpro di tahun ke-3 dengan dana non APBD. Terkait dengan perlakuan akuntansi atas pembayaran *commitment fee* kegiatan Formula E tersebut telah dijelaskan lebih rinci pada CaLK 5.5.1.1.3.

<table>
<tr><th>Uraian</th><th>City Host Agreement (CHA) Sebelum Pandemi</th><th>City Host Agreement (CHA) Addendum No.3 (Renegosiasi) tanggal 27 September 2021</th></tr>
<tr><td>Periode pelaksanaan kegiatan</td><td>5 tahun (2020 – 2024)</td><td>3 tahun (2022 – 2024)</td></tr>
<tr><td>Bank Garansi<br>Commitment Fee</td><td>£22 juta<br>2020: £20,0 juta, sudah dibayar<br>2021: £22,0 juta, sudah dibayar £11,0 juta<br>2022: £24,2 juta<br>2023: £26,6 juta<br>2024: £29,3 juta</td><td>Tidak Ada<br>● Commitment Fee untuk 3 tahun £36 juta<br>● Nilai yang sudah dibayarkan sebesar £31 juta dialokasikan untuk 3 tahun, dengan alokasi sebagai berikut:<br><table><tr><th>No</th><th>Tahun</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>2020</td><td>Batal (Pandemi COVID)</td></tr><tr><td>2</td><td>2021</td><td>Batal (Pandemi COVID)</td></tr><tr><td>3</td><td>2022</td><td>Telah dibayar di muka £ 7 juta</td></tr><tr><td>4</td><td>2023</td><td>Telah dibayar di muka £ 14 juta</td></tr><tr><td>5</td><td>2024</td><td>Telah dibayar di muka £ 10 juta</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Telah dibayar di muka £ 31 juta</td></tr></table>● Kekurangan £5 juta (ditambah 10% revenue 2023) akan dibayarkan oleh Jakpro pada tahun ke-3 dengan dana non-APBD</td></tr>
</table>

Gelaran Formula E tahun pertama di Indonesia berhasil diselenggarakan pada bulan Juni 2022. Atas penyelenggaraan tersebut dilakukan analisis oleh tim independen dari INDEF untuk mengetahui dampak ekonomi secara makro dari penyelenggaraan Formula E baik di level Provinsi dan Nasional. Analisis juga dilakukan untuk mengetahui dampak sosial-ekonomi serta manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat DKI Jakarta secara langsung ataupun tidak langsung dari penyelenggaraan Formula E tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh tim INDEF, penyelenggaraan Jakarta *E-Prix* 2022 memberikan dampak yang cukup luas terhadap banyak aspek. Mulai dari aspek mikro yang meliputi keuntungan finansial dalam jangka panjang, keuntungan industri yang terkait termasuk UMKM, hingga aspek makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan banyak efek lainnya.

Sebagai komitmen penyelenggaraan Formula E yang tertuang dalam CHA antara Jakpro dan FEO, pada Tahun 2023 Jakpro kembali menyelenggarakan kegiatan Formula E yang berlangsung pada 3 dan 4 Juni 2023 yang diselenggarakan di AGI Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta. Kegiatan in disebut dengan 2023 Jakarta E-Prix.

Atas penyelenggaraan 2023 Jakarta E-Prix, dilakukan Analisa Dampak Ekonomi dan Analisa Dampak Sosial bagi Jakarta dan Indonesia, oleh konsultan dari Inggris, The Sports Consultancy (TSC). Menurut TSC penyelenggaraan 2023 Jakarta E-Prix memberikan dampak sebagai berikut:

a. Dampak Ekonomi

Menggunakan *Augmented Impact Methodology* dalam menghitung dampak ekonomi, total *Gross Event Impact* bagi Jakarta sebagai *Host* dari 2023 Jakarta E-Prix adalah sekitar USD100.5 million (Rp 1,5 triliun). Dengan perincian sebagai berikut.

| **Keterangan** | |
|---|---|
| Dampak ekonomi langsung | $ 50.900.000 |
| Dampak ekonomi tidak langsung | $ 35.000.000 |
| *Total dampak ekonomi* | $ 85.900.000 |
| Valuasi dampak sosial | $ 900.000 |
| Valuasi dampak media | $ 8.400.000 |
| Penerimaan Pajak | $ 5.300.000 |
| **Gross Total Dampak *Event*** | **$ 100.500.000** |

b. Dampak Sosial

Sebagai rangkaian dalam penyelenggaraan 2023 Jakarta E-Prix, FEO bersama-sama dengan Jakpro melaksanakan beberapa program tambahan dalam rangka mensosialisasikan *Sustainability* pada masyarakat Indonesia dengan beberapa program yang dilakukan di antaranya adalah *Beach Clean Up* dan *Volunteer.*

Selain dari *intangible value* yang didapatkan dari rangkaian acara penyelenggaraan Formula E, dampak sosial yang bisa dirasakan salah satunya adalah menumbuhkan inspirasi dalam mengubah kebiasaan untuk melestarikan lingkungan. Menurut TSC, *Total Gross Social Value* bagi Jakarta sebagai *Host* dari 2023 Jakarta E-Prix adalah sekitar USD743,700 (Rp11,5 milyar).

Dan selanjutnya untuk penyelenggaraan Formula E Tahun 2024 yang dijadwalkan pada bulan Juni 2024, ditunda ke Tahun 2025 sesuai dengan kesepakatan Jakpro dan FEO yang tertuang dalam Adendum CHA Nomor 4 tertanggal 30 November 2023. Hal ini mempertimbangkan kondisi politik atas penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2024. Terkait dengan kesepakatan tersebut, maka kewajiban pembayaran *commitment fee* £5 juta juga dilakukan penjadwalan ulang di Tahun 2025.

## 6.8 Penjabat Gubernur DKI Jakarta

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 125/P/2024 Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melaksanakan tugas untuk periode tahun 2022-2024. Mulai tanggal 17 Oktober 2024, jabatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta beralih ke Teguh Setyabudi yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 125/P/2024 dengan periode jabatan sampai dengan pelantikan gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Pada tanggal 20 Februari 2025 Pramono Anung dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta periode Tahun 2025 – 2030.

# BAB VII

## PENUTUP

# BAB VII
# PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 753 UKPD/SKPD yang memiliki fungsi sebagai entitas akuntansi dan 42 SKPD sebagai entitas akuntansi penggabung. Setiap entitas akuntansi diwajibkan menyusun Laporan Keuangan yang kemudian digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi 42 Laporan Keuangan SKPD Penggabung. Laporan Keuangan dari 42 SKPD Penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp72.952.092.296.153,00 atau 97,34% dari anggaran sebesar Rp74.946.825.859.889,00, sedangkan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp70.012.717.839.886,00 atau 92,09% dari anggaran sebesar Rp76.023.113.210.933,00. Dengan demikian terdapat Surplus antara Pendapatan dengan Belanja sebesar Rp2.939.374.456.267,00. Selain itu, realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp1.494.476.377.779,00, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.433.850.834.046,00;

2. Saldo Anggaran Lebih pada awal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.542.421.120.069,00. Nilai tersebut merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang diakui sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024. Pada akhir Tahun Anggaran 2024 terdapat SiLPA sebesar Rp4.433.850.834.046,00;

3. Berdasarkan Laporan Operasional Tahun 2024 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp100.121.357.370.829,00, Beban sebesar Rp69.491.484.612.994,00, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp23.759.653.274,00 sehingga Surplus-LO sebesar Rp30.653.632.411.109,00;

4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas Awal sebesar Rp698.072.284.621.375,00, Surplus-LO sebesar Rp30.653.632.411.109,00 dan koreksi Ekuitas sebesar (Rp775.697.786.886,00), sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp727.950.219.245.598,00;

5. Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp745.956.336.004.049,00, Kewajiban sebesar Rp18.006.116.758.451,00, dan Ekuitas sebesar Rp727.950.219.245.598,00; dan

6. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp12.425.769.717.693,00, Aktivitas Investasi sebesar (Rp13.584.216.072.218,00), Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp938.693.208.121,00), dan Aktivitas Transitoris sebesar (Rp26.268.609.832,00), sehingga terjadi penurunan bersih kas selama periode tahun 2024 sebesar Rp2.123.408.172.478,00. Total saldo awal Kas sebesar Rp6.562.186.965.985,00, sehingga saldo akhir Kas adalah sebesar Rp4.438.778.793.507,00.

Demikian Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2024 (*Audited*) yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

**Gubernur Daerah Khusus**
**Ibukota Jakarta,**

**Pramono Anung**